LAKIP/LKjIP 2025



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP/LKjIP)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2025

KATA PENGANTAR

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri menjalankan amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sejak 20 Februari 2025. Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB, tidak hanya diwujudkan melalui penetapan kebijakan sesuai visi dan misi, namun juga dengan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 di NTB didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, yang di dalamnya memuat penetapan sasaran strategis, indikator, dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Pertanggungjawaban atas kinerja sepanjang tahun 2025 dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP/LKjIP Provinsi NTB Tahun 2025 disusun berdasarkan data, informasi, dan bukti dukung yang terverifikasi secara berjenjang melalui koordinasi dan konsolidasi para pihak. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh atas kualitas pencapaian kinerja, efisiensi sumber daya, dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui penetapan perencanaan selanjutnya. Masa satu tahun kepemimpinan, tentunya tidak sedikit sasaran pembangunan yang sudah dicapai namun di sisi lain juga cukup banyak yang perlu dioptimalkan. Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri menyadari bahwa laporan pertanggungjawaban saja tidak cukup untuk menjawab keberhasilan pembangunan, namun yang paling penting adalah dampak nyata perbaikan taraf hidup masyarakat, akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang meningkat, rasa aman dan nyaman, serta lingkungan yang kondusif. Tentunya keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2025 ini tidak menjadikan Pemerintah Provinsi NTB berpuas diri, namun terus berikhtiar menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga LAKIP/LKjIP Provinsi NTB Tahun 2025 dapat bermanfaat untuk masyarakat luas serta menjadi bahan perbaikan kebijakan untuk Pemerintah Provinsi NTB di tahun berikutnya.

Mataram, 8 April 2026
Gubernur Nusa Tenggara Barat

Lalu Muhamad Iqbal

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
RINGKASAN EKSEKUTIF xvii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Maksud dan Tujuan I-1
1.3 Dasar Hukum I-1
1.4 Gambaran Umum I-4
1.5 Permasalahan Umum dan Isu Strategis I-12
1.6 Cascading Kinerja I-15
1.7 Proses Bisnis I-29
1.8 Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025 ..... I-30
BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1
2.1 Perencanaan Kinerja II-1
1. Tujuan II-1
2. Sasaran Strategis II-2
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III-1
3.1.1 RPD III-1
3.1.1.1 Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah III-1
3.1.1.2 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat III-47
3.1.1.3 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) III-78
3.1.1.4 Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana III-95
3.1.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara III-111
3.1.1.6 Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik) III-122
3.1.1.7 Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan III-153
3.1.1.8 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan public III-181
3.1.1.9 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah III-192
3.1.1.10 Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) III-200
3.1.1.11 Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi III-261
3.1.1.12 Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional III-309
3.1.1.13 Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan

kinerja industri dan pengembangan ekspor III-320
3.1.2 RPJMD III-330
3.1.2.1 Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB III-330
3.1.2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat III-356
3.1.2.3 Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender III-369
3.1.2.4 Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan III-382
3.1.2.5 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran III-397
3.1.2.6 Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan III-410
3.1.2.7 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat III-416
3.1.2.8 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan III-423
3.1.2.9 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan III-431
3.1.2.10 Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi III-439
3.1.2.11 Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim III-443
3.1.2.12 Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) III-448
3.1.2.13 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif III-457
3.1.2.14 Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya III-469
3.1.2.15 Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga III-475
3.1.2.16 Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana III-491
3.1.2.17 Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas III-495
3.1.2.18 Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem III-503
3.1.2.19 Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan III-515
3.1.2.20 Meningkatnya Realisasi Investasi III-523
3.1.2.21 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi III-531
3.1.2.22 Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang III-554
3.1.2.23 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah III-558
3.1.2.24 Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas III-638
3.1.2.25 Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah III-650
BAB IV PENUTUP IV-1
4.1 Kesimpulan IV-1
4.2 Langkah-Langkah Meningkatkan Kinerja untuk Mencapai Target Sasaran Strategis IV-6

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Rekapitulasi Pencapaian Kinerja atas Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Didasarkan Dokumen Perencanaan 2024-2026 xx
Tabel A.2 Rekapitulasi Pencapaian Kinerja atas Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Didasarkan Dokumen Perencanaan 2025-2029 xxviii
Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2025.....I-6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2022-2024 Menuruh Kelompok Umur I-8
Tabel 1.3 IPM Provinsi NTB Tahun 2022-2024.....I-9
Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2022-2024.....I-10
Tabel 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2022-2024.....I-10
Tabel 1.6 Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2022-2024.....I-10
Tabel 1.7 Permasalahan Umum dan Isu Strategis.....I-12
Tabel 1.8 Matrik Rencana Aksi Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2026.....I-30
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 Berdasarkan RPD 2024-2026 .....II-2
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029.....II-4
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPD 2024-2026 .....II-8
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 .....II-10
Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah.....III-2
Tabel 3.1a Perbandingan Nilai PDRB ADHK Tahun 2024 dan Triwulan III 2025...III-4
Tabel 3.2 Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang III-7
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang III-8
Tabel 3.4 Distribusi Lapangan Usaha dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang Provinsi NTB (%).....III-11
Tabel 3.5 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Konektivitas..III-14
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang III-21
Tabel 3.7 Jumlah Pencari Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 .....III-36
Tabel 3.8 Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Dilaksanakan BPVP Lotim Tahun 2025.....III-37
Tabel 3.9 Pemagangan dalam Luar Negeri Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 2025 ..III-38
Tabel 3.10 Rekapitulasi Data Penempatan Tenaga Kerja AKAD, AKL, AKAN Tahun 2025 .....III-39
Tabel 3.11 Rekapitulasi Data Penempatan Keluar Negeri Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2025.....III-39
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator TPT III-44
Tabel 3.13 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-46
Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan Serta Derajat Kesehatan Masyarakat.....III-47
Tabel 3.15 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2025.....III-49
Tabel 3.16 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator RLS III-53
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator RLS.....III-53

Tabel 3.18 HLS Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2024 ..... III-55
Tabel 3.19 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator HLS III-58
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator HLS III-59
Tabel 3.21 Perbandingan UH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2024 ..... III-60
Tabel 3.22 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator UHH III-64
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator UHH III-64
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator AKI III-70
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator AKB III-75
Tabel 3.26 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) III-78
Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPLM III-83
Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Presentase Kota Kreatif III-85
Tabel 3.29 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi III-87
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPK III-89
Tabel 3.31 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Persentase Penanganan Konflik SARA III-94
Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Penanganan Konflik SARA III-94
Tabel 3.33 Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Risiko Bencana III-95
Tabel 3.34 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Penurunan Emisi GRK III-100
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Penurunan Emisi GRK III-101
Tabel 3.36 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Risiko Bencana III-106
Tabel 3.37 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Risiko Bencana III-106
Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Bauran EBT III-108
Tabel 3.39 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Bauran EBT III-110
Tabel 3.40 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara III-111
Tabel 3.41 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKTL III-114
Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKTL III-115
Tabel 3.43 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKA III-117
Tabel 3.44 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKA III-118
Tabel 3.45 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKU III-121
Tabel 3.46 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKU III-121
Tabel 3.47 Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik) Tahun 2025 ..... III-122
Tabel 3.48 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Pembangunan Ketena III-127
Tabel 3.49 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Nilai IPK III-127
Tabel 3.50 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) III-133
Tabel 3.51 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Nilai IKP III-135
Tabel 3.52 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) III-140

Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKS III-143
Tabel 3.54 Rekap Jumlah Pengurus Parpol di Provinsi NTB Tahun 2025 ..... III-148
Tabel 3.55 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Demokrasi..... III-151
Tabel 3.56 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Demokrasi..... III-152
Tabel 3.57 Realisasi Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial, Pengembangan Mata Pencaharian, Pemberdayaan Sosial dan Inklusi Keuangan Provinsi NTB Tahun 2025 ..... III-153
Tabel 3.58 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Tingkat Inflasi III-156
Tabel 3.59 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Tingkat Inflasi..... III-157
Tabel 3.60 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator UHC III-161
Tabel 3.61 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator UHC III-162
Tabel 3.62 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan III-164
Tabel 3.63 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan..... III-165
Tabel 3.64 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Peningkatan Pendapatan per Kapita..... III-169
Tabel 3.65 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Peningkatan Pendapatan per Kapita..... III-172
Tabel 3.66 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Literasi Keuangan III-179
Tabel 3.67 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Literasi Keuangan III-180
Tabel 3.68 Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik..... III-181
Tabel 3.69 Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan II) per Komponen..... III-182
Tabel 3.70 Catatan dan Rekomendasi LHE SAKIP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025..... III-183
Tabel 3.71 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas LHE SAKIP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025..... III-184
Tabel 3.72 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Nilai SAKIP..... III-187
Tabel 3.73 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Nilai SAKIP III-189
Tabel 3.74 Realisasi Kinerja Meningkatnya Kemandirian Fiskal Provinsi NTB sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 ..... III-192
Tabel 3.75 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Kapasitas Fiskal... III-195
Tabel 3.76 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Kapasitas FIskal..... III-197
Tabel 3.77 Realisasi Kinerja Meningkatnya Integrasi Program Pembangunan Daerah dan Peran Pemerintah Provinsi NTB dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2025 ..... III-201
Tabel 3.78 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial..... III-214
Tabel 3.79 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial..... III-214
Tabel 3.80 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi..... III-231
Tabel 3.81 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase

Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi III-231
Tabel 3.82 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan III-249
Tabel 3.83 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola III-254
Tabel 3.84 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola III-256
Tabel 3.85 Variabel Unsur Kepuasan Layanan Infrastruktur III-261
Tabel 3.86 Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Transmigrasi dan Perdesaan, Mendorong Investasi dan Percepatan Industrialisasi Tahun 2025 .... III-264
Tabel 3.87 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Wilayah Provinsi NTB III-265
Tabel 3.88 Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) dan Jalan Strategis Provinsi (JSP) di Wilayah Provinsi NTB III-267
Tabel 3.89 Jaringan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3) dan/atau Jalan Strategis Provinsi (JSP) di Wilayah Provinsi NTB III-268
Tabel 3.90 Jembatan pada Ruas Jalan Kewenangan Provinsi di Wilayah Provinsi NTB III-271
Tabel 3.91 Infrastruktur SPAM di Provinsi NTB III-288
Tabel 3.92 Rencana Sistem Jaringan Persampahan di Wilayah Provinsi NTB ... III-294
Tabel 3.93 Luas Kawasan Kumuh dan Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2020-2025 ..... III-296
Tabel 3.94 Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB di Pulau Lombok III-297
Tabel 3.95 Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB di Pulau Sumbawa III-298
Tabel 3.96 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2025 ..... III-299
Tabel 3.97 Rencana Tipe B di Wilayah Provinsi NTB III-299
Tabel 3.98 Rencana Pelabuhan Pengumpul di Wilayah Provinsi NTB III-300
Tabel 3.99 Rencana Pelabuhan Pengumpan di Wilayah Provinsi NTB III-301
Tabel 3.100 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja IKLI III-304
Tabel 3.101 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKLI III-306
Tabel 3.102 Realisasi Kinerja Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional Tahun 2025 ..... III-309
Tabel 3.103 Konektivitas Darat III-311
Tabel 3.104 Konektivitas Laut III-315
Tabel 3.105 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Konektivitas III-318
Tabel 3.106 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Konektivitas III-319
Tabel 3.107 Realisasi Kinerja Meningkatnya Kapabilitas Inovasi Mendukung Peningkatan Kinerja Industri dan Pengembangan Ekspor Tahun 2025 ..... III-321
Tabel 3.108 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah III-326
Tabel 3.109 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Inovasi Daerah III-326
Tabel 3.110 Realisasi Kinerja Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB III-330
Tabel 3.111 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator RLS Penduduk

Usia di Atas 15 Tahun III-335
Tabel 3.112 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator RLS III-337
Tabel 3.113 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... III-339
Tabel 3.114 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Harapan Lama Sekolah ... III-342
Tabel 3.115 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator HLS III-343
Tabel 3.116 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... III-344
Tabel 3.117 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi III-346
Tabel 3.118 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi III-348
Tabel 3.119 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional III-351
Tabel 3.120 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional III-354
Tabel 3.121 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat III-356
Tabel 3.122 UHH Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... III-357
Tabel 3.123 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator UHH III-359
Tabel 3.124 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator UHH III-360
Tabel 3.125 Cakupan Balita Stunting Hasil SKI/SSGI per Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2019-2024 ..... III-364
Tabel 3.126 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Prevalensi Stunting III-366
Tabel 3.127 Realisasi Kinerja Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga serta Kesetaraan Gender III-369
Tabel 3.128 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Ketimpangan Gender III-374
Tabel 3.129 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Ketimpangan Gender III-375
Tabel 3.130 Capaian iBangga setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTB III-378
Tabel 3.131 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator iBangga III-380
Tabel 3.132 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator iBangga III-381
Tabel 3.133 Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan III-382
Tabel 3.134 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah III-386
Tabel 3.135 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah III-386
Tabel 3.136 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB III-391
Tabel 3.137 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB III-391
Tabel 3.138 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB III-395

Tabel 3.139 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB III-396
Tabel 3.140 Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2025 ..... III-397
Tabel 3.141 Penghitungan Efisien Anggaran Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja III-401
Tabel 3.142 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja..... III-402
Tabel 3.143 Penghitungan Efisien Anggaran TPT III-406
Tabel 3.144 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator TPT III-407
Tabel 3.145 Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan Provinsi NTB Tahun 2025 ..... III-411
Tabel 3.146 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Inklusi Keuangan..... III-414
Tabel 3.147 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Inklusi Keuangan..... III-415
Tabel 3.148 Realisasi Kinerja Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2025..... III-416
Tabel 3.149 Penghitungan Efisien Anggaran Indeks Kesejahteraan Sosial..... III-419
Tabel 3.150 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial III-423
Tabel 3.151 Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan yang Berkelanjutan Tahun 2025 ..... III-429
Tabel 3.152 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKP III-429
Tabel 3.153 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKP III-429
Tabel 3.154 Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Pedesaan III-432
Tabel 3.155 Capaian Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, 2025 ..... III-433
Tabel 3.156 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Desa III-436
Tabel 3.157 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Desa..... III-437
Tabel 3.158 Realisasi Menurunnya Disparitas Harga Antar Wilayah Dalam Provinsi..... III-439
Tabel 3.159 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi..... III-442
Tabel 3.160 Realisasi Sasaran Kinerja Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim Provinsi NTB Tahun 2025 ..... III-443
Tabel 3.161 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKD III-446
Tabel 3.162 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim..... III-446
Tabel 3.163 Realisasi Kinerja MeningkatnyaProduktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) Tahun 2025..... III-448
Tabel 3.164 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan III-453
Tabel 3.165 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan..... III-453
Tabel 3.166 Realisasi Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif III-457
Tabel 3.167 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Jumlah Tamu

Wisatawan Mancanegara III-460
Tabel 3.168 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara III-461
Tabel 3.169 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum III-465
Tabel 3.170 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif III-467
Tabel 3.171 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif III-468
Tabel 3.172 Realisasi Kinerja Meningkatnya Budaya Literasi, Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Ekonomi Budaya Tahun 2025 ..... III-469
Tabel 3.173 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Sasaran Meningkatnya Budaya Literasi, Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Ekonomi Budaya III-473
Tabel 3.174 Realisasi Kinerja Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga Tahun 2025 ..... III-475
Tabel 3.175 Penghitungan Efisien Anggaran TPAK Pemuda III-480
Tabel 3.176 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator TPAK Pemuda III-481
Tabel 3.177 Penghitungan Efisien Anggaran Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional III-484
Tabel 3.178 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional III-485
Tabel 3.179 Penghitungan Efisien Anggaran Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang Mendapat insentif dan/atau Beasiswa III-489
Tabel 3.180 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Pemuda dan Atlet Berprestasi yang Mendapat Insentif dan/atau Beasiswa III-490
Tabel 3.181 Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2025 ..... III-491
Tabel 3.182 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKD III-494
Tabel 3.183 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKD III-494
Tabel 3.184 Realisasi Kinerja Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2025 ..... III-495
Tabel 3.185 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKLH III-498
Tabel 3.186 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKLH III-500
Tabel 3.187 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Tahun 2025 ..... III-503
Tabel 3.188 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan III-508
Tabel 3.189 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan III-508
Tabel 3.190 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik III-513
Tabel 3.191 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik III-514
Tabel 3.192 Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan Konsumsi Listrik

yang Merata serta Berkelanjutan III-515
Tabel 3.192a Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Intensitas Energi Primer .. III-518
Tabel 3.193 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Intensitas Energi Primer III-519
Tabel 3.193a Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Konsumsi Listrik per Kapita III-521
Tabel 3.194 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Konsumsi Listrik per Kapita III-522
Tabel 3.195 Realisasi Meningkatnya Realisasi Investasi Provinsi NTB Tahun 2025 ..... III-523
Tabel 3.196 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 ..... III-525
Tabel 3.197 Rekapitulasi Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2025 ..... III-526
Tabel 3.198 Permasalahan dan Upaya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi III-528
Tabel 3.199 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Realisasi Investasi III-530
Tabel 3.200 Realisasi Kinerja Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi Tahun 2025 ..... III-531
Tabel 3.201 Capaian kinerja indeks kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) per sektor III-533
Tabel 3.202 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) III-536
Tabel 3.203 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKLI III-539
Tabel 3.204 Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan NTB Tahun 2022-2025 ..... III-543
Tabel 3.205 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021-2025 ..... III-544
Tabel 3.206 Capaian Program Nasional Tiga Juta Rumah di Provinsi NTB III-544
Tabel 3.207 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan III-547
Tabel 3.208 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan III-548
Tabel 3.209 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Konektivitas III-551
Tabel 3.210 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Konektivitas III-552
Tabel 3.211 Realisasi Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang III-554
Tabel 3.212 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang nyelenggaraan Penataan Ruang III-557
Tabel 3.213 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang III-557
Tabel 3.214 Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 ..... III-558
Tabel 3.215 Rincian Nilai Sub Komponen RB General Provinsi NTB Tahun 2024 dan 2025 ..... III-559

Tabel 3.216 Catatan dan Rekomendasi LHE RB Komponen RB General Tahun 2025 ..... III-562
Tabel 3.217 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE RB Komponen RB General Tahun 2025 ..... III-580
Tabel 3.218 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja RB General III-606
Tabel 3.219 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Reformasi Birokrasi General..... III-609
Tabel 3.220 Rincian Nilai Sub Komponen RB Tematik Provinsi NTB Tahun 2024 dan 2025 ..... III-615
Tabel 3.221 Penghitungan Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja RB Tematik..... III-619
Tabel 3.222 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Reformasi Birokrasi Tematik III-621
Tabel 3.223 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Kapasitas Fiskal Daerah III-628
Tabel 3.224 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah III-629
Tabel 3.225 Kriteria dan Indikator Penilaian IPPN Provinsi Tahun 2025 ..... III-631
Tabel 3.226 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi..... III-636
Tabel 3.227 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPPN III-637
Tabel 3.228 Realisasi Kinerja Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas III-638
Tabel 3.229 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IDI III-642
Tabel 3.230 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Demokrasi Indonesia..... III-645
Tabel 3.231 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah..... III-647
Tabel 3.232 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPKKU III-649
Tabel 3.233 Realisasi Kinerja Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah..... III-650
Tabel 3.234. Kajian/Inovasi Dalam Mendukung Program Unggulan Provinsi NTB Tahun 2025 ..... III-651
Tabel 3.235 Permasalahan dan Upaya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti III-653
Tabel 3.236 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti..... III-654
Tabel 3.237 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti..... III-655
Tabel 3.238 Data Inovasi Daerah Provinsi NTB IGA Tahun 2025 ..... III-656
Tabel 3.239 Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Inovasi yang di Terapkan Dalam Pembangunan Daerah III-668
Tabel 3.240 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Inovasi yang di Terapkan Dalam Pembangunan Daerah III-669

DAFTAR GRAFIK

Grafik A.1 Pencapaian Kinerja tahun 2025 atas Dokumen Perencanaan 2024-2026 xvii
Grafik A.2 Pencapaian Kinerja tahun 2025 atas Dokumen Perencanaan 2025-2029 xviii
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Menurut Jenis Kelamin 2022-2024 ..... I-6
Grafik 1.2 Piramida Penduduk NTB Tahun 2024 ..... I-8
Grafik 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) III-3
Grafik 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) III-7
Grafik 3.3 Pertumbuhan PDRB (%) Beberapa Komponen Lapangan Usaha (c-to-c) III-8
Grafik 3.4 TPT Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) (Agustus) III-33
Grafik 3.5 TPT Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) (Agustus) Menurut Jenis Kelamin III-33
Grafik 3.6 TPT Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) (Agustus) Menurut Wilayah Perkotaan dan Perdesaan III-34
Grafik 3.7 Realisasi RLS Provinsi NTB Tahun 2021-2024 ..... III-48
Grafik 3.8 Perbandingan RLS Provinsi NTB dengan Nasional Tahun 2021-2025 ..... III-50
Grafik 3.9 Perbandingan HLS Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2024 ..... III-56
Grafik 3.10 Perbandingan UHH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2024 ..... III-61
Grafik 3.11 Distribusi Jumlah dan Rasio Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2024 ..... III-66
Grafik 3.12 Perbandingan Capaian IPLM 2023-2024 ..... III-81
Grafik 3.13 Capaian IPK Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ..... III-86
Grafik 3.14 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2023-Agustus 2025 ..... III-124
Grafik 3.15 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2023, 2024 dan 2025 (Triwulan II) per Komponen III-182
Grafik 3.16 Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB Tahun 2022-2025 ..... III-222
Grafik 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya III-252
Grafik 3.18 Grafik Perkembangan Realisasi Rasio Konektivitas Provinsi NTB Tahun 2021-2025 (TW. III 2025) III-310
Grafik 3.19 Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi NTB III-333
Grafik 3.20 Perbandingan RLS Provinsi NTB dengan Nasional Tahun 2021-2025 ..... III-333
Grafik 3.21 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (RLS) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... III-340
Grafik 3.22 Grafik Perbandingan UHH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... III-358
Grafik 3.23 Grafik Prevalensi Stunting dan Target Tahun 2019-2024 ..... III-363
Grafik 3.24 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB, 2019-2024 ..... III-371
Grafik 3.25 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota Provinsi NTB, 2023-2024 ..... III-371
Grafik 3.26 Capaian Indeks Ketimpangan Gender menurut

Provinsi Tahun 2024 ..... III-372
Grafik 3.27 Capaian iBangga Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... III-378
Grafik 3.28 Perbadingan IKP Tahun 2023-2025 ..... III-424
Grafik 3.29 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2023-2025 ..... III-450
Grafik 3.30 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2023-2025 ..... III-458
Grafik 3.31 Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2023-2025 ..... III-462
Grafik 3.32 Perbandingan Target dan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025 ..... III-524
Grafik 3.33 Realisasi Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023-2025 ..... III-524
Grafik 3. 34 Proporsi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025 Menurut Kategori III-625
Grafik 3. 35 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025 Menurut Wilayah III-626
Grafik 3.36 Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD Provinsi NTB 2025 Berdasarkan Kriteria III-632
Grafik 3.37 Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD Provinsi NTB 2025 Berdasarkan Indikator III-634
Grafik 3.38 Jumlah Inovasi Provinsi NTB Tahun 2023-2025 ..... III-666

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Perencanaan Provinsi NTB	I-5
Gambar 1.2	Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020	I-7
Gambar 1.3	Cascading RPD Tujuan I	I-15
Gambar 1.4	Cascading RPD Tujuan II	I-16
Gambar 1.5	Cascading RPD Tujuan III	I-17
Gambar 1.6	Cascading RPD Tujuan IV	I-18
Gambar 1.7	Cascading RPD Tujuan V	I-19
Gambar 1.8	Cascading RPD Tujuan VI	I-20
Gambar 1.9	Cascading RPD Tujuan VII	I-21
Gambar 1.10	Cascading RPJMD Misi I	I-22
Gambar 1.11	Cascading RPJMD Misi II	I-23
Gambar 1.12	Cascading RPJMD Misi III	I-24
Gambar 1.13	Cascading RPJMD Misi IV	I-25
Gambar 1.14	Cascading RPJMD Misi V	I-26
Gambar 1.15	Cascading RPJMD Misi VI	I-27
Gambar 1.16	Cascading RPJMD Misi VII	I-28
Gambar 1.17	Proses Bisnis Provinsi Nusa Tenggara Barat	I-29
Gambar 3.1	Contoh Rencana Sistem Jaringan Persampahan di Wilayah Provinsi NTB (Pembangunan TPA Regional / PPST Lemer di Kabupaten Lombok Barat	III-294
Gambar 3.2	Peta ALKI di Wilayah Perairan Indonesia	III-301

Lampiran :

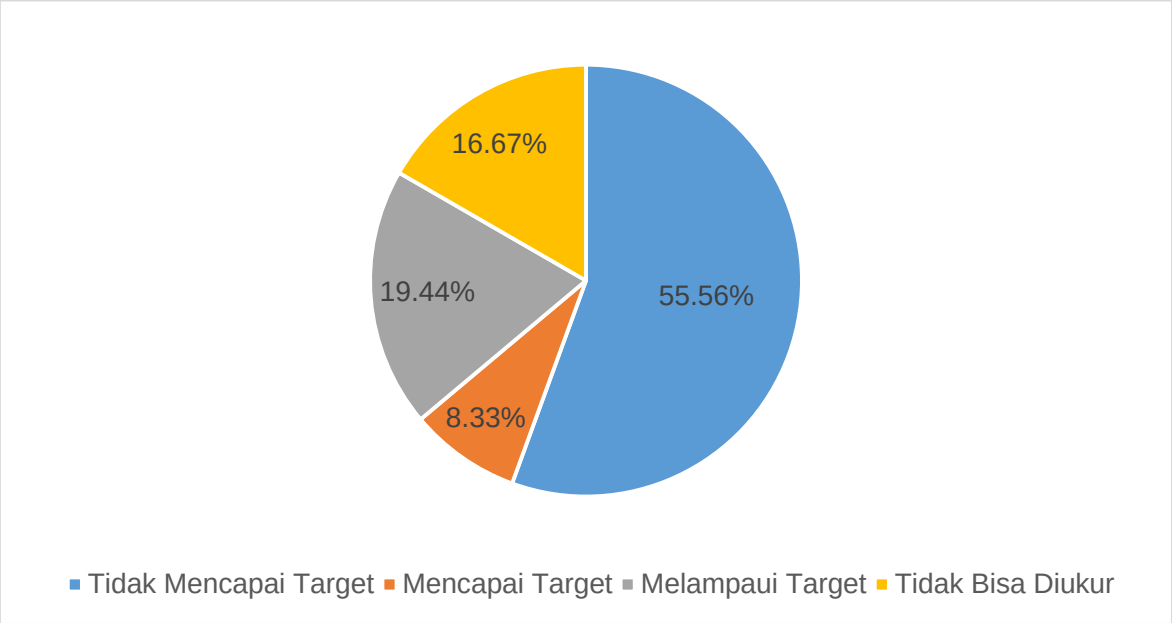
IKHTISAR EKSEKUTIF

Pencapaian kinerja tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat didasarkan atas Perencanan Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanan tahun 2024-2026 dan dokumen perencanaan tahun 2025-2026. Dalam dokumen perencanaan tahun 2024-2026 terdapat 13 Sasaran Strategis dengan 36 indikator kinerja. Sedangkan dalam dokumen perencanaan tahun 2025-2029 terdapat 25 Sasaran Strategis dan 53 indikator kinerja.

Capaian kinerja tahun 2025 atas dokumen perencanaan 2024-2026 sebagai berikut:

1. Melampaui target : 6 indikator
2. Mencapai target : 4 indikator
3. Tidak mencapai target : 20 indikator
4. Tidak bisa diukur : 6 indikator

Gambar A.1
Pencapaian Kinerja tahun 2025 atas Dokumen Perencanaan 2024-2026

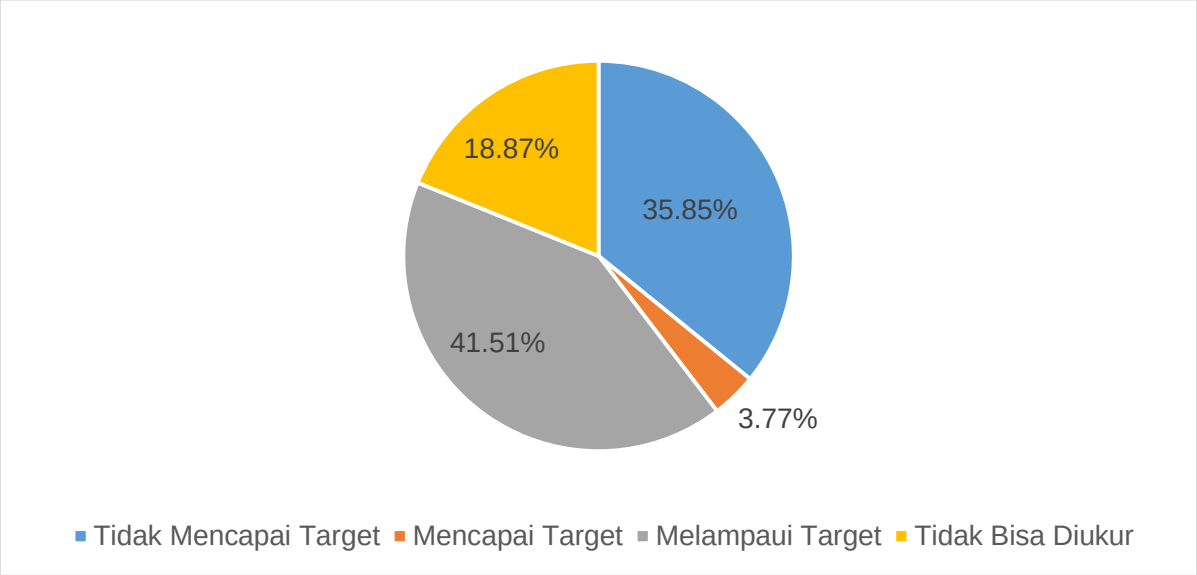


Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

Capaian kinerja tahun 2025 atas dokumen perencanaan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Melampaui target : 23 indikator
2. Mencapai target : 2 indikator
3. Tidak mencapai target : 19 indikator
4. Tidak bisa diukur : 9 indikator

Gambar A.2
Pencapaian Kinerja tahun 2025 atas Dokumen Perencanaan 2025-2029



(Rincian pencapaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah)

Efisiensi anggaran hanya diperhitungkan terhadap target yang tercapai atau target yang belum tercapai namun capaiannya di atas 95%. Untuk capaian selain itu, maka tidak terdapat efisiensi anggaran.

Ketidaktercapaian secara umum disebabkan oleh:

1. Rumusan indikator yang kurang *Spesific* (spesifik/jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan/sesuai), dan *Time bond* (terbatas waktu)
2. Kurang cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang berdampak pada penentuan program dan kegiatan pendukung
3. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala belum optimal
4. Kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian dokumen perencanaan dan anggran
5. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur dalam jumlah dan kompetensi
6. Dukungan kabupaten/kota yang belum optimal dalam mencapai target-target pembangunan daerah

Langkah-langkah di masa mendatang dalam meningkatkan Kinerja untuk mencapai target sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
2. Menyusun perbaikan atas penjenjangan kinerja bagian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pedoman dalam PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Merumuskan program dan kegiatan tahun 2027 (Ranwal RKPD) yang mendukung capaian sasaran strategis atas evaluasi kinerja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Tabel A.1

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja atas Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam Dokumen Perencanaan 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	6-6,5	0,22	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	
		Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5,5-6,9	6,55	Mencapai Target	69,06%	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,19-2,79	3,06	Tidak Mencapai Target	55,69%	- Indikator bersifat negatif - Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja sudah baik (92,63%)
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,65-8,66	7,87	Tidak Mencapai Target	43,94%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja sudah baik (90,98%)
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,24-14,25	13,98	Tidak Mencapai Target	48,04%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja sudah baik (98,17%)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
		Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,92	72,25	Tidak Mencapai Target	56,76%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja sudah baik (99,08%)
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	169	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data, sensus 10 tahun sekali)	Tidak bisa diukur	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64-16,85	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data, sensus 10 tahun sekali)	Tidak bisa diukur	
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	69-70	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data)	Tidak bisa diukur	
		Persentase kota kreatif	%	40	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data)	Tidak bisa diukur	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	57,05-57,1	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data)	Tidak bisa diukur	
		Persentase penanganan konflik SARA	%	100	100	Mencapai Target	54,21%	
4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	25,99	24,47	Melampaui Target	83,95%	Indikator bersifat negatif
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	119,83	156,02	Tidak Mencapai Target	79,54%	- Indikator bersifat negatif - Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja baik (99,24%)
		Bauran energi baru terbarukan	%	25	25,07	Melampaui Target	93,00%	
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	67	66,49	Tidak Mencapai Target	86,45%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja baik (97,92%)
		Indeks Kualitas Air	48	48	47,9	Tidak Mencapai Target	84,23%	
		Indeks Kualitas Udara	point	50-75	93.13	Melampaui Target	89,17%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	71.19	68,73	Tidak Mencapai Target	54,27%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja cukup baik (96,54%)
		Indeks Ketahanan Pangan	point	78,67	77,67	Tidak Mencapai Target	72,01%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja cukup baik (98,73%)
		Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	Baik	Mencapai Target	56,21%	
		Indeks Demokrasi	point	Sedang (75,37-78,63)	77,47	Mencapai Target	55,45%	
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	2-4	3,01	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	Indikator bersifat negatif
		Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	98	95	Tidak Mencapai Target	55,77%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja cukup baik (96,94%)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
		Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	27,2	32	Melampaui Target	58,94%	
		Peningkatan Pendapatan per kapita	%	34,48-34,57 (juta rupiah)	8	Tidak Bisa Diukur (perubahan satuan indikator kinerja dari % menjadi juta rupiah)	Tidak bisa diukur	
		Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	66	Melampaui Target (batas bawah)	71,88%	
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	BB	B	Tidak Mencapai Target	34,11%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja cukup baik (99,53%)
9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	Sedang (0,54-1,02)	1,241*	Mencapai Target	22,90%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	70	69	Tidak Mencapai Target	50,25%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja baik (98,57%)
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	65	63	Tidak Mencapai Target	85,45%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja baik (96,92%)
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	69	68	Tidak Mencapai Target	75.97%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja baik (98,55%)
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	65	62	Tidak Mencapai Target	30,47%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja baik (95,38%)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	80	75,83	Tidak Mencapai Target	62,32%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja cukup baik (94,79%)
12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	95	83,1	Tidak Mencapai Target	90,22%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja cukup baik (87,47%)
13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	70	63,40	Tidak Mencapai Target	71,36%	Target tidak tercapai karena pelaksanaan hanya sampai triwulan III 2025 saja. Namun capaian kinerja cukup baik (90,57%)

Tabel A.2

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja atas Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam Dokumen Perencanaan 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,6-8,63	8,87	Melampaui Target	8,24%	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,1-14,13	13,99	Tidak Mencapai Target	4,61%	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,02	11,59	Melampaui Target	18,18%	Target tidak tercapai, namun capaian kinerja sudah baik (99%)
		Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
		a) Literasi Membaca	%	10	NA	Tidak Bisa Diukur (indikator imperatif, tidak ada data yang rilis dari pusat)	Tidak Bisa Diukur	
		b) Numerasi	%	0-10	NA	Tidak Bisa Diukur (indikator imperatif, tidak ada data yang rilis dari pusat)	Tidak Bisa Diukur	
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:						
		a) Literasi Membaca	%	26,24-28,74	NA	Tidak Bisa Diukur (indikator imperatif, tidak ada data yang rilis dari	Tidak Bisa Diukur	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
						pusat)		
		b) Numerasi	%	22,68-25,18	NA	Tidak Bisa Diukur (indikator imperatif, tidak ada data yang rilis dari pusat)	Tidak Bisa Diukur	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,95	73,97	Melampaui Target	10%	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,7	29,8	Tidak Mencapai Target	Pendekatan efisiensi melalui adanya sisa anggaran Rp29.726.663.433,00	Indikator bersifat negatif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,517	0,53	Tidak Mencapai Target	53,41%	Indikator bersifat negatif
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,70	63,70	Melampaui Target	28,98%	
4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	Rasio kewirausahaan Daerah	%	2,37	10,03	Melampaui Target	76,68%	
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,97	0,93	Tidak Mencapai Target	7,80%	Target tidak tercapai, namun capaian kinerja sudah baik (95,88%)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,27	14,53	Melampaui Target	4,60	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35.408,24	36.010,28	Melampaui Target	2,84%	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19 - 2,79	3,05	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	- Indikator bersifat negatif - Target tidak tercapai, namun capaian kinerja sudah baik (90,68%)
6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	Inklusi Keuangan	%	88,70		Tidak Bisa Diukur (tidak ada data)		
7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	46,00	49,21	Melampaui Target	10,46%	
8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,83	74,70	Tidak Mencapai Target	2,74%	Target tidak tercapai, namun capaian kinerja sudah baik (94,76%)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa	(%)	77.88	78.81	Melampaui Target	12,94%	
10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	7,30	16,21	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	
11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	5,3-6,4	9,8	Melampaui Target	49,07%	
12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,2	5,03	Melampaui Target	63,02%	
13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	382.813	474.838	Melampaui Target	21,38%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
	Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,03	1,81	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	
		Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3,76	4,33	Melampaui Target	15,25%	
14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	Indeks budaya literasi	Indeks	64,42	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data karena tidak ada rilis lagi dari Kementerian Kebudayaan)	Tidak Bisa Diukur	
		Indeks ekspresi budaya	Indeks	44,48	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data karena tidak ada rilis lagi dari Kementerian Kebudayaan)	Tidak Bisa Diukur	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
		Indeks warisan budaya	Indeks	50,17	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data karena tidak ada rilis lagi dari Kementerian Kebudayaan)	Tidak Bisa Diukur	
		Indeks ekonomi budaya	Indeks	44,26	NA	Tidak Bisa Diukur (tidak ada data karena tidak ada rilis lagi dari Kementerian Kebudayaan)	Tidak Bisa Diukur	
15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	70,18	69,97	Tidak Mencapai Target	6,42%	Target tidak tercapai, namun capaian kinerja sudah baik (99,70%)
		Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	9,3 (47 medali)	23,40 (58 medali)	Melampaui Target	20,14%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
		Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100	Mencapai Target	6,42%	
16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,59	0,55	Tidak Mencapai Target	0,15%	Target tidak tercapai, namun capaian kinerja sudah baik (93,22%)
17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,19	77,40	Melampaui Target	24,95%	
18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,331	0,327	Mencapai Target	4,92%	
		Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0,1	0,1	Tidak Mencapai Target	3,26%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	192,23	123,53	Melampaui Target	52,35%	Indikator bersifat negatif
		Konsumsi Listrik per kapita	kWh	751,00	769,88	Melampaui Target	2,83%	
20	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	61.09	61.1	Melampaui Target	34,38%	
21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	76,21	70,12	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	
		Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	71,68-71,7	71,49	Tidak Mencapai Target	0,32%	Target tidak tercapai, namun capaian kinerja sudah baik (99,73%)
		Rasio Konektivitas	Rasio	0,83	0,831	Melampaui Target	4,41%	
22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83,38	83,13	Tidak Mencapai Target	3,18%	Target tidak tercapai, namun capaian kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
								sudah baik (99,70%)
23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi General	Skor	69,49	70,5	Melampaui Target	15,54%	
		Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	9,28	6,96	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,100	0,598	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	
		Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91,50	87,20	Tidak Mencapai Target	3,52%	Target tidak tercapai Namun capaian kinerja sudah baik (95,30%)
24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	75,37-78,63	76,37	Melampaui Target	8.,23%	
		Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	65	59	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Ketercapaian terhadap Target 2025	Efisiensi (%)	Keterangan
	Demokrasi yang Berkualitas	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	75	49,76	Tidak Mencapai Target	Tidak ada efisiensi	
25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	50	60	Melampaui Target	23,49%	
		Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	95,58	100	Melampaui Target	12,24%	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Gubernur NTB tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atas Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Pertanggungjawaban pelaksanaan perjanjian kinerja Gubernur sebagai wujud akuntabilitas disusun dalam bentuk dokumen LAKIP/LKjIP Provinsi NTB Tahun 2025 yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP/LKjIP Provinsi NTB Tahun 2025 adalah untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP/LKjIP adalah agar:

a. Memperoleh gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025;
b. Memperoleh gambaran efisiensi pemanfaatan anggaran Tahun 2025; dan
c. Merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk perencanaan kinerja selanjutnya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum LAKIP/LKjIP Provinsi NTB Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu Atas laporan Kinerja instansi pemerintah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB

Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di LIngkungan Pemerintah Provinsi NTB;
24. Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2023);
25. Peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 25);
26. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Nomor 53);
27. Peraturan Gubernur NTB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
28. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
29. Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Nomor 19);
31. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Nomor 22).

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

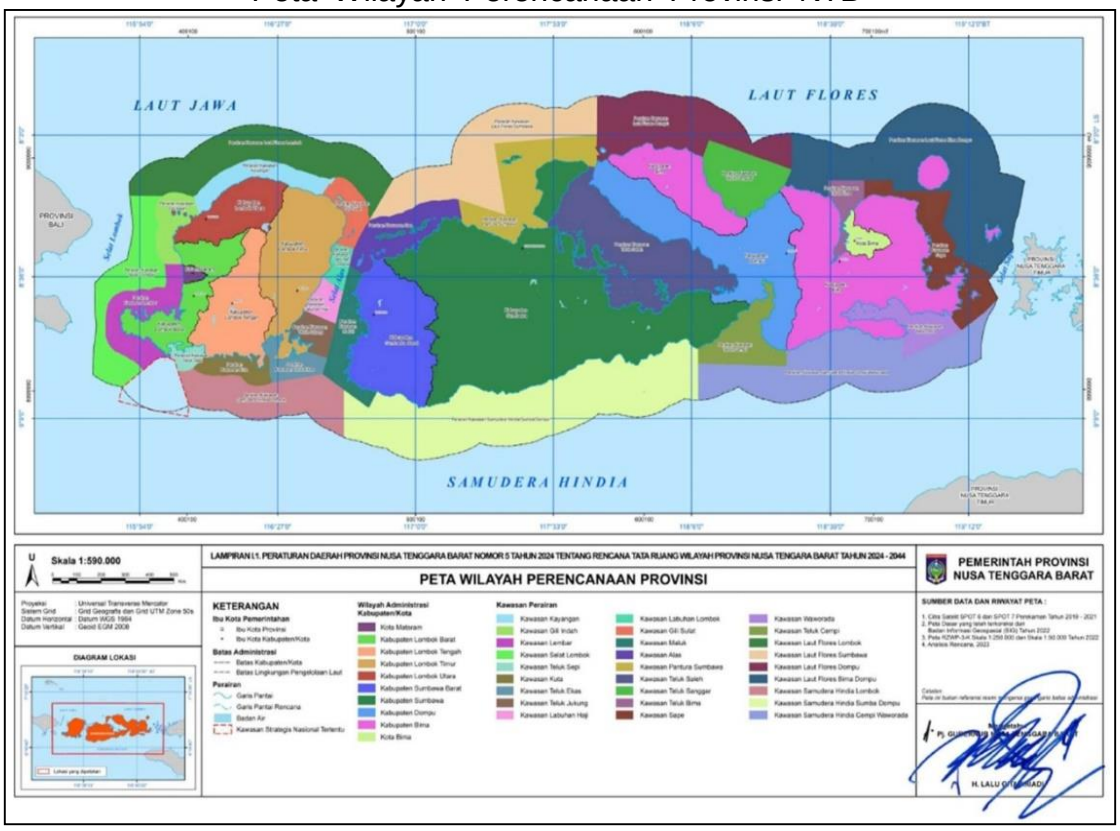
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB, bahwa Provinsi NTB dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Provinsi NTB diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah di Provinsi NTB. Provinsi NTB adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Secara geografis, Provinsi NTB berada di antara $8^{o}10'–9^{o}5'$ Lintang Selatan dan $115^{o}46'–119^{o}5'$ Bujur Timur. Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Wilayah NTB terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 401 pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Setiap pulau memiliki karakteristik geografis yang khas yang mempengaruhi kondisi alam, iklim, sumber daya serta aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Pulau Lombok berada di sebelah barat dan memiliki topografi yang beragam mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Wilayah utara didominasi oleh kawasan pegunungan dan hutan hujan tropis. Wilayah tengah banyak dimanfaatkan untuk pertanian khsusunya padi, tembakau, dan hortikultura. Sedangkan wilayah selatan dan barat agak kering dengan garis pantai yang indah dengan kawasan wisata unggulan. Pulau Lombok umumnya memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Pulau Sumbawa berada di wilayah timur NTB dan jauh lebih besar dibandingkan Pulau Lombok. Pulau ini memiliki kondisi geografis yang lebih beragam serta iklim yang lebih kering dibandingkan Lombok. Wilayah barat didominasi oleh perbukitan dan kawasan hutan serta terdapat beberapa daerah pertanian dan perkebunan. Wilayah tengah terdiri dari dataran rendah yang digunakan untuk pertanian lahan kering, peternakan dan tambang. Sedangkan wilayah timur memiliki pantai yang indah dan kaya akan potensi perikanan seperti di Teluk Saleh dan Pelabuhan Sape.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044 menyebutkan bahwa luas wilayah perencanaan NTB kurang lebih 4.758.132 hektare. Wilayah perencanaan ini terbagi menjadi dua yakni wilayah darat dengan luas kurang lebih 1.966.639 hektare (41%); dan wilayah laut dengan luas kurang lebih 2.791.492 hektare (59%). Adapun panjang garis pantai mencapai kurang lebih 2.999,54 km^{2}.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Perencanaan Provinsi NTB



Sumber: RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044 (Perda NTB Nomor 5 Tahun 2024)

Wilayah yang didominasi oleh perairan, menjadikan Provinsi NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan Ekonomi Agro-Maritim seperti perikanan tangkap, budidaya laut serta industri garam dan perkapalan; Ekowisata Bahari dan Pesisir dengan destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Pantai Kuta Mandalika dan perairan Pulau Moyo; dan Keamanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut, mengingat besarnya luas laut yang memerlukan perlindungan dari eksploitasi berlebihan dan aktivitas ilegal. Sementara itu, luas wilayah darat yang mencapai 41 persen tetap menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk batas-batas wilayah Provinsi NTB adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Jawa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bali; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi NTT.

Posisi strategis NTB ini memberikan berbagai keuntungan seperti berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Australia dan kawasan Pasifik. Laut di sekitar NTB menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang digunakan sebagai jalur pelayaran kapal-kapal internasional sehingga dapat menjadi peluang NTB untuk memperkuat perdagangan ekspor dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk Australia dan Asia Timur. Keuntungan lainnya adalah NTB memiliki posisi yang strategis dalam konteks geopolitik seperti keamanan maritim yang lebih kuat dan potensi pengembangan pangkalan logistik maritim yang dapat mendukung perdagangan serta keamanan perairan Indonesia bagian tengah. Secara administratif, NTB terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yang tersebar di dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah dengan wilayah terluas yang mencapai 6.655,92 Km^2

(33,83 persen), sedangkan yang terkecil adalah Kota Mataram dengan luas mencapai 60,42 Km2 (0,31 persen). Sedangkan apabila dilihat dari jumlah struktur administratif, jumlah Kecamatan di NTB sebanyak 117 dan Desa/Kelurahan sebanyak 1.166. Gambaran perbandingan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2025

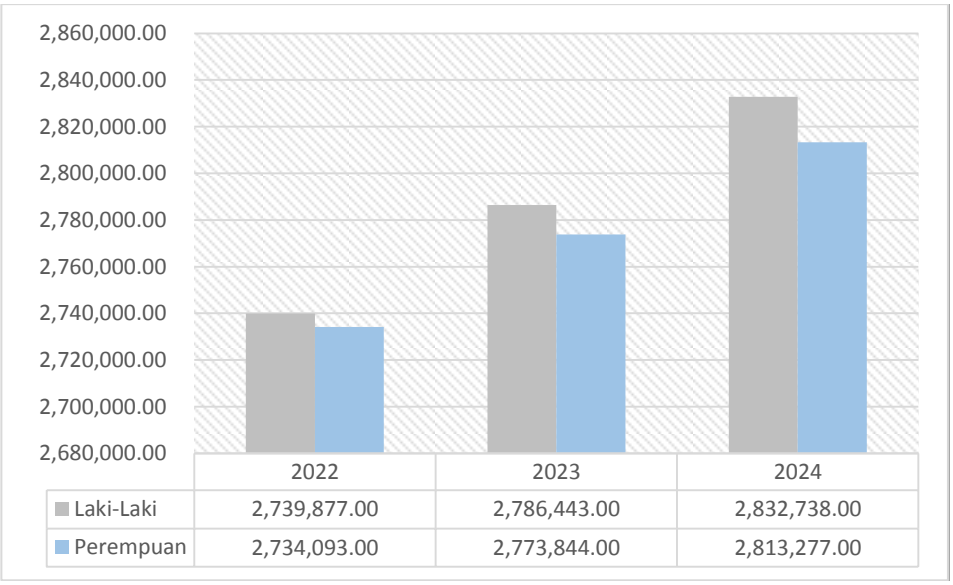
Kabupaten/Kota	Luas (km^2)	%	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
Kota Mataram	60.42	0.31	6	50
Kab. Lombok Barat	923.06	4.69	10	122
Kab. Lombok Utara	811.19	4.12	5	43
Kab. Lombok Tengah	1,169.52	5.94	12	154
Kab. Lombok Timur	1,606.47	8.16	21	254
Pulau Lombok	4,570.66	23.23	54	623
Kab. Sumbawa Barat	1,743.58	8.86	8	65
Kab. Sumbawa	6,655.92	33.83	24	165
Kab. Dompu	2,281.75	11.60	8	81
Kab. Bima	4,216.09	21.43	18	191
Kota Bima	207.89	1.06	5	41
Pulau Sumbawa	15,105.23	76.77	63	543
Provinsi NTB	19,675.89	100.00	117	1.166

Sumber: LKPJ Tahun 2025 Provinsi NTB, 2026

1.4.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk NTB terus meningkat setiap tahun, dimana jumlah penduduk laki laki dan perempuan tidak berbeda signifikan. Jumlah penduduk laki-laki di tahun 2024 lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dalam kurun waktu tahun 2022-2024, rata-rata jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.786.352 orang (50,11%) dan perempuan sebanyak 2.773.738 orang (49,89%).

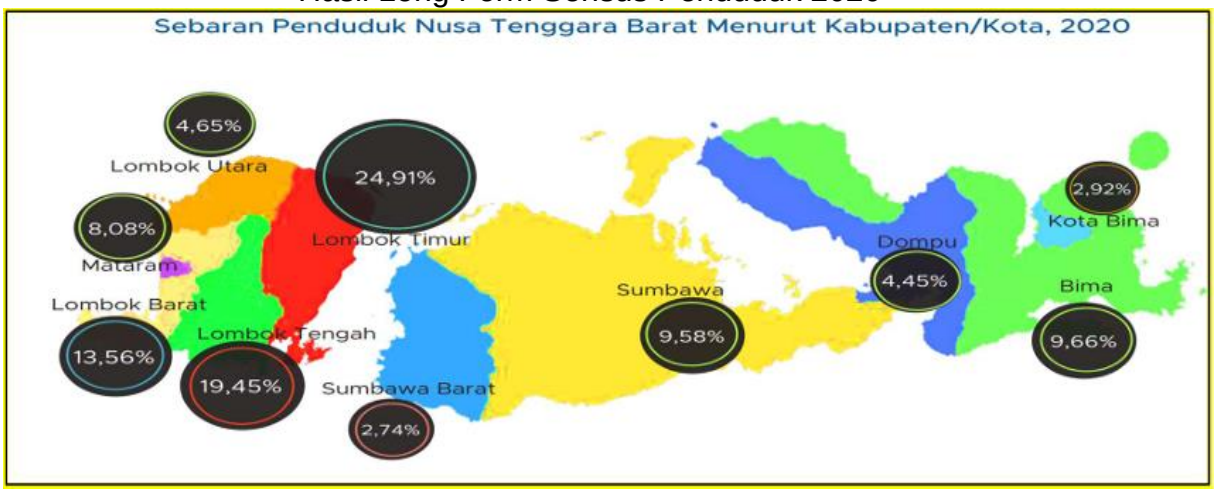
Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi NTB Menurut Jenis Kelamin 2022-2024



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Persebaran penduduk Provinsi NTB berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota. Sebaran penduduk tertinggi ada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 24,91%, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 19,45% dan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 13,56 %. Provinsi NTB terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan sebaran penduduk terbanyak ada di Pulau Lombok. Persebaran penduduk yang belum merata antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses layanan dasar dan perekonomian yang masih belum merata.

Gambar 1 .2
Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020



Sumber: BPS Provinsi NTB, Hasil LongForm 2020

Dilihat dari sebaran penduduk di tahun 2024, jumlah penduduk di Pulau Lombok sebanyak 3.995.877 jiwa (70,77%) dan Pulau Sumbawa 1.650.138 jiwa (29,22%). Sedangkan dilihat dari sisi luas wilayah, Pulau Sumbawa memiliki luas wilayah 15.105 km^2 dan Pulau Lombok 4.571 km^2. Luas wilayah Pulau Sumbawa yang hampir 3,3 kali lipat dari luas wilayah Pulau Lombok mempengaruhi tingkat kepadatan penduduknya. Pulau Lombok memiliki kepadatan 874 jiwa/km^2 sedangkan Pulau Sumbawa hanya 109 jiwa/km^2.

Kota Mataram dan Kota Bima adalah wilayah dengan luas yang paling kecil dibandingkan kabupaten lainnya. Namun jika melihat dari kepadatan penduduk, Kota Mataram menjadi yang terpadat di NTB yaitu 7.365 jiwa/km² dengan luas wilayah 60,42 km², sementara Kota Bima memiliki kepadatan 787 jiwa/km² dengan luas wilayah 207,89 km² pada tahun 2024. Luasan area perkotaan tersebut (Kota Mataram dan Kota Bima) tidak sebanding dengan kepadatan penduduk, dimana daerah perkotaan masih menjadi magnet bagi penduduk NTB untuk bertempat tinggal dan mencari penghidupan. Kepadatan pendudukan NTB tahun 2022 sebesar 278 orang/ km², meningkat menjadi 283 orang/ km² pada tahun 2023, dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 287 orang/ km².

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur usia produktif/non-produktif di NTB selama 2022-2024 menunjukkan secara jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) mendominasi yakni rata-rata 3,7 juta jiwa atau 67,15 % sedangkan dari usia non-produktif kelompok anak (0-14 tahun) rata-rata sebanyak 1,5 juta jiwa atau 27,68%, dan dari usia non-produktif kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) rata-rata sebanyak 312,2 ribu jiwa atau 5,70%. Besarnya jumlah usia penduduk produktif di NTB ini menjadi potensi besar dalam perekonomian dan ketenagakerjaan.

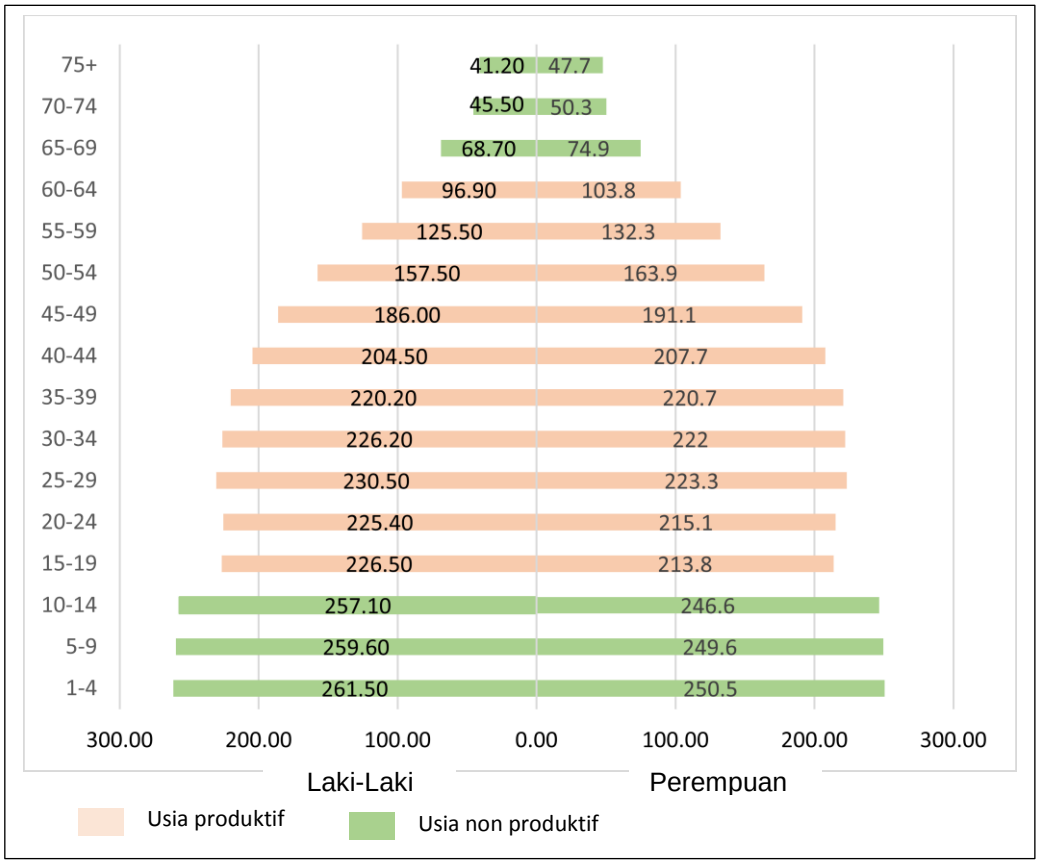
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2022-2024 Menuruh Kelompok Umur

Kelompok Umur	2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0-4	505,1	9,23	508,2	9,14	512,0	9,07
5-9	519,3	9,49	515,2	9,27	509,1	9,02
10-14	473,9	8,66	498,6	8,80	503,6	8,92
15-19	435,6	7,96	436,5	7,85	440,2	7,80
20-24	444,8	8,13	442,7	7,96	440,6	7,80
25-29	447,9	8,18	451,3	8,12	453,8	8,04
30-34	444,4	8,12	446,2	8,03	448,2	7,94
35-39	427,8	7,81	434,7	7,82	440,9	7,81
40-44	399,2	7,29	405,7	7,30	412,2	7,30
45-49	357,9	6,54	367,8	6,61	377,1	6,68
50-54	298,4	5,45	309,9	5,57	321,4	5,69
55-59	240,1	4,39	248,7	4,47	257,8	4,,57
60-64	183,0	3,34	191,9	3,45	200,7	3,55
65+	296,5	5,42	311,9	5,61	328,3	5,81
Jumlah	5,474,0	100,00	5,560,3	100,00	5,646,0	100,00

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Piramida penduduk adalah gambaran komposisi usia dan jenis kelamin suatu populasi penduduk. Piramida penduduk NTB tahun 2024 termasuk piramida ekspansif (muda) yang memiliki tingkat kelahiran yang tidak terlalu rendah dan angka kematian yang rendah atau sedang. Piramida menggambarkan penduduk NTB yang didominasi oleh penduduk usia produktif, sebagai berikut:

Grafik 1.2
Piramida Penduduk NTB Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025, diolah

1.4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit (ukuran ringkasan) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak yang mencerminkan akses penduduk terhadap pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas merepresentasikan dimensi pendidikan. Dimensi pendapatan direpresentasikan dengan pengeluaran riil perkapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. IPM Provinsi NTB Tahun 2022-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata 1,01% per tahun. Pertumbuhan rata-rata untuk dimensi umur panjang dan sehat 0,41% per tahun, dimensi pengetahuan-HLS 0,07% per tahun, dimensi pengetahuan-RLS 1,69% per tahun, dan dimensi standar hidup layak 4,24% per tahun. IPM Provinsi NTB Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
IPM Provinsi NTB Tahun 2022-2025

No.	Dimensi	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	Umur Panjang dan Hidup Sehat					
	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,66	72,02	72,25	72,60
2	Pengetahuan					
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,96	13,97	13,98	13,99
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,61	7,74	7,87	8,21
3	Standar Hidup Layak					
	Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp000	10.681	11.095	11.606	11.922
		IPM	71,65	72,37	73,1	73,97

Sumber BPS NTB, 2025

Pada tahun 2025, IPM NTB dan seluruh dimensinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. IPM NTB tahun 2025 sebesar 73,97 (kategori tinggi) naik 0,87 poin dari tahun 2024. Dimensi umur panjang dan sehat naik 0,35 poin, dimensi pengetahuan-HLS 0,01 poin, dimensi pengetahuan-RLS 0,34 poin, dan dimensi standar hidup layak naik Rp316.000.

1.4.4 Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2022-2024, perekonomian NTB relatif masih bergantung pada kinerja sektor pertambangan. Ketika sektor ini tumbuh tinggi, ekonomi NTB melonjak, seperti yang terjadi di tahun 2022 dan 2024. Namun, ketergantungan tersebut juga menciptakan volatilitas yang tinggi. Sementara itu, sektor non-tambang di NTB menunjukkan kinerja yang lebih stabil, meskipun tidak setinggi pertumbuhan berbasis tambang (tabel di bawah). Sektor pertambangan seringkali sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas global, permintaan internasional, atau kebijakan perdagangan. Jika harga produksi naik, pertumbuhan ekonomi NTB melonjak cepat. Sebaliknya, jika turun atau ada gejolak pasar, pertumbuhan bisa anjlok drastis. Perekonomian NTB menjadi sulit diprediksi karena sangat bergantung pada satu sektor yang rentan perubahan.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2022-2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi	2022	2023	2024
Dengan tambang (%)	6,95	1,8	5,30
Tanpa tambang (%)	3,42	4,89	3,87

Sumber BPS NTB, 2025

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dengan tambang sebesar 3,22%, deviasi -2,08 poin dibandingkan dengan tahun 2024 atau deviasi -2,78 dibandingkan dengan target tahun 2025. Ini terjadi karena belum optimalnya operasional smelter PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dan adanya larangan ekspor konsentrat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 8,33%, deviasi +4,46 poin dibandingkan dengan tahun 2024 atau deviasi +1,43 poin dibandingkan dengan target tahun 2025. Angka pertumbuhan ekonomi tanpa tambang yang positif menunjukkan bahwa sektor-sektor di luar pertambangan mulai berkembang dengan baik.

1.4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Provinsi NTB dalam periode Februari 2022 sampai dengan Agustus 2024 mengalami penurunan 1,19 poin (tren positif). TPT Agustus 2025 sebesar 3,06 turun sebesar 0,16 poin dari periode Februari 2025 atau naik 0,33 poin dari periode Agustus 2024.

Tabel 1.5
TPT Provinsi NTB Tahun 2022-2024

2022		2023		2024		2025	
Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
3,92	2,89	3,73	2,8	3,3	2,73	3,22	3,06

Sumber BPS NTB, 2024

1.4.6 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB dalam periode Maret 2022 sampai dengan September 2024 mengalami penurunan 1,91 poin atau berkurang sebanyak 86,09 ribu orang. Angka yang menunjukkan capaian posistif ini diikuti dengan kondisi sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2025 periode September, persentase kemiskinan di Provinsi NTB sebesar 11,38% menurun 0,4 poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,53 poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 637,18 ribu orang, menurun 17,39 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 21,42 ribu orang terhadap September 2024.

Tabel 1.6
Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2022-2025

Indikator	2022		2023	2024		2025	
	Maret	September	Maret	Maret	September	Maret	September
Persentase Kemiskinan (%)	13,68	13,82	13,85	12,91	11,91	11,78	11,38
Angka Kemiskinan (ribu orang)	731,94	744,69	751,23	709,01	658,6	654,57	637,18

Sumber BPS NTB, 2024

Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 11,38 %, menurun 0,40 % poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,53 % poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 637,18 ribu orang, menurun 17,39 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 21,42 ribu orang terhadap

September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 11,70%, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 12,02%.

1.4.7 Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP Provinsi NTB

Pelaporan merupakan salah satu komponen, selain perencanaan, pengukuran, dan evaluasi dalam SAKIP. Bobot komponen pelaporan sebesar 15 dari total bobot ideal 100. Realisasi komponen pelaporan pada SAKIP Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 11,39 atau deviasi +0,15 dibandingkan tahun 2024 dan deviasi -0,24 dari target tahun 2025. Capaian komponen pelaporan tahun 2025 sebesar 101,33% terhadap realisasi tahun 2024 dan 97,94% terhadap target tahun 2025.

1.5 Permasalahan Umum dan Isu Strategis

Permasalahan umum dan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Permasalahan Umum dan Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan Umum	Isu KLHS	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah
1. Provinsi NTB memiliki Bonus demografi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) pada periode 2025-2035 2. Pertanian di Provinsi NTB memiliki potensi yang besar dan variatif didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dan sebagai komponen penting dalam pembangunan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 3. Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau Besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan dikeliling 401 pulau kecil dengan 32 pulau diantaranya berpenghuni dan Sebagian menjadi obyek pariwisata.	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Masalah Sosial lainnya	Masih tingginya angka kemiskinan	1. Geopolitik dan Geoekonomi 2. Perlemahan ekonomi China 3. Kebiakan Proteksionltme Amerika Serikat 4. Dampak Perubahan Iklim Global	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar	Penurunan Tingkat Kemiskinan
		Masih tingginya angka pengangguran dan kurangnya kualitas tenaga kerja		Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Witayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi	
					kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap	
	Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya taraf kesehatan masyarakat		Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
		Masih rendahnya kualitas maupun kuantitas pendidikan			Kualitas SDM yalg rendah juga disebabkar oteh tingginya prevalensi stunting dibandingkan nasional	
	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Inklusif	Kurangnya daya saing wilayah		Rendahnya Produktivitas	Perekonomian Wilayah Bali Nusa Tenggara mengalami perlambatan	Produktivitas dan Perkuatan Pembanguna n Ekonomi Daerah yang

Potensi Daerah	Permasalahan Umum	Isu KLHS	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah
Dalam konteks geografi pariwisata, Provinsi NTB berada pada posisi yang strategis atau berada pada segitiga emas daerah tujuan wisata (DTW) utama Indonesia yaitu Pulau Bali di sebelah barat sebagai tujuan wisata internasional, Taman Wisata Pulau Komodo di sebalah timur dan Tanah Toraja di sebelah utara 4. Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang memiliki komoditas sumber daya mineral yang sangat besar yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayah. Beberapa jenis mineral yang ditemukan di NTB, antara lain; emas, perak, bauksit, timah, pasir besi, batu bara, kalsium, dan mangan 5. Adanya kebijakan hilirisasi melalui pembangunan smelter yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja industri pengolahan khususnya sub sektor industri pengolahan logam dasar di NTB 6. Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan						Berkelanjutan
	Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur	Belum optimalnya konektivitas dan infrastruktur dasar wilayah			Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentasinya aktivitas ekonomi pada Kab/Kota tertentu	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	Degradasi Lingkungan dan Kebencanaan Masih Tinggi	Degradasi lingkungan hidup, perubahan iklim, dan mitigasi bencana		Krisis Lingkungan	Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar seperti Flores Back Arc Thrust, Lombok Strait Strike slip Fault, Teluk Panas Fault, Sape Strike slip Fault, Bondowatu Fault, Sumba Ridge Thrust, Savu Thrust, Semau Fault, Sape Strike-slip Fault, dan Sumba Strike-slip Fault	
					Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekltar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan	

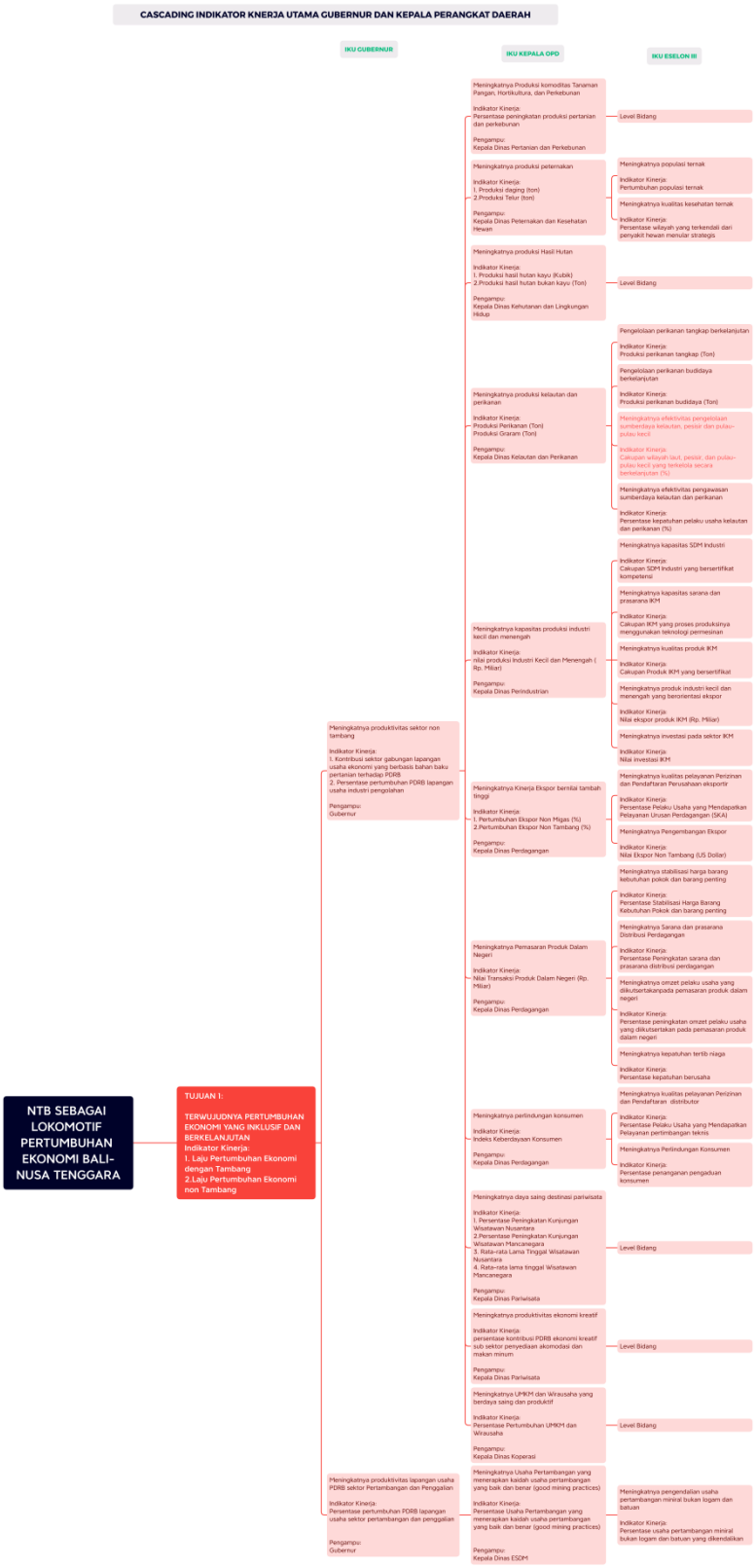
Potensi Daerah	Permasalahan Umum	Isu KLHS	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah
sebagai sumber energi listrik diantaranya panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. 7. Sebagai provinsi dengan memiliki wilayah perairan yang luas, potensi perikanan di Provinsi NTB cukup menjanjikan bahkan salah satu komoditi ekspor unggulannya adalah ikan segar dan mutiara. Komoditas perikanan terbagi menjadi perikanan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, udang, dan lainnya. Untuk perikanan budidaya dengan komoditas rumput laut, lobster, kerapu, udang, bandeng, nila, lele, mas, gurami, dan lainnya.						

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1.6 Cascading Kinerja

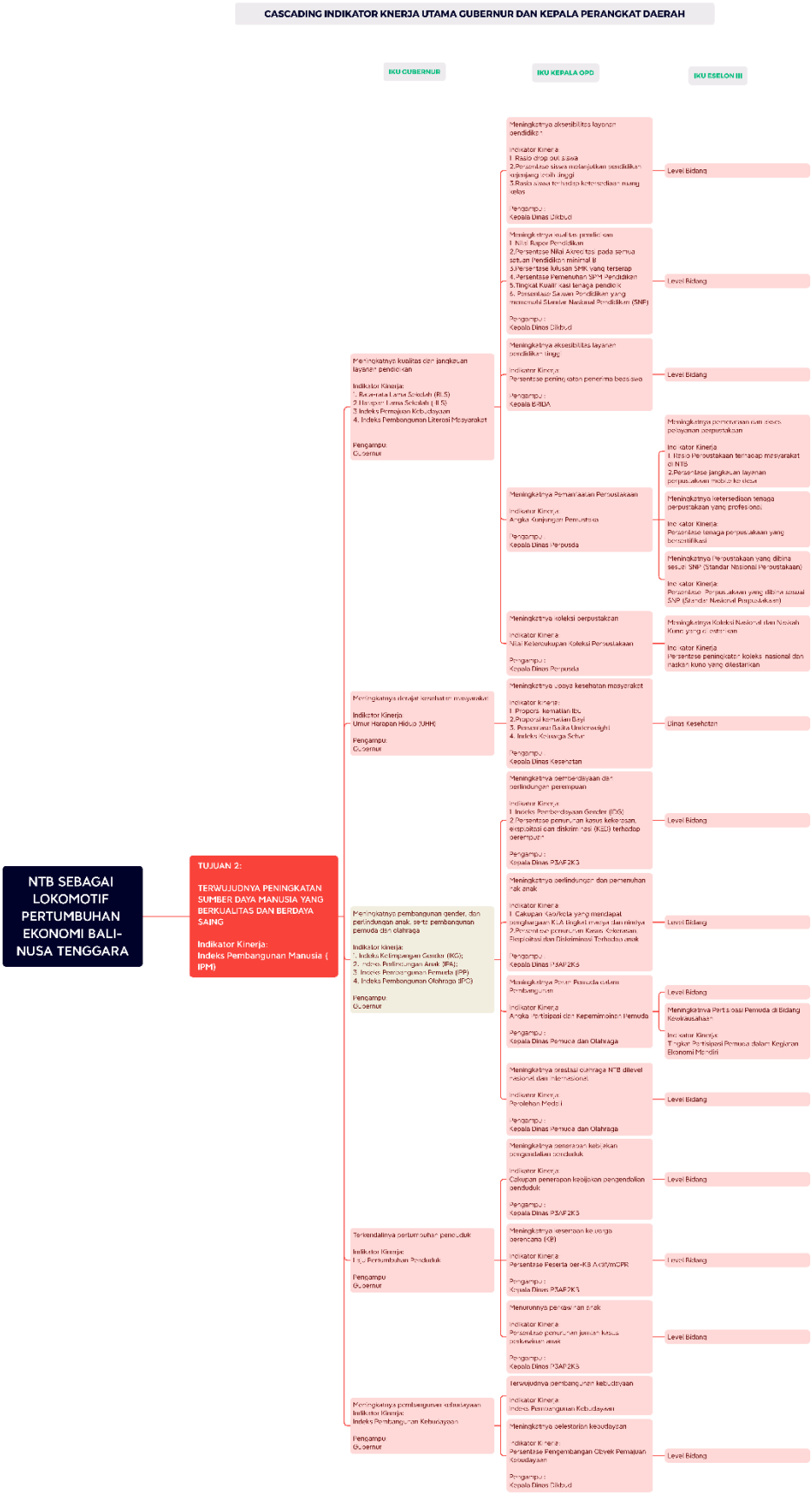
1.6.1 Cascading RPD Dibuat Berdasarkan Tujuan

Gambar 1.3
Cascading RPD Tujuan I



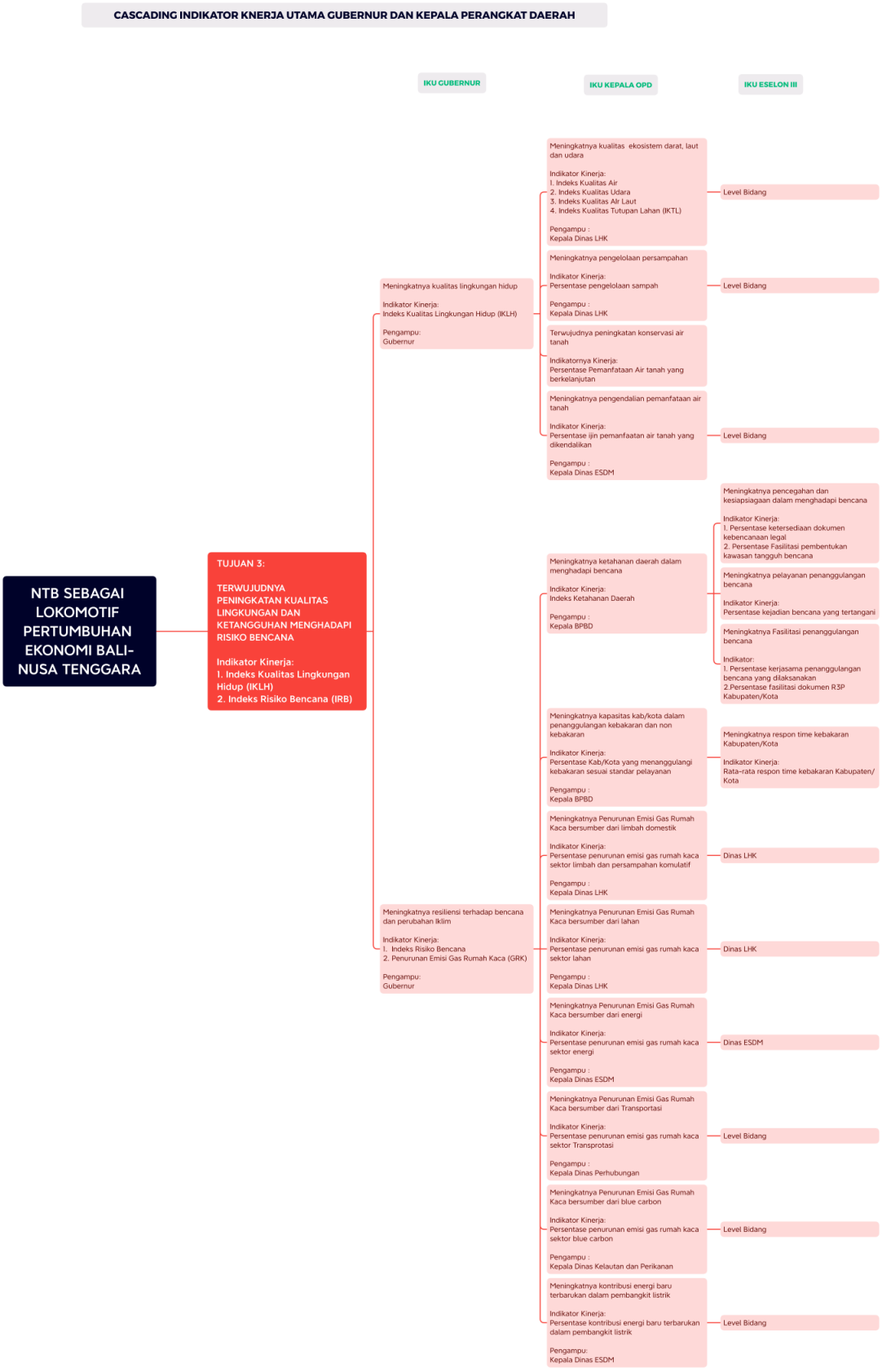
Link https://s.id/BiE2o

Gambar 1.4
Cascading RPD Tujuan II



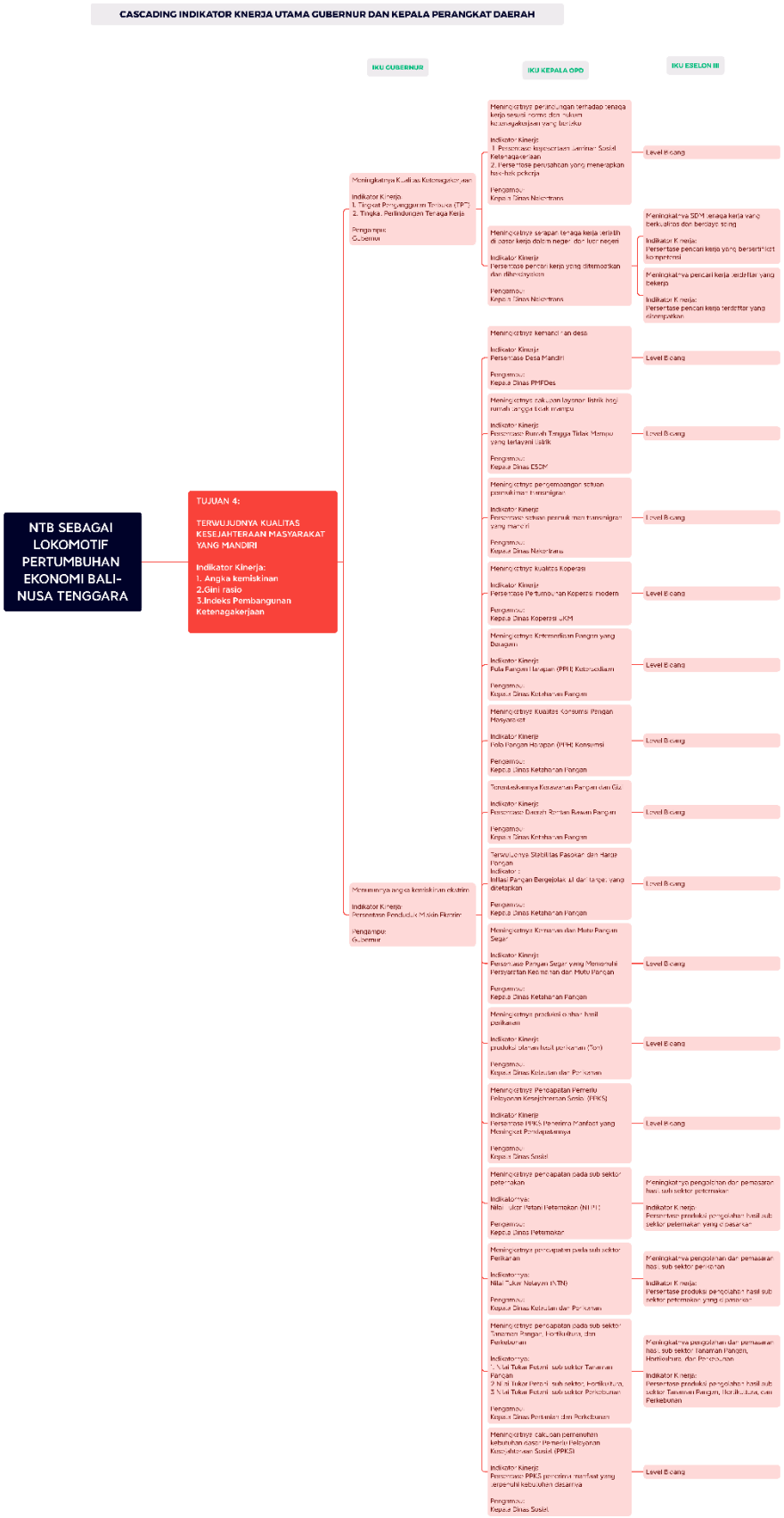
Link https://s.id/BiE2o

Gambar 1.5
Cascading RPD Tujuan III



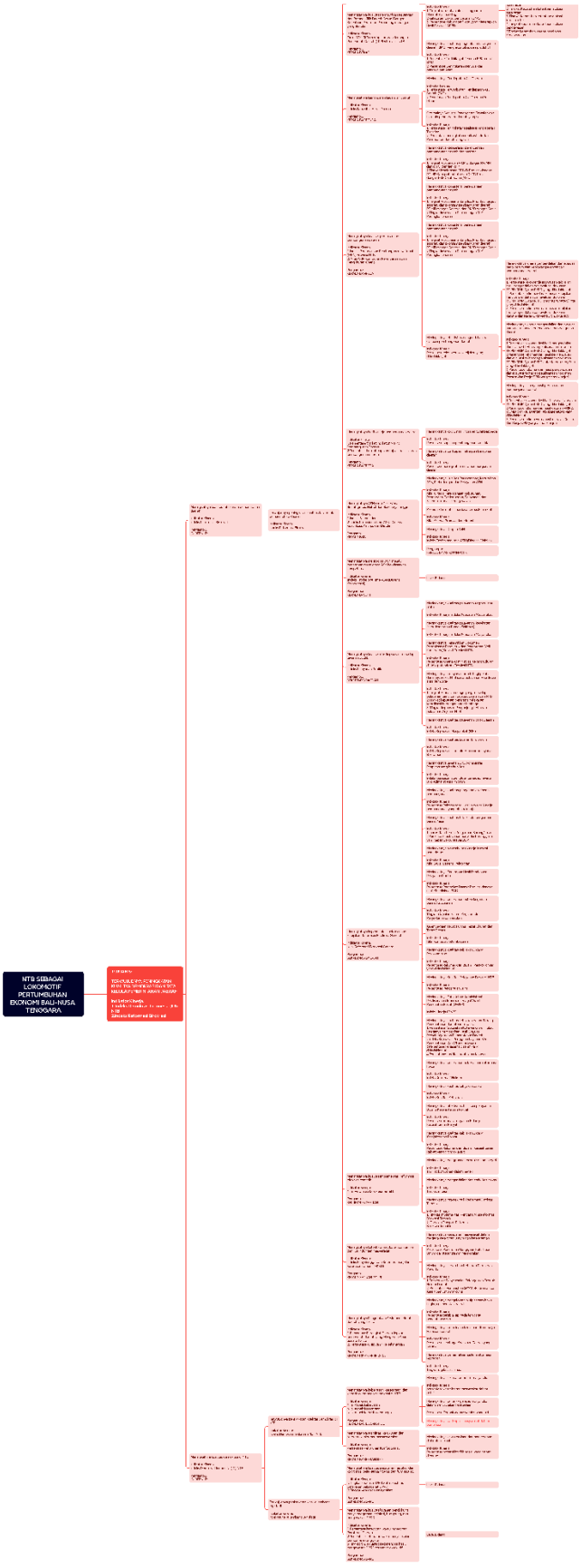
Link https://s.id/BiE2o

Gambar 1.6
Cascading RPD Tujuan IV



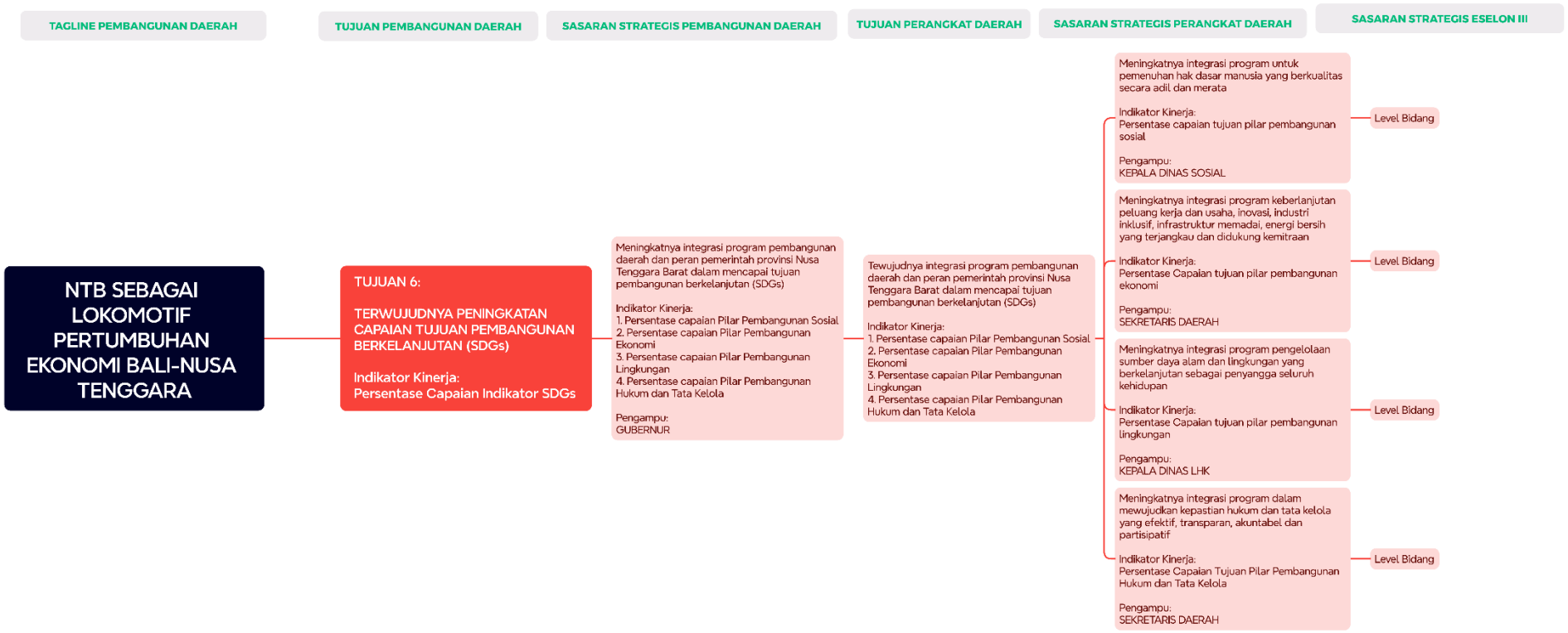
Link https://s.id/BiE2o

Gambar 1.7
Cascading RPD Tujuan V



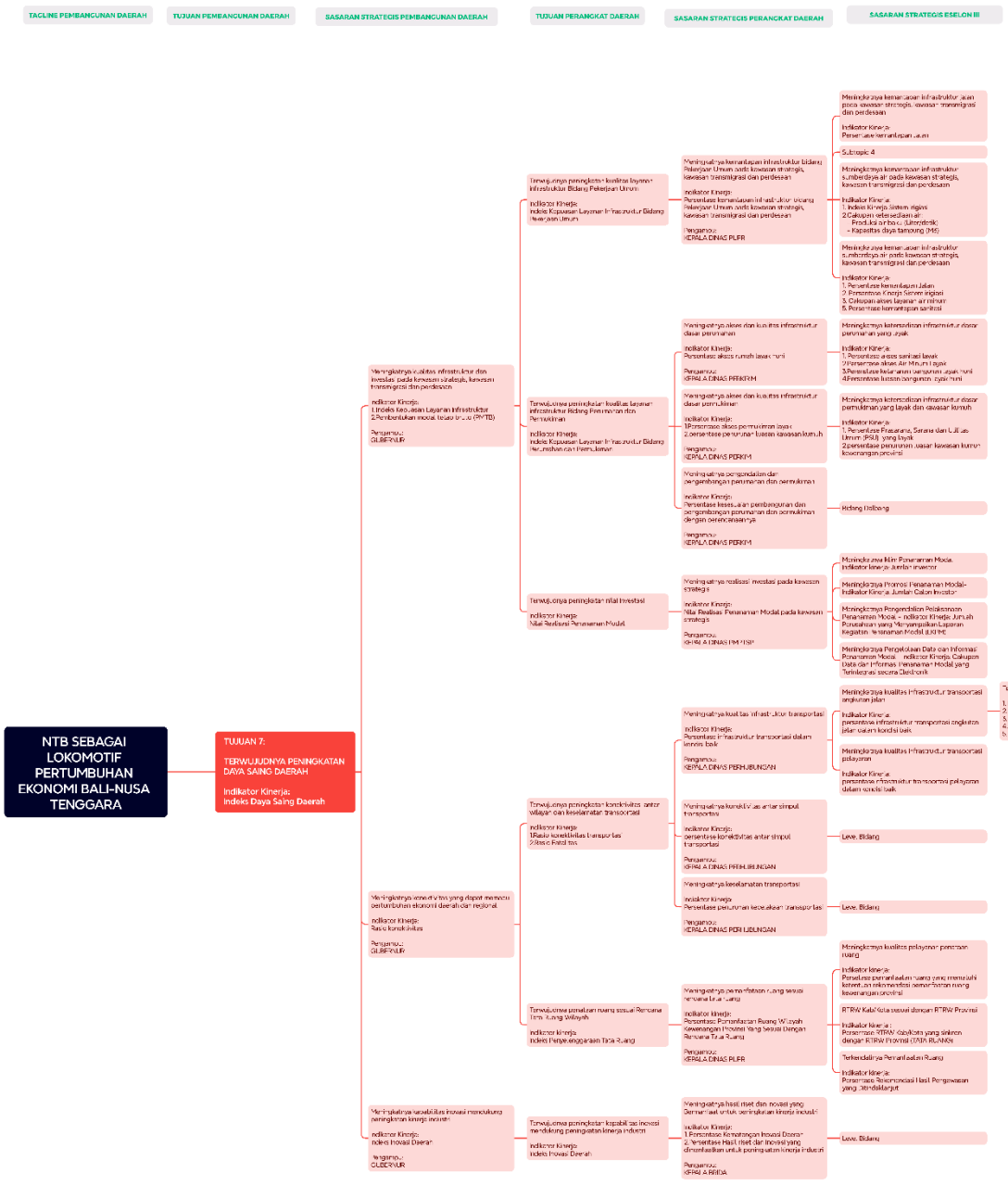
Link https://s.id/BiE2o

Gambar 1.8
Cascading RPD Tujuan VI



Link https://s.id/BiE2o

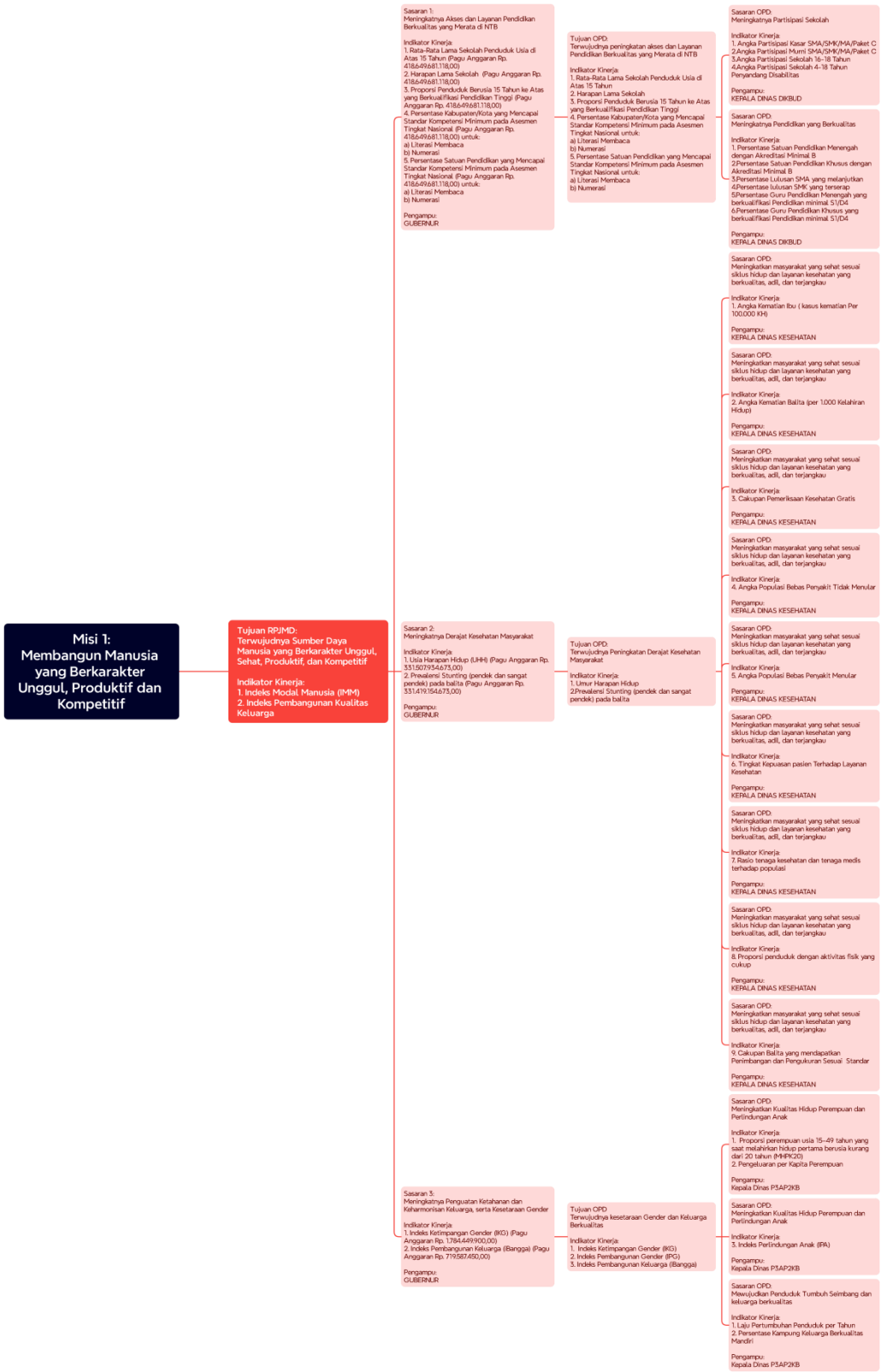
Gambar 1.9
Cascading RPD Tujuan VII



Link https://s.id/BiE2o

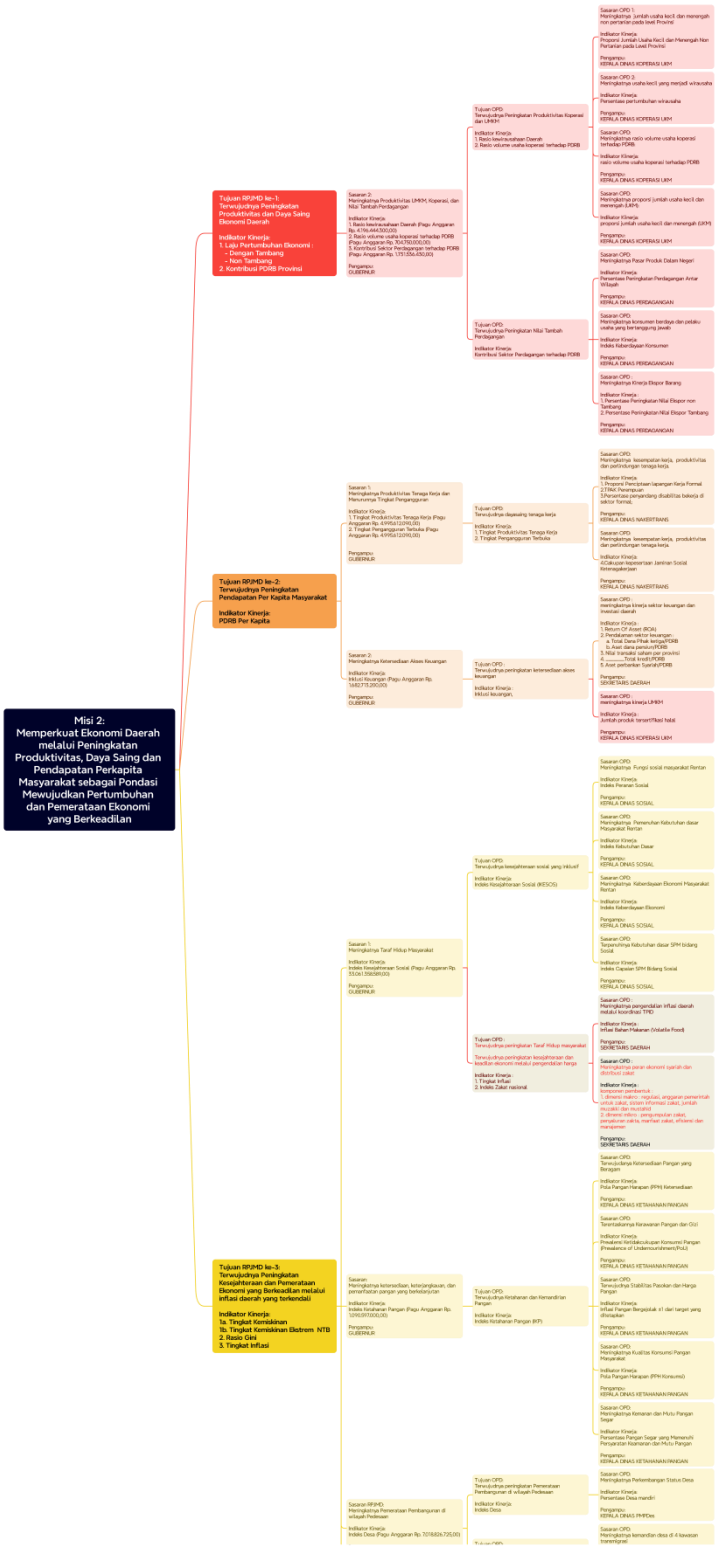
1.6.2 Cascading RPJMD Dibuat Berdasarkan Misi

Gambar 1.10
Cascading RPJMD Misi I



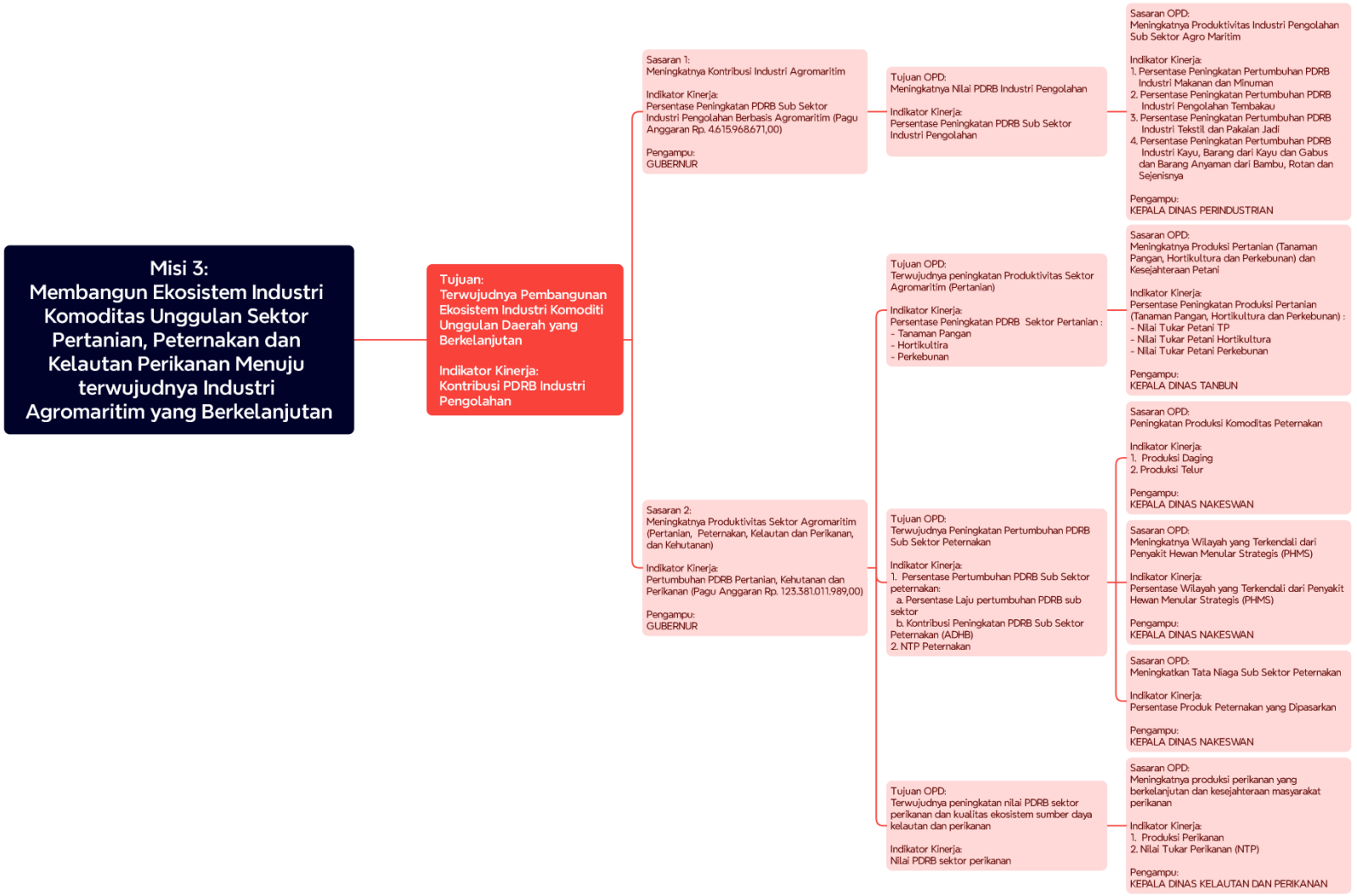
Link https://s.id/Mg0Yi

Gambar 1.11
Cascading RPJMD Misi II



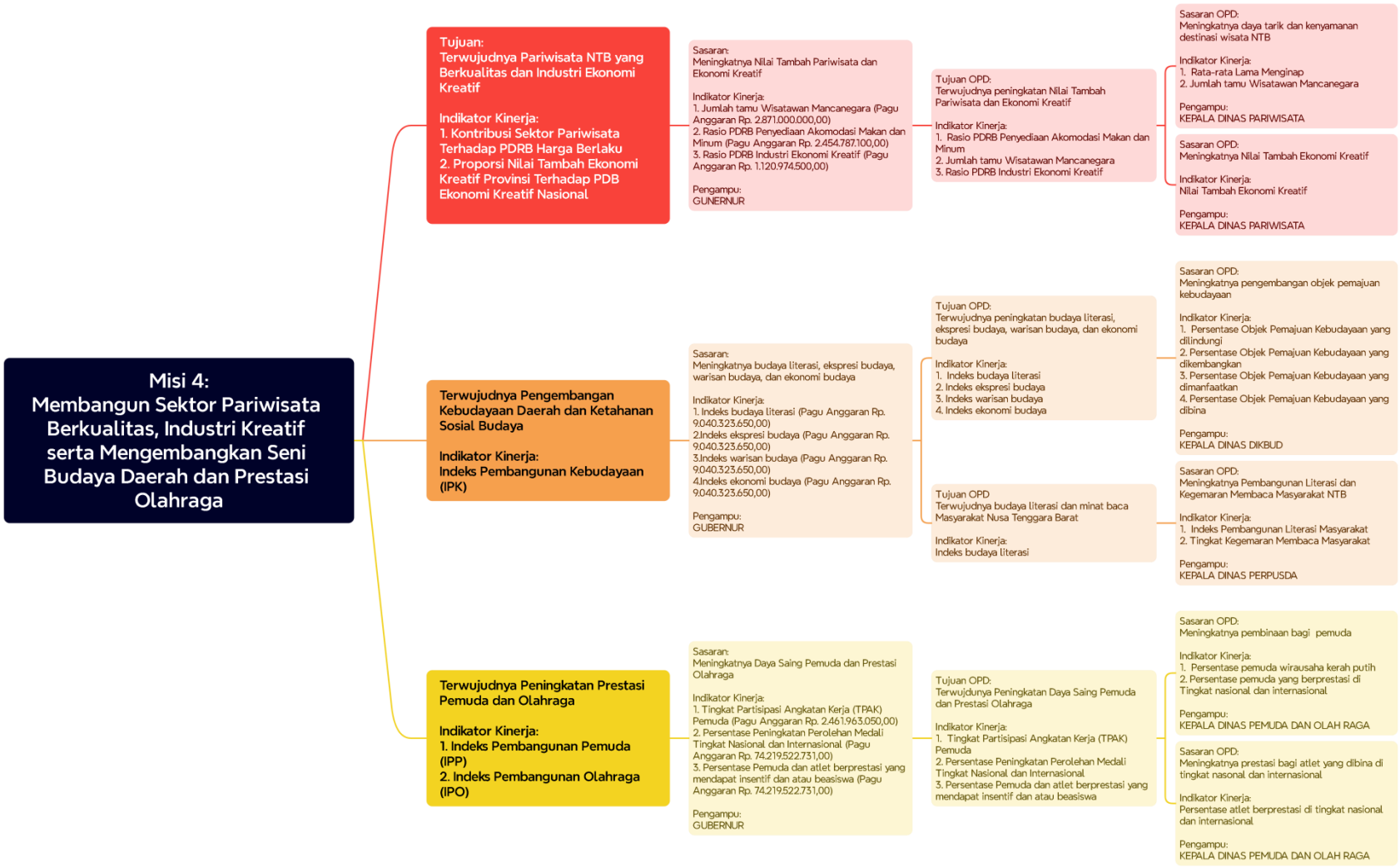
Link https://s.id/Mq0Yi

Gambar 1.12
Cascading RPJMD Misi III



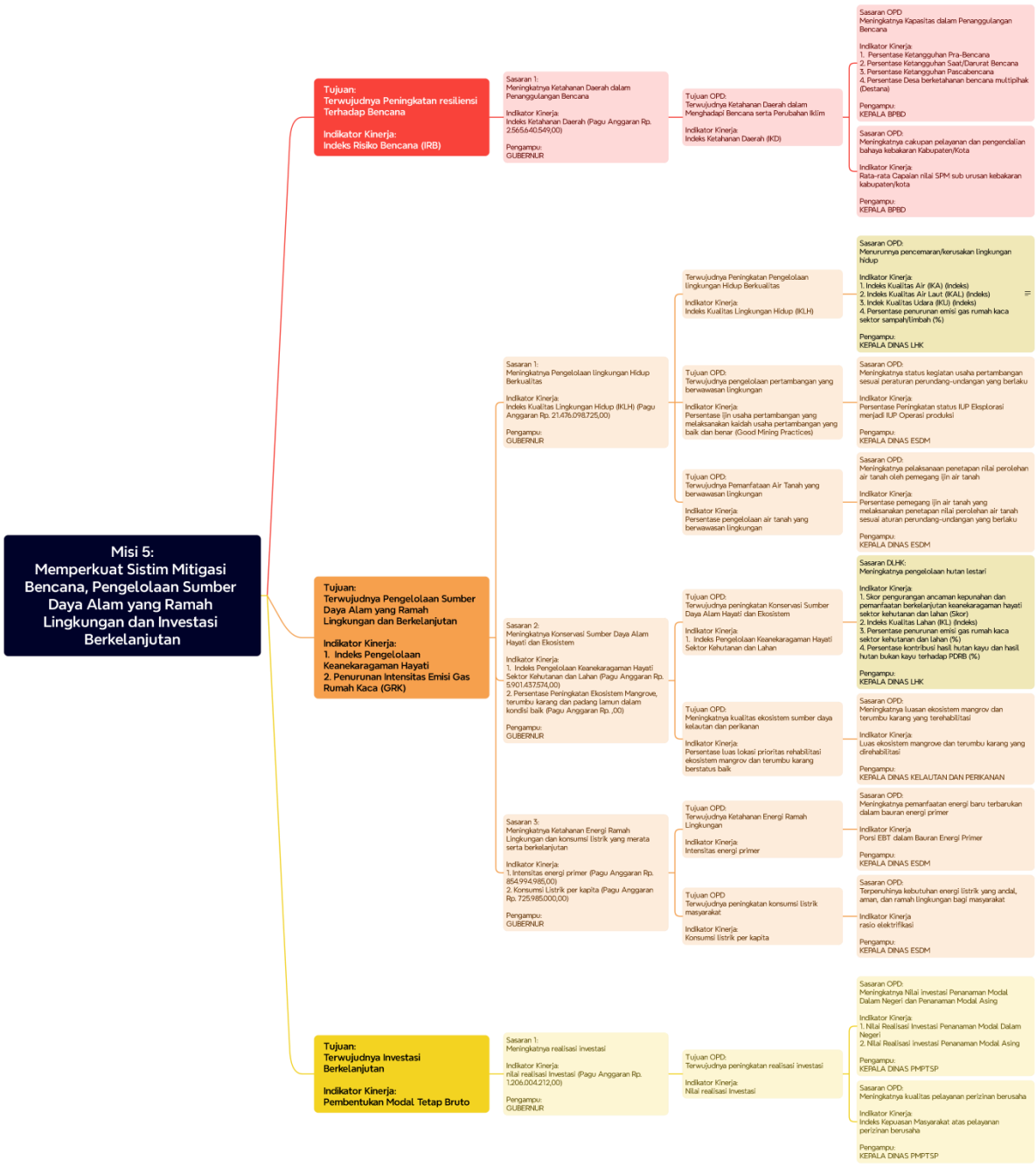
Link https://s.id/Mq0Yi

Gambar 1.13
Cascading RPJMD Misi IV



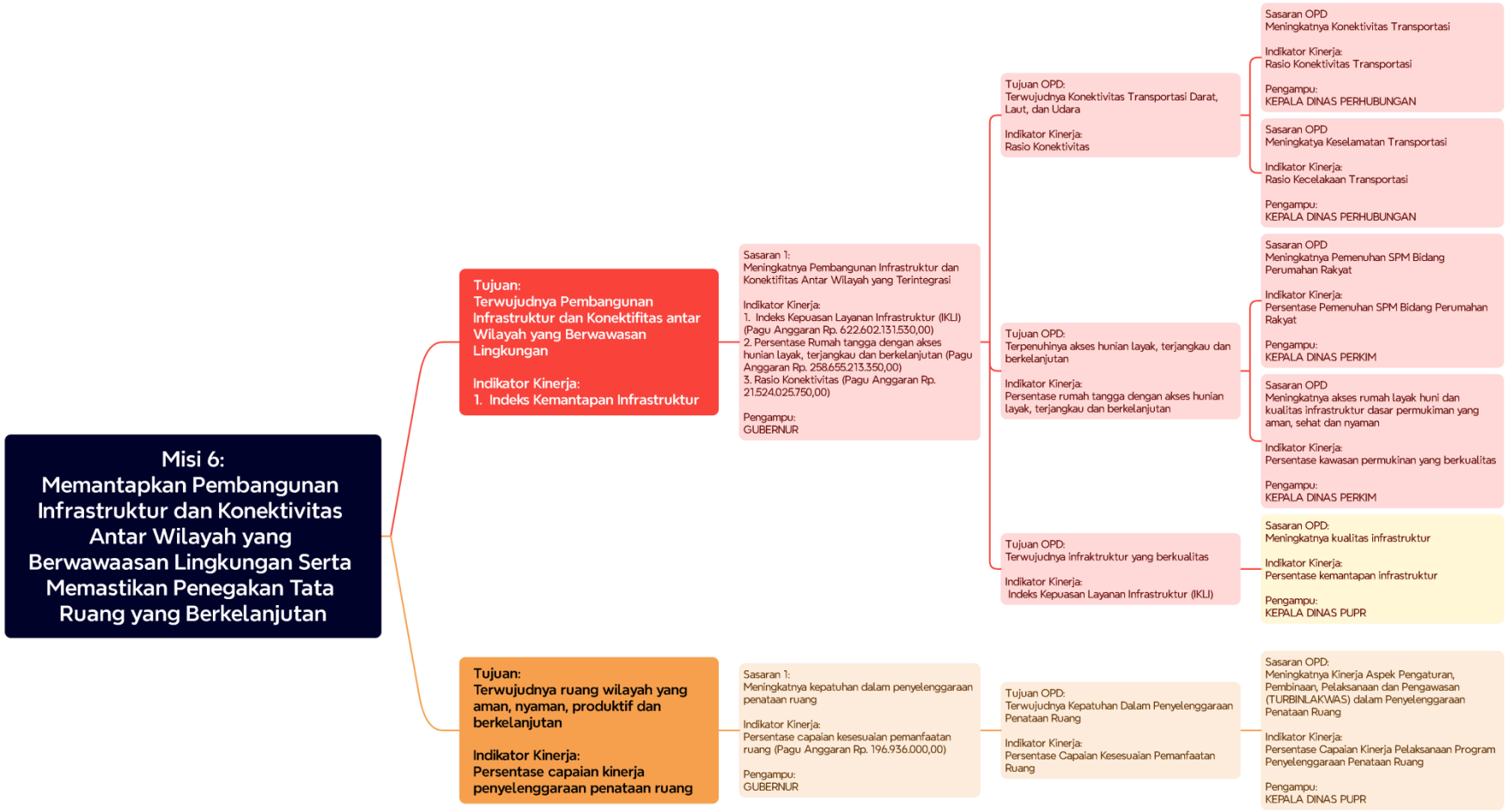
Link https://s.id/Mq0Yi

Gambar 1.14
Cascading RPJMD Misi V



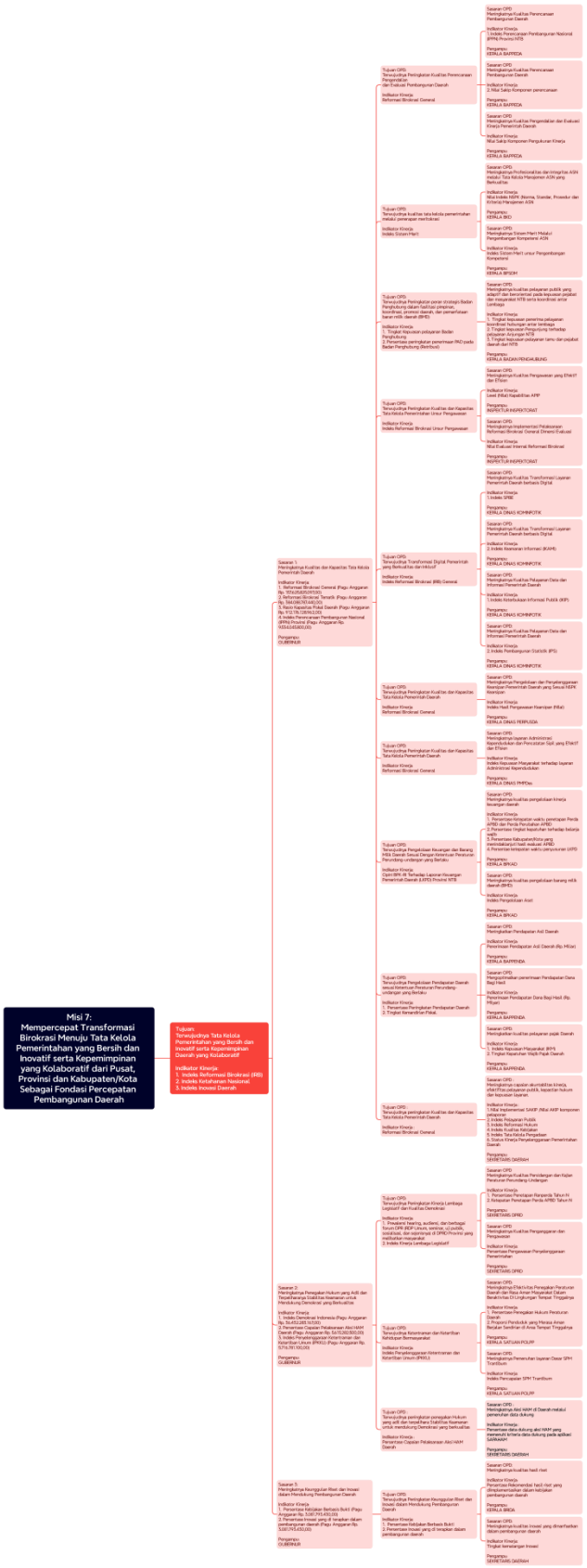
Link https://s.id/Mq0Yi

Gambar 1.15
Cascading RPJMD Misi VI



Link https://s.id/Mq0Yi

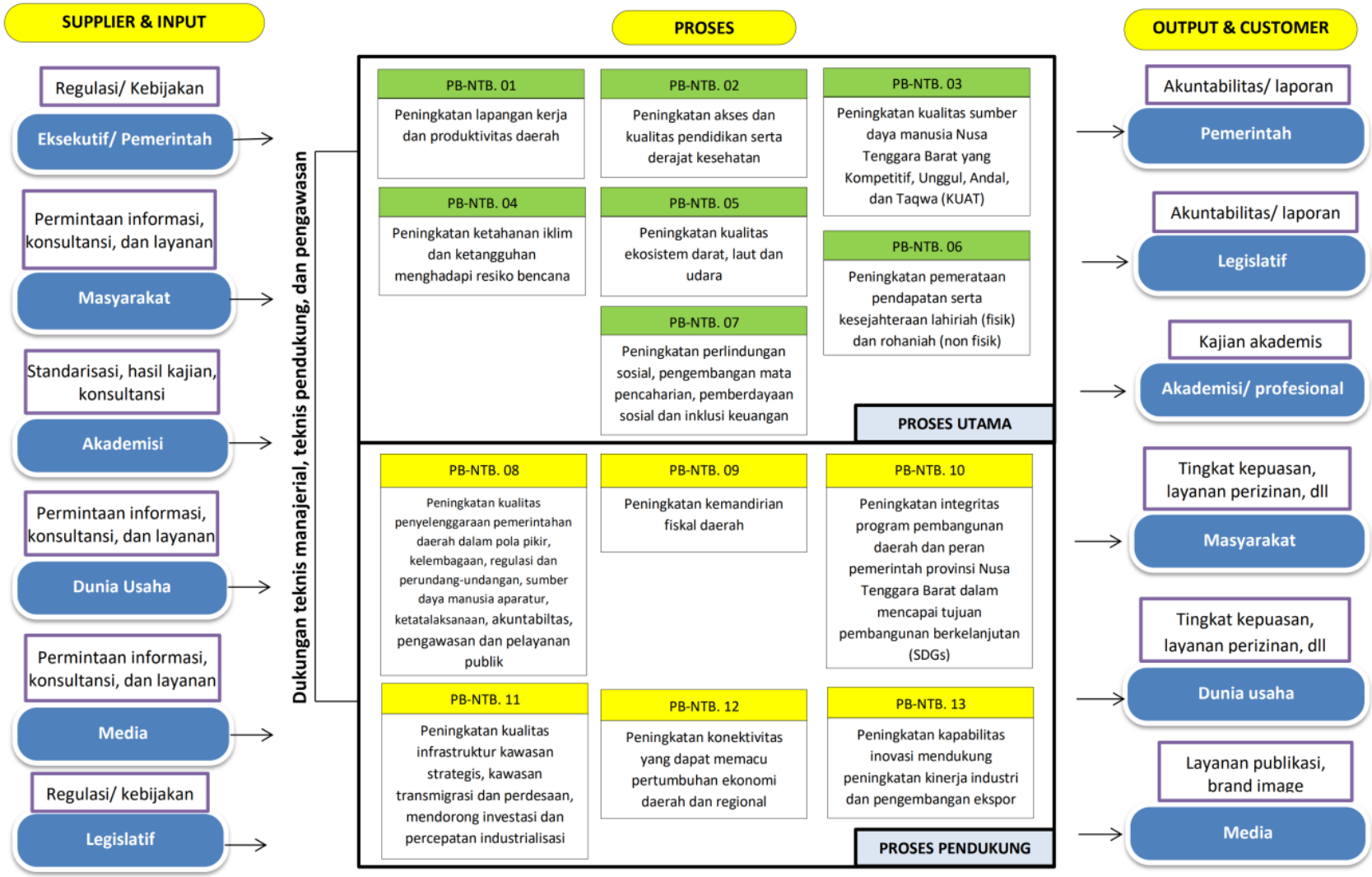
Gambar 1.16
Cascading RPJMD Misi VII



Link https://s.id/Mg0Yi

1.7 Proses Bisnis

Gambar 1.17
Proses Bisnis Provinsi Nusa Tenggara Barat



1.8 Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025

Tabel 1.8
Matrik Rencana Aksi Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP
Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2026

Hasil Evaluasi zoom meeting tanggal 11 Maret Februari 2026

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Data Dukung
1.	Menyusun draft perbaikan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 dengan memastikan seluruh kinerja telah berorientasi pada hasil untuk level Gubernur begitu juga dengan indikator kinerja yang digunakan telah relevan menggambarkan kinerja tujuan/sasaran strategis. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada RPJMD 2025-2029 pada periode yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku	Pemerintah Provinsi melalui Bappeda sebagai langkah awal atas rekomendasi ini adalah dengan melakukan rapat koordinasi bersama dengan seluruh perangkat daerah Untuk selanjutnya akan dilakukan desk asistensi untuk perbaikan dokumen RPJMD 2025-2029 dan Renstra 2025-2029, khususnya yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran.	Bappeda	On proses	https://www.instagram.com/p/DVIc4-wkTjs/?igsh=MXd3Z2NoYzd6bXV1Yg
2.	Melakukan perbaikan target kinerja pada dokumen perjanjian kinerja Gubernur setiap tahunnya dengan menggunakan angka absolut, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan kinerja Provinsi NTB serta melakukan penyesuaian target kinerja yang mengacu pada target RPJMN 2025-2029;				

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Data Dukung
3.	Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan Critical Success Factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang. Setelah itu, melakukan identifikasi adanya crosscutting kinerja baik yang berasal dari internal maupun eksternal lingkup Provinsi NTB;				
4.	Melakukan perbaikan pada dokumen rencana aksi pada level perangkat daerah dengan memastikan keselarasan dengan sasaran strategis yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga dapat diketahui program/kegiatan yang relevan untuk mencapai kinerja sasaran strategis				

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Data Dukung
PENGUKURAN					
5.	Mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menyusun pedoman teknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar dapat dijadikan dasar seluruh perangkat daerah dalam menyusun SOP dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk didalamnya kebijakan mengenai pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB	1. Tim Implementasi SAKIP 2026 mengalami penyempurnaan dalam komposisi dan keanggotaannnya. Saat ini sedang dilakukan proses finalisasi SK di Biro Hukum	Bappeda	On proses	https://s.id/edHEw
		2. Selain itu juga sedang dilakuan finalisasi Rapergub Implementasi SAKIP yang di dalamnya memuat pengaturan tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja		On proses	https://s.id/P3CsI
6.	Melakukan pengembangan terhadap e-sakip Provinsi NTB sehingga dapat menyajikan capaian kinerja Gubernur secara berkala yang didapatkan dari pelaksanaan rencana aksi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Perjanjian Kinerja Gubernur.	Aplikasi e-SAKIP sudah dilakukan pengembangan, dapat diakses pada:		On proses	https://esakip.ntbprov.go.id.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Data Dukung
7.	Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja secara berkala, dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.	3. Bappeda sudah menerbitkan surat nomor: 000.7/259/Bappeda/2026 tanggal 27 Februari 2026, hal: Penginputan Data Capaian Kinerja Tahun 2025		On proses	https://s.id/H4Gd9
8.	Melakukan penyempurnaan pada dokumen IKU seluruh perangkat daerah dengan menambahkan penjelasan mengenai definisi operasional pada setiap indikator kinerja agar dapat diketahui pengertian atau makna dari indikator tersebut				
PELAPORAN KINERJA					
9.	Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menyajikan strategi atau alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, sehingga laporan kinerja bukan hanya dijadikan sebagai output akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan tahun berikutnya	1. Sudah dilakukan desk asistensi LAKIP/LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk perbaikan/penyempurnaan laporan Saat laporan ini disusun, LAKIP/LKjIP Perangkat Daerah dalam proses reviu Inspektorat.	Biro Organisasi	On proses	https://s.id/3LV2T

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Data Dukung
10.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah dengan melengkapi informasi mengenai keterkaitan antara anggaran yang sudah digunakan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sehingga pimpinan dapat segera dapat melakukan tindaklanjut atas informasi tersebut	2. Sudah dilakukan desk asistensi LAKIP/LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk perbaikan/penyempurnaan laporan	Biro Organisasi	On proses	https://s.id/3LV2T
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
11.	Mendorong seluruh perangkat daerah untuk dapat mengupload dokumen LHE AKIP Internal yang terbaru pada esr.menpan.go.id, agar dapat dapat dipastikan seluruh perangkat daerah telah mendapatkan LHE AKIP internal dari Inspektorat Provinsi NTB dan akan ditindaklanjuti	1. Inspektorat sudah menerbitkan surat Inspektur Nomor: 700/352-III/SP-II/XI/2026 tanggal 2 Maret 2026, hal:Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Menpan RB Tahun 2025	Inspektorat	selesai	https://s.id/cLIOU
12.	Mendorong Inspektorat Provinsi NTB untuk dapat mengembangkan aplikasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menambahkan	2. Aplikasi evaluasi kinerja internal e-SIAP, mulai tahun 2026 diintegrasikan dengan e-SAKIP	Inspektorat	On proses	https://esakip.ntbprov.go.id https://docs.google.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Data Dukung
	menu dalam pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan serta memberikan akses kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan dialog pada aplikasi tersebut				com/document/d/1X1uOVJL2Uv9jq9i-iP6h0IKD0Y1Cb-m9/edit?usp=sharing&ouid=107810802840933058928&rtpof=true&sd=true

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja pada LAKIP/LKjIP 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

1. Tujuan

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi NTB merumuskan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

a. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
c. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri
d. Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri
e. Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
f. Terwujudnya Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
g. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi NTB merumuskan 14 (empat belas) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif
b. Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
c. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat
d. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali
e. Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan
f. Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif
g. Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya
h. Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga
i. Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana
j. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan
k. Terwujudnya Investasi Berkelanjutan
l. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan
m. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
n. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif

2. Sasaran Strategis

Sesuai tujuan yang telah dirumuskan, Pemerintah Provinsi NTB menjabarkan dalam sasaran strategis, yang akan dicapai secara tahunan selama periode RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029. Indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi NTB
Tahun 2025 Berdasarkan RPD 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang (%)
			Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang (%)
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)
			Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)
			Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)
			Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (point)
			Persentase kota kreatif (%)
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (point)
			Persentase penanganan konflik SARA (%)
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)
			Indeks Risiko Bencana (IRB) (point)
			Bauran energi baru terbarukan (%)
		Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (point)
			Indeks Kualitas Air

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			(point)
			Indeks Kualitas Udara (point)
4	Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (point)
			Indeks Ketahanan Pangan (point)
			Indeks Kesejahteraan Sosial (kategori)
			Indeks Demokrasi (point)
		Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi (%)
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC) (%)
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
			Peningkatan Pendapatan per kapita (%)
			Tingkat Literasi Keuangan (%)
5	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP (kategori)
		Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (point)
6	Terwujudnya Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial (%)
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi (%)
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan (%)
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (%)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
7	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (point)
		Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas (%)
		Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah (point)

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi NTB
Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)
			2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
			3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
			4	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:
				a) Literasi Membaca (%)
				b) Numerasi (%)
			5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: a) Literasi Membaca (%) b) Numerasi (%)

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)
			2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
		Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)
			2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)
2	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1 Rasio kewirausahaan Daerah (%)
			2 Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)
			3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
3	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)
			2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	Inklusi Keuangan (%)
4	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)
		Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa (%)
		Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi (Koefisien)
5	Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim (%)

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
6	Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)
			2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
			3 Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif (%)
7	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1 Indeks budaya literasi (Indeks)
			2 Indeks ekspresi budaya (Indeks)
			3 Indeks warisan budaya (Indeks)
			4 Indeks ekonomi budaya (Indeks)
8	Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda (%)
			2 Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional (% (medali))
			3 Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa (%)
9	Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)
10	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)
		Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan (Indeks)

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
			2 Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik (%)
		Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1 Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar)
			2 Konsumsi Listrik per kapita (kWh)
11	Terwujudnya Investasi Berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)
12	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)
			2 Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)
			3 Rasio Konektivitas (Rasio)
13	Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang (%)
14	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a Reformasi Birokrasi General (Skor)
			1b Reformasi Birokrasi Tematik (Skor)
			2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Poin)
			3 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi (Indeks)
		Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)
			2 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah (%)
			3 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)
		Meningkatnya Keunggulan Riset dan	1 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (%)

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	2 Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah (%)

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja sebagai pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, relevan dan cukup dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Tujuan penetapan Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Pemutakhiran)
Berdasarkan RPD 2024-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	6,00-6,50	%	Hasil kesepakatan bersama Bappenas pada saat Rakortekbangnas
		Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	5,5-6,9	%	tidak ada perubahan karena on progress
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,19-2,79	%	Hasil kesepakatan bersama Bappenas pada saat Rakortekbangnas
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,65-8,66	tahun	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya yang secara rata-rata naik 0,1 poin sehingga untuk naik dari 7,87 pada tahun 2024 menjadi 9,55 pada tahun 2025 sulit untuk diwujudkan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,24-14,25	tahun	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya yang secara rata-rata naik 0,02 poin sehingga untuk naik dari 13,98 pada tahun 2024 menjadi 17 pada tahun 2025 sulit untuk diwujudkan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
		Umur Harapan Hidup (UHH)	72,92	tahun	tidak ada perubahan karena on progress dan menggunakan angka absolut
		Angka Kematian Ibu (AKI)	169	per 100.000 KH	datanya hanya tersedia 5 tahun skali, tidak ada perubahan karena on progress dan menggunakan angka absolut
		Angka Kematian Bayi (AKB)	24,64-16,85	per 1000 KH	datanya hanya tersedia 5 tahun skali, tidak ada perubahan karena on progress
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69-70	point	tidak ada perubahan karena on progress
		Persentase kota kreatif	40	%	tidak ada perubahan karena on progress
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,05-57,1	point	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya yang telah melampaui target minimal
		Persentase penanganan konflik SARA	100	%	tidak ada perubahan karena on progress
4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	25,99	%	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya yang telah melampaui target
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	119,83	point	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian dan ada perubahan metodologi perhitungan mulai tahun 2025 dengan memasukan bencana sosial bagian dari IRB
		Bauran energi baru terbarukan	25	%	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya yang telah melampaui target
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67	point	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya yang telah melampaui target
		Indeks Kualitas Air	48	point	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya yang telah melampaui target
		Indeks Kualitas Udara	50-75	point	Mempertimbangkan ada perubahan metodologi perhitungan mulai tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,19	point	tidak ada perubahan karena on progress
		Indeks Ketahanan Pangan	78,67	point	tidak ada perubahan karena on progress
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Baik	kategori	tidak ada perubahan karena on progress
		Indeks Demokrasi	Sedang (75,37-78,63)	point	Mempertimbangkan ada perubahan metodologi perhitungan mulai tahun 2025
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	2-4	%	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya
		Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	98	%	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya
		Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27,2	%	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya
		Peningkatan Pendapatan per kapita	34,48-34,57 (juta rupiah)	%	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya
		Tingkat Literasi Keuangan	65-67	%	tidak ada perubahan karena on progress
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB	kategori	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya
9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,504-1,838	point	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya
10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	70	%	tidak ada perubahan karena on progress
		Persentase capaian Pilar Pembangunan	65	%	tidak ada perubahan karena on progress

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
	peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Ekonomi			
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	69	%	tidak ada perubahan karena on progress
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	65	%	tidak ada perubahan karena on progress
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80	point	tidak ada perubahan karena on progress
12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	95	%	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya dan ada perubahan metode perhitungannya
13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	70	point	Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 3 tahun sebelumnya

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	8,6-8,63	Tahun
		2 Harapan Lama Sekolah	14,1-14,13	Tahun
		3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	10,02	%
		4 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:		
		a) Literasi Membaca	10	%
		b) Numerasi	0-10	%
		5 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:		
		a) Literasi Membaca	26,24-28,74	%
		b) Numerasi	22,68-25,18	%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	72,95	Tahun
		2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	21,7	%
3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,517	Indeks
		2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,70	Indeks
4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1 Rasio kewirausahaan Daerah	2,37	%
		2 Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,97	%
		3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,27	%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	35.408,24	Juta Rupiah/Tenaga Kerja
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,19 - 2,79	%
6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	Inklusi Keuangan	88,70	%
7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	46,00	Indeks
8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	78,83	Indeks
9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa	77,88	(%)
10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7,30	%
11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	5,3-6,4	%
12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,2	%
13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	382.813	Orang
		2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,03	%
		3 Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	3,76	%
14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1 Indeks budaya literasi	64,42	Indeks
		2 Indeks ekspresi budaya	44,48	Indeks
		3 Indeks warisan budaya	50,17	Indeks
		4 Indeks ekonomi budaya	44,26	Indeks
15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	70,18	%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		2 Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	9,3 (47 medali)	% (medali)
		3 Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	100	%
16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,59	Indeks
17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,19	Indeks
18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	0,331	Indeks
		2 Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	0,10	%
19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1 Intensitas energi primer	192,23	SBM/Rp milyar
		2 Konsumsi Listrik per kapita	751,00	kWh
20	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	61,09	Rp Triliun
21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,21	Indeks
		2 Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	71,68-71,7	%
		3 Rasio Konektivitas	0,83	Rasio
22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	83,38	%
23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a Reformasi Birokrasi General	69,49	Skor
		1b Reformasi Birokrasi Tematik	9,28	Skor
		2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,100	Poin
		3 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	91,50	Indeks

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1 Indeks Demokrasi Indonesia	75,37-78,63	Indeks
		2 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	65,00	%
		3 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	75,00	Indeks
25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	50	%
		2 Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	95,58	%

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025

Rumus Capaian Kinerja indikator positif

Capaian (%) = $\frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$

Rumus Capaian Kinerja indikator negatif

Capaian (%) = $\left(\frac{Target-(Realisasi-Target)}{Target}\right)\ x\ 100\%$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB ini memuat capaian kinerja atas perjanjian kinerja dengan target yang sudah dimutakhirkan untuk kinerja atas dokumen perencanaan tahun 2024-2026 dan target atas dokumen perencanaan tahun 2025-2029. Pembahasan akuntabilitas kinerja setiap sasaran strategis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran. Terdapat 13 sasaran strategis dengan 36 indikator kinerja yang didasarkan atas Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan 25 sasaran strategis dan 53 indikator kinerja yang didasarkan atas Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Indikator kinerja ada 2 jenis, yaitu indikator kinerja yang bersifat positif dan bersifat negatif. Indikator kinerja yang bersifat positif adalah indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan jika capaiannya semakin besar, sedangkan indikator kinerja yang bersifat negatif adalah indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan jika capaiannya semakin kecil. Dari 89 indikator terdapat 9 indikator yang bersifat negatif, yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Intensitas Energi Primer, Indeks Risiko Bencana (IRB), Tingkat Inflasi, Prevalensi Stunting, dan Indeks Ketimpangan Gender. Perhitungan efisiensi sumber daya hanya digunakan untuk anggaran saja. Efisiensi anggaran hanya diperhitungkan terhadap target yang tercapai atau target yang belum tercapai namun persentase capaiannya di atas 95%. Untuk capaian selain kriteria tersebut, maka disimpulkan tidak terdapat efisiensi anggaran.

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1.1 RPD

3.1.1.1 Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah diukur dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang, Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun capaian sasaran kinerja Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Dalam RPD 2024-2026	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100) atau (9=(3-(6-3)/3)*100	10 (10=6/5*100) atau (10=(5-(6-5)/5)*100	11 (11=6/7*100) atau (11=(7-(6-7)/7)*100	12 (12=6/8*100) atau (12=(8-(6-8)/8)*100
Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5,30	6-7,5	6,00 – 6,5	0,22	6,2-7,8	5,11	4,15	3,67	3,55	4,31
Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	3,87	5,5-6,9	5,5-6,9	6,55	5,7-7,8	-	169,25	119,09	114,91	-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,73	2,85	2,19-2,79	3,06	2,63	4,85	87,91	90,32	83,65	136,91

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang

a. Analisis Capaian Kinerja

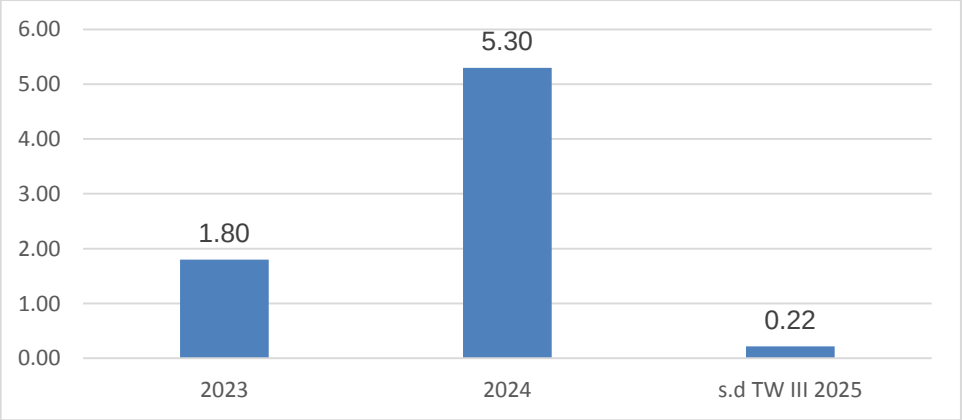
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang tahun 2025 sampai dengan triwulan III sebesar 0,22% (berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB tanggal 5 November 2025) atau mencapai 3,67% dari target yang ditetapkan sebesar 6,0-6,5%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja indikator laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang sampai dengan triwulan III tahun 2025 (0,22%) lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Pada tahun 2024 sebesar 5,30% pada tahun 2024 berkurang 5,08 poin. Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2024, namun mengalami penurunan pada triwulan III tahun 2025. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang mencapai 1,80%, meningkat menjadi 5,30% di tahun 2024. Namun di sampai dengan triwulan III tahun 2025. Realisasi kinerja indikator laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang
Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III)



Sumber : BPS NTB 2023-2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah 0,22 %, lebih rendah dibandingkan target pada akhir RPD tahun 2026 (6,2-7,8%) atau mencapai kinerja sebesar 3,55%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang untuk Provinsi NTB sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 0,22%, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,11%) atau mencapai kinerja sebesar 4,31%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Ekonomi NTB sampai dengan triwulan III 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,22%, dimana 16 lapangan usaha mengalami pertumbuhan, sementara 1 lapangan usaha mengalami kontraksi, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) serta laju pertumbuhannya sesuai rilis BPS pada tanggal 5 November 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1a
Perbandingan Nilai PDRB ADHK Tahun 2024 dan Triwulan III 2025

Lapangan Usaha	Tahun 2024	TW III Tahun 2025	Kontribusi TW III 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.992,49	6.435,22	22,92
Pertambangan dan Penggalian	20.342,79	3.865,72	15,36
Industri Pengolahan	4.839,21	2.491,52	7,66
Pengadaan Listrik dan Gas	129,45	34,30	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	81,03	21,01	0,07
Konstruksi	10.884,96	2.921,18	9,13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.603,08	4.158,39	14,27
Transportasi dan Pergudangan	6.090,24	1.611,21	5,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.686,30	480,62	1,88
Informasi dan Komunikasi	3.145,87	814,54	1,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.037,08	1.099,51	3,95
Real Estate	3.398,75	890,14	2,82
Jasa Perusahaan	206,13	53,15	0,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.576,67	1.396,35	5,43
Jasa Pendidikan	5.256,24	1.342,05	4,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.540,69	640,29	1,83
Jasa lainnya	2.604,26	665,66	2,06
Produk Domestik Regional Bruto	**109.415,25**	**28.920,86**	**100**

Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai PDRB ADHB sampai triwulan III 2025 mencapai Rp 28.920,86 M dengan kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 6.435,22 M, (22,92%) kemudian diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar Rp 3.865,72 M (15,36%) dan

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 4.158,39 (14,27%).

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah pertambangan dan penggalian sebesar 27,37%. Hal ini disebabkan adanya penurunan produksi konsentrat tembaga dan gangguan teknis smelter yang berdampak pada temhambatnya kegiatan ekspor.

Pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2025 menunjukkan tren peningkatan setelah sebelumnya menunjukkan kontraksi, yaitu sebesar -1,43% pada triwulan I dan -1,12% pada triwulan II. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan di sisi produksi terutama industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan 54,86%. Sementara di sisi pengeluaran komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,25%. Sektor industri pengolahan melonjak drastis, berbalik positif setelah sebelumnya kontraksi akibat penurunan produksi tambang, ditopang smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah meningkat, mencerminkan pemulihan daya beli dan aktivitas ekonomi domestik.di sisi lain, produksi padi naik 37,15 persen pada triwulan III 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor pariwisata juga tumbuh kuat, didukung kenaikan jumlah tamu hotel bintang dan non bintang. Pertumbuhan kredit perbankan, khususnya di sektor pertambangan, tetap solid dengan NPL terjaga di bawah 2%.

Untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan tambang di tengah menurunnya kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian, pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi lapangan usaha lainnya terutama lapangan usaha yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, seperti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha industri pengolahan. Untuk mendorong peningkatan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, pemerintah provinsi melakukan strategi hilirisasi berbasis agromaritim dengan fokus utama meliputi revitalisasi penyuluh dan pendayagunaan sarana, penerapan teknologi modern serta pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan Roadmap Industri Agromaritim 2025-209. Penyusunan roadmap ini juga bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari sektor hulu ke hilir. Adapun untuk mendorong lapangan usaha perdagangan, pemerintah provinsi NTB melakukan upaya yang komprehensif melalui : (a) Penguatan ekspor dan hilirisasi. Pemerintah mendorong meningkatakan nilai tambah produk melalui industrialsiasi pertanian dan hilirisasi pangan lokal sehingga dapat diekspor, (b) Optimalsiasi sektor UMKM dan pariwisata. Event-event skala nasional maupun internasional yang dilaksanakan di NTB merupakan ajang promosi UMKM dan pariwisata untuk meningkatkan

belanja wisatawan, (c) Digitalisasi dan koperasi. Pemerintah daerah mendorong digitalisasi ekonomi keuangan terutama UMKM serta mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih untuk menciptakan ekonomi inklusif.

Untuk mendorong pertumbuhan lapangan usaha konstruksi, pemerintah Provinsi NTB melakukan beberapa upaya diantaranya : (a) Penguatan kompetensi sumber daya manusia dengan melatih calon tenaga kerja teknis dan menggunakan SIMKERJA untuk mempermudah akses informasi lapangan kerja konstruksi, (b) Pembangunan infrastruktur strategis dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi (darat dan laut) serta penunjang pariwisata yang didukung APBN dan skema kerjasama Pemerintah dan badan usaha (KPBU); (c) Penguatan pelaku usaha local dengan mendorong partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi local dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, (d) Peningkatan jaminan sosial Jamsostek. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan peningkatan Universal Coverage Jamsostek untuk melindungi pekerja konstruksi dan informal.

Sementara itu, untuk meningkatkan lapangan usaha industri pengolahan, pemerintah Provinsi NTB melakukan upaya-upaya diantaranya : (a) hilirisasi industri pertambangan dengan mengoptimalkan produksi katoda tembaga sebagai penggerak utama pertumbuhan serta mendorong perpanjangan izin ekspor untuk menjaga stabilitas ekonomi, (b) industrialisasi pertanian dan pangan local melalui transformasi sektor pertanian dengan penguatan hilirisasi panngan local dan mengintegrasikan petani ke dalam rantai nilai industry agar hasil pertanian memiliki nilai tambah, (c) penguatan industri UMKM dengan mendorong pengembangan industry kecil menengah (IKM) melalui teknologi dan akses pasar untuk makanan dan minuman lokal. Keberadaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut mempengaruhi peningkatan kontribusi industr pengolahan. Sampai pertengahan September 2025 terdapat 269 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif di Provinsi NTB yang melayani para penerima manfaat. Program MBG ini secara signifikan telah meningkatkan serapan bahan baku local dan menggerakkan industri makanan dan minuman lokal.

Adapun permasalahan dan kendala dalam pencapaian indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang

Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1. Sektor pertambangan dan penggalian (terutama tembaga) mengalami penurunan tajam (kontraksi) akibat penurunan produksi PT AMNT. 2. Larangan ekspor mineral mentah dan turunnya ekspor luar negeri NTB secara signifikan.	1. Optimalisasi sektor non tambang seperti sektor industri pengolahan, serta sektor pertanian dan peternakan, termasuk dengan melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi ekspor tambang. 2. Akselerasi konsumsi domestic dan pariwisata dengan memanfaatkan momen seperti bilan maulid dan even-even MICE untuk mendongkrak pariwisata dan hunian hotel, mengurangi ketergantungan pada wisatawan musiman. 3. Peningkatan investasi dan infrastruktur untuk mendorong hilirisasi tambang dengan tujuan meningkatkan nilai tambah ditengah tantangan ekspor yang fluktuatif. 4. Melakukan kolaborasi tingkat pusat untuk mendorong percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur.

Sumber: Bappeda NTB 2025

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang tahun 2025 adalah sebesar Rp 912.147.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 85.157.893,00. Efisiensi anggaran dihitung hanya dengan melihat sisa anggaran pelaksanaan program, karena karena target tidak tercapai. Efisiensi dari sisa anggaran sebesar Rp.826.989.307,00

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Program yang dilaksanakanoleh Dinas Energi dan

SUmber Daya Mineral adalah Program Pengelolaan Mineral dan Batubara (realisasi anggaran 9,34%) dengan kegiatan:

a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
b. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	912,147,200.00	85,157,893.00	9.34
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	145,801,125.00	36,720,690.00	25.19
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	646,685,525.00	42,662,203.00	6.60
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	119,660,550.00	5,775,000.00	4.83

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang

a. Analisis Capaian Kinerja:

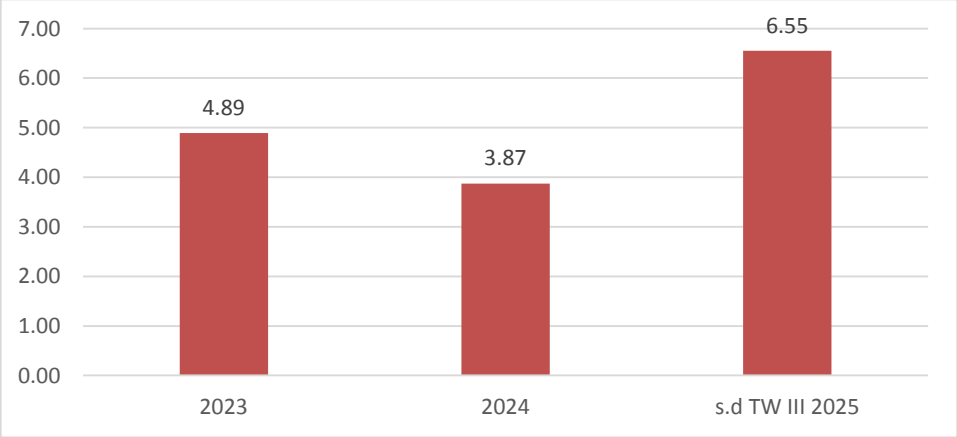
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang tahun 2025 sampai dengan triwulan III sebesar 6,55% (berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB tanggal 5 November 2025) atau mencapai 119,09% dari target yang ditetapkan (5,5-6,9%). Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/id/news/2025/11/05/95/ekonomi-ntb-tumbuh-2-82-persen-di-triwulan-iii.html

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja indikator laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sampai dengan triwulan III tahun 2025 (6,55%) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (3,87%) Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun mengalami peningkatan di triwulan III tahun 2025. Realisasi kinerja indikator laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.2
Realisasi Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III)



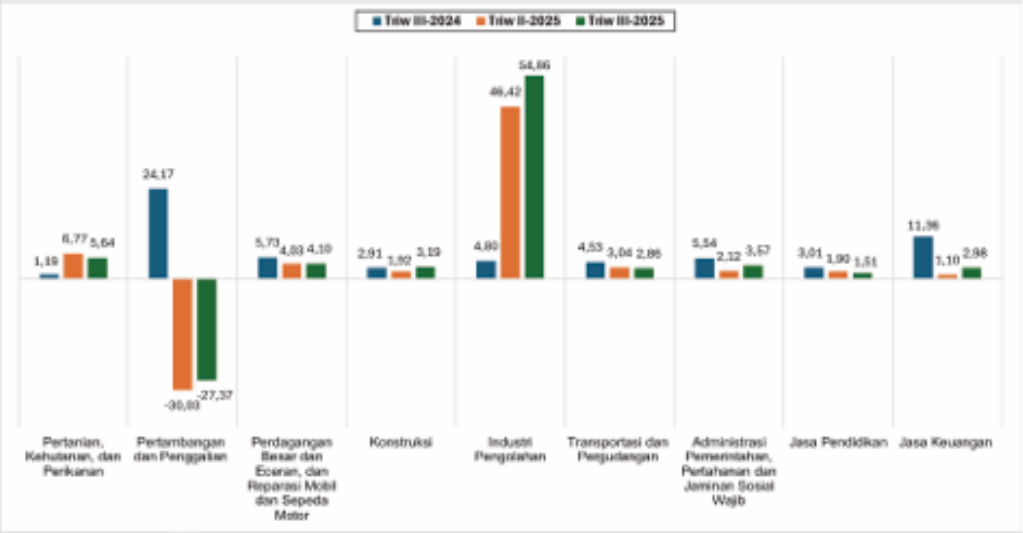
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025 diolah

Laju pertumbuhan tanpa tambang Provinsi NTB sampai triwulan III tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,55% (c-to-c) Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah usaha industri pengolahan, dan ada 1 (satu) lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan antara lain Industri Pengolahan tumbuh sebesar 54,86%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 6,17%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 5,64%; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 5,20%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,10%; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 4,06%; Jasa lainnya tumbuh sebesar 4,06 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 3,71%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 3,57%; Real Estate tumbuh sebesar 3,29%; Konstruksi tumbuh sebesar 3,19%; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 3,10%; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 2,98%; Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 2,86%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 1,77%; Jasa Pendidikan

tumbuh sebesar 1,51%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami konstraksi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 27,37%

Grafik 3.3

Pertumbuhan PDRB (%) Beberapa Komponen Lapangan Usaha (c-to-c)



Sumber : BPS NTB 2025

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sampai dengan triwulan III tahun 2025 realisasinya sebesar 6,55%, sesuai dengan target akhir RPD tahun 2026 yaitu sebesar 5,7-7,8% atau capaian kinerja sebesar 114,91%.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pemerintah tidak memiliki indikator laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, sehingga indikator realisasi pertumbuhan ekonomi tanpa tambang tidak dapat dibandingkan dengan nasional.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan 16 sektor lapangan usaha pada PDRB. Semua lapangan usaha yang berkontribusi dalam laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang di triwulan III tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif, namun hampir sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan tahun 2024. Distribusi kontribusi Lapangan usaha dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa tambang dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Distribusi Lapangan Usaha dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tanpa Tambang Provinsi NTB (%)

Lapangan Usaha	2024	s.d Triwulan III 2025
Pertanian,kehutanan dan perikanan	21,45	22,92
Industri Pengolahan	3,87	7,66
Pengadaan Listrik dan Gas	0	0,09
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,07	0,07
Konstruksi	9,11	9,13
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor	14,2	14,27
Transportasi dan pergudangan	5,83	5,85
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,75	1,88
Informasi dan komunikasi	2,00	1,91
Jasa keuangan dan asuransi	3,83	3,95
Real estate	2,89	2,82
Jasa perusahaan	0,18	0,17
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	5,82	5,43
Jasa pendidikan	4,77	4,59
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,93	1,83
Jasa lainnya	2,10	2,06

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hanya ada 8 lapangan usaha kontribusinya meningkat, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta jasa Lainnya. Adapun lapangan usaha yang relatif tetap adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Walaupun beberapa lapangan usaha mengalami penurunan di triwulan III 2025, namun kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi non tambang tidak sebesar lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai 15,36 persen. Namun penurunan kontribusi beberapa lapangan usaha ini tetap perlu mendapatkan perhatian sehingga laju pertumbuhan ekonomi non tambang di tahun 2025 daoat melampaui target yang ditetapkan. Adapun penyebab menurunnya kontribusi beberapa lapangan usaha di luar pertambangan dan penggalian

merupan efek domino penurunan produksi tambang. Pertambangan adalah tulang punggung PDRB NTB, sehingga Ketika sektor ini mengalami gangguan produksi dan kontraksi, hal ini menyeret lapangan usaha penunjang lainnya, seperti sektor jasa pendukung pertambangan serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan melambat yang berdampak pada stagnasi pendapatan masyarakat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak maksimal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang adalah dengan meningkatkan produksi pada lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha Industri Pengolahan. Selain itu, pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan beberapa sektor unggulan sebagai penggerak ekonomi baru. Sektor agromaritim menjadi prioritas utama, dengan fokus pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan mengembangkan potensi agrowisata.

Pemerintah provinsi NTB juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pelatihan, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan inovasi produk. Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata juga diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Upaya Pemerinth Provinsi NTB dalam meningkatkan produksi lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB adalah:

1. Menciptakan lingkungan yang aman iklim usaha yang kondusif untuk mendorong investasi di daerah dengan menyusun regulasi :
    a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengaturan Penanaman Modal yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah
    b. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB Tahun 2023-2043
    c. Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
    d. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Koperasi.

2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM melalui pelatihan dan pembinaan, serta kemudahan terhadap akses perbankan dan keuangan.
3. Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor agromaritim dalam upaya meningkatkan produksi dan distribusi produk-produk agromaritim maupun olahannya.
4. Pengembangan destinasi wisata berbasis alam dan budaya
5. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang sebesar Rp708.962.066.443,00. Realisasi anggaran sebesar Rp261.270.844.748,60,00. Efisiensi anggaran sebesar 69,06%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Konektivitas

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/ Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	708.962.066.443,00	261.270.844.748,60	5,5	6,55	39.888.678.587,57	128.902.193.898,73	0,31	0,69	69,06

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 dipengaruhi kebijakan efisiensi dari Pemerintah. Kebijakan efisiensi dilakukan melalui penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang, sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 3,24%) dengan kegiatan:
    1. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
    2. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
b. Program Hubungan Industrial (realisasi anggaran 66,32%) dengan kegiatan:
    1. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
    2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi
    3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (Ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (Umsp), Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (Umsk)
c. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa (realisasi anggaran 47,12%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
    2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    3. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
d. Program Kesejahteraan Rakyat (realisasi anggaran 27,63%) dengan kegiatan:
    1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
    2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
e. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,07%) dengan kegiatan:
    1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
    2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)
    3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
f. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisasi anggaran 15,28%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
    2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
    3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

g. Program Pelayanan Penanaman Modal (realisasi anggaran 84,22%) dengan kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
h. Program Pemasaran Pariwisata (realisasi anggaran 27,99%) dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 98,70%) dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
j. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (realisasi anggaran 5,86%) dengan kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
k. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (realisasi anggaran 52,375) dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
l. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) (realisasi anggaran 37,04%) dengan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
m. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (realisasi anggaran 44,42%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    2. Pelaksanaan Otonomi Daerah
    3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah
n. Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggaran 22,28%) dengan kegiatan
    1. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
    3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
o. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan (realisasi anggaran 14,09%) dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
p. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah (realisasi anggaran 19,78%) dengan kegiatan:
    1. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan
    2. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan

3. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi Dan Teknologi

q. Program Penempatan Tenaga Kerja (realisasi anggaran 49,23%) dengan kegiatan:
   1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   3. Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi
   4. Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah Tka, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
r. Program Pengawasan Keamanan Pangan (realisasi anggaran 25,54%) dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
s. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi
   2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk)
   3. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
   4. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
   5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
   6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
t. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (realisasi anggaran 0,72%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi
   2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
u. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (realisasi anggaran 8,73%) dengan kegiatan:
   1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi
   2. Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
   3. Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan

v. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (realisasi anggaran 9,97%) dengan kegiatan:
    1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
    2. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
    3. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
w. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 51,99%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
    2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
    3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
x. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (realisasi anggaran 6,85%)
    1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut dengan kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat
y. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (realisasi anggaran 10,76%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
    2. Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
    3. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 Gt Yang Beroperasi Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
z. Program Pengelolaan Persampahan (realisasi anggaran 16,15%) dengan kegiatan Penanganan Sampah Di Tpa/Tpst Regional
aa. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (realisasi anggaran 19,61%) dengan kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif
bb. Program Pengembangan Ekspor (realisasi anggaran 17,91%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

cc. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (realisasi anggaran 25,46%) dengan kegiatan:
    1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
    2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
dd. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (realisasi anggaran 31,01%) dengan kegiatan:
    1. Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
    2. Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
ee. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (realisasi anggaran 6,37%) dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki), Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Provinsi
ff. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (realisasi anggaran 11,94%) dengan kegiatan:
    1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
    3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan
    4. Kesejahteraan Hewan
gg. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (realisasi anggaran 9,64%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
    2. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
hh. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (realisasi angaran 19,65%(dengan kegiatan:
    1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar
    3. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
ii. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (realisasi anggaran 8,16%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
    2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
    3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

jj. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (realisasi anggaran 23,53%) dengan kegiatan:
   1. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
   2. Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
   3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi

kk. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (realisasi anggaran 6,34%) dengan kegiatan:
   1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
   2. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman
   3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
   4. Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi
   5. Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi
   6. Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor
   7. Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain

ll. Program Penyelenggaraan Jalan (realisasi anggaran 9,67%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

mm. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (realisasi anggaran 1,31%) dengan kegiatan:
   1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi
   2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
   3. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

nn. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (realisasi anggaran 51,33%) dengan kegiatan:
   1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
   2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
   3. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi

oo. Program Perekonomian Dan Pembangunan (realisasi anggan 41,33%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian

2. Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam
3. Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Bumd Dan Blud

pp. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (realisasi anggaran 49,60%) dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

qq. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 64,35%) dengan kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Program dan kegiatan yang tidak efektif dalam pencapaian target indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang, sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (realisasi anggaran 0%) dengan kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (realisasi angggaran 0%) dengan kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota
c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (realisasi anggaran 0%) dengan kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	73,719,662.00	3.24
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	73,719,662.00	3.87
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0.00	0.00
Program Hubungan Industrial	2,539,899,764.00	1,684,403,165.00	66.32

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,799,900.00	99.60
Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	76,933,400.00	12,391,200.00	16.11
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2,412,966,364.00	1,622,212,065.00	67.23
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1,019,097,100.00	480,183,478.00	47.12
Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	191,460,700.00	86,312,141.00	45.08
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	95,000,000.00	42,764,257.00	45.02
Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	732,636,400.00	351,107,080.00	47.92
Program Kesejahteraan Rakyat	35,179,785,155.00	9,718,826,266.00	27.63
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18,214,848,295.00	8,671,961,381.00	47.61
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16,787,387,410.00	977,531,085.00	5.82
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	177,549,450.00	69,333,800.00	39.05
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	3,442,255,431.00	50.07
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya	4,847,142,500.00	2,649,413,414.00	54.66

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Alam)			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	211,678,850.00	15.28
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	194,132,600.00	17.00
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	16,574,250.00	7.37
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	972,000.00	5.12
Program Pelayanan Penanaman Modal	38,813,000.00	32,688,000.00	84.22
Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	38,813,000.00	32,688,000.00	84.22
Program Pemasaran Pariwisata	2,871,000,000.00	803,731,931.00	27.99
Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2,871,000,000.00	803,731,931.00	27.99
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	522,435,240.00	30,602,700.00	5.86
Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	522,435,240.00	30,602,700.00	5.86
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,604,949,300.00	1,887,739,731.00	52.37

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,604,949,300.00	1,887,739,731.00	52.37
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	79,687,000.00	29,520,000.00	37.04
Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	79,687,000.00	29,520,000.00	37.04
Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1,290,872,600.00	573,397,243.00	44.42
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	341,794,600.00	99,336,012.00	29.06
Pelaksanaan Otonomi Daerah	546,563,000.00	273,275,731.00	50.00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	402,515,000.00	200,785,500.00	49.88
Program Penanggulangan Bencana	2,354,640,549.00	524,512,786.00	22.28
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	830,956,549.00	31,749,600.00	3.82
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1,343,034,000.00	447,396,986.00	33.31
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	180,650,000.00	45,366,200.00	25.11
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1,347,568,000.00	189,859,800.00	14.09
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1,347,568,000.00	189,859,800.00	14.09

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3,081,793,430.00	609,530,670.00	19.78
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	240,925,000.00	18,286,800.00	7.59
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	1,609,284,640.00	534,610,060.00	33.22
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	637,130,290.00	37,083,110.00	5.82
Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	594,453,500.00	19,550,700.00	3.29
Program Penempatan Tenaga Kerja	305,571,200.00	150,435,650.00	49.23
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59,679,200.00	0.00	0.00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100,192,000.00	57,739,750.00	57.63
Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	120,200,000.00	78,194,150.00	65.05
Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25,500,000.00	14,501,750.00	56.87
Program Pengawasan Keamanan Pangan	104,400,000.00	26,665,000.00	25.54
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	104,400,000.00	26,665,000.00	25.54
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100,000,000.00	0.00	0.00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	100,000,000.00	0.00	0.00
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	3,938,767,000.00	28,276,000.00	0.72
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	1,111,910,000.00	26,324,000.00	2.37
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2,826,857,000.00	1,952,000.00	0.07
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	725,985,000.00	63,409,675.00	8.73
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	51,322,000.00	19,320,000.00	37.64
Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	9,617,000.00	3,760,000.00	39.10
Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	665,046,000.00	40,329,675.00	6.06
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	918,764,200.00	91,617,893.00	9.97

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	145,801,125.00	36,720,690.00	25.19
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	653,302,525.00	49,122,203.00	7.52
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	119,660,550.00	5,775,000.00	4.83
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	217,552,406,077.60	51.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	121,014,796,125.80	56.45
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	81,649,478,124.80	45.05
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	14,888,131,827.00	65.15
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,540,342,980.00	174,133,980.00	6.85
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,110,000.00	1,092,000.00	98.38
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	275,787,000.00	0.00	0.00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	2,263,445,980.00	173,041,980.00	7.65
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4,205,135,600.00	452,537,950.00	10.76
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2,578,568,800.00	451,139,950.00	17.50
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan	1,624,988,000.00	320,000.00	0.02

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Perikanan Provinsi			
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,578,800.00	1,078,000.00	68.28
Program Pengelolaan Persampahan	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	627,000,000.00	122,931,700.00	19.61
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif	627,000,000.00	122,931,700.00	19.61
Program Pengembangan Ekspor	257,630,000.00	46,133,382.00	17.91
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	257,630,000.00	46,133,382.00	17.91
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	824,394,012.00	209,901,200.00	25.46
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	323,597,900.00	177,457,400.00	54.84
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	500,796,112.00	32,443,800.00	6.48
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,461,963,050.00	763,522,650.00	31.01
Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1,711,963,050.00	263,522,650.00	15.39
Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	750,000,000.00	500,000,000.00	66.67

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	227,820,000.00	14,517,960.00	6.37
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	227,820,000.00	14,517,960.00	6.37
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,850,536,200.00	340,481,067.00	11.94
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	610,324,500.00	170,611,867.00	27.95
Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	48,108,000.00	2,802,000.00	5.82
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan	2,135,818,700.00	147,195,700.00	6.89
Kesejahteraan Hewan	56,285,000.00	19,871,500.00	35.31
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	373,530,430.00	36,013,500.00	9.64
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	89,655,400.00	25,036,000.00	27.92
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	283,875,030.00	10,977,500.00	3.87
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,503,174,645.00	295,392,550.00	19.65
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,400,000.00	550,000.00	39.29
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar	1,498,835,645.00	293,272,750.00	19.57

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2,939,000.00	1,569,800.00	53.41
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,454,787,100.00	200,433,150.00	8.16
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	83,200,000.00	22,710,500.00	27.30
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2,311,287,100.00	136,362,650.00	5.90
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	52,800,000.00	33,860,000.00	64.13
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	634,997,000.00	149,432,000.00	23.53
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	485,497,000.00	143,464,500.00	29.55
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	23,500,000.00	3,967,500.00	16.88
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	126,000,000.00	2,000,000.00	1.59
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,100,376,000.00	0.00	0.00
Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	1,100,376,000.00	0.00	0.00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	27,236,030,090.00	1,727,258,095.00	6.34
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	15,503,965,950.00	300,390,097.00	1.94

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	1,862,051,080.00	767,549,733.00	41.22
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	130,400,000.00	56,256,200.00	43.14
Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	408,754,950.00	98,224,400.00	24.03
Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi	1,116,071,154.00	411,036,515.00	36.83
Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor	35,622,356.00	8,571,650.00	24.06
Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	8,179,164,600.00	85,229,500.00	1.04
Program Penyelenggaraan Jalan	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	19,429,740,600.00	254,191,300.00	1.31
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi	18,811,850,000.00	62,633,900.00	0.33
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	169,500,000.00	0.00	0.00
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	173,852,600.00	71,482,400.00	41.12
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	196,936,000.00	101,085,570.00	51.33
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	38,106,000.00	0.00	0.00
Koordinasi Dan Sinkronisasi	35,469,000.00	18,451,500.00	52.02

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Perencanaan Tata Ruang			
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	123,361,000.00	82,634,070.00	66.99
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,682,713,200.00	695,413,450.00	41.33
Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian	550,658,600.00	308,289,330.00	55.99
Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam	529,000,000.00	224,321,000.00	42.40
Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi BUMD Dan BLUD	603,054,600.00	162,803,120.00	27.00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4,232,888,671.00	2,099,422,735.00	49.60
Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4,232,888,671.00	2,099,422,735.00	49.60
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	10,489,100.00	64.35
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	10,489,100.00	64.35

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

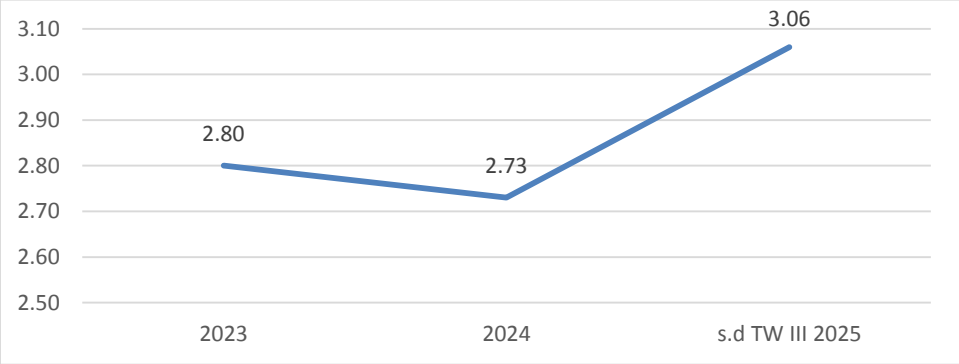
Realisasi TPT triwulan III tahun 2025 mencapai 3,06% atau mencapai 90,32% dari target yang ditetapkan (2,79%).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 3,06%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 sampai 4 orang penganggur. Melihat tren TPT sejak 2023-triwulan III 2025, TPT NTB mengalami fluktuasi.

Capaian TPT Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.4
TPT Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) (Agustus)



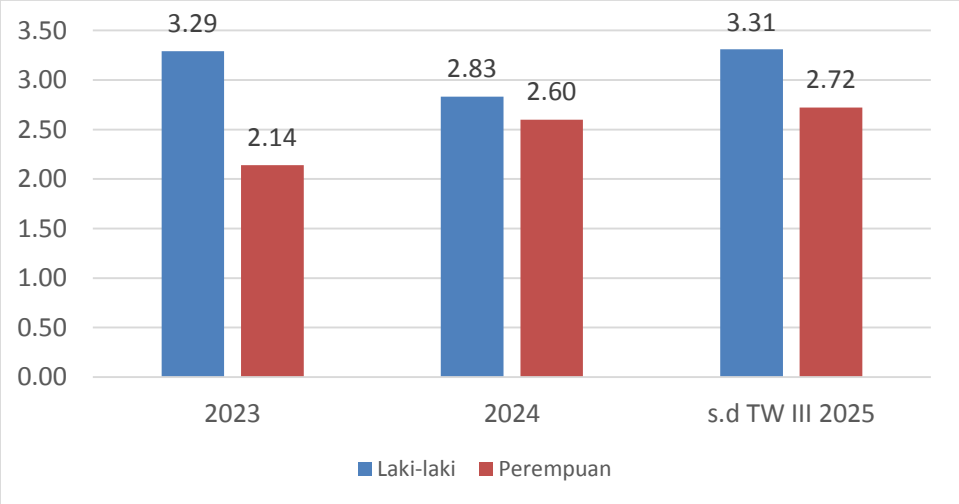
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Pada tahun 2023 TPT Provinsi NTB sebesar 2,80%, kemudian menurun menjadi 2,73% di tahun 2024. Pada triwulan III tahun 2025 TPT Provinsi NTB kembali mengalami peningkatan menjadi 3,06%.

Berdarsakan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 3,29%, lebih tinggi dari TPT perempuan sebesar 2,14%. Dibandingkan Agustus 2024, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,46 poin, sementara TPT perempuan naik sebesar 0,46 poin. TPT kembali mengalami kenaikan, bila dibandingkan dengan Agustus 2025. TPT laki-laki naik sebesar 0,48 % sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 0,12 % poin. Peningkatan TPT yang signifikan ini disebabkan ketidakseimbangan antara tingginya pertumbuhan angkatan kerja baru dan terbatasnya lapangan kerja, terutama akibat investasi padat modal (smelter/pertambangan) yang kurang menyerap tenaga kerja, serta ketidaksesuaian skill lulusan (vokasi/perguruan tinggi) dengan kebutuhan industri.

Capaian TPT Tahun 2023-2025 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.5
TPT Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) (Agustus)
Menurut Jenis Kelamin

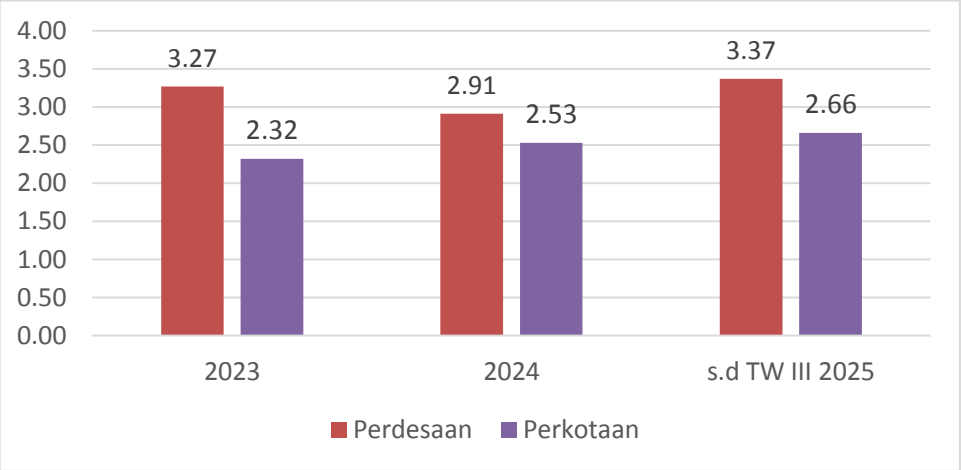


Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan wilayah, TPT perkotaan sebesar 3,27% lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan yang sebesar 2,32%. Pada Agustus 2024 TPT perkotaan turun 0,36%, sementara TPT perdesaan naik 0,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Agustus 2025, TPT perkotaan kembali mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen dan TPT perdesaan naik 0,13 poin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir TPT perkotaan maupun perdesaan mengalami fluktuasi.

Capaian TPT Tahun 2023-2025 menurut wilayah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6
TPT Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (triwulan III) (Agustus)
Menurut Wilayah Perkotaan dan Perdesaan



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   TPT pada akhir RPD tahun 2026 ditargetkan sebesar 2,63% dan realisasi triwulan III tahun 2025 sebesar 3,06%. Realisasi ini mencapai 83,65% dari target.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Realisasi TPT Provinsi NTB mencapai 3,06%, capaiannya lebih baik dibandingkan realisasi TPT Nasional sebesar 4,85%. Realisasi ini mencapai 136,91% atas standar nasional.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   TPT di Provinsi NTB tahun 2025 mencapai 3,06% (belum memenuhi target 2,79%). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) Pertumbuhan angkatan kerja menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2023- 2025 sehingga perlu diupayakan perencanaan pertumbuhan/penciptaan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat terserap dalam pasar kerja, (2) Penguatan dan peningkatan skill angkatan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, dimulai dari jenis keahlian yang ditawarkan di sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun di Balai Latihan Kerja

(BLK), Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) harus memperhatikan skill yang dibutuhkan pasar kerja sehingga keluaran sekolah kejuruan ataupun lembaga pelatihan dapat terserap di pasar kerja. Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dan *Training Need Analysis* (TNA) serta kolaborasi dengan DUDIKA (KADIN) melalui Tim Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Provinsi NTB menjadi penting dalam menentukan jenis kejuruan yang akan dilatih, penyelenggaraan program pemagangan dan penempatan peserta pelatihan.

Langkah dan upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja atau menurunkan TPT tahun 2025 yaitu: (1) Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; (2) Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja berstandar SKKNI; (3) Melakukan survei dan penilaian akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja; (4) Job Fair/Bursa Kerja; (5) Penyediaan layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran; (6) pembinaan operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL Antar Kerja Lokal); dan (7) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yaitu dilakukan inovasi dalam bentuk program “PePADu Plus” atau Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus yaitu :

1. Revitalisasi BLK dengan melengkapi instrumen yang dibutuhkan mulai dari hulu ke hilir. Dimulai dari proses perencanaan secara kolaboratif dan terintegrasi, bersama lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi serta dunia usaha dunia industri.
2. Penyiapan kompetensi calon tenaga kerja di lembaga pelatihan kerja, baik di BLK/LLK maupun LPKS secara terpadu bersama dunia industri hingga fasilitasi dan pendampingan pasca pelatihan bersama stakeholder terkait.
3. Terciptanya link and match antara supply and demand skill tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pembinaan dan pendampingan bagi peserta pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru dan penciptaan kesempatan kerja.
4. Membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) sesuai SK Gubernur No. 050.13-100 Tahun 2024. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku koordinator bidang pelatihan vokasi dalam TKDV NTB, serta melibatkan pula seluruh unsur terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Harapannya TKDV NTB semakin mengefektifkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja NTB.

5. Penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dari yang biasa dilaksanakan selama ini, agar keluarannya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri.
6. Pola pelatihan terintegrasi dengan BPVP Lombok Timur, BLKDLN, dan BLK/LLK kabupaten/kota bersama LPKS se NTB dan dunia usaha dunia industri.

Pada tahun 2025 ada sekitar 35.215 orang pencari kerja. Terdapat sebanyak 4.637 orang yang telah mengikuti pelatihan keterampilan di BPVP Lombok Timur, yang terdiri dari 2.075 laki-laki dan 2.562 orang perempuan. Sebanyak 110 orang sudah bekerja, sementara 71 orang melakukan wirausaha.

Tabel 3.7

Jumlah Pencari Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Pencari Kerja Terdaftar		
		L	P	Jumlah
1	Kota Mataram	8.171	1.323	9.494
2	Lombok Barat	4.903	1.693	6596
3	Lombok Utara	1.972	702	2674
4	Lombok Tengah	10.001	1.609	11610
5	Lombok Timur	16.006	1.976	17982
6	Sumbawa Barat	1.777	1.033	2810
7	S u m b a w a	4.291	3.175	7466
8	D o m p u	5.326	1.469	6795
9	Kota Bima	1.798	676	2474
10	B i m a	2.215	1.194	3.409
	Jumlah	56.460	14.850	71310

Sumber : Disnakertrans NTB 2025

Tabel 3.8
Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Dilaksanakan BPVP Lotim Tahun 2025

Nama Lembaga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Belum Bekerja	Wirausaha	Bekerja	Jumlah
BLK Sumbawa Barat	37	11	48	35	2	11	48
BLK Lombok Tengah	139	101	240	145	45	50	240
BLKDLN NTB	39	55	94	94	0	0	94
UPTD Loka Latihan Kerja Selong	37	30	67	21	16	30	67
UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Lombok Utara	20	26	46	33	8	5	46
BPVP Lombok Timur	1803	2339	4142	4128	0	14	4142
Jumlah	2075	2562	4637	4456	71	110	4637

Sumber : Disnakertrans NTB 2025

Terdapat sebanyak 20 program kejuruan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 4.637 orang dengan mengunakan dan APBN, diantaranya kejuruan TIK, welding, listrik, teknologi informasi dan komunikasi, las, elektronika, otomotif prosesing dan lain sebagainya. Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten yang banyak mendapat paket pelatihan sebanyak 15 paket dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam rangka menjamin mutu keluaran pelatihan, maka sangat perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah proses penilaian dan pengakuan resmi yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah atau badan independen terhadap kualitas dan kelayakan LPK. Akreditasi LPK bertujuan untuk memastikan bahwa LPK memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga peserta pelatihan mendapatkan pembelajaran yang bermutu. Akreditasi terhadap Lembaga pelatihan kerja penting dilakukan agar lulusan pelatihan memiliki standar sesuai dengan kebutuhan/spesifikasi pasar kerja. Jumlah LPKS di NTB tahun 2025 sebanyak 208 Lembaga, yang belum terakreditasi, 116 LPKS yang sudah terakreditasi dan 102 LPKS sudah dilakukan verifikasi internal, sehingga realisasi

mencapai 49,03%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa LPKS yang masih perlu mendapat pendampingan awal terkait syarat-syarat/kelengkapan pemenuhan standar dokumen akreditasi lembaga.

Untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja juga dilakukan program pemagangan. Pemerintah Provinsi NTB melalui melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Pemerintah Jepang melalui IM Japan telahmelakukan kerjasama untuk melakukan pemagangan calon tenaga kerja Indonesia sebangak 15.000 orang per tahun. Kerjasama ini memiliki makna yang strategis bagi Pemerintah Provinsi NTB karena : (1) Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah, terutama usia produktif, agar mampu bersaing dalam pasar kerja internasional; (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui remitan peserta magang yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan daerah; (3) Memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, TNI, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pembinaan tenaga kerja yang berkelanjutan.program magang ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari sosialsiasi dan pengarahan, rekrutmen dan seleksi peserta, pelatihan dan pra pemberangkatan (Pelatda Tahap I), wawancara dan kontrak kerjam Pelatda Tahap II, penempatan dan pemberangkatan ke Jepang.

Pada tahun 2025, pelaksanaan rekrut magang jepang dilaksanakan 2 tahap setelah tahap I berhasil meluluskan 28 orang, NTB kembali mendapat kesempatan menyelenggarakan seleksi tahap II dengan jumlah pendaftar yang lebih tinggi. Dari total pendaftaran sebanyak 198 orang yang lulus sampai dengan tahap tes wawancara sebanyak 57 orang. Adanya peningkatan minat peserta menunjukkan reputasi program yang semakin baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah Provinsi NTB.

Tabel 3.9
Pemagangan dalam Luar Negeri Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	Pemagangan Luar Negeri Tahap 1	Pemagangan Luar Negeri Tahap 2
1	Kota Mataram	1	4
2	Lombok Barat	1	20
3	Lombok Utara	0	1
4	Lombok Tengah	8	14
5	Lombok Timur	9	14
6	Sumbawa Barat	2	0
7	Sumbawa	7	4
8	Dompu	0	0
9	Kota Bima	0	0
10	Bima	0	0
	Jumlah	28	57

Sumber : Disnakertrans NTB, 2025

Dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program penempatan tenaga kerja melalui skema Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Program ini dilaksanakan melalui pelayanan penempatan, penyediaan informasi pasar kerja, serta fasilitasi rekrutmen yang terkoordinasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mobilitas kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja dan perekonomian daerah

Tabel 3.10
Rekapitulasi Data Penempatan Tenaga Kerja
AKAD, AKL, AKAN Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	AKAD	AKL	AKAN
1	Kota Mataram	46	542	973
2	Lombok Barat	190	2.164	5.276
3	Lombok Tengah	376	306	9.727
4	Lombok Timur	423	261	13.745
5	Lombok Utara	48	327	960
6	Sumbawa Barat	0	560	411
7	Sumbawa	6	151	2.015
8	Dompu	3	60	485
9	Bima	66	128	1.414
10	Kota Bima	3	94	209
Jumlah		1.183	4.593	35.215

Sumber : Disnakertrans NTB, 2025

Berdasarkan data penempatan tenaga kerja berdasarkan negara tujuan terdapat 33 negara tujuan PMI dengan jumlah penempatan PMI tertinggi di negara Malaysia sebanyak 24.445 orang dan negara Arab Saudi sebanyak 2.232 orang.

Tabel 3.11
Rekapitulasi Data Penempatan Keluar Negeri
Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2025

No	Negara	Jumlah	No.	Negara	Jumlah
1	Malaysia	24.445	18	Maladewa	5
2	Hongkong	2.576	19	Bahrain	3
3	Taiwan	2.791	20	Zambia	3
4	Arab saudi	2.032	21	Mongolia	7
5	Singapura	1.581	22	Kazakhstan	1
6	Uni Emirat Arab	391	23	Kroasia	26
7	Brunei Darussalam	475	24	Bulgaria	19
8	Kuwait	71	25	Qatar	5
9	Jepang	219	26	Meksiko	1

No	Negara	Jumlah	No.	Negara	Jumlah
10	Korea Selatan	106	27	Oman	3
11	Turki	197	28	Yunani	1
12	Hungaria	69	29	Makao	2
13	Slovakia	68	30	Kepulauan Turks dan Caicos	1
14	Polandia	11	31	Yordania	1
15	Papua Nugini	29	32	Serbia	1
16	Italia	59	33	Pulau Solomon	1
17	Rumania	15			
Jumlah		35.215			

Sumber : Disnakertrans NTB, 2025

Pada tahun 2025, penempatan PMI dari Provinsi NTB menunjukkan distribusi yang jelas antara sektor formal dan informal. Dari total penempatan, 28.767 PMI ditempatkan di sektor formal, yang mencakup pekerjaan dengan kontrak resmi, perlindungan hukum, dan jaminan sosial. Sementara itu, 6.448 PMI ditempatkan di sektor informal, yang umumnya bersifat pekerjaan sementara atau tidak memiliki perlindungan formal. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas PMI NTB berhasil terserap di sektor formal, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan penempatan PMI lebih aman, terlindungi, dan sesuai kompetensi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pekerjaan yang lebih stabil.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan pendataan dan pembinaan rutin kepada P3MI yang ada di NTB untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam merekrut dan menempatkan CPMI/PMI. Sampai dengan tahun 2025 terdapat 229 P3MI yang terdiri dari 15 Kantor Pusat dan 214 Kantor Cabang.

Dalam upaya menekan penempatan PMI secara illegal, penanganan PMI menjadi tugas lintas sektor. Kuncinya adalah kolaborasi dalam mengedukasi masyarakat agar dapat mengakses kesempatan kerja keluar negeri secara benar dan sesuai prosedur. Untuk mencegah terjadinya kasus PMI non prosedural, pemerintah telah secara masif memberikan informasi dan edukasi tentang bekerja keluar negeri kepada masyarakat melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam penyelenggaraan penempatan PMI keluar negeri, tahun 2024 tercatat PMI bermasalah sebanyak 1.063 orang, dan semuanya tertangani.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB berkerjasama dengan BP2MI, dan Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memfasilitasi pemulangan PMI dari negara penempatan. Disamping itu dibentuk juga Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural yang betujuan untuk meminimalisir terjadinya proses penempatan non prosedural pekerja migran indonesia khususnya yang berasal dari wilayah Provinsi NTB. Jumlah pencegahan dan

penanganan kasus yang dilakukan oleh satgas pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Bulan Desember tahun 2025 sebanyak 1.138 orang.

Upaya perlindungan bagi PMI adalah melalui program *Zero Unprocedural Migrant*. Melalui program tersebut, sudah berhasil dicegah upaya penyelundupan PMI melalui jalur illegal dan beberapa P3MI yang tidak bertanggungjawab, kasusnya telah dibawa ke ranah hukum. Selain itu, pemerintah Provinsi NTB juga melakukan berbagai upaya pencegahan dari hulu untuk mewujudkan NTB Zero PMI Unprosedur

Sampai dengan bulan November 2025, jumlah *remittance* yang diperoleh sejumlah Rp. 193.354.211.645,62 harapannya remittance yang diperoleh tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumtif namun lebih diarahkan pada kegiatan produktif. Untuk itu penting adanya pemberdayaan dan pembinaan bagi keluarga PMI yang ditinggalkan agar dapat menggunakan *remittance* secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan PMI dan keluarganya. Penerimaan remittance oleh Pemerintah Provinsi NTB, dikirim melalui Bank Indonesia maupun Kantor Pos.

Program Hubungan Industrial di Provinsi NTB menunjukkan pencapaian yang sangat positif dalam melindungi hak-hak pekerja. Dengan target sebanyak 53.133 orang, realisasi program berhasil mencapai 65.562 pekerja, atau melebihi target sekitar 23 persen. Capaian ini menandakan keberhasilan pemerintah daerah dan Disnakertrans NTB dalam memperkuat perlindungan hukum dan kepastian hak pekerja, termasuk melalui penyuluhan ketenagakerjaan, fasilitasi penyelesaian perselisihan, dan implementasi peraturan ketenagakerjaan yang jelas. Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi ini tidak hanya meningkatkan keamanan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan iklim hubungan industrial yang lebih harmonis antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, sehingga mendukung produktivitas dan stabilitas ekonomi di NTB. Pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial dilaksanakan untuk memastikan seluruh hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha seimbang dan semuanya terlindungi sehingga tidak terjadi perselisihan. Kasus hubungan industrial seharusnya diselesaikan sejak dini. Untuk itu perlu dilakukan langkah preventif sehingga tidak perlu sampai ke persidangan yang akan menyita waktu dan dana yang tidak sedikit.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan jumlah perselisihan antara perusahaan dengan pekerja adalah melalui pembinaan kepada Lembaga Kerjasama bipartite (LKS Bipartit) dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat. Pada tahun 2024 sebanyak 247 perusahaan yang sudah mempunyai LKS Bipartit.

Dalam rangka memediasi perselisihan hubungan industrial antar pengusaha dan pekerja, pada tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dari 31 kasus yang diperselisihkan oleh perusahaan dengan melibatkan 43 orang tenaga kerja, kasus yang diselesaikan secara Bipartit sebanyak 14 kasus, diselesaikan melalui Perjanjian Bersama sebanyak 17 kasus, Dari total 31 kasus yang masuk, kasus perselisihan hak sebanyak 7 kasus, dan perselisihan PHK sebanyak 24 kasus. Tahun 2025 terjadi penurunan kasus dari 37 kasus di tahun 2024 menjadi 31 kasus ditahun 2025.

Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 500/15.1-758 Tahun 2024, Tgl. 11-12-2024 dengan besaran UMP Rp. 2.602.931,-. Disnakertrans dengan Dewan Pengupahan Daerah NTB telah membahas UMP NTB Tahun 2026 yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB No. 100.3.3.1-683 Tahun 2025, tanggal. 22 Desember 2025 dengan besaran UMP Rp. 2.673.861,-. Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2025 meningkat 6,5 persen dibandingkan dengan tahun 2026.

Dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja, pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi pekerjaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan tahun 2025 jumlah pekerja yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 716.265 orang terdiri dari pekerja formal 399.998 orang dan pekerja informal sebanyak 316.267 orang.

Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB telah mendaftarkan 13.000 petani dan buruh tani tembakau (sektor informal) untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan jumlah iuran RP.16.800/orang. Atas inisiatif tersebut NTB dinobatkan sebagai Provinsi pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani tembakau dengan mengunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Pemerintah terus mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3 di lingkungan kerja. Pengujian K3 tahun 2025 dilakukan pada 1090 perusahaan dengan jenis pengujian sebagai berikut: bejana tekan pada 293 perusahaan, pesawat angkat angkut pada 439 perusahaan, pesawat teknologi dan produksi pada 15 perusahaan, motor disel pada 38 perusahaan, instalasi Listrik pada 38 perusahaan, Lift pada 37 perusahaan, IPP petir pada 102 perusahaan, proteksi kebakaran pada 69 perusahaan.

Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja telah dilaksanakan terhadap 300 orang tenaga kerja UMKM/petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara meliputi Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Gizi Kerja, Pemeriksaan Kelelahan Kerja, Pemeriksaan Urine dan Darah serta Pengujian Parameter lingkungan

kerja. Kegiatan K3 terdiri dari Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan dan UMKM yang tersebar di seluruh Pulau Lombok bertujuan agar semakin banyak perusahaan dan UMKM yang mengenal K3 dan menerapkannya di tempat kerja, sehingga diharapkan budaya K3 di tempat Kerja dapat terwujud.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Walaupun kinerja belum mencapai target (capaian 90,68%), namun anggaran yang digunakan cukup efisien. Pagu anggaran untuk mencapai indikator sasaran TPT sebesar Rp 4.262.108.249,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar Rp2.071.482.765. Efisiensi anggaran sebesar 545,69%. Perhitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan**

   Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 96,70%), dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

   Sedangkan program dan kegiatan yang kurang efektif dalam pencapaian target adalah:

   a. Program Hubungan Industrial (realiasi anggaran 66,32%) dengan kegiatan:
      1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
      2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
      3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
   b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisasi anggaran 15,28%), dengan kegiatan:
      1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
      2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
      3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
   c. Program Penempatan Tenaga Kerja (realisasi anggaran 49,23%) dengan kegiatan :
      1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
      2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi

4. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

d. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (64,35%) dengan kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator TPT

Program/Kegiatan	Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Program Hubungan Industrial	2,539,899,764.00	1,684,403,165.00	66.32
Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,799,900.00	99.60
Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	76,933,400.00	12,391,200.00	16.11
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2,412,966,364.00	1,622,212,065.00	67.23
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	211,678,850.00	15.28
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	194,132,600.00	17.00
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	16,574,250.00	7.37
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	972,000.00	5.12

Program/Kegiatan	Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penempatan Tenaga Kerja	305,571,200.00	150,435,650.00	49.23
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59,679,200.00	0.00	0.00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100,192,000.00	57,739,750.00	57.63
Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	120,200,000.00	78,194,150.00	65.05
Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25,500,000.00	14,501,750.00	56.87
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	10,489,100.00	64.35
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	10,489,100.00	64.35

Tabel 3.13
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
TPT	4.262.108.249,00	2.071.482.765,00	2,79	3,06	676.955.151,96	1.527.637.365,23	0,44	0,56	55,69

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

3.1.1.2 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator-indikator ini merupakan indic\kator kunci dalam menilai kualitas pendidikan dan kesehatan di suatu wilayah. Perangkat daerah pengampu dan orkestrator pada indikator ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan. Hasil capaian indikator-indikator tersebut tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan Serta Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Dalam RPD 2024-2026	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100) atau (9=(3-(6-3)/3)*100	10 (10=6/5*100) atau (10=(5-(6-5)/5)*100	11 (11=6/7*100) atau (11=(7-(6-7)/7)*100	12 (12=6/8*100) atau (12=(8-(6-8)/8)*100
RLS	tahun	7,87	9,55	8,65-8,66	7,87*	10,94	-	100	90,98	71,94	-
HLS	tahun	13,98	17	14,24-14,25	13,98*	18	-	100	98,17	77,67	-
UHH	tahun	72,25	72,68-73,01	72,92	72,25*	73.10-73.32	-	100	99,08	98,84	-
AKI	Per 100,000 kelahiran hidup	257-189	257-189	169	NA	257-189	-	-	-	-	-
AKB	Per 1,000 kelahiran hidup	24.64-16.85	24,64-16,85	24.64-16.85	NA	24.64-16.85	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

*Keterangan: * capaian tahun 2024, karena capaian 2025 belum rilis pada TWIII (rilis Capaian Tahun 2025 pada bulan Maret 2026 dari BPS untuk RLS,HLS dan UHH).*

A. Indikator RLS

a. Analisis Capaian Indikator:

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

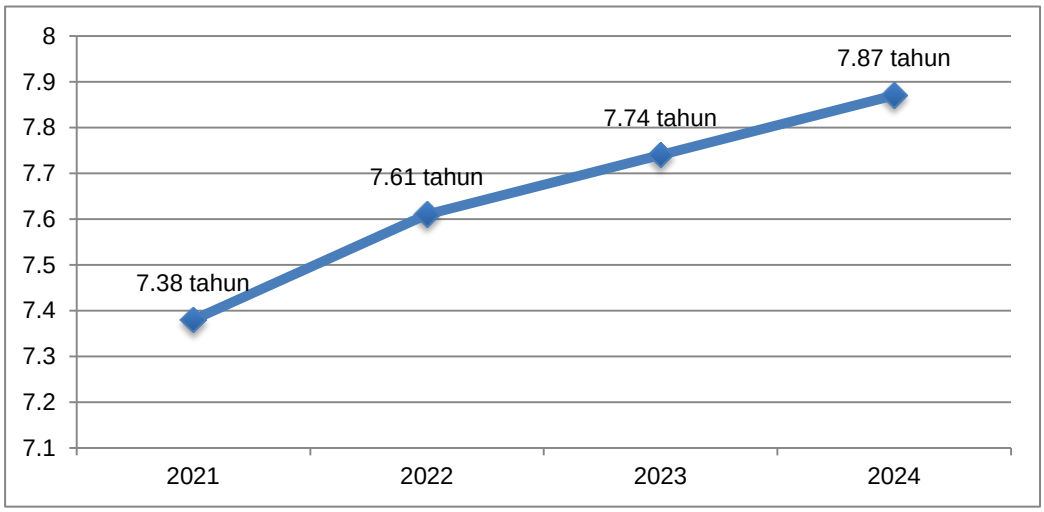
Indikator RLS menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun keatas (BPS). Data RLS pada tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada, sehingga capaian RLS Provinsi NTB yang digunakan adalah RLS pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,87 tahun. Bila dibandingkan dengan target 2025 terdapat deviasi -0,78 poin atau capaian sebesar 90,98% (target tidak tercapai).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Data RLS pada tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada, sehingga capaian RLS yang digunakan adalah RLS pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka capaiannya sebesar 100%. Capaian RLS NTB pada tahun 2024 ini menunjukan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas di Provinsi NTB rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 7,87 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP pada tahun 2025.

Pada periode tahun 2021 – 2024 terdapat tren kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, seperti pada tampak pada grafik di bawah ini. Hal ini menunjukan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB, sehingga terdapat kenaikan RLS pada setaiap tahunnya pada kurun waktu tahun 2021 -2024.

Grafik 3.7
Realisasi RLS Provinsi NTB Tahun 2021-2024



Sumber: BPS NTB 2025

Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada ketimpangan capaian RLS antarwilayah, yang masih tergolong cukup tinggi. Hal ini tercermin dari capaian RLS Kota Bima yang mencapai 10,96 tahun, sementara Kabupaten Lombok Utara hanya mencapai 6,4 tahun pada tahun 2024. Ketimpangan ini juga terjadi secara konsisten selama periode tahun 2021-2024, pada rentang waktu tersebut, Kota Bima secara berkelanjutan mencatatkan capaian RLS tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di NTB, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB
Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Lombok Barat	6,42	6,6	6,87	6,88
2.	Lombok Tengah	6,29	6,44	6,61	6,73
3.	Lombok Timur	6,71	7,04	7,12	7,36
4.	Sumbawa	8,15	8,21	8,52	8,59
5.	Dompu	8,72	8,73	8,97	9,04
6.	Bima	7,91	8,17	8,29	8,3
7.	Sumbawa Barat	8,72	8,9	8,98	8,99
8.	Lombok Utara	6,04	6,3	6,39	6,4
9.	Kota Mataram	9,54	9,55	9,56	9,58
10.	Kota Bima	10,65	10,94	10,95	10,96
Provinsi NTB		7,38	7,61	7,74	7,87
Indonesia		8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS NTB 2025

Hal ini menunjukan bahwa Provinsi NTB menghadapi tantangan serius dalam pemerataan akses dan capaian pendidikan antar kabupaten/kota, karena cukup tingginya disparitas capaian RLS antar Kabupaten/Kota.

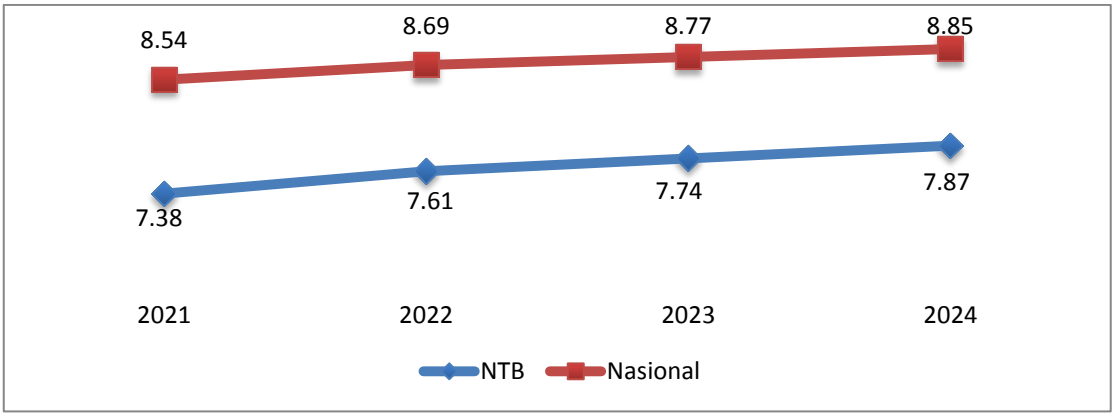
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPD

Realisasi RLS tahun 2024 adalah sebesar 7,87 tahun atau mencapai 71,94% dari target yang telah ditetapkan sebesar 10,94 tahun. Provinsi NTB memerlukan startegi yang lebih inovatif untuk mengejar ketertinggalan dalam upaya pencapaian target pada tahun 2026.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tidak terdapat target atau standar nasional yang harus dicapai oleh setiap Provinsi. Namun demikian, capaian RLS Provinsi NTB tetap dapat dianalisis melalui perbandingan dengan capaian nasional, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Grafik 3.8
Perbandingan RLS Provinsi NTB dengan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS NTB 2025

Capaian RLS Provinsi NTB selalu menunjukan kenaikan pada rentang waktu tahun 2021-2024, namun capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024, dengan selisih 0,98 tahun dibandingkan capaian nasional tahun 2024 yang mencapai 9,07 tahun.

Sementara itu, pada tahun 2024 capaian RLS Provinsi NTT berada di atas capaian Provinsi NTB yaitu sebesar 8,02 tahun dan Provinsi Bali jauh mengungguli dengan capaian sebesar 9,54 tahun dan di atas capaian nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Kenaikan capaian RLS Provinsi NTB setiap tahunnya tidak terlepas pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeirntah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama *stakeholders* lainnya. Capaian RLS ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan itu antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, melalui pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru untuk meningkatkan jangkauan layanan pendidikan menengah dan ketersediaan sekolah yang merata. Upaya lain untuk meningkatkan angka partisipasi adalah dengan mempermudah akses terhadap pendidikan Paket C dalam rangka memfasilitasi anak putus sekolah. Selain itu, bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu, upaya lainnya adalah peningkatan kualitas pemenuhan SPM pendidikan melalui berbagai tahapan yang lebih efektif dan efisien, yaitu melalui pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu pada standar teknis, perhitungan kebutuhan pemenuhan layanan dasar yang lebih akurat, penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar berdasarkan data, dan

pelaksanaan pemenuhan layanan dasar langsung oleh Pemerintah Daerah tanpa campur tangan pihak lainnya.

Keseluruhan kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan hak bagi para peserta didik disabilitas, sehingga pendidikan inklusi dapat tercapai di Provinsi NTB.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator RLS pada tahun 2025 adalah sebesar Rp471,153,641,118 dengan realisasi anggaran sebesar Rp240,319,915,716.60. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 43.94%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Hampir seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan. Ini terjadi karena pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

   Program dan Kegiatan yang cukup efektif dalam pencapaian target indikator kinerja adalah Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 74,01%) dengan kegiatan:

   a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
   b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

   Program ini indikatornya adalah persentase persentase pengendalian perizinan pendidikan yang bertujuan memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan yang beroperasi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan. Melalui mekanisme pengendalian perizinan ini, pemerintah daerah dapat menjaga kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, sehingga mendukung tercapainya standar kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh peserta didik.

   Program dan Kegiatan yang kurang efektif dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

   a. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran 43,13%) dengan kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi. Program ini indikatornya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi

Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA SMK Paket C, Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB, Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B, dan Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B. Peningkatan APK dan APS pada jenjang pendidikan menengah memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan RLS dan HLS. Program ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan menekan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.

b. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 51,99%), dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
    2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
    3. Pengelolaan Pendidikan Khusus

Tabel 3.16
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator RLS

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
RLS	471.153.641.118	240.319.915.716,60	8,65	7,87	30.536.202.759,42	54.468.629.030,98	0,56	0,44	43,94

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. **Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator RLS

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	22,642,437,979.00	43.13
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	52,503,960,000.00	22,642,437,979.00	43.13
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	217,552,406,077.60	51.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	121,014,796,125.80	56.45
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	81,649,478,124.80	45.05
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	14,888,131,827.00	65.15

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	125,071,660.00	74.01
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	134,000,000.00	99,205,500.00	74.03
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	35,000,000.00	25,866,160.00	73.90

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator HLS

a. Analisisi Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam analisis pembangunan, indikator HLS sering dikaitkan dengan RLS untuk melihat kesenjangan antara capaian pendidikan saat ini dan peluang pendidikan generasi selanjutnya. Data HLS pada tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada, sehingga capaian HLS Provinsi NTB yang digunakan adalah HLS pada tahun 2024 yaitu sebesar 13,98 tahun. Bila dibandingkan dengan target 2025 terdapat deviasi -0,26 poin atau capaian sebesar 98,17% (target tidak tercapai).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Data HLS pada tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada, sehingga capaian HLS yang digunakan adalah HLS pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka capaiannya sebesar 100%. Capaian HLS ini menunjukan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah pada tahun 2025 di Provinsi NTB memiliki peluang untuk menempuh pendidikan formal selama 13,98 tahun atau setara Diploma III. Pada tahun 2024, HLS NTB tercatat sebesar 13,98 tahun, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Kenaikan HLS Provinsi NTB pada periode tahun 2021-2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.18
HLS Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2024

No.	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Lombok Barat	13.95	13.96	13.98	13.99
2.	Lombok Tengah	13.85	13.86	13.87	13.89
3.	Lombok Timur	13.90	14.05	14.06	14.07
4.	Sumbawa	13.07	13.23	13.24	13.34
5.	Dompu	13.53	13.69	13.83	13.84
6.	Bima	13.39	13.58	13.65	13.66
7.	Sumbawa Barat	13.64	13.65	13.66	13.68
8.	Lombok Utara	12.76	12.77	13.01	13.02
9.	Kota Mataram	15.64	15.65	15.67	15.68
10.	Kota Bima	15.04	15.05	15.06	15.08
Provinsi NTB		13.90	13.96	13.97	13.98
Indonesia		13.08	13.10	13.15	13.21

Sumber: BPS NTB 2025.

Sejalan dengan RLS, HLS pun masih menunjukan ketimpangan antar wilayah, yang tercermin dari capaian HLS Kota Mataram sebesar 15,68 tahun, jauh di atas capaian Provinsi maupun Nasional, sementara itu Kabupaten Lombok

Utara tertinggal dengan capaian 13,02 tahun di tahun 2024 dan ini terjadi selama periode tahun 2021-2024.

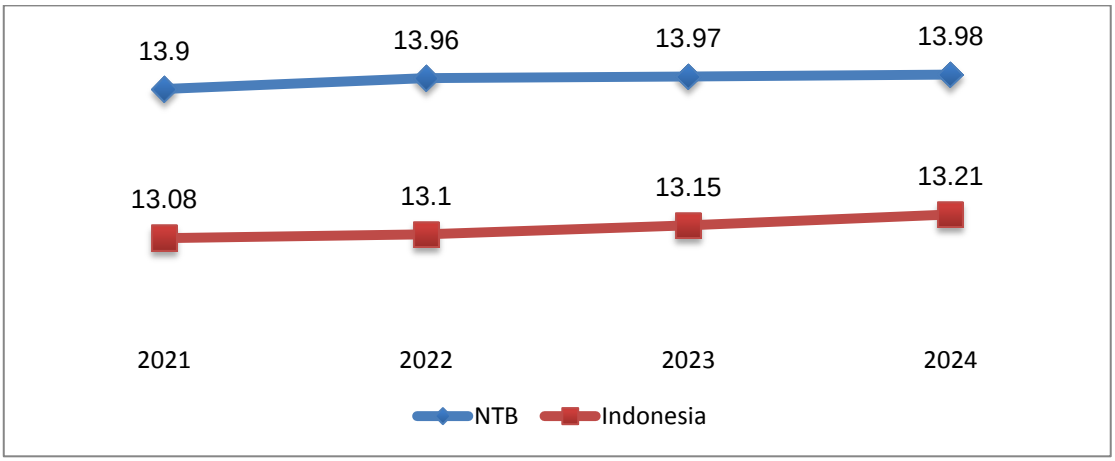
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPD**

   Realisasi HLS tahun 2024 adalah 13,98 tahun atau mencapai 77,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 18 tahun pada akhir periode RPD tahun 2026.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional**

   HLS Provinsi NTB tahun 2024 mencapai 13,98 tahun lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 13,21 tahun. Kondisi ini secara konsisten menempatkan HLS NTB di atas rata-rata nasional selama periode 2021-2024.

Grafik 3.9
Perbandingan HLS Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: BPS NTB 2025

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Peningkatan capaian HLS di Provinsi NTB dari tahun ke tahun tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Capaian HLS tersebut mencerminkan adanya peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang sejalan dengan tujuan dan strategi pembangunan pendidikan Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2024–2026.

   Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung peningkatan HLS, antara lain melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan, termasuk pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru guna memperluas jangkauan layanan pendidikan menengah serta memastikan ketersediaan satuan pendidikan yang lebih merata. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan melalui penyediaan akses yang lebih luas terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C sebagai alternatif bagi anak yang putus sekolah. Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, dukungan juga diberikan melalui bantuan pendidikan seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Upaya lainnya dilakukan melalui peningkatan kualitas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui tahapan yang lebih sistematis dan berbasis data, mulai dari pengumpulan data empiris yang mengacu pada standar teknis, perhitungan kebutuhan pemenuhan layanan dasar secara lebih akurat, penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar berbasis data, hingga pelaksanaan pemenuhan layanan dasar secara langsung oleh pemerintah daerah. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, sehingga prinsip pendidikan inklusif dapat terwujud secara lebih optimal di Provinsi NTB.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator HLS pada tahun 2025 adalah sebesar Rp471,153,641,118 dengan realisasi anggaran sebesar Rp240,319,915,716.60. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 48,04%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator HLS

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
HLS	471.153.641.118	240.319.915.716,60	14,24	13,98	17.190.265.788,03	33.086.632.100,98	0,52	0,48	48,04

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Hampir seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan. Ini terjadi karena pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan Kegiatan yang cukup efektif dalam pencapaian target indikator kinerja adalah Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 74,01%) dengan kegiatan:

a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Program ini indikatornya adalah persentase persentase pengendalian perizinan pendidikan yang bertujuan memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan yang beroperasi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan. Melalui mekanisme pengendalian perizinan ini, pemerintah daerah dapat menjaga kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, sehingga mendukung tercapainya standar kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh peserta didik.

Program dan Kegiatan yang kurang efektif dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

a. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran 43,13%) dengan kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi. Program ini indikatornya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA SMK Paket C, Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB, Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B, dan Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B. Peningkatan APK dan APS pada jenjang pendidikan menengah memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan RLS dan HLS. Program ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan menekan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.
b. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 51,99%), dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
    2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
    3. Pengelolaan Pendidikan Khusus

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator HLS

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	22,642,437,979.00	43.13
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	52,503,960,000.00	22,642,437,979.00	43.13
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	217,552,406,077.60	51.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah	214,370,103,602.00	121,014,796,125.80	56.45

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Menengah Atas			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	81,649,478,124.80	45.05
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	14,888,131,827.00	65.15
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	125,071,660.00	74.01
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	134,000,000.00	99,205,500.00	74.03
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	35,000,000.00	25,866,160.00	73.90

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator UHH

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

UHH menjadi salah satu indikator strategis karena mencerminkan kualitas kesehatan penduduk secara keseluruhan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, kondisi lingkungan, serta perilaku hidup masyarakat.

Data UHH pada tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada, sehingga capaian UHH Provinsi NTB yang digunakan adalah UHH pada tahun 2024, yaitu sebesar 72,25 tahun tahun atau mencapai 99,08% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,92 tahun.

Tabel 3.21
Perbandingan UH Provinsi NTB dan Nasional
Tahun 2021-2024

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
NTB	71,33	71,66	72,02	72,25
Indonesia	73,46	73,79	73,93	74,15

Sumber: BPS NTB 2021-2024

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Data UHH pada tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada, sehingga capaian UHH yang digunakan adalah UHH pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka capaiannya sebesar 100%. Capaian UHH Provinsi NTB mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dibandingkan capaian 2024 dengan capaian TW III 2025 maka capaian nya sebesar 100%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**

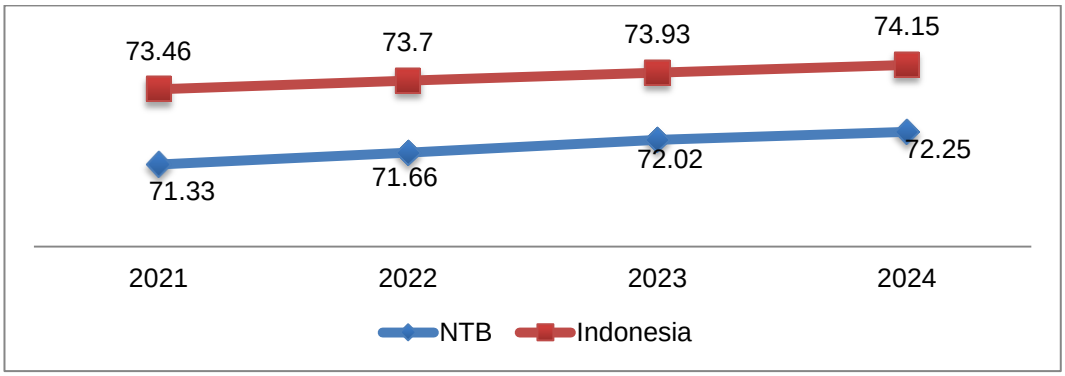
   Data UHH pada tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada, sehingga capaian UHH yang digunakan adalah UHH pada tahun 2024, yaitu 72,25 tahun atau mencapai 99,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 73,10-73,20 tahun di tahun 2026.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Capaian UHH NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,25 tahun pada tahun 2024 dan kondisi ini berlangsung sepanjang periode 2021-2025. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat, yaitu Provinsi NTT dan Bali menunjukan bahwa capaian UHH Provinsi Bali sebesar 7,10 tahun pada tahun 2024 dengan posisi di atas rata-rata nasional. Sedangkan, capaian UHH Provinsi NTT pada tahun 2024 adalah sebesar 71,83 tahun, jauh dibawah rata-rata nasional maupun Provinsi NTB.

   Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan kesehatan di Provinsi NTB masih cukup besar dan memerlukan penguatan kebijakan serta intervensi yang lebih terarah. UHH memiliki peran yang sangat penting karena bersama RLS dan HLS menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang secara luas digunakan sebagai ukuran kualitas hidup penduduk dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Grafik 3.10
Perbandingan UHH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: BPS NTB 2021-2024

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan UHH sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penurunan Angka Kematian Bayi, yang

didukung oleh peningkatan cakupan imunisasi lengkap pada bayi serta peningkatan rata-rata lama pemberian Air Susu Ibu (ASI), sehingga bayi memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan mutu layanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi penguatan pelayanan antenatal care terpadu dan berkualitas, standarisasi pelayanan neonatal esensial di seluruh fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan audit kasus neonatal baik pada kasus *near miss* maupun kematian neonatal. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan juga dilakukan melalui pelatihan resusitasi neonatal dan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) bagi bidan dan dokter, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan neonatal, serta penguatan sistem rujukan kesehatan. Upaya tersebut juga didukung oleh pengembangan jejaring rujukan neonatal regional, penyediaan ambulans dan peralatan stabilisasi neonatal, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu dan anak.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2025 adalah sebesar Rp333.032.536.523,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp142.683.227.576,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 56,76%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (realisasi anggaran 8,97%) dengan kegiatan:
    1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
    2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan lintas sektor, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka upaya promotif dan preventif, serta pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di tingkat provinsi. Program pemberdayaan masyarakat ini juga mendukung peningkatan capaian UHH dan upaya pencegahan stunting melalui kegiatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan kepada masyarakat.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggaran 42,88%) dengan kegiatan:
   1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
   4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

   Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana, prasarana, serta alat kesehatan untuk mendukung pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat daerah provinsi. Selain itu, program ini juga mencakup penyediaan layanan kesehatan rujukan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, serta penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi. Berbagai kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan capaian Umur Harapan Hidup (UHH).

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (realisasi anggaran 52,41%) dengan kegiatan:
   1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi
   2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 3.22
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator UHH

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
UHH	333.032.536.523	142.683.227.576	72,92	72,25	1.974.854.360,91	4.567.094.576,56	0,43	0,57	56,76

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator UHH

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811,529,900.00	71,350,000.00	8.79
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	638,479,900.00	47,230,000.00	7.40
Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	148,550,000.00	0.00	0.00
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	24,500,000.00	24,120,000.00	98.45

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	141,766,347,784.00	42.88
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	86,691,824,844.00	39.71
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	54,714,360,290.00	49.15
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	145,934,000.00	62.82
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	214,228,650.00	29.48
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,613,381,850.00	845,529,792.00	52.41
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi	178,270,000.00	84,343,040.00	47.31
Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,435,111,850.00	761,186,752.00	53.04

Sumber: BKAD NTB 2025

D. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI)

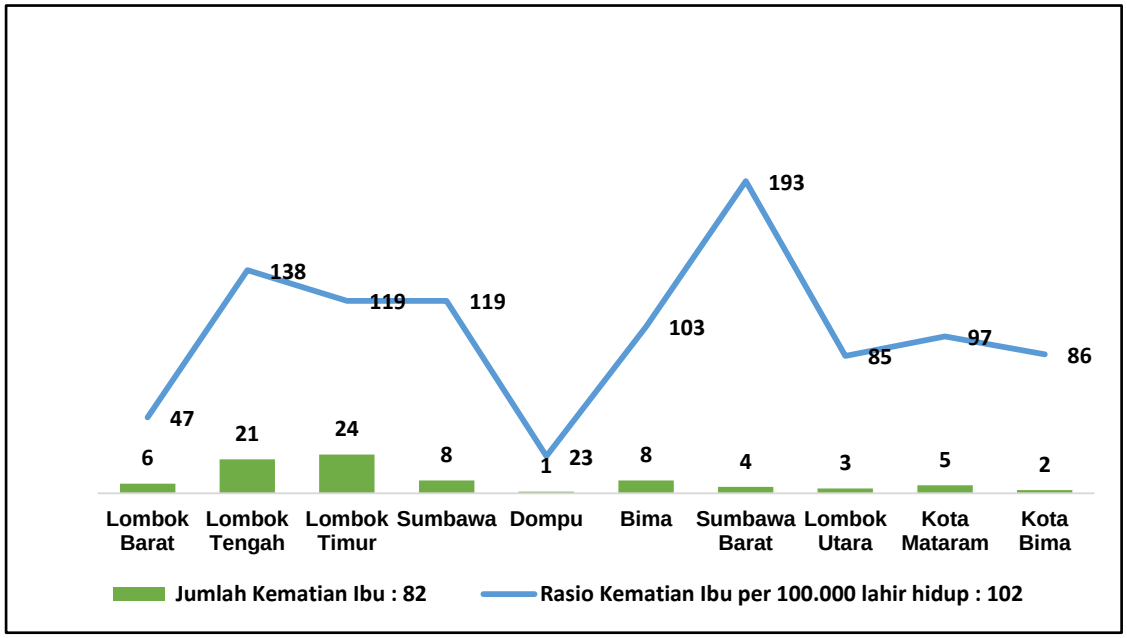
AKI merupakan permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia serta menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS, AKI Provinsi NTB tercatat sebesar 257 yang artinya terdapat 257 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100,000 kelahiran hidup. Angka tersebut menempatkan Provinsi NTB sebagai tertinggi kedelapan dengan AKI tertinggi di Indonesia. BPS melakukan sensus AKI dan AKB per 10 tahun yang menjadi bagian dari Sensus Penduduk. Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, jumlah angka kematian ibu yang dilaporkan melalui fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2024 adalah sebesar 82 kematian ibu yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Perhitungan ini hanya merupakan proporsi dan tidak dapat dijadikan dasar pada perhitungan angka kematian ibu.

Grafik 3.11
Distribusi Jumlah dan Rasio Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan NTB 2025

Namun, hasil perhitungan dari Dinas Kesahatan ini tidak bisa dibandingkan dengan hasil perhitungan sensus yang dilakukan oleh BPS, karena metode perhitungan yang berbeda.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Nilai AKI diperoleh melalui Sensus Kependudukan setiap 10 tahun yang dilakukan oleh BPS, sehingga capaian ini tidak bisa dihitung pada tahun 2025.

   Dinas Kesehatan telah melakukan perhitungan secara mandiri berdasarkan data dari fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota yang menunjukan adanya penurunan AKI di Provinsi NTB dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 144 kasus, kemudian turun menjadi 91 kasus (36,80%) pada tahun 2023. Tahun 2024 kasus kematian ibu kembali turun sebanyak 10 persen jika dibandingkan dengan 2023.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD 2024-2026**

   Target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 257-189 per 100.000 kelahiran hidup, namun tidak dapat dibandingkan dengan kondisi tahun 2025, karena tidak ada data.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   BPS merilis AKI seluruh Provinsi di Indonesia berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat 257 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100,000 kelahiran hidup di NTB pada tahun 2020, hasil ini berada jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 189 per 100,000 kelahiran hidup. Capaian NTB ini berada di atas Provinsi Bali yang hanya 85 kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup dan di bawah NTT dengan capaian 316 kematian per 100,000 kelahiran hidup.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   AKI merupakan salah satu indikator prioritas dalam pembangunan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin keberlangsungan generasi di masa mendatang. Tingginya AKI berkaitan erat dengan kondisi kesehatan ibu, sehingga berbagai upaya peningkatan kesehatan ibu diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan, mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa pasca persalinan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan ibu sekaligus bayi yang dilahirkan.

   Pelaksanaan program kesehatan ibu difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas melalui penguatan layanan kesehatan dasar serta sistem rujukan. Pelayanan antenatal diberikan sesuai dengan standar pelayanan untuk mendeteksi secara dini berbagai faktor risiko dan komplikasi kehamilan, seperti anemia, hipertensi dalam kehamilan, serta masalah gizi. Selain itu,

persalinan didorong untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan dukungan tenaga kesehatan yang kompeten guna menekan risiko kematian dan kesakitan pada ibu. Upaya kesehatan ibu juga mencakup pelayanan nifas dan pasca persalinan yang berfokus pada pemantauan kondisi kesehatan ibu, pencegahan komplikasi, serta pemberian konseling kesehatan dan layanan keluarga berencana pasca persalinan. Penguatan integrasi pelayanan kesehatan ibu dengan program gizi, kesehatan reproduksi, dan perlindungan sosial juga terus dilakukan untuk mengatasi berbagai determinan kesehatan secara lebih menyeluruh.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kesehatan ibu, berbagai strategi dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kapasitas serta pemerataan tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kesehatan, serta peningkatan keterlibatan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu secara berkelanjutan, sejalan dengan tujuan rencana strategis pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sepanjang siklus kehidupan dengan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator AKI pada tahun 2025 adalah sebesar Rp333.032.536.523,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp141.683.227.576,00. Penghitungan efisiensi anggaran didasarkan pada sisa anggaran program saja, karena nilai AKI tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada. Efisiensi anggaran sebesar Rp190.349.308.947,00.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan**

   Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

   Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (realisasi anggaran 8,97%) dengan kegiatan:
    1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
    2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
    3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

    Program ini dilaksanakan melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan lintas sektor, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka upaya promotif dan preventif, serta pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di tingkat provinsi. Program pemberdayaan masyarakat ini juga mendukung peningkatan capaian AKI dan upaya pencegahan stunting melalui kegiatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan kepada masyarakat.
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggaran 42,88%) dengan kegiatan:
    1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
    4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

    Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana, prasarana, serta alat kesehatan untuk mendukung pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat daerah provinsi. Selain itu, program ini juga mencakup penyediaan layanan kesehatan rujukan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, serta penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi. Berbagai kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan capaian AKI.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (realisasi anggaran 52,41%) dengan kegiatan:
   1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi
   2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator AKI

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811,529,900.00	71,350,000.00	8.79
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	638,479,900.00	47,230,000.00	7.40
Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	148,550,000.00	0.00	0.00
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	24,500,000.00	24,120,000.00	98.45
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	330,607,624,773.00	141,766,347,784.00	42.88

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Masyarakat			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	86,691,824,844.00	39.71
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	54,714,360,290.00	49.15
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	145,934,000.00	62.82
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	214,228,650.00	29.48
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,613,381,850.00	845,529,792.00	52.41
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi	178,270,000.00	84,343,040.00	47.31
Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,435,111,850.00	761,186,752.00	53.04

Sumber: BKAD NTB 2025

E. Indikator AKB

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

AKB adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun). Capaian AKB Provinsi NTB berdasarkan hasil *Long Form* SP2020 yaitu sebesar 24,64 per 1,000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukan penurunan kematian bayi yang sangat signifikan, yaitu hampir 90% dalam rentang waktu 50 tahun (periode 1971-2022). Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi NTB hanya dapat menghitung jumlah angka kematian bayi yang dilaporkan melalui fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Perhitungan ini hanya merupakan proporsi dan tidak dapat dijadikan dasar pada perhitungan angka kematian bayi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Nilai AKB diperoleh melalui Sensus Kependudukan setiap 10 tahun yang dilakukan oleh BPS, sehingga capaian ini tidak bisa dihitung pada tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPD 2024-2026

Target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 24,64-16,85 per 1,000 kelahiran hidup, namun tidak dapat dibandingkan dengan kondisi tahun 2025, karena tidak ada data.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Hasil SP LF2020 menunjukan bahwa AKB Provinsi NTB adalah 24,64 per 1,000 kelahiran hidup dan terdapat lima kabupaten/kota yang memiliki angka kema an bayi di atas angka provinsi, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Angka kematian bayi di NTB paling tinggi sebesar 27,82 per 1000 kelahiran hidup berada di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan paling rendah berada di Kota Mataram, yaitu sebesar 14,46 per 1000 kelahiran hidup.

Capaian AKB pada setiap provinsi sangat beragam, Provinsi NTT dan Provinsi Bali sebagai Provinsi terdekat, memiliki capaian AKB 25,67 per 1,000 kelahiran hidup di NTT dan 13,26 per 1,000 kelahiran hidup di Bali. Sementara itu, rata-rata AKB di Indonesi adalah 16.85 per 1,000 kelahiran hidup. Kasus AKB terendah berada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 10.38 per 1,000 kelahiran hidup, jauh dibawah rata-rata nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Tingginya proporsi kasus kematian neonatal (usia 0–28 hari) dalam kelompok balita menunjukkan bahwa periode awal kehidupan merupakan fase yang paling rentan terhadap morbiditas dan mortalitas. Kondisi tersebut sering kali mencerminkan belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, terutama pada layanan esensial sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain kualitas pelayanan antenatal care (ANC) yang belum sepenuhnya memenuhi standar serta belum

optimalnya deteksi dini terhadap berbagai faktor risiko kehamilan seperti anemia, hipertensi, infeksi, dan kekurangan energi kronis (KEK). Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko komplikasi pada bayi yang dilahirkan, seperti kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia, serta infeksi neonatal. Tingginya jumlah kasus kematian neonatal dalam kelompok balita usia 0–1 tahun juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), khususnya pada masa neonatal, masih perlu diperkuat.

Dalam rangka menurunkan AKB, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya strategis yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan penguatan pelayanan ANC terpadu yang berkualitas, standarisasi pelayanan neonatal esensial di seluruh fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan audit kasus neonatal baik pada kasus near miss maupun kematian neonatal. Selain itu, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan resusitasi neonatal dan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) bagi bidan dan dokter, serta pemerataan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan neonatal.

Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan sistem rujukan kesehatan dengan pengembangan jejaring rujukan neonatal regional, penyediaan ambulans, serta ketersediaan peralatan stabilisasi neonatal guna memastikan penanganan kasus kegawatdaruratan bayi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Di samping itu, pemberdayaan keluarga dan masyarakat juga terus ditingkatkan melalui edukasi mengenai pentingnya imunisasi lengkap serta peningkatan praktik pemberian ASI, yang terbukti berperan dalam meningkatkan ketahanan hidup bayi. Berbagai intervensi tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan UHH masyarakat secara keseluruhan.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator AKB pada tahun 2025 adalah sebesar Rp333.032.536.523,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp141.683.227.576,00. Penghitungan efisiensi anggaran didasarkan pada sisa anggaran program saja, karena nilai AKI tahun 2025 sampai dengan TW III tidak ada. Efisiensi anggaran sebesar Rp 190.349.308.947,00.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi

Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (realisasi anggaran 8,97%) dengan kegiatan:

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan lintas sektor, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka upaya promotif dan preventif, serta pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di tingkat provinsi. Program pemberdayaan masyarakat ini juga mendukung peningkatan capaian AKB dan upaya pencegahan stunting melalui kegiatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan kepada masyarakat.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggaran 42,88%) dengan kegiatan:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana, prasarana, serta alat kesehatan untuk mendukung pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat daerah provinsi. Selain itu, program ini juga mencakup penyediaan layanan kesehatan rujukan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, serta penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi. Berbagai kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan capaian AKB.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (realisasi anggaran 52,41%) dengan kegiatan:
   1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi
   2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan stunting, dengan peran sentral dinas kesehatan sebagai *leading sector* yang memastikan intervensi gizi spesifik berjalan efektif, mulai dari pemantauan pertumbuhan balita, pemberian suplementasi, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak. Sinergi ini diperkuat oleh dinas sosial yang berperan dalam intervensi sensitif melalui perlindungan sosial, seperti bantuan pangan dan jaminan sosial bagi keluarga rentan, serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mendorong peningkatan kapasitas keluarga, pengasuhan yang responsif, serta pemberdayaan ibu sebagai aktor kunci dalam pencegahan stunting di tingkat rumah tangga.

Di sisi lain, keterlibatan mitra pembangunan menjadi elemen strategis dalam memperkuat implementasi di lapangan, terutama dalam hal advokasi, pendampingan masyarakat, inovasi program, serta penguatan kapasitas kader dan komunitas. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan perilaku. Dengan integrasi peran antar sektor tersebut, upaya penanganan stunting menjadi lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator AKB

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811,529,900.00	71,350,000.00	8.79
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	638,479,900.00	47,230,000.00	7.40

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	148,550,000.00	0.00	0.00
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	24,500,000.00	24,120,000.00	98.45
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	141,766,347,784.00	42.88
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	86,691,824,844.00	39.71
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	54,714,360,290.00	49.15
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	145,934,000.00	62.82
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	214,228,650.00	29.48

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,613,381,850.00	845,529,792.00	52.41
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi	178,270,000.00	84,343,040.00	47.31
Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,435,111,850.00	761,186,752.00	53.04

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.3 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indiKator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Presentase Kota Kreatif, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), dan Presentase Penanganan Konflik SARA. Indikator-indikator ini merupakan indikator kunci dalam menilai kualitas pendidikan dan kesehatan di suatu wilayah. Capaian keempat indikator tersebut mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong ekosistem budaya dan kreativitas yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil capaian indicator-indikator pada sasaran strategis tersebut tersaji pada table berikut ini:

Tabel 3.26
Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	60.42	69-70	NA	70-75	-	NA	NA	NA	NA
Persentase Kota Kreatif	%	30	40	NA	100	-	NA	NA	NA	NA
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Point	60.41	57.05-57.1	NA	>60	-	NA	NA	NA	NA
Persentase penanganan konflik										

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (8=5/3*100)**	**9 (9=5/4*100)**	**10 (10=5/6*100)**	**11 (11=5/7*100)**
SARA	%	100	100	100	100		100	100	100	

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

Keterangan: NA = Not Available atau data tidak tersedia

A. Indikator Kinerja IPLM

a. Analisis Capaian Kinerja:

IPLM merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Komponen pengukuran IPLM ini terdiri dari dimensi kepatuhan dan dimensi kerja yang pada setiap dimensi tersebut terdiri dari beberapa variable dan indicator. IPLM diukur oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan data yang disampaikan dan diverifikasi oleh daerah.

Pada tahun 2025, IPLM menggunakan instrument dan metodologi terbaru yang berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dan target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen dan dimensi kepatuhan sebesar 30 persen. Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan ataupun kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantive terhadap kinerja perpustakaan. Melalui metode pengukuran yang baru ini juga menunjukan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbeda dengan pengukuran tahun sebelumnya yang berdasarkan kewilayahan.

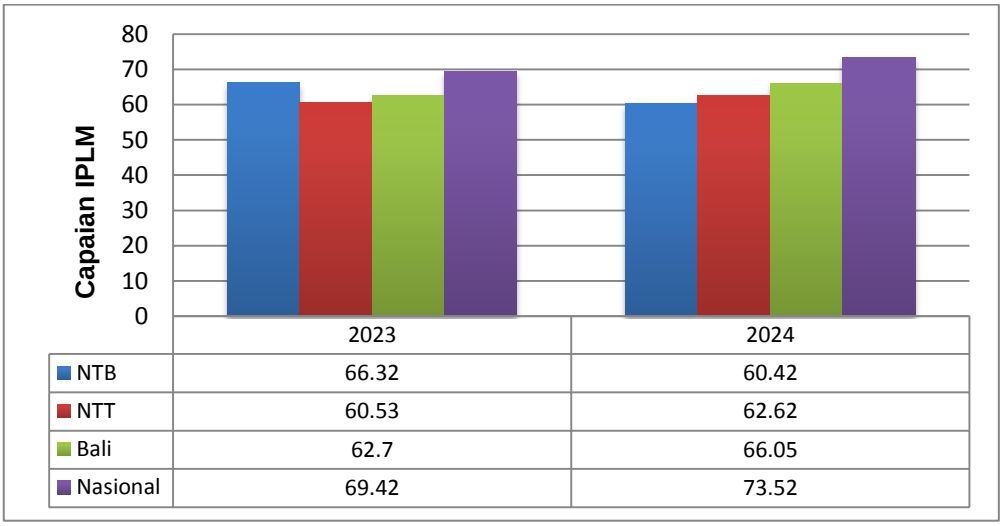
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 capaian IPLM Provinsi NTB belum rilis. Akan tetapi, hasil perhitungan Perpustakan Nasional RI pada tahun 2025 merupakan hasil perhitungan dengan metode baru, sehingga capaian di tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian IPLM Provinsi NTB menunjukkan fluktuasi selama periode 2022–2024, yang salah satunya disebabkan oleh perubahan metode perhitungan IPLM pada tahun 2023 dan 2025. Perubahan metodologi tersebut berdampak pada keterbatasan dalam melakukan perbandingan dan evaluasi capaian secara menyeluruh dan konsisten antarwaktu. Perbandingan capaian yang dimungkin adalah capaian IPLM tahun 2023 dan 2024, seperti tampak pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.12
Perbandingan Capaian IPLM 2023-2024



	2023	2024
NTB	66.32	60.42
NTT	60.53	62.62
Bali	62.7	66.05
Nasional	69.42	73.52

Sumber: Perpusatakaan Nasional RI, 2025

Tahun 2023, capaian IPLM NTB mengalami penurunan menjadi 66.32 point dibandingkan capaian tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya perubahan cara menghitung IPLM secara nasional. Tahun 2024, IPLM NTB kembali mengalami penurunan menjadi 60.42 point karena nilai IPLM Kabupaten/Kota di NTB yang menjadi agregasi nilai IPLM Provinsi NTB juga mengalami penurunan terutama kabupaten Bima dari tahun 2023 yang dalam posisi “Sedang” menjadi “Sangat Rendah”.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Realisasi IPLM tahun 2025 belum dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI, namun metodologi perhitungan yang berbeda akan menyebabkan hasil 2025 belum bisa dibandingkan dengan target akhir RPD.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Tidak terdapat target atau standar nasional yang harus dicapai oleh setiap Provinsi dan capaian IPLM 2025 juga belum rilis. Namun demikian, capaian IPLM NTB tahun 2024 termasuk kategori sedang dengan capaian 60,42 dan berada di bawah capaian Provinsi NTT yaitu 62,62 dan capaian Provinsi Bali yaitu sebesar 66,05.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui perumusan dan implementasi strategi, kebijakan, dan program yang mendukung penguatan budaya literasi masyarakat. Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan untuk memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan capaian indikator makro pendidikan, yaitu HLS dan RLS. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan indikator peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan setiap tahun. Seiring dengan pelaksanaan berbagai program tersebut, jumlah kunjungan ke

Perpustakaan Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, jumlah kunjungan tercatat mencapai 66.223 orang dengan jumlah anggota perpustakaan sebanyak 81.260 orang. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong minat baca masyarakat, khususnya kalangan pelajar, agar lebih aktif memanfaatkan layanan perpustakaan baik di tingkat provinsi maupun di perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan lembaga masyarakat lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkaya koleksi bahan bacaan yang tersedia, mulai dari buku ilmiah hingga buku pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan pembaca. Selain penguatan layanan konvensional, transformasi layanan perpustakaan juga dilakukan melalui pengembangan layanan berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan peran perpustakaan dari sekadar penyedia koleksi buku fisik menjadi penyedia akses informasi digital yang lebih luas dan fleksibel. Hal ini semakin relevan terutama sejak adanya pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi aktivitas membaca di perpustakaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB mengembangkan berbagai layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), salah satunya melalui aplikasi perpustakaan digital **NTBelib** yang memungkinkan masyarakat mengakses koleksi buku elektronik secara lebih mudah melalui perangkat digital.

Selain pengembangan layanan perpustakaan digital, berbagai inovasi lain juga dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan literasi masyarakat. Inovasi tersebut antara lain pemanfaatan sistem otomasi perpustakaan berbasis perangkat lunak sumber terbuka seperti Senayan Library Management System (SLiMS) serta penggunaan aplikasi INLISLite yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, layanan perpustakaan juga diperluas melalui penyediaan layanan daring bagi pemustaka, seperti pembuatan akun anggota perpustakaan digital, akses terhadap sumber informasi elektronik berupa *e-book* dan *e-journal*, serta layanan referensi yang memberikan rujukan langsung ke berbagai sumber informasi digital. Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antar pustakawan serta pengembangan berbagai layanan literasi inovatif seperti **Kafe Literasi Keliling** yang membawa koleksi bacaan langsung ke masyarakat, serta penyediaan layanan **Pojok Baca Digital (POCADI)** yang ditempatkan di ruang publik strategis, salah satunya di kawasan Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center melalui kerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IPLM tahun 2025 adalah sebesar Rp1,966,284,700 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp506,249,300. Efisiensi anggaran dihitung hanya dengan melihat sisa anggaran pelaksanaan program, karena karena capaian indikator belum terpublikasi. Efisiensi dari sisa anggaran sebesar Rp1.460.035.400,00.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**
   Program dan kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB adalah Program Pembinaan Perpustakaan (realisasi anggaran 25,75%) dengan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPLM

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Kegiatan (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pembinaan Perpustakaan	1,966,284,700.00	506,249,300.00	25.75
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1,734,819,700.00	473,859,300.00	27.31
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	231,465,000.00	32,390,000.00	13.99

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Kinerja Presentase Kota Kreatif

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian indicator Kota Kreatif tahun 2025 ditarget kan sebesar 40 persen, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, capaian persentase Kota Kreatif pada TW III tahun 2025 belum dirilis secara resmi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kota kreatif merupakan indicator yang baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga jika dibandingkan dengan capaian 2024 yang disamakan dengan capaian TW III Tahun 2025 maka capaian nya mencapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

Realisasi kota kreatif diharapkan dapat mencapai target pada tahun 2026 sebesar 100%, sementara target pada tahun 2026 hanya sebesar 40%, sehingga dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target di akhir periode 2026.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tidak ada indikator kota kreatif pada level nasional, sehingga tidak ada pembanding untuk capaian indikator ini pada level daerah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi NTB untuk meningkatkan presentase kota kreatif, upaya tersebut antara lain melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan dan melindungi hak kekayaan intelektual. Hal tersebut dilakukan dengan penyediaan sarana prasana kota kreatif, melalui koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif, koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula dan perluasan pasar produk kreatif untuk pasar ekspor maupun domestik.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Kota Kreatif tahun 2025 adalah sebesar Rp627.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp122.931.700,00. Efisiensi anggaran dihitung hanya dengan melihat sisa anggaran pelaksanaan program, karena karena capaian indikator belum terpublikasi. Efisiensi dari sisa anggaran sebesar Rp504.068.300,00.

7. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB adalah Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (realisasi anggaran 19,61%) dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.28

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Presentase Kota Kreatif

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Kegiatan (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	627,000,000.00	122,931,700.00	19.61
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	627,000,000.00	122,931,700.00	19.61

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

IPK adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan kebudayaan di Indonesia. IPK memberikan gambaran tentang bagaimana kebudayaan dikelola, dilestarikan, dan dikembangkan dalam suatu masyarakat. Pengukuran ini penting untuk melihat kontribusi kebudayaan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. IPK telah dirancang berdasarkan kerangka kerja *Culture for Development Indicators* (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam kerangka ini, IPK terdiri dari 31 indikator yang

dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi-dimensi tersebut mencakup Dimensi Ekonomi Budaya (satu indikator), Dimensi Pendidikan (enam indikator), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (delapan indikator), Dimensi Warisan Budaya (enam indikator), Dimensi Ekspresi Budaya (empat indikator), Dimensi Budaya Literasi (tiga indikator), dan Dimensi Gender (tiga indikator). Indikator-indikator dalam dimensi tersebut menggunakan data yang bersumber dari hasil survei BPS dan data dari kementerian lainnya.

a. Analisis Capaian Kinerja:

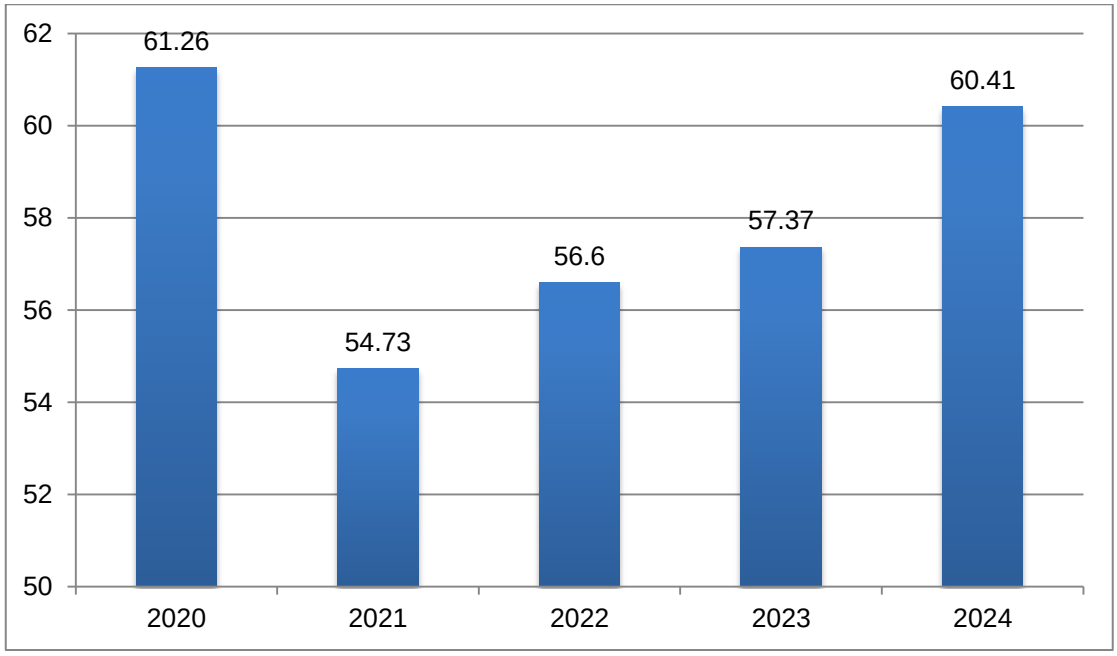
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian IPK pada TWIII Tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Kebudayaan. Sementara itu, capaian IPK tahun 2024 Provinsi NTB adalah sebesar 60.41, jika dibandingkan capaian TWIII 2025 dengan capaian 2024, maka persentase capaian mencapai 100 persen. Sementara itu, target capaian 2025 sebesar 57,05 – 57,10 telah tercapai di tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian IPK Provinsi NTB selalu meningkat setiap tahunnya, dengan capaian per dimensi yang beragam. Capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,04 dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 57,37. Kenaikan tersebut, tampak pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.13
Capaian IPK Provinsi NTB Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

Realisasi IPK tahun 2024 adalah 60,41 atau telah mencapai target akhir RPD yang sebesar >60.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Capaian IPK NTB masih di atas rata-rata nasional yang mencapai 59,98 pada tahun 2024. Perbandingan capaian IPK Provinsi NTB dan Nasional terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.29
Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi
menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
D1	Ekonomi Budaya	79,24	47,97	43,09	41,92	47,10
D2	Pendidikan	69,22	71,61	71,80	72,91	69,46
D3	Ketahanan Sosial Budaya	73,30	64,36	68,76	68,97	79,39
D4	Warisan Budaya	45,43	47,08	47,72	48,37	50,16
D5	Ekspresi Budaya	45,66	31,43	37,37	39,74	43,61
D6	Budaya Literasi	66,88	54,22	59,59	61,20	63,49
D7	Gender	44,36	48,18	51,11	52,25	53,68
IPK Provinsi		61,26	54,73	56,60	57,37	60,41
IPK Nasional		54,65	51,90	55,13	57,13	59,98

Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2025

Sementara itu, capaian IPK Provinsi NTT pada tahun 2024 adalah sebesar 54,89 dan capaian IPK Provinsi Bali adalah 70,66.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan IPK melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kebudayaan. Upaya tersebut diarahkan pada penguatan pengembangan dan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai bagian dari strategi memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong implementasi Gerakan Sabtu Budaya di lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran dan pengenalan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Program ini juga didukung oleh regulasi daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pemajuan kebudayaan di daerah. Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil mengembangkan 10 dari 12 Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada. Selain itu, upaya pelestarian budaya juga dilakukan melalui kegiatan pemugaran cagar budaya, penyelenggaraan berbagai event kebudayaan di kawasan cagar budaya, serta pelaksanaan *workshop* kesenian yang melibatkan pelaku seni dan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut tidak

hanya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya daerah, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem kebudayaan serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Hal utama lainnya dalam upaya peningkatan IPK Provinsi adalah koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pada dimensi-dimensi IPK. Hal ini menjadi penting, karena IPK tidak hanya dibentuk dari unsur kebudayaan, tapi sector lain diluar urusan kebudayaan.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IPK tahun 2025 adalah sebesar Rp429,382,311,118 dengan realisasi anggaran sebesar Rp221,453,529,625.60. Efisiensi anggaran dihitung hanya dengan melihat sisa anggaran pelaksanaan program, karena karena capaian indikator belum terpublikasi. Efisiensi dari sisa anggaran sebesar Rp207.928.781.492,40.

7. **Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Hampir semua program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

   Program dan kegiatan yang cukup efektif dalam pencapaian target kinerja adalah Program Pengembangan Kesenian Tradisional (realisasi anggaran 71,18%) dengan kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

   Program dan kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian target kinerja adalah:

   a. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (realisasi anggaran 11,84%) dengan kegiatanPenetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
   b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (realisasi anggaran 52,37%) dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   c. Program Pembinaan Perpustakaan (realisasi anggaran 25,75%) dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

d. Program Pembinaan Sejarah (realisasi anggaran 18,44%) dengan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
e. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 51,99%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
   2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
   3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
f. Program Pengembangan Kebudayaan (realisasi anggaran 27,67%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   2. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi
   3. Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPK

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	126,500,000.00	14,976,000.00	11.84
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	126,500,000.00	14,976,000.00	11.84
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,604,949,300.00	1,887,739,731.00	52.37

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,604,949,300.00	1,887,739,731.00	52.37
Program Pembinaan Perpustakaan	1,966,284,700.00	506,249,300.00	25.75
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1,734,819,700.00	473,859,300.00	27.31
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	231,465,000.00	32,390,000.00	13.99
Program Pembinaan Sejarah	224,727,450.00	41,445,702.00	18.44
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	224,727,450.00	41,445,702.00	18.44
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	217,552,406,077.60	51.99
Pengelolaan Pendidikan	214,370,103,602.00	121,014,796,125.80	56.45

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
Sekolah Menengah Atas			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	81,649,478,124.80	45.05
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	14,888,131,827.00	65.15
Program Pengembangan Kebudayaan	5,083,896,400.00	1,406,737,217.00	27.67
Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2,777,804,400.00	873,973,467.00	31.46
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	1,530,092,000.00	530,663,750.00	34.68
Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	776,000,000.00	2,100,000.00	0.27
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	120,000,000.00	85,421,300.00	71.18

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000.00	85,421,300.00	71.18

Sumber: BKAD NTB 2025

D. Indikator Persentase Penanganan Konflik SARA

Indikator selanjutnya pada sasaran strategis ini adalah Persentase Penanganan Konflik SARA yang digunakan untuk mengukur persentase konflik yang bermuatan SARA yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025**
   Realisasi persentase penanganan konflik SARA tahun 2025 pada TW III adalah 100%, maka telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
2. **Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Capaian indikator persentase penanganan konflik SARA tahun 2024 juga mencapai 100%, sehingga selalu mencapai target yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Persentase penanganan konflik SARA setiap tahun mencapai 100 persen, sehingga target akhir RPD diperkirakan dapat tercapai yang juga memiliki target 100 persen setiaap tahunnya.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Tidak ada standar nasional tentang indikator persentase penanganan konflik SARA, sehingga capaian ini tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Dalam rangka mencegah dan meredam potensi konflik sosial, termasuk konflik yang berkaitan dengan isu SARA, Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi serta peran berbagai tim dan forum strategis daerah. Forum tersebut antara lain Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bale Mediasi, serta jejaring pemantauan sosial di masyarakat. Sepanjang tahun 2025, berbagai forum tersebut secara aktif difungsikan melalui

pelaksanaan rapat koordinasi, antara lain rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebanyak 1 kali, rapat FKUB sebanyak 1 kali, rapat Forum Pembauran Kebangsaan sebanyak 2 kali, serta rapat Forkopimda sebanyak 12 kali. Tim dan forum strategis tersebut dibentuk melalui keputusan kepala daerah dan difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah. Melalui forum-forum tersebut, berbagai upaya pencegahan konflik dilakukan secara terstruktur, antara lain dengan menjaring dan menghimpun informasi dari masyarakat terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat memicu konflik sosial. Informasi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan antar pemangku kepentingan untuk mendukung sistem peringatan dini serta perumusan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan guna menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, forum-forum strategis ini juga berperan dalam mengoordinasikan pengamanan terhadap kondisi tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah, menyusun mekanisme pengamanan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta memberikan laporan dan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada tahun 2025 teridentifikasi sebanyak 152 potensi konflik yang tersebar di 10 kabupaten/kota di wilayah provinsi, sehingga penguatan koordinasi dan sistem pencegahan konflik menjadi langkah penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan persatuan masyarakat.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Persentase Penanganan Konflik SARA tahun 2025 adalah sebesar Rp855.858.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp391.919.071,00. Perhitungan efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas tersaji pada tabel di bawah ini.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Terdapat 1 (satu) program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja dan efektif, yaituProgram Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (realisasi anggaran 45,79%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Tabel 3.31
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator
Persentase Penanganan Konflik SARA

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Persentase penanganan konflik SARA	855.858.300,00	391.919.071,00	100	100	3,\.919.190,71	8.558.583,00	0,46	0,54	54,21

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Penanganan Konflik SARA

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	391,919,071.00	45.79
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	391,919,071.00	45.79

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.4 Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana

Keberhasilan pelaksanaan sasaran meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan dalam menghadapi Risiko Bencana, diukur dengan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK), Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Bauran Energi Baru Terbarukan.Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100) atau (9=(3-(6-3)/3)*100	10 (10=6/5*100) atau (10=(5-(6-5)/5)*100	11 (11=6/7*100) atau (11=(7-(6-7)/7)*100	12 (12=6/8*100) atau (12=(8-(6-8)/8)*100
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	24,47	25,99	25,99	24,47	19,82	31.89	100,00	105,84	76,53	123,26
Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	113,63	119,83	119,83	156,02	106,83	90	72,83	69,8	53,95	26.64
Bauran energi baru terbarukan	%	23,25	23	25	25,07	25	23	107,83	100,28	100,28	109

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

a. Analisis Capaian Kinerja

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Realisasi kinerja indikator penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi NTB Tahun 2025 sebesar 24,47% (angka realisasi masih bersifat sementara merupakan angka realisasi tahun 2024. Realisasi ini melampaui target tahun 2025 sebesar 25,99% atau mencapai kinerja 105,84%. Link bukti dukung https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/download/MWU2ZTYyYWQwNmQxNDJjYmQ2NjNiMmRiYzAyNTZiYjc1YzczOGYzYWU3YmViZTUwZmRmMzc0YmQ4MThkZmYyNjlkMjA2ZGQ3ODA4OGFhZGQ5MGQyYzc2ZmEwODUxNTY2NjcwM2IyZjljMTBhNDY4NzFiMzk1YWI0YTBlNGViOWV4VlNEaTNZOGFsYjZnMHVib0dUWkF3VFQyV2dMTyt4aXQ0VUFoS29mUWNVPQ

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja indikator penurunan Emisi GRK Provinsi NTB Tahun 2025 memiliki angka yang sama dengan tahun 2024, yaitu sebesar 24,47% atau capaian 100%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**

   Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 19,82%, maka capaian tahun 2025 masih belum mencapai target atau dengan capaian 76,53%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Berdasarkan dokumen *Enhanced Nationally Determined Contributions (NDCs)* Indonesia menetapkan target penurunan emisi GRK menjadi 31,89% (nonkondisional) dan 43,20% (kondisional). Sehingga, realisasi kinerja penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi NTB sebesar 24,47%, masih di bawah target nasional

5. **Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Keberhasilan capaian indikator kinerja penurunan emisi GRK merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTB. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peta Jalan NTB menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi dalam rangka menurunkan Emisi GRK. Peta Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan visi Daerah yang memiliki ketahanan dan kemandirian energi yang bersumber dari Sumber daya energi lokal, terbarukan, berkelanjutan, dan rendah karbon, untuk menjamin akses energi yang universal dan andal bagi seluruh masyarakat.

Sedangkan misi peta jalan yaitu:

a. Mengurangi ketergantungan Daerah NTB terhadap sumber daya energi yang diimpor dari luar daerah dan optimalisasi penggunaan Sumber daya energi yang tersedia secara lokal, terbarukan, berkelanjutan dan rendah karbon;

b. Mempercepat adopsi, transfer, dan implementasi teknologi maju untuk Energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik, sistem penyimpanan dan lain-lain secara terstruktur dan berkelanjutan; dan

c. Menyediakan dan memastikan akses energi yang universal, andal, dan rendah karbon bagi seluruh masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing. Emisi nol bersih mendorong transisi ke energi terbarukan yang dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan, dan berperan untuk meningkatkan pembangunan yang sejahtera dan berkelanjutan. Emisi nol bersih di Provinsi NTB sangat urgen diselenggarakan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Target *Net Zero Emision* (NZE) pada tahun 2050. Target tersebut lebih cepat 10 tahun dari target nasional. Untuk memenuhi target tersebut diperlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak dan mitra pembangunan terkait. Keberpihakan anggaran terhadap program dan kegiatan dalam mendukung menetapkan Target NZE pada tahun 2050 harus menjadi atensi pemangku kebijakan.

   Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB terkait emisi GRK, yaitu:

   1. Penggunaan pupuk kimia sintetik, pestisida, serta pembakaran hutan/lahan untuk konversi lahan menjadi penyumbang signifikan emisi metana dan nitrogen oksida.
   2. Pembakaran limbah padat dan sistem pengelolaan limbah cair yang salah, terutama di kawasan urban seperti Mataram, berkontribusi besar.
   3. Pesatnya pembangunan hotel dan sarana pariwisata, terutama di kawasan Mandalika, meningkatkan jejak karbon akibat penggunaan energi dan pembangunan fisik.
   4. Kurangnya data emisi yang akurat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dukungan antarinstansi yang belum optimal menghambat pelaporan rutin data emisi daerah.
   5. Perluasan lahan pertanian yang tidak terkontrol dan deforestasi juga memengaruhi kemampuan penyerapan karbon di NTB.

   Upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam menurunkan emisi karbon dilakukan pada sektor kehutanan dan sektor pengelolaan limbah yaitu:

   1. Menerbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun2024 tentang Peta Jalan NTB menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050.

2. Melakukan penurunan cadangan karbon berupa pembentukanKEE, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pembentukanperhutanan sosial dalam rangka mitigasi perubahan iklim;
3. Meningkatkan tata kelola karbon;
4. Menjaga kawasan hutan agar tetap lestari;
5. Mendorong agar kepedulian masyarakat terhadap fungsi darihutan dan lingkungan yang lestari terus meningkat;
6. Memasukan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah, mendorong pembangunan *eco office*, gaya hidup hemat energi, hemat air, menanam pohon, bersih pantai, danpenggunaan renewable energi yang bisa dirasakanmanfaatnya langsung oleh masyarakat secara berkelanjutan.

   Selain itu pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan aksi mitigasi yaitu:

   1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral;
   2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove;
   3. Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral;
   4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut danmangrove;
   5. Pembangunan hutan tanaman; Pengelolaan hutan lestari;
   6. Rehabilitasi dengan rotasi;
   7. Rehabilitasi non-rotasi;
   8. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut;
   9. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekastambang;
   10. Konservasi keanekaragaman hayati;
   11. Perhutanan sosial;
   12. Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, danekoriparian;
   13. Pengembangan dan konsolidasi hutan adat; dan;
   14. Pengawasan dan law enforcement dalam mendukungperlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

   Pada sub sektor pengelolaan limbah, Provinsi NTB berhasil mencatat penurunan emisi CO_2 eq yang dihasilkan dari sektor limbah. Penurunan ini mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menerapkan praktik pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan, melalui pengelolaan TPA, pengurangan sampah dari rumah tangga, dan optimalisasi bank sampah untuk mengukur produktivitas kegiatan pengolahan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recyle*). Implementasi program pengurangan emisi GRK dari aksi adaptasi perubahan iklim dicerminkan melalui pengusulan kelompok Program Kampung Iklim (Proklim). Kelompok yang diusulkan merupakan kelompok yang sudah melakukan aksi adaptasi

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar Rp3.221.912.183,00. Realisasi anggaran sebesar Rp893.614.959.605,00. Efisiensi anggaran sebesar 83,95%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3.34
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Penurunan Emisi GRK

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Penurunan Emisi GRK	21.327.087.559,00	3.221.912.183,00	25,99	24,47	131,667.845,65	820.588.209,27	0,16	0,84	83,95

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target:

a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan:
   b. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi
   c. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
   d. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
   e. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
   f. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
   g. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
b. Program Pengelolaan Persampahan (realisasi anggaran16,15%) dengan kegiatan Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional
c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (realisasi anggaran7,02%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Penyediaan Biomassa Dan/Atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi
   2. Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi

3. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.35

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Penurunan Emisi GRK

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02
Program Pengelolaan Persampahan	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Program Pengelolaan Energi	854,994,985.00	59,985,905.00	7.02

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Baru Terbarukan			
Pengelolaan Penyediaan Biomassa Dan/Atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi	329,099,265.00	14,873,375.00	4.52
Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	492,873,195.00	19,822,925.00	4.02
Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi	33,022,525.00	25,289,605.00	76.58

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Capaian Kinerja Indikator Indeks Risiko Bencana

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Indeks Risiko Bencana Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 156,02 poin tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 (119,83 poin) atau mencapai 69,80%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 156,02 point jika dibandingkan dengan tahun 2024 (113,63), maka capaian tahun 2025 sebesar 72,83%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD

Realisasi Indeks Risiko Bencana Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 156,02 poin belum mencapai target akhir RPD tahun 2026 (106,83 poin) atau mencapai 53,95%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Nilai Indeks Risiko Becana NTB tahun 2025 sebesar 156,02 poin, sedangkan untuk IRB Nasional juga berada pada angka 90 di kategori sedang. Sehingga IRB NTB masih di bawah rata-rata Indeks Risiko Bencana Nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanganan Bencana, risiko bencana yang dominan pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, cuaca ekstrem, dan erupsi gunung api.

   Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

   a. Penguatan implementasi Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi NTB 2022-2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-825 Tahun 2021.
   b. Melaksanakan strategi di daerah mencakup strategi preventif, tanggap darurat pada saat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi.
   c. Penguatan penerapan manajemen penanggulangan bencana melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
      1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana.
      2. Tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
      3. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana.
   d. Membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana
   e. Pembuatan alarm bencana
   f. Membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu
   g. Memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

   Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dalam Indeks Risiko Bencana dapat disampaikan sebagai berikut:

   Permasalahan-permasalahan:

   a. Ketimpangan Akses Informasi

      Tidak semua wilayah kabupaten/kota memiliki akses yang sama terhadap layanan informasi kebencanaan. Wilayah terpencil atau terisolasi cenderung lebih sulit dijangkau oleh layanan informasi kebencanaan.
   b. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

      Banyak masyarakat di wilayah rawan bencana yang belum memahami pentingnya informasi kebencanaan. Kurangnya edukasi membuat masyarakat sulit mengakses dan memanfaatkan informasi kebencanaan secara efektif.

c. Infrastruktur yang Belum Memadai
   Sistem penyebaran informasi kebencanaan, seperti sirine, papan informasi, atau aplikasi digital, belum tersedia secara merata. Keterbatasan teknologi di wilayah pedesaan, seperti akses internet atau listrik, menghambat distribusi informasi.
d. Koordinasi yang Kurang Optimal
   Kurangnya koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, dan pihak lain seperti media atau lembaga swadaya masyarakat dalam menyampaikan informasi kebencanaan.
e. Tidak semua pihak terkait memiliki data atau informasi terkini mengenai risiko bencana.
f. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya
   Anggaran yang terbatas untuk memproduksi dan menyebarluaskan materi informasi kebencanaan.
g. Keterbatasan tenaga profesional yang mampu mengelola dan menyampaikan informasi secara efektif.
h. Data dan Informasi yang Tidak Memadai :
   - Keterbatasan data historis bencana:
   - Banyak daerah tidak memiliki data lengkap mengenai kejadian bencana sebelumnya, seperti frekuensi, intensitas, dan dampaknya.
i. Data spasial yang belum akurat
   Peta risiko bencana sering kali tidak detail atau tidak mencakup seluruh wilayah.
j. Sumber Daya Manusia yang Terbatas
   1. Kekurangan tenaga ahli di bidang geografi,hidrologi, klimatologi, atau bidang lainyang relevan untuk menyusun KRB.
   2. Kapasitas SDM di BPBD sering kali tidakmencukupi untuk melakukan analisis risikoyang komprehensif
k. Pendanaan yang Terbatas
   1. Anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan survei lapangan, pengadaan perangkat lunak GIS (Geographic Information System), atau pembaruan data.
   2. Prioritas anggaran sering kali dialihkan untuk penanganan bencana daripada untuk perencanaan dan pencegahan.
l. Kompleksitas Kajian Risiko :
   Risiko bencana bersifat multidimensi, melibatkan berbagai sektor (sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan), sehingga sulit untuk dirangkum dalam satu dokumen kajian.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan capaian IKD, yaitu:

1. melakukan Koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kota Mataram untuk mengidentifikasi penyebab masalah IKD Kota Mataram belum terinput (sebab karena kesalahan teknis, keterlambatan pengiriman data, atau kurangnya dokumen pendukung)
2. Koordinasi: Mengadakan rapat koordinasi antara BPBD Kota Mataram, BPBD Provinsi NTB, untuk menyelaraskan data yang dibutuhkan oleh BNPB.
3. Melakukan penguatan data dan informasi dengan mengembangkan sistem data terpadu bencana, melakukan survei lapangan secara rutin untuk memperbarui data resiko bencana, dan meningkatkan penggunaan teknologi seperti drone, satelit dan GIS untuk menghasilkan peta risiko yang lebih akurat.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Indeks Risiko Bencana sebesar Rp2.565.640.549,00. Realisasi anggaran sebesar Rp683.444.774,00. Efisiensi anggaran sebesar 79,54%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan

a. Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggaran 22,28%) dengan kegiatan:
   1. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
   3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Pnyelamatan Non Kebakaran (realisasi anggaran 25,11%) dengan kegiatanPenyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaranb.

Tabel 3.36
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Risiko Bencana

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Penurunan Emisi GRK	2.565.640.549,00	683.444.774,00	119,83	156,02	4.380.494,64	21.410.669,69	0,2	0,8	79,54

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.37
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Risiko Bencana

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penanggulangan Bencana	2,354,640,549.00	524,512,786.00	22.28
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	830,956,549.00	31,749,600.00	3.82
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1,343,034,000.00	447,396,986.00	33.31
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	180,650,000.00	45,366,200.00	25.11
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	211,000,000.00	158,931,988.00	75.32
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	211,000,000.00	158,931,988.00	75.32

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Capaian Kinerja Indikator Bauran Energi Baru terbarukan

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja indikator Bauran Energi Baru Terbarukan Tahun 2025 sebesar 25,07% atau lebih tinggi target tahun 2025 (25%) atau capaian 100,28%. Link bukti dukung https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lk

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun

Realisasi kinerja indikator Bauran Energi Baru Terbarukan mengalami fluktuasi dari tahun 2022 sebesar 20,44 persen kemudian menurun di tahun 2023 sebesar 19,18% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 23,25%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2025 jauh meningkat atau mencapai 107,83%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD

Realisasi kinerja indkator Bauran Energi Baru Terbarukan Tahun 2025 sebesar 25,07 % telah melampaui target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 25% atau mencapai 100,28%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional

Bauran Energi Baru Terbarukan Provinsi NTB di tahun 2025 sebesar 25,07% lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional (23%). Angka ini melampaui target nasional dengan capaian 10%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Indonesia telah menetapkan target penggunaan energi baru terbarukan minimal 23% di tahun 2025 dan meningkat hingga 31% di tahun 2050 mendatang. Energi baru terbarukan merupakan pengelolaan energi yang memanfaatkan proses alam secara berkelanjutan yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Salah satu kelebihan sekaligus ciri-ciri energi baru terbarukan EBT adalah bersifat ramah lingkungan.

Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja Bauran Energi Baru Terbarukan yaitu:

a. Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan ICLEI Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengembangan proyek energi terbarukan;

   Proyek yang dimulai sejak 2019 ini merupakan hasil kolaborasi antara ICLEI Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTB melalui

program 100% *Renewables Cities and Regions Roadmap* (100% RE). Proyek ini berfokus mendukung *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat penggunaan energi.

b. Penguatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan
c. Penguatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah.
d. Meluncurkan Peta Jalan 100% Energi Terbarukan.
   Peluncuranini merupakan bagian dari upaya mempercepattransisienergi bersih dengan target mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada 2050.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Bauran EBT sebesar Rp854.995.985,00 Realisasi anggaran sebesar Rp59.985.905,00. Efisiensi anggaran sebesar 93,00%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan dalam pencapaian target adalah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (realisasi anggaran 7,02%) dengan kegiatan:

a. Pengelolaan Penyediaan Biomassa Dan/Atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi
b. Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi
c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Bauran EBT

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	854,994,985.00	59,985,905.00	7.02
Pengelolaan Penyediaan Biomassa Dan/Atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi	329,099,265.00	14,873,375.00	4.52

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	492,873,195.00	19,822,925.00	4.02
Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi	33,022,525.00	25,289,605.00	76.58

Sumber: BKAD NTB 2025

Tabel 3.39
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Bauran EBT

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Bauran EBT	854.994.985,00	59.985.905,00	25	25,07	2.392.736,54	34.199.799,00	0,07	0,93	93,00

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

3.1.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekosistem darat, laut dan udara memiliki peran vital dalam menopang kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas ekosistem darat, laut dan udara menjadi sasaran strategis yang penting dalam upaya pel bao lingkungan hidup.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara diukur dengan indikator kinerja IKU, IKA dan IKLH. Adapun capaian sasaran kinerja tersebut tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.40

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100)	10 (10=6/5*100)	11 (11=6/7*100)	12 (12=6/8*100)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	66,49	65,53	67	66,49*	65,51	NA	100	99,24	101,5	NA
Indeks Kualitas Air	point	47	46,8	48	47*	47,9	NA	100	97,92	98,12	NA
Indeks Kualitas Udara	point	93,13	50-75	50-75	93,13*	<50	NA	100	124,17	186,22	NA

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

*Keterangan : * = data tahun 2024, rilis 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Maret Tahun 2026*

A. Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

IKTL merupakan komponen khusus yang mengukur kesehatan ekosistem berdasarkan luas vegetasi (hutan/non hutan) dan fungsi lahan, menjadikannya bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perbedaan IKTL dengan IKLH yaitu IKTL menyoroti fungsi lahan dalam menjaga ekosistem (keanekaragaman hayati, erosi), sementara IKLH menceminkan daya dukung lingkungan secara keseluruhan.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKTL di Provinsi NTB sampai dengan Triwulan Ill Tahun 2025 sebesar 66,49, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 67 sehingga capaiannya 99,24%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Data realisasi yang digunakan adalah data tahun 2024, sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

Target IKTL pada akhir periode RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebesar 65,51 dan realisasi tahun 2025 ini sebesar 66,49, sehingga capaiannya sebesar 99,24% terhadap target akhir RPD.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Belum dapat menjelaskan perbandingan capaian kinerja dengan target nasional karena keterbatasan informasi dan data.

5. **Analisis Penyebab Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

Realisasi IKTL Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 66,49, lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan (67). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tersebut antara lain:

a. Alih fungsi lahan dari kawasan vegetasi alami menjadi kawasan budidaya, permukiman, serta infrastruktur yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
b. Aktivitas perambahan hutan dan pembukaan lahan, baik untuk pertanian maupun kegiatan lainnya, yang berpotensi menurunkan luas tutupan vegetasi.
c. Degradasi lahan dan deforestasi, terutama pada wilayah yang memiliki tekanan tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
d. Terjadinya bencana alam, seperti kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang berdampak terhadap kondisi vegetasi.

e. Keterbatasan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga masih terjadi pemanfaatan lahan yang kurang sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas LHK untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tutupan lahan, antara lain melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan, serta penguatan pengelolaan kawasan konservasi**.**

Adapun beberapa alternatif solusi dan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian IKTL pada tahun-tahun mendatang antara lain:

a. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman kembali pada lahan kritis dan kawasan yang mengalami degradasi.
b. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak tutupan lahan, seperti pembalakan liar dan perambahan hutan.
c. Optimalisasi perencanaan tata ruang wilayah agar pemanfaatan lahan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
d. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian lingkungan melalui kegiatan penghijauan dan pengelolaan lahan berkelanjutan.
e. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan ekosistem darat.
f. Mendorong upaya rehabilitasi hutan dan lahan, serta meningkatkan upaya perlindungan hutan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan tutupan lahan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target IKTL sebesar Rp5.312.297.274,00. Realisasi anggaran sebesar Rp714.235.329,00. Efisiensi anggaran sebesar 86,45%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3.41
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKTL

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
IKTL	5.312.297.274	714.235.329	67	66,49	10.741.996,22	79.288.019,01	0,14	0,86	86,45

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target adalah Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan:

a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi
b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
c. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
d. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.42

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKTL

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Air (IKA)

IKA adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas air di suatu wilayah dan memberikan informasi tentang potensi bahaya kesehatan lingkungan. IKA dihitung berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi air, seperti : pH, suhu, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologis (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), bakteri E-coli.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKA di Provinsi NTB sampai dengan Triwulan Ill Tahun 2025 sebesar 45, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 46,8 sehingga capaiannya 96,15%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Data realisasi yang digunakan adalah data tahun 2024, sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Indikator IKA pada akhir periode RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 ditargetkan sebesar 47,9 dan realisasi tahun 2025 ini sebesar 47 sehingga capaiannya sebesar 98,12% terhadap target akhir RPD.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional**
   Belum dapat melaporkan perbandingan capaian kinerja dengan target nasional karena keterbatasan data.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Realisasi IKA tahun 2025 tercatat sebesar 47,9, lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan (67). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas badan air pada beberapa wilayah di Provinsi NTB mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan aktivitas manusia.

   Penurunan capaian indikator IKA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

   a. Peningkatan pencemaran dari limbah domestik, khususnya pada kawasan permukiman padat yang belum dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah yang memadai. Limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke badan air berkontribusi terhadap meningkatnya kandungan bahan pencemar organik.
   b. Aktivitas pertanian dan peternakan, yang menghasilkan limpasan (run off) pupuk kimia, pestisida, serta limbah organik yang masuk ke badan air melalui sistem drainase maupun aliran permukaan.
   c. Kegiatan usaha dan industri skala kecil dan menengah, yang dalam beberapa kasus masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan limbah cair sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran pada badan air.
   d. Pengelolaan sampah yang belum optimal, khususnya di wilayah yang berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS), sehingga masih ditemukan praktik pembuangan sampah ke sungai dan badan air lainnya.
   e. Faktor hidrologi dan perubahan musim, seperti berkurangnya debit air sungai pada musim kemarau yang menyebabkan konsentrasi bahan pencemar menjadi lebih tinggi.
   f. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengendalian kualitas air antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, terutama pada titik-titik sampling sungai yang tercemar ringan hingga sedang.

   Di sisi lain, berbagai upaya pengendalian pencemaran air telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemantauan kualitas air secara berkala, pembinaan terhadap pelaku usaha dan kegiatan, serta peningkatan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target IKA sebesar Rp20.472.092.574,00. Realisasi anggaran sebesar Rp3.161.926.278,00. Efisiensi anggaran sebesar 84,23%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3.43
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKA

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
IKA	20.472.092.574	3.161.926.278	48	47,9	67.275.027,19	426.501.928,63	0,16	0,84	84,23

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target adalah:

a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi
   2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
   3. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
   4. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
   5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
   6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun

b. Program Pengelolaan Persampahan(realisasi anggaran 16,15%) dengan kegiatan Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKA

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02
Program Pengelolaan Persampahan	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU adalah indikator untuk mengukur kualitas udara di suatu wilayah, dan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang potensi bahaya kesehatan. IKU menjadi target indikator dalam lingkungan hidup bertujuan untuk menurunkan tingkat polusi udara ambien dan emisi, serta memastikan lingkungan sehat bagi masyarakat. IKU dihitung berdasarkan konsentrasi polutan udara seperti: Partikulat (PM10), Ozon (O3), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2).

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 93,13, di atas target yang ditetapkan sebesar 50-75, sehingga capaiannya 124,17%. Link bukti dukung https://drive.google.com/drive/folders/1Z3U8xhyVfPMsNwlIZ06qJP2g9TSXyh1F

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Data realisasi yang digunakan adalah data tahun 2024, sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

IKU pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar <50%, dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 93,13 berarti capaiannya sebesar 186,22% dari target.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Belum dapat melaporkan perbandingan capaian kinerja dengan target nasional karena keterbatasan data

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Realisasi IKU tahun 2025 yang masih menggunakan data tahun 2024 menunjukkan kinerja belum sepenuhnya dinilai berhasil atau tidak. Secara umum permasalahan dalam pencapaian IKU adalah:

a. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan gaya hidup, khususnya di kawasan perkotaan. Kondisi ini memberikankontribusi pada meningkatnya emisi gas buang kendaraan seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikulat.
b. Aktivitas pembakaran terbuka, seperti pembakaran sampah rumah tangga maupun sisa hasil pertanian yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, sehingga menghasilkan polutan udara berupa asap dan partikulat.
c. Kebakaran lahan pada musim kemarau, yang menghasilkan asap dan partikel debu yang dapat menurunkan kualitas udara secara signifikan.
d. Kegiatan pembangunan dan konstruksi, yang menghasilkan debu dan partikel halus di udara terutama pada kawasan yang sedang mengalami pertumbuhan pembangunan infrastruktur.
e. Faktor meteorologi, seperti arah dan kecepatan angin, suhu udara, serta kelembaban yang mempengaruhi proses dispersi dan akumulasi polutan di udara.

Alternatif Solusi untuk meningkatkan kualitas udara di Provinsi NTB, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

a. Penguatan pengendalian emisi kendaraan bermotor, antara lain melalui pelaksanaan uji emisi secara berkala dan pengendalian kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi.
b. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan industri dan usaha yang berpotensi menghasilkan emisi udara agar memenuhi standar baku mutu emisi yang telah ditetapkan.
c. Pengendalian praktik pembakaran terbuka, termasuk melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pembakaran sampah terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
d. Peningkatan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai salah satu upaya alami dalam menyerap polutan udara serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
e. Penguatan sistem pemantauan kualitas udara, termasuk peningkatan jumlah titik pemantauan serta pengembangan sistem informasi kualitas udara yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas udara di Provinsi NTB dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target IKTL sebesar Rp5.312.297.274,00. Realisasi anggaran sebesar Rp714.235.329,00. Efisiensi anggaran sebesar 89,17%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target adalah Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan:

a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi
b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
c. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
d. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun

Tabel 3.45
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKU

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
IKU	5.312.297.274	714.235.329	75	93,13	7.669.229,35	70.830.630,328	0,11	0,89	89,17

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.46
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKU

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.6 Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik) diukur dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Kesejahteraan Sosial serta Indeks Demokrasi. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Dalam RPD 2024-2026	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100)	10 (10=6/5*100)	11 (11=6/7*100)	12 (12=6/8*100)
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	68,73	71,19	71,19	68,73*	73,65	-	100	96,54	93,32	-
Indeks Ketahanan Pangan	point	77,67	78,67	78,67	77,67*	75.68	82	100	98,73	102,63	94,72
Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	Baik	Baik	Baik*	Baik	-	100	100	100	-
Indeks Demokrasi	point	77,47	78,11	Sedang (75.37 - 78.63)	77,47*	78,75	-	100	102,79	98,37	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah
*Keterangan: * realisasi tahun 2024, karena realisasi 2025 s.d TW III tidak ada(rilis capaian tahun 2025 dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian dan Kemendagri pada bulan Maret 2026*

A. **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)**

IPK adalah indikator komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan daerah, mencakup perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, kompetensi, produktivitas, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan penduduk.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 68,73. Capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 96,54% (tidak mencapai target).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 68,73. Capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 68,73. Capaian kinerja terhadap target akhir RPD sebesar 93,32% (tidak mencapai target).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

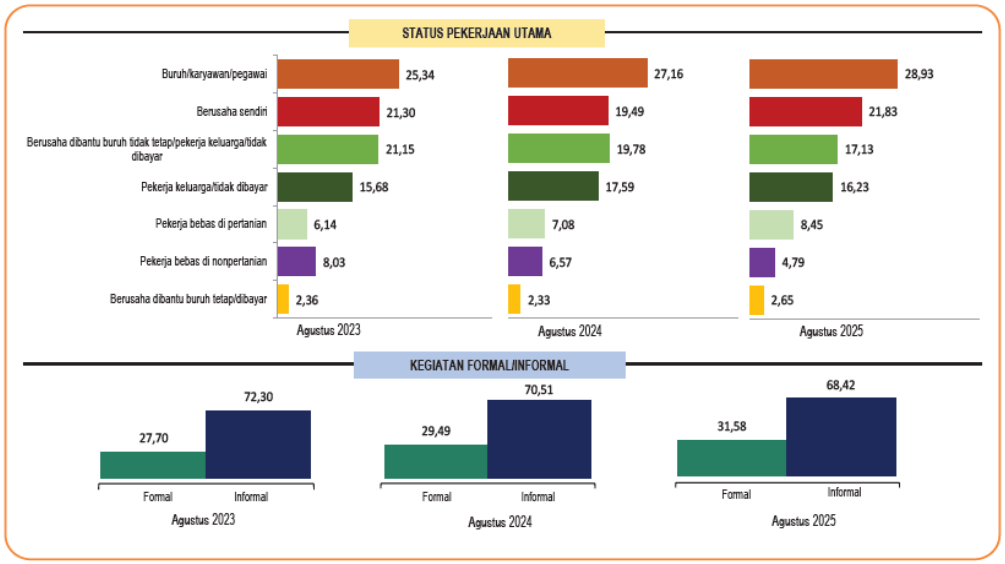
Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi NTB antara lain kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih belum optimal karena masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja dan sertifikasi pelatihan keterampilan yang masih terbatas; masih rendahnya tingkat upah dan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja khususnya pekerja sektor informal serta terbatasnya penciptaan kesempatan kerja formal. Ketidaktercapaian target ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi struktural dan dinamika pasar tenaga kerja yang tercatat dalam data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS periode Agustus 2025. BPS mencatat bahwa jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Provinsi NTB mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, menunjukkan bahwa tidak semua angkatan kerja yang ada terserap secara optimal di pasar kerja lokal, meskipun jumlah penduduk bekerja meningkat secara nominal. Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini mencerminkan adanya kecenderungan sebagian angkatan kerja tidak aktif mencari pekerjaan atau belum memasuki pasar kerja secara formal, yang kemudian berpotensi menurunkan tingkat penyerapan kerja keseluruhan.

Jumlah pengangguran masih mencapai jutaan orang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja tidak selalu diikuti dengan tersedianya kesempatan kerja yang sebanding di sektor formal, sehingga menyulitkan pencapaian target penyerapan tenaga kerja. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah struktur pekerjaan yang masih didominasi oleh sektor informal, dengan banyaknya pekerja yang bekerja sebagai upahan informal atau berstatus kerja paruh waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pekerja tercatat bekerja, mereka mungkin tidak terserap di sektor formal yang biasanya terindikasi lebih stabil dan berkontribusi pada penyerapan kerja yang lebih tinggi.

Grafik 3.14
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2023-Agustus 2025



Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Faktor Struktural dan Pasar Kerja
   - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di NTB sedikit menurun, sehingga tidak semua angkatan kerja terserap ke pasar kerja formal.
   - Masih tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal atau paruh waktu mengurangi persentase penyerapan di sektor formal.
2. Faktor Ekonomi dan Industri
   - Pertumbuhan sektor industri dan jasa belum sepenuhnya menyerap tambahan angkatan kerja baru.
   - Beberapa sektor usaha masih berhati-hati dalam perekrutan akibat fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian pasar.
3. Faktor Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja
   - Terdapat *mismatch* antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

- Keterbatasan keterampilan teknis dan *soft skills* menyebabkan sebagian angkatan kerja belum terserap optimal.

4. Faktor Geografis dan Aksesibilitas

   Mobilitas tenaga kerja yang terbatas akibat jarak, transportasi, atau lokasi lapangan kerja yang kurang merata memengaruhi kemampuan masyarakat untuk terserap ke pekerjaan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan di atas adalah:

a. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industry dan kewirausahaan.
b. Perluasan kesempatan kerja melalui kemitraan dengan sektor swasta, UMKM, dan investor untuk menciptakan lapangan kerja baru.
c. Optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan penyebaran informasi lowongan kerja yang merata, termasuk di daerah terpencil.
d. Pendampingan dan program inkubasi usaha bagi tenaga kerja sektor informal agar dapat beralih ke pekerjaan formal atau mandiri.
e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan program ketenagakerjaan dengan perubahan kebutuhan pasar.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IPK pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.245.038.950,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.653.934.281,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 54,10%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah ini.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program/kegiatanProgram dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisasi anggaran 15,28%) dengan kegiatan:
   1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
   2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,18%) dengan kegiatan:
   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
c. ProgramPengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (realisasi anggaran 47,44%) dengan kegiatan:
   1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
   2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Realisasi Anggaran 10,22%) Dengan Kegiatan
   1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
   2. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Realisasi Anggaran 13,26%) Dengan Kegiatan:
   1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
   2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
f. Program Penyuluhan Pertanian (Realisasi Anggaran 43,29%) Dengan Kegiatan:
   1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
   2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
   3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Tabel 3.48
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
IPK	11.719.725.550,00	5.174.646.107,00	71,19	68,73	75.289.482,13	164.626.008,57	0,46	0,54	54,27

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.49
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Nilai IPK

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,859,366,500.00	3,442,255,431.00	50.18
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)	4,832,142,500.00	2,649,413,414.00	54.83
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	211,678,850.00	15.28

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	194,132,600.00	17.00
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	16,574,250.00	7.37
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	972,000.00	5.12
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1,682,332,300.00	674,290,138.00	40.08
Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1,682,332,300.00	674,290,138.00	40.08
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	120,281,500.00	57,056,600.00	47.44
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	37,376,500.00	4,210,000.00	11.26
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	82,905,000.00	52,846,600.00	63.74
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	138,663,000.00	14,175,800.00	10.22
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	25,724,000.00	4,001,000.00	15.55
Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	112,939,000.00	10,174,800.00	9.01

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Administrasi Kependudukan Provinsi			
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	493,974,500.00	65,505,648.00	13.26
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	281,774,500.00	20,100,000.00	7.13
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	212,200,000.00	45,405,648.00	21.40
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,100,376,000.00	0.00	0.00
Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	1,100,376,000.00	0.00	0.00
Program Penyuluhan Pertanian	1,672,072,800.00	723,859,440.00	43.29
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	119,700,000.00	48,450,000.00	40.48
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1,396,217,500.00	647,933,100.00	46.41
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	156,155,300.00	27,476,340.00	17.60

Sumber: BKAD NTB, 2025

B. **Indikator Sasaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**

IKP merupakan nilai komposit dari indikator yang digunakan untuk memotret status ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan 9 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. IKP bertujuan untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi serta memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu daerah/wilayah, menjadi indikator keberhasilan daerah dalam peningkatan/penguatan ketahanan pangan. Hasil perhitungan IKP berdasarkan sembilan indikator mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan yang memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan berdasarkan *cut off* poin IKP.

Wilayah yang masuk kedalam kelompok 1 adalah wilayah yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada wilayah dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan wilayah dengan kelompok tingkat ketahanan pangan paling baik.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKP tahun 2025 sebesar 74,70. Realisasi ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 78,83, deviasi -4,13 poin, sehingga capaiannya sebesar 94,76%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IKP mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, IKP sebesar 76,51 dan mengalami kenaikan 1,93 poin menjadi 78,44 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, IKP mengalami penurunan menjadi 74,70. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian IKP tahun 2025 sebesar 95,23%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 77,67. Capaian kinerja terhadap target akhir RPD sebesar 102,63% (melampaui target).

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

Target nasional sebesar 82, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, maka terdapat deviasi -4,33 atau capaian sebesar 94,72%

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi**

Kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak sepenuhnya dapat diukur. Namun dengan capaian tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan yaitu dengan:

a. Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan;
b. Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan;
c. Meningkatkan keterlibatan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal;
d. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
e. Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat;
f. Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; dan
g. Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan.

Kebijakan dalam ketahanan pangan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan saja namun juga melalui dukungan berbagai sektor dan instansi terkait. Dukungan tersebut antara lain adalah :

a. Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi;
b. Peningkatan produksi komoditas hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan;
c. Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu;
d. Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan;
e. Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan;
f. Penyediaan benih unggul dan bersertifikat untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
g. Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; serta
h. Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan

memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IPK pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 27.073.903.263,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.507.553.198,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 71,91%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.50
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
IKP	27.073.903.263,00	7.507.553.198,00	78,67	77,67	96.659.626,60	344.145.204,82	0,28	0,72	72,02

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program/kegiatanProgram dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Program Penanganan Kerawanan Pangan (realisasi anggaran 5,54%) dengan kegiatan:
   1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
   2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
b. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 14,25%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
   2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
   3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
   4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
   5. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
c. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (realisasi anggaran 0,72%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

d. Program Penyuluhan Pertanian (realisasi anggaran 43,29%) dengan kegiatan:
   1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
   2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
   3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
e. Program Perekonomian dan Pembangunan (realisasi anggaran 41,33%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
   2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
   3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (realisasi anggaran 23,27%) dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
g. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (realisasi anggaran 7,02%) dengan kegiatan
   1. Pengelolaan Penyediaan Biomassa Dan/Atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi
   2. Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi
   3. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi
h. Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggaran 22,30%) dengan kegiatan
   1. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
   3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
i. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,18%) dengan kegiatan:
   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

j. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (realisasi anggaran 40,08%) dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.51
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Nilai IKP

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,859,366,500.00	3,442,255,431.00	50.18
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,832,142,500.00	2,649,413,414.00	54.83
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1,682,332,300.00	674,290,138.00	40.08
Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1,682,332,300.00	674,290,138.00	40.08
Program Penanganan Kerawanan Pangan	351,200,000.00	19,440,000.00	5.54
Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	46,100,000.00	3,500,000.00	7.59
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	305,100,000.00	15,940,000.00	5.22
Program Penanggulangan Bencana	2,351,640,549.00	524,512,786.00	22.30
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	830,956,549.00	31,749,600.00	3.82
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,340,034,000.00	447,396,986.00	33.39
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	180,650,000.00	45,366,200.00	25.11

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	854,994,985.00	59,985,905.00	7.02
Pengelolaan Penyediaan Biomassa Dan/Atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi	329,099,265.00	14,873,375.00	4.52
Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	492,873,195.00	19,822,925.00	4.02
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	33,022,525.00	25,289,605.00	76.58
Program Pengelolaan Hutan	4,965,565,274.00	707,735,329.00	14.25
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,341,682,175.00	77,936,700.00	5.81
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1,293,754,000.00	120,516,060.00	9.32
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	3,938,767,000.00	28,276,000.00	0.72
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak Dan Gas Bumi	1,111,910,000.00	26,324,000.00	2.37
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,826,857,000.00	1,952,000.00	0.07

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penyuluhan Pertanian	1,672,072,800.00	723,859,440.00	43.29
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	119,700,000.00	48,450,000.00	40.48
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1,396,217,500.00	647,933,100.00	46.41
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	156,155,300.00	27,476,340.00	17.60
Program Perekonomian dan Pembangunan	1,682,713,200.00	695,413,450.00	41.33
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	550,658,600.00	308,289,330.00	55.99
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	529,000,000.00	224,321,000.00	42.40
Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi BUMD Dan BLUD	603,054,600.00	162,803,120.00	27.00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2,715,250,655.00	631,784,719.00	23.27
Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2,715,250,655.00	631,784,719.00	23.27

Sumber: BKAD NTB, 2025

C. **Indikator Sasaran Indeks Kesejahteraan Sosial**

Menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mengacu pada konsep tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang.

Indeks Kesejahteraan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas hidup pada tingkat individu maupun populasi. Indeks ini berusaha untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai elemen yang membentuk kehidupan yang baik, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, hak asasi manusia, dan partisipasi sosial.

Berbagai pengukuran indeks terkait kesejahteraan telah dilakukan antara lain tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan koefisien gini, serta indeks pembangunan manusia. Selain itu BPS juga setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang Indikator Kesejahteraaan. Rakyat. Publikasi ini menyajikan delapan bidang yang mencakup, kependidikan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu ”Baik”. Capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 100% (target tercapai).

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu ”Baik”. Capaian kinerja sebesar 100%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu ”Baik”. Capaian kinerja terhadap target akhir RPD ”Baik” (target tercapai).

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

   Target nasional tidak ada, sehingga kinerja tidak bisa dibandingkan.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi**

   Kondisi kesejahteraan masyarakat NTB pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan. Indikator-indikator utama seperti tingkat kemiskinan, pangsa pekerja formal, dan indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan. Penurunan kemiskinan menjadi salah satu capaian penting tahun ini. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan NTB berada pada angka 11,78%, lebih baik daripada kondisi prapandemi, meski masih berada di

atas rata-rata nasional. Perbaikan ini menunjukkan penguatan daya beli dan pemulihan ekonomi yang perlahan mengurangi tekanan pada kelompok masyarakat rentan. Perbaikan lainnya tampak dari peningkatan pangsa pekerja formal yang mencapai 31,58% per Agustus 2025. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan pendidikan mendorong kenaikan ini.

Sementara itu, IPM NTB juga menunjukkan kemajuan. Tahun 2025, IPM NTB tercatat 73,97, atau naik 0,87 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan IPM ini tak lepas dari perbaikan pada tiga dimensi pembentuknya, yaitu:

a. Harapan hidup meningkat menjadi 72,60 tahun
b. Rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,21 tahun
c. Pengeluaran riil per kapita tumbuh menjadi Rp11,92 juta.

Terkait dengan angka pengangguran, meski berada dalam tren positif, NTB belum sepenuhnya lepas dari tekanan. Tingkat pengangguran per Agustus 2025 tercatat meningkat. TPT NTB sebesar 3,06% pada Agustus 2025, naik 0,33% poin dari tahun sebelumnya.Kondisi ini sejalan dengan penurunan pangsa pekerja di sektor pertanian yang merosot hingga -24,01%.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan capaian indikator kesejahteraan sosial adalah:

a. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti berupa memberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial melalui pelatihan keterampilan yang terdiri dari:
   - Anak terlantar sebanyak 306 orang
   - Penyandang disabilitas terlantar sebanyak 100 orang
   - Gelandang dan Pengemis sebanyak 122 orang
   - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 60 orang
   - Lanjut Usia terlantar sebanyak 130 orang
b. Memberikan pembinaan, pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Korban Tindak Kekerasan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 60 orang
c. Memberikan pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat kepada 120 orang anak remaja putus sekolah oleh Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Mandiri dengan rentang usia antara 15 sampai 18 tahun. Jenis pelatihan keterampilan yang diberikan yang diberikan kepada penerima manfaat yaitu keterampilan tata busana, keterampilan tata rias, keterampilan tata boga, keterampilan servis AC, keterampilan otomotif dan keterampilan las. Setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan masing-masing penerima manfaat diberikan bantuan sosial (*toolkit*) sesuai dengan pelatihan yang diikuti dengan harapan agar penerima manfaat remaja putus sekolah mendapatkan modal usaha untuk dapat memandirikan dirinya dan men-*generate income*.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IKS pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 191.112.959.629,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp83.682.433.891,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 43,79%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.52

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
IKS	191.112.959.629,00	83.682.433.891,00	Baik	Baik	83.682.433.891,00	191.112.959.629,00	0,44	0,56	56,21

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program/kegiatanProgram dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,18%) dengan kegiatan:
    1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
    3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisasi anggaran 15,28%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
    2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
    3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (realisasi anggaran 52,43%) dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Pemberdayaan Sosial (realisasi anggaran 26,67%) dengan kegiatan:
    1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggaran 46,46%) dengan kegiatan:
    1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
    4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
f. Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggaran 22,30%) dengan kegiatan:
    1. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
    3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
g. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (realisasi anggaran 10,22%) dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
2. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

h. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (realisasi anggaran 8,73%) dengan kegiatan:
   1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi
   2. Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
   3. Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan

i. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 3,24%) dengan kegiatan:
   1. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
   2. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi

j. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (realisasi anggaran 16,71%)
   1. Pengangkatan Anak Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
   2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

k. Program Rehabilitasi Sosial (realisasi anggaran 53,61%) dengan kegiatan:
   1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
   2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
   3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
   4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
   5. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA di Dalam Panti

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.53
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKS

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,859,366,500.00	3,442,255,431.00	50.18
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,832,142,500.00	2,649,413,414.00	54.83
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	211,678,850.00	15.28
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	194,132,600.00	17.00
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	16,574,250.00	7.37
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	972,000.00	5.12
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,600,449,300.00	1,887,739,731.00	52.43

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,600,449,300.00	1,887,739,731.00	52.43
Program Pemberdayaan Sosial	10,614,264,200.00	2,831,285,000.00	26.67
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	13,915,000.00	1,400,000.00	10.06
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	10,600,349,200.00	2,829,885,000.00	26.70
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	143,228,410,058.00	66,543,494,731.00	46.46
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	33,813,575,013.00	11,867,651,791.00	35.10
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	108,455,808,285.00	54,315,680,290.00	50.08
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	145,934,000.00	62.82

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	214,228,650.00	29.48
Program Penanggulangan Bencana	2,351,640,549.00	524,512,786.00	22.30
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	830,956,549.00	31,749,600.00	3.82
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1,340,034,000.00	447,396,986.00	33.39
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	180,650,000.00	45,366,200.00	25.11
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	138,663,000.00	14,175,800.00	10.22
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	25,724,000.00	4,001,000.00	15.55
Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	112,939,000.00	10,174,800.00	9.01
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	725,985,000.00	63,409,675.00	8.73
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	51,322,000.00	19,320,000.00	37.64
Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	9,617,000.00	3,760,000.00	39.10

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	665,046,000.00	40,329,675.00	6.06
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	73,719,662.00	3.24
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	73,719,662.00	3.87
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0.00	0.00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7,030,536,800.00	1,174,862,100.00	16.71
Pengangkatan Anak Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	6,189,500.00	195,000.00	3.15
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	7,024,347,300.00	1,174,667,100.00	16.72
Program Rehabilitasi Sosial	12,899,994,322.00	6,915,300,125.00	53.61
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	3,426,924,570.00	2,301,784,800.00	67.17
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	5,519,217,705.00	2,187,006,960.00	39.63
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	2,475,714,662.00	1,514,189,414.00	61.16
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	789,248,785.00	477,928,401.00	60.55

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA Di Dalam Panti	688,888,600.00	434,390,550.00	63.06

Sumber: BKAD NTB, 2025

D. **Indikator Sasaran Indeks Demokrasi**

Indeks demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Provinsi. Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100 yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Ketiga aspek itu pun dirinci lagi menjadi 30 elemen yang lebih membumi, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, bebas dari diskriminasi, hak memilih-dipilih, hak partisipasi dalam penyusunan kebijakan, pemilu yang jurdil, peran DPRD, birokrasi, dan peradilan yang independen.

Metode yang digunakan untuk mengukur variable-variabel tersebut adalah dengan melakukan analisis konten media lokal, review atas perda/pergub/perbub dan sejenisnya, hasil wawancara, yang semuanya kemudian digelar di dalam fokus grup diskusi (FGD). Di situ penghitungan skor dilakukan, masing-masing punya bobot sendiri, dan dihimpun ke dalam tiga aspek utama tadi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu 77,47. Capaian kinerja terhadap target 2025 (75,37) sebesar 102,79% (melampaui target).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu 77,47. Capaian kinerja sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu 77,47.

Capaian kinerja terhadap target akhir RPD (78,11) adalah 99,19% (tidak tercapai).

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

   Target nasional tidak ada, sehingga kinerja tidak bisa dibandingkan.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi**

   Pencapaian Indeks Demokrasi tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*) merupakan satu harapan besar yang ingin dicapai untuk menunjukan bahwa masyarakat NTB semakin sadar pentingnya berperan serta membangun daerah dalam bentuk berserikat melalui wadah organisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat NTB memanfaatkan atau menggunakan fasilitas/organisasi-organisasi yang ada untuk menyalurkan/ menyampaiakan gagasan/ aspirasinya dalam rangka berkontribusi membangun bangsa atau wilayahnya.

   Faktor pendukung ketercapaian indikator indeks demokrasi adalah:

   a. Partai Politik (Parpol)

      Parpol yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui Pemilu (UU No. 31 thn 2002 tentang Parpol). Parpol di Provinsi NTB terbentuk dan berkembang dengan baik. Proporsi pengurus parpol secara umum sudah mengakomodir keterwakilan laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.54

Rekap Jumlah Pengurus Parpol di Provinsi NTB Tahun 2025

No	Partai	Pengurus Perempuan	Pengurus Laki-Laki	Jumlah Pengurus
1	Partai Keadilan Sejahtera	9	79	88
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55	114	169
3	Partai Hati Nurani Rakyat	113	328	441
4	Partai Kebangkitan Bangsa	105	280	385
5	Partai Persatuan Pembangunan	80	203	283
6	Partai Golkar	273	572	845
7	Partai Nasional Demokrat	102	199	301
8	Partai Demokrat	790	411	1201

No	Partai	Pengurus Perempuan	Pengurus Laki-Laki	Jumlah Pengurus
9	Partai Bulan Bintang	47	94	141
10	Partai Gerakan Indonesia Raya	103	215	318
11	Partai Amanat Nasional			175
12.	Partai Berkarya			34
Total				4.381

Sumber: Bakesbangpoldagri NTB 2025

b. Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang). Keberadaan ormas di Provinsi NTB berfungsi sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan. Ormas dilibatkan sejak tahap perencanaan pembangunan melalui penyampaian aspirasi yang kemudian dituangkan ke dalam usulan sebagai bahan pembahasan dalam forum-forum berikutnya.

c. Kepengurusan Ormas dan Parpol
Berdasarkan data dari Bakesbangpoldagri Provinsi NTB terdapat 12 (dua belas) Parpol dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas/LSM). Keberadaan organisasi ini dikategorikan berdasarkan:
- laporan;
- fasilitasi dari Bakesbangpoldagri dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kementerian Dalam Negeri;
- status Badan Hukum yang proses penerbitannya melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Terdapat 17.957 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,7% dari 2,650.759 jiwa penduduk NTB usia 25 – 59 tahun.

d. Dukungan Ormas/LSM sebagi mitra binaan Bakesbangpoldagri yang membantu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui keikutsertaan bergabung dan berserikat dalam wadah organisasi.

e. Dukungan Organisasi politik seperti Parpol sebagi mitra Bakesbangpoldagri yang merupakan organisasi dengan partisipan yang besar dan berpengaruh.
f. Efektifnya Fungsi Koordinasi Efektifnya Provinsi dengan Kabupaten/Kota maupun melalui pembinaan secara langsung kepada masing-masing Ormas/LSM ataupun berkoordinasi langsung dengan pengurus-pengurus Parpol.

   Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Demokrasi adalah sebagi berikut:

   1. Pendampingan kepada setiap Ormas/LSM yang mengajukan permohonan mendaftarkan Lembaga ke Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjadi inspirasi bagi yang lain.
   2. Pembinaan kepada Ormas/LSM yang mendapat bantuan hibah dari pemerintah untuk senantiasa aktif bersosialisasi ke masyarakat.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Indeks Demokrasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 855.858.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp391.919.071,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 55,45%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.55
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Demokrasi

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Indeks Demokrasi	855.858.300,00	391.919.071,00	75,37	77,47	5.058.978,59	11.355.423,91	0,45	0,55	55,45

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja indeks demokrasi adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (realisasi anggaran 45,79%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.56

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Demokrasi

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	391,919,071.00	45.79
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	391,919,071.00	45.79

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.7 Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan

Sasaran meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan, diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi, Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan/Universal Health Coverage (UHC), Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peningkatan Pendapatan Per Kapita, Peningkatan Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Literasi Keuangan dengan capain sebagai berikut:

Tabel 3.57
Realisasi Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial, Pengembangan Mata Pencaharian, Pemberdayaan Sosial dan Inklusi Keuangan Provinsi NTB Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Dalam RPD 2024-2026	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100) atau (9=(3-(6-3)/3)*100	10 (10=6/5*100) atau (10=(5-(6-5)/5)*100	11 (11=6/7*100) atau (11=(7-(6-7)/7)*100	12 (12=6/8*100) atau (12=(8-(6-8)/8)*100
Tingkat inflasi	%	1.28	2-4	2-4	3.01	2-4	3.53	-35.16	124.75	124.75	114.73
Persentase Universal Health Coverage (UHC)	%	95	97	98	95*	100	-	100,00	96,94	95	-
Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43	54	27,2	32	65	-	74,42	117,65	49,23	-
Peningkatan Pendapatan per kapita	%	8	9	34.48 - 34.57 (Juta rupiah)	8*	>10	-	100,00	-	80	-
Tingkat Literasi Keuangan	%	67	65-67	65-67	66	67	90	98,51	101,54	98,50	73.33

*Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah; Keterangan: * data tahun 2024 karena data 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada (rilis capaian tahun 2025 dari Kementerian Tenaga Kerja pada bulan Maret 2026)*

A. Indikator Sasaran Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah skala kenaikan harga barang maupun jasa secara bersamaan dalam kurun waktu tertentu. Namun berdasarkan Bank Indonesia (BI) tingkat inflasi merupakan pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode tertentu. Pertumbuhan harga yang dimaksud merupakan kenaikkan beberapa harga barang yang berdampak pada barang lainnya. Umumnya ketika tingkat inflasi naik juga menyebabkan penurunan daya beli dan nilai mata uang suatu negara.

a. **Analisis Capaian Kinerja:**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 3,01%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 (4, batas atas), maka ada deviasi sebesar +0,99 atau capaian sebesar 124.75%.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 3,01%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka ada deviasi sebesar -1,73 atau capaian sebesar -35,16%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 3,01%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD, maka ada deviasi sebesar sebesar 0,95 (batas atas) atau capaian sebesar 124,75%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 3,01%. Bila dibandingkan dengan target nasional maka ada deviasi sebesar sebesar +0,48 atau capaian sebesar 114,73%.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Laju inflasi tahun kalender atau *year to date* (ytd) di Provinsi NTB sepanjang tahun 2025 mencapai 3,05%. Angka ini juga menjadi inflasi tahunan (year-on-year/yoy) provinsi NTB, dengan inflasi bulanan pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,72%. Inflasi 3,01% tersebut masih berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa batas maksimum inflasi tahunan yang ditetapkan pemerintah adalah 3,5%, sementara batas minimumnya sebesar 1,5%.

Dengan demikian, inflasi NTB tahun 2025 masih tergolong terkendali. kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi, dengan andil sebesar 1,40% dan laju inflasi kelompok tersebut mencapai 3,83% sepanjang tahun. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi secara persentase, yakni 17,76%, namun kontribusinya terhadap inflasi keseluruhan hanya 1,07% karena bobotnya yang kecil.

Walaupun inflasi sangat tinggi mencapai dua digit, tetapi bobot kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terbilang kecil. Kelompok dengan bobot terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau, laju inflasi di NTB dalam satu dekade terakhir menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Inflasi tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 6,23%, sedangkan inflasi terendah tercatat pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, yakni hanya sebesar 0,60%. Meski inflasi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,28%, angka ini masih berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah. Karena jika inflasi terlalu rendah akan membuat produsen kurang produksi, sedangkan bila inflasi terlalu tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan dan menekan laju inflasi adalah:

1. Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi NTB yang berperan dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Tim ini bertugas untuk melakukan inspeksi mendadak atau survey ke pasar-pasar tradisional dan distributor dalam rangka mengecek harga-harga komoditas.
2. Melakukan operasi pasar bekerjasama dengan Bulog dan pihak -pihak terkait
3. Melaksanakan Operasi Pasar Murah secara intensif, dan memperhatikan komoditas yang mengalami perubahan harga.
4. Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai sektor, yaitu Dinas Perdagangan, Bulog Divre NTB, Bank Indonesia (BI), Reskrim Polda NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bapenda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfotik, TVRI, pihask swasta (PT. Perusahaan Dagang Indonesia, PT, Rajawali Nusindo Cabang Mataram, KAO Cabang Mataram, CV. Baling-baling Bambu, PPJI NTB, Alfamart, Indomaret, Niaga, MGM, CV. Tulus Jaya Sejahtera, PT. Deloto MED, PT. Sungai Budi, Indo Lautan Makmur, PT. Protein Go Tama Cipta Pangan, Bokah Falm, UMKM se Kota Mataram, CV. 88), dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Mitra, serta binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator tingkat inflasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.557.079.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.137.668.881,00. Tidak ada efisienai anggaran karena realisasi investasi walaupun dalam rentang waktu target, namun capaiannya cenderung meningkat. Perhitungan efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.58
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Tingkat Inflasi

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Tingkat Inflasi	8.557.079.700,00	4.137.668.881,00	4	3,01	1.374.640.824,25	2.139.269.925,00	0,64	-0,36	-35,74

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,07%) dengan kegiatan:
   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
   2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)
   3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
b. Program Perekonomian dan Pembangunan (realisasi anggaran 41,33%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
   2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
   3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Bumd Dan Blud

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.59
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Tingkat Inflasi

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	3,442,255,431.00	50.07
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sda (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	2,649,413,414.00	54.66
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	1,682,713,200.00	695,413,450.00	41.33
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	550,658,600.00	308,289,330.00	55.99
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	529,000,000.00	224,321,000.00	42.40
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	603,054,600.00	162,803,120.00	27.00

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Sasaran Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan/*Universal Health Coverage* (UHC)

UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC mengandung dua elemen inti, yaitu akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 95%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 (98%), maka ada deviasi -3 poin atau capaian sebesar 96,94%.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 95%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka ada deviasi 0 poin atau capaian sebesar 100%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 95%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD (100), maka ada deviasi -5 point atau capaian sebesar 95%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

   Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Faktor penyebab dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

   a. Kurangnya minat masyarakat mendaftar secara mandiri sebagai peserta JKN
   b. Kurangnya kesadaran perusahaan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN
   c. Masih banyak peserta mandiri menunggak iuran
   d. Adanya permasalahan adminduk berakibat pada penonaktifan peserta JKN PBI
   e. Kurang optimalnya verifikasi OPD terkait kepesertaan sehingga masih ada penduduk miskin belum terdaftar dan penduduk desil 9 dan 10 masuk pembiayaan PBI JK.

   Alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

   a. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam perbaikan data kepesertaan JKN (Dinsos, Dukcapil, BPJS, Dikes)
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan pelayanan kesehatan kepesertaan JKN
   c. Melakukan advokasi ke Dinsos untuk mengupdate DTKS

   Pada tahun 2025, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 99,24% menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap perlindungan jaminan sosial kesehatan secara administratif sudah hampir menyeluruh dan sejalan dengan target UHC. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan melalui berbagai skema, baik peserta mandiri, pekerja penerima upah, maupun dukungan pembiayaan bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta yang berada pada angka 82,99 persen menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kepesertaan terdaftar dan peserta yang benar-benar aktif memanfaatkan layanan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan membayar iuran secara rutin, kurangnya pemahaman

tentang pentingnya status kepesertaan aktif, maupun dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam analisis indikator persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan, tidak hanya cakupan yang perlu menjadi perhatian, tetapi juga keberlanjutan keaktifan peserta sebagai ukuran efektivitas perlindungan kesehatan. Upaya peningkatan keaktifan perlu difokuskan melalui penguatan edukasi kepada masyarakat, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjamin kepesertaan kelompok rentan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan agar mendorong kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pencapaian UHC tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator UHC pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 330.607.624.773,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp141.766.347.784,00. Efisiensi sebesar 55,77%. Perhitungan efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.60
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator UHC

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
UHC	330.607.624.773,00	141.766.347.784,00	98	95	1.492.277.345,09	3.373.547.191,56	0,44	0,56	55,77

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan:

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
a. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.61

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator UHC

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	141,766,347,784.00	42.88
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	86,691,824,844.00	39.71
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	54,714,360,290.00	49.15
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	145,934,000.00	62.82
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	214,228,650.00	29.48

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Sasaran Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah status keanggotaan pekerja (formal, informal, maupun migran) dalam program perlindungan Jamsostek untuk menanggulangi risiko ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Jamsostek wajib bagi pekerja dengan upah, mandiri, maupun konstruksi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja. Jamsostek memiliki empat program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

a. Analisis Capaian Kinerja

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 32%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 (27,2%), maka ada deviasi sebesar +4,8 poin atau capaian sebesar 117,65%. Link bukti dukung https://ntbprov.go.id/post/pemprov-ntb-berupaya-meningkatkan-universal-coverage-62-persen-tahun-2025-untuk-pekerja-konstruksi-dan-informal

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 32%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 (43%), maka ada deviasi sebesar -11poin atau capaian sebesar 74,42%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 32%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD (65%), maka ada deviasi -33 poin atau capaian sebesar 49,23%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

   Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Berdasarkan data, partisipasi masyarakat dalam program ini baru mencapai 41%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan yang hampir mencakup 100% dari populasi. Kepesertaan Jamsostek pada umumnya sudah diterima secara luas oleh masyarakat, namun kesadaran akan pentingnya perlindungan yang ditawarkan masih minim.

   Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mewajibkan pengusaha, baik di sektor formal maupun informal, untuk mengasuransikan pekerjanya dalam rangka perlindungan terhadap pekerja. Sasaran kebijakan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS saja, namun lebih kepada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan manfaat program ini. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan langkah-langkah pembinaan berupa pendampingan kepada perusahaan, melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Perda, memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh, memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada para pekerja, dan lain sebagainya.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.925.572.214,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.896.082.015,00. Efisiensi anggaran sebesar 58,94%. Perhitungan efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.62

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Kepesertaan Jamsostek	3.925.572.214,00	1.896.082.015,00	27,2	32	59.252.562,97	144.322.507,87	0,41	0,59	58,94

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Secara umum program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan Kegiatan yang cukup efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah Program Hubungan Industrial (realisasi anggaran 66,32%) dengan kegiatan:

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi

c. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)

Sedangkan Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisasi anggaran15,28%) dengan kegiatan:

a. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
b. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
c. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.63
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Hubungan Industrial	2,539,899,764.00	1,684,403,165.00	66.32
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,799,900.00	99.60
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	76,933,400.00	12,391,200.00	16.11

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penetapan Upah Minimum Provinsi (Ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (Umsk)	2,412,966,364.00	1,622,212,065.00	67.23
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	211,678,850.00	15.28
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	194,132,600.00	17.00
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	16,574,250.00	7.37
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	972,000.00	5.12

Sumber: BKAD NTB 2025

D. Indikator Sasaran Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Peningkatan pendapatan per kapita adalah kenaikan rata-rata pendapatan yang diterima setiap individu (per kepala) dalam suatu daerah selama periode tertentu, mencerminkan peningkatan kesejahteraan, standar hidup, dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi jika pertumbuhan pendapatan daerah (PDRB) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 8% (realisasi tahun 2024). Untuk tahun 2025 dilakukan perubahan indikator

dan satuannya, semula persentase peningkatan pendapatan per kapita (%) menjadi besaran peningkatan pendapatan per kapita (juta rupiah). Target dan realisasi kinerja sampai dengan triwulan III 2025 tidak bisa dibandingkan.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 8% (menggunakan realisasi tahun 2024). Bila dibandingkan dengan tahun tahun 2024 maka capaian sebesar 100%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026**

   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 8%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD (>10), maka capaiannya sebesar 80%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**

   Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Masih belum optimalnya pencapaian target persentase pendapatan per kapita disebabkan karena:

   a. Pertumbuhan PDRB ADHB yang belum optimal seiring dengan persentase kenaikan penduduk
   b. Produksi barang dan jasa yang belum optimal karena menurunnya permintaan pasar akibat dari daya beli masyarakat yang masih terganggu
   c. Produktivitas tenaga kerja yang rendah yang disebabkan oleh keterampilan/keahian yang kurang sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar
   d. Persentase kemiskinan yang cukup tinggi
   e. Penanaman modal di luar sektor pertambangan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, akibatnya penyerapan tenaga kerja masih belum optimal
   f. Minat atau kesadaran masyarakat untuk membuka lapangan kerja secara mandiri masih kurang

   Upaya yang sudah dilakukan untuk penyelesaian masalah/hambatan tersebut adalah:

   a. Penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui diversifikasi pertanian termasuk agroforestri, peternakan dan agromaritim untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal serta industrialsiasi pertanian agar dapat meningkatkan nilai ekspor on tambang.
   b. Pengembangan sektor pariwisata berkelas dunia. Provinsi NTB berusaha memperkuar posisi NTB sebagai destinasi wisata dunia

dengan fokus pada efek domino even internasional seperti MotoGP di KEK Mandalika untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong acara-acara bisnis dan pertemuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara.

c. Peningkatan kulitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sehingga lebih produktif dalam menghasilkan barang dan jasa
d. Perluasan akses pasar melalui kerjasama dengan pihak swasta
e. Pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan dan insentif untuk memajukan usaha
f. Menjaga kondusivitas lingkungan untuk menarik investor
g. Optimalisi digitalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintah khususnya dalam perizinan berusaha
h. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan energi.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Peningkatan Perdapatan per Kapita pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 394.864.977.068,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp157.304.427.533,00. Efisiensi anggaran didasarkan pada anggaran yang tersisa (realisasi dikurangi pagu) sebesar Rp237.560.549.535,00 Hal ini terjadi karena adanya perubahan satuan kinerja antara target dan realisasi.

Tabel 3.64
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Peningkatan Pendapatan per Kapita

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Peningkatan Pendapatan per Kapita	394.424.981.068,00	157.171.469.703,00	34,48-34,57 juta rupiah	8	19.46.433.712,88	-	-	-	-

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Program Kawasan Permukiman (realisasi anggaran 2,87%) dengan kegiatan:
    1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai Dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha
    2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha

b. Program Kesejahteraan Rakyat (realisasi anggaran 27,63%) dengan kegiatan:
    1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
    2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran (realisasi anggaran 50,07%) dengan kegiatan:
    1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
    3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
d. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisasi anggaran 15,28%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
    2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
    3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (realisasi anggaran 5,86%) dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (realisasi anggaran 40,08%) dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
g. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggaran 42,88%) dengan kegiatan:
    1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
    4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
h. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (realisasi anggaran 0%) dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

i. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
    2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
    3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
    4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
    5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
    6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (realisasi anggaran 0,72%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
    2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
k. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 3,24%) dengan kegiatan:
    1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
    2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
l. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (realisasi anggaran 13,26%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
    2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
m. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (realisasi anggaran 8,16%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
    2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
    3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
    4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
n. Program Penyuluhan Pertanian (realisasi anggaran 42,82%) dengan kegiatan:
    1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
    2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
    3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
o. Program Perekonomian dan Pembangunan (realisasi anggaran 41,33%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Bumd Dan BLUD

Sedangkan Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 98,70%) dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.65

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator

Peningkatan Pendapatan per Kapita

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Kawasan Permukiman	7,304,804,900.00	209,551,322.00	2.87
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200,000,000.00	0.00	0.00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7,104,804,900.00	209,551,322.00	2.95
Program Kesejahteraan Rakyat	35,179,785,155.00	9,718,826,266.00	27.63
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18,214,848,295.00	8,671,961,381.00	47.61
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16,787,387,410.00	977,531,085.00	5.82
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	177,549,450.00	69,333,800.00	39.05
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	3,442,255,431.00	50.07
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	2,649,413,414.00	54.66

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	211,678,850.00	15.28
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	194,132,600.00	17.00
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	16,574,250.00	7.37
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	972,000.00	5.12
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	522,435,240.00	30,602,700.00	5.86
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	522,435,240.00	30,602,700.00	5.86
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1,682,332,300.00	674,290,138.00	40.08
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1,682,332,300.00	674,290,138.00	40.08
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	141,766,347,784.00	42.88

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	86,691,824,844.00	39.71
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	54,714,360,290.00	49.15
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	145,934,000.00	62.82
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	214,228,650.00	29.48
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	450,000,000.00	0.00	0.00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	450,000,000.00	0.00	0.00
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	3,938,767,000.00	28,276,000.00	0.72
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1,111,910,000.00	26,324,000.00	2.37
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,826,857,000.00	1,952,000.00	0.07
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	73,719,662.00	3.24
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	73,719,662.00	3.87
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0.00	0.00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	493,974,500.00	65,505,648.00	13.26
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	281,774,500.00	20,100,000.00	7.13
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	212,200,000.00	45,405,648.00	21.40
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,454,787,100.00	200,433,150.00	8.16
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	83,200,000.00	22,710,500.00	27.30
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2,311,287,100.00	136,362,650.00	5.90

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	52,800,000.00	33,860,000.00	64.13
Program Penyuluhan Pertanian	1,702,072,800.00	728,859,440.00	42.82
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	119,700,000.00	48,450,000.00	40.48
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1,426,217,500.00	652,933,100.00	45.78
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	156,155,300.00	27,476,340.00	17.60
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,682,713,200.00	695,413,450.00	41.33
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	550,658,600.00	308,289,330.00	55.99
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	529,000,000.00	224,321,000.00	42.40
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	603,054,600.00	162,803,120.00	27.00

Sumber: BKD NTB 2025

E. Indikator Sasaran Tingkat Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

a. Merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan agar tetap terjaga atau stabil;
b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi keuangan memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan;
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
3. Mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil;
4. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;

Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat,

maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**
   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 66%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 (65%), maka ada deviasi +1 poin atau capaian sebesar 101,54%. Link bukti dukung https://suarantb.com/2025/05/04/literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-indonesia-meningkat-di-tahun-2025/
2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 66%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka ada deviasi -1 poin atau capaian sebesar 98,51%.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026**
   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 66%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD (67%), maka ada deviasi -1 point atau capaian sebesar 98,50%.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional**
   Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 66% sedangkan target nasional sebesar 90%, sehingga ada deviasi -24 poin. Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target nasional adalah 73,33%
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan indeks literasi keuangan masyarakat NTB sebesar 66% merupakan tertinggi ke-2 secara nasional pada tahun 2025 atau lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional sebesar 65,43% dan rata-rata nasional sebesar 49,68. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk NTB umur 15-79 tahun, terdapat 65 orang yang terliterasi keuangan dengan baik.
   Angka ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan baik terhadap lembaga jasa keuangan maupun produk dan layanannya yang menjadi kontributor terbesar belum menjangkau seluruh masyarakat NTB. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia produktif (26-35 tahun), domisili penduduk (perkotaan/perdesaan), mata pencaharian.
   Tantangan literasi keuangan di Provinsi NTB adalah sebagai berikut:
   a. Kesenjangan antar wilayah
      Tingkat literasi keuangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan dan wilayah terpencil. Ini disebabkan karena keterbatasan akses informasi serta rendahnya pengetahuan tentang produk keuangan yang lebih kompleks, seperti investasi pasar modal.
   b. Rendahnya pemahaman produk keuangan yang lebih kompleks
      Pemahaman terhadap produk investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham masih terbatas. Hal ini berakibat pada keraguan dalam berinvestasi.
   c. Kepercayaan terhadap layanan keuangan digital

Kepercayaan masyarakat pada layanan keuangan digital maish kurang, terutama yang berkaitan dengan keamanan data dan transaksi.

Upaya yg dilakukan dalam peningkatan literasi keuangan di NTB:

Upaya ini dilakukan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi dengan OJK dan FKIJK dengan melakukan edukasi pedesaan dan program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar). Targetnya adalah meningkatkan inklusi keuangan di atas 80,51% menuju target nasional 90%, sebagai berikut

a. **Pasar Keuangan Rakyat (PKR) 2025:**
   Menghadirkan 30+ industri jasa keuangan untuk pameran, edukasi, dan bazar UMKM untuk mempermudah akses layanan keuangan legal.
b. **Edukasi Keuangan Pedesaan:**
   OJK NTB mengintensifkan sosialisasi ke pedesaan untuk membangun kemandirian ekonomi.
c. **Program KEJAR & Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI):**
   Menyasar pelajar (15-17 tahun) dan menjadikan desa seperti Desa Lantan di Lombok Tengah sebagai percontohan inklusi.
d. **Literasi Syariah:**
   Kegiatan seperti *Trek and Talk* oleh Bank NTB Syariah menyasar generasi milenial/Gen Z dengan konsep *edu-adventure*.
e. **Survei SNLIK 2025:**
   Pemutakhiran dan pendataan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dilakukan di Lombok Timur pada awal 2025 untuk mengukur dan merumuskan kebijakan berbasis data. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat NTB terhadap produk jasa keuangan yang aman, mengurangi ketergantungan pada pinjol ilegal, dan meningkatkan literasi keuangan syariah
f. Penyusunan Peta Jalan Literasi dan Inklusi Keuangan
   Sedang disusun peta jalan literasi dan inklusi keuangan provinsi NTB dengan tujuan untuk meningkatkan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi NTB

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Literasi Keuangan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.357.007.516,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp958.543.358,00. Efisiensi anggaran sebesar 71,88%.

Perhitungan efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas tersaji pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Walaupun dilakukan pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam

Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan untuk literasi keuangan relatif baik. Anggaran belum terserap dengan optimal namun kinerja sudah mencapai target.

Program dan Kegiatan yang cukup efektif dalam pencapaian keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Program Perekonomian dan Pembangunan (realisasi anggaran 41,33%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
   2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
   3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Bumd Dan Blud
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (realisasi anggaran 15,72%) dengan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 3.66

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Literasi Keuangan

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Literasi Keuangan	3.357.007.516,00	958.543.358,00	65	66	14.523.384,21	51.646.269,48	0,28	0,72	71,88

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.67

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Literasi Keuangan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,682,713,200.00	695,413,450.00	41.33
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	550,658,600.00	308,289,330.00	55.99
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	529,000,000.00	224,321,000.00	42.40
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	603,054,600.00	162,803,120.00	27.00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.8 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik diukur dengan Nilai SAKIP. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat 4 komponen yang diukur, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal. Nilai SAKIP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menggunakan angka realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian PAN RB, yaitu sebesar 69,68. Sampai dengan berakhirnya Triwulan III Tahun 2025, Kementerian PAN RB tidak menerbitkan hasil evaluasi yang baru. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.68

Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100)	10 (10=6/5*100)	11 (11=6/7*100)	12 (12=6/8*100)
Nilai SAKIP	kategori	BB (72,88)	A	BB	B (69,68)	A (80,01)	-	99,53	99,53	87,09	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target (Pemutakhiran) dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi Nilai SAKIP dan target 2025, terdapat deviasi -0,33. Capaian realisasi sebesar 99,53% (belum mencapai target).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, Nilai SAKIP tahun 2025 turun 3,2 poin. Capaian realisasi sebesar 95,61% (belum mencapai target). Realisasi per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.69
Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan II) per Komponen

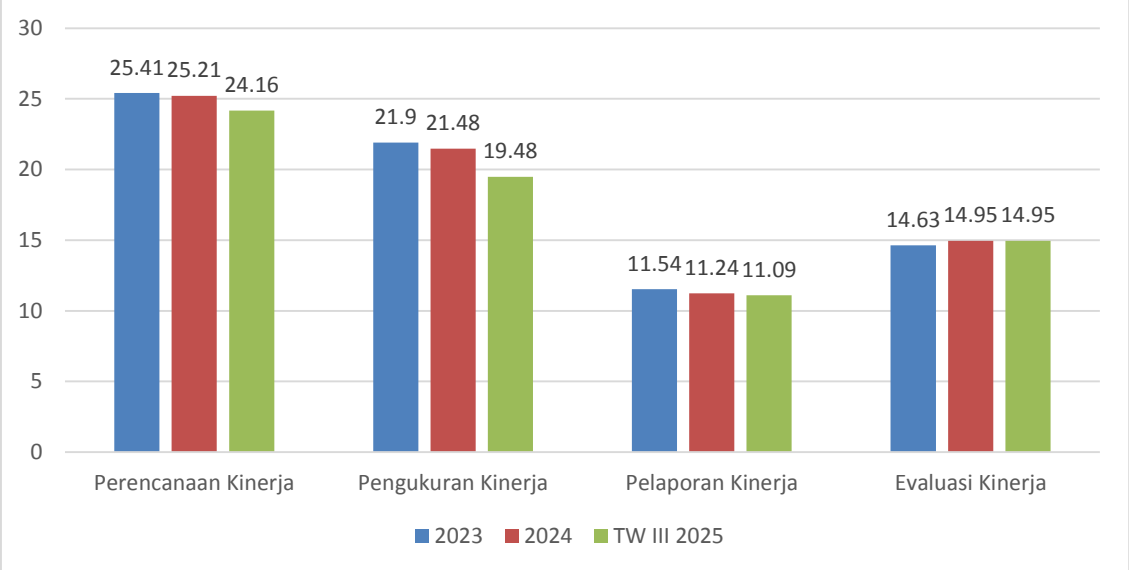
Komponan	2024	2025	Deviasi	Capaian (%)
Perencanaan Kinerja	25,21	24,16	-1,05	95,83
Pengukuran Kinerja	21,48	19,48	-2,00	90,69
Pelaporan Kinerja	11,24	11,09	-0,15	98,665
Evaluasi Kinerja	14,95	14,95	0,00	100

Sumber: Kementerian PAN RB, 2024-2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas, seluruh komponen mengalami penurunan kecuali evaluasi kinerja.

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan di semua komponen, kecuali evaluasi kinerja. Dibandingkan dengan tahun 2023, komponen perencanaan kinerja turun sebesar 1,25 poin, pengukuran kinerja turun 2,42 poin, dan pelaporan kinerja turun 0,45 poin.

Grafik 3.15
Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2023, 2024 dan 2025 (Triwulan II) per Komponen



Sumber: KemenPANRB 2024-2025, diolah

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Bila dibandingkan dengan target akhir Nilai SAKIP dalam RPD 2024-2026, terdapat deviasi - 20,33 poin. Capaian realisasi sebesar 87,09% (belum mencapai target).
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (jika ada)**
   Target Nilai SAKIP secara nasional tidak ada, sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Realisasi 2025 sampai dengan Triwulan III yang dibandingkan dengan seluruh target, baik target 2025, realisasi 2024, dan target akhir dalam RPD 2024-2026 menunjukkan ketidaktercapaian, namun menunjukkan pencapaian yang *on the track*. Ketidaktercapaian target, selain disebabkan karena penghitungan yang didasarkan atas realisasi sampai dengan Triwulan III (pelaksanaan belum tuntas sampai dengan akhir tahun), juga disebabkan karena implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi NTB yang belum optimal khususnya pada komponen perencaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal ini tertuang dalam catatan dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB, sebagai berikut:

Tabel 3.70
Catatan dan Rekomendasi LHE SAKIP sampai dengan
Triwulan II Tahun 2025

Catatan	Rekomendasi
Komponen Perencanaan Kinerja	
1. Pohon kinerja yang disusun belum memperlihatkan hubungan kausalitas, misalnya masih terdapat kondisi yang sama pada level yang berbeda. 2. Terdapat beberapa catatan pada Ranwal RPJMD Prov NTB Tahun 2025-2029 dan sudah juga disampaikan ketika *multilateral meeting* dengan Kemendagri	1. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang 2. Menindaklanjuti catatan/rekomendasi yang disampaikan ketika multilateral meeting membahas Ranwal RPJMD dengan Kementerian Dalam Negeri"
Komponen Pengukuran Kinerja	
1. Sebagian besar rekomendasi pada LHE AKIP Tahun 2024 belum ditindaklanjuti secara optimal 2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menggunakan aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB	1. Mempercepat proses tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan pada LHE AKIP Tahun 2024 2. Mempercepat proses pengembangan aplikasi e-SAKIP dan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam pengukuran kinerja
Komponen Pelaporan Kinerja	
1. Pada laporan kinerja Tahun	1. Mendorong Inspektorat Prov NTB untuk

Catatan	Rekomendasi
2024 belum terdapat lembar pernyataan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat	melakukan reviu atas Laporan Kinerja Prov NTB
2. Belum dilakukan publikasi Laporan Kinerja/LPPD Prov NTB Tahun 2024 pada website resmi prov NTB, begitu juga dengan LAKIP Perangkat Daerah	2. Melakukan publikasi LAKIP/LPPD pada media-media yang dapat diakses oleh masyarakat luas termasuk Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah
Komponen Evaluasi Kinerja	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan Teknologi Informasi	Mendorong Inspektorat untuk menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja interna

Sumber: LHE KemenPANRB 2025

Berdasarkan analisasi ketidaktercapaian target di atas, berikut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang juga sudah diunggah dalam portal esr.menpan.go.id, sebagai berikut:

Tabel 3.71
Rencana Aksi Tindak Lanjut atas LHE SAKIP
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
Komponen Perencanaan Kinerja		
1. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan Critical Success Factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja	Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan Critical Success Factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang	https://drive.google.com/file/d/1ayEGgw5ZCIZAY Qe8bAlici3uV8sDAnR/view?usp= sharing

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang		
2. Menindaklanjuti catatan/rekomendasi yang disampaikan ketika multilateral meeting membahas Ranwal RPJMD dengan Kementerian Dalam Negeri"	Sudah Menindaklanjuti catatan/ rekomendasi yang disampaikan ketika multilateral meeting membahas Ranwal RPJMD dengan Kementerian Dalam Negeri"	https://drive.google.com/file/d/1Rqf4BY377JxavrZKAPr9iYMcT6az2d5l/view?usp=sharing
Komponen Pengukuran Kinerja		
3. Mempercepat proses tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan pada LHE AKIP Tahun 2024	Sudah dilakukan proses tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan pada LHE tahun 2024	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sJDZPe2GR02UPVWiCzmhT2 eyD3d2VlmM
4. Mempercepat proses pengembangan aplikasi e-SAKIP dan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam pengukuran kinerja"	Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Organisasi telah melakukan pengembangan aplikasi e SAKIP dan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam pengukuran kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/1JeqQlPBPL nqD_BMRBDEJpXZOkzKX iS7?usp=sharing
Komponen Pelaporan Kinerja		
5. Mendorong Inspektorat Prov NTB untuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja Prov NTB	Reviu oleh Inspektorat sudah dilakukan dan dokumennya menjadi bagian dari LAKIP yang sudah diunggah pada portal esr.menpanrb	https://drive.google.com/file/d/137KweRRhfyUSNlZ8PqG_RMM0Zhv75ue/view?usp=sharing
6. Melakukan publikasi LAKIP/LPPD pada media-media yang dapat diakses oleh masyarakat luas	Sudah mempublikasi LAKIP/LPPD pada media-media yang dapat di akses oleh masyrakat luas termasuk Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah	https://s.id/vb9TD

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
termasuk Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah"		
Komponen Evaluasi Kinerja		
7. Mendorong Inspektorat untuk menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Inspektorat telah membangun aplikasi teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	https://drive.google.com/drive/folders/1jAWMdwMZUYcjIZmEZ5kQY8sBE5amG4BR?usp=sharing
	Telah disusun SOP dalam hal monitoring dan evaluasi tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan pada LHE AKIP internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB. Akan tetapi dalam SOP tidak menyajikan tools yang digunakan dalam melakukan monev.	https://drive.google.com/file/d/16OW15qCphlAfgetB2LncMhC9quIfg2T/view?usp=sh aring

Sumber: Biro Organisasi Setda NTB, 2025

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Nilai SAKIP BB sebesar Rp1.362.579.176.815,00. Realisasi anggaran sebesar Rp893.614.959.605,00. Efisiensi anggaran sebesar 34,11%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.72
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi (%)
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Nilai SAKIP	1.362.579.176.815,00	893.614.959.605,00	70.01 (BB)	69,68 (B)	12.824.554.529,35	19.462.636.435,01	0,66	0,34	34,11

Sumber: Biro Organisasi Setda NTB, 2025

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Target tahunan Nilai SAKIP adalah kategori BB, sedangkan realisasi sampai dengan TW II berdasarkan evaluasi Kemen PANRB sebesar 69,68 (B). Sampai dengan TW III, Kemen PANRB tidak melakukan evaluasi kembali atas Nilai SAKIP, sehingga Nilai SAKIP yang digunakan adalah Nilai SAKIP sampai dengan TW II. Seluruh program/kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun ANggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program/kegiatanProgram dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian Menunjang Keberhasilan Pencapaian Target adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah (realisasi 38,23%) dengan kegiatan:
    1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    2. Mutasi dan Promosi ASN
    3. Pengembangan Kompetensi ASN
    4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

b. Program Pemenuhan Hak Anak (realisasi 39,59%) dengan kegiatan:
    1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
    2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
c. Program Penataan Organisasi (realisasi 25,65%) dengan kegiatan:
    1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
d. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (realisasi 47,44%) dengan kegiatan:
    1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
    2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
e. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (realisasi 15,72%) dangan kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
f. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (realisasi 41,57%) dengan kegiatan:
    1. Pengembangan Kompetensi Teknis
    2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (realisasi 66,03%) dengan kegiatan:
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    10. Peningkatan Pelayanan BLUD
h. Program Penyelenggaraan Pengawasan (realisasi 40,71%) dengan kegiatan:
    1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

8. Inovasi

Inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target 189dalah189or kinerja Nilai SAKIP 189dalah dengan melakukan pengembangan terhadap aplikasi e-SAKIP. Pengembangan aplikasi ini merupakan tindaklanut atas rekomendasi LHE Kementerian PANRB Tahun 2024 agar aplikasi e-SAKIP Pemerintah Provinsi NTB dapat mengaitkan hubungan antara kinerja dengan realisasi anggaran, baik pada pada setiap jenjang jabatan maupun target organisasi perangkat daerah. Aplikasi e-SAKIP awal diakses melalui https://esakip2.ntbprov.go.id dan setelah pengembangan diakses melalui: https://esakip.ntbprov.go.id (link Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi dan link laporan integrasi dengan e-kin: http://s.id/y8gtX).

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.73
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Nilai SAKIP

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Kepegawaian Daerah	3,663,092,900.00	1,400,359,573.00	38.23
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	768,622,700.00	404,194,710.00	52.59
Mutasi dan Promosi ASN	1,480,990,000.00	498,328,742.00	33.65
Pengembangan Kompetensi Asn	589,125,400.00	369,416,459.00	62.71
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	824,354,800.00	128,419,662.00	15.58
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	188,923,100.00	74,793,700.00	39.59
Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	156,094,000.00	74,793,700.00	47.92
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	32,829,100.00	0.00	0.00
Program Penataan Organisasi	1,656,196,700.00	424,792,784.00	25.65
Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	590,170,600.00	264,120,144.00	44.75

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1,066,026,100.00	160,672,640.00	15.07
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	120,281,500.00	57,056,600.00	47.44
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	37,376,500.00	4,210,000.00	11.26
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	82,905,000.00	52,846,600.00	63.74
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,334,791,726.00	4,712,345,314.00	41.57
Pengembangan Kompetensi Teknis	2,218,320,890.00	976,254,436.00	44.01
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	9,116,470,836.00	3,736,090,878.00	40.98
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,341,136,231,073.00	885,540,523,686.00	66.03
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257,093,000.00	73,533,000.00	28.60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,325,284,444,143.00	875,799,042,824.00	66.08
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	889,131,000.00	284,155,268.00	31.96
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,725,000.00	0.00	0.00

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161,007,700.00	72,022,160.00	44.73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	574,450,700.00	254,328,807.00	44.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194,789,000.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,941,119,040.00	2,680,741,717.00	68.02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,800,000.00	328,319,184.00	53.32
Peningkatan Pelayanan Blud	9,216,671,490.00	6,048,380,726.00	65.62
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,805,365,500.00	1,141,958,040.00	40.71
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,149,209,500.00	778,403,704.00	36.22
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	656,156,000.00	363,554,336.00	55.41

Sumber: BKAD NTB, 2025

3.1.1.9 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal diukur dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Fiskal. Adapun capaian sasaran strategis kinerja Meningkatnya Kemandirian Fiskal sampai dengan triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 3.74
Realisasi Kinerja Meningkatnya Kemandirian Fiskal Provinsi NTB sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026) Realisasi Tahun 2024	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Dalam RPD 2024-2026	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100)	10 (10=6/5*100)	11 (11=6/7*100)	12 (12=6/8*100)
Indeks Kapasitas Fiskal	Poin	1,241	1,504-1,838	Sedang (0,54-1,02)	1,241*	1,838-2,171	-	100	121,67	67,52	NA

Sumber : PMK No. 65 Tahun 2024, 2025 diolah
Keterangan: Data tahun 2024 karena data rilis dari Kementerian Keuangan pada bulan Januari tahun 2026*

A. Indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk Peta Kapasitas Fiskal Daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk : (1) pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah, (2) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah dalam hal dipersyaratkan, (3) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah, (4) pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat, (5) pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah, (6) pertimbanagn dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/Lembaga dalam rangka sinergi pendanaan, (7)

pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur, dan (8) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**
   Sampai dengan triwulan III 2025, belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang tentang Peta Kapasitas Fiskal Tahun 2025 sehingga realisasi indikator Indeks Kapasitas Fiskal Tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024 sebesar 1,241 poin. Capaian sebesar 121,67% atau mencapai target.
2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Realisasi kinerja Indeks Indeks Kapasitas Fiskal tahun 2025 sampai dengan Triwulan III belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga realisasinya masih menggunakan realisasi tahun 2024 sebesar 1,241 poin. Capaian kinerja menjadi 100%.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal sampai dengan triwulan III tahun 2025 (menggunakan realisasi tahun 2024) sebesar 1,241 poin, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024-2026 (1,838-2,171) capaiannya sebesar 67,52%.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional**
   Indeks Kapasitas Fiskal dihitung hanya untuk provinsi dan kabupaten.kota sehingga realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB tidak bisa dibandingkan dengan nasional.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 menunjukkan penurunan, tahun 2023 Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB sebesar 1,375 poin (kategori rendah), turun 0,134 poin di 2024 menjadi 1,241 poin (kategori rendah). Penurunan ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat.
   Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan dengan mengurangkan pendapatan dengan unsur pengurang. Pendapatan adalah total pendapatan, sedangkan unsur pengurang terdiri dari pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berdasarkan data APBD Murni Provinsi NTB Tahun 2023 dan Tahun 2024 terlihat bahwa untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPS) maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Disis lain, unsur pengurang Indikator Fiskal Daerah seperti belanja pegawai, dan belanja bagi hasil mengalami peningkatan. Tahun 2024, Provinsi NTB juga mulai melakukan pembayaran utang beserta bunganya kepada PT. SMI, sehingga hal inilah yang mengakibatkan penurunan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.
   Untuk dapat meningkatkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah maka pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk meningkatkan PAD dengan memaksimalkan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan dan karakteristik pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi. PAD Dihitung berdasarkan tren historis dengan penyesuaian faktor-faktor seperti penambahan obyek pajak dan tarif serta meningkatkan potensi PAD melalui

pemutakhiran basis data wajib pajak dan optimalisasi aset. Selain itu dilakukan pula peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPS) dengan upaya memperluas jejaring dan kerja sama internasional atau dengan sektor swasta.

Disisi belanja, alokasi Belanja Pegawai Provinsi NTB dalam APBD Murni setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp 2.075,73 M (34,80% dari APBD), pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp2.257,68 M (36,52 % dari APBD) dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi Rp 2.420,52 M (38,24% dari APBD) yang disebabkan peningkatan jumlah pegawai pemerintah Provinsi NTB. Untuk dapat membatasi belanja pegawai ini, pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2025 telah menyeleksi pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu. Untuk pegawai yang tidak lulus untuk kedua kategori tersebut diberhentikan masa kontrak kerjanya. Selain itu untuk bisa meningkatkan rasio belanja pegawai terhadap APBD maka sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD, LLPS terus ditingkatkan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Pagu anggaran untuk mencapai target Indeks Kapasitas Fiskal sebesar Rp 2.261.482.044.666,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 2025 sebesar Rp1.438.612.761.105,00. Efisiensi anggaran sebesar 22,9%. Perhitungan efisiensi anggran sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.75

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Kapasitas Fiskal

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi (%)
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Indeks Kapasitas Fiskal	2.261.482.044.666	1.438.612.761.105	1,504	1,521	1.159.236.713.219,18	1.503.644.976.506,65	0,77	0,23	22,9

Sumber: Biro Organisasi Setda NTB, 2025

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program dan kegiatan belum optimal dilaksanakan mengingat pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja

Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (realisasi anggaran 47,12%), dengan kegiatan :
    1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,07%), dengan kegiatan :
    1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
    3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
c. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (realisasi anggaran 60,39%), dengan kegiatan :
    1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
    3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
    5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    6. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (realisasi anggaran 47,90%), dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (realisasi anggaran 66,03%), dengan kegiatan :
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    10. Peningkatan Pelayanan BLUD
f. Program Penyelenggaraan Pengawasan (realisasi anggaran 40,71%), dengan kegiatan :
    1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
g. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi (realisasi anggaran 65,80%), dengan kegiatan :
    1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    2. Pendampingan dan Asistensi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.76

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Kapasitas FIskal

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1,019,097,100.00	480,183,478.00	47.12
Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	191,460,700.00	86,312,141.00	45.08
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	95,000,000.00	42,764,257.00	45.02
Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	732,636,400.00	351,107,080.00	47.92
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	3,442,255,431.00	50.07
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	2,649,413,414.00	54.66
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	896,019,370,793.00	541,113,668,935.00	60.39
Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4,015,227,250.00	1,632,168,512.00	40.65
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	983,025,500.00	427,117,396.00	43.45
Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	720,721,800.00	281,459,586.00	39.05
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	811,470,680.00	444,625,720.00	54.79

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	888,818,302,563.00	538,225,527,721.00	60.56
Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	670,623,000.00	102,770,000.00	15.32
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11,580,854,700.00	5,547,453,922.00	47.90
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11,580,854,700.00	5,547,453,922.00	47.90
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,341,136,231,073.00	885,540,523,686.00	66.03
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257,093,000.00	73,533,000.00	28.60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,325,284,444,143.00	875,799,042,824.00	66.08
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	889,131,000.00	284,155,268.00	31.96
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,725,000.00	0.00	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161,007,700.00	72,022,160.00	44.73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	574,450,700.00	254,328,807.00	44.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194,789,000.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,941,119,040.00	2,680,741,717.00	68.02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,800,000.00	328,319,184.00	53.32
Peningkatan Pelayanan Blud	9,216,671,490.00	6,048,380,726.00	65.62

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,805,365,500.00	1,141,958,040.00	40.71
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,149,209,500.00	778,403,704.00	36.22
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	656,156,000.00	363,554,336.00	55.41
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2,046,759,000.00	1,346,717,613.00	65.80
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	96,640,000.00	8,617,700.00	8.92
Pendampingan Dan Asistensi	1,950,119,000.00	1,338,099,913.00	68.62

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.10 Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 indikator yang dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan serta Pilar pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Adapun 17 Tujuan SDGs meliputi : Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrasruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diukur dengan Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta Hukum dan Tata Kelola. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.77

Realisasi Kinerja Meningkatnya Integrasi Program Pembangunan Daerah dan Peran Pemerintah Provinsi NTB dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	58	70	69*	80	-	118,97	98,57	86,25	-
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	63	65	63*	75	-	100,00	96,92	84,00	-
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	49	69	68*	72	-	138,,78	98,55	94,44	-
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	57	65	62*	75	60-62	108,77	95,38	82,67	100

Sumber: Bappeda NTB 2025

*Keterangan: * Penilaian mandiri, rilis dari Kementerian PPN/Bappenas belum ada sampai laporan disusun*

A. Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial tahun 2025 sebesar 69% lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2025 (70,00%) atau mencapai 98,57%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Presentase Realisasi Pilar Pembangunan Sosial tahun 2025 sebesar 69%, mengalami peningkatan 11 poin dibandingan tahun 2024 (58%). Capaian Pilar Pembangunan Sosial Tahun 2025 sebesar 118,97 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial Tahun 2025 sebesar 69 persen lebih rendah dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 (80,00%) atau mencapai 86,25%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tidak ada target nasional untuk Pilar Pembangunan Sosial di tahun 2025, sehingga indikator ini tidak bisa dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Dari 17 Tujuan SDGs, terdapat 7 tujuan yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Sosial yaitu (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Adapun analisis penyebab keberhasilan/keggalan dan alternatif solusi Pilar Pembangunan Sosial dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Tanpa Kemiskinan

Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin sebesar 11,78%, menurun 0,13 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 1,13 poin terhadap Maret 2024. Angka kemiskinan di Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang mencapai 8.47% pada Maret 2025.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 654,57 ribu orang, menurun 4,03 ribu orang terhadap September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 12,02%, naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,64%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,51%, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 12,21%. Jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 mengalami penurunan sebanyak 14,94 ribu orang (dari 338,74 ribu

orang pada September 2024 menjadi 353,68 ribu orang pada Maret 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 18,97 ribu orang (dari 319,86 ribu orang pada September 2024 menjadi 300,89 ribu orang pada Maret 2025).

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp556.846/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp422.427 (75,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp134.419 (24,14 persen). Garis Kemiskinan pada Maret 2025 lebih tinggi dibandingakn September 2024 yang sebesar Rp 540.339/kapita/bulan.

Pada Maret 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTB memiliki 4,27 orang anggota rumah tangga, sementara pada September 2024 sebesar 4,13 orang dalam rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.377.732/rumah tangga miskin/bulan, masih lebih tinggi dibandingkan September 2024 yang mencapai Rp 2.231.600/rumah tangga miskian/bulan..

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2024–Maret 2025 antara lain adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi

   Perekonomian NTB triwulan I 2025 mengalami kontraksi sebesar -1,47 persen (y-on-y) sementara itu pertumbuhan ekonomi NTB (tanpa tambang) sebesar 5,57% di *rebound* oleh pertumbuhan sektor pertanian (pilar utama perekonomian NTB) sebesar 10,28 persen dengan share sebesar 23,24%. Sektor tersebut menyerap tenaga kerja di NTB 32,50 persen (Februari 2025) yaitu 43,66 ribu orang dibanding tahun sebelumnya
2. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Jagung

   Pemerintah telah resmi menaikkan HPP untuk gabah dan jagung. Efektif mulai 1 Februari 2025, HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan HPP jagung pakan menjadi Rp5.500 per kilogram. Kenaikan HPP ini meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong produktivitas pertanian serta potensi mengurangi kemiskinan
3. Peningkatan Produksi Padi dan Jagung

   Pada triwulan I 2025 terdapat peningkatan produksi padi dan jagung di NTB. Peningkatan produksi padi sebesar 141,09 ribu ton GKG (55,43 persen) dibandingkan produksi padi pada triwulan I 2024 yang sebesar 254,56 ribu ton GKG. Produksi jagung triwulan I 2025 sebesar 221,049 ribu ton pipilan kering meningkat 43,88 persen

dibandingkan produksi jagung pada triwulan I 2024 yang sebesar 153,631 ribu ton pipilan kering

4. Nilai Tukar Petani (NTP) Meningkat
   Persentase perubahan NTP Provinsi NTB Maret 2025 dibandingkan September 2024 meningkat sebesar 5,63 poin persen.
5. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Meningkat
   Konsumsi masyarakat NTB tumbuh 4,18 persen (y-on-y), menopang pertumbuhan perekonomian NTB dan menggambarkan daya beli masyarakat tumbuh positif.
6. Rata-Rata Upah Buruh Meningkat
   Rata-Rata Upah Buruh Meningkat Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp2.377.411, meningkat 0,52% dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar Rp2.365.102.
7. Penyaluran Bantuan Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
   Penyaluran Bansos Sembako/BPNT NTB sampai bulan Maret 2025 meningkat sebesar 3,54% dibanding bulan September 2024. Dari target 505.565 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah disalurkan kepada 496.778 KPM

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program antara lain Program jamban keluarga, pembangunan rumah tidak layak huni, BUMDES, kawasan rumah pangan lestari, kelompok usaha bersama, bank sampah, dan air bersih. Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi beban pengeluaran, salah satunya dengan cara meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi penduduk miskin. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Ada 4 (empat) bentuk perlindungan sosial utama untuk memenuhi kebutuhan dasar pengembangan SDM Indonesia seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai/Beras Sejahtera (BPNT/Rastra), Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Tantangan yang dihadapi Provinsi NTB saat ini adalah belum optimalnya koordinasi TKPK provinsi dengan TKPK kabupaten/kota serta belum optimalnya sinergitas program/kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.Data sasaran program P3KE belum dipakai sebagai dasar penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, startegi pelaksanaan yang belum berjalan efektif dan kualitas SDM yang rendah dan bantuan adalah bantuan berupa kebutuhan dasar. Monitoring dan evaluasi juga bermanfaat sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah, nonpemerintah dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan maka diperlukan penguatan kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangna kemiskinan, seperti membangun keterpaduan dan sinergisitas dalam system monitoring dan evaluasi yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara regular dan terpilar, mengembangkan standarisasi indikator, variabel, dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan survey dan kunjungan lapangan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai respon terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah NTB tahun 2025 diantaranya adalah dengan

mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada Perangkat Daerah . Strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah sistem monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mengetahui output dan outcome dari berbagai upaya program/kegiatan yang sedang dan telah berjalan terkait penanggulangan kemiskinan.

b. Tanpa Kelaparan

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Kondisi rentan rawan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh masih masih rendahnya produksi pangan di wilayah itu dibandingkan dengan kebutuhan, kemudian tingginya prevalensi balita stunting, terbatasnya akses air bersih, dan masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut. Selaras dengan itu, FAO menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 (empat) komponen, yaitu: 1) Kecukupan ketersediaan bahan pangan, 2) Stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap bahan pangan, dan 4) Kualitas/keamanan bahan pangan yang digunakan.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan adalah nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan (PPH). Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan.Provinsi NTB terlihat bahwa Pola Pangan Harapan setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dari angka 91.30 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 93,27 persen pada tahun 2024. Program Pola pangan harapan juga berdampak pada stunting di NTB.Persentase Balita stunting dari tahun sejak tahun 2019 konsisten mengalami penurunan dari 25,50 persen pada tahun 2019 menjadi menjadi 13,49% pada tahun 2023, dan tahun 2024 sebesar 12,19%. Sementara itu, data dari 10 kabupaten dan kota di NTB, delapan di antaranya mencapai perkembangan stunting dengan tren penurunan positif. Sumbawa Barat 7,36%; Kota Mataram 8,11%; Sumbawa 8,95%; Kota Bima 10,21%; Lombok Tengah 10,39%; Lombok Barat 10,48%; Dompu 10,73%; Bima 10,95%; Lombok Utara 14,69% dan Lombok Timur 17,35%.

Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dan menjadi tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi NTB adalah : a. Masih cukup tingginya persentase penduduk miskin;

b.Masih adanya daerah dan penduduk yang terkategori rentan rawan pangan; c.Semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya alam; d.Masih terjadinya fluktuasi dan gejolak harga pangan pokok strategis;e.Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar (terutama air bersih dan kesehatan); dan f. Dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, khususnya berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap kekeringan dan banjir; g.Masih dijumpainya praktik-praktik penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Hal ini menyebabkan terjadinya potensi kontaminasi, yang dapat meningkatkan resiko penyakit bawaan makanan; h.Kualitas Konsumsi Pangan penduduk yang masih belum beragam dan didominasi oleh konsumsi bahan pangan nabati.

Pemerintah provinsi NTB terus berupaya melalui program/kegiatan untuk kebijakan pola pangan harapan meliputi peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya lumbung pangan masyarakat, terbina dan tertatanya kelembagaan desa mandiri pangan, memperbanyak kawasan rumah pangan lestari, serta terpantaunya arus keluar masuk komoditas pangan strategis. Untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memerlukan dukungan dari berbagai sektor dan instansi terkait. Dukungan tersebut antara lain adalah : (1) Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) Peningkatan produksi komoditas hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3) Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu; (4) Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan; (5) Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (6) Penyediaan benih unggul dan bersertifikat untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura; (7) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; serta (8) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.

c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

IPM Provinsi NTB 2025 mengalami peningkatan 1,19 persen dari 73,10 pada tahun 2024 menjadi 73,97 pada tahun 2025. Peningkatan IPM Provinsi NTB 2025 terjadi pada tiga dimensi utama, yakni umur panjang, hidup sehat, dan pengetahuan. Ketiga dimensi tersebut adalah standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,60 tahun, meningkat 0,35 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,98 menjadi 13,99 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,34 tahun, dari 7,87 tahun menjadi 8,21 tahun pada tahun 2025. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 316 ribu rupiah (2,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret

d. Pendidikan Berkualitas

Dimensi pengetahuan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata- rata Lama Sekolah. Pada tahun 2024, Harapan lama sekolah di Provinsi NTB sebesar 13,98 tahun meningkat menjadi 13,99 tahun di 2025. Sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 7,87 tahun di 2024 menjadi 8,21 tahun di 2025. Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yaitu : tidak meratanya akses pendidikan; kualitas guru yang mencakup integritas dan profesionalisme, kesesuaian kualifikasi dan kurangnya pengembangan profesi; keterbatasan infrastruktur dan akses internet; rendahnya kemampuan literasi dan numerasi serta tidak relevannya kurikulum, belum optimalnya keterlibatan orang tua dan masyarakat.

Beberapa upaya dapat dilakukan, termasuk meningkatkan kualitas guru dan infrastruktur sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah. Selain itu, program seperti Sekolah LISAN yang berfokus pada pembentukan karakter ramah lingkungan sejak dini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan Beberapa Upaya yang dilakukan adalah 1. Peningkatan Kualitas Guru: Melalui pelatihan dan pengembangan profesional, guru dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan membimbing siswa.2. Perbaikan Infrastruktur Sekolah: Memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman dapat

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan melanjutkan pendidika. 3. Pengurangan Angka Putus Sekolah: Identifikasi penyebab putus sekolah (baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi) dan berikan dukungan yang sesuai, seperti beasiswa atau bantuan lainnya.4. Program Sekolah LISAN: Program ini, yang berfokus pada pembentukan karakter ramah lingkungan, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga lingkungan 5. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan, misalnya melalui program orang tua asuh atau dukungan finansial, dapat memberikan dampak positif pada angka lama sekolah. 6. Peningkatan Koordinasi: Memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait (pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan lembaga terkait) untuk memastikan implementasi program yang efektif dan berkelanjutan. 7. Penghargaan: Memberikan penghargaan kepada individu atau lembaga yang berjasa dalam memajukan pendidikan dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kualitas dan angka lama sekolah

e. Kesetaraan Gender

Analisis menggunakan data tahun 2024 karena data tahun 2025 s/d Triwulan III tidak ada. Pada tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB sebesar 0,530 turun sebesar 0,120 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,650. Penurunan sebesar 0,120 poin tahun ini merupakan penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Selain itu penurunan IKG Provinsi NTB ini menunjukkan perbaikan yang signifikan karena pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Provinsi NTB mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan.

Penurunan IKG Provinsi NTB 2024 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, khususnya dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Pada tahun 2024 keterwakilan perempuan dalam parlemen meningkat dari 1,54 persen menjadi 10,77 persen, dan Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 62,54 persen pada tahun 2023 menjadi 68,04 persen pada tahun 2024, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat dari 84,18 persen pada tahun 2023 menjadi 86,47 persen pada tahun 2024.

IKG di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang konsisten pada ketiga dimensi pembentuknya. Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia telah berhasil diminimalisir. Sementara itu, dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja juga mengalami perbaikan.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKG adalah : mempertahankan dan meningkatkan pencapaian, dimana Provinsi NTB masuk dalam 22

(dua puluh dua) daerah dengan ketimpangan gender diatas national; Keterwakilan perempuan dalam kursi legeslatif yang sejauh ini masih jauh dengan angka sebesar 10,77% sementara keterwakilan laki-laki mencapai 89,23%. Perempuan seringkali menghadapi beban ganda dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan; Akses teradap pelayanan kesehatan masih kurang terutama di daerah terpencil; Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi aktif dalam upaya pengurangan ketimpangan juga menjadi tantangan..

Untuk percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan Gender (IKG) di Provinsi NTB meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Upaya-upaya tersebut memfokuskan apda peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikann yang setara dengan laki-laku, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja, Mengurangi angka putus sekolah pada perempuan; pemberdayaan ekonomi melalui pelibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, Memberikan akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, Menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-lak; perlindungan perempuan melalui Menjamin hak-hak reproduksi perempuan, Melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, baik di dalam maupun di luar rumah, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi.; keterwakilan perempuan dalam pengamnbilan keputusan dengan mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen, pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik lainnya serta Memastikan perempuan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan pengambilan keputusan; pengukuran dan evaluasi dengan Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap IKG di NTB, Menggunakan data dan informasi yang akurat untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus serta Menyesuaikan strategi dan intervensi berdasarkan hasil evaluasi..

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indicator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial pada tahun 2025 adalah sebesar Rp523.870.271.822,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp256.883.849.384,60. Efisien anggaran sebesar 50,25%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 dipengaruhi kebijakan efisiensi dari Pemerintah. Kebijakan efisiensi dilakukan melalui penyesuaian anggaran melalui pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025

Pogram dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target indikator Persentase CapaianPilar Pembangunan Sosial, sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 3,24%) dengan kegiatan:
    1. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
    2. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
b. Program Kesejahteraan Rakyat (realisasi anggaran 27,63%) dengan kegiatan:
    1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
    2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,07%) dengan kegiatan:
    1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
    2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)
    3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (realisasi anggaran 52,375) dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggaran 22,28%) dengan kegiatan
    1. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
    3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
f. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan(realisasi anggaran 8,79%) dengan kegiatan:
    1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
    2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
    3. Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (realisasi anggaran 52,41%) dengan kegiatan:
    1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi
    2. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
h. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
    4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
i. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran 43,13%) dengan kegiatan Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi
j. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 51,99%) dengan kegiatan:
    4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
    5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
    6. Pengelolaan Pendidikan Khusus

k. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 74,01%) dengan kegiatan:
    1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
    2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
l. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (realisasi anggaran 31,01%) dengan kegiatan:
    3. Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
    4. Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 3.78
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi (%)
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial	523.870.271.822,00	256.883.849.384,60	70	69	3.722.554.338,91	7.483.861.026,03	0,50	0,50	50,25

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.79
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	73,719,662.00	3.24
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	73,719,662.00	3.87
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0.00	0.00
Program Kesejahteraan Rakyat	35,179,785,155.00	9,718,826,266.00	27.63
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18,214,848,295.00	8,671,961,381.00	47.61
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16,787,387,410.00	977,531,085.00	5.82

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	177,549,450.00	69,333,800.00	39.05
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	3,442,255,431.00	50.07
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	2,649,413,414.00	54.66
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,604,949,300.00	1,887,739,731.00	52.37
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,604,949,300.00	1,887,739,731.00	52.37
Program Penanggulangan Bencana	2,354,640,549.00	524,512,786.00	22.28
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	830,956,549.00	31,749,600.00	3.82
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1,343,034,000.00	447,396,986.00	33.31
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	180,650,000.00	45,366,200.00	25.11
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	217,552,406,077.60	51.99

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	121,014,796,125.80	56.45
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	81,649,478,124.80	45.05
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	14,888,131,827.00	65.15
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811,529,900.00	71,350,000.00	8.79
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	638,479,900.00	47,230,000.00	7.40
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	148,550,000.00	0.00	0.00
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	24,500,000.00	24,120,000.00	98.45
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	141,766,347,784.00	42.88
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	86,691,824,844.00	39.71
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	54,714,360,290.00	49.15
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	145,934,000.00	62.82
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	726,720,000.00	214,228,650.00	29.48

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Provinsi			
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	22,642,437,979.00	43.13
Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	52,503,960,000.00	22,642,437,979.00	43.13
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	217,552,406,077.60	51.99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	121,014,796,125.80	56.45
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	81,649,478,124.80	45.05
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	14,888,131,827.00	65.15
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	125,071,660.00	74.01
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	134,000,000.00	99,205,500.00	74.03
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	35,000,000.00	25,866,160.00	73.90
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,613,381,850.00	845,529,792.00	52.41
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi	178,270,000.00	84,343,040.00	47.31
Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,435,111,850.00	761,186,752.00	53.04

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi Tahun 2025 sebesar 63% lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2025 (65%) atau mencapai 96,92%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Presentase Realisasi Pilar Pembangunan Ekonomi tahun 2025 sebesar 63%, sama dengan tahun 2024 sehingga realisasinya sebesar 100%,

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi Tahun 2025 sebesar 63% lebih rendah dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 (75,00%) atau mencapai 84,00%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Tidak ada target nasional untuk Pilar Pembangunan Ekonomi di tahun 2025, sehingga indikator ini tidak bisa dibandingkan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Dari 17 Tujuan SDGs, terdapat 5 tujuan yang masuk kedalam pilar pembangunan ekonomi yaitu (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi dan Infrasruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, serta (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Adapun capaian persentase Pilar Pembangunan Ekonomi dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Energi Bersih dan Terjangkau

Urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan target setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi kelistrikan di Provinsi NTB saat ini semakin baik baik dari sisi penyediaan pembangkit, ditribusi jaringan hingga kualitas listrik yang diikmati oleh masyarakat Peningkatan rasio elektrifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dibarengi adanya pemerataan distribusi listrik yang lebih merata. Tercatat sejak tahun 2018 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.138 desa/kelurahan mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber non

PLN, yaitu Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit dan Desa Baturotok yang masuk dalam Kecamatan Batulanteh dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa. Kelima desa tersebut mendapatkan listrik dari sumber PLTMH. Kelima desa tersebut berada pada wilayah pegunungan di Kabupaten Sumbawa dimana jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut.

Kendala akses jalan bagi pembangunan jaringan PLN menjadi permasalahan utama belum masuknya jaringan listrik di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas ESDM telah melakukan koordinasi secara berkala dengan PLN Wilayah NTB, Dians PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempercepat peningkatan jalan menuju ke wilayah tersebut. Selanjutnya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan penyambungan listrik murah dan hemat diperuntukan bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui oleh jaringan listrik namun belum mendapat layanan listrik, maupun sudah mendapat layanan listrik tetapi masih menyambung pada tetangganya.

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, kapasitas pembangkit yang direncanakan di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2024 adalah 953 MW. Sebagian besar pembangkit yang akan dibangun adalah PLTU batubara. Untuk meminimalkan penggunaan BBM terutama waktu beban puncak, direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/ Pembangkit Listrik Mobile Gas (PLTMG)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan bahan bakar gas alam yang disimpan dalam bentuk CNG (compressed natural gas).

Sesuai dengan proyeksi kebutuhan tenaga listrik di provinsi ini, direncanakan tambahan sambungan baru sampai dengan tahun 2025 sekitar 507.680 pelanggan. Tambahan sambungan ini juga untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Selaras dengan penambahan pelanggan tersebut, direncanakan pembangunan jaringan distribusi termasuk untuk listrik perdesaan, meliputi jaringan tegangan menengah 5.074 kms, jaringan tegangan rendah sekitar 4.072 kms dan tambahan kapasitas trafo distribusi sekitar 615 MVA. Adapun pengembangan jaringan distribusi ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.

b. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebanyak 3.204,66 ribu orang, naik 12,1 ribu orang dibanding Agustus 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,38 persen poin dibanding Agustus 2024.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 3.106,73 ribu orang, naik sebanyak 1,18 ribu orang dari Agustus 2024. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,05%; serta Industri Pengolahan sebesar 10,25%. Dibandingkan Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pendidikan (20,14 ribu orang); Konstruksi (19,72 ribu orang); dan Pengangkutan dan Pergudangan (9,67 ribu orang).

Pada Agustus 2025 sebanyak 980,95 ribu orang (31,58 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 7,10 persen poin dibanding Agustus 2024. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 turun sebesar 1,29 persen poin, selain itu persentase pekerja paruh waktu juga naik sebesar 1,32 persen poin dibanding Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 3,06%, naik 0,33 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024.

Perekonomian NTB berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan III-2025 mencapai Rp 49,49 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 28,92 triliun. Ekonomi NTB Triwulan III-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,91persen (q-to-q). Ekonomi NTB selama 2025 terhadap 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,22 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 54,86 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,25 persen

c. Industri, Inovasi dan Infrasruktur

Pertumbuhan ekonomi sektor industri/pengolahan pada triwulan III Tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 40,17 persen, meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II Tahun 2025 sebesar 37,69 persen. Pertumbuhan di triwulan III tahun 2025 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 40,32 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sektor industri pengolahan sudah mulai berkembang cukup bagus di Provinsi NTB. Untuk itu perlu lebih didorong pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas industri di Provinsi NTB.

Prioritas pembangunan sektor industri berbasis pada pengembangan potensi lokal yang ada di NTB. Hal ini dihajatkan sebagai bentuk peningkatan perekonomian masyarakat NTB. hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada subsektor perindustrian Sejalan dengan hal tersebut, internalisasi kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2024-2026 diarahkan

untuk mendorong pengembangan sektor industri prioritas untuk menuju Making Indonesia 4.0 dengan tetap mengedepankan pengembangan skala industri berbasis potensi lokal. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri pengolahan berkorelasi dengan kebijakan strategis Kabupaten/Kota untuk secara bersama mengembangkan skala industri berbasis potensi lokal serta pengembangan mass Production and mass Promotion.

Perkembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata cukup menggembirakan seperti yang diharapkan dalam menanggulangi penganguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang tinggal di lingkar destinasi. Adapun tantangan yang dihadapi adalah: a. Kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan bisnis masih rendah. b. Desain dan packaging kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar. c. Peluang pembiayaan IKM yang masih lemah karena belum memenuhi standar kelayakan kredit pembiayaan perbankan. d. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.(termasuk packaging produk). e. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Provinsi NTB untuk bersaing di pasar nasional. f. Masih rendahnya penggunaan sarana prasarana mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah melalui Peningkatan Kapasitas dengan Mengadakan pelatihan dan workshop tentang desain produk, inovasi, manajemen produksi, dan pemasaran bagi pelaku IKM. Melalui: 1. Pendampingan yaitu Memberikan pendampingan teknis dan manajerial secara berkelanjutan kepada IKM, termasuk dalam hal pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, dan akses pasar. 2. Kemitraan: Mendorong kemitraan antara IKM dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau perusahaan besar untuk transfer pengetahuan dan teknologi. 3. Pengembangan Standar: Pemerintah dan asosiasi industri perlu berperan aktif dalam mengembangkan standar kualitas produk IKM, baik standar nasional maupun internasional. 4. Sertifikasi: Mendorong IKM untuk mendapatkan sertifikasi produk yang relevan, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) atau sertifikasi halal. 5. Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran pelaku IKM tentang pentingnya standar kualitas dan sertifikasi produk.

Pengembangan Kawasan Industri: Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan rantai pasokan bahan baku. Kawasan industri ini dapat menjadi pusat produksi dan distribusi bahan baku bagi IKM.

Program Pembiayaan Khusus: Pemerintah perlu mengembangkan program pembiayaan khusus untuk IKM, dengan persyaratan yang lebih mudah dan bunga yang lebih rendah.

Pemasaran Bersama: Mendorong IKM untuk bergabung dalam kelompok atau klaster untuk melakukan pemasaran bersama melalui 1. E-commerce: Memfasilitasi IKM untuk memanfaatkan platform e commerce untuk memasarkan produk mereka secara online. 2. Pameran dan Festival: Mengadakan pameran dan festival produk IKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas.

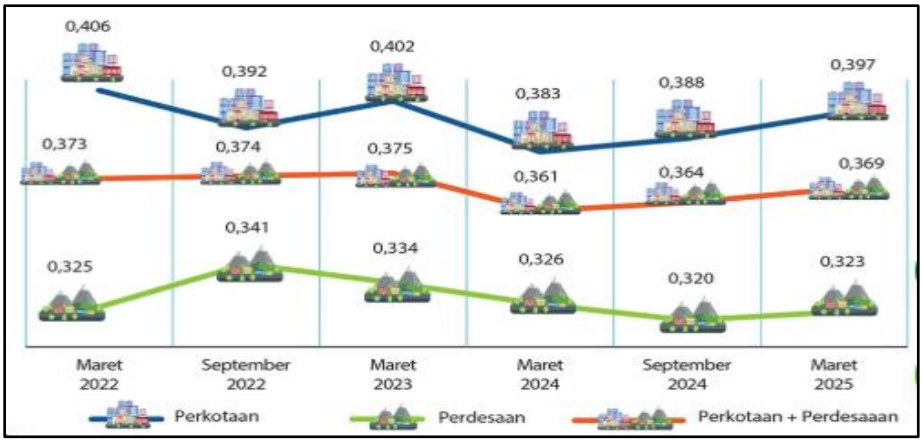
d. Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan,

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB diukur dengan Gini Ratio. Gini Ratio Provinsi NTB pada Maret 2025 sebesar 0,369. Angka ini meningkat 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 sebesar 0,364. Namun gini ratio Provinsi NTB pada Maret 2024 menurun 0,003 poin bila dibandingkan dengan kondisi September 2024 sebesar 0,361.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,397; meningkat dibanding Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,388 dan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,383. „ Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,323, naik dibanding Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,320 dan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,326

Grafik 3.16

Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB Tahun 2022-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,88 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,55 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,86 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran

baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,55 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,86 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga ada upaya yang sistimatis untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB, disamping itu juga Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) harus selalu diperbaharui sehingga sasaran penanggulangan bisa tepat. untuk mengkondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap wilayah sangat beragam dan spesifik, untuk itu butuh kebijakan dan strategi yg berbeda. Begitu juga kondisi keparahan kemiskinan dari setiap wilayah sangat beragam sehingga ada wilayah yang mendesak segera di tangani dan ada juga wilayah yang masih bisa ditunda penanganannya.

Pemerintah Provinsi NTB. telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan pada tahun 2025, antara lain meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, mengimplementasi kebijakan distribusi pendapatan, pembentukan kemitraan dan kolaborasi antar stakeholder, peningkatan kesadaran dan literasi keuangan, serta implementasi program pemberdayaan masyarakat. Upaya lainnya adalah dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) yang bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. serta kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk mengurangi beban finansial mereka dan meningkatkan akses transportasi.

e. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 26,92 persen pada tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai 49,75 persen. Lebih dirinci, pajak terealisasi Rp 1.728.154.255.901,- menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 2.045.004.056.872, sementara retribusi meningkat dari Rp 720.036.975.056 menjadi Rp 848.815.665.256 di tahun 2025. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga meningkat dari Rp 79.902.735.899 di tahun 2024 menjadi Rp 90.582.447.997, sementara Lain-lain PAD yang Sah menurun dari Rp 449.429.652.833 di tahun 2024, menjadi Rp 87.658.865.372. Penurunan PAD di tahun 2025 disebabkan mulai berlakunya opsen pajak sesuai yang diamantkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerapan opsen tidak mengurangi semangat pemerintah provinsi NTB dalam meningkatkan PAD. Beberapa upaya yang dilakukan adalah : melakukan peningkatan kualitas layanan yang inovatif dan modern, yaitu e-Pendapatan (sudah termasuk e- Samsat dan Samsat Delivery) yang dihajatkan untuk mendekatkan pelayanan Bappenda kepada masyarakat wajib pajak, sekaligus untuk menunjang optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. diantara layanan pembayaran pajak daerah (e-Samsat), layanan jemput antar pembayaran PKB (Samsat Delivery), serta layanan penyetoran retribusi daerah (e-STS Retribusi). Untuk itulah Bappenda Provinsi NTB mengintegrasikannya ke dalam aplikasi e-Pendapatan merupakan program digitalisasi pendapatan daerah yang mengadopsi sistem Enterprice Resource Planning (ERP) guna menghasilkan pengelolaan pendapatan yang akurat, kuat, responsif, efektif dan efisien.

Upaya percepatan yang dilakukan yaitu menambah jam layanan yakni Samsat Night Music setiap sabtu malam yang beroperasi didepan kantor Bappenda Provinsi NTB (jalan Majapahit) dengan menghadirkan musik dan penyanyi yang menghibur masyarakat/Wajib Pajak serta pemberian Door Price; memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan OPD yang potensial dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD; melakukan koordinasi dengan BPKAD, Bank NTB dan Instansi terkait lainnya untuk memantapkan e-sts Online Retribusi.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indicator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp189.419.122.886,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.719.119.731,00. Efisiensi anggaran sebesar 85,45%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi, sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 3,24%) dengan kegiatan:
    1. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
    2. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi

b. Program Hubungan Industrial (realisasi anggaran 66,32%) dengan kegiatan:
    1. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
    2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi
    3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (Ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (Umsp), Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (Umsk)
c. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa (realisasi anggaran 47,12%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
    2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    3. Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
d. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 50,07%) dengan kegiatan:
    1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
    2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)
    3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
e. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisasi anggaran 15,28%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
    2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
    3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
f. Program Pelayanan Penanaman Modal (realisasi anggaran 84,22%) dengan kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
g. Program Pemasaran Pariwisata (realisasi anggaran 27,99%) dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
h. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 98,70%) dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
i. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (realisasi anggaran 5,86%) dengan kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

j. Program Pengawasan Keamanan Pangan (realisasi anggaran 5,86%) dengan kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
k. Program Pengawasan Keamanan Pangan (realisasi anggaran 25,54%) dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
l. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi
    2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk)
    3. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
    4. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
    5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
    6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
m. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (realisasi anggaran 0,72%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi
    2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
n. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (realisasi anggaran 8,73%) dengan kegiatan:
    1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi
    2. Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
    3. Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan
o. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (realisasi anggaran 9,97%) dengan kegiatan:
    1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

2. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

p. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (realisasi anggaran 6,85%)
1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut dengan kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat

q. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (realisasi anggaran 10,76%) dengan kegiatan:
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
2. Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
3. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 Gt Yang Beroperasi Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

r. Program Pengelolaan Persampahan (realisasi anggaran 16,15%) dengan kegiatan Penanganan Sampah Di Tpa/Tpst Regional

s. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (realisasi anggaran 19,61%) dengan kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif

t. Program Pengembangan Ekspor (realisasi anggaran 17,91%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

u. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (realisasi anggaran 25,46%) dengan kegiatan:
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

v. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (realisasi anggaran 31,01%) dengan kegiatan:
1. Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2. Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

w. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (realisasi anggaran 6,37%) dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki), Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Provinsi
x. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (realisasi anggaran 11,94%) dengan kegiatan:
    1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
    3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan
    4. Kesejahteraan Hewan
y. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (realisasi anggaran 9,64%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
    2. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
z. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (realisasi angaran 19,65%) dengan kegiatan:
    1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar
    3. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
aa. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (realisasi anggaran 8,16%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
    2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
    3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
    4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
bb. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (realisasi anggaran 23,53%) dengan kegiatan:
    1. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
    2. Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
    3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi

cc. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (realisasi anggaran 6,34%) dengan kegiatan:
    1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
    2. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman
    3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
    4. Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi
    5. Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi
    6. Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor
    7. Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain
dd. Program Penyelenggaraan Jalan (realisasi anggaran 9,67%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
ee. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (realisasi anggaran 1,31%) dengan kegiatan:
    1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi
    2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
    3. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
ff. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (realisasi anggaran 51,33%) dengan kegiatan:
    1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
    2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
    3. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
gg. Program Perekonomian Dan Pembangunan (realisasi anggaran 41,33%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian
    2. Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    3. Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Bumd Dan Blud
hh. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (realisasi anggaran 49,60%) dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
ii. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 64,35%) dengan kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Program dan kegiatan yang tidak efektif dalam pencapaian target indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (realisasi anggaran 0%) dengan kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas.

Tabel 3.80
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi (%)
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	189.419.122.886,00	26.719.119.731,00	65	63	424.113.011,60	2.914.140.352,09	0,15	0,85	85,45

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.81
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	73,719,662.00	3.24
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	73,719,662.00	3.87
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0	0
Program Hubungan Industrial	2,539,899,764.00	1,684,403,165.00	66.32
Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,799,900.00	99.6

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	76,933,400.00	12,391,200.00	16.11
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2,412,966,364.00	1,622,212,065.00	67.23
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1,019,097,100.00	480,183,478.00	47.12
Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	191,460,700.00	86,312,141.00	45.08
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	95,000,000.00	42,764,257.00	45.02
Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	732,636,400.00	351,107,080.00	47.92
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	3,442,255,431.00	50.07
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	2,649,413,414.00	54.66
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	211,678,850.00	15.28
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	194,132,600.00	17
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	16,574,250.00	7.37
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	972,000.00	5.12
Program Pelayanan Penanaman Modal	38,813,000.00	32,688,000.00	84.22

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	38,813,000.00	32,688,000.00	84.22
Program Pemasaran Pariwisata	2,871,000,000.00	803,731,931.00	27.99
Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2,871,000,000.00	803,731,931.00	27.99
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.7
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.7
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	522,435,240.00	30,602,700.00	5.86
Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	522,435,240.00	30,602,700.00	5.86
Program Pengawasan Keamanan Pangan	104,400,000.00	26,665,000.00	25.54
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	104,400,000.00	26,665,000.00	25.54
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	3,938,767,000.00	28,276,000.00	0.72
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	1,111,910,000.00	26,324,000.00	2.37
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2,826,857,000.00	1,952,000.00	0.07
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	725,985,000.00	63,409,675.00	8.73
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	51,322,000.00	19,320,000.00	37.64
Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	9,617,000.00	3,760,000.00	39.1
Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	665,046,000.00	40,329,675.00	6.06
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	918,764,200.00	91,617,893.00	9.97
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	145,801,125.00	36,720,690.00	25.19
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	653,302,525.00	49,122,203.00	7.52
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	119,660,550.00	5,775,000.00	4.83
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,540,342,980.00	174,133,980.00	6.85

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,110,000.00	1,092,000.00	98.38
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	275,787,000.00	0	0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	2,263,445,980.00	173,041,980.00	7.65
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4,205,135,600.00	452,537,950.00	10.76
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2,578,568,800.00	451,139,950.00	17.5
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1,624,988,000.00	320,000.00	0.02
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,578,800.00	1,078,000.00	68.28
Program Pengelolaan Persampahan	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	627,000,000.00	122,931,700.00	19.61
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif	627,000,000.00	122,931,700.00	19.61
Program Pengembangan Ekspor	257,630,000.00	46,133,382.00	17.91
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	257,630,000.00	46,133,382.00	17.91
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	824,394,012.00	209,901,200.00	25.46
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	323,597,900.00	177,457,400.00	54.84
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	500,796,112.00	32,443,800.00	6.48

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,461,963,050.00	763,522,650.00	31.01
Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1,711,963,050.00	263,522,650.00	15.39
Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	750,000,000.00	500,000,000.00	66.67
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	227,820,000.00	14,517,960.00	6.37
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	227,820,000.00	14,517,960.00	6.37
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,850,536,200.00	340,481,067.00	11.94
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	610,324,500.00	170,611,867.00	27.95
Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	48,108,000.00	2,802,000.00	5.82
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan	2,135,818,700.00	147,195,700.00	6.89
Kesejahteraan Hewan	56,285,000.00	19,871,500.00	35.31
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	373,530,430.00	36,013,500.00	9.64
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	89,655,400.00	25,036,000.00	27.92
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	283,875,030.00	10,977,500.00	3.87
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,503,174,645.00	295,392,550.00	19.65

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,400,000.00	550,000.00	39.29
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar	1,498,835,645.00	293,272,750.00	19.57
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2,939,000.00	1,569,800.00	53.41
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,454,787,100.00	200,433,150.00	8.16
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7,500,000.00	7,500,000.00	100
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	83,200,000.00	22,710,500.00	27.3
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2,311,287,100.00	136,362,650.00	5.9
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	52,800,000.00	33,860,000.00	64.13
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	634,997,000.00	149,432,000.00	23.53
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	485,497,000.00	143,464,500.00	29.55
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	23,500,000.00	3,967,500.00	16.88
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	126,000,000.00	2,000,000.00	1.59
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,100,376,000.00	0	0
Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	1,100,376,000.00	0	0

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	27,236,030,090.00	1,727,258,095.00	6.34
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	15,503,965,950.00	300,390,097.00	1.94
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	1,862,051,080.00	767,549,733.00	41.22
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	130,400,000.00	56,256,200.00	43.14
Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	408,754,950.00	98,224,400.00	24.03
Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi	1,116,071,154.00	411,036,515.00	36.83
Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor	35,622,356.00	8,571,650.00	24.06
Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	8,179,164,600.00	85,229,500.00	1.04
Program Penyelenggaraan Jalan	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	19,429,740,600.00	254,191,300.00	1.31
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi	18,811,850,000.00	62,633,900.00	0.33
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	169,500,000.00	0	0
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	173,852,600.00	71,482,400.00	41.12
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	196,936,000.00	101,085,570.00	51.33
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	38,106,000.00	0	0
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	35,469,000.00	18,451,500.00	52.02

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	123,361,000.00	82,634,070.00	66.99
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,682,713,200.00	695,413,450.00	41.33
Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian	550,658,600.00	308,289,330.00	55.99
Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam	529,000,000.00	224,321,000.00	42.4
Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi BUMD Dan BLUD	603,054,600.00	162,803,120.00	27
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4,232,888,671.00	2,099,422,735.00	49.6
Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4,232,888,671.00	2,099,422,735.00	49.6
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	10,489,100.00	64.35
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	10,489,100.00	64.35

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan sebesar 68 %, lebih rendah dari target yang ditetapkan (69% persen), sehingga capaiannya 98,55%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Presentase Realisasi Pilar Pembangunan Lingkungan tahun 2025 sebesar 68%, mengalami peningkatan 19 persen point dari tahun 2024 (49 %). Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan Tahun 2025 sebesar 138,78% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD

Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan Tahun 2025 sebesar 68% lebih rendah dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 (72,00%) atau mencapai 94,44%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Tidak ada target nasional untuk Pilar Pembangunan Lingkungan di tahun 2025, sehingga indikator ini tidak bisa dibandingkan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Dari 17 Tujuan SDGs, terdapat 6 tujuan yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Lingkungan yaitu (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan, (12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Lautan, dan (15) Ekosistem Daratan. Adapun capaian persentase Pilar Pembangunan Lingkungan dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Nilai IKLH Provinsi NTB yang dicapai tahun 2025 sebesar 77,4 poin, lebih tinggi dibandingkan 2024 sebesar 73,18 poin. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai IKA dibandingkan tahun sebelumnya. IKA Provinsi NTB tahun 2024 sebesar 47 poin lebh rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 47,78 poin. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perubahan (penurunan atau peningkatan) beban pencemaran yang masuk ke sungai; 2. Perubahan daya tampung beban pencemaran sungai karena peningkatan atau penurunan debit air sungai.

Perkembangan/tren nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) selama 3 tahun terakhir nilainya cenderung melampaui target dari tahun ke tahun. Untuk pengukuran parameter nilai IKU yang diukur tidak berubah, yaitu SO2 (belerang dioksida) dan NO2 (nitrogen dioksida). Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan dengan adanya upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian pencemaran udara secara administratif (penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS, tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan monev unit usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui rehabilitasi vegetatif yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan polusi udara.

Perkembangan nilai Indeks kualitas air laut (IKAL) mengalami fluktuasi. Tahun 2024 sebesar 85,83 poin, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 82,88 poin. Adapun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami penurunan dari 66,60 poin di tahun 2023 menjadi 66,49 poin di tahun 2024.

b. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Rumah menjadi jendela untuk melihat kualitas hidup masyarakat. BPS menerbitkan Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun

2023, yang menunjukkan 36,85% Rumah Tangga di Indonesia tinggal dalam rumah yang tidak layak huni. 36-37 rumah dari setiap 100 rumah tangga hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak huni. Rumah sehat berkontribusi untuk mencapai Tujuan 11 SDGs 2030 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Hunian Layak memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space) (2) memiliki akses terhadap air minum layak (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak (4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Provinsi NTB mencapai 66,31% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 67,74% pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan dengan penyediaan perumahan, yaitu penyediaan rumah susun di kawasan perkotaan dan kawasan kumuh dan pemberian bantuan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada kebijakan rencana tata ruang wilayah Provinsi NTB , pembangunan dan pengembangan perumahan akan diarahkan untuk menunjang pengembangan potensi dan pusat kegiatan yang ada di wilayah kota/kabupaten. Pembangunan dan pengembangan perumahan diarahkan untuk mendukung atau menunjang potensi wisata yang ada, menunjang keberadaan kawasan strategis Provinsi, menunjang fungsi perkotaan dan perdesaan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang tersebar pada kawasan permukiman kumuh di kota/kabupaten.

Upaya pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni tidak hanya melalui penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, namun melalui pembangunan rumah baru dalam mengatasi backlog. Pemerintah daerah juga memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, khususnya yang tergolong MBR bisa menghuni RLH, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya

Pelaksanaan program perbaikan RTLH masih menghadapi berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun sosial. Sementara itu, upaya yang mendukung yaitu adamya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Dukungan kebijakan melalui

perencanaan dan penganggaran daerah menjadi landasan penting bagi keberlanjutan program RTLH. Selain itu adanya Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat, turut menjadi faktor pendukung utama. Keterlibatan aktif masyarakat penerima bantuan melalui swadaya dan gotong royong mempercepat pelaksanaan perbaikan dan pembangunan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil kegiatan. Dari sisi pelaksanaan teknis, keberadaan tenaga fasilitator lapangan yang kompeten berperan penting dalam memastikan kesesuaian pekerjaan dengan standar teknis rumah layak huni serta mendampingi masyarakat selama proses pembangunan. Pemanfaatan pedoman teknis yang jelas, mekanisme pengawasan yang berjenjang, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan dan pelaporan turut meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program.

c. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Tujuan ke 12 adalah konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan berfokus pada mengurangi limbah pangan dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.

Persentase pengurangan sampah tahun 2024 realisasinya sebesar 20,95%, dan sampai dengan triwulan III 2025 realisasinya baru mencapai 9,41% dari target 22,08%. Adapun upaya penanganan sampah terus menerus dilakukan upaya peningkatan dimana pada 2024 realisasinya sebesar 53,2%, sementara realisasi samapai triwulan III 2025 sebesar 25,92% dari target 69,92%.

Dalam rangka mendukung upaya dalam pengurangan sampah, telah diupayakan implementasi 8 pilar pengelolaan sampah antara lain : Penguatan regulasi pengelolaan sampah, Penyediaan sarpras persampahan, Revitalisasi gotong royong, Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya, Edukasi dan Kampanye, Pelibatan Para Pihak, Penguatan bank sampah serta Industrialisasi pengelolaan persampahan.

Adapun untuk penanganan sampah difokuskan pada TPA Kebun Kongok. Di tahun 2025 ini, TPA Regional Kebon Kongok sedang dalam status darurat penanganan sampah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3-250 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Sampah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Beberapa penyebabnya antara lain kelebihan kapasitas pengurukan sampah di landfill-2 TPA Regional Kebon Kongok dengan volume sampah sebanyak 1.035 m3 atau setara dengan 345 ton/hari yang tidak

tertangani sejak tanggal 17 April 2025, selain itu telah terjadi penolakan masyarakat terhadap area yang akan dijadikan sebagai tempat penampungan sementara seluas 25 are (aset Pemerntah Kabupaten Lombok Barat) di kawasan TPA Regional Kebon Kongok sehingga menyebabkan gangguan pelayanan di TPA Kebon Kongok dan terjadi penumpukan sampah di Kota Mataram dan Lombok Barat. Beberapa upaya yang dilakukan setelah penetapan status tanggap darurat sampah ini, ialah dengan melakukan pengurangan ritase pengangkutan sampah ke TPA Regional, perbaikan tata kelola sampah di hulu (rumah tangga, kantor, sekolah, fasilitas umum) dan di tengah (TPS3R, TPST, pusat daur ulang, bank sampah, dan pengepul), optimalisasi ruang landfill di TPA Regional Kebon Kongok khusus untuk pengolahan sampah residu, dan optimalisasi pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional.

d. Penanganan Perubahan Iklim

Perubahan iklim saat ini sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas. Saat musim hujan tiba, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana selalu khawatir akan terjadinya bencana banjir lantaran curah hujan yang sering tinggi dan disertai dengan angin kencang. Sementara di musim panas, cuaca yang dirasakan oleh masyarakat sering mengganggu aktivitas. Berdasarkan data dari 117 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata periode 1991-2020 di Indonesia sebesar 26,7º C dan suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 27,5 ºC, sehingga anomali suhu udara rata-rata tahun 2024 sebesar 0,8 ºC.

Ekonomi Hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dengan menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam ujarnya. Sementara itu terkait pengembangan Hutan Tanaman Energi, program ini akan dilaksanakan di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di wilayah Balai KPH di NTB. Dengan jenis tanaman dengan tingkat pertumbuhan cepat seperti lamtoro, komoditi ini akan mensubtitusi Batubara sebagai bahan bakar. Berkolaborasi dengan PLN.

e. Ekosistem Lautan

Ekosistem lautan terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove yang menjadi satu kesatuan dalam sistem ekologi perairan laut. Mengingat fungsi dan perannya sangat strategis maka beberapa kawasan di perairan laut NTB telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang dikelola langsung oleh

pemerintah daerah provinsi NTB dengan luasan pada tahun 2024 jumlah luas kawasan konservasi perairan NTB mencapai 182.968,40 ha.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi NTB sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037 serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 sebagai salah satu instrument untuk mengatur pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut di NTB. Namun untuk memastikan aspek ketaatan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya lautan perlu didorong terbitnya peraturan gubernur terkait dengan tata cara pembinaan dan pengawasan yang merupakan salah satu amanat Perda 12 Tahun 2017 tersebut.

Adapun strategi yang diharapkan adalah mendorong partisipasi semua pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung untuk secara arif dan bijaksana dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lautan agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendorong terwujudnya percepatan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan pada tujuan 14 ekosistem lautan adalah memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, mendorong terbitnya Pergub tentang kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta memfasiltasi perluasan pelayanan asuransi nelayan dan juga mendorong peningkatan investasi usaha sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan.

f. Ekosistem Daratan

IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.Nilai IKTL tersebut memberikan gambaran tentang upaya pemerintah Provinsi NTB dalam hal pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam bentuk menekan laju deforestasi serta melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lahan Provinsi NTB mencapai 77,36 poin berdasarkan perhitungan pada 22 kelas tutupan lahan.

IKL adalah nilai yang mengukur mutu lahan dengan menggabungkan IKTL dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), menunjukkan kondisi ekologi dan penggunaan lahan, termasuk hutan, vegetasi, dan gambut, untuk pemantauan lingkungan hidup

Penataan batas blok memiliki kaitan erat dengan IKL sebagai alat manajemen untuk menjamin keberlanjutan fungsi lahan. Penataan batas yang jelas membantu menentukan peruntukan lahan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas tutupan lahan. Penataan batas yang dilakukan meliputi pengukuran, pembuatan rintis batas, dan pemancangan dan penomoran pal batas. Pada tahun 2025 Dinas LHK

NTB melaksanakan penataan batas blok pada Blok Inti dalam Kawasan Hutan Lindung KPHP Unit II Pelangan yang terletak Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, Dinas LHK NTB juga melakukan pendampingan penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) bagi KPH yang telah habis masa berlaku dokumennya dan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek) sebagai aksi tahunan yang menjabarkan operasional dari RPHJP untuk kegiatan teknis di KPH Lindung maupun KPH Produksi. Indeks Kualitas Lahan menjadi salah satu basis data utama dan indikator keberhasilan dalam dokumen perencanaan tersebut. Pengesahan RPHJPd dilakukan oleh Dinas LHK NTB sesuai kewenangannya terhadap dokumen RPHJPd dari masing-masing unit KPH (23 Unit) melalui aplikasi SI-RPHJP. Di tahun 2025, terdapat 8 RPHJPd yang sudah disahkan, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu 7 RPHJPd yang berstatus sah. Untuk penyusunan dokumen RPHJP, difokuskan pada 6 (enam) unit KPH yang telah habis masa berlaku dokumen RPHJPnya. Jika dihitung persentasenya maka capaian penyusunan RPHJP dan RPHJPd adalah sebesar 27,92% atau masih dibawah target Renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam mendukung penyusunan RPHJP, khususnya untuk melakukan inventarisasi hutan dan updating data potensi di KPH serta untuk kegiatan pendukung lainnya seperti pelaksanaan konsultasi publik draft RPHJP. Selain itu, masih minimnya Keterbatasan anggaran dalam mendukung penyusunan RPHJP, khususnya untuk melakukan inventarisasi hutan dan updating data potensi di KPH serta untuk kegiatan pendukung lainnya seperti pelaksanaan konsultasi publik draft RPHJP. Dari segi format penyusunan, petunjuk penyusunan RPHJP yang berlaku tidak memberikan arahan lebih detail mengenai isi pada bagian-bagian penting dari RPHJP khususnya BAB IV sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari masing-masing KPH.

Upaya lainnya dalam mempertahankan atau meningkatkan nilai IKL ialah monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfataan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan oleh perusahaan tidak merusak ekosistem, melainkan mendukung kelestarian hutan yang menjadi indikator utama kualitas lahan. Monitoring PBPH dilakukan pada aspek penutupan lahan dan keberlanjutan tegakan, dan memastikan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu tetap sejalan dengan prinsip Sustainable

Forest Management (SFM), yang pada akhirnya mempertahankan dan meningkatkan indeks kualitas lahan.

Pada tahun 2025 terdapat permohonan PBPH namun lokasi yang dimohon telah memiliki Izin pemanfaatan sebelumnya. Untuk permohonan dari PT Matarama Devindo Corp (PT MDC) yang ingin melakukan pembangunan sarana wisata alam di Sekaroh, tepatnya bermohon di areal sebelah IUPJLWA PT Lombok Saka yang menghadap ke Laut Selatan Lombok. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut dengan SK Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) Tahun 2025, lokasi yang dimohon tidak dapat diberikan rekomendasi dikarenakan tidak masuk peta arahan pemanfaatan. SK PAPH 2025 yang diterbitkan oleh Dirjen PHL, Kemenhut terjadi perubahan arah kebijakan, dimana sebelumnya blok pemanfaatan pada HL yang diluar PAPH dapat diberikan rekomendasi, untuk SK PAPH 2025 hanya mengakomodir areal peruntukan korporasi sebagaimana Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). Telaah dan hasil survei lapangan mengenai kondisi wilayah yang dimohonkan sudah disampaikan ke Kementerian untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

Hasil monitoring PBPHH dilaksanakan pada 7 usaha/kegiatan, yang meliputi pengolahandan pemanfaatan hasil hutan kayu yang mendukung peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan hutan. Sedangkan untuk monitoring PBPHH Bukan Kayu dilaksanakan pada 4 usaha/kegiatan, yang mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan yang mendukung ekonomi lokal dan keberlanjutan sumber daya hutan.

Di tahun 2025 telah diselenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah Provinsi. Inventarisasi hutan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi sistematis tentang keadaan, potensi, dan lingkungan sumber daya hutan. Kegiatan ini penting dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan indeks kualitas lahan, karena menyediakan dasar data ilmiah untuk perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan hutan secara berkelanjutan. Dinas LHK NTB telah mengadakan bimbingan teknis untuk pelaksanaan inventarisasi hutan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap persiapan dan pembentukan tim inventarisasi hutan.

Inventarisasi dilakukan pada 55 klaster sampling yang tersebar diseluruh wilayah KPH/ Tahura se-NTB dengan jarak antara titik klaster sejauh 10 Km dalam kawasan hutan sesuai dengan standar inventarisasi hutan nasional. Pada masing-masing klaster terdapat tiga plot ukur dengan masing-masing sub plot untuk pengambilan data vegetasi baik kayu maupun non-kayu serta tumbuhan bawah dan serasah. Pada klaster di masing-masing KPH telah dilakukan pengukuran inventarisasi pohon, non-kayu, kayu mati dan pengambilan serasah serta tumbuhan bawah di

3 plot yaitu plot pusat, plot utara dan plot timur. Pada tiap plot sudah dipasang patok dan papan nama plot sebagai penanda. Berdasarkan pengecekan terhadap dokumentasi kegiatan serta data yang dikumpulkan melalui aplikasi collect oleh tim inventarisasi, dinilai bahwa pelaksanaan inventarisasi oleh KPH telah sesuai dengan pedoman inventarisasi hutan nasional. Jumlah sampel yang dikumpulkan yaitu 2 unit sampel berupa 1 unit sampel untuk serasah dan 1 unit sampel untuk tumbuhan bawah. Sampel tersebut telah dilakukan penimbangan berat basah oleh tim inventarisasi. Kemudian akan dibawa ke laboratorium untuk di keringkan dan diukur berat keringnya. Data tersebut akan digunakan untuk pendugaan nilai cadangan karbon.

Dinas LHK NTB juga telah melakukan penilaian KPH efektif sebagai alat kontrol dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan hutan di tingkat tapak berjalan lestari, yang secara langsung berdampak pada mempertahankan atau meningkatkan indeks kualitas lahan. Penilaian kinerja KPH yang baik mencakup indikator perlindungan hutan, seperti penanganan perambahan dan kebakaran hutan. KPH yang efektif (skor tinggi) mampu meminimalkan alih fungsi lahan ilegal dan perambahan, yang secara langsung mencegah penurunan kualitas lahan dan menjaga stabilitas ekosistem. Penilaian menekankan pada implementasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengurangan konflik lahan. Penilaian dilaksanakan pada KPH Unit II Pelangan yang memiliki dokumen RPHJP yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.. Pendampingan validasi penilaian untuk KPH Efektif tahun 2025 dilakukan bersama dengan tim dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Mataram. KPHP Unit II Pelangan telah melakukan self assesment /penilaian mandiri pengeloalan hutan produksi dan hutan lindung pada KPH serta survey persepsi publik kepada pihak terkait. Kepala Dinas LHK NTB melalui Tim Verifikasi yang diketuai oleh Kepala BPHL Wilayah IX melakukan verifikasi atas penilaian mandiri yang telah diajukan oleh Kepala KPH dan risalah hasil verifikasi akan dilaporkan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Dinas LHK NTB. Dari hasil verifikasi diperoleh nilai sebesar 75,925 (Efektif).

Mempertahankan indeks kualitas lahan juga dapat dilakukan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bertujuan untuk

mencegah degradasi tanah, mengurangi erosi, dan mengoptimalkan fungsi hidrologis. Di tahun 2025, telah dilakukan penyusunan draft dokumen rencana pengelolaan DAS Beh. Pemilihan lokasi DAS Beh adalah berdasarkan status DAS Beh yang termasuk dalam DAS yang dipulihkan sesuai dengan hasil evaluasi kondisi DAS. Penyusunan dan implementasi rencana yang baik dapat berdampak langsung pada penurunan laju erosi, penurunan lahan kritis, dan peningkatan tutupan vegetasi.

Selain penyusunan rencana pengelolaan DAS, Dinas LHK NTB juga menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Mata Air dalam Kawasan Hutan. Perlindungan sumber mata air meningkatkan kualitas lahan melalui beberapa cara, antara lain peningkatan infiltrasi, pencegahan erosi dan sedimentasi, perbaikan struktur tanah, serta menjaga keseimbangan hidrologi.

Keberhasilan program pengelolaan DAS juga diukur melalui persentase tutupan lahan pada sempadan sungai. Kondisi tutupan lahan pada sempadan sungai dengan jarak kiri dan kanan masing-masing 100 meter diukur melalui overlay peta sungai dan tutupan lahan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indicator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp28.694.027.074,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.794.041.509,00. Efisiensi anggaran sebesar 75,97%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh program dan kegiatan efektif dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

a. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran50,07%) dengan kegiatan:
   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
   2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)
   3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

b. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan (realisasi anggaran 14,09%) dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

c. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 13,44%) dengan kegiatan
   1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi
   2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
   3. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
   4. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
   5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
   6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
d. Program Pengelolaan Persampahan (realisasi anggaran 16,15%) dengan kegiatan Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional

b. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.82

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	3,442,255,431.00	50.07
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	633,783,723.00	51.33
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	2,649,413,414.00	54.66
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	159,058,294.00	20.07
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1,347,568,000.00	189,859,800.00	14.09
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1,347,568,000.00	189,859,800.00	14.09
Program Pengelolaan	5,312,297,274.00	714,235,329.00	13.44

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Hutan			
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	22,755,100.00	22.76
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	77,936,700.00	4.69
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	7,895,800.00	15.08
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	127,016,060.00	9.61
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	449,607,600.00	21.64
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	29,024,069.00	29.02
Program Pengelolaan Persampahan	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15

Sumber: BKAD NTB 2025

D. Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola tahun 2025 sebesar 62% lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2025 (65,00%) atau mencapai (95,38%).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Presentase Realisasi Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola tahun 2025 sebesar 62%, mengalami peningkatan 5% dibandingkan tahun 2024 yang realisasinya sebesar 57%. Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tahun 2025 mencapai 108,77% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

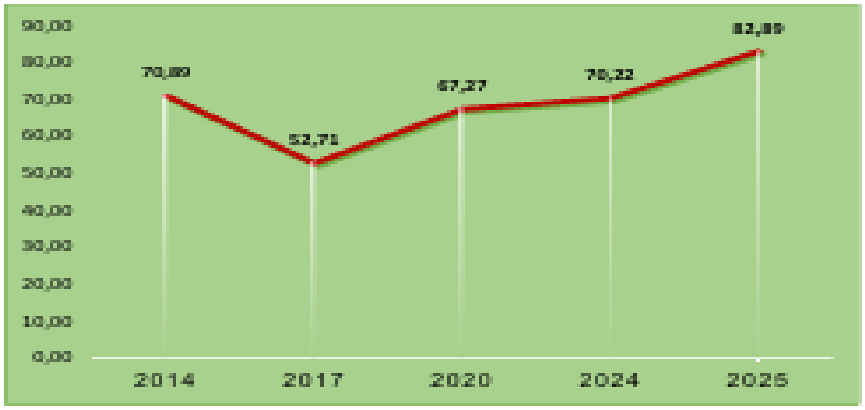
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tahun 2025 sebesar 62% lebih rendah dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 75,00% atau mencapai 95,38%.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional**
   Tidak ada target nasional untuk Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di tahun 2025, sehingga indikator ini tidak bisa dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Dari 17 Tujuan SDGs, terdapat 1 tujuan yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu (17) Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Adapun capaian persentase Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dapat disampaikan sebagai berikut:
   a. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
      Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang heterogen yaitu dengan adanya berbagai agama, suku dan budaya yang merupakan wujud plurarisme yang secara kultur mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi perbedaan itu merupakan wujud kekayaan yang perlu dipertahankan dalam kerangka persatuan dan kesatuan, bahwa sektor ekonomi menjadikan suatu masalah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan tingginya kemiskinan yang berdampak kepada tingkat kriminalitas dan instabilitas sosial, ekonomi maupun masyarakat. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran hukum.
      Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 memberikan gambaran mengenai tren keamanan serta perubahannya dalam beberapa tahun terakhir. Data yang disajikan berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan di sektor keamanan dan hukum, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam publikasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kejadian kejahatan (data registrasi Kepolisian), korban kejahatan (data Survei Sosial Ekonomi Nasional), dan aspek kewilayahan (Pendataan Potensi Desa). Berdasarkan data registrasi Kepolisian, terjadi penurunan jumlah kejahatan (crime total) menjadi 561.993 kejadian, penurunan *crime rate* menjadi 204 per 100.000 penduduk, serta crime clock yang semakin panjang menjadi 56 detik pada tahun 2024. Meskipun demikian, hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan pola yang berbeda, di mana terjadi peningkatan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di tahun 2024 menjadi sebanyak 0,73%. Di sisi lain, tingkat pelaporan kepada polisi pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 20,28%. Sementara itu, data Potensi

Desa menyoroti bahwa pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 29,92 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia. Indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman berjalan sendirian pada malam hari di lingkungan tempat tinggalnya. Dari target 72,00% tercapai sebesar 82,89% dengan persepsi “TIDAK KHAWATIR”, dari capaian tersebut naik 10,89% dari target yang ditetapkan (Melampaui Target).

Adapun persepsi rasa aman masyarakat saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan tempat tinggalnya (kampung, komplek perumahan, dll) pada waktu malam hari (hari telah gelap) mulai pukul 18.00 – 05.59) dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.17

Realisasi Indikator Kinerja Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya



Sumber : Satpol PP NTB 2025

Adapun kendala yang dihadapi terkait proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya antara lain Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada Provinsi NTB yang mengandung sanksi, Masih kurangnya koordinasi dengan OPD Provinsi NTB pengampu Perda dan Perkada yang mengandung sanksi; Masih lemahnya pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi di masyarakat dan lingkungan sekolah; Kurang efektifnya penegakan atas pelanggaran Perda dan Perkada (tidak ada data tindakan pro-yustisia sampai pengadilan), Belum seluruhnya kecamatan, desa/keluarahan membentuk Satgas Linmas. Sementara factor keberhasilan dalam mendukung indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya yaitu : Partisipasi aktif yang intensif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota maupun organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait dalam rangka

menjaga Trantibumlinmas; Pelaksanaan kegiatan deteksi dini, cegah dini, pengawasan, pengamanan dan patroli Trantibumlinmas; Adanya keterlibatan pihak aparat Desa/Kelurahan yang memberdayakan anggota Satlinmas dan Badan Keamanan Desa dalam rangka menjaga Trantibumlinmas; Partisipasi dan peran serta masyarakat di tingkat RT/RW dalam menjaga Kantibmas/Trantibumlinmas di lingkungan tempat tinggalnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait setiap triwulan; melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Perda dan Perkada yang mengandung sanksi secara berkala; melaksanakan pengawasan secara intensif pelaksanaan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi di masyarakat dan lingkungan sekolah; Sosialisasi Perda dan Perkada Provinsi NTB kepada masyarakat, sekolah-sekolah, dan memanfaatkan media sosial; peningkatan kapasitas anggota Linmas di 6 Kab/Kota se-NTB dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebanyak 240 orang anggota Satlinmas.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indicator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.400.702.222.482,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp928.892.594.660,00. Efisiensi anggaran sebesar 66,32%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

Tabel 3.83
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi (%)
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	523.870.271.822,00	256.883.849.384,60	70	69	3.722.554.338,91	7.483.861.026,03	0,50	0,50	50,25

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target adalah:

a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (realisasi anggaran 94,80%) dengan kegiatan :
   1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
   2. Fasilitasi Bantuan Hukum
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (realisasi anggaran 93,64%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (realisasi anggaran 92,68%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (realisasi anggan 92,91%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (realisasi anggaran 98,48%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (realisasi anggaran 100%), dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial
g. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (realisasi anggaran 88,81%) dengan kegiatan:
    1. Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur
    3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
h. Program Kepegawaian Daerah (realisasi anggaran 38,23%) dengan kegiatan:
    1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    2. Mutasi dan Promosi ASN
    3. Pengembangan Kompetensi Asn
    4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
i. Program Penataan Organisasi (realisasi anggaran 25,65%) dengan kegiatan:
    1. Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
    2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
j. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (realisasi anggaran 15,72%) dengan kegiatan: Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
k. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (realisasi anggaran 44,01%) dengan kegiatan:
    1. Pengembangan Kompetensi Teknis
    2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional
l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (realisasi anggaran 66,03%) dengan kegiatan:
    1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    10. Peningkatan Pelayanan BLUD
m. Program Penyelenggaraan Pengawasan (realisasi anggaran 40,71%) dengan kegiatan:
    1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.84

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	5,615,282,500.00	5,323,522,571.00	94.8
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2,948,763,300.00	2,761,758,610.00	93.66
Fasilitasi Bantuan Hukum	2,666,519,200.00	2,561,763,961.00	96.07
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	801,384,091.00	93.64
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	801,384,091.00	93.64
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	23,800,228,167.00	22,057,906,533.00	92.68

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	23,800,228,167.00	22,057,906,533.00	92.68
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,516,292,000.00	1,408,772,540.00	92.91
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,516,292,000.00	1408772540	92.91
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	618,603,600.00	609215160	98.48
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	618,603,600.00	609,215,160.00	98.48

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,924,520,000.00	3,924,396,388.00	100
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	3,924,520,000.00	3,924,396,388.00	100
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5,716,781,100.00	5,076,834,160.00	88.81
Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3,344,595,800.00	3,282,365,997.00	98.14
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	2,340,185,300.00	1,763,269,984.00	75.35
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	32,000,000.00	31,198,179.00	97.49
Program Kepegawaian Daerah	3,663,092,900.00	1,400,359,573.00	38.23
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	768,622,700.00	404,194,710.00	52.59
Mutasi dan Promosi ASN	1,480,990,000.00	498,328,742.00	33.65
Pengembangan Kompetensi Asn	589,125,400.00	369,416,459.00	62.71
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	824,354,800.00	128,419,662.00	15.58

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penataan Organisasi	1,656,196,700.00	424,792,784.00	25.65
Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	590,170,600.00	264,120,144.00	44.75
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1,066,026,100.00	160,672,640.00	15.07
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,334,791,726.00	4,712,345,314.00	41.57
Pengembangan Kompetensi Teknis	2,218,320,890.00	976,254,436.00	44.01
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	9,116,470,836.00	3,736,090,878.00	40.98
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,341,136,231,073.00	885,540,523,686.00	66.03
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257,093,000.00	73,533,000.00	28.6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,325,284,444,143.00	875,799,042,824.00	66.08
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	889,131,000.00	284,155,268.00	31.96
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,725,000.00	0	0

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161,007,700.00	72,022,160.00	44.73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	574,450,700.00	254,328,807.00	44.27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194,789,000.00	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,941,119,040.00	2,680,741,717.00	68.02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,800,000.00	328,319,184.00	53.32
Peningkatan Pelayanan BLUD	9,216,671,490.00	6,048,380,726.00	65.62
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,805,365,500.00	1,141,958,040.00	40.71
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,149,209,500.00	778,403,704.00	36.22
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	656,156,000.00	363,554,336.00	55.41

Sumber: BKAD NTB, 2025

3.1.1.11 Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan Percepatan Industrialisasi diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). IKLI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kualitas layanan infrastruktur yang ada. Pengukuran ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan lebih lanjut. Dalam konteks NTB, sektor-sektor infrastruktur yang dinilai mencakup berbagai aspek yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti: (1) Irigasi, yang mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. (2) Jalan dan Jembatan, yang mendukung mobilitas orang dan barang antar wilayah. (3) Air minum (SPAM), yang memastikan akses masyarakat terhadap air bersih. (4) Persampahan, yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat. (5) Drainase, yang mencegah banjir dan kerusakan lingkungan. (6) Kawasan Permukiman Kumuh, yang membutuhkan perhatian untuk meningkatkan kualitas hidup. (7) Terminal dan Pelabuhan, yang mendukung transportasi dan perdagangan.

Berikut disampaikan variabel/unsur-unsur kepuasan masyarakat akan layanan infrastruktur sebagai berikut:

Tabel 3.85
Variabel Unsur Kepuasan Layanan Infrastruktur

Variabel	Jenis Infrastruktur		Unsur Kepuasan Layanan	Jumlah
1. Kenyataan yang dihadapi Masyarakat 2. Harapan Masyarakat	Irigasi	1	Ketersediaan Fisik Jaringan Irigasi	10 Unsur/Kriteria
		2	Kualitas Fisik Jaringan Irigasi	
		3	Kontinuitas air irigasi (jumlah, dan waktu)	
		4	Tingkat Pemanfaatan Infrastruktur	
		5	Kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian	
	Jalan dan Jembatan	1	Ketersediaan Fisik Jalan dan Jembatan	10 Unsur/Kriteria
		2	Kualitas Fisik Jalan dan Jembatan	
		3	Peran terhadap konektivitas antar wilayah	
		4	Tingkat Pemanfaatan Infrastruktur	
		5	Kontribusi terhadap pergerakan orang dan barang	
	Air Minum	1	Ketersediaan Fisik Jaringan	10

Variabel	Jenis Infrastruktur		Unsur Kepuasan Layanan	Jumlah
			Air Minum (SPAM)	Unsur/Kriteria
		2	Kualitas Fisik Jaringan Air Minum (SPAM)	
		3	Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat Kesehatan	
		4	Tingkat Pemanfaatan Infrastruktur	
		5	kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat	
	Persampahan	1	Ketersediaan Fisik Infrastruktur Pengurangan sampah dan Pengangkutan Sampah	10 Unsur/Kriteria
		2	Kualitas Fisik Persampahan	
		3	Operasionalisasi pengurangan dan pegangkutan sampah	
		4	tingkat pemanfaatan infrastruktur persampahan	
		5	kontribusi terhadap penciptaan lingkungan bersih dan sehat	
	Drainase	1	Ketersediaan Fisik Drainase	10 Unsur/Kriteria
		2	Kualitas Fisik Infrastruktur Drainase	
		3	kemampuan mengurangi genangan dan banjir	
		4	tingkat pemanfaatan infrastruktur	
		5	kontribusi terhadap penciptaan lingkungan bersih dan sehat	
	Permukiman Kumuh	1	Kualitas bangunan perumahan dan Permukiman	14 Unsur/Kriteria
		2	Ketersediaan dan kualitas jalan lingkungan kualitas perumahan dan permukiman	
		3	Ketersediaan dan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	
		4	Ketersediaan dan kualitas drainase perumahan dan permukiman	
		5	Ketersediaan dan kualitas sarana persampahan perumahan dan permukiman	
		6	Ketersediaan dan kualitas air minum perumahan dan permukiman	
		7	Ketersediaan dan kualitas proteksi kebakaran perumahan dan permukiman	

Variabel	Jenis Infrastruktur		Unsur Kepuasan Layanan	Jumlah
	Terminal	1	Ketersediaan Fisik infrastruktur terminal	16 Unsur/Kriteria
		2	Kualitas Fisik infrastruktur terminal	
		3	fasilitas pelayanan keselamatan	
		4	fasilitas pelayanan Keamanan	
		5	fasilitas pelayanan Kehandalan/Keteraturan	
		6	fasilitas pelayanan Kenyamanan	
		7	fasilitas pelayanan Kesetaraan	
		8	Kontribusi terhadap mobilitas orang dan barang	
	Pelabuhan	1	Ketersediaan Fisik infrastruktur terminal	16 Unsur/Kriteria
		2	Kualitas Fisik infrastruktur terminal	
		3	fasilitas pelayanan keselamatan	
		4	fasilitas pelayanan Keamanan	
		5	fasilitas pelayanan Kehandalan/Keteraturan	
		6	fasilitas pelayanan Kenyamanan	
		7	fasilitas pelayanan Kesetaraan	
		8	Kontribusi terhadap mobilitas orang dan barang	

Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2025 (Diolah)

Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.86

Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Transmigrasi dan Perdesaan, Mendorong Investasi dan Percepatan Industrialisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100)	10 (10=6/5*100)	11 (11=6/7*100)	12 (12=6/8*100)
IKLI	Point	75,83	80	80	75,83*	85	NA	100,00	94,79	89,21	NA

Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2024-2025, diolah
*Keterangan: * tahun 2024, karena realisasi sampai dengan TW III 2025 tidak ada (rilis capaian 2025 dari Kementerian PUPR pada awal tahun 2026)*

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target (Pemutakhiran) dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**
   Realisasi kinerja IKLI Provinsi tahun 2025 sampai dengan Triwulan III (75,83), bila dibandingkan dengan target tahun 2025, maka ada deviasi -4,17 atau capaian sebesar 94,79%.
2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Realisasi kinerja IKLI Provinsi tahun 2025 sampai dengan Triwulan III (75,83), bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (75,83), maka capaian sebesar 100%.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Bila dibandingkan dengan target akhir IKLI dalam RPD 2024-2026, terdapat deviasi -9,17 poin. Capaian realisasi sebesar 89,21% (belum mencapai target).
4. **Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Realisasi IKLI 2025 sampai dengan Triwulan III yang dibandingkan dengan target 2025, target RPD 2024-2026, menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.

IKLI di Provinsi NTB merupakan upaya untuk menilai kualitas penyediaan infrastruktur berdasarkan persepsi masyarakat. IKLI adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dankualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan infrastruktur yaitu dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Layanan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi mencakup berbagai bidang yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat provinsi. IKLI berfokus pada Infrastruktur Provinsi dengan tujuan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah provinsi dalam bidang infrastruktur. Sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB melalui perangkat daerah terkait melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatkan akses (pendidikan, kesehatan, ekonomi), menjangkau daerah-daerah terpencil, dan lain sebagainya. Rincian pembangunan infrastruktur dimaksud, sebagai berikut:

a. **Irigasi**

Sistem jaringan irigasi di Wilayah Provinsi NTB berupa jaringan/saluran irigasi primer dan sekunder yang diarahkan pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional dan kewenangan provinsi. Daerah Irigasi di wilayah Provinsi NTB dapat berupa DI utuh dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau DI lintas kabupaten/kota lihat table dibawah.

Tabel 3.87
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Wilayah Provinsi NTB

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kategori	Kabupaten/Kota	Luas pada Peta (± Ha)
A.	**WS. Lombok**			**29.721,59**
1	DI Sesaot	DI Lintas	Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat	2.302,52
2	DI Gebong	DI Utuh	Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah	2.236,40
3	DI Bagik Kembar	DI Utuh	Kabupaten Lombok Utara	1.353,01
4	DI Santong	DI Utuh	Kabupaten Lombok Utara	2.262,25
5	DI Bisok Bokah	DI Utuh	Kabupaten Lombok Tengah	1.198,11
6	DI Gde Bongoh	DI Utuh	Kabupaten Lombok Tengah	3.575,99
7	DI Parung	DI Utuh	Kabupaten Lombok Tengah	1.529,42
8	DI Renggung	DI Utuh	Kabupaten Lombok Tengah	1.575,70
9	DI Pelapak	DI Lintas	Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	2.376,25
10	DI Rutus	DI Lintas	Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	2.215,58
11	DI Belanting	DI Utuh	Kabupaten Lombok Timur	1.449,99

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kategori	Kabupaten/Kota	Luas pada Peta (± Ha)
12	DI Kali Desa Kompleks	DI Utuh	Kabupaten Lombok Timur	1.144,02
13	DI Marongge Kompleks	DI Utuh	Kabupaten Lombok Timur	1.508,74
14	DI Sakra	DI Utuh	Kabupaten Lombok Timur	1.959,13
15	DI Sambelia	DI Utuh	Kabupaten Lombok Timur	1.977,34
16	DI Tojang Kompleks	DI Utuh	Kabupaten Lombok Timur	1.057,12
B.	**WS Sumbawa**			**34.344,99**
1	DI Elang Desa	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa Barat	989,61
2	DI Kalimantong I	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa Barat	1.990,31
3	DI Kalimantong II	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa Barat	3.323,65
4	DI Plampo'o	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa Barat	303,99
5	DI Beringin Sila	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	2.802,59
6	DI Buer Kompleks	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	1.451,30
7	DI Embung Gapit	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	2.278,40
8	DI Marente Kompleks	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	1.836,88
9	DI Maronge/Tiu Kulit	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	3.466,20
10	DI Pelara	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	3.231,45
11	DI Pungkit	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	1.393,85
12	DI Semangi	DI Utuh	Kabupaten Sumbawa	1.221,92
13	DI Daha I, II	DI Utuh	Kabupaten Dompu	1.558,11
14	DI Kadindi	DI Utuh	Kabupaten Dompu	1.396,08
15	DI Latonda Pekat	DI Utuh	Kabupaten Dompu	1.184,67
16	DI Nangakara	DI Utuh	Kabupaten Dompu	683,35
17	DI Mada Pangga II	DI Utuh	Kabupaten Bima	1.448,26
18	DI Ncangakai Ncoha	DI Utuh	Kabupaten Bima	1.199,34
19	DI Sumi Sape	DI Utuh	Kabupaten Bima	2.585,04
			Total	**64.066,58**

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2044

b. **Jalan dan Jembatan**

Sistem jaringan jalan di wilayah Provinsi NTB dikembangkan dengan memperhatikan keterhubungan antarwilayah, antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan di Wilayah Provinsi NTB adalah sistem jaringan jalan primer yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Tabel 3.88
Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) dan Jalan Strategis Provinsi (JSP)
di Wilayah Provinsi NTB

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas Jalan Menurut Peta (km)	Panjang Usulan (Km)
A.	**Pulau Lombok**			**184,29**	**-**
1.	052	11.K	Jln. DR. Wahidin (Bts. Kota)	0,70	-
2.	052		Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang	21,64	-
3.	050	11.K	Jln. Terminal Mandalika (Bertais - Sweta)	1,70	-
4.	004	15.K	Jln. TM. Rais (Mataram)	2,11	-
5.	004	16.K	Jln. T. Ali Batu (Mataram)	1,30	-
6.	080		Bengkel – Kediri	2,56	-
7.	081		Kediri – Rumak	3,00	-
8.	095		Kediri – Kuripan	5,30	-
9.	096		Kuripan - Giri Menang	2,80	-
10.	096	11.K	Jl. Soekarno Hatta (Gerung)	1,80	-
11.	008	11.K	Jln. A. Yani 1 (Gerung)	0,92	-
12.	007	11.K	Jln. Gatot Subroto 2 (Gerung)	0,90	-
13.	082		Kediri – Praya	14,46	-
14.	082	11.K	Jln. Gajah Mada di Kabupaten Lombok Tengah	2,95	-
15.	083		Praya – Kruak	21,50	-
16.	084		Kruak - Lb. Haji	15,05	-
17.	093		Selong - Lb. Haji	5,45	-
18.	092	12.K	Jln. Cokroaminoto	1,92	-
19.	092	11.K	Jln. TGH Zainudin Abd. Majid (Pancor - Selong)	3,45	-
20.	092		Masbagik – Pancor	6,30	-
21.	085		Tanjung Geres - Pohgading - Pringgabaya	15,23	-
22.	101	1	Lb. Lombok – Sambalia	29,73	-
23.	101	2	Sambalia - Ds. Biluk	23,52	-
B.	**Pulau Sumbawa**			**678,51**	**5,15**
24.	106		Simpang Tano - Simpang Seteluk	3,85	-
25.	107	1	Benete – Sejorong	30,44	-
26.	107	2	Sejorong - Tetar - Bts. KSB	42,10	-
27.	108		Tetar (Bts. KSB) – Lunyuk	32,40	-
28.	112	2	Lenangguar – Lunyuk	56,20	-
29.	112	1	Pal. IV – Lenangguar	35,37	-
30.	111		Simpang Negara - Moyo - Lua Air	25,86	-
31.	110		Sumbawa - Sebewe - Lua Air	20,70	-

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas Jalan Menurut Peta (km)	Panjang Usulan (Km)
32.	023	11.K	Jln. Diponegoro / Bts. Kota (Dompu)	4,99	-
33.	023	12.K	Jln. Imam Bonjol (Dompu)	0,67	-
34.	023	13.K	Jln. Teuku Umar (Dompu)	4,30	-
35.	023	14.K	Jln. Hasanudin (Dompu)	1,71	-
36.	023	15.K	Jln. Sudirman (Dompu)	0,33	-
37.	023	16.K	Jln. Soekarno Hatta (Dompu)	0,38	-
38.	116	1	Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda To'i	41,26	-
39.	116	2	Kawinda To'I – Piong	35,57	-
40.	116	3	Piong - Simpang Kore	14,75	-
41.	118	1	Simpang Kore – Kiwu	29,05	-
42.	118	2	Kiwu – Sampungu	16,22	-
43.	118	3	Sampungu – Bajo	41,60	-
44.	119		Sila – Bajo	10,00	-
45.	120		Hu'u – Parado	40,24	-
46.	122	2	Simpasai – Parado	17,60	-
47.	123	1	Simpasai – Wilamaci	4,70	-
48.	123	2	Wilamaci – Karumbu	24,50	-
49.	123	3	Karumbu – Sape	37,00	-
50.	121	2	Tawali – Sape	46,71	-
51.	121	1	Bima – Tawali	42,32	-
52.	121	11.K	Jl. Datuk Dibanta - Bts. Kota	11,90	-
53.	124	11.K	Jln. Hasanudin	1,09	-
54.	125	11.K	Jln. Gajah Mada di Kota Bima	4,70	-
55.			Jalan Lingkar Utara Alas *)	-	5,15
Total Panjang Ruas Jalan Kolektor Primer -2				**862,80**	**5,15**

*Keterangan: *) Usulan Jalan Baru menjadi Jalan Kewenangan Provinsi*
Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2044

Tabel 3.89
Jaringan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3) dan/atau Jalan Strategis Provinsi (JSP) di Wilayah Provinsi NTB

No.	**Nomor Ruas**		**Nama Ruas**	**Panjang Ruas Jalan Menurut Peta (km)**	**Panjang Usulan (km)**
A.	**Pulau Lombok**			**349,10**	**5,49**
1.	053	11.K	Jln. Yos Sudarso	0,85	-
2.	053	12.K	Jln. Langko	2,30	-
3.	054	11.K	Jln. Pejanggik	3,15	-
4.	055	11.K	Jln. Selaparang	2,25	-

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas Jalan Menurut Peta (km)	Panjang Usulan (km)
5.	073	11.K	Jln. Pendidikan	1,57	-
6.	074	11.K	Jln. Caturwarga	1,90	-
7.	075	11.K	Jln. Panca Usaha	1,35	-
8.	076	11.K	Jln. Tumpangsari	1,20	-
9.	072	11.K	Jln. R. Suprapto	0,75	-
10.	069	11.K	Jln. Majapahit	3,05	-
11.	070	11.K	Jln. Sriwijaya	3,13	-
12.	071	11.K	Jln. Brawijaya	1,93	-
13.	072	12.K	Jln. Panji Tilar Negara	1,91	-
14.	077	11.K	Jln. Sultan Salahudin	1,10	-
15.	077	12.K	Jln. Sultan Kaharudin	1,85	-
16.	078	11.K	Jln. TGH. Bangkol	1,72	-
17.	079	11.K	Jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa	1,70	-
18.	065	11.K	Jln. Prabu Rangka Sari	2,00	-
19.	064	11.K	Jln. AA. Gede Ngurah	0,85	-
20.	066	11.K	Jln. Sultan Hasanudin di Kota Mataram	0,65	-
21.	067	11.K	Jln. Imam Bonjol	1,00	-
22.	068	11.K	Jln. Diponegoro (Bts. Kota)	0,72	-
23.	063	11.K	Jln. Bung Karno	4,35	-
24.	062	11.K	Jln. Bung Hatta	2,90	-
25.	060	11.K	Jln. RA. Kartini di Kota Mataram	1,05	-
26.	061	11.K	Jln. Ade Irma Suryani	3,00	-
27.	051	11.K	Jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga	2,39	-
28.			Selaparang – Gunungsari (Alt. 1) *)	-	1,94
			Selaparang – Gunungsari (Alt. 2) *)	-	3,55
29.	056	11.K	Jln. Udayana/Junction - Selaparang	1,95	-
30.	057	11.K	Jln. Erlangga	1,58	-
31.	059	11.K	Jln. W R. Supratman	0,65	-
32.	059	12.K	Jln. A. Rahman Hakim	1,14	-
33.	058	11.K	Jln. Gajah Mada di Kota Mataram	3,55	-
34.	086	1	Mapak - Perampuan	0,80	-
35.	086	2	Perampuan - Kebun Ayu - Lembar	14,68	-
36.	087		Lembar - Sekotong - Pelangan	41,00	-
37.	088		Pelangan - Sp. Pengantap	36,38	-
38.	100		Penujak - Mt. Ajan	23,00	-

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas Jalan Menurut Peta (km)	Panjang Usulan (km)
39.	099		Sp. Penujak - Tanah Awu	4,46	-
40.	127		Batunyala - Sengkol	9,20	-
41.	098	11.K	Wakul – Ketejer	3,53	-
42.	098	12.K	Ketejer – Jontlak	2,93	-
43.	097	11.K	Jln. Basuki Rahmat	1,00	-
44.	097		Mantang – Praya	11,27	-
45.	089		Pengantap - Mt. Ajan - Kuta	36,44	-
46.	090		Kuta – Kruak	37,95	-
47.	091		Kruak – Pancor	22,77	-
48.	094		Pancor - Rempung	4,41	-
49.	104	11.K	Jln. RA. Kartini di Kabupaten Lombok Tengah	0,95	-
50.	105	11.K	Jln. Diponegoro	2,80	-
51.	105	12.K	Jln. Hasanudin-1 di Kabupaten Lombok Timur	0,43	-
52.	105	13.K	Jln. Abdullah	0,31	-
53.	102		Aikmal – Swela	8,40	-
54.	103		Pringgabaya - Sembalun Bumbung	26,90	-
B.	**Pulau Sumbawa**			**290,14**	**5,50**
55.			Benete - Sejorong Baru *)		5,50
56.	110	11.K	Jln. Sudirman	1,00	-
57.	109	11.K	Jl. Sltn. Kaharudin	1,75	-
58.	109		Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang	24,90	-
59.	113	1	Lunyuk - Ropang	45,00	-
60.	113	2	Ropang - Sekokat	59,40	-
61.	115		Plampang - Sekokat	13,60	-
62.	114		Sekokat – Bawi	91,00	-
63.	117		Simpang Kempo - Simpang Kore	18,19	-
64.	123	4	Wilamaci - Parado	16,30	-
65.	122	1	Talabiu - Simpasai	16,50	-
66.	126	11.K	Jln. Gatot Subroto	2,50	-
Total Panjang Ruas Jalan Kolektor Primer -3				**639,24**	**10,99**

*Keterangan: *) Usulan Jalan Baru menjadi Jalan Kewenangan Provinsi*
Sumber: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 620-350 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Fungsinya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 3.90
Jembatan pada Ruas Jalan Kewenangan Provinsi
di Wilayah Provinsi NTB

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
1.	Jembatan Sori Nowa	JKP-2	Jln. Diponegoro / Bts. Kota (Dompu)	Kabupaten Dompu
2.	Jembatan Bara I	JKP-2		Kabupaten Dompu
3.	Jembatan Bara II	JKP-2		Kabupaten Dompu
4.	Jembatan Sori Buna	JKP-2		Kabupaten Dompu
5.	Jembatan Ginte	JKP-2	Jln. Teuku Umar (Dompu)	Kabupaten Dompu
6.	Jembatan Kandai Dua	JKP-2		Kabupaten Dompu
7.	Jembatan Rasanggaro	JKP-2		Kabupaten Dompu
8.	Jembatan Rasa Nae	JKP-2		Kabupaten Dompu
9.	Jembatan Simpasai	JKP-2	Jln. Hasanudin (Dompu)	Kabupaten Dompu
10.	Jembatan Wadu Paa	JKP-2	Sampungu - Bajo	Kabupaten Bima
11.	Jembatan XX1	JKP-2	Sila - Bajo	Kabupaten Bima
12.	Jembatan Kambu	JKP-2	Simpang Kore - Kiwu	Kabupaten Bima
13.	Jembatan Sori Uma	JKP-2	Simpasai - Parado	Kabupaten Bima
14.	Jembatan Dae Lawaru	JKP-2		Kabupaten Bima
15.	Jembatan Nggeru / Dundu Hea	JKP-2		Kabupaten Bima
16.	Jembatan Pela	JKP-2		Kabupaten Bima
17.	Jembatan Benete III	JKP-2	Benete - Sejorong	Kabupaten Sumbawa Barat
18.	Jembatan Maluk II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
19.	Jembatan Sekongkang I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
20.	Jembatan Sekongkang II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
21.	Jembatan Sekongkang III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
22.	Jembatan Sekongkang IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
23.	Jembatan Sinyur I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
24.	Jembatan Sinyur II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
25.	Jembatan Sinyur III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
26.	Jembatan Sinyur IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
27.	Jembatan Sinyur IX	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
28.	Jembatan Sinyur V	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
29.	Jembatan Sinur VI / Batu Rea	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
30.	Jembatan Sinyur VII	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
31.	Jembatan Maluk III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
32.	Jembatan Maluk IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
33.	Jembatan Sejorong I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
34.	Jembatan Aik Betak II	JKP-2	Sejorong - Tetar - Bts. KSB	Kabupaten Sumbawa Barat
35.	Jembatan Aik Betak I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
36.	Jembatan Aik Goah I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
37.	Jembatan Aik Goah II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
38.	Jembatan Aik Kangkung	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
39.	Jembatan Aik Keru III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
40.	Jembatan Aik Keru I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
41.	Jembatan Aik Keru II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
42.	Jembatan Brunut	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
43.	Jembatan Labuhan A	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
44.	Jembatan Nangene I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
45.	Jembatan Puna Ii	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
46.	Jembatan Puna Iii	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
47.	Jembatan Tabisu I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
48.	Jembatan Tabisu II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
49.	Jembatan Tabisu III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
50.	Jembatan Tabisu IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
51.	Jembatan Tabisu V	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
52.	Jembatan Tabiung	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
53.	Jembatan Tanaman I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
				Barat
54.	Jembatan Tanaman II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
55.	Jembatan Tatar I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
56.	Jembatan Tatar Loka	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
57.	Jembatan Tongo Loka Sakura	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
58.	Jembatan Telonang I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
59.	Jembatan Sepang	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
60.	Jembatan Talonang II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
61.	Jembatan Talonang III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
62.	Jembatan Aik Mat	JKP-2	Tetar (Bts. KSB) - Lunyuk	Kabupaten Sumbawa
63.	Jembatan Bendungan	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
64.	Jembatan Brang Bai	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
65.	Jembatan Bontong I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
66.	Jembatan Telang / Liang Bagik	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
67.	Jembatan Emang	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
68.	Jembatan Kalbir	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
69.	Jembatan Lamar	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
70.	Jembatan Molong	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
71.	Jembatan Mumil I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
72.	Jembatan Petani I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
73.	Jembatan Petani III / Liang Buk	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
74.	Jembatan Sampar Goal	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
75.	Jembatan Kokar Singko	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
76.	Jembatan Tebil I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
77.	Jembatan Tebil (Jepang)	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
78.	Jembatan Raberas I	JKP-2	Sumbawa - Sebewe - Lua Air	Kabupaten Sumbawa
79.	Jembatan Raberas II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
80.	Jembatan Tahan	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
81.	Jembatan Brang Moyo I	JKP-2	Simpang Negara - Moyo - Lua Air	Kabupaten Sumbawa
82.	Jembatan Berare I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
83.	Jembatan Berare II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
84.	Jembatan Brang Boak A	JKP-2	Pal. IV - Lenangguar	Kabupaten Sumbawa
85.	Jembatan Brang Boak B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
86.	Jembatan Batu Pasak	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
87.	Jembatan Batan Juat	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
88.	Jembatan Brang Penemung	JKP-2		Kabupaten Sumbawa

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
89.	Jembatan Kemang Kuning I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
90.	Jembatan Kokar Ali	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
91.	Jembatan Bale Air	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
92.	Jembatan Kokar Balisu	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
93.	Jembatan Kokar Neisa	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
94.	Jembatan Lanak I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
95.	Jembatan Lanak II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
96.	Jembatan Kokar Lesang A	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
97.	Jembatan Kokar Lesang B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
98.	Jembatan Litok II A	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
99.	Jembatan Litok II B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
100.	Jembatan Uma Belo A	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
101.	Jembatan Uma Langke	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
102.	Jembatan Kokar Katompo A	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
103.	Jembatan Kokar Katompo B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
104.	Jembatan Pen Bonyo	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
105.	Jembatan Ledang II (Baleman)	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
106.	Jembatan Batu Nampar I	JKP-2	Lenangguar - Lunyuk	Kabupaten Sumbawa
107.	Jembatan Beat	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
108.	Jembatan Genting I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
109.	Jembatan Air Terjun Darurat	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
110.	Jembatan Batu Nampar II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
111.	Jembatan Beringin	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
112.	Jembatan Binong III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
113.	Jembatan Binong IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
114.	Jembatan Bomong	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
115.	Jembatan Brora	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
116.	Jembatan Cadas Pisak	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
117.	Jembatan Kenangas I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
118.	Jembatan Kenangas IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
119.	Jembatan Kokar Lobong	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
120.	Jembatan Kokar Pelas	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
121.	Jembatan Kokar Wena	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
122.	Jembatan Ledang V	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
123.	Jembatan Lian (Malake)	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
124.	Jembatan Lian II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
125.	Jembatan Lunyuk	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
126.	Jembatan Rontong II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
127.	Jembatan Sampang I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
128.	Jembatan Kesi	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
129.	Jembatan Komas II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
130.	Jembatan Komas III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
131.	Jembatan Ledang XI	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
132.	Jembatan Ledang XII	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
133.	Jembatan Ledang XIV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
134.	Jembatan Ledang XIX	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
135.	Jembatan Ledang XVI	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
136.	Jembatan Ledang XVII	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
137.	Jembatan Ledang XX	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
138.	Jembatan Melung II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
139.	Jembatan Plas I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
140.	Jembatan Tawar II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
141.	Jembatan Ledang XV / Rate	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
142.	Jembatan Dasan Lekong	JKP-2	Masbagik - Pancor	Kabupaten Lombok Timur
143.	Jembatan Eyat Mayung	JKP-2	Kediri - Praya	Kabupaten Lombok Tengah
144.	Jembatan Jelantik II	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
145.	Jembatan Meninting Aik	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
146.	Jembatan Paku Keling	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
147.	Jembatan Plowok	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
148.	Jembatan Puyung	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
149.	Jembatan Ganti	JKP-2	Praya - Kruak	Kabupaten Lombok Tengah
150.	Jembatan Gerantung	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
151.	Jembatan Kelebuh	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
152.	Jembatan Longkang	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
153.	Jembatan Mujur II	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
154.	Jembatan Pamondah	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
155.	Jembatan Penendem	JKP-2		Kabupaten Lombok Timur
156.	Jembatan Tundak	JKP-2		Kabupaten Lombok Timur
157.	Jembatan Babile	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
158.	Jembatan Jagaraga I	JKP-2	Kediri - Kuripan	Kabupaten Lombok Barat
159.	Jembatan Jagaraga III	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
160.	Jembatan Tegal	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
161.	Jembatan Kuripan	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
162.	Jembatan Sulin	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
163.	Jembatan Bentek	JKP-2	Rembiga (Bts. Kota)	Kabupaten Lombok Utara

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
164.	Jembatan Medas	JKP-2	- Pemenang	Kabupaten Lombok Barat
165.	Jembatan Menggala	JKP-2		Kabupaten Lombok Utara
166.	Jembatan Meninting	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
167.	Jembatan Koloh	JKP-2		Kabupaten Lombok Utara
168.	Jembatan Datar	JKP-2	Bengkel - Kediri	Kabupaten Lombok Barat
169.	Jembatan Kali Tengah II	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
170.	Jembatan Remening	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
171.	Jembatan Nyangget	JKP-2	Jl. Soekarno Hatta (Gerung)	Kabupaten Lombok Barat
172.	Jembatan Midang I	JKP-2	Jln. DR. Wahidin (Bts. Kota)	Kota Mataram
173.	Jembatan Lela	JKP-2	Jln. Datuk Dibanta - Bts. Kota	Kota Bima
174.	Jembatan Jatiwangi	JKP-2		Kota Bima
175.	Jembatan Ranggo I	JKP-2		Kota Bima
176.	Jembatan Desa II	JKP-2		Kota Bima
177.	Jembatan Dana Mbari	JKP-2	Jln. Gajah Mada di Kota Bima	Kota Bima
178.	Jembatan Na'E	JKP-2		Kota Bima
179.	Jembatan Salo	JKP-2		Kota Bima
180.	Jembatan Patula	JKP-2	Simpang Kore - Kiwu	Kabupaten Dompu
181.	Jembatan Hu'u Besar	JKP-2	Hu'u - Parado	Kabupaten Dompu
182.	Jembatan Lakey I	JKP-2		Kabupaten Dompu
183.	Jembatan Lakey II	JKP-2		Kabupaten Dompu
184.	Jembatan Matiti	JKP-2		Kabupaten Dompu
185.	Jembatan Nanga Doro I	JKP-2		Kabupaten Dompu
186.	Jembatan Nanga Doro II	JKP-2		Kabupaten Dompu
187.	Jembatan Nanga Doro III	JKP-2		Kabupaten Dompu
188.	Jembatan Ncanga	JKP-2		Kabupaten Dompu
189.	Jembatan Supa	JKP-2		Kabupaten Dompu
190.	Jembatan Tante'E	JKP-2		Kabupaten Dompu
191.	Jembatan Wadu Nae	JKP-2		Kabupaten Dompu
192.	Jembatan Sampungu I	JKP-2	Kiwu - Sampungu	Kabupaten Bima
193.	Jembatan Dorombolo	JKP-2	Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda	Kabupaten Bima
194.	Jembatan Dorombolo IV / Kawinda X	JKP-2		Kabupaten Bima
195.	Jembatan Lb. Kenanga	JKP-2		Kabupaten Bima

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
196.	Jembatan Dorombolo I / Kawinda	JKP-2	To'i	Kabupaten Bima
197.	Jembatan Kawinda Nae	JKP-2		Kabupaten Bima
198.	Jembatan Labu Bili	JKP-2		Kabupaten Bima
199.	Jembatan Oi Marai I	JKP-2		Kabupaten Bima
200.	Jembatan Oi Mori I / Sori Mango	JKP-2		Kabupaten Bima
201.	Jembatan Oi Mori II	JKP-2		Kabupaten Bima
202.	Jembatan Oi Mori III	JKP-2		Kabupaten Bima
203.	Jembatan Sori Bura	JKP-2		Kabupaten Bima
204.	Jembatan Sori Jati I	JKP-2		Kabupaten Bima
205.	Jembatan Sori Jati II	JKP-2		Kabupaten Bima
206.	Jembatan Sori Panihi	JKP-2		Kabupaten Bima
207.	Jembatan Diwu Jara	JKP-2	Sampungu - Bajo	Kabupaten Bima
208.	Jembatan Noti II	JKP-2		Kabupaten Bima
209.	Jembatan Sarita I	JKP-2		Kabupaten Bima
210.	Jembatan Sarita II	JKP-2		Kabupaten Bima
211.	Jembatan Sarita III	JKP-2		Kabupaten Bima
212.	Jembatan Sori Punti M Pelengkung beton bertulang / Sarita 4 / Sori Komba I	JKP-2		Kabupaten Bima
213.	Jembatan Sori Lupus	JKP-2		Kabupaten Bima
214.	Jembatan Mori	JKP-2		Kabupaten Bima
215.	Jembatan Sae / Sei I	JKP-2		Kabupaten Bima
216.	Jembatan Sori Enggose	JKP-2		Kabupaten Bima
217.	Jembatan Jati	JKP-2		Kabupaten Bima
218.	Jembatan Sori Riando / Sori Lambe	JKP-2		Kabupaten Bima
219.	Jembatan Sori Ponte	JKP-2		Kabupaten Bima
220.	Jembatan Sori Punti	JKP-2		Kabupaten Bima
221.	Jembatan Sori Sai Besar	JKP-2		Kabupaten Bima
222.	Jembatan Sori Wontu I	JKP-2		Kabupaten Bima
223.	Jembatan Sori Wontu II	JKP-2		Kabupaten Bima
224.	Jembatan Sori Wontu IV	JKP-2		Kabupaten Bima
225.	Jembatan Sori Wontu V	JKP-2		Kabupaten Bima
226.	Jembatan Bajo	JKP-2	Sila - Bajo	Kabupaten Bima
227.	Jembatan Kenanga II	JKP-2		Kabupaten Bima
228.	Jembatan Kenanga I	JKP-2		Kabupaten Bima
229.	Jembatan Lewi Dewa	JKP-2		Kabupaten Bima
230.	Jembatan Lewi Ntana	JKP-2		Kabupaten Bima
231.	Jembatan Nggembe	JKP-2		Kabupaten Bima
232.	Jembatan Oiwontu	JKP-2		Kabupaten Bima
233.	Jembatan Tompu	JKP-2		Kabupaten Bima
234.	Jembatan Cekungan Dalam	JKP-2	Hu'u - Parado	Kabupaten Dompu
235.	Jembatan Terolulu I	JKP-2		Kabupaten Dompu

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
236.	Jembatan Lere III	JKP-2		Kabupaten Bima
237.	Jembatan Lere I	JKP-2		Kabupaten Bima
238.	Jembatan Lere IV	JKP-2		Kabupaten Bima
239.	Jembatan Lere V	JKP-2		Kabupaten Bima
240.	Jembatan Terolulu II	JKP-2		Kabupaten Bima
241.	Jembatan Terolulu III	JKP-2		Kabupaten Bima
242.	Jembatan Lamea	JKP-2		Kabupaten Bima
243.	Jembatan Sadidi Rangge II	JKP-2		Kabupaten Bima
244.	Jembatan Sadidi Rangge I	JKP-2	Hu'u - Parado	Kabupaten Bima
245.	Jembatan Sama I	JKP-2		Kabupaten Bima
246.	Jembatan Sama II	JKP-2		Kabupaten Bima
247.	Jembatan Tanah Awu III	JKP-2		Kabupaten Bima
248.	Jembatan Tanah Awu II	JKP-2		Kabupaten Bima
249.	Jembatan Tanah Awu I	JKP-2		Kabupaten Bima
250.	Jembatan Tahinae III	JKP-2		Kabupaten Bima
251.	Jembatan Tahinae II	JKP-2		Kabupaten Bima
252.	Jembatan Tahinae I	JKP-2		Kabupaten Bima
253.	Jembatan Lalune	JKP-2		Kabupaten Bima
254.	Jembatan Amadareho	JKP-2		Kabupaten Bima
255.	Jembatan Ambalawi	JKP-2		Kabupaten Bima
256.	Jembatan Kamoso	JKP-2		Kabupaten Bima
257.	Jembatan Manggo Mawu	JKP-2		Kabupaten Bima
258.	Jembatan Nanga Ndawa	JKP-2		Kabupaten Bima
259.	Jembatan Nipa I	JKP-2		Kabupaten Bima
260.	Jembatan Nipa II	JKP-2		Kabupaten Bima
261.	Jembatan Sori Apu	JKP-2		Kabupaten Bima
262.	Jembatan Sori Banta I	JKP-2	Bima - Tawali	Kabupaten Bima
263.	Jembatan Sori Banta II	JKP-2		Kabupaten Bima
264.	Jembatan Sori Kaleli	JKP-2		Kabupaten Bima
265.	Jembatan Sori Keli	JKP-2		Kabupaten Bima
266.	Jembatan Sori Mawu	JKP-2		Kabupaten Bima
267.	Jembatan Sori Sancara	JKP-2		Kabupaten Bima
268.	Jembatan Sori Tawali	JKP-2		Kabupaten Bima
269.	Jembatan Tololai	JKP-2		Kabupaten Bima
270.	Jembatan Ntundu / Tundon	JKP-2		Kabupaten Bima
271.	Jembatan Sori Nanga Nae	JKP-2		Kabupaten Bima
272.	Jembatan Oi Bombu I	JKP-2		Kabupaten Bima
273.	Jembatan Oi Moro / Oi Bombu	JKP-2		Kabupaten Bima
274.	Jembatan Oi Pou / Sori Molu	JKP-2	Tawali - Sape	Kabupaten Bima
275.	Jembatan Raba Wontu	JKP-2		Kabupaten Bima
276.	Jembatan Sori Kanahi	JKP-2		Kabupaten Bima
277.	Jembatan Sori Kowo	JKP-2		Kabupaten Bima
278.	Jembatan Sori Mango	JKP-2		Kabupaten Bima
279.	Jembatan Sori Nae	JKP-2		Kabupaten Bima
280.	Jembatan Sori Ndolo	JKP-2		Kabupaten Bima
281.	Jembatan Sori Peto	JKP-2		Kabupaten Bima
282.	Jembatan Sori Tengge	JKP-2		Kabupaten Bima
283.	Jembatan Sori Wuwu	JKP-2		Kabupaten Bima
284.	Jembatan Tolo Mila	JKP-2		Kabupaten Bima
285.	Jembatan Simpasai I	JKP-2	Simpasai -	Kabupaten Bima

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
			Wilamaci	
286.	Jembatan Raba Busi I	JKP-2	Karumbu - Sape	Kabupaten Bima
287.	Jembatan Rimba	JKP-2	Wilamaci - Karumbu	Kabupaten Bima
288.	Jembatan Sori Ngonco	JKP-2		Kabupaten Bima
289.	Jembatan Doro O'O IV	JKP-2		Kabupaten Bima
290.	Jembatan Doro O'O II	JKP-2		Kabupaten Bima
291.	Jembatan Konca	JKP-2		Kabupaten Bima
292.	Jembatan Bugis	JKP-2	Karumbu - Sape	Kabupaten Bima
293.	Jembatan Soro II	JKP-2		Kabupaten Bima
294.	Jembatan Raba Busi II	JKP-2		Kabupaten Bima
295.	Jembatan Sori Mango	JKP-2		Kabupaten Bima
296.	Jembatan Rore I	JKP-2		Kabupaten Bima
297.	Jembatan Mangge VI	JKP-2		Kabupaten Bima
298.	Jembatan Sumi I	JKP-2		Kabupaten Bima
299.	Jembatan Sumi II	JKP-2		Kabupaten Bima
300.	Jembatan Blengkon / Singkuk	JKP-2	Tetar (Bts. KSB) - Lunyuk	Kabupaten Sumbawa
301.	Jembatan Melap / Menanga Kerikit	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
302.	Jembatan Telonang III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
303.	Jembatan Sepang	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
304.	Jembatan Boin Jati	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
305.	Jembatan Bontong II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
306.	Jembatan Kokar Kelikit	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
307.	Jembatan Bintung	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
308.	Jembatan Kokar Iwes Limung	JKP-2	Simpang Negara - Moyo - Lua Air	Kabupaten Sumbawa
309.	Jembatan Talonang I	JKP-2	Sejorong - Tetar - Bts. KSB	Kabupaten Sumbawa Barat
310.	Jembatan Tabisu VI	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
311.	Jembatan Labuhan B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
312.	Jembatan Tatar I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
313.	Jembatan Mone I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
314.	Jembatan Mone II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
315.	Jembatan Sejorong II	JKP-2	Benete - Sejorong	Kabupaten Sumbawa Barat
316.	Jembatan Sidemen	JKP-2	Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang	Kabupaten Lombok Barat
317.	Jembatan Litok III	JKP-2	Pal. IV - Lenangguar	Kabupaten Sumbawa
318.	Jembatan Pola I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
319.	Jembatan Litok II B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
320.	Jembatan Batan Juat	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
321.	Jembatan Kokar Aling	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
322.	Jembatan Uma Belo B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
323.	Jembatan Kokar Kasio III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
324.	Jembatan Ledang XV	JKP-2	Lenangguar - Lunyuk	Kabupaten Sumbawa
325.	Jembatan Soga I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
326.	Jembatan Komas IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
327.	Jembatan Plara I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
328.	Jembatan Samparau II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
329.	Jembatan Kenangas II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
330.	Jembatan Ledang II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa
331.	Jembatan Terate	JKP-2	Kediri - Kuripan	Kabupaten Lombok Barat
332.	Jembatan Rupe II	JKP-2	Karumbu - Sape	Kabupaten Bima
333.	Jembatan Sori Bote	JKP-2	Bima - Tawali	Kabupaten Bima
334.	Jembatan Sinyur X	JKP-2	Benete - Sejorong	Kabupaten Sumbawa Barat
335.	Jembatan Oi Katupa I	JKP-2	Kawinda To'i - Piong	Kabupaten Bima
336.	Jembatan Oi Katupa II	JKP-2		Kabupaten Bima
337.	Jembatan Oi Katupa III	JKP-2		Kabupaten Bima
338.	Jembatan Oi Katupa IV	JKP-2		Kabupaten Bima
339.	Jembatan Oi Katupa VI	JKP-2		Kabupaten Bima
340.	Jembatan Pong VI	JKP-2		Kabupaten Bima
341.	Jembatan Piong V	JKP-2		Kabupaten Bima
342.	Jembatan Piong IV	JKP-2		Kabupaten Bima
343.	Jembatan Piong III	JKP-2		Kabupaten Bima
344.	Jembatan Piong II	JKP-2		Kabupaten Bima
345.	Jembatan Piong VIII	JKP-2		Kabupaten Bima
346.	Jembatan Piong VII	JKP-2		Kabupaten Bima
347.	Jembatan Piong VII.1	JKP-2		Kabupaten Bima
348.	Jembatan Piong I	JKP-2		Kabupaten Bima
349.	Jembatan Oi Katupa V	JKP-2		Kabupaten Bima
350.	Jembatan Sampungu IA	JKP-2	Simpang Kore - Kiwu	Kabupaten Dompu
351.	Jembatan Kuangge IV	JKP-2	Kiwu - Sampungu	Kabupaten Bima
352.	Jembatan Sori Lumba	JKP-2		Kabupaten Bima
353.	Jembatan Sori Lampiul	JKP-2		Kabupaten Bima
354.	Jembatan Sori Kenanga	JKP-2		Kabupaten Bima
355.	Jembatan Sampungu II	JKP-2		Kabupaten Bima
356.	Jembatan Sampungu III / WXX	JKP-2		Kabupaten Bima
357.	Jembatan Kuangge I / WXX	JKP-2		Kabupaten Bima
358.	Jembatan Kuangge II	JKP-2		Kabupaten Bima
359.	Jembatan Kuangge III	JKP-2		Kabupaten Bima
360.	Jembatan Palangga	JKP-2		Kabupaten Bima
361.	Jembatan Pelangga II	JKP-2		Kabupaten Bima
362.	Jembatan Sori Tinggi	JKP-2		Kabupaten Bima
363.	Jembatan Sori Kari'I I	JKP-2		Kabupaten Bima

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
364.	Jembatan Sapunggu Kuwangge	JKP-2		Kabupaten Bima
365.	Jembatan WXX	JKP-2		Kabupaten Bima
366.	Jembatan WXX	JKP-2		Kabupaten Bima
367.	Jembatan Sori Saba	JKP-2		Kabupaten Bima
368.	Jembatan Dorombolo II / Kawinda V	JKP-2	Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda To'i	Kabupaten Bima
369.	Jembatan Dorombolo V / Kawinda	JKP-2		Kabupaten Bima
370.	Jembatan Dorombolo VI / Kawinda	JKP-2		Kabupaten Bima
371.	Jembatan Dorombolo VII / Kawinda	JKP-2		Kabupaten Bima
372.	Jembatan Kawinda VII	JKP-2		Kabupaten Bima
373.	Jembatan Kawinda II	JKP-2		Kabupaten Bima
374.	Jembatan Oi Marai III	JKP-2		Kabupaten Bima
375	Jembatan Kawinda I	JKP-2		Kabupaten Bima
376.	Jembatan Kawinda VIII	JKP-2		Kabupaten Bima
377.	Jembatan Sori Duwe / Kawinda VI	JKP-2		Kabupaten Bima
378.	Jembatan Kawinda V	JKP-2		Kabupaten Bima
379.	Jembatan Kawinda IV	JKP-2		Kabupaten Bima
380.	Jembatan Kawinda III	JKP-2		Kabupaten Bima
381.	Jembatan Rasabou	JKP-2		Kabupaten Bima
382.	Jembatan Sori Boro II	JKP-2	Kawinda To'i - Piong	Kabupaten Bima
383.	Jembatan Karupa	JKP-2		Kabupaten Bima
384.	Jembatan Kore Kenu / Sanggar	JKP-2		Kabupaten Bima
385.	Jembatan Sori Boro I	JKP-2		Kabupaten Bima
386.	Jembatan Sai II / Sonco Kea	JKP-2	Sampungu - Bajo	Kabupaten Bima
387.	Jembatan Sori Nae	JKP-2		Kabupaten Bima
388.	Jembatan Kali Kebondo	JKP-2		Kabupaten Bima
389.	Jembatan WXX Kali Ngase	JKP-2		Kabupaten Bima
390.	Jembatan WXX Kali Kajao	JKP-2		Kabupaten Bima
391.	Jembatan WXX Kali Torluba	JKP-2		Kabupaten Bima
392.	Jembatan WXX Sori Sonco Soka	JKP-2		Kabupaten Bima
393.	Jembatan WXX Sungai Kalo	JKP-2		Kabupaten Bima
394.	Jembatan WXX Sungai Kampi	JKP-2		Kabupaten Bima
395.	Jembatan WXX	JKP-2		Kabupaten Bima
396.	Jembatan Kali Sangari	JKP-2		Kabupaten Bima
397.	Jembatan Sungai Lambe	JKP-2		Kabupaten Bima
398.	Jembatan Sori Busi	JKP-2		Kabupaten Bima
399.	Jembatan Sori Lia I	JKP-2		Kabupaten Bima
400.	Jembatan Sori Lia II	JKP-2		Kabupaten Bima

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
401.	Jembatan Enggose	JKP-2		Kabupaten Bima
402.	Jembatan Jati I	JKP-2		Kabupaten Bima
403.	Jembatan Jati II	JKP-2		Kabupaten Bima
404.	Jembatan Jati III	JKP-2		Kabupaten Bima
405.	Jembatan Jati IV	JKP-2		Kabupaten Bima
406.	Jembatan Sori To'I	JKP-2		Kabupaten Bima
407.	Jembatan Parado	JKP-2		Kabupaten Bima
408.	Jembatan Dana Me'E	JKP-2		Kabupaten Bima
409.	Jembatan Sori Kara	JKP-2		Kabupaten Bima
410.	Jembatan Pela II	JKP-2	Simpasai - Parado	Kabupaten Bima
411.	Jembatan Pela I	JKP-2		Kabupaten Bima
412.	Jembatan Simpasai II / Dundu Hea	JKP-2		Kabupaten Bima
413.	Jembatan Simpasai I	JKP-2		Kabupaten Bima
414.	Jembatan Mbuju	JKP-2		Kabupaten Dompu
415.	Jembatan Sori Lo	JKP-2		Kabupaten Dompu
416.	Jembatan Enca I	JKP-2	Simpang Kore - Kiwu	Kabupaten Dompu
417.	Jembatan Wae Kiwu	JKP-2		Kabupaten Dompu
418.	Jembatan Kiwu	JKP-2		Kabupaten Dompu
419.	Jembatan Laju	JKP-2	Wilamaci - Karumbu	Kabupaten Bima
420.	Jembatan Kenangas III	JKP-2	Lenangguar - Lunyuk	Kabupaten Sumbawa
421.	Jembatan WXX	JKP-2	Sampungu - Bajo	Kabupaten Bima
422.	Jembatan Slab Culvert / XX	JKP-3	Jln. Sultan Hasanudin di Kota Mataram	Kota Mataram
423.	Jembatan Lempuih	JKP-3	Lunyuk - Ropang	Kabupaten Sumbawa
424.	Jembatan XXX	JKP-3	Mantang - Praya	Lombok Tengah
425.	Jembatan Gorong - Gorong 1 / XX 1	JKP-3	Jln. Sriwijaya	Kota Mataram
426.	Jembatan Gorong - Gorong 2 / XX 2	JKP-3		Kota Mataram
427.	Jembatan Slab Culvert / XX	JKP-3	Jln. Panji Tilar Negara	Kota Mataram
428.	Jembatan Gorong - Gorong / XX	JKP-3	Jln. Bung Hatta	Kota Mataram
429.	Jembatan Brang Lepu 1	JKP-3	Sekokat - Bawi	Kabupaten Sumbawa
430.	Jembatan Brang Lepu 2	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
431.	Jembatan Sori Sante	JKP-3	Simpang Kempo - Simpang Kore	Kabupaten Dompu
432.	Jembatan Kenu	JKP-3		Kabupaten Dompu
433.	Jembatan Wadu Nae	JKP-3		Kabupaten Dompu
434.	Jembatan Mpolo	JKP-3		Kabupaten Dompu

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
435.	Jembatan Tente 2	JKP-3	Talabiu - Simpasai	Kabupaten Bima
436.	Jembatan Sakuru	JKP-3		Kabupaten Bima
437.	Jembatan Sori Rida	JKP-3		Kabupaten Bima
438.	Jembatan Sanggar	JKP-3	Aikmal - Swela	Kabupaten Lombok Timur
439.	Jembatan XXX	JKP-3	Penujak - Mt. Ajan	Kabupaten Lombok Tengah
440.	Jembatan XXX	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
441.	Jembatan XXX	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
442.	Jembatan Batu Lateh I	JKP-3	Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang	Kabupaten Sumbawa
443.	Jembatan Batu Lateh II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
444.	Jembatan Semongkat I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
445.	Jembatan Semongkat II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
446.	Jembatan Setango	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
447.	Jembatan Semongkat IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
448.	Jembatan Brang Bara	JKP-3	Jln. Sudirman	Kabupaten Sumbawa
449.	Jembatan Mata Geluni	JKP-3	Ropang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
450.	Jembatan Labangka III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
451.	Jembatan Labangka IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
452.	Jembatan Labangka V	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
453.	Jembatan Nanga Pola	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
454.	Jembatan Brang Baru	JKP-3	Plampang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
455.	Jembatan Labangka I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
456.	Jembatan Pruak Neloka	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
457.	Jembatan Rasak	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
458.	Jembatan Selante II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
459.	Jembatan Untir Renga	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
460.	Jembatan Sekokat	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
461.	Jembatan Mata Geluning	JKP-3	Ropang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
462.	Jembatan Labangka II	JKP-3	Lunyuk - Ropang	Kabupaten Sumbawa
463.	Jembatan Batu Belek B	JKP-3	Kruak - Pancor	Kabupaten Lombok Timur
464.	Jembatan Maronggek	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
465.	Jembatan Moyot	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
466.	Jembatan Palung	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
467.	Jembatan Rambang	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
468.	Jembatan Batu Belek A	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
469.	Jembatan Tojang	JKP-3	Pancor - Rempung	Kabupaten Lombok Timur
470.	Jembatan Ds.Bagik	JKP-3	Aikmal - Swela	Kabupaten Lombok Timur
471.	Jembatan Gereng	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
472.	Jembatan Kedatu	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
473.	Jembatan Songgen	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
474.	Jembatan Kedondong	JKP-3	Pringgabaya - Sembalun Bumbung	Kabupaten Lombok Timur
475.	Jembatan Pesugulan / Orong Semaye	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
476.	Jembatan Juring	JKP-3	Wakul - Ketejer	Kabupaten Lombok Tengah
477.	Jembatan Bonder I	JKP-3	Ketejer - Jontlak	Kabupaten Lombok Tengah
478.	Jembatan Sade	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
479.	Jembatan Penujak II	JKP-3	Sp. Penujak - Tanah Awu	Kabupaten Lombok Tengah
480.	Jembatan Emot	JKP-3	Penujak - Mt. Ajan	Kabupaten Lombok Tengah
481.	Jembatan Kelebuh	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
482.	Jembatan Mengkoneng	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
483.	Jembatan Penujak I	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
484.	Jembatan Penujak II	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
485.	Jembatan Setanggor I	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
486.	Jembatan Tebek	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
487.	Jembatan Tl. Pedek	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
488.	Jembatan Lajut	JKP-3	Batunyala - Sengkol	Kabupaten Lombok Tengah
489.	Jembatan Seraya II	JKP-3	Perampuan - Kebun Ayu - Lembar	Kabupaten Lombok Barat
490.	Jembatan Kemakmuran	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
491.	Jembatan Paok Dodol I	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
492.	Jembatan Paok Dodol II	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
493.	Jembatan Parampuan I	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
494.	Jembatan Parampuan II	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
495.	Jembatan Bongor	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
496.	Jembatan Kesejahteraan	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
497.	Jembatan Jangkok II	JKP-3	Jln. DR. Sutomo / Mataram - Rembiga	Kota Mataram
498.	Jembatan Kali Ning	JKP-3		Kota Mataram
499.	Jembatan Telabah Bawak	JKP-3		Kota Mataram
500.	Jembatan Bung Hatta	JKP-3	Jln. Bung Hatta	Kota Mataram
501.	Jembatan Kali Jangkok A	JKP-3		Kota Mataram
502.	Jembatan Kali Jangkok B	JKP-3		Kota Mataram
503.	Jembatan Kali Ropang A	JKP-3		Kota Mataram
504.	Jembatan Kali Ropang B	JKP-3		Kota Mataram
505.	Jembatan Kali Jangkok A	JKP-3	Jln. Yos Sudarso	Kota Mataram
506.	Jembatan Kali Jangkok B	JKP-3		Kota Mataram
507.	Jembatan Udayana I	JKP-3	Jln. Udayana / Junction - Selaparang	Kota Mataram
508.	Jembatan Udayana II	JKP-3		Kota Mataram
509.	Jembatan Kali Ancar	JKP-3	Jln. Pejanggik	Kota Mataram
510.	Jembatan Punia A	JKP-3	Jln. Erlangga	Kota Mataram
511.	Jembatan Punia B	JKP-3		Kota Mataram
512.	Jembatan Bernyok A	JKP-3	Jln. Gajah Mada di Kota Mataram	Kota Mataram
513.	Jembatan Bernyok B	JKP-3		Kota Mataram
514.	Jembatan Pesongoran A	JKP-3		Kota Mataram
515.	Jembatan Pesongoran B	JKP-3		Kota Mataram
516.	Jembatan Seraye I A	JKP-3		Kota Mataram
517.	Jembatan Seraye I B	JKP-3		Kota Mataram
518.	Jembatan Tl. Tengah A	JKP-3		Kota Mataram
519.	Jembatan Tl. Tengah B	JKP-3		Kota Mataram
520.	Jembatan Kr. Bedil	JKP-3	Jln. WR. Supratman	Kota Mataram
521.	Jembatan Bungkarno	JKP-3	Jln. Bung Karno	Kota Mataram
522.	Jembatan Pagutan I	JKP-3		Kota Mataram
523.	Jembatan Pagutan II	JKP-3		Kota Mataram
524.	Jembatan Pesongoran	JKP-3		Kota Mataram
525.	Jembatan Abian Tubuh I	JKP-3	Jln. Prabu Rangka Sari	Kota Mataram
526.	Jembatan Abian Tubuh II	JKP-3		Kota Mataram
527.	Jembatan Tl. Waker	JKP-3		Kota Mataram
528.	Jembatan Sindu	JKP-3	Jln. Sultan Hasanudin di Kota Mataram	Kota Mataram
529.	Jembatan Sayang - Sayang	JKP-3	Jln. Diponegoro (Bts. Kota)	Kota Mataram
530.	Jembatan Tl. Sayang - Sayang	JKP-3		Kota Mataram
531.	Jembatan Batu Dawe A	JKP-3	Jln. Majapahit	Kota Mataram
532.	Jembatan Batu Dawe B	JKP-3		Kota Mataram
533.	Jembatan Batu Dawe	JKP-3	Jln. Panji Tilar Negara	Kota Mataram
534.	Jembatan Karang Sukun	JKP-3	Jln. Caturwarga	Kota Mataram
535.	Jembatan Guru Bangkol	JKP-3	Jln. TGH. Bangkol	Kota Mataram

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
536.	Jembatan Sadia	JKP-3	Jln. Gatot Subroto	Kota Bima
537.	Jembatan Sambi Nae	JKP-3		Kota Bima
538.	Jembatan Nisa II	JKP-3	Simpang Kempo - Simpang Kore	Kabupaten Bima
539.	Jembatan Tolo Tangga	JKP-3	Wilamaci - Parado	Kabupaten Bima
540.	Jembatan Kepal	JKP-3		Kabupaten Bima
541.	Jembatan Monta	JKP-3		Kabupaten Bima
542.	Jembatan Waro	JKP-3		Kabupaten Bima
543.	Jembatan Penujak I	JKP-3	Sp. Penujak - Tanah Awu	Kabupaten Lombok Tengah
544.	Jembatan Nook	JKP-3	Ropang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
545.	Jembatan Soso'Batu	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
546.	Jembatan Paraleng	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
547.	Jembatan Senda	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
548.	Jembatan Biau	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
549.	Jembatan Jemplung	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
550.	Jembatan Sebekil	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
551.	Jembatan Aer Suning	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
552.	Jembatan Kuning	JKP-3	Plampang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
553.	Jembatan Putih	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
554.	Jembatan Kokar Labangka	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
555.	Jembatan Batu Jangkih	JKP-3	Penujak - Mt. Ajan	Kabupaten Lombok Tengah
556.	Jembatan Babar	JKP-3	Lunyuk - Ropang	Kabupaten Sumbawa
557.	Jembatan Pejanggik	JKP-3	Kruak - Pancor	Kabupaten Lombok Timur
558.	Jembatan XXX A	JKP-3	Jln. Bung Karno	Kota Mataram
559.	Jembatan XXX B	JKP-3		Kota Mataram
560.	Jembatan Nisa I	JKP-3	Simpang Kempo - Simpang Kore	Kabupaten Dompu
561.	Jembatan Karan Geluni	JKP-3	Ropang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
562.	Jembatan Kokar Labangka 3	JKP-3	Sekokat - Bawi	Kabupaten Sumbawa
563.	Brang Gelumpang II	JKP-3	Sekokat - Bawi	Kabupaten Sumbawa
564.	Kokar Tero I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
565.	Kokar Tero II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
566.	Kokar Mejo	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
567.	Kokar Tero III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
568.	Kokar Imo	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
569.	Brang Batu Bulan I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
570.	Brang Batu Bulan II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
571.	Kokar Batu Bolong I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
572.	Kokar Batu Bolong II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
573.	Kokar Batu Bolong III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
574.	Kokar Batu Bolong IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
575.	Brang Odek I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
576.	Kokar Odek II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
577.	Kokar Odek III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
578.	Kokar Odek IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
579.	Kokar Ruku	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
580.	Kokar Kajah I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
581.	Kokar Kajah II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
582.	Kokar Kajah III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
583.	Kokar Ipil	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
584.	Brang Bua	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
585.	Brang Kajah IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
586.	Kokar Sekadung I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
587.	Kokar Sekadung II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
588.	Brang Gelumpang I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
589.	Kokar Borang I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
590.	Brang Borang II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
591.	Kokar Tampar Ode II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
592.	Kokar Tampar Ode II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
593.	Kokar Tampar Ode III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
594.	Kokar Joreng I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
595.	Kokar Joreng II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
596.	Kokar Joreng II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
597.	Brang Betinggal I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
598.	Brang Betinggal II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
599.	Brang Betinggal III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
600.	Brang Betinggal IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
601.	Brang Betinggal V	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
602.	Brang Galuni	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
603.	Brang Tampar Bagik I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
604.	Brang Tampar Bagik II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
605.	Brang Aik Mumil I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
606.	Kokar Aik Mumil II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
607.	Brang Mumil III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
608.	Brang Mumil IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
609.	Kokar Ai Panan	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
610.	Kokar Jung Rusak I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
611.	Kokar Jung Rusak II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
612.	Kokar Baru I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
613.	Kokar Baru II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
614.	Kokar Tampar Pisak I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
615.	Kokar Tampar Pisak II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
616.	Kokar Tampar Pisak III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
617.	Brang Batu Anar I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
618.	Kokar Batu Anar II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
619.	Brang Batu Anar III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
620.	Kokar Buruk	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
621.	Kokar Takat Reak I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
622.	Brang Takat Reak II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
623.	Brang Tampar Dalam I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
624.	Brang Tampar Dalam II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
625.	Brang Tampar Dalam III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa

No.	Nama Jembatan	Ruas Jalan		Kabupaten/Kota
626.	Brang Tampar Dalam IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
627.	Brang Kelimutu I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
628.	Brang Kelimutu II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
629.	Brang Kelimutu III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
630.	Brang Kelimutu IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
631.	Brang Treng I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
632.	Brang Treng II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
633.	Kokar Ode I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
634.	Brang Ode II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
635.	Brang Ode III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
636.	Kokar Ode IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
637.	Kokar Udang	JKP-3		Kabupaten Sumbawa

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata *Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2044*

c. **Air Minum**

Pemerintah Provinsi NTB saat ini belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sementara pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang menjadi Kewenangan Provinsi NTB masih dalam proses perencanaan. Namun Infrastruktur Air Minum tetap menjadi salah satu indikator penilaian dalam kegiatan Penilaian IKLI, karena mempertimbangkan adanya infrastruktur SPAM yang dibangun oleh pemerintah provinsi yang pengelolaannya menjadi kewenangannya Kabupaten/Kota. Berikut merupakan lokasi Pembangunan infrastruktur SPAM pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Tabel 3.91
Infrastruktur SPAM di Provinsi NTB

No	Uraian	Lokasi	Jumlah Penduduk Terlayani	Tahun Pelaksanaan
1	SPAM Dusun Bebak Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah	Lombok Tengah	100 kk	Tahun 2022
2	SPAM Dusun Bisok Bokah Desa Bebuak Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah	Lombok Tengah	160 kk	Tahun 2022
3	SPAM Dusun Kali Bening. Desa Mamben Daya. Kec. Wanasaba. Kab. Lombok Timur	Lombok Timur	300 kk	Tahun 2022
4	SPAM Dusun Kr. Anyar Timuk. Desa Mamben Lauk. Kec. Wanasaba. Kab. Lotim	Lombok Timur	350 kk	Tahun 2022
5	SPAM Dusun Lingkok Marang Desa Kotaraja Kec. Sikur Kab. Lombok Timur	Lombok Timur	50 kk	Tahun 2022
6	SPAM Dusun Pemotoh Tengah Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah	Lombok Tengah	250 kk	Tahun 2022
7	SPAM Lingkungan Karang Baru Barat Desa Sasake Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Lombok Tengah	200 kk	Tahun 2022

No	Uraian	Lokasi	Jumlah Penduduk Terlayani	Tahun Pelaksanaan
8	SPAM Masjid Nurul Iman Dusun Loang Sawak Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur	Lombok Timur	180 kk	Tahun 2022
9	aringgan Perpipaan Air Bersih Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai, Kabupaten Sumbawa	Sumbawa		Tahun 2022
10	Pembangunan SPAM Air Bersih Pondok Pesantren Al-Majidiah Kab. Sumbawa	Sumbawa	50 kk	Tahun 2022
11	SPAM Desa Klungkung Kec. Batu Lanteh Kab. Sumbawa	Sumbawa	500 kk	Tahun 2022
12	SPAM Desa Mumbul Sari Kec. Bayan KLU	Lombok Utara	350 kk	Tahun 2022
13	SPAM Desa Tete Batu Kec. Sikur Kab. Lombok Timur	Lombok Timur	380 kk	Tahun 2022
14	SPAM Dusun Sangiang Desa Selengen Kec. Kayangan KLU	Lombok Utara	150 kk	Tahun 2022
15	SPAM Dusun Sukarara Utara Desa Sukarara Kel. Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur	Lombok Timur	40 kk	Tahun 2022
16	Air Bersih Jaran Pusang Desa Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa	Sumbawa	400 kk	Tahun 2022
17	Pembangunan perpipaan air minum pipa 2 inci Kel. UPT Perode SP III Kec. Plampang Kab. Sumbawa DESA PRODE SP 3, Kab. Sumbawa	Sumbawa	450 kk	Tahun 2022
18	Pembangunan SPAM Desa Gontoran Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	Lombok Utara	300 kk	Tahun 2022
19	Pembangunan SPAM Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara	Lombok Barat	250 kk	Tahun 2022
20	Pembangunan SPAM Desa Kekait Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat	Lombok Utara	150 kk	Tahun 2022
21	Pembangunan SPAM Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	Lombok Barat	300 kk	Tahun 2022
22	Pembangunan SPAM Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	Lombok Barat	300 kk	Tahun 2022
23	Pembangunan SPAM Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Lombok Utara	450 kk	Tahun 2022

24	Pembangunan SPAM Desa Pengadangan Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur	Lombok Timur	450 kk	Tahun 2022
25	Pembangunan SPAM Dusun Barung Birak Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara	Lombok Utara	300 kk	Tahun 2022
26	Pembangunan SPAM Dusun Lenggorong Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara	Lombok Utara	250 kk	Tahun 2022
27	Saluran Air Bersih Kel. Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur Desa Wanasaba. Kec.Wanasaba. Kab. Lombok Timur	Lombok Timur	500 kk	Tahun 2022
28	SPAM Dusun Batulayar utara Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kab Lombok Barat	Lombok Barat	50 kk	Tahun 2022
29	Pembangunan SPAM Ulem-Ulem Berseri Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kec. Sikur Kab.Lombok Timur	Lombok Timur	450 kk	Tahun 2022
30	SPAM SMK IT Pancor Dao Batukliang Kab. Lombok Tengah	Lombok Tengah	100 kk	Tahun 2022
31	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Sidemen Kecamatan Batulayar Kab. Lombok Barat (DBHCHT)	Lombok Barat		Tahun 2023
32	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Jurang Malang Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat (DBHCHT)	Lombok Barat		Tahun 2023
33	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Tanggluk Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
34	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Keluncing Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023

35	Peningkatan Kualitas Air Bersih Lingkungan Dusun Lekong Rempong Desa Pesanggrahan Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
36	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Lendang Penyonggok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
37	Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Air Bersih Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
38	Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Air Bersih Desa Senanggalih Kecamatan Sembelia Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
39	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
40	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
41	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Sedau Kecamatan Narmada Kab. Lobar (DBHCHT)	Lombok Barat		Tahun 2023
42	Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Air Bersih Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
43	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
44	Pembangunan Prasarana Limbah Domestik Dusun Pelita Desa Serading Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa (DBHCHT)	Sumbawa		Tahun 2023

45	Pembangunan Prasarana Limbah Domestik Dusun Brang Beru Desa Moyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa (DBHCHT)	Sumbawa		Tahun 2023
46	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Lingkok Marang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kota Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
47	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Bangle Desa Pesanggrahan Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
48	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Lekor Kecamatan Janapria Kab. Loteng (DBHCHT)	Lombok Tengah		Tahun 2023
49	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang KLU (DBHCHT)	Lombok Utara		Tahun 2023
50	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Selelos Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara (DBHCHT)	Lombok Utara		Tahun 2023
51	Peningkatan Kualitas Air Bersih Lingkungan Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab.	Lombok Tengah		Tahun 2023
52	Lombok Tengah (DBHCHT)			Tahun 2023
53	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
54	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kab. Lobar (DBHCHT)	Lombok Barat		Tahun 2023
55	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kab. Lotim (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
56	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kab. Lotim (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023

57	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (DBHCHT)	Lombok Utara		Tahun 2023
58	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Gontoran 1 Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat (DBHCHT)	Lombok Barat		Tahun 2023
59	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Madaprama Kecamatan Woja Kab. Dompu (DBHCHT)	Dompu		Tahun 2023
60	Peningkatan Kualitas Air Bersih Desa Kwangko Kecamatan Manggalea Kab. Dompu (DBHCHT)	Dompu		Tahun 2023
61	Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Air Bersih Desa Pekat Kecamatan Pekat Kab. Dompu (DBHCHT)	Dompu		Tahun 2023
62	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Gubuk Lauk Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023
63	Peningkatan Kualitas Air Bersih Dusun Dasan Tengak Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur (DBHCHT)	Lombok Timur		Tahun 2023

Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025

d. Persampahan

Pengelolaan sampah dalam skala regional di Wilayah Provinsi NTB berada pada tahapan pengumpulan dan pengolahan akhir yang melayani lintas kabupaten/kota. Pada proses pengumpulan sampah, dikembangkan Tempat Pengumpulan Sementara Terpadu Regional (TPST-R) yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima.

Sementara itu, untuk pengolahan akhir dikembangkan Tempat Pengolahan Akhir Regional (TPA-R) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. TPA-R ini dikembangkan dengan metode *sanitary landfill*, dimana pemusnahan sampahnya dilakukan dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekungan, memadatkannya, dan kemudian

menimbunnya dengan tanah. Metode ini dipilih karena lebih efisien dan gas metana hasil dari pengolahan sampah dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik.

Gambar 3.1
Contoh Rencana Sistem Jaringan Persampahan di Wilayah Provinsi NTB
(Pembangunan TPA Regional / PPST Lemer di Kabupaten Lombok Barat



Tabel 3.92
Rencana Sistem Jaringan Persampahan di Wilayah Provinsi NTB

No.	Sistem Jaringan Persampahan	Ketarangan	Lokasi
A.	TPA Regional (TPA-R)		
1.	PPST Regional Lemer	Eksisting	Kabupaten Lombok Barat
2.	TPA Regional Kebun Kongok	Eksisting	
3.	TPA Regional Rincung	Rencana	
4.	TPA Regional Lekong Alas	Rencana	Kabupaten Sumbawa
5.	TPA Regional Waduwani	Rencana	Kabupaten Bima

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata *Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2044*

e. Drainase

Drainase meruapakan sistem yang digunakan untuk mengalirkan atau mengatur aliran air dari suatu area tertentu, seperti saluran atau saluran pembuangan air. Sistem drainase ini berfungsi untuk mencegah genangan air yang berlebihan, mengurangi potensi banjir, serta mengalirkan air hujan atau air yang terkumpul di permukaan tanah ke saluran yang lebih besar atau sumber pembuangan yang tepat. Penilaian lokasi drainase dalam kegiatan ini difokuskan pada area di sepanjang jalan kewenangan Provinsi NTB. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kondisi sistem drainase yang ada di sepanjang jalan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti ketersediaan fisik, kualitasi fisik, kemampuan mengurangi genangan dan banjir, tingkat pemanfaatan, dan kontribusi terhadap penciptaan lingkungan berish dan sehat.

f. Permukiman Kumuh

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh, lebih lanjut ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang dimaksudkan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat selanjutnya penetapan lokasi ditetapkan oleh bupati/walikota. Luas kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK Bupati/walikota se-NTB adalah 612,83 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2025 seluas 87,40 ha. Sehingga capaian sampai dengan tahun 2025 yang telah ditangani sebesar 384,879 ha di seluruh kawasan kumuh kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.93
Luas Kawasan Kumuh dan Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2020-2025

No	Kabupaten/ Kota	Target Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)	Kawasan Kumuh Tertagani 20202021 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertagani 2022 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertagani 2023 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertagani 2024 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertagani 2025 (Ha)	Total Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)
1	Kota Mataram	12.04	3.86	1.65	1.48	3.39	0.75	11.134
2	Kota Bima	24.65	1.55	2.08	6.45	9.75	6.66	26.494
3	Lombok Barat	37.64	8.12	3.73	17.03	5.44	7.80	42.125
4	Lombok Tengah	29.11	34.79	9.25	6.92	6.46	5.78	63.199
5	Lombok Timur	64.68	25.73	4.49	8.62	9.66	15.90	64.400
6	Sumbawa	200.82	10.67	6.23	16.1	20.76	24.41	78.174
7	Sumbawa Barat	18.72	1.39	0.47	0	1.74	0.00	3.600
8	Bima	63.4	5.82	2.18	4.94	4.88	4.13	21.950
9	Lombok Utara	78.07	1.8	2.49	10.68	19.46	13.42	47.855
10	Dompu	91.9	1.29	0.61	7.46	8.06	8.53	25.947
	Total	**621.03**	**95.02**	**33.18**	**79.68**	**89.6**	**87.40**	**384.879**

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2025

Tabel 3.94
Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB di Pulau Lombok

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kawasan	Jumlah Kawasan
Lombok Barat	Sandubaya	Turida	Turida	4 Kawasan
	Kuripan	Kuripan	Tongkek	
	Labu Api	Karang Bongkot	Perampuan Timur	
		Perampuan	Perampuan Barat	
Lombok Tengah	Pujut	Mertak	Sokat	2 Kawasan
	Pringgarata	Pemepek	Pemepek	
Lombok Timur	Labuhan Haji	Teros	Dusun Kokok Daya, Timba Timuk, Selungkep, Timba Daya	5 Kawasan
	Sakra Barat	Buntiang	Buntiang	
	Wanasaba	Bebidas	Lingkungan Bebidas 4	
	Sembalun	Sembalun Timba Gading	Sembalun Timba Gading	
		Bilok Pitung	Bilok Pitung	
Lombok Utara	Pemenang	Malaka	Malaka	6 Kawasan
	Tanjung	Sigar Penjalin	Sigar Penjalin	
		Sokong	Sokong	
	Gangga	Sambik Bangkol	Sambik Bangkol	
	Bayan	Loloan	Loloan	
		Senaru	Senaru	

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2025

Tabel 3.95
Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB
di Pulau Sumbawa

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kawasan	Jumlah Kawasan
Sumbawa Barat	Taliwang	Menala	Menala	1 Kawasan
Sumbawa	Sumbawa	Bugis	Bugis	16 Kawasan
	Labuhan Badas	Karang Dima	Karang Dima	
	Alas	Pulau Bungin	Pulau Bungin	
	Alas Barat	Gontar	Gontar	
	Lopok	Langam	Langam	
	Maronge	Maronge	Maronge	
	Moyo Hilir	Moyo Mekar	Moyo Mekar	
	Moyo Utara	Sebewe	Sebewe	
	Plampang	Plampang	Plampang	
	Terano	Labuan Aji	Labuan Aji	
	Unter Iwes	Nijang	Nijang	
		Uma Beringin	Uma Beringin	
	Utan	Jorok	Jorok	
	Moyo Hulu	Sampe	Sampe	
	Lenangguar	Lenangguar	Lenangguar	
		Tetebal	Tetebal	
Dompu	Woja	Dorobara	Tolomba'a	7 Kawasan
		Wawonduru	Meciangi Ii	
		Matua	Doronawa Ii	
		Madapratama	Madarutu I	
	Pekat	Kadindi	Kaldera I	
		Calabai	Kaldera Ii	
		Kadindi Barat	Kaldera Iii	
Bima	Bolo	Darussalam	Darussalam	5 Kawasan
	Woha	Donggobolo 2	Dadibou	
		Panda	Panda	
	Sape	Nae	Nae	
		Sangia	Sangia	
Kota Bima	Asakota	Jatiwangi	Ranggo (Tato, Gindi, Ranggo, Nae, Sarae, Gili Panda)	4 Kawasan
	Resanae Barat	Nae		
		Sarae		
	Mpunda	Mande	Sambimaci (Mande, I, Waki, Bedi, Samporo, Sambinae, Rabangodu	

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kawasan	Jumlah Kawasan
			Selatan)	
		Manggemaci	Sambinae	
		Raba	Rabangodu Selatan	

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2025

Tabel 3.96
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun					Total
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kota Mataram	2	6	0	8	16	32
2	Lombok Barat	18	3	30	10	16	77
3	Lombok Tengah	30	80	26	14	17	167
4	Lombok Timur	76	20	42	30	16	184
5	Lombok Utara	6	4	5	23	9	47
6	Sumbawa	50	1	18	25	26	120
7	Sumbawa Barat	9	0	6	14	21	50
8	Dompu	5	10	14	20	22	71
9	Bima	1	6	4	15	29	55
10	Kota Bima	2	2	4	16	-	24
Total		199	132	149	175	172	827

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2025

g. Terminal

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana terminal guna menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang. Keberadaan terminal berfungsi untuk memadukan intramoda dan antarmoda di pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. Pengembangan terminal penumpang di Wilayah Provinsi NTB diarahkan sebagai berikut: Terminal Tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, serta angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan. Rencana pengembangan terminal Tipe B di Wilayah Provinsi NTB adalah:

Tabel 3.97
Rencana Tipe B di Wilayah Provinsi NTB

No.	Terminal Penumpang Tipe B	Lokasi
A.	**Pulau Lombok**	
1.	Terminal Bangsal *)	Kabupaten Lombok Utara

No.	Terminal Penumpang Tipe B	Lokasi
2.	Terminal Renteng	Kabupaten Lombok Tengah
3.	Terminal Pringgabaya	Kabupaten Lombok Timur
B.	**Pulau Sumbawa**	
1.	Terminal Tana Mira	Kabupaten Sumbawa Barat
2.	Terminal Ginte	Kabupaten Dompu
3.	Terminal Woha	Kabupaten Bima

Keterangan:
**) Terminal eksisting yang dialihkan dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi.*
Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2044

h. Pelabuhan

Pelabuhan laut di wilayah Provinsi NTB berupa pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal umum, terminal khusus, dan pelabuhan perikanan. Pelabuhan laut yang dikelola oleh pemerintah adalah pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal umum dan pelabuhan perikanan. Sedangkan terminal khusus biasanya dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta (badan usaha) tergantung pada kepentingan pembangunan pelabuhan. Pelabuhan pengumpul merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara dan/atau antarprovinsi. Pelabuhan pengumpul di Wilayah Provinsi NTB diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.

Tabel 3.98
Rencana Pelabuhan Pengumpul di Wilayah Provinsi NTB

No.	Pelabuhan Pengumpul	Kabupaten/ Kota	Perairan	Koordinat	
				X	**Y**
A.	**Pulau Lombok**				
1.	Pelabuhan Lembar	Lombok Barat	Kawasan Lembar	116°4’22.555" BT	8°43’47.812" LS
2.	Pelabuhan Labuhan Lombok	Lombok Timur	Kawasan Labuhan Lombok	116°40’22.377" BT	8°30’0.484" LS
B.	**Pulau Sumbawa**				
1.	Pelabuhan Benete	Sumbawa Barat	Kawasan Maluk	116°45’1.261" BT	8°53’42.071" LS
2.	Pelabuhan Badas	Sumbawa	Kawasan Pantura Sumbawa	117°22’20.798" BT	8°27’45.595" LS
3.	Pelabuhan Bima	Kota Bima	Kawasan Teluk Bima	118°42’48.606" BT	8°26’51.380" LS

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2044

Khusus Pelabuhan Lembar merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang melintasi Selat Lombok. ALKI ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Indonesia memiliki kewajiban hukum guna memberi hak lintas damai, hal lintas alur laut kepulauan, dan hak lintas transit bagi kapal maupun pesawat asing. Kapal maupun pesawat asing bisa melintasi wiayah perairan Indonesia melalui rute yang ditentukan sebagai ALKI. Jalur ALKI II difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.

Gambar 3.2
Peta ALKI di Wilayah Perairan Indonesia



Tabel 3.99
Rencana Pelabuhan Pengumpan di Wilayah Provinsi NTB

No.	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/ Kota	Perairan	Koordinat	
				X	Y
A.	**Pelabuhan Pengumpan Regional**				
1	**Pelabuhan Pemenang**	Lombok Utara	Kawasan Gili Indah	116°5’58.913" BT	8°23’38.023" LS
2.	**Pelabuhan Carik**	Lombok Utara	Kawasan Kayangan	116°25’33.251" BT	8°13’21.326" LS
3.	Pelabuhan Bandar Kayangan	Lombok Utara	Kawasan Kayangan	116°18’6.058" BT	8°13’51.667" LS
4.	Pelabuhan Alas	Sumbawa	Kawasan Alas	116°59’59.585" BT	8°30’12.153" LS
5.	Pelabuhan Calabai	Dompu	Kawasan Teluk Saleh	117°42’35.118" BT	8°12’54.278" LS

No.	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/ Kota	Perairan	Koordinat	
				X	Y
6.	Pelabuhan Kilo *)	Dompu	Kawasan Teluk Sanggar	118°18’26.878" BT	8°22’11.280" LS
7.	Pelabuhan Kempo	Dompu	Kawasan Teluk Saleh	118°13’11.403" BT	8°33’21.250" LS
8.	Pelabuahn Sape	Bima	Kawasan Sape	119°1’6.182" BT	8°34’7.804" LS
9.	Pelabuhan Waworada	Bima	Kawasan Waworada	118°49’10.660" BT	8°42’35.394" LS
B.	**Pelabuhan Pengumpan Lokal**				
1.	Pelabuhan Labuhan Poh Sekotong *)	Lombok Barat	Kawasan Lembar	115°51’27.992" BT	8°43’34.786" LS
2.	Pelabun Gili Gede	Lombok Barat	Kawasan Lembar	115°55’13.535" BT	8°44’35.653" LS
3.	Pelabuhan Teluk Sepi	Lombok Barat	Kawasan Teluk Sepi	116°3’33.380" BT	8°51’4.395" LS
4.	Pelabuhan Tawun	Lombok Barat	Kawasan Lembar	116°0’34.535" BT	8°45’5.452" LS
5.	Pelabuhan Tembowong	Lombok Barat	Kawasan Lembar	115°56’10.079" BT	8°46’1.095" LS
6.	Pelabuhan Kuta Mandalika	Lombok Tengah	Kawasan Kuta	116°16'39,33" BT	8°53'35,505" LS
7.	Pelabuhan Teluk Awang	Lombok Tengah	Kawasan Teluk Ekas	116°23’43.025" BT	8°52’56.341" LS
9.	Pelabuhan Tanjung Luar	Lombok Timur	Kawasan Teluk Jukung	116°31’30.155" BT	8°46’13.016" LS
10.	Pelabuhan Labuhan Haji	Lombok Timur	Kawasan Labuhan Haji	116°34’27.181" BT	8°41’59.945" LS
11.	Pelabuhan Labuhan Aji Pulau Moyo	Sumbawa	Kawasan Pantura Sumbawa	117°29’5.125" BT	8°13’11.214" LS
12.	Pelabuhan Teluk Santong	Sumbawa	Kawasan Teluk Saleh	117°54’43.095" BT	8°44’0.887" LS
13.	Pelabuhan Pulau Medang	Sumbawa	Kawasan Pantura Sumbawa	117°23’10.187" BT	8°8’58.022" LS
14.	Pelabuhan Pernang / Mapin	Sumbawa	Kawasan Alas	117°1’59.549" BT	8°27’0.238" LS

No.	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten/ Kota	Perairan	Koordinat	
				X	Y
15.	Pelabuhan Labuhan Ijuk	Sumbawa	Kawasan Teluk Saleh	117°34’1.696" BT	8°29’13.714" LS
16.	Pelabuhan Soroadu	Dompu	Kawasan Teluk Cempi	118°25’59.721" BT	8°40’23.557" LS
17.	Pelabuhan Tambora	Bima	Kawasan Laut Flores Dompu	117°56’13.654" BT	8°5’1.321" LS
18.	Terminal Umum Darussalam Bolo	Bima	Kawasan Teluk Bima	118°39’47.721" BT	8°30’42.784" LS
19.	Pelabuhan Rompo Langgudu	Bima	Kawasan Waworada	118°48’9.469" BT	8°42’23.969" LS
20.	Pelabuhan Kore	Bima	Kawasan Teluk Sanggar	118°17’37.639" BT	8°22’4.528" LS

*Keterangan : *) Pelabuhan Rencana*
Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomo 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2044

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan capaian indikator Kinerja IKLI yaitu:

a. Mendorong peningkatan jaringan irigasi sebagai satu program strategis yang mendukung swasembada pangan termasuk irigasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat, termasuk pembangunan database dan penyusunan masterplan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan skala prioritas.
b. Mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh dan adaptif terhadap kondisi daerah serta melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah irigasi yang terdampak bencana.
c. Melakukan Koordinasi dan kolaborasi program/kegiatan lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk mendapatkan hasil maksimal. Perlu adanya regulasi terkait pengaturan Kelembagaan petani sehingga dapat menjadi kesatuan dengan pengaturan tugas dan fungsi.
d. Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan
e. Melakukan penyusunan Kebijakan tentang Penyelenggaraan SPAM di wilayah Provinsi NTB
f. Melakukan Koordinasi tentang cakupan air minum dengan Pemerintah Kab/Kota meliputi Jumlah KK dan Kondisi daerah yang telah terlayani.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar Rp223.006.706.340,00 Realisasi anggaran sebesar Rp79.651.820.728,00. Efisiensi anggaran sebesar 62,32%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

Tabel 3.100
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja IKLI

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
IKLI	223.006.706.340,00	79.651.820.728,00	80	75.83	1.050.399.851,35	2.787.583.829,25	0.38	0.62	62,32

Sumber: Biro Organiasi 2025, diolah

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perhubungan dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja IKLI tersebut antara lain:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui beberapa Program/Kegiatan prioritas yaitu:
   1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (realisasi anggaran 44,38%) dengan Kegiatan Antara Lain: Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku, Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa.
   2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (realisasi anggaran 16,15%) dengan Kegiatan Antara Lain: Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Berupa Optimalisasi TPA/TPST/SPA.

3. Program Pengembangan Permukiman (realisasi anggaran 2,11%) dengan Kegiatan Antara Lain: Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Berupa Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Di Kawasan Strategis Provinsi
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (realisasi anggaran 66,11%) dengan Kegiatan Antara Lain: Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Berupa Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya.
5. Program Penyelenggaraan Jalan (realisasi anggaran 42,82%) dengan Kegiatan Antara Lain: Penyelenggaraan Jalan Provinsi Berupa Rekonstruksi Jalan, Penggantian Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan.

b. Dinas Perumahan dan Permukiman melalui beberapa Program/Kegiatan prioritas yaitu:
   1. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 3,24%) dengan Kegiatan Antara Lain: Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi, Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus, Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
   2. Program Kawasan Permukiman Dengan Kegiatan Antara Lain: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
c. Dinas Perhubungan Melalui Beberapa Program/Kegiatan Prioritas Yaitu:
   1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (realisasi anggaran 1,31%) dengan Kegiatan Antara Lain: Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi, Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi, Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Tidak Dalam Trayek Sesuai Wilayah Kerja Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Program Pengelolaan Pelayaran (realisasi anggaran 12,16%) dengan Kegiatan Antara Lain: Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, Dan Pelabuhan Internasional, Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Dan Depo Peti Kemas, Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.101
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKLI

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Permukiman	11,974,950,000.00	253,010,500.00	2.11
Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	11,974,950,000.00	253,010,500.00	2.11
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2,065,396,400.00	1,365,394,400.00	66.11
Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,065,396,400.00	1,365,394,400.00	66.11
Program Penyelenggaraan Jalan	28,468,780,400.00	12,190,513,534.00	42.82
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	28,468,780,400.00	12,190,513,534.00	42.82
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	141,535,781,040.00	62,812,546,498.00	44.38
Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	79,462,004,360.00	32,674,262,248.00	41.12

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	62,073,776,680.00	30,138,284,250.00	48.55
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	73,719,662.00	3.24
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	73,719,662.00	3.87
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0.00	0.00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	19,429,740,600.00	254,191,300.00	1.31
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi	18,811,850,000.00	62,633,900.00	0.33
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	169,500,000.00	0.00	0.00
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	173,852,600.00	71,482,400.00	41.12
Program Pengelolaan Persampahan	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Penanganan Sampah Di Tpa/Tpst Regional	15,159,795,300.00	2,447,690,949.00	16.15
Program Pengelolaan Pelayaran	2,094,285,150.00	254,753,885.00	12.16
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah	24,806,700.00	20,986,700.00	84.60

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Provinsi, Dan Pelabuhan Internasional			
Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	45,547,200.00	32,633,800.00	71.65
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Dan Depo Peti Kemas	25,409,650.00	14,929,650.00	58.76
Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (Dlkr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (Dlkp) Pelabuhan Pengumpan Regional	1,400,000,000.00	0.00	0.00
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	598,521,600.00	186,203,735.00	31.11

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.12 Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional diukur dengan Indikator Kinerja Rasio Konektivitas. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.102

Realisasi Kinerja Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100)	10 (10=6/5*100)	11 (11=6/7*100)	12 (12=6/8*100)
Rasio konektivitas	%	82	95	95	83,1	96	NA	101,34	87,47	86,56	NA

Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2024-2025, diolah

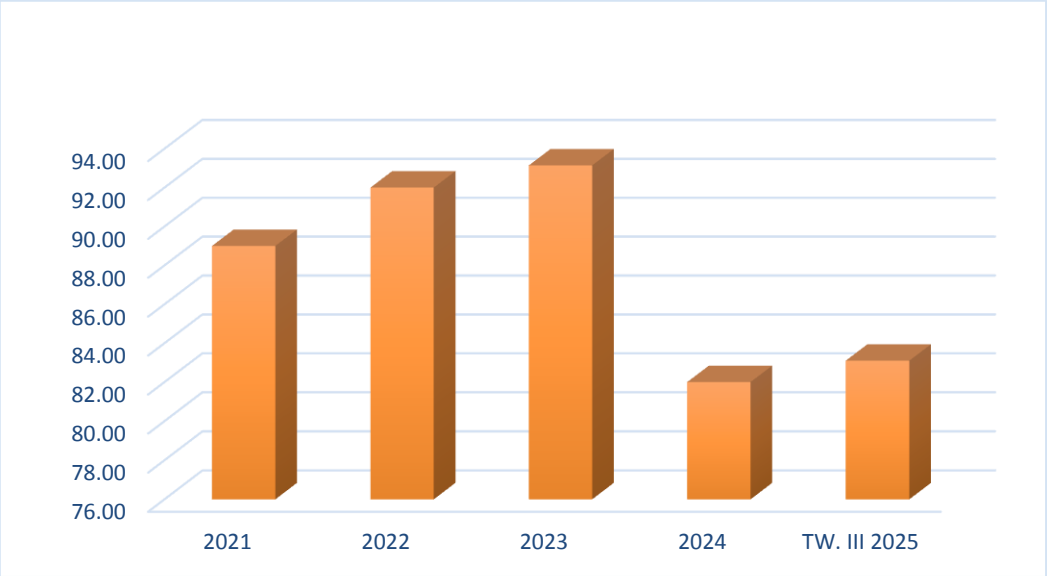
1. **Perbandingan Target (Pemutakhiran) dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Bila dibandingkan antara realisasi dan target Rasio Konektivitas Tahun 2025, terdapat deviasi -11,9 poin. Capaian realisasi sebesar 87,47% (tidak mencapai target).

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja Rasio Konektivitas Provinsi tahun 2025 sampai dengan Triwulan III (83,1), bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (82%), naik sebesar 1,1 poin. Capaian realisasi sebesar 101,34% (melampaui target). Rasio konektivitas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Capaian tertinggi pada tahun 2023 dan terendah di tahun 2024. Gambaran perkembangan rasio konetivitas selama tahun 2021-2025 sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 3.18
Grafik Perkembangan Realisasi Rasio Konektivitas Provinsi NTB
Tahun 2021-2025 (TW. III 2025)



Sumber: Dinas Perhubungan 2026

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD**
   Bila dibandingkan dengan target akhir Rasio Konektivitas dalam RPD 2024-2026, terdapat deviasi -12,9 poin. Capaian realisasi sebesar 86,56% (belum mencapai target).

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. **Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Realisasi Rasio Konektivitas 2025 sampai dengan Triwulan III yang dibandingkan dengan target 2025, target RPD 2024-2026, menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
   Indikator Rasio Konektivitas merupakan akumulasi dari tingkat pemenuhan moda transportasi darat dan pemenuhan lintasan transportasi laut di wilayah Provinsi NTB. Konektivitas Darat terdiri dari 106 trayek AKDP, dan untuk konektivitas laut terdiri dari 21 lintasan dengan 1 lintasan tambahan Pemenang - Nusa Penida, sebagaimana rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.103
Konektivitas Darat

No	Jenis Rute	Rute	Kebutuhan Jumlah Armada (K)	Eksisting
1	2	3	4	5
1	AKDP-2	Terminal Mandalika - Pancor - PP	8	13
2	AKDP-3	Terminal Mandalika - Labuhan Lombok - PP	6	3
3	AKDP-6	Terminal Mandalika - Masbagek - Lab. Lombok - Sembalun - PP	6	0
4	AKDP-8	Terminal Mandalika - Taliwang - PP	6	8
5	AKDP-9	Terminal Mandalika -Sumbawa Besar - PP	18	30
6	AKDP-11	Terminal Mandalika - Sumbawa Besar - Lunyuk - PP	6	6
7	AKDP-13	Terminal Mandalika - Empang - pp	6	6
8	AKDP-14	Terminal Mandalika - Praya - Empang - PP	6	0
9	AKDP-16	Terminal Mandalika - Dompu - PP	10	17
10	AKDP-17	Terminal Mandalika - Bima - PP	53	67
11	AKDP-21	Lembar - Terminal Mandalika - Lab. Lombok - PP	6	1
12	AKDP-23	Lembar - Terminal Mandalika - Pancor - PP	5	0
13	AKDP-29	Sumbawa Besar - Ginte Dompu - Bima - PP	10	26
14	AKDP-32	Calabai - Cabang Soriutu - Praya - Terminal Mandalika - PP	7	2
15	AKDP-33	Calabai - Cabang Soriutu - Terminal Mandalika - PP	7	0
16	AKDP-34	Bima - Ginte Dompu - Kore - PP	7	4
17	AKDP-35	Bima - Telabiu - Ginte Dompu - PP	5	0
18	AKDP-36	Sape - Bima - Ginte Dompu - PP	5	2
19	AKDP-38	Bima - Ginte Dompu - Lab. Kenanga - PP	5	2
20	AKDP-39	Bima - Ginte Dompu - Kilo - PP	5	3
21	AKDP-40	Tente - Ginte Dompu - Kore - Bima - PP	5	3
22	AKDP-53	Tonggo - Jereweh - Taliwang - Praya - Terminal Mandalika - PP	5	3
23	AKDP-54	Taliwang - Alas - Sumbawa Besar - PP	1	0
24	AKDP-59	Bima - Dompu - Hu'u - PP	1	2

25	AKDP-61	Sembalun - Terminal Mandalika - PP	6	1
26	AKDP-62	Pelampang - Sumbawa Besar - Utan - Terminal Mandalika - PP	6	1
27	AKDP-63	Terminal Mandalika - Labuhan Lombok - Sembalun - PP	6	3
28	AKDP-64	Pelampang - Sumbawa - Terminal Mandalika - PP	6	1
29	AKDP-65	Terminal Mandalika - Tanjung - Bayan - PP	12	1
30	AKDP-66	Pelampang - Sumbawa - Praya - Terminal Mandalika - PP	6	0
31	AKDP-67	Terminal Mandalika - Praya - Kopang - Sumbawa - PP	6	1
32	AKDP-68	Empang - Sumbawa - Mataram - PP	6	2
33	AKDP-69	Empang - Lape - Sumbawa - Praya - Terminal Mandalika PP	6	0
34	AKDP-70	Empang - Pelampang - Terminal Mandalika PP	6	0
35	AKDP-71	Kempo - Dompu - Bima PP	10	1
36	AKDP-72	Kesi - Dompu - Bima PP	7	2
37	AKDP-73	Labuhan Lombok - Masbagek - Terminal Mandalika PP	6	0
38	AKDP-74	Lunyuk - Sumbawa - Praya - Terminal Mandalika PP	6	2
39	AKDP-75	Sumbawa - Maluk PP	1	6
40	AKDP-76	Sekongkang - Maluk - Taliwang - Pototano - Alas - Sumbawa Besar PP	1	2
41	AKDP-77	Sekongkang - Taliwang - Terminal Mandalika PP	5	6
42	AKDP-78	Sekongkang - Taliwang - Pototano - Alas PP	1	0
43	AKDP-79	Sekongkang - Taliwang - Pototano - Alas - Sumbawa Besar PP	1	1
44	AKDP-80	Sekongkang - Taliwang - Sumbawa abesar PP	1	1
45	AKDP-81	Sumbawa - Tano - Taliwang - Maluk PP	1	1
46	AKDP-82	Tonggo - Jereweh - Taliwang - Poto Tano - Alas - Sumbawa PP	1	3
47	AKDP-83	Tonggo - Taliwang - Pototano - Sumbawa PP	1	4
48	AKDP-84	Tonggo - Taliwang - Sumbawa PP	1	1
49	AKDP-85	Santong - Tanjung - Gunungsari - Terminal Mandalika PP	14	0
50	AKDP-86	Sumbawa Besar - Alas - Tano - Taliwang PP	1	0

51	AKDP-87	Dompu - Sumbawa - Mataram PP	6	5
52	AKDP-88	Bayan - Tanjung - Gunungsari - Terminal Mandalika PP	18	1
53	AKDP-89	Bayan - Tanjung - Terminal Mandalika PP	18	0
54	AKDP-90	Bima - Dompu - Terminal Mandalika PP	29	24
55	AKDP-91	Bima - Dompu - Calabai - Lb. Kenanga PP	5	1
56	AKDP-92	Sambelia - Lb. Lombok - Terminal Mandalika PP	5	0
57	AKDP-93	Sambelia - Kayangan - Terminal Mandalika - Lembar PP	5	0
58	AKDP-94	Sambelia - Terminal Mandalika PP	5	0
59	AKDP-95	Bima - Dompu - Lb. Kenanga (Melalui Kempo - Doropeti - Calabai) PP	5	0
60	AKDP-96	Bima - Dompu - Sumbawa Besar PP	10	16
61	AKDP-97	Calabai - Dompu - Sumbawa Besar - Praya - Terminal Mandalika PP	7	0
62	AKDP-98	Calabai - Dompu - Bima PP	5	3
63	AKDP-99	Calabai - Manggalewa - Praya - Terminal Mandalika PP	7	0
64	AKDP-100	Sumbawa - Utan - Terminal Mandalika PP	6	1
65	AKDP-101	Sumbawa - Alas - Pototano - Taliwang - Sekotong PP	1	0
66	AKDP-102	Taliwang - Maluk - Sekongkang - Terminal Mandalika pp	5	1
67	AKDP-103	Taliwang - Sumbawa Besar PP	1	1
68	AKDP-104	Taliwang - Seteluk - Pototano - Utan - Sumbawa PP	1	0
69	AKDP-105	Tanjung - Gunungsari - Terminal Mandalika PP	12	0
70	AKDP-106	Tente - Dompu - Calabai PP	1	0
71	AKDP-107	Tente - Dompu - Sumbawa Besar PP	2	0
72	AKDP-108	Tonggo - Sekongkang - Maluk - Jereweh - Taliwang - Pototano - Sumbawa Besar PP	1	0
73	AKDP-109	Sape - Bima - Sumbawa PP	7	0
74	AKDP-110	Terminal Mandalika - Taliwang - Jereweh - Maluk - Tonggo PP	6	0
75	AKDP-111	Terminal Mandalika - Taliwang - Maluk - Tonggo PP	6	0
76	AKDP-112	Sumbawa - Alas - Pototano - Taliwang PP	1	0

77	AKDP-113	Alas - Pototano - Taliwang - Maluk - Sekongkang PP	1	0
78	AKDP-114	Bima - Dompu PP	5	2
79	AKDP-115	Bima - Sumbawa Besar PP	7	2
80	AKDP-116	Bima - Tente - Dompu - Hu'u PP	5	5
81	AKDP- 117	Calabai - Bima - Dompu PP	5	1
82	AKDP-118	Jereweh - Taliwang - Pototano - Labuhan Lombok - Terminal Mandalika PP	6	1
83	AKDP-119	Labangka - Plampang - Sumbawa - Praya - Terminal Mandalika PP	7	0
84	AKDP-120	Labangka - Sumbawa - Utan - Rhe - Terminal Mandalika PP	7	0
85	AKDP-121	Maluk - Taliwang - Terminal Mandalika PP	6	3
86	AKDP-122	Maluk - Taliwang - Pototano - Alas - Sumbawa Besar PP	1	0
87	AKDP-123	Mataram - Jereweh - Maluk - Sekongkang - Tonggo PP	6	0
88	AKDP-124	Mataram - Praya - Labangka PP	7	4
89	AKDP-125	Mataram - Sumbawa Besar - Dompu PP	7	5
90	AKDP-126	Mataram - Pelampang - Labangka PP	7	0
91	AKDP-127	Mataram - Bangkobangko PP	1	1
92	AKDP-128	Mataram - Labangka PP	7	2
93	AKDP-129	Mataram - Leweng PP	7	4
94	AKDP-130	Mataram - Lunyuk PP	7	4
95	AKDP-131	Mataram - Mata PP	7	4
96	AKDP-132	Mataram - Moyo PP	7	3
97		Mataram - pesugulan PP	non aktif	-
98		Mataram - sampar goal PP	non aktif	-
99		Mataram - santong PP	non aktif	-
100		Mataram - praya - awang melalui ganti PP	non aktif	-
101	AKDP-134	Mataram - Praya - Sumbawa Besar - Labangka PP	7	0
102	AKDP-137	Mataram - Sumbawa Besar - Ropang PP	7	2
103	AKDP-138	Mataram - Talonang PP	6	3

104	AKDP-140	Mataram - Sumbawa - Lendanggoar - Orong Telu PP	7	0
105	AKDP-141	Pelabuhan Lembar - Terminal Mandalika PP	1	0
106	AKDP-142	Sumbawa - Sempar Goal PP	6	1

Sumber: Dinas Perhubungan 2026

Tabel 3.104
Konektivitas Laut

No	Lintasan	Keterangan
1	2	3
1	Lembar – Tanjung Perak (Jawa Timur)	Eksisting
2	Lembar – Jangkar (Jawa Timur)	Eksisting
3	Lembar – Padangbai (Bali)	Eksisting
4	Lembar – Waingapu (NTT)	Eksisting
5	Gili Mas – Tanjung Wangi (Jawa Timur)	Eksisting
6	Gili Mas – Luar Negeri (*Cruise*)	Eksisting
7	Pemenang – 3 Gili (Trawangan, Meno, Air)	Eksisting
8	Pemenang – Nusa Penida (Bali)	Baru
9	Senggigi – Padangbai (Bali)	Eksisting
10	Senggigi – Gili Trawangan	Eksisting
11	Kayangan – Poto Tano	Eksisting
12	Lab. Lombok – Benete	Eksisting
13	Badas – Moyo – Medang - Sibotok	Eksisting
14	Bima – Makasar (Sulawesi)	Eksisting
15	Sape – Lab. Bajo (NTT)	Eksisting
16	Sape – Waikelo (NTT)	Eksisting
17	Sape – Waingapu (NTT)	Eksisting
18	Bima – Reo – Jampea – Makassar – Jampea – Reo – Bima – Waikelo – Ende - Pulau Raijua – Sabu/Seba – Pulau Raijua – Ende – Waikelo – Bima	Eksisting
19	Bima – Carik – Celukan Bawang – Sepekan – Kangean – Kalianget – Surabaya – Kalianget – Kangean – Sepekan – Celukan Bawang – Carik – Bima	Eksisting
20	Bima – Calabai – Labuhan Lombok – Sailus – Sapuka – Balobaloang Besar – Makassar – Balobaloang Besar – Sapuka – Sailus – Labuhan Lombok – Calabai – Bima	Eksisting
21	Bima – Labuhan Bajo – Bonerate – Selayar – Bau Bau – Selayar – Bonerate – Labuhan bajo – Bima	Eksisting

Sumber: Dinas Perhubungan 2026

Meskipun rasio konektivitas pada Tahun 2025 ini tidak tercapai akan tetapi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 101,34% atau 1,1 poin melebihi capaian 2024. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

a. Pada sektor transportasi darat terjadi ketidak seimbangan pemenuhan trayek, dimana ada sebagian trayek melebihi dan sebagian trayek belum terpenuhi bahkan ada trayek yang belum terisi. Kondisi ini menyebabkan rata-rata tingkat pemenuhan moda transportasi di bawah 50%
b. Pada sektor transportasi laut masih terdapat kekurangan 5 lintasan dibandingkan dengan kebutuhan yang berpotensi menimbulkan keterbatasan akses antar pulau. Oleh karena itu, pengembangan lintasan baru perlu di prioritaskan pada rute strategis yang mampu menghubungkan daerah terpencil serta mendukung konektivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi di wilayah NTB.
c. Belum memadainya fasilitas pengelolaan pelabuhan pengumpan regional oleh pemerintah provinsi
d. Fasilitas utama dan pendukung setiap terminal belum sesuai dengan Standar pelayanan terminal
e. Belum terlaksananya kegiatan untuk penilaian Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU)
f. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi
g. Pengawasan dan penindakan/pemberian sanksi pada angkutan di kawasan terminal belum maksimal dilaksanakan karena tidak ada PPNS dibidang LLAJ

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan Rasio Konektivitas antara lain:

a. Pemenuhan armada pada trayek yang belum terisi baik sebagian maupun belum terisi sama sekali, jika diperlukan pengaturan kembali armada yang sudah terisi pada trayek yang melebihi quota;
b. Menambah lintasan transportasi laut pada rute strategis, khususnya yang menghubungkan daerah terpencil, mendukung konektivitas pariwisata, serta meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah.
c. Melaksanakan sosialisasi/kampanye keselamatan kepada masyarakat terutama kepada pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas terbanyak di NTB tentang pentingya keselamatan berkendara di jalan raya;
d. Optimalisasi pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Ruas Provinsi;
e. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia pada Dinas Perhubungan terutama PPNS di Bidang LLAJ dan Penguji SPM untuk Kapal Penyeberangan agar pengawasan/penindakan/pemberian sanksi dapat dilaksanakan secara optimal sehinggga memaksimalkan capaian kinerja pada masing masing kegiatan;
f. Menyusun Pedoman Teknis pelaksanaan dan Pembinaan SMK PAU serta Sosialisasi kepada perusahaan angkutan umum terkai kewajiban Penyusunan SMK PAU
g. Evaluasi dan Pemenuhan standar pelayanan terminal;

h. Pemetaan dan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
i. Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan;

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah sebesar Rp.145.556.028.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp12.449.882.423,00. Efisiensi anggaran sebesar 90,22%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.105
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Konektivitas

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/ Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Rasio konektivitas	145.556.028.000,00	12.449.882.423,00	95	83,1	149.818.079,70	1.532.168.715,79	0,10	0,90	90,22

Sumber: Bappeda Provinsi NTB (diolah)

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Rasio Konektivitas antara lain:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (realisasi anggaran 9,67%) dengan kegiatan antara lain: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Program Pengelolaan Pelayaran (realisasi anggaran 1,31%) dengan kegiatan antara lain: Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional, Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas, Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.106
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Konektivitas

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19,429,740,600.00	254,191,300.00	1.31
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18,811,850,000.00	62,633,900.00	0.33
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	169,500,000.00	0.00	0.00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	173,852,600.00	71,482,400.00	41.12

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.1.13 Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor

Keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Inovasi Mendukung Peningkatan Kinerja Industri dan Pengembangan Ekspor diukur dengan Indeks Inovasi Daerah (IID). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kriteria inovasi daerah meliputi: mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dapat direplikasi. Realisasi Indeks Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan III 2025 belum dirilis, sehingga nilainya masih menggunakan angka sementara, yaitu nilai tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten. Dan Kota Tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTB sebesar 63,40 (sangat inovatif). Provinsi NTB termasuk salah satu Provinsi dari 10 Provinsi yang sangat inovatif. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.107
Realisasi Kinerja Meningkatnya Kapabilitas Inovasi Mendukung Peningkatan Kinerja Industri dan Pengembangan Ekspor Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025			Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)	Capaian s.d Triwulan III Tahun 2025 terhadap 3, 5, 7, 8 (%)			
			Target Dalam RPD 2024-2026	Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Pemutakhiran)	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2026)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (9=6/3*100)	10 (10=6/5*100)	11 (11=6/7*100)	12 (12=6/8*100)
IID	point	63,40	79	70	63,40*	80	73	100	90,57	79,25	86,85

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah
*Keterangan: * tahun 2024, karena realisasi sampai dengan TW III 2025 tidak ada (rilis capaian 2025 dari Kemendagri pada bulan Desember 2025)*

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target (Pemutakhiran) dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi dan target indeks inovasi daerah 2025, terdapat deviasi -6,6 poin. Capaian realisasi sebesar 90,57% (tidak mencapai target).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja Indeks Inovasi Daerah Provinsi tahun 2025 sampai dengan Triwulan III (63,40), bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (75,37), turun sebesar 11,97 poin. Capaian realisasi sebesar 84,12% (tidak mencapai target). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, karena realisasi masih menggunakan nilai tahun 2024, maka capaiannya sebesar 100% (mencapai target).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD 2024-2026

Bila dibandingkan dengan target akhir indeks inovasi daerah dalam RPD 2024-2026, terdapat deviasi -16,6 poin. Capaian realisasi sebesar 79,25% (belum mencapai target).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (jika ada)

Bila dibandingkan dengan target nasional (73), terdapat deviasi -9,6 poin. Capaian realisasi sebesar 86,85% (tidak mencapai target).

5. Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Realisasi indeks inovasi daerah 2025 sampai dengan Triwulan III yang dibandingkan dengan target 2025, target RPD 2024-2026, dan target nasional menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Ketidaktercapaian target disebabkan karena belum optimalnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah daerah, akademisi/perguruan tinggi, pebisnis/UMKM, komunitas, dan media.

Pada tahun 2024, Provinsi NTB (NTB) berhasil mengidentifikasi sebanyak 211 inovasi yang berasal dari berbagai inovator, dan sebanyak 141 inovasi memenuhi syarat dan terkirim ke Kemendagri yang terdiri dari inovasi digital sebanyak 28 inovasi dan non digital sebanyak 113 inovasi.

Inovasi sebanyak 211 sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN):

   Terdapat 13 inovasi yang diusulkan oleh ASN, pada umumnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam lingkup pemerintahan daerah.

b. Kepala Daerah:

   Terdapat 14 inovasi Kepala Daerah yang berfokus pada pelatihan, kebijakan baru, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

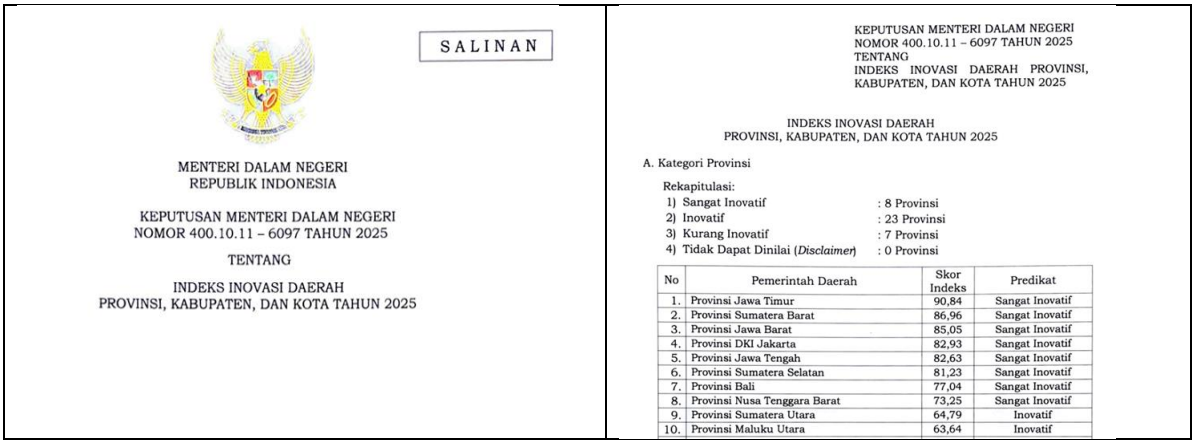
c. Masyarakat:

   Terdapat 43 inovasi yang berasal dari partisipasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan publik serta cara-cara baru dalam meningkatkan kualitas kehidupan bersama.

d. Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

   Terdapat 141 inovasi OPD yang berperan penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan serta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan ruang lingkup aspek pelayanan publik, administrasi, serta pengelolaan informasi.

Langkah yang sudah diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah adanya melalui optimalisasi sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, media dan masyarakat (pentahelix), pelaksanaan forum diseminasi hasil riset dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara berkala, dan pengembangan hasil riset yang bersumber dari perguruan tinggi disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Strategi ini dinilai efektif terbukti pada bulan Desember 2025, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, nilai IID Provinsi NTB sebesar 73,25 (sangat inovatif). Angka ini naik 9,85 poin dari tahun 2024 dan menempatkan Provinsi NTB sebagai salah satu dari 8 Provinsi yang masuk dalam kategori sangat inovatif.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6097 TAHUN 2025

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6097 TAHUN 2025
TENTANG
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

A. Kategori Provinsi

Rekapitulasi:
1) Sangat Inovatif : 8 Provinsi
2) Inovatif : 23 Provinsi
3) Kurang Inovatif : 7 Provinsi
4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 0 Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Provinsi Jawa Timur	90,84	Sangat Inovatif
2.	Provinsi Sumatera Barat	86,96	Sangat Inovatif
3.	Provinsi Jawa Barat	85,05	Sangat Inovatif
4.	Provinsi DKI Jakarta	82,93	Sangat Inovatif
5.	Provinsi Jawa Tengah	82,63	Sangat Inovatif
6.	Provinsi Sumatera Selatan	81,23	Sangat Inovatif
7.	Provinsi Bali	77,04	Sangat Inovatif
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	73,25	Sangat Inovatif
9.	Provinsi Sumatera Utara	64,79	Inovatif
10.	Provinsi Maluku Utara	63,64	Inovatif

Sumber: Kemendagri 2025

Judul riset/inovasi pada tahun 2025 yang mendukung program unggulan sebagai berikut:

1. Studi Pengembangan SDM Menuju NTB Emas 2024
2. Optimalisasi Pemanfaatan Produk Olahan Berbasis Kelor dan Rumput Laut Untuk Mencegah Stunting dan Mendukung Program MBG
3. Hilirisasi Kelor dan Rumput Laut untuk Mencegah Stunting dan Mendukung Program Makan Gizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Intervensi Sosial Berbasis Komunitas Dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural dan Meningkatkan Status Sosial di Kawasan Perdesaan di NTB
5. Penelitian Hilirisasi Nira Aren Menjadi Nira Segar dan Sirup Aren Terkemas
6. Implementasi Produk Turunan Nira Aren Untuk Mendukung Produk Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu NTB
7. Riset Kultur Jaringan Kurma
8. Riset Joki CIlik di Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Tradisi Merarik Suku Sasak Sebagai Penyangga Pariwisata NTB
10. Ulama Lombok,Genealogi Keilmuan & Tariqah : Menuju Pariwisata Mendunia
11. Riset Standarisasi Peresean di NTB
12. Penelitian dan Pengembangan Bricket Biomassa
13. Pengembangan Pyrolisis Portabel
14. Penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek (RIPJ-PIP) Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029
15. Penyusunan Review AMDAL
16. Integritas Birokrasi dan Resiko Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Unggulan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah sebesar Rp301.379.184.990,00. Realisasi anggaran sebesar Rp78.163.290.605,00.

Efisiensi anggaran sebesar 71,36%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Target adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Pennyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (realisasi 75,32%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran. Sedangkan Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian target adalah:

a. Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggaran 22,28%) dengan kegiatan:
    1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (realisasi anggaran 60,27%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (realisasi anggaran 15,72%) dengan kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (realisasi 0%) dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
e. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (realisasi anggaran 7,02%) dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi
    2. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
    3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi
f. Program Pengelolaan Pelayaran (realisasi anggaran 12,16%) dengan kegiatan:
    1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional.
    2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.
4. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (realisasi anggaran 44,38%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
h. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 3,24%) dengan kegiatan:
   1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
   2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
i. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (realisasi anggaran 8,16%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
   2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
   3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
j. Program Penyelenggaraan Jalan (realisasi anggaran 9,67%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
k. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (realisasi anggaran 1,31%) dengan kegiatan:
   1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
   2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
   3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Tabel 3.108

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
IID	301.379.184.990,00	78.163.290.605,00	70	63,40	1.232.859.473,26	4.305.416.928,43	0,29	0,71	71,36

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

a. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.109

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Inovasi Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penanggulangan Bencana	2,354,640,549.00	524,512,786.00	22.28
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	830,956,549.00	31,749,600.00	3.82
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1,343,034,000.00	447,396,986.00	33.31
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	180,650,000.00	45,366,200.00	25.11
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2,265,396,400.00	1,365,394,400.00	60.27
Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,265,396,400.00	1,365,394,400.00	60.27
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	211,000,000.00	158,931,988.00	75.32
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	211,000,000.00	158,931,988.00	75.32
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1,674,294,316.00	263,129,908.00	15.72

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100,000,000.00	0.00	0.00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	100,000,000.00	0.00	0.00
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	854,994,985.00	59,985,905.00	7.02
Pengelolaan Penyediaan Biomassa Dan/Atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi	329,099,265.00	14,873,375.00	4.52
Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	492,873,195.00	19,822,925.00	4.02
Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi	33,022,525.00	25,289,605.00	76.58
Program Pengelolaan Pelayaran	2,094,285,150.00	254,753,885.00	12.16
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, Dan Pelabuhan Internasional	24,806,700.00	20,986,700.00	84.60
Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	45,547,200.00	32,633,800.00	71.65
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Dan Depo Peti Kemas	25,409,650.00	14,929,650.00	58.76

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1,400,000,000.00	0.00	0.00
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	598,521,600.00	186,203,735.00	31.11
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	141,535,781,040.00	62,812,546,498.00	44.38
Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	79,462,004,360.00	32,674,262,248.00	41.12
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	62,073,776,680.00	30,138,284,250.00	48.55
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	73,719,662.00	3.24
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	73,719,662.00	3.87
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,454,787,100.00	200,433,150.00	8.16
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	83,200,000.00	22,710,500.00	27.30
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2,311,287,100.00	136,362,650.00	5.90
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	52,800,000.00	33,860,000.00	64.13
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	126,126,287,400.00	12,195,691,123.00	9.67
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19,429,740,600.00	254,191,300.00	1.31
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18,811,850,000.00	62,633,900.00	0.33

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	169,500,000.00	0.00	0.00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	173,852,600.00	71,482,400.00	41.12

Sumber: BKAD NTB, 2025

3.1.2 RPJMD

3.1.2.1 Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB

Sasaran strategis *Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB* diarahkan untuk memastikan seluruh penduduk di NTB memperoleh kesempatan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan tanpa kesenjangan wilayah maupun sosial ekonomi. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil pembelajaran dan daya saing sumber daya manusia. Pengukuran capaian sasaran ini tercermin melalui indikator kinerja utama, yaitu peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS), proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, serta persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan dalam memperluas partisipasi, meningkatkan capaian akademik, dan mendorong pemerataan mutu pendidikan antarwilayah di NTB. Capaian sasaran strategis dalam lima indikator ini seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.110
Realisasi Kinerja Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	tahun	8,5	8,6-8,63	8,87	9,11-9,12	-	104,35	103,14	97,36	-
Harapan Lama Sekolah	tahun	13,98	14,1-14,13	13,99	14,40-14,42	-	100,07	99	97,15	-
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,44	10,02	11,59	10,56	-	122,77	115,67	109,75	-

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:										
a) Literasi Membaca	%	NA	10	NA	NA		NA	NA	NA	
b) Numerasi	%	NA	0 - 10	NA	NA		NA	NA	NA	
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:						-				
a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	NA	NA		NA	NA	NA	
b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	NA	NA		NA	NA	NA	

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Sasaran RLS

Indikator RLS menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2025, perhitungan capaian RLS menjadi lebih spesifik dengan menghitung rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, sedangkan metode lama menghitung rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun keatas.

Perubahan metodologi penghitungan RLS dari penduduk usia 25 tahun ke atas menjadi usia 15 tahun ke atas mencerminkan upaya penyempurnaan indikator agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan pendidikan. Jika sebelumnya RLS 25 tahun keatas menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang karena merepresentasikan penduduk yang telah relatif menyelesaikan pendidikan formalnya, maka RLS 15 tahun ke atas memberikan potret yang lebih aktual dengan memasukkan kelompok usia muda yang masih atau baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya sensitivitas indikator terhadap kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih relevan untuk evaluasi kinerja pembangunan pendidikan.

a. Anaisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

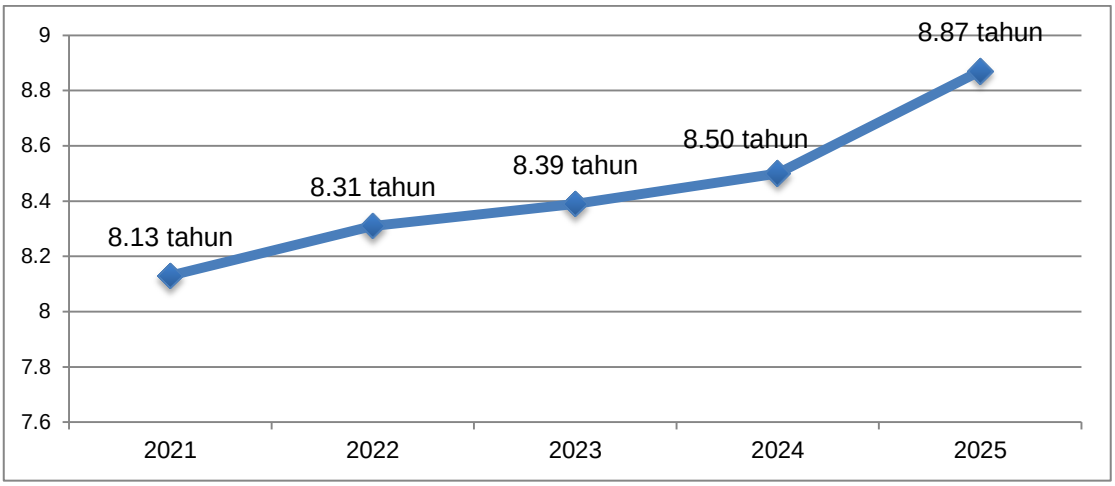
RLS penduduk usia di atas 15 tahun Provinsi NTB adalah 8,87 tahun dan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 8,6-8,63 tahun pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah Provinsi NTB tahun 2025-2029. Capaian atas target sebesar 103,14%. Link bukti dukung https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyOSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi.html

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian RLS penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 8,87 tahun, maka terdapat kenaikan sebesar 0,34 tahun dalam capaian RLS Provinsi NTB. Hal ini menunjukan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi NTB rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 8,87 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP pada tahun 2025.

Pada periode tahun 2021–2025 terdapat tren kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, seperti pada grafik di bawah ini. Hal ini menunjukan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB, sehingga terdapat kenaikan RLS pada setiap tahunnya pada kurun waktu tahun 2021 -2025.

Grafik 3.19
Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia
di Atas 15 Tahun Provinsi NTB



Sumber: BPS NTB 2021-2025, diolah

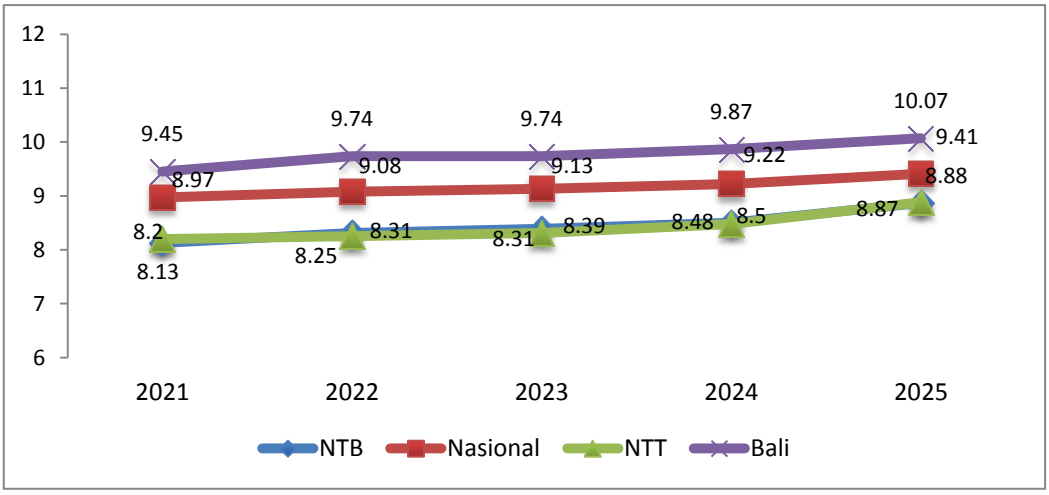
3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**

   Realisasi RLS penduduk usia di atas 15 tahun tahun 2025 adalah 8,87 tahun atau mencapai 97,36% dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,11-9,12 tahun.

4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target nasional**

   Tidak terdapat target atau standar nasional yang harus dicapai oleh setiap provinsi. Namun demikian, capaian RLS penduduk usia di atas 15 tahun Provinsi NTB tetap dapat dianalisis melalui perbandingan dengan capaian nasional, dan Provinsi lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Grafik 3.20
Perbandingan RLS Provinsi NTB dengan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS NTB 2021-2025, diolah

Capaian RLS penduduk usia di atas 15 tahun Provinsi NTB selalu menunjukan kenaikan pada rentang waktu tahun 2021-2025, namun capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2025, capaian Provinsi NTB memiliki selisih 0,54 tahun dibandingkan capaian nasional tahun yaitu 9,07 tahun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, capaian Provinsi NTB tertinggal cukup jauh, karena capaian RLS Provinsi Bali pun melampaui capaian nasional. Capaian Provinsi NTT hampir setara dengan capaian Provinsi NTB pada kurun waktu 2021-2025.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan capaian indicator RLS agar target RLS penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2025 dapat tercapai. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan menerapkan pendidikan inklusif sehingga pemerataan pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, selain itu memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkan sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan juga telah berkontribusi terhadap capaian RLS di Provinsi NTB. Maraknya *bullying* di lingkungan sekolah saat ini telah mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan dukungan sosial dan psikologis melalui bimbingan *konseling* dan *mentorship*.

Keberadaan kurikulum juga harus relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja untuk siswa dari sekolah kejuruan khususnya. Pemerataan kualitas dan akses pendidikan pun tidak terlepas dari pemerataan dan pemenuhan tenaga pendidik.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator RLS penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2025 adalah sebesar Rp471.153.641.118,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp445.915.108.379,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 8,24%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.111
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator RLS Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
RLS Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	471.153.641.118	445.915.108.379	8,6	8,87	50.272.278.283,95	54.785.307.106,74	0,92	0,08	8,24

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator pada sasaran strategis peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Salah satu program utama adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Peningkatan capaian APK pada jenjang pendidikan menengah memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan RLS penduduk usia 15 tahun ke atas serta Harapan Lama Sekolah. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada penurunan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan, penguatan kapasitas pendidik, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Selain itu, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator persentase guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di satuan pendidikan. Kegiatan dalam program ini difokuskan pada pemerataan distribusi guru antarwilayah serta pencapaian rasio guru terhadap peserta didik yang lebih proporsional. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan capaian kompetensi peserta didik. Akan tetapi, realisasi anggaran dari program ini hanya mencapai 69,64%, sehingga program ini kurang efektif dalam mendukung pencapaian kinerja dan mempengaruhi secara langsung pada capaian indicator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan indikator persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pengendalian perizinan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan yang beroperasi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan. Melalui pengendalian perizinan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan tetap terjaga. Hal ini menjadi penting dalam mendukung tercapainya standar kompetensi minimum peserta didik, khususnya dalam aspek literasi membaca dan numerasi.

Program dan kegiatan pendukung yang cukup efektif dalam pencapaian RLS Penduduk Usia di Atas 15 Tahun tahun 2025 ini adalah:

a. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 97,78%), dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
    2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
    3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 97,96%), dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Sedangkan program dan kegiatan pendukung yang belum efektif dalam pencapaian RLS Penduduk Usia di Atas 15 Tahun tahun 2025 ini adalah Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran 69,64%), dengan kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.112
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator RLS

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	409,187,487,819.60	97.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	209,806,044,576.80	97.87
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	176646604110.80	97.46
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	22,734,839,132.00	99.49
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	165,559,820.00	97.96
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	134,000,000.00	130,885,500.00	97.68
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	35,000,000.00	34,674,320.00	99.07

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS)

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam analisis pembangunan, indikator RLS sering dikaitkan dengan HLS untuk melihat kesenjangan antara capaian pendidikan saat ini dan peluang pendidikan generasi selanjutnya. Capaian HLS NTB Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2025-2029 dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 14,1-14,13 tahun, capaian HLS Provinsi NTB mencapai 13,99 tahun atau 99,22% terhadap target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa, capaian tersebut masih berada pada jalur (on the track) untuk mencapai target.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian HLS ini menunjukan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu dan di Provinsi NTB artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah pada tahun 2025 memiliki peluang untuk menempuh pendidikan formal selama 13,99 tahun atau setara Diploma III. Pada tahun 2025, HLS NTB tercatat sebesar 13,99 tahun, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Kenaikan HLS Provinsi NTB pada periode tahun 2021-2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.113
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB
Tahun 2021-2025

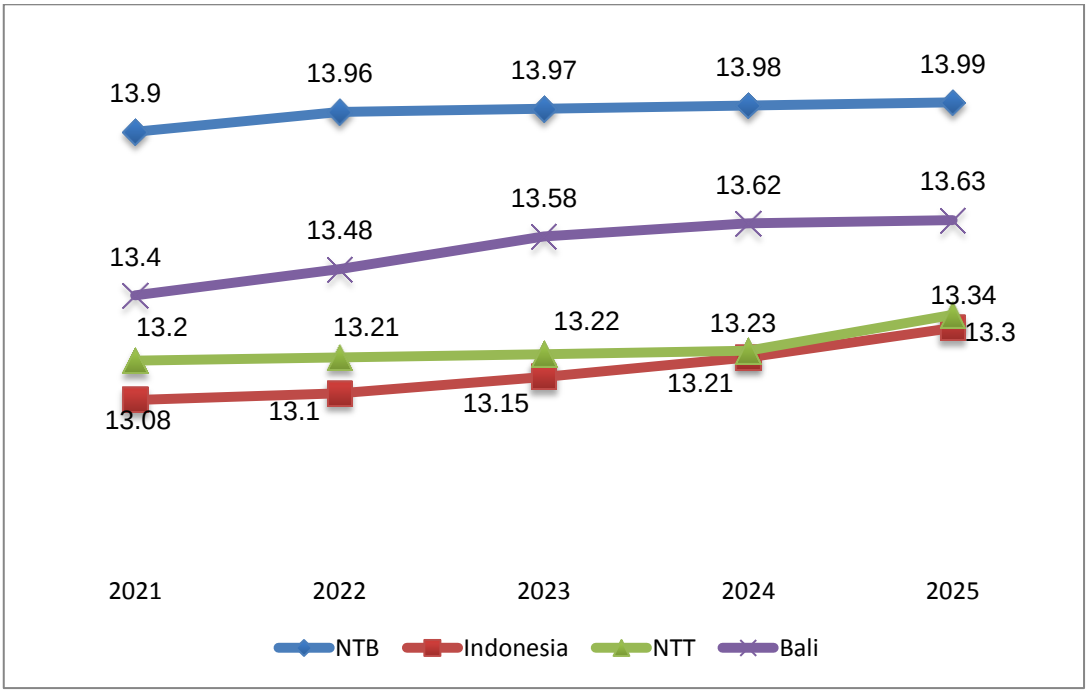
No.	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Lombok Barat	13,95	13,96	13,98	13,99	14,17
2.	Lombok Tengah	13,85	13,86	13,87	13,89	13,90
3.	Lombok Timur	13,90	14,05	14,06	14,07	14,08
4.	Sumbawa	13,07	13,23	13,24	13,34	13,35
5.	Dompu	13,53	13,69	13,83	13,84	14,01
6.	Bima	13,39	13,58	13,65	13,66	13,67
7.	Sumbawa Barat	13,64	13,65	13,66	13,68	13,84
8.	Lombok Utara	12,76	12,,77	13,01	13,02	13,16
9.	Kota Mataram	15,64	15,65	15,67	15,68	15,69
10.	Kota Bima	15,04	15,05	15,06	15,08	15,21
Provinsi NTB		13,90	13,96	13,97	13,98	13,99
Indonesia		13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Sumber: BPS NTB 2025

Sejalan dengan RLS, HLS pun masih menunjukan ketimpangan antar wilayah, yang tercermin dari capaian HLS Kota Mataram sebesar 15,69 tahun, jauh di atas capaian Provinsi maupun Nasional, sementara itu Kabupaten Lombok Utara tertinggal dengan capaian 13,16 tahun di tahun 2025 dan ini terjadi selama periode tahun 2021-2025.

3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**
   Realisasi HLS tahun 2025 adalah 13,99 tahun atau mencapai 97,15 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 14,40-14,42 tahun.
4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target nasional**
   HLS Provinsi NTB tahun 2025 mencapai 13,99 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 13,30 tahun, kondisi ini secara konsisten menempatkan HLS NTB diatas rata-rata nasional selama periode 2021-2025. Selain itu, capaian HLS Provinsi NTB juga berada di atas capaian provinsi tetangga, yaitu Provinsi NTT dan Bali. Perbandingan sebagaimana tabel berikut ini:

Grafik 3.21
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (RLS) Provinsi NTB dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS NTB 2021-2025

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan peningkatan capaian HLS melalui penerapan pendidikan inklusif guna memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan dalam bentuk bantuan keuangan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Dalam merespons berbagai tantangan di lingkungan sekolah, termasuk meningkatnya kasus perundungan (bullying), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama satuan pendidikan memperkuat dukungan sosial dan psikologis bagi peserta didik melalui layanan bimbingan konseling serta program pendampingan. Di sisi lain, pengembangan kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, khususnya pada jenjang pendidikan kejuruan, menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pendidikan peserta didik. Upaya tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerataan distribusi serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik guna menjamin kualitas proses pembelajaran di seluruh wilayah. Akan tetapi, target atas HLS ini belum mencapai maksimal, beberapa hal yang perlu dievaluasi, salah satu nya adalah selektif terhadap pemberian bantuan bagi peserta didik yang kurang mampu dan peningkatan sarana prasarana pendidikan terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator HLS pada tahun 2025 adalah sebesar Rp471.153.641.118,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp445.915.108.379,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 4,61%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator pada sasaran strategis peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Salah satu program utama adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Peningkatan capaian APK pada jenjang pendidikan menengah memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan RLS penduduk usia 15 tahun ke atas serta Harapan Lama Sekolah. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada penurunan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan, penguatan kapasitas pendidik, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Selain itu, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 341dalah341ka persentase guru SMA yang memiliki kualifikasi 341dalah341kan minimal S1/DIV diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di satuan 341dalah341kan. Kegiatan dalam program ini difokuskan pada pemerataan distribusi guru antarwilayah serta pencapaian rasio guru terhadap peserta didik yang lebih proporsional. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu 341dalah341kan dan capaian kompetensi peserta didik. Akan tetapi, realisasi anggaran dari program ini hanya mencapai 69,64%, sehingga program ini kurang efektif dalam mendukung pencapaian kinerja dan mempengaruhi secara langsung pada capaian indicator yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan pendukung yang cukup efektif dalam pencapaian HLS tahun 2025 ini adalah:

a. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 97,78%), dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
   2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
   3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 97,96%), dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
   2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

   Sedangkan program dan kegiatan pendukung yang belum efektif dalam pencapaian HLS tahun 2025 ini dalah Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran 69,64%), dengan kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

Tabel 3.114
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
HLS	471.153.641.118	445.915.108.379	14,1	13,99	31.873.846.202,90	33.415.151.852,34	0,95	0,05	4,61

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.115
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator HLS

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	409,187,487,819.60	97.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	209,806,044,576.80	97.87
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	176646604110.80	97.46
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	22,734,839,132.00	99.49
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	165,559,820.00	97.96
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	134,000,000.00	130,885,500.00	97.68
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	35,000,000.00	34,674,320.00	99.07

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Sasaran Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan lanjutan masyarakat sebagai fondasi penguatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia daerah. Indikator ini mengukur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan diploma atau sarjana ke atas, sehingga mencerminkan kapasitas intelektual dan kompetensi profesional yang tersedia di pasar kerja. Semakin tinggi proporsi tersebut, semakin besar pula potensi daerah dalam mendorong inovasi, produktivitas, dan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Dalam konteks pembangunan di Provinsi NTB, indikator ini menjadi penting untuk menilai keberhasilan perluasan akses pendidikan tinggi sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial yang masih memerlukan intervensi kebijakan.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi pada tahun 2025 di Provinsi NTB sebesar 11,59% dan melampaui target yang sebesar 10,02% dengan tingkat capaian 115,67%. Link bukti dukung https://drive.google.com/file/d/1sasuZvAx45CRZyTjGjF_YITHGFYn3SEA/view?usp=sharing

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Provinsi NTB memiliki peningkatan yang cukup tinggi yaitu 2,15 persen dibandingkan capaian tahun 2024 (9,44%). Capaian indikator ini menunjukan kenaikan setiap tahunnya, begitu pula dengan capaian di tingkat Kabupaten/Kota. Akan tetapi, kesenjangan antara capaian Kabupaten/Kota masih cukup tinggi, rincian capaian tersebut seperti tersaji pada table berikut ini:

Tabel 3.116
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/Kota	Capaian Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten/Kota		
		2023	2024	2025
1.	Lombok Barat	7,07	5,82	6,68
2.	Lombok Tengah	6,53	7,07	10,79
3.	Lombok Timur	7,39	8,76	10,49
4.	Sumbawa	10,39	10,37	11,62
5.	Dompu	12,69	12,38	16,06
6.	Bima	11,50	10,64	13,49
7.	Sumbawa Barat	13,10	13,24	15,83
8.	Lombok Utara	6,30	7,36	6,85
9.	Kota Mataram	12,34	12,99	15,76
10.	Kota Bima	21,76	19,61	20,28
Provinsi NTB		9,24	9,44	11,59

No.	Kabupaten/Kota	Capaian Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten/Kota		
		2023	2024	2025
Indonesia		10,15	10,20	11,00

Sumber: BPS NTB 2025

Capaian indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi pada tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Beberapa daerah masih berada pada capaian yang relatif rendah, seperti Kabupaten Lombok Utara yang secara konsisten berada pada posisi terbawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sebaliknya, Kota Bima menunjukkan capaian yang lebih baik dan tercatat berada di atas rata-rata nasional selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan akses dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi antarwilayah di Nusa Tenggara Barat.

3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**

   Realisasi Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi tahun 2025 adalah 11,59% atau mencapai 109,75% dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2025-2029 (10,56%).

4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target nasional**

   Capaian indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Provinsi pada tahun 2023 hingga 2025 menunjukan kenaikan, meskipun capaian tersebut belum melampaui capaian nasional. Sementara itu, 6 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB capaiannya melebihi rata-rata nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi. Capaian atas indikator ini sangat bergantung pada RLS dan HLS, karena jika RLS dan HLS tinggi, maka proporsi peserta didik yang menamatkan pendidikan tinggu pun akan meningkat. Pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk membekali masyarakat dengan kecakapan hidup (*life skills*) yang diperlukan dalam mendukung proses pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya memperluas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat NTB.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp471.153.641.118,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp445.915.108.379,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 18,18%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 3.117
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	471.153.641.118	445.915.108.379	10,02	11,59	38.474.124.967,96	47.021.321.468,86	0,82	0,18	18,18

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

Salah satu program utama adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator APK pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Peningkatan capaian APK pada jenjang pendidikan menengah memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan RLS penduduk usia 15 tahun ke atas serta HLS. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada penurunan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan, penguatan kapasitas pendidik, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Selain itu, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator persentase guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di satuan pendidikan. Kegiatan dalam program ini difokuskan pada pemerataan distribusi guru antarwilayah serta pencapaian rasio guru terhadap peserta didik yang lebih proporsional. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan capaian kompetensi peserta didik. Akan tetapi, realisasi anggaran dari program ini hanya mencapai 69,64%, sehingga program ini kurang efektif dalam mendukung pencapaian kinerja dan mempengaruhi secara langsung pada capaian indicator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan indikator persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pengendalian perizinan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan yang beroperasi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan. Melalui pengendalian perizinan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan tetap terjaga. Hal ini menjadi penting dalam mendukung tercapainya standar kompetensi minimum peserta didik, khususnya dalam aspek literasi membaca dan numerasi.

Program dan kegiatan pendukung yang cukup efektif dalam pencapaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi tahun 2025 ini adalah:

a. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 97,78%), dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
    2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
    3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 97,96%), dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
    2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Sedangkan program dan kegiatan pendukung yang belum efektif dalam pencapaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi tahun 2025 ini adalah Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran 69,64%), dengan kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.118
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	409,187,487,819.60	97.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	209,806,044,576.80	97.87
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	176646604110.80	97.46
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	22,734,839,132.00	99.49
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	165,559,820.00	97.96
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	134,000,000.00	130,885,500.00	97.68

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	35,000,000.00	34,674,320.00	99.07

Sumber: BKAD NTB 2025

D. Indikator Sasaran Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional dengan alat ukur tingkat numerasi dan literasi membaca digunakan untuk menggambarkan capaian mutu pembelajaran dasar peserta didik secara lebih komprehensif dan merata antarwilayah. Melalui pelaksanaan Asesmen Nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik diukur sebagai kompetensi fundamental yang diperlukan untuk memahami informasi, berpikir kritis, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran pada tingkat Kabupaten/Kota memungkinkan pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana standar kompetensi minimum telah tercapai secara merata di berbagai wilayah. Dengan demikian, semakin tinggi persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar tersebut, semakin baik pula kualitas proses pembelajaran dan pemerataan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Hingga saat ini, capaian indikator tersebut masih mengacu pada hasil publikasi terakhir dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pelaksanaan Asesmen Nasional.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025**

   Untuk tahun 2025, hasil pengukuran tingkat literasi membaca dan numerasi pada tingkat kabupaten/kota belum dirilis secara resmi, sehingga evaluasi perkembangan capaian indikator belum bisa dilakukan. Keterbatasan ketersediaan data terbaru ini menyebabkan analisis perkembangan kinerja antarwilayah pada tahun berjalan belum dapat dilakukan secara komprehensif.

2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional belum dirilis oleh Kementerian Pendidikan, sehingga analisa atas capaian tersebut belum dapat dilakukan.

3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**

   Indikator ini merupakan indicator baru dalam dokumen perencanaan, sehingga *baseline data* dan data capaian 2025 yang belum dirilis tidak

dapat dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD.

4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**
   Tidak ada standar nasional yang ditetapkan yang harus dicapai dari indikator ini.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional merupakan indikator baru pada dokumen RPJMD 2025-2029. Indicator ini merupakan Indikator Utama Pembangunan yang bersifat imperatif, sehingga harus tertuang dalama dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**
   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp471.153.641.118,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp445.915.108.379,00. Karena realisasi indikator belum rilis, sehingga, efisiensi anggaran dihitung dengan pendekatan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran untuk pencapaian strategis dimaksud sebesar Rp25.238.532.739,00.
7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**
   Program dan kegiatan pendukung yang cukup efektif dalam pencapaian Persentase Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional tahun 2025 ini adalah:
   a. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 97,78%), dengan kegiatan sebagai berikut:
      1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
      2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
      3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
   b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 97,96%), dengan kegiatan sebagai berikut:
      1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
      2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

   Sedangkan program dan kegiatan pendukung yang belum efektif dalam pencapaian Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional ini adalah Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran 69,64%), dengan

kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.119
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	409,187,487,819.60	97.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	209,806,044,576.80	97.87
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	176646604110.80	97.46
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	22,734,839,132.00	99.49
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	165,559,820.00	97.96
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	134,000,000.00	130,885,500.00	97.68
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	35,000,000.00	34,674,320.00	99.07

Sumber: BKAD NTB 2025

E. Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional digunakan untuk mengukur capaian mutu pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Melalui pelaksanaan Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana satuan pendidikan mampu memastikan peserta didik memiliki kemampuan memahami informasi tertulis serta menggunakan konsep numerik untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, semakin tinggi persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum, semakin baik pula kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah serta semakin kuat dasar peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan di NTB.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Untuk tahun 2025, hasil pengukuran terkait persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada literasi membaca dan numerasi belum dirilis secara resmi.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional belum dirilis oleh Kementerian Pendidikan, sehingga analisa atas capaian tersebut belum dapat dilakukan.

3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**
   Indikator ini merupakan indikator baru dalam dokumen perencanaan, sehingga *baseline data* dan data capaian 2025 yang belum dirilis tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD.
4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**
   Tidak ada standar nasional yang ditetapkan yang harus dicapai dari indikator ini.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Indikator ini termasuk dalam kategori Indikator Utama Pembangunan yang bersifat imperatif, sehingga wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**
   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp471.153.641.118,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp445.915.108.379,00. Karena realisasi indikator belum rilis, sehingga, efisiensi anggaran dihitung dengan pendekatan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran untuk pencapaian strategis dimaksud sebesar Rp25.238.532.739,00.
7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**
   Program dan kegiatan pendukung yang cukup efektif dalam pencapaian Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional tahun 2025 ini adalah:
   a. Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggaran 97,78%), dengan kegiatan sebagai berikut:
      1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
      2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
      3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
   b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (realisasi anggaran 97,96%), dengan kegiatan sebagai berikut:
      1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
      2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

   Sedangkan program dan kegiatan pendukung yang belum efektif dalam pencapaian Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional tahun 2025 ini adalah Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggaran

69,64%), dengan kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.120
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	418,480,681,118.00	409,187,487,819.60	97.78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214,370,103,602.00	209,806,044,576.80	97.87
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	181,258,961,966.00	176646604110.80	97.46
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22,851,615,550.00	22,734,839,132.00	99.49
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	52,503,960,000.00	36,562,060,739.00	69.64
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169,000,000.00	165,559,820.00	97.96

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	134,000,000.00	130,885,500.00	97.68
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	35,000,000.00	34,674,320.00	99.07

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* diarahkan untuk mewujudkan kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik, produktif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan serta penguatan upaya promotif dan preventif. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator utama, yaitu peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai gambaran umum tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, serta penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita yang mencerminkan kondisi status gizi dan kualitas tumbuh kembang anak. Kedua indikator tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan kesehatan, baik dari sisi keberlangsungan hidup penduduk maupun dari aspek kualitas generasi masa depan di Nusa Tenggara Barat. Capaian indicator sasaran strategis ini tertuang dalam table berikut ini:

Tabel 3.121
Realisasi Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100) Atau (8=(3-(5-3))/3*100%	9 (9=5/4*100) Atau (9=(4-(5-4))/4*100%	10 (10=5/6*100) Atau (10=(6-(5-6))/6*100%	11 (11=5/7*100) Atau (11=(7-(5-7))/7*100%
Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,10	72,95	73,97	74,45	75,9	101,19	101,4	99,35	97,46
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29,8	21,7	29,8*	15,94	-	100	62,67	13,05	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

Keterangan: Data tahun 2024 karena data 2025 belum rilis (rilis tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan pada bulan Maret 2026)*

A. Indikator Sasaran Umur Harapan Hidup (UHH)

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

UHH menjadi salah satu indkator strategis dalam urusan kesehatan, karena mencerminkan kualitas kesehatan penduduk secara keseluruhan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, kondisi lingkungan, serta perilaku hidup masyarakat.

Pada tahun 2025, UHH NTB tercatat sebesar 73,97 tahun atau mencapai 101,4 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,92 tahun. Link bukti dukung https://docs.google.com/document/d/1hpWTm7J05W0uAlxcpQGmtaqyZFdhhERh/edit?usp=sharing&ouid=107810802840933058928&rtpof=true&sd=true

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian UHH NTB meningkat sebesar 0,87 tahun dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 73,10 tahun (capaian 101,19%) dan UHH NTB menunjukan kenaikan setiap tahunnya, seperti tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.122
UHH Provinsi NTB Tahun 2021-2025

Wilayah	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
NTB	70,86	71,65	72,37	73,10	73,97
Indonesia	73,16	73,77	74,39	74,97	75,90

Sumber: BPS NTB 2021-2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

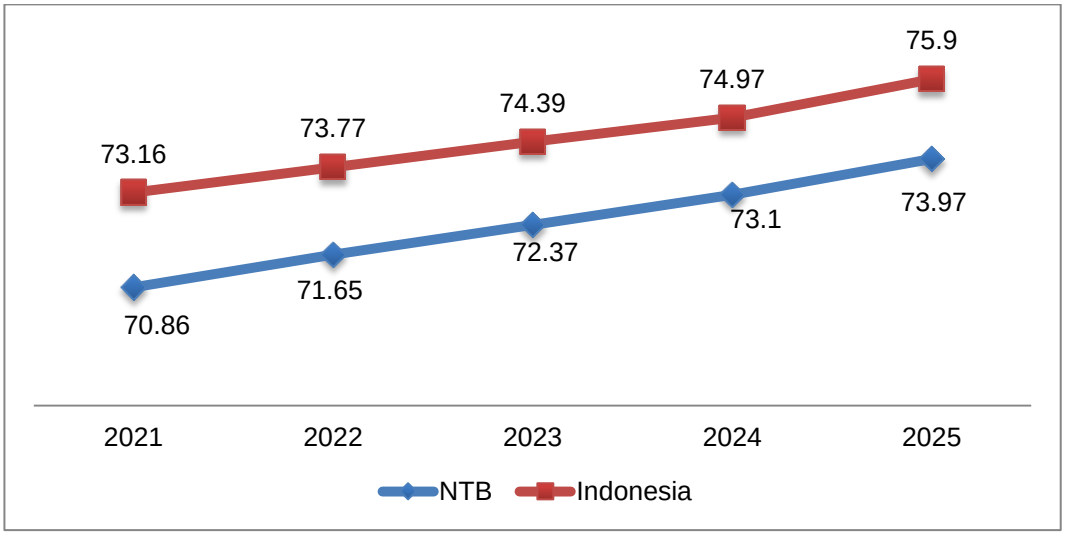
Realisasi UHH pada tahun 2025 tercatat sebesar 73,97 tahun, atau telah mencapai 99,35% dari target yang ditetapkan sebesar 74,45 tahun pada tahun 2030. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi NTB berada pada jalur yang positif menuju target yang telah ditetapkan. Maka secara optimistis target UHH pada tahun 2030 berpotensi untuk dapat tercapai apabila pelaksanaan program dan intervensi kebijakan dilakukan secara konsisten dan terukur.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Capaian UHH NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,9 tahun pada tahun 2025 dan kondisi ini berlangsung sepanjang periode 2021-2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan kesehatan di Provinsi NTB masih cukup besar dan memerlukan penguatan kebijakan serta intervensi yang lebih terarah. UHH memiliki peran yang sangat penting karena bersama RLS dan HLS menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang secara

luas digunakan sebagai ukuran kualitas hidup penduduk dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Grafik 3.22
Grafik Perbandingan UHH Provinsi NTB dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS NTB 2021-2025, diolah

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan UHH yang merupakan cerminan keberhasilan pembangunan kesehatan. Upaya-upaya tersebut yaitu upaya penurunan Angka Kematian Bayi, seperti peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata lama pemberian ASI membuat bayi semakin mampu bertahan hidup. Selain itu, adalah upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan mutu layanan.

Kegiatan ini meliputi penguatan antenatal care terpadu dan berkualitas, standarisasi pelayanan neonatal esensial di seluruh fasilitas, audit kasus neonatal (near miss dan kematian), penguatan SDM melalui pelatihan resusitasi neonatal dan MTBM bagi bidan dan dokter, pemerataan tenaga kesehatan terlatih neonatal, penguatan sistem rujukan, pengembangan jejaring rujukan neonatal regional, penyediaan ambulans dan alat stabilisasi neonatal, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2025 adalah sebesar Rp331.419.154.673,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp301.692.491.240,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 10,225%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.123
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator UHH

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
UHH	331.419.154.673	301.692.491.240	72,95	73,97	4.078.579.035,28	4.54543.100.132,60	0,898	0,102	10,225

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai koordinator dalam pencapaian indikator pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dua program utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan pada program ini yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Selanjutnya, Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang berfokus pada kegiatan pada kesehatan lingkungan yang sangat berpengaruh pada capaian UHH, dan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, serta kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang akan berpengaruh pada peningkatan capaian UHH pada masyarakat.

Selain itu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian UHH dan pencegahan stunting melalui kegiatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan. Detail
program dan kegiatan pendukung dalam pencapaian RLS Penduduk Usia di Atas 15 Tahun tahun 2025 ini adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan (realisasi anggaran 91,04%), dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
   d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (realisasi anggaran 85,41%), dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
   b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
   c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.124
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator UHH

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	300,999,368,874.00	91.04
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,	218,337,115,578.00	199,881,328,236.00	91.55

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	100,212,898,778.00	90.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	221,667,100.00	95.42
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	683,474,760.00	94.05
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	88,780,000.00	64674000.00	72.85
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (Pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Pak)	61,740,000.00	55854000.00	90.47
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Ukot)	27,040,000.00	8,820,000.00	32.62

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811,529,900.00	693,122,366.00	85.41
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	638,479,900.00	595,332,366.00	93.24
Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (Kie) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	148,550,000.00	73,670,000.00	49.59
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbm) Tingkat Daerah Provinsi	24,500,000.00	24,120,000.00	98.45

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita digunakan untuk menggambarkan kondisi status gizi dan kualitas tumbuh kembang anak pada periode awal kehidupan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan, yang dapat berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, serta produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, tingkat prevalensi stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Penurunan angka

stunting menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Provinsi NTB.

a. Analisis Capaian Kinerja:

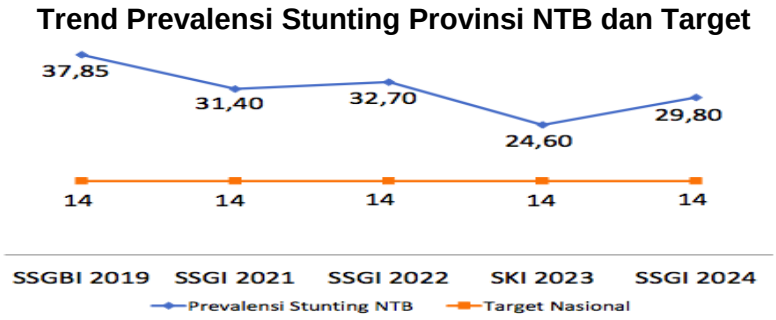
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kondisi awal status gizi yang digunakan sebagai basis data tahun 2024 adalah hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yaitu sebesar 29,80%, sementara itu saat ini hasil SSGI 2025 belum dipublikasikan. Sehingga, realisasi kinerja atas indikator prevalensi stunting di tahun 2025 belum bisa dianalisa dengan optimal karena masih menggunakan data tahun 2024. Link bukti dukung https://docs.google.com/document/d/1hpWTm7J05W0uAlxcpQGmtaqyZFdhhERh/edit?usp=sharing&ouid=107810802840933058928&rtpof=true&sd=true

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja indikator prevalensi stunting pada balita di tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya belum bisa dilakukan dengan optimal, karena data survey tahun 2025 belum rilis sehingga masih menggunakan angka tahun 2024. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.23
Grafik Prevalensi Stunting dan Target Tahun 2019-2024



Sumber: Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024

Prevalensi Stunting pada Balita di setiap Kabupaten/Kota di NTB sangat beragam dan seluruh capaian tersebut berada diatas target nasional. Pada tahun 2024, prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Lombok Utara dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 3.125
Cakupan Balita Stunting Hasil SKI/SSGI per Kabupaten/Kota Provinsi NTB
Tahun 2019-2024

No.	Kabupaten/ Kota	Stunting SKI/SGI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lombok Barat	35.40%	0.00%	28.90%	34.00%	19.90%	27,3%
2.	Lombok Tengah	44.50%	0.00%	32.10%	37.00%	17.60%	24,9%
3.	Lombok Timur	38.20%	0.00%	37.60%	35.60%	27.60%	33.0%
4.	Sumbawa	27.60%	0.00%	29.70%	29.70%	25.70%	29.8%
5.	Dompu	40.50%	0.00%	31.50%	34.50%	12.40%	19.8%
6.	Bima	33.50%	0.00%	30.40%	29.50%	36.70%	23,8*%
7.	Sumbawa Barat	41.00%	0.00%	28.90%	13.90%	10.50%	18,2*%
8.	Lombok Utara	40.00%	0.00%	34.00%	35.90%	33.50%	35.3%
9.	Kota Mataram	27.10%	0.00%	23.70%	25.80%	25.60%	23.5%
10.	Kota Bima	33.20%	0.00%	30.40%	31.20%	31.80%	28.4%
Provinsi		36.80%	0.00%	31.40%	32.70%	24.60%	29.80%

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Analisa atas perbandingan ini belum bisa dilakukan dengan optimal, karena hasil survey tahun 2025 yang belum dirilis, sehingga masih menggunakan angka tahun 2024. Akan tetapi jika dilihat dari tren penurunan prevalensi stunting selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 8,05 persen, maka secara optimis jika target pada tahun 2025 tercapai, kemungkinan besar target pada akhir masa RPJMD pun akan tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Pada level nasional dalam kurun waktu 2019-2024, prevalensi stunting pada balita di Provinsi NTB turun sebesar 8,05 persen, dari 37,85% pada tahun 2019 dan 29,80 persen pada tahun 2024. Kondisi ini masih jauh diatas target yang ditetapkan oleh nasional yaitu 14 persen pada setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.

Akan tetapi, target nasional tersebut tidak tercapai, karena prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2024 mencapai 19.8 persen. Sementara itu, Provinsi terdekat dengan NTB yaitu Bali dan NTT memiliki prevalensi stunting 8.7 persen dan 37 persen dan menempatkan Provinsi Bali dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Tingkat prevalensi stunting di Provinsi NTB dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, baik dari aspek kesehatan, perilaku, maupun kondisi

sosial masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting antara lain praktik pernikahan usia dini, keberadaan anggota keluarga yang merokok, pola asuh dan praktik pemberian makan bayi dan anak yang belum optimal, serta masih rendahnya konsumsi gizi seimbang dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pemenuhan gizi selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan fase krusial dalam menentukan tumbuh kembang anak.

Dalam upaya menurunkan prevalensi balita stunting, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan berbagai intervensi secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif serta praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang tepat. Selain itu, dilakukan pembinaan keluarga sehat guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga sasaran, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga dalam penanggulangan masalah gizi. Pemerintah daerah juga melakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader posyandu terkait praktik PMBA melalui pelatihan yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan tenaga gizi, bidan puskesmas, bidan desa, serta kader posyandu.

Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Tim Penggerak PKK, DP3AP2KB, DPMPD, Dukcapil, perguruan tinggi kesehatan di NTB, organisasi profesi kesehatan seperti PERSAGI, IDI, dan IBI, serta berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Forum Peduli ASI. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pembinaan keluarga sasaran serta pendampingan pada kelompok prioritas, seperti pengasuh balita dengan masalah gizi, ibu hamil yang mengalami anemia atau kekurangan energi kronis (KEK), serta ibu menyusui. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan distribusi makanan tambahan bagi ibu hamil dengan KEK dan balita kurus di seluruh kabupaten/kota, dengan tujuan memenuhi kecukupan gizi sehingga berat badan balita dapat mencapai standar sesuai umur dan kebutuhan gizi ibu hamil dapat terpenuhi secara optimal. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat intervensi gizi secara komprehensif guna menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator prevalensi stunting pada tahun 2025 adalah sebesar Rp331.419.154.673,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp301.692.491.240,00. Target tercapai di bawah 95% sehingga tidak ada efisiensi anggaran. Pendekatan efisiensi dilakukan menggunakan sisa anggaran saja, yaitu sebesar Rp29.726.663.433,00.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai coordinator dalam pencapaian indicator pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dua program utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan pada program ini yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Selanjutnya, Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM

Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang berfokus pada kegiatan pada kesehatan lingkungan yang sangat berpengaruh pada capaian prevalensi stunting di suatu daerah, dan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, serta kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang akan berpengaruh pada peningkatan capaian UHH pada masyarakat. Selain itu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian UHH dan pencegahan stunting melalui kegiatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan untuk peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Detail program dan kegiatan pendukung dalam pencapaian Prevalensi Stunting pada Balita adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan (realisasi anggaran 91,04%), dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
   d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (realisasi anggaran 85,41%), dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
   b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
   c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.126

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Prevalensi Stunting

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	300,999,368,874.00	91.04

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	199,881,328,236.00	91.55
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	100,212,898,778.00	90.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	221,667,100.00	95.42
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	683,474,760.00	94.05
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811,529,900.00	693,122,366.00	85.41
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	638,479,900.00	595,332,366.00	93.24

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	148,550,000.00	73,670,000.00	49.59
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	24,500,000.00	24,120,000.00	98.45

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.3 Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender

Sasaran strategis *Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga serta Kesetaraan Gender* diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, harmonis, dan berdaya, sekaligus memastikan adanya kesetaraan peran, akses, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Penguatan ketahanan keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan inklusif, karena keluarga merupakan unit terkecil yang berperan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui peningkatan nilai Indeks Kesetaraan Gender (IKG) yang menggambarkan tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan, serta Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang mencerminkan tingkat kualitas dan ketahanan keluarga. Melalui kedua indikator tersebut, diharapkan terwujud keluarga yang tangguh, setara, dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Capaian pada indikator pada sasaran strategis ini disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 3.127
Realisasi Kinerja Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga serta Kesetaraan Gender

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100) Atau (8=(3-(5-3))/3*100%	9 (9=5/4*100) Atau (9=(4-(5-4))/4*100%	10 (10=5/6*100) Atau (10=(6-(5-6))/6*100%	11 (11=5/7*100) Atau (11=(7-(5-7))/7*100%
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,53	0,517	0,53*	0,463	-	100	97,49	85,53	-
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,02	61,70	63,70	70,20	-	106,13	103	90,74	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

*Keterangan: *Data Tahun 2024 karena data tahun 2025 belum rilis (rilis dari Kementerian PPPA pada Desember tahun 2025)*

A. Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG menjadi ukuran ketimpangan gender dalam pembangunan manusia dengan mengukur tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Sehingga, IKG menggambarkan besarnya kerugian (loss) yang terjadi dalam pembangunan manusia akibat adanya ketimpangan gender pada ketiga dimensi tersebut.

IKG memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Angka 0 mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya, dan angka 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut.

Dengan demikian, nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah (semakin membaik). Sebaliknya, nilai IKG yang semakin besar menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin tinggi (semakin memburuk).

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

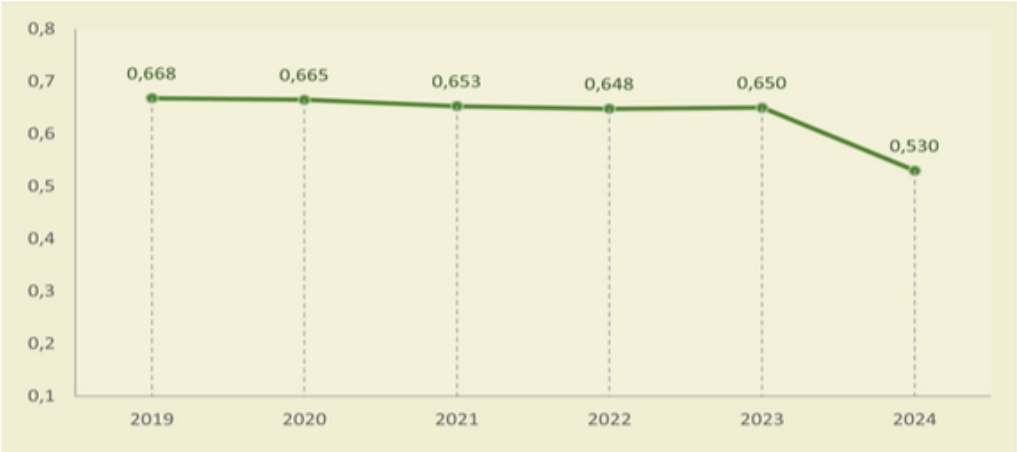
Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB pada tahun 2025 belum rilis hingga Maret 2025. Sementara itu, capaian IKG pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,530 poin, hal ini menunjukan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender. Sejak tahun 2019, IKG Provinsi NTB mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,028 poin per tahun, sehingga diprediksi capaian IKG Provinsi NTB tahun 2025 dapat mencapai target tahun 2025. Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/en/pressrelease/2025/05/05/1050/indeks-ketimpangan-gender-provinsi-nusa-tenggara-barat-2024.html

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi capaian IKG tahun 2025 belum tersedia, sehingga capaian IKG tahun 2024 yang dianalisa dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya. IKG Provinsi NTB pada tahun 2024 adalah sebesar 0,530. Perbaikan di seluruh dimensi menjadi factor utama menurunnya IKG di Provinsi NTB, dan secara spasial ketimpangan gender mengalami penurunan yang sifnifikan di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Kondisi tersebut tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 3.24

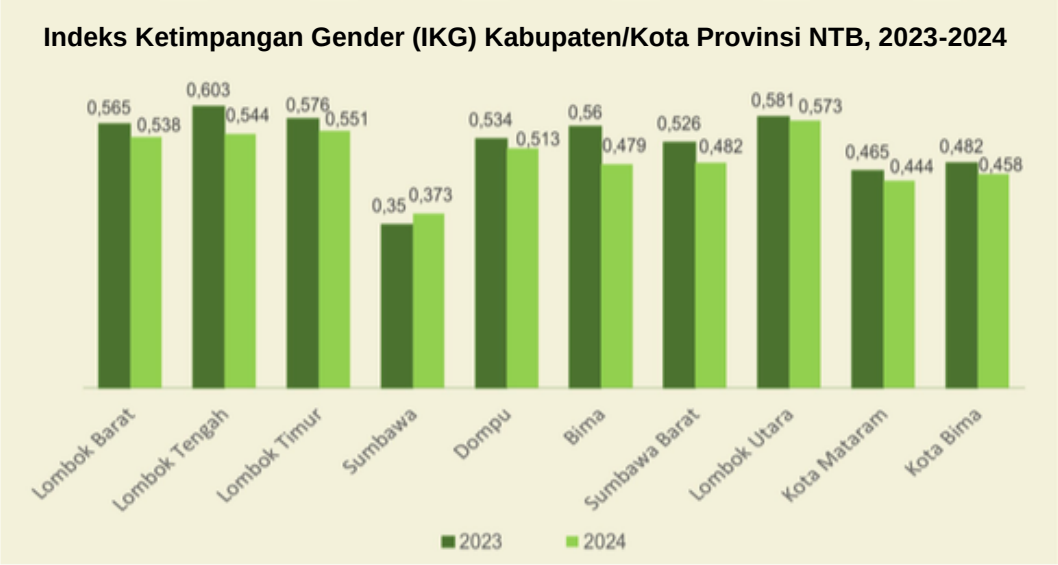
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB, 2019-2024



Sumber: DP3AP2KB NTB 2019-2025

Penurunan 0,120 poin pada tahun 2024 merupakan penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, selama kurun waktu 2019-2024 capaian IKG di tingkat Kabupaten/Kota bervariasi. Capaian 2024, menunjukan ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kabupaten Sumbawa dengan capaian IKG 0,370 poin, sebaliknya ketimpangan gender yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Lombok Utara dengan capaian IKG 0,573 poin.

Grafik 3.25



Sumber: DP3AP2KB NTB 2019-2025

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2025-2029**

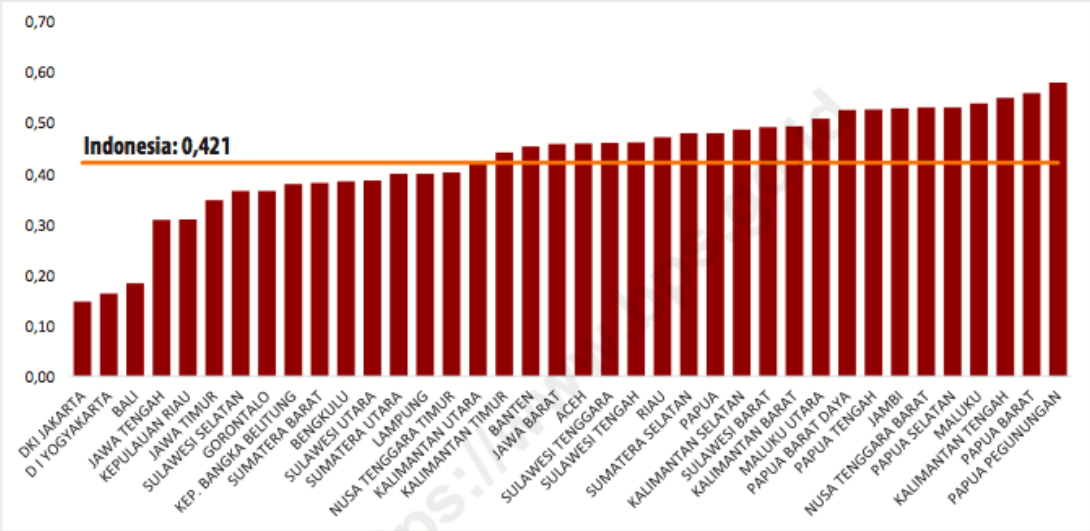
   Realisasi IKG Provinsi NTB tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh BPS, sehingga jika dianalisa dari hasil capaian pada tahun 2024 sebesar 0,530 poin dan rata-rata penurunan sebesar 0,028 poin per tahun, maka diprediksi capaian setiap tahunnya telah *on the track* dan akan mencapai target akhir sesuai dokumen RPJMD 2025-2029 yaitu sebesar 0,463.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Pencapaian kesetaraan gender tidak dapat direpresentasikan secara memadai hanya melalui rata-rata capaian nasional. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat tinggi, analisis terhadap kesenjangan gender perlu dilakukan secara lebih mendalam hingga pada tingkat wilayah. Upaya pengurangan ketimpangan gender secara nasional harus diiringi dengan perhatian yang serius terhadap disparitas antarprovinsi. Perbedaan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber daya, perumusan kebijakan pembangunan, serta penguatan pemberdayaan perempuan turut mempengaruhi variasi capaian kesetaraan gender di setiap wilayah.

Grafik 3.26

Capaian Indeks Ketimpangan Gender menurut Provinsi Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statisti Indeks Ketimpangan Gender 2024

Penurunan IKG pada tahun 2024 terjadi hampir di seluruh provinsi, Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali merupakan tiga Provinsi dengan capaian IKG terendah dan berada diatas rata-rata nasional. Sementara itu, Provinsi NTB termasuk dalam sepuluh Provinsi dengan capaian tertinggi di Indonesia bersama dengan Provinsi pada Kawasan Timur Indonesia. Meskipun demikian, Provinsi NTB termasuk dalam Provinsi dengan capaian penurunan IKG tercepat bersama Provinsi Bali, DKI Jakarta, Bengkulu dan Bangka Belitung.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB Dinas P3AP2KB sebagai pengampu utama dalam tercapainnya indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga serta Kesetaraan Gender. Upaya-upaya yang telah dilakukan itu antara lain perencanaan pembangunan yang responsif gender, memperkuat pemberdayaan perempuan, serta mendorong pencapaian predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain itu, fokus utama juga diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menjadi salah satu prioritas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi NTB, Dinas P3AP2KB telah melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan penyusunan dokumen PPRG bagi 49 Perangkat Daerah (PD) Lingkup Provinsi NTB.

Dinas P3AP2KB Provinsi NTB berkomitmen menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Sementara itu, urusan perlindungan anak yang diampu Dinas P3AP2KB Provinsi NTB berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan khusus anak. Perhatian utama dalam bidang perlindungan anak diarahkan untuk menurunkan angka perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan masalah utama yang dihadapi yakni tingginya angka perkawinan anak. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 NTB tercatat sebagai provinsi dengan persentase perkawinan anak tertinggi di Indonesia.

Selain itu, DP3AP2KB Provinsi NTB juga melakukan berbagai program/kegiatan pencegahan dan pemberinan layanan komperhensif bagi korban kekerasan sebagai berikut.

Advokasi anti kekerasan di lingkungan pendidikan (SMA/SMK, Madrasah dan Pondok Pesantren). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada murid dan guru cara pencegahan kekerasan terhadap anak melalui metode penyuluhan dan diskusi, hasil yang diperoleh bahwa murid-murid semakin memahami cara pencegahan kekerasan dan cara melaporkan apabila terjadi kejadian kekerasan di lingkungan sekolah.

Namun demikian, hal yang paling startegis yang dapat dilakukan oleh Dinas pengampu urusan PPPA adalah koordinasi dan kolaborasi yang intensif dengan para perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang berperan secara langsung dalam kegiatan dan pencapaian ketiga dimensi pembentuk indikator Indeks Ketimpangan Gender.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indicator Indeks Ketahanan Gender pada tahun 2025 adalah sebesar Rp4.058.502.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.938.574.876,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 53,41%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.128
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Ketimpangan Gender

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Indeks Ketimpangan Gender	4.058.502.500	1.938.574.876	0,517	0,53	3.657.688.445,28	7.850.101.547,39	0,466	0,534	53,41

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.

Program dan kegiatan yang dinilai efektif karena serapannya baik sampai dengan akhir tahun adalah:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (realisasi anggaran 97,60%) dengan kegiatan:
   1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
   2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang berfokus pada peningkatan anggaran berbasis gender di setiap perangkat daerah.

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (realisasi anggaran 96,77%) dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (realisasi anggaran 92,12%) dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi. Program ini menghasilkan data terpilah, sebagai dasar dalam perencanaan yang responsif gender.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (realisasi anggaran 98,10%) dengan kegiatan:
   1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
   2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

e. Program Perlindungan Khusus Anak (realisasi anggaran 91,31%) dengan kegiatan:
   1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan yang dinilai kurang efektif dalam pencapaian target adalah Program Perlindungan Perempuan (realisasi anggaran 11,09%) dengan kegiatan:

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan fokus kegiatan pada perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan kegiatan pendukung lainnya.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.129
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator
Indeks Ketimpangan Gender

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	120,281,500.00	117,390,644.00	97.60
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	37,376,500.00	37,089,044.00	99.23
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	82,905,000.00	80,301,600.00	96.86
Program Perlindungan Perempuan	2,274,052,600.00	252,138,863.00	11.09
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	126,903,600.00	126,437,560.00	99.63

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,125,374,000.00	103926303.00	4.89
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	21,775,000.00	21775000.00	100.00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	666,290,000.00	644,779,500.00	96.77
Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	666,290,000.00	644,779,500.00	96.77
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	33,845,000.00	31,177,000.00	92.12
Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi	33,845,000.00	31,177,000.00	92.12
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	188,923,100.00	185,334,040.00	98.10
Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	156,094,000.00	153,504,940.00	98.34
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	32,829,100.00	31,829,100.00	96.95
Program Perlindungan Khusus Anak	775,110,300.00	707,754,829.00	91.31
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	544,042,300.00	529,463,800.00	97.32

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	182,548,000.00	141,943,029.00	77.76
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48,520,000.00	36,348,000.00	74.91

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menilai tingkat kualitas keluarga di Indonesia. Pengukuran indeks ini didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, suatu wilayah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu keluarga tangguh, keluarga berkembang, dan keluarga rentan berdasarkan nilai iBangga yang dicapai. Selain itu, iBangga juga digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia.

a. Analisis Capaian Kinerja:

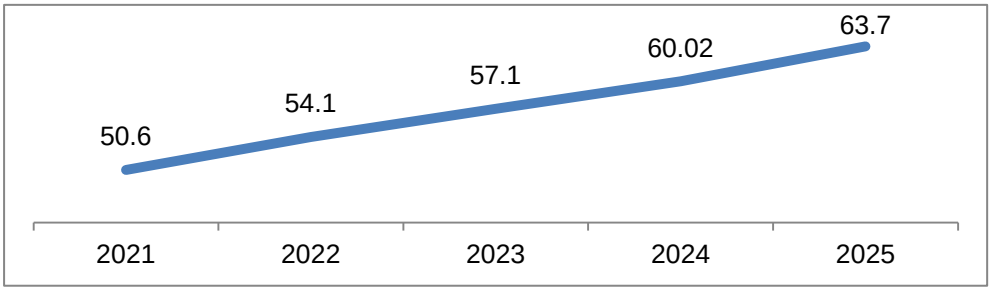
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Capaian iBangga Provinsi NTB tahun 2025 adalah sebesar 63.70 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 61,70, sehingga persentase capaian indikator ini adalah 103%. Link bukti dukung https://siperindu.online/mob/

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian iBangga Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah 63,70, naik sebesar 3,68 poin dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 60,02. Capaian iBangga Provinsi NTB mengalami kenaikan setiap tahun nya, hal tersebut tersaji pada grafik berikut ini.

Grafik 3.27
Capaian iBangga Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, 2025

Kenaikan capaian iBangga setiap tahunnya bagi Provinsi NTB perlu juga dievaluasi untuk capaian pada setiap Kabupaten/Kota. Masih terdapat ketimpangan antar Kabupaten/Kota dalam capaian iBangga dan terdapat 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang masih jauh dibawah rata-rata capaian Provinsi NTB pada tahun 2025. Hal tersebut, tertuang dalam table berikut ini:

Tabel 3.130
Capaian iBangga setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

#	KABUPATEN	Tahun 2025
		2025
		PK 25
1.	KAB. LOMBOK BARAT	63.3
2.	KAB. LOMBOK TENGAH	52.6
3.	KAB. LOMBOK TIMUR	58.3
4.	KAB. SUMBAWA	72.9
5.	KAB. DOMPU	69.8
6.	KAB. BIMA	70.0
7.	KAB. SUMBAWA BARAT	78.2
8.	KAB. LOMBOK UTARA	66.9
9.	KOTA MATARAM	71.6
10.	KOTA BIMA	71.1
NUSA TENGGARA BARAT		63.7

Sumber: *Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, 2025*

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**
   Indikator iBangga pada RPJMD 2025-2029 ditargetkan mencapai 68,50, sementara itu capaian tahun 2025 adalah 63,70 dengan rata-rata kenaikan capaian iBangga Provinsi NTB adalah 2,62 per tahun, maka target akhir RPJMD secara optimis dapat tercapai.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Capaian iBangga Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar 67,30, sementara itu capaian iBangga pada Provinsi terdekat adalah 76,50 untuk capaian Provinsi Bali dan 58,60 untuk capaian Provinsi NTT. Capaian Provinsi Bali jauh di atas capaian nasional, sedangkan capaian iBangga NTB dan NTT berada di bawah capaian nasional pada tahun 2025.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   iBangga merupakan salah satu indikator kinerja pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). PPKB memiliki peran strategis dalam mengarahkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung pembangunan daerah. Upaya pengendalian penduduk tidak hanya berfokus pada penurunan angka kelahiran, tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk melalui penguatan perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan keluarga. Program ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera. Upaya yang telah direncanakan dan dilakukan pada urusan ini untuk mencapai keluarga yang berkualitas pada aspek ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan antara lain penetapan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, dan penyusunan kebijakan pembangunan keluarga tingkat daerah. Sementara itu untuk fokus Sistem Data dan Informasi Kependudukan, hal-hal yang dilakukan adalah koordinasi, penyediaan, dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga, dukungan pendataan dan pemutakhiran data keluarga, penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi dan pemetaan program Bangga Kencana. Sedangkan untuk Advokasi Program Pembangunan Keluarga, kegiatan yang dilaksanakan adalah Advokasi, sosialisasi dan promosi iBangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

   Namun demikian, hal yang paling strategis yang dapat dilakukan oleh Dinas pengampu urusan PPKB adalah koordinasi dan kolaborasi yang intensif dengan para perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang berperan secara langsung dalam kegiatan dan pencapaian komponen pada dimensi pembentuk indikator iBangga.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator iBangga pada tahun 2025 adalah sebesar Rp719,587,450 dengan realisasi anggaran sebesar Rp527,639,908. Sehingga, efisiensi anggaran sebesar 28,98%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.131
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator iBangga

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
iBangga	719.587.450	527.639.908	61,7	63,7	8.283.201,07	11.662.681,52	0,71	0,29	28,98

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.

Seluruh program dinilai efektif dalam pencapaian kinerja. Program tersebut adalah:

a. Program Pengendalian Penduduk (realisasi anggaran 97,87%) dengan kegiatan:
   1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (realisasi anggaran 100%) dengan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
c. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (realisasi anggaran 70,08%) dengan kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.132
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator iBangga

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengendalian Penduduk	77,357,450.00	75,706,860.00	97.87
Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	72,157,450.00	70,506,860.00	97.71
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6,164,000.00	6,164,000.00	100.00
Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6,164,000.00	6,164,000.00	100.00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	636,066,000.00	445,769,048.00	70.08
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	636,066,000.00	445,769,048.00	70.08

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.4 Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan diukur dengan indikator kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB serta Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Adapun capaian sasaran kinerja Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.133

Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,12	2,37	10,03	2,53	3,10	8358,33	423,21	396,44	323,55
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,95	0,97	0,93	1,04	1,10	97.89	95.88	89.42	84.55
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,20	14,27	14,53	16,10		102,32	101,82	90,25	

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio Kewirausahaan Daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Realisasi Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 10,03%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 2,37%, sehingga capaiannya sebesar 423,21%. Link bukti dukung https://drive.google.com/drive/folders/1viKQnhi3UgRmqVHuNnNDM6qe3sBoW0Yy?usp=sharing

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Pada tahun 2024, Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar 0,12% dan di tahun 2025 meningkat menjadi 10,30% sehingga capaian kinerjanya sebesar 8.358,33 %.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**

   Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 2,53% dan realisasi tahun 2025 ini sebesar 10,03% sehingga capaiannya sebesar 396,44% terhadap target akhir RPJMD.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional**

   Pemerintah mentargetkan Rasio Kewirausahaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebesar 3,10%. Dengan realisasi Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi NTB sebesar 10,03% di tahun 2025 maka capaiannya sebesar 323,55%.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui sinergi dengan lembaga pendidikan, sektor swasta dan komunitas lokal. Peran ini semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan perubahan pasar tenaga kerja. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan Rasio Kewirausahaan Daerah adalah sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan Karya Kreatif NTB (KK-NTB) 2025

Kegiatan ini difokuskan sebagai wadah sinergi dan kolaborasi untuk memberdayakan 101 UMKM unggulan, mendorong produk lokal agar mampu "naik kelas" dan mendunia.

b. Penguatan UMKM Go Digital
   Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB secara konsisten melakukan program onboarding UMKM ke ekosistem digital (go digital), termasuk optimalisasi penggunaan QRIS untuk mempermudah transaksi dan memperluas pasar.
c. Optimalisasi Ekonomi Kreatif dan Sektor Unggulan
   Pemerintah NTB mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai pilar masa depan, didukung dengan fokus pada sektor pariwisata dan pertanian (agroforestri, peternakan) untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan sektor tambang.
d. Program Inkubasi dan Pelatihan
   Penguatan peran inkubator bisnis untuk menjangkau pelaku usaha pemula, memberikan ruang bagi potensi baru (hidden gems), serta pelatihan pendampingan guna meningkatkan keterampilan bisnis. Program inkubasi dan pelatihan ini salah satunya dilaksanakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yaitu program kementerian Koperasi dan UMKM yang menyediakan pendampingan gratis, konsultasi bisnis, pelatihan dan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM. PLUT bertujuan meningkatkan daya saing melalui konsultasn professional di bidang kelembagaan, SDM, pemasaran, produksi dan pembiayaan. PLUT-KUMKM memiliki 7 (tujuh) bidang layanan pendampingan, yaitu (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Produksi, (3) Bidang Pemasaran, (4) Bidang Pembiayaan, (5) Bidang Sumber Daya Manusia, (6) Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi, dan (7) Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha.
e. Penyediaan Wadah Promosi (MICE): Mendorong penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) untuk mempromosikan produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada wisatawan musiman.
f. Penyesuaian Perda UMKM: Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta usaha kecil untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat (UU Cipta Kerja), guna menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing. Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk menyesuaikan regulasi terkait penguatan, pengembangan serta perlindungan koperasi dan UMKM di wilayah

NTB agar lebih relevan dengan kondisi terkini. Ruang lingkup Perda tersebut mengatur tentang pemberdayaan, peningkatan kapasitas serta perlindungan hukum dan pendampingan bagi pelaku koperasi dan usaha kecil.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Rasio Kewirausahaan Daerah pada tahun 2025 adalah Rp4.196.444.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp4.141.340.979,00. Efisiensi anggaran sebesar 76,68%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan**

   Seluruh program dan kegiatan efektif dalam pencapaian target sebagai berikut:

   a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (realisasi anggaran 98,03%) dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
   b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (realisasi anggaran 98,94%) dengan kegiatan:
      1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
      2. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
      3. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
   c. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (realisasi anggaran 99,13) dengan kegiatan:
      1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
      2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
      3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.134
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Rasio Kewirausahaan Daerah	4.196.444.300,00	4.141.340.979,00	2.37	10.03	412.895.411,67	1.770.651.603,38	0,2332	0,7668	76,68

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.135
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator
Rasio Kewirausahaan Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1,682,332,300.00	1,649,170,851.00	98.03
Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1,682,332,300.00	1,649,170,851.00	98.03
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	25,500,000.00	25,228,600.00	98.94
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea Dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	8,000,000.00	7,999,000.00	99.99

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Provinsi	7,500,000.00	7,490,000.00	99.87
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	10,000,000.00	9,739,600.00	97.40
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2,488,612,000.00	2,466,941,528.00	99.13
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	2,339,612,000.00	2,323,005,100.00	99.29
Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	27,000,000.00	23,210,428.00	85.96
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Di Selruh Daerah Kabupaten/Kota	122,000,000.00	120,726,000.00	98.96

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB adalah Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Provinsi NTB pada tahun 2025 sebesar 0,93%, lebih trendah dari target yang ditetapkan sebesar 0,97%, sehingga capaiannya terhadap target sebesar 95,88%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 0,95% dan di tahun 2025 menurun menjadi 0,93% sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,89 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 ditargetkan sebesar 1,04% dan realisasi tahun 2025 ini sebesar 0,93% sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,42%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Pemerintah mentargetkan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebesar 1,10%. Dengan realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di NTB sebesar 0,93% di tahun 2025 maka capaian kinerjanya sebesar 84,55%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Peningkatkan rasio volume usaha koperasi di Provinsi NTB tahun 2025 difokuskan pada penguatan struktur, digitalisasi, dan kemitraan strategis. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi dan UKM berfokus pada langkah-langkah progresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui koperasi. Selain itu sinergi antara Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dekopinwil NTB (Dewan Koperasi Indonesia Wilayah) menjadi kunci untuk mendorong rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang lebih tinggi.

Berikut adalah beberapa upaya untuk meningkatkan rasio volume usaha koperasi di Provinsi NTB:

a. Implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sampai dengan Desember 2025 sudah terbentuk 1.166 koperasi merah putih yang berbadan hukum yang ada di desa/kelurahan di masing-masing kabupaten kota di NTB..
b. Digitalisasi dan modernisasi koperasi dengan mendorong adopsi teknologi digital dalam operasional dan pemasaran koperasi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah akses anggota.
c. Penguatan kemitraan strategis dengan memperkuat kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan sektor swasta/investor. Bali dan NTB telah sepakat menjadikan koperasi sebagai penggerak utama UMKM dengan fokus pada pengembangan produk unggulan.

d. Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan manajemen koperasi, termasuk manajemen keuangan, agar pengurus lebih profesional dalam mengelola usaha.
e. Penguatan akses pembiayaan dengan mempermudah akses koperasi terhadap modal, baik melalui lembaga keuangan formal, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun sinergi dengan LPDB-KUMKM.
f. Komersialisasi dan inovasi produk dengan mendorong koperasi untuk melakukan inovasi produk dan jasa agar memiliki daya saing tinggi, tidak hanya mengandalkan usaha simpan pinjam.
g. Penyesuaian Perda Koperasi dan Usaha Kecil dengan melakukan penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja, untuk memperkuat landasan hukum perlindungan dan pengembangan koperasi di NTB

Adapun hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan rasio volume usaha koperasi tarhadap PDRB di Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

a. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif:
   Sebanyak 2.237 koperasi dari total 6.190 koperasi dinyatakan tidak beroperasi pada tahun 2025. Koperasi-koperasi ini tidak menjalankan aktivitas usaha atau organisasi, termasuk tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
b. Terbatasnya modal dan akses pembiayaan
   Kendala utama yang membuat ribuan koperasi di NTB tidak beroperasi adalah keterbatasan modal. Koperasi sulit berkembang dan meningkatkan volume usaha karena kekurangan dana untuk modal kerja dan investasi.
c. Rendahnya kualitas SDM dan manajemen.
   Koperasi di NTB mengalami krisis SDM yang profesional untuk mengelola usaha secara modern, sehingga menghambat efektivitas dan keberlanjutan usaha.
d. Lambatnya adopsi teknologi dan digitalisasi.
   Masih rendahnya adopsi teknologi dalam operasional koperasi membuat mereka kalah bersaing dengan badan usaha lain.
e. Legalitas dan keberlanjutan usaha.
   Belum optimalnya legalitas dan formalitas usaha membuat koperasi sulit mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan resmi.
f. Kendala Operasional Koperasi Baru (Merah Putih).
   Pembangunan dan pengaktifan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menemui kendala, seperti kesulitan lahan dan belum jelasnya arah bisnis, yang menyebabkan target operasional tersendat

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB pada tahun 2025 adalah

Rp1.269.685.240,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.1.122.353.278,00. Efisiensi anggaran sebesar 7,80%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (realisasi anggaran 99,97%) dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (realisasi anggaran 96,48%) dengan kegiatan:
    1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (realisasi anggaran 99,92%) dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Program dan kegiatan yang kurang efektif dalam pencapaian target sebagai berikut:

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (realisasi anggaran 86,4%) dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
b. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (realisasi anggaran 83,84%) dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 3.136
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1.269.685.240,00	1.122.353.278,00	0.97	0.93	1.206.831.481,72	1.308.953.855,67	0,9220	0,0780	7,80

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.137
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	11,690,000.00	11,687,000.00	99.97
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11,690,000.00	11,687,000.00	99.97
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	42,500,000.00	41,005,000.00	96.48
Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14,866,000.00	14,591,000.00	98.15

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	27,634,000.00	26,414,000.00	95.59
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	243,060,000.00	242869260.00	99.92
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	243,060,000.00	242869260.00	99.92
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	450,000,000.00	388,803,336.00	86.40
Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	450,000,000.00	388,803,336.00	86.40
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	522,435,240.00	437,988,682.00	83.84
Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	522,435,240.00	437,988,682.00	83.84

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan PDRB Atas Dsar Hrga Berlaku (ADHB) dari sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi.

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 14,53%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 14,27% sehingga capaiannya 101,82%. Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVRaR1RHODBVSG9yYldGa2JFZ3lWbW81U1M4MFFUMDkjMw==/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-barat--2020.html?year=2020

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Pada tahun 2024, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi NTB sebesar 14,20% dengan nilai PDRB sektor perdagangan mencapai Rp 25.884,35 M, sementara total PDRB sebesar Rp 182.265,62 M. Pada tahun 2025, nilai PDRB sektor perdagangan meningkat menjadi Rp 28.033,36 M, sementara total PDRB sebesar Rp 192.951,54 M, sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat menjadi 14,53 % atau capaiannya 102,32% dibandingkan realisasi tahun 2024.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029**

   Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 16,10%, dengan realisasi di tahun 2025 sebesar 14,53% berarti capaiannya 90,25% dari target.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Pemerintah dalam RPJMN Tahun 2025-2029 tidak memilliki indikator terkait kontribusi PDRB sektor perdagangan terhadap PDB, sehingga realisasi indikator ini untuk Provinsi NTB di tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi NTB tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

   a. Peningkatan aktivitas ekonomi non-tambang

      Sektor non-tambang, termasuk perdagangan, mengalami lonjakan signifikan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi keseluruhan di tengah fluktuasi sektor tambang. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan ekspor non tambang yang meningkat tajam pada akhir tahun 2025, terutama didorong oleh ekspor perhiasan/permata, hasil ikan/udang serta daging dan ikan olahan dengan tujuan ekspor didominasi oleh pasar Eropa dan Asia, seperti Swiss, Tiongkok, Jepang, Malaysia dan Korea Selatan

   b. Penguatan permintaan domestik dan konsumsi

      Penguatan permintaan domestik dan konsumsi ditunjukkan dengan adanya peningkatan perdagangan domestik antar wilayah. Perdagangan barang domestik antar wilayah menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Untuk perdagangan antar wilayah provinsi NTB, 5 (lima) komoditas penjualan antar wilayah terbesar adalah jagung, daun tembakau diawetkan bertangkai/bertulang, bawang bombay,crustacea tidak beku serta cabai dan paprika hijau. Moda trasnortasi utama perdagangan antarwilayah adalah angkutan air laut dengan persentase mencapai 58,49%,

kemudian diikuti dengan angkutan jalan 34,48%, ASDP 4,89% dan angkutan udara 2,14%.

Provinsi yang melakukan transaksi penjualan antar wilayah terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur. Sementara 5 (lima) kelompok komoditas terbesar yang dibeli Provinsi NTB adalah (a) minyak bahan bakar ytdl, (b) Kokas dan semi-kokas dari batubara, dari lignit atau dari tanah gemuk; retort carbon, (c) Semen portland, semen alumina, semen terak dan semen hidrolis semacam itu, kecuali dalam bentuk clinker, (d) Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret dari tembakau atau pengganti tembakau dan (e) Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya). Komoditas tersebut berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan

c. Akselerasi UMKM dan digitalisasi

   Penguatan sinergi melalui akselerasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kemudahan pembiayaan, serta percepatan digitalisasi daerah turut mendorong sektor perdagangan eceran.

d. Perbaikan produksi pertanian

   Pertanian dengan pangsa pasar sekitar 21,89% terhadap perekonomian tumbuh 5,04%. Pertumbuhan ini didukung berbagai program pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian yang memicu aktivitas perdagangan hasil pertanian.

e. Kinerja positif sektor industri pengolahan

   Industri pengolahan yang tumbuh tinggi mencapai 76,37% yang dipicu oleh semakin optimalnya operasional smelter pengolahan mineral di NTB berdampak terhadap peningkatan kebutuhan distribusi dan perdagangan hasil olahan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2025 adalah Rp1.731.536.430,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.682.022.413,00. Efisiensi anggaran sebesar 4,60%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

Tabel 3.138
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1.731.536.430,00	1.682.022.413,00	14.27	14.53	115.762.038,06	121.341.025,23	0,9540	0,0460	4,60

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Semua program dan kegiatan efektif dalam pencapaian target kinerja, sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (realisasi anggaran 99,54%) dengan kegiatan: Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas
b. Program Pengembangan Ekspor (realisasi anggaran 95,23%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
c. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (realisasi anggaran 91,33%) dengan kegiatan:
    1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
    2. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.139
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,100,376,000.00	1,095,314,950.00	99.54
Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	1,100,376,000.00	1,095,314,950.00	99.54
Program Pengembangan Ekspor	257,630,000.00	245,578,603.00	95.32
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	257,630,000.00	245,578,603.00	95.32
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	373,530,430.00	341,128,860.00	91.33
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	89,655,400.00	74,063,914.00	82.61
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	283,875,030.00	267,064,946.00	94.08

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.5 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan diukur dengan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.140

Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 5, 6, 8, 9 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100) Atau (8=(3-(5-3))/3*100%	9 (9=5/4*100) Atau (9=(4-(5-4))/4*100%	10 (10=5/6*100) Atau (10=(6-(5-6))/6*100%	11 (11=5/7*100) Atau (11=(7-(5-7))/7*100%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	35.182,00	35.408,24	36.010,28	36,302,34	-	102,35	101,70	99,20	-
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19 - 2,79	3,05	1,72 - 2,54	4,76	88,28	90,68	79.92	135.92

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Sasaran Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja) Provinsi NTB Tahun 2025 sebesar 36.010,28. Angka ini menunjukkan target teah terlampaui dengan capaian sebesar 101,70%. Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1052/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-nusa-tenggara-barat-februari-2025-.html

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (35.182,00 Juta Rupiah/Tenaga Kerja), maka terdapat deviasi +828,28 Juta Rupiah/Tenaga Kerja. Ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 melampaui realisasi tahun 2024 atau capaian sebesa 102,35%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD Tahun 2030

Capaian kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi NTB Tahun 2025 sebesar 36.010,28 (Juta Rupiah/Tenaga Kerja) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 sebesar 36.302,34 (Juta Rupiah/Tenaga Kerja) terdapat deviasi -292,06 (Juta Rupiah/Tenaga Kerja). Capaian atas realisasi ini sebesar 99,20%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

Target nasional tidak ada, sehingga kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Keberhasilan capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi NTB ditentukan oleh kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi, iklim investasi dan usaha yang kondusif, serta kemudahan berusaha yang mendorong formalisasi kegiatan ekonomi. Keberhasilan juga ditopang oleh peningkatan kualitas dan relevansi kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan *link and match* dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta perluasan penempatan tenaga kerja formal. Selain itu, penguatan regulasi ketenagakerjaan, penegakan kepatuhan terhadap norma kerja, dan perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan berperan penting dalam mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor

formal, sehingga meningkatkan produktivitas sekaligus perlindungan tenaga kerja.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2025 telah melampaui realisasi tahun 2025 dan target 2025. Beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

a. Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang kondisten dilaksanakan setiap tahun.
b. Peran aktif dunia usaha dan industri dalam menyerap tenaga kerja lokal.
c. Stabilitas ekonomi daerah yang relatif mendukung penciptaan lapangan kerja.
d. Penyediaan akses informasi pasar kerja melalui bursa kerja, media online, dan *job fair*.

Namun walaupun kinerja telah tercapai, masih terdapat faktor-faktor penghambat yang jika tidak diantisipasi maka dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, di antaranya:

a. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pasar.
b. Masih lambatnya transisi tenaga kerja dari sektor informal ke formal
c. Belum meratanya pertumbuhan lapangan kerja formal
d. Masih rendahnya cakupan jaminan sosial terutama di sektor mikro dan informal.
e. Masih kurangnya kesadaran pekerja dan pemberi kerja terhadap jaminan sosial
f. Belum optimalnya implementasi regulasi ketenagakerjaan
g. Stereotipe dan tanggung jawab rumah tangga atas pekerja perempuan berdampak pada akses pekerjaan formal yang terbatas.
h. Masih kurangnya fasilitas pendukung seperti penitipan anak dan transportasi
i. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan.

Upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah:

f. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industry dan kewirausahaan.
g. Perluasan kesempatan kerja melalui kemitraan dengan sektor swasta, UMKM, dan investor untuk menciptakan lapangan kerja baru.
h. Optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan penyebaran informasi lowongan kerja yang merata, termasuk di daerah terpencil.
i. Pendampingan dan program inkubasi usaha bagi tenaga kerja sektor informal agar dapat beralih ke pekerjaan formal atau mandiri.
j. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan program ketenagakerjaan dengan perubahan kebutuhan pasar.

k. Advokasi kepada perusahaan terkait dengan hak-hak pekerja termasuk fasilitas minimal yang harus tersedia di perusahaan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.995.612.090,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.936.179.623,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 2,84%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.141
Penghitungan Efisien Anggaran Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran/ Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4.995.612.090,00	4.936.179.623,00	35.408,24	36.010,28	137.076,96	141.086,15	0,97	0,03	2,84

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan yang belum cukup efektif dalam keberhasilan pencapaian target. Hanya ada 1 (satu) program yang mendukung pencapaian target ini, yaitu:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja (realisasi anggaran 99,71%) dengan Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisais anggaran 96,33%) dengan 3 kegiatan yaitu :
   1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
   2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
   3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

c. Program Penempatan Tenaga Kerja (realisasi anggaran 97,88%) dengan 4 kegiatan yaitu :
   1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   3. Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
   4. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

d. Program Hubungan Industrial (realisasi anggaran 99,98%) dengan 3 kegiatan yaitu :
   1. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
   2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
   3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (realisasi anggaran 99,80%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.142
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	92,499,980.00	92,229,500.00	99.71
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	92,499,980.00	92,229,500.00	99.71
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	1,334,778,084.00	96.33
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	1,101,271,180.00	96.46
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	214,534,904.00	95.34
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	18972000.00	99.99
Program Penempatan Tenaga Kerja	305,571,200.00	299097637.00	97.88
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59,679,200.00	58,415,500.00	97.88
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100,192,000.00	98,549,145.00	98.36

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	120,200,000.00	117,029,592.00	97.36
Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25,500,000.00	25,103,400.00	98.44
Program Hubungan Industrial	2,539,899,764.00	2,539,461,445.00	99.98
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,799,900.00	99.60
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	76,933,400.00	76,903,200.00	99.96
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2,412,966,364.00	2,412,758,345.00	99.99
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	671,968,696.00	670,612,957.00	99.80
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	671,968,696.00	670,612,957.00	99.80

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran. Pengangguran yaitu:

- penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
- penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,
- penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan,
- kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

TPT Tahun 2025 sebesar 3,05%. Angka ini berada di atas target 2,19 - 2,79% atau dengan capaian 90,68% (belum mencapai target).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi TPT tahun 2024 sebesar 2,73%. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2025 maka terdapat deviasi -0,32 poin atau capaian 88,28%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD Tahun 2030

Target akhir TPT pada RPJMD sebesaar 1,72 - 2,54%. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2025 maka terdapat deviasi -0,51 poin capaian 79,92%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

TPT Provinsi NTB secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional, menjadikannya salah satu daerah dengan performa ketenagakerjaan terbaik. Per Agustus 2025, TPT NTB sebesar 3,05%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,76% atau capaian 135,92%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 3,05%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren fluktuatif hingga Agustus 2025. Pada Agustus 2025, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,33% poin dibandingkan dengan Agustus 2024. Kondisi ini disebabkan karena adanya kenaikan angka pengangguran selama 1

(satu) tahun terakhir disebabkan oleh meningkatnya lulusan SMP, SMK dan Perguruan Tinggi yang mencari pekerjaan. Disisi lain daya tampung lapangan usaha terbatas. Faktor penyebab kegagalan yang menyebabkan TPT mengalami kenaikan atau tidak mencapai target yang ditetapkan:

a. Ketidaksesuaian kriteria pencari kerja dengan lowongan yang ada.
b. Pencari kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi/persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
c. Pelaksanaan Job Fair selama 1 (satu) hari masih dianggap kurang oleh pengunjung/pelamar, karena banyak pengunjung/pelamar datang setelah penutupan acara.
d. Setelah penempatan, pencari kerja atau perusahaan tidak melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, sehingga mempengaruhi perhitungan data TPT.

Berdasarkan analisasi ketidaktercapaian target di atas, berikut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB

a. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri dan kewirausahaan.
b. Perluasan kesempatan kerja melalui kemitraan dengan sektor swasta, UMKM, dan investor untuk menciptakan lapangan kerja baru.
c. Optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan penyebaran informasi lowongan kerja yang merata, termasuk di daerah terpencil.
d. Pendampingan dan program inkubasi usaha bagi tenaga kerja sektor informal agar dapat beralih ke pekerjaan formal atau mandiri.
e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan program ketenagakerjaan dengan perubahan kebutuhan pasar.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator TPT Kerja pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.995.612.090,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.936.179.623,00. Tidak terdapat efsiensi anggaran karena antara capaian kinerja dengan anggaran yang terserap tidak berbanding lurus.

Tabel 3.143
Penghitungan Efisien Anggaran TPT

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	(Pagu Anggaran/ Target Outcome)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.995.612.090,00	4.936.179.623,00	2.19 - 2,79	3,05	1.618.419.548,52	1.790.541.967,74	0,90	-0,10	-9,61

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan yang belum cukup efektif dalam keberhasilan pencapaian target. Hanya ada 1 (satu) program yang mendukung pencapaian target ini, yaitu:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja (realisasi anggaran 99,71%) dengan Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (realisais anggaran 96,33%) dengan 3 kegiatan yaitu :
   1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
   2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
   3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

c. Program Penempatan Tenaga Kerja (realisasi anggaran 97,88%) dengan 4 kegiatan yaitu :
   1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   3. Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
   4. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

d. Program Hubungan Industrial (realisasi anggaran 99,98%) dengan 3 kegiatan yaitu :
   1. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
   2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
   3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (realisasi anggaran 99,80%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.144
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator TPT

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	92,499,980.00	92,229,500.00	99.71
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	92,499,980.00	92,229,500.00	99.71
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,385,672,450.00	1,334,778,084.00	96.33
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,141,669,250.00	1,101,271,180.00	96.46
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	225,029,800.00	214,534,904.00	95.34
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	18,973,400.00	18972000.00	99.99

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penempatan Tenaga Kerja	305,571,200.00	299097637.00	97.88
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59,679,200.00	58,415,500.00	97.88
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100,192,000.00	98,549,145.00	98.36
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	120,200,000.00	117,029,592.00	97.36
Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25,500,000.00	25,103,400.00	98.44
Program Hubungan Industrial	2,539,899,764.00	2,539,461,445.00	99.98
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,799,900.00	99.60

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	76,933,400.00	76,903,200.00	99.96
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2,412,966,364.00	2,412,758,345.00	99.99
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	671,968,696.00	670,612,957.00	99.80
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	671,968,696.00	670,612,957.00	99.80

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.6 Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan diukur dengan indikator kinerja Inklusi Keuangan. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di suatu provinsi yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Tingkat Inklusi Keuangan per Provinsi adalah persentase dari perbandingan antara jumlah responden di suatu provinsi yang “menggunakan” atau usage produk dan layanan jasa keuangan formal dengan jumlah seluruh responden di suatu provinsi. Tingkat inklusi keuangan menggambarkan persentase responden yang menggunakan sedikitnya satu produk atau layanan keuangan formal.

Peningkatan tingkat inklusi keuangan per provinsi menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat di provinsi tersebut baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan per provinsi yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai enabler dalam pembangunan di daerah atau provinsi tersebut.

Tabel 3.145

Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan Provinsi NTB Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Inklusi Keuangan	%	NA	88,7	NA	92,01	91,00	NA	NA	NA	NA

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

Keterangan : Rilis capaian 2025 pada bulan Maret tahun 2026

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Inklusi Keuangan untuk Provinsi NTB tahun 2025 sampai dengan saat ini masih belum ada datanya, sehingga capaiannya tidak bisa dihitung.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Inklusi Keuangan di Provinsi NTB tahun 2024 maupun tahun 2025 tidak ada datanya sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Inklusi Keuangan pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 92,01%dan realisasi tahun 2025 masih belum ada datanya. Oleh karenanya capaiannya terhadap target akhir RPJMD belum dapat dihitung.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah menargetkan inklusi keuangan di tahun 2025 sebesar 91,00%, sementara realisasi inklusi keuangan nasional tahun 2023 sebesar 75,02%, kemudian meningkat menjadi 75,02% di tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 80,51% di tahun 2025. Sementara untuk inklusi keuangan di Provinsi NTB tahun 2025 masih belum ada datanya, sehingga capaiannya terhadap target nasional tidak bisa dihitung.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Upaya meningkatkan inklusi keuangan di NTB tahun 2025 difokuskan pada perluasan akses layanan keuangan formal hingga ke pedesaan, mencapai target inklusi nasional 90%. Adapun beberapa upaya yang dilakukan adalah :

a. Penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025**:**
   OJK NTB mengadakan Puncak BIK dan Pasar Keuangan Rakyat di Lombok Barat/Utara, melibatkan 30 industri jasa keuangan untuk edukasi dan aktivasi produk langsung kepada masyarakat.
b. Edukasi Keuangan Masif (GENCARKAN):
   Pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) oleh Bank NTB Syariah, OJK, dan Polda NTB yang menyasar sektor pertanian dan masyarakat umum.
c. Digitalisasi dan Edukasi QRIS**:**
   Bank Indonesia NTB mendorong penggunaan QRIS dan QRIS Tap melalui *booth* edukatif interaktif untuk memperluas akses layanan keuangan digital.
d. Inklusi Keuangan bagi Disabilitas**:**
   OJK NTB proaktif menyelenggarakan edukasi keuangan khusus bagi penyandang disabilitas (misalnya di Bima) agar mendapatkan akses setara.
e. Program MAWAR EMAS (Masyarakat Sadar Literasi Keuangan Syariah):
   OJK NTB memperkuat inklusi keuangan syariah bagi nasabah dan calon nasabah, khususnya di daerah seperti Bima.
f. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026:
   Pelatihan petugas SNLIK di NTB dilaksanakan pada akhir 2025 untuk memetakan kondisi riil dan merumuskan kebijakan berbasis data yang akurat.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Provinsi NTB adalah :

a. Literasi Keuangan yang Masih Rendah
   Meskipun indeks literasi keuangan nasional meningkat (tercatat 66,46% pada Mei 2025), tingkat pemahaman masyarakat NTB, khususnya di daerah perdesaan, mengenai produk keuangan formal masih perlu ditingkatkan dibandingkan tingkat penggunaannya (inklusi). Banyak masyarakat menggunakan layanan keuangan tanpa memahami risikonya.
b. Terbatasnya Akses Digital dan Infrastruktur Fisik
   Akses digital yaitu akses terhadap layanan keuangan digital masih terbatas di daerah pelosok atau perdesaan di NTB. Sementara infrastruktur fisik yaitu jarak

ke kantor fisik lembaga jasa keuangan (perbankan/non-bank) masih menjadi kendala bagi masyarakat di wilayah terpencil.

c. Tantangan UMKM dan Sektor Informal
   Sebagian besar pelaku usaha di NTB adalah UMKM, yang seringkali menghadapi masalah: kurangnya dokumentasi keuangan yang rapi. kurangnya pendampingan untuk akses pembiayaan formal serta keterbatasan dalam memanfaatkan inovasi teknologi finansial (*fintech*).
d. Kesenjangan gender dan kelompok rentan.
   Kelompok rentan, seperti petani, nelayan, dan masyarakat dengan pendapatan rendah, masih sulit menjangkau layanan keuangan formal karena dianggap rumit atau tidak sesuai dengan kebutuhan arus kas mereka.
e. Risiko investasi ilegal dan pinjol tidak resmi.
   Tingginya paparan terhadap investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal berpotensi menimbulkan trauma atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan resmi.
f. Faktor sosial-demografis dan ekonomi. Kondisi ekonomi, seperti kontraksi ekonomi di NTB pada triwulan II-2025 (tercatat kontraksi 0,82% yoy), memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menabung atau memanfaatkan produk investasi formal

Untuk mengatasi hambatan tersebut, OJK NTB dan Pemerintah Daerah melakukan pendekatan melalui:

a. Pasar Keuangan Rakyat (PKR), yaitu kegiatan langsung di daerah untuk mengenali produk keuangan legal.
b. Digitalisasi Edukasi, yaitu pengembangan infrastruktur literasi digital (LMS/MOOC).
c. Aliansi Strategis, dengan melibatkan pemuka agama dan duta literasi keuangan untuk menjangkau masyarakat rural.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Inklusi Keuangan tahun 2025 adalah sebesar Rp1.682.713.200,00,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.606.401.738,00. Dikarenakan realisasi inklusi keungan belum ada, maka pendekatan yang dilakukan untuk menghitung efisiensi adalah dengan sisa anggaran yang digunakan dalam mencapai target. Sisa anggaran sebesar Rp76.311.462,00.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah Program Perekonomian dan Pembangunan (realisasi anggaran 94,46%), dengan kegiatan

a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.146
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Inklusi Keuangan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
Program Perekonomian dan Pembangunan	1,682,713,200.00	1,606,401,738.00	95.46
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	550,658,600.00	535,964,832.00	97.33
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	529,000,000.00	481,614,000.00	91.04
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	603,054,600.00	588,822,906.00	97.64

Sumber: BKAD NTB 2025

Tabel 3.147
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Inklusi Keuangan

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Inklusi Keuangan	1,682,713,200.00	1,606,401,738.00	88,70 %	NA	NA	18,970,836.53	NA	NA	NA

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

3.1.2.7 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat, diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial dengan capaian Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial. Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi maupun merencanakam suatu program pembangunan kesejahteraan sosial. Pengukuran ini akan menghasilkan data dan informasi tentang status kesejahteraan sosial di Provinsi NTB. Pengukuran indeks kesejahteraan sosial sebagai *baseline* data nasional dan provinsi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan program selanjutnya. Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Angka hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap program program kesejahteraan yang digulirkan pemerintah.

Tabel 3.148
Realisasi Kinerja Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	46,00	49,21	51	48	-	106,97	96.49	102,52

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebesar 49,21, realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 46,00 atau dengan capaian 106,97%. Link bukti dukung https://drive.google.com/file/d/1fosJvBdQIe-hJ8RkW1kIHn6VQ_MvEAYV/view?usp=sharing

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebesar 49,21. Capaian Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi NTB Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena berbeda indikator dengan dokumen perencanaan sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebesar 49,21. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (51), maka capaiannya sebesar 96,49% (belum mencapai target).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar/target nasional

Capaian Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi NTB Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target nasional karena tidak tersedia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Kondisi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan. Indikator-indikator utama pembentuk Indeks Kesejahteraan Sosial seperti tingkat kemiskinan, pangsa pekerja formal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Penurunan kemiskinan menjadi salah satu capaian penting tahun ini. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan NTB berada pada angka 11,78%, lebih baik daripada kondisi prapandemi, meski masih berada di atas rata-rata nasional.

Perbaikan ini menunjukkan penguatan daya beli dan pemulihan ekonomi yang perlahan mengurangi tekanan pada kelompok masyarakat rentan, Perbaikan lainnya tampak dari peningkatan pangsa pekerja formal yang mencapai 31,58% per Agustus 2025. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan pendidikan mendorong kenaikan ini. IPM NTB juga menunjukkan kemajuan. Tahun 2025, IPM NTB tercatat 73,97, atau naik 0,87 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan IPM ini tak lepas dari perbaikan pada tiga dimensi pembentuknya yaitu Harapan hidup meningkat menjadi 72,60 tahun, rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,21 tahun, dan pengeluaran riil per kapita tumbuh menjadi Rp11,92 juta. Meski berada dalam tren positif, NTB belum sepenuhnya lepas dari

tekanan Tingkat pengangguran, per Agustus 2025 tercatat meningkat. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) NTB sebesar 3,06% pada Agustus 2025, naik 0,33% poin dari tahun sebelumnya.Kondisi ini sejalan dengan penurunan pangsa pekerja di sektor pertanian yang merosot hingga -24,01 persen

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam meningatkan capaian Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial adalah:

1. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti berupa memberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial melalui pelatihan keterampilan yang terdiri dari:
   - Anak terlantar sebanyak 306 orang
   - Penyandang disabilitas terlantar sebanyak 100 orang
   - Gelandang dan Pengemis sebanyak 122 orang
   - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 60 orang
   - Lanjut Usia terlantar sebanyak 130 orang
2. Memberikan pembinaan, pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Korban Tindak Kekerasan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 60 orang
3. Memberikan pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat kepada 120 orang anak remaja putus sekolah oleh Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Mandiri dengan rentang usia antara 15 sampai 18 tahun. Jenis pelatihan keterampilan yang diberikan yang diberikan kepada penerima manfaat yaitu keterampilan tata busana, keterampilan tata rias, keterampilan tata boga, keterampilan service AC, keterampilan otomotif dan keterampilan las. Setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan masing-masing penerima manfaat diberikan bantuan sosial (*toolkit*) sesuai dengan pelatihan yang diikuti dengan harapan agar penerima manfaat remaja putus sekolah mendapatkan modal usaha untuk dapat memandirikan dirinya dan men-*generate income*.Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Indeks Kesejahteraan Sosial pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 10.614.264.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.167.715.351,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 10,46%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.149
Penghitungan Efisien Anggaran Indeks Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	(Pagu Anggaran/Target Outcome)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Indeks Kesejahteraan Sosial	10.614.264.200,00	10.167.715.351,00	46	49,21	206.618.885,41	230.744.873,91	0,90	0,10	10,46

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan yang cukup efektif dalam pencapaian Keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial (realisasi anggaran 95,80%) dengan kegiatan:
   1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

b. Program Rehabilitasi Sosial (realisasi anggaran 92,54%) dengan kegiatan:
   1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
   2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
   3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (realisasi anggaran 94,33%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

d. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (realisasi anggaran 92,23%) dengan kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Program dan Kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian Menunjang Keberhasilan Pencapaian Target adalah sebagai berikut:

a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (realisasi anggaran 78,07%) dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
b. Program Rehabilitasi Sosial (realisasi anggaran 92,54%) dengan kegiatan:
   1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
   2. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (realisasi anggaran 94,33%) dengan kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
d. Program Penanganan Bencana (realisasi anggaran 84,44%) dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.150
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemberdayaan Sosial	10,644,264,200.00	10,197,715,351.00	95.80
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	13,915,000.00	13,725,000.00	98.63
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	10,630,349,200.00	10,183,990,351.00	95.80
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	436,302,500.00	340,616,902.00	78.07

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	436,302,500.00	340,616,902.00	78.07
Program Rehabilitasi Sosial	13,306,771,039.00	12314394379.00	92.54
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	3,546,874,570.00	3422660361.00	96.50
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	5,604,117,705.00	5,364,217,260.00	95.72
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	2,649,601,379.00	2,448,263,677.00	92.40
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	817,288,785.00	528,372,361.00	64.65
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Di Dalam Panti	688,888,600.00	550,880,720.00	79.97
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7,030,536,800.00	6,631,821,874.00	94.33

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	6,189,500.00	195,000.00	3.15
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	7,024,347,300.00	6,631,626,874.00	94.41
Program Penanganan Bencana	1,458,866,700.00	1,231,823,459.00	84.44
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi	1,458,866,700.00	1,231,823,459.00	84.44
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	184,617,350.00	172,125,330.00	93.23
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	184,617,350.00	172,125,330.00	93.23

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.8 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan

Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan yang Berkelanjutan diukur dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang disusun oleh Badan Pangan Nasional untuk menilai kondisi ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di tingkat wilayah. Semakin tinggi skor IKP, semakin baik ketahanan pangan wilayah tersebut. IKP digunakan sebagai dasar kebijakan untuk mengidentifikasi daerah rentan dan memprioritaskan intervensi program ketahanan pangan Adapun capaian sasaran strategis kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.151
Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan yang Berkelanjutan Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,44	78,83	74,70	80,82	73,2	95,23	94,76	92,43	102,04

Sumber : Bappeda NTB, 2025 diolah

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKP tahun 2025 sebesar 74,40. Realisasi ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 78,83, deviasi -4,43 poin, sehingga capaiannya sebesar 94,76%.

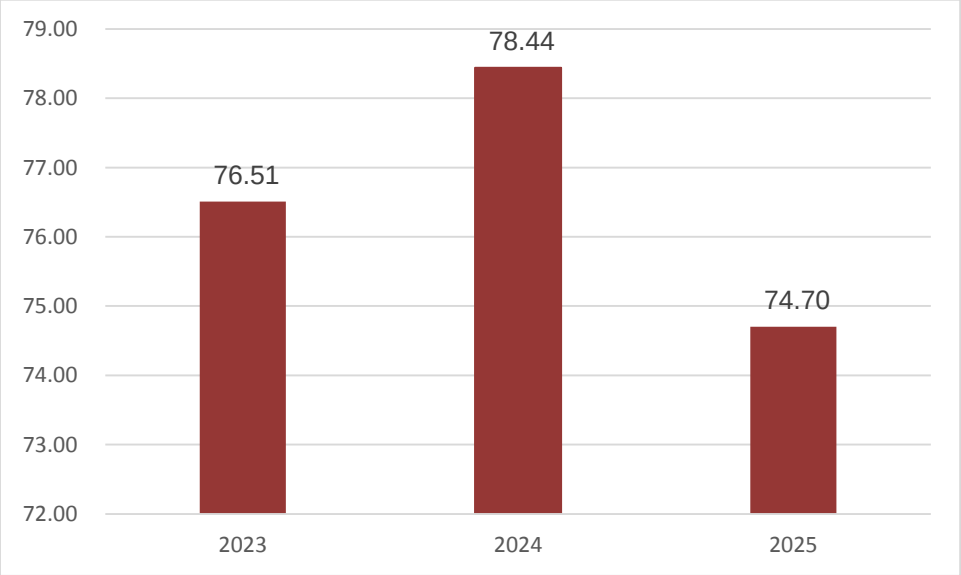
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IKM mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, IKP sebesar 76,51 dan mengalami kenaikan 1,93 poin menjadi 78,44. Pada tahun 2025, IKP mengalami penurunan menjadi 74,70, sehingga capaiannya sebesar 95,23% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Perbandingan IKP tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.28

Perbadingan IKP Tahun 2023-2025



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025 diolah

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

IKP pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 80,82 dan dengan realisasi 74,70 di tahun 2025, tingkat capaiannya sebesar 92,43%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Pemerintah dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menargetkan IKP Nasional sebesar 73,2 pada tahun 2025. Bila realisasi Provinsi dibandingkan dengan target nasional, maka kinerja sudah melebihi target nasional atau dengan capaian sebesar 102,05%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Kinerja yang belum mencapai target disebabkan karena:

a. Maraknya alih fungsi lahan pertanian
   Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Alih fungsi lahan banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat
b. Inflasi yang fluktuatif
   Inflasi di Provinsi NTB sepanjang tahun 2025 cenderung meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
c. Tingginya angka stunting
   Ini menandakan belum optimalnya pemanfaatan pangan di tengah-tengah masyarakat. Sebab stunting berkaitan dengan pola makan, pola hidup, dan pengetahuan masyarakat akan gizi.
d. Tingginya *Food Loss and Waste*
   Kondisi kehilangan pasca panen dan sisa pangan yang terbuang dari konsumsi masih cukup tinggi. Pemerintah Provinsi NTB belum optimal dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mengantisipasi kondisi ini.
e. Distribusi dan infrastruktur uang belum merata
   Kondisi topografi di Provinsi NTB berakibat infrastruktur belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil. Hal ini ini berdampak pada distribusi pangan yang tidak merata, sehingga berpengaruh padda kesenjangan harga dan ketersediaan pangan.

Upaya meningkatkan IKP di NTB difokuskan pada optimalisasi lahan (10.574 ha), penggunaan benih unggul, dan distribusi pupuk bersubsidi. Produksi padi Provinsi NTB pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dan mencatat surplus. Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah, sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju swasembada pangan.

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi NTB tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka tersebut meningkat 16,85 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 1.453.408 ton GKG, didukung peningkatan luas panen dari 281.718 hektare menjadi 322.927 hektare serta produktivitas dari 51,59 kuintal per hektare menjadi 52,59 kuintal per hektare. Secara rinci, produksi padi terbesar tercatat di Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 hektare dan produksi 421.941 ton GKG, disusul Sumbawa seluas 74.736 hektare dengan produksi 398.864 ton GKG, serta Lombok Timur seluas 45.387 hektare dengan produksi 243.474 ton GKG. Daerah lainnya meliputi Kabupaten Bima 208.018 ton GKG, Dompu 151.335 ton GKG, Lombok Barat 135.678 ton GKG, Sumbawa Barat 74.496 ton GKG, Lombok

Utara 33.320 ton GKG, Kota Mataram 17.727 ton GKG, dan Kota Bima 13.431 ton GKG.

Capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak melalui optimasi lahan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bersertifikat, penyaluran pupuk subsidi sesuai RDKK, serta penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Ada juga program penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.

Beberapa poin utama upaya peningkatan IKP Provinsi NTB yaitu : (a) **Peningkatan ketersediaan pangan melalui o**ptimasi lahan pertanian (padi, jagung, kedelai, umbi-umbian) dan penggunaan benih unggul bersertifikat untuk surplus produksi, (b) **Penguatan infrastruktur dan teknologi melalui** modernisasi irigasi, pemanfaatan teknologi hemat air, dan penggunaan aplikasi digital untuk memantau harga, iklim, dan menghubungkan petani dengan pasar, (c) **Diversifikasi dan hilirisasi melalui p**engembangan industri pengolahan hasil pertanian/perikanan (agro processing center) untuk mengurangi *post-harvest loss* dan menambah nilai jual, (d) **Peningkatan akses dan konsumsi melalui p**enguatan cadangan pangan desa/daerah, optimalisasi pekarangan untuk kebun gizi keluarga, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah stunting, (e) S**tabilitas pasokan melalui i**ntervensi pemerintah terhadap rantai pasok jagung dan komoditas utama lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan (f) **Kolaborasi stakeholder melalui s**inergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, TNI/Polri, serta akademisi dalam pengelolaan pangan dan penguatan kelembagaan petani

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan IKP adalah : (a) **Ancaman iklim ekstrem dan dampaknya :** perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu, termasuk kekeringan ekstrim yang berpotensi menyebabkan gagal panen (puso) dan menurunkan produktivitas pertanian. Kondisi ini mengancam ketersediaan pangan; (b) **Alih fungsi lahan pertanian : k**onversi lahan produktif menjadi kawasan non-pertanian (industri atau perumahan) memperkecil areal tanam, yang secara langsung mengancam keberlanjutan produksi bahan pangan; (c) **Tantangan keterjangkauan dan ekonomi : m**asih tingginya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan membatasi kemampuan akses ekonomi masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi;(d) **Kerentanan gizi masyarakat : s**elain ketersediaan fisik, isu pemanfaatan pangan yang terkait dengan tingkat gizi masyarakat, seperti prevalensi stunting, masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan indikator "pemanfaatan" dalam IKP; (e) **Krisis regenerasi petani :** kurangnya minat generasi muda dalam sektor pertanian menyebabkan krisis tenaga kerja produktif di lapangan, yang menghambat

inovasi dan produktivitas jangka Panjang; (f) **Distribusi dan infrastruktur :** meskipun terjadi surplus di tingkat produsen, tantangan pada rantai pasok dan distribusi seringkali menyebabkan disparitas harga antar wilayah di NTB; (g) **Perilaku konsumsi :** adanya kecenderungan mindset masyarakat yang masih menganggap pangan lokal sebagai "makanan kelas dua" dibandingkan beras, sehingga menghambat diversifikasi pangan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Produksi dan Intensifikasi Pertanian
    - Peningkatan Luas Tanam: Mentargetkan luas area tanam mencapai 430 ribu hektare pada 2025 untuk meningkatkan produksi padi dan jagung.
    - Optimalisasi Lahan (OPLAH): Melakukan pendampingan intensif pada program optimalisasi lahan untuk memastikan NTB tetap menjadi lumbung pangan.
    - Intensifikasi dan Ekstensifikasi: Mengalokasikan APBD khusus tahun 2025 sebesar Rp9,2 miliar untuk meningkatkan produktivitas.
    - Modernisasi Irigasi: Terus mensosialisasikan dan membangun infrastruktur irigasi modern untuk mengatasi keterbatasan air.
2. Stabilitas Pasokan dan Keterjangkauan Harga
    - Cadangan Pangan Pemerintah (CPP): Menyerap hasil panen petani (terutama jagung) untuk dijadikan stok cadangan, dengan penugasan ke Bulog untuk menjaga kualitas, contohnya jagung pipilan kering dengan kadar air 14%.
    - Gerakan Pangan Murah (GPM): Secara rutin menggelar GPM, terutama di daerah rawan pangan atau untuk mengintervensi kenaikan harga (misalnya GPM di Lombok Barat).
    - Bantuan Pangan Beras: Penyaluran bantuan sosial pangan beras secara masif kepada masyarakat untuk menjaga daya beli.
3. Mitigasi Risiko dan Adaptasi Iklim
    - Penanganan Darurat Bencana: Mengingat NTB rentan bencana, dilakukan penguatan sarana prasarana penanggulangan bencana pertanian serta pemaduan program dengan pihak terkait.
    - Penguatan Infrastruktur: Memperkuat infrastruktur untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap produktivitas.
4. Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Pangan
    - Diversifikasi Pangan Lokal: Mengembangkan pangan alternatif lokal sebagai pengganti beras untuk meningkatkan keragaman gizi masyarakat.
    - Pemanfaatan Pekarangan: Mendorong masyarakat pedesaan untuk menanam sayuran dan buah-buahan secara mandiri.

5. Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi

- Digitalisasi Pengelolaan Pangan: Mempercepat sistem digitalisasi dalam pengelolaan cadangan pangan nasional (CPP) untuk mempermudah pemantauan suplai.
- Pembentukan Koperasi Desa: Mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai saluran distribusi produk pangan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Pagu anggaran untuk mencapai Indeks Ketahanan Pangan sebesar Rp 1.090.597.000. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.005.131.207,00. Efisiensi anggaran sebesar 2,74%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel …….:

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang cukup efektif menunjang keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (realisasi anggaran 99,50%) dengan kegiatan :
   1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
   2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
   3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan (realisasi anggaran 92,64%) dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Adapun program dan kegiatan yang menghambat keberhasilan pencapaian target adalah Program Penanganan Kerawanan Pangan (realisasi anggaran 78,76%) dengan kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi.

Tabel 3.152
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKP

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Indeks Ketahanan Pangan	1,090,597,000.00	1,005,131,207.00	78,83	74,70	13.455.571,71	13.834.796,40	0,97	0,03	2,74

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.153
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKP

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	634,997,000.00	631,796,784.00	99.50
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	485,497,000.00	485,315,500.00	99.96
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	23,500,000.00	20,621,284.00	87.75
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	126,000,000.00	125,860,000.00	99.89
Program Penanganan Kerawanan Pangan	351,200,000.00	276,620,923.00	78.76

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	46,100,000.00	27040000.00	58.66
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	305,100,000.00	249580923.00	81.80
Program Pengawasan Keamanan Pangan	104,400,000.00	96,713,500.00	92.64
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	104,400,000.00	96,713,500.00	92.64

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.9 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan

Sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perdesaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa sebagai pusat pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perdesaan tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat agar desa mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi penting mengingat sebagian besar wilayah dan penduduk di Nusa Tenggara Barat berada di kawasan perdesaan, sehingga pemerataan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian sasaran ini diukur melalui peningkatan nilai Indeks Desa yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam berbagai dimensi pembangunan. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.154
Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Pedesaan

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (8=5/3*100)**	**9 (9=5/4*100)**	**10 (10=5/6*100)**	**11 (11=5/7*100)**
Indeks Desa	%	77.08	77.88	78.81	81.33	-	101.93	100,89	97	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

Pada tahun 2024, Indeks Desa ditetapkan sebagai indikator tunggal pembangunan desa yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT. Indeks Desa merupakan hasil pengukuran terhadap 6 (enam) dimensi dan 48 (empat puluh delapan) indikator penyusun. Keenam dimensi itu adalah Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas, dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025**

   Capaian Indeks Desa Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebesar 78,81% dengan tingkat capaian 100,89%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 77,88%. Kenaikan 0,93 poin ini menjadikan Provinsi NTB sebagai Provinsi yang tidak memiliki Desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Link bukti dukung https://drive.google.com/file/d/1_miBkXJ-NhUxoFMc0Ramk5v4CCQGaZ3x/view?usp=sharing

2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Indeks Desa Provinsi NTB pada tahun 2024 adalah sebesar 77,08 % dan meningkat sebesar 1,49 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelum 2023, karena indikator sebelumnya untuk melihat kemandirian dan pemberdayaan desa adalah dengan indicator Indeks Desa Membangun (IDM).

3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**

   Realisasi Indeks Desa pada tahun 2025 adalah sebesar 77,08% atau telah tercapai sekitar 97 persen dari target yang telah ditetapkan pada periode akhir RPJMD yaitu sebesar 81,33% pada tahun 2030.

4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

   Pada tingkat nasional, pengukuran Indeks Desa tidak disajikan dalam bentuk persentase nilai indeks, melainkan diterjemahkan ke dalam klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan desa berdasarkan berbagai dimensi pembangunan. Jika dibandingkan dengan provinsi terdekat, seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur, maka capaian desa di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.155
Capaian Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, 2025

No.	Provinsi	Status Desa					Jumlah Desa
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1.	NTB	498	405	118	0	0	1.021
2.	NTT	100	552	1.758	624	103	3.137
3.	Bali	524	94	18	0	0	636
Indonesia		20.503	23.579	21.813	4.672	4.694	75.265

Sumber: Kementerian Desa dan PDT, 2025

Berdasarkan data tersebut, persentase Desa Mandiri di Provinsi NTB mencapai 48,78% dari total 1.021 desa. Capaian ini masih berada di bawah Provinsi Bali yang memiliki persentase Desa Mandiri hingga 82,39%, namun jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTT yang hanya mencapai 3,18%.

Sementara itu, secara nasional persentase Desa Mandiri di Indonesia tercatat sebesar 27,24%.

Dengan demikian, capaian Provinsi NTB berada di atas rata-rata nasional dan juga lebih tinggi dibandingkan provinsi tetangga, yaitu Provinsi NTT, yang menunjukkan perkembangan status kemandirian desa yang relatif lebih baik di wilayah tersebut. Status Desa Mandiri ini menunjukan bahwa desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan social, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Capaian Indeks Desa yang melampaui target tahun 2025 yang telah ditetapkan pada RPJMD 2025-2029 tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) sebagai perangkat daerah pengampu pencapaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perdesaan. Capaian Indeks Desa yang melampaui rata-rata nasional dengan rincian pada setiap dimensi nya adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Layanan Dasar dengan Sub Dimensi Pendidikan, Sub Dimensi Kesehatan, dan Sub Dimensi Utilitas Dasar, pada tahun 2025 rata-rata capaian dimensi ini di Provinsi NTB adalah sebesar 141,7 dari 170 untuk capaian maksimal nya.
b. Dimensi Sosial dengan Sub Dimensi Aktivitas dan Sub Dimensi Fasilitas Masyarakat, dan Sub Dimensi Utilitas Dasar, pada tahun 2025 rata-rata capaian dimensi ini di Provinsi NTB adalah sebesar 68,79 dari 85 untuk capaian maksimal nya.
c. Dimensi Ekonomi dengan Sub Dimensi Produksi Desa, dan Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi, pada tahun 2025 rata-rata capaian dimensi ini di Provinsi NTB adalah sebesar 113,83 dari 160 untuk capaian maksimalnya.
d. Dimensi Lingkungan dengan Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan, dan Sub Dimensi Penanggulangan Bencana, pada tahun 2025 rata-rata capaian dimensi ini di Provinsi NTB adalah sebesar 64,66 dari 90 untuk capaian maksimalnya.
e. Dimensi Aksesibilitas dengan Sub Dimensi Kondisi Akses Jalan, dan Sub Dimensi Kemudahan Akses, pada tahun 2025 rata-rata capaian dimensi ini di Provinsi NTB adalah sebesar 45,26 dari 50 untuk capaian maksimalnya..
f. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa, dan Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa, pada tahun 2025 rata-rata capaian dimensi ini di Provinsi NTB adalah sebesar 66,23 dari 80 untuk capaian maksimal nya.

Capaian dimensi-dimensi tersebut menghasilkan skor Indeks Desa Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebesar 78,81% atau dengan kategori Maju. Sehingga, rata-rata desa di Provinsi NTB berstatus desa Maju yang

merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintah yang sudah baik.

Hal tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB yaitu dengan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi para aparatur desa di 10 Kabupaten/Kota di NTB dalam pengelolaan aset desa, fasilitasi kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) serta peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berupa bimbingan teknis peningkatan kapasitas kader Standar Pelayanan Minimum (SPM) Posyandu.
Selain itu, DPMPD Dukcapil sebagai koordinator dalam pelaksanaan Program Unggulan Desa Berdaya yang memiliki tujuan utama penurunan kemiskinan ekstrim di tingkat desa. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program unggulan ini adalah pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan sebagai bentuk peningkatan kapasitas bagi para pendamping desa berdaya yang akan mendampingi kepala keluarga sasaran dalam pemanfaatan bantuan sosial untuk kesejahteraan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Indeks Desa pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7.018.826.725,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.247.978.552. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 12.94%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.156

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Desa

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Indeks Desa	7,018,826,725	6,247,978,552	77.08	78.81	79,279,007.13	91,058,987.09	0.87	0.13	12.94

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ini berada pada DPMPD Dukcapil dan pada Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Program Peningkatan Kerjasama Desa yang berfokus pada pelaksanaan pengembangan kawasan pedesaan yang hasilnya akan berkontribusi pada capaian Dimensi Lingkungan dan Dimensi Ekonomi, Program Administrasi Pemerintahan Desa yang telah melaksanakan pembinaan terhadap para aparatur desa untuk peningkatan pada Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan LKD yang melaksanaan pembinaan terhadap kader dan pengurus Posyandu yang saat ini memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan SPM di tingkat Desa yang secara tidak langsung akan berkontribusi pada capaian Dimensi Layanan Dasar pada perhitungan Indeks Desa.

Program transmigrasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa melalui pemerataan penduduk, pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, serta peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan perdesaan. Kegiatan pada ketiga program urusan transmigrasi telah berkontribusi dalam pencapaian target Indeks Desa tahun 2025. Detail program dan kegiatan pendukung dalam pencapaian Indeks Desa tahun 2025 ini adalah:

1. Program Peningkatan Kerja Sama Desa (realisasi anggaran 99,80%), dengan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa (realisasi anggaran 88,78%), dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (realisasi anggaran 88,83%) dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 99,64%), dengan kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 98,70 %) dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (realisasi anggaran 81,60%) dengan kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.157

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Desa

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	125,708,000.00	125,462,200.00	99.80
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	125,708,000.00	125,462,200.00	99.80
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,227,204,600.00	2,864,987,255.00	88.78
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,227,204,600.00	2,864,987,255.00	88.78
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,604,949,300.00	3,202,332,607.00	88.83

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,604,949,300.00	3202332607.00	88.83
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	16240500.00	99.64
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	16,298,835.00	16,240,500.00	99.64
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14,666,000.00	14,476,000.00	98.70
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	29,999,990.00	24,479,990.00	81.60
Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	29,999,990.00	24,479,990.00	81.60

Sumber: BKAD NTB, 2025

3.1.2.10 Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Menurunnya Disparitas Harga Antar Wilayah Dalam Provinsi diukur dengan indikator kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi. Adapun capaian sasaran kinerja Menurunnya Disparitas Harga Antar Wilayah Dalam Provinsi Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.158

Realisasi Kinerja Menurunnya Disparitas Harga Antar Wilayah Dalam Provinsi

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7,30	16,21	6,82	NA	-	-22,05	-37,68	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi adalah disparitas harga pada barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara kabupaten/kota di dalam satu provinsi. Pada tahun 2025, Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi untuk Provinsi NTB realisasinya sebesar 16,21, lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 7,30 sehingga capaiannya sebesar -22,05% (target tidak tercapai). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan harga yang besar atau disparitas harga yang tinggi antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya di Provinsi NTB.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Pada tahun 2024, Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi di Provinsi NTB tidak ada datanya, namun di tahun 2025 realisasinya sebesar 16,21. Hal ini menyebakan tidak dapat dilakukan perbandingan natara tahun 2025 dengan 2024.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**
   Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 6,82 dan realisasi tahun 2025 ini sebesar 16,21 sehingga capaiannya sebesar -37,68% terhadap target akhir RPJMD.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional**
   Dalam RPJPN Tahun 2025-2029 indikator yang digunakan untuk mengukur integrasi ekonomi domestik dan global salah satunya adalah biaya logistik yang ditargetkan sebesar 13,52% dari PDB. Untuk di tingkat daerah, indikator ini kemudian diturunkan menjadi Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi. Realisasi Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi di Provinsi NTB sebesar 16,21 tidak bisa dibandingkan dengan nasional karena perbedaan indikator tersebut.
5. **Analisis Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Secara konseptual, semakin rendah nilai koefisien variasi, maka semakin kecil tingkat kesenjangan harga antar wilayah. Realisasi Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi sebesar 16,21 mengindikasikan bahwa perbedaan harga komoditas antar kabupaten/kota di Provinsi NTB masih relatif tinggi dibandingkan dengan target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas distribusi barang, keterjangkauan harga antar wilayah, pola konsumsi serta kelancaran rantai pasok masih menghadapi tantangan.
   Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting diukur dari inflasi pangan. Inflasi pangan tahun 2025 ditetapkan target kinerja 2-4%, diukur dari inflasi sub makanan. Sampai dengan bulan Desember 2025, kelompok ini mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,01% atau terjadi kenaikan indeks dari 109,11 pada Desember 2024 menjadi 113,29 pada Desember 2025. Sub kelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu: sub kelompok rokok dan tembakau sebesar 3,92 persen; sub kelompok makanan sebesar 3,90%; dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,06%. Sub kelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu: sub kelompok rokok dan tembakau sebesar 3,92%; sub kelompok makanan sebesar 3,90%; dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,06%, Tingkat inflasi yang tinggi terutama untuk kelompok makanan inilah yang menyebabkan terjadi gejolak harga yang relatif tinggi dengan kata lain harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting mengalami kenaikan, namun ketersediaan stok masih tetap terjaga.
   Pemantauan dan pengawasan harga dan stok barang pokok dan barang penting lainnya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan

dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan dan pengawasan tersebut dilakukan di Pasar Mandalika, Pasar Pagesangan, Pasar Sindu, Pasar Kebon Roek, operasi pasar di beberapa distributor, serta melaksanakan Pasar Murah. Selama tahun 2025 telah dilaksanakan pasar murah sebanyak 24 (dua puluh empat) kali di Pulau Lombok. Kegiatan pasar murah hanya dilaksanakan di Pulau Lombok sebagai bentuk efisiensi anggaran serta untuk menghindari biaya operasional yang tinggi dari pihak distributor.

Mengingat capaian Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Provinsi Tahun 2025 masih berada di bawah ekspektasi yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terstruktur dan terintegrasi guna menurunkan tingkat disparitas harga secara bertahap, langkah strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan penting.
b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting secara *real time* guna mendeteksi lebih dini potensi lonjakan harga dan gangguan distribusi
c. Operasi pasar pada wilayah dengan tingkat disparitas tinggi akan ditingkatkan, khususnya pada komoditas strategis
d. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia UKM, sehingga dapat menghasilkan produk berorientasi pasar dan berdaya saing tinggi.
e. Meningkatkan kondisi dan sarana pelabuhan agar kegiatan ekspor dan impor dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui daerah lain, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan meningkatkan daya saing.
f. Penguatan dan peran aktif TPID daerah, satgas pangan dan stakeholder terkait dalam rangka memperlancar arus barang antar wilayah.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Pagu anggaran untuk mencapai target Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Provinsi sebesar Rp253.680.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 251.048.600,00. Tidak terdapat efisiensi anggaran karena pencapaian kinerja sangat jauh dari target yang ditetapkan namun anggaran yang terserap sangat besar.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Hanya ada 1 (satu) program dalam pencapaian kinerja, yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (realisasi anggaran 98,96%). Kinerja yang tidak tercapai namun penyerapan anggaran yang besar menunjukkan program ini belum efektif dalam mencapai target kinerja. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.159
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	253,680,000.00	251,048,600.00	98.96
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Provinsi	24,937,200.00	23,203,600.00	93.05
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	210,500,000.00	209,879,300.00	99.71
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya	18,242,800.00	17,965,700.00	98.48

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.11 Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Kontribusi Agromaritim diukur dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim. Adapun capaian sasaran strategis kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.160

Realisasi Sasaran Kinerja Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim Provinsi NTB Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	5,30	5,3-6,4	9,8	9,6-10,00	-	184,91	184,91	100,00	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

a. **Analisis Capaiam Kinerja:**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**
   Indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim diukur berdasarkan hasil rilis BPS Provinsi NTB. Untuk tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 9,8% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 5,3-6,4%, sehingga capaiannya sebesar 184,91%. Link bukti dukung https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uuMbFIISatWQhHw8R8zv_F7kbytW0G8A/edit?usp=sharing&ouid=107810802840933058928&rtpof=true&sd=true
2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Pada tahun 2024, Indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim sebesar 5,30% dan di tahun 2025 meningkat menjadi 9,8% sehingga capaian kinerjanya sebesar 184,91%.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**
   Persentase Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 9,6-10,0% dan realisasi tahun 2025 ini sebesar 9,8% sehingga capaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% dan rasio PDB industri pengolahan sebesar 20,80%, sementara target untuk indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim tidak disebutkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Oleh karenanya realisasi indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim Provinsi NTB tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Peningkatan PDRB Subsektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim di Provinsi NTB pada tahun 2025 diproyeksikan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi NTB secara strategis berfokus pada hilirisasi produk pertanian dan kelautan untuk meningkatkan nilai tambah, ditandai dengan penyusunan Roadmap Industri Agromaritim 2025–2029. Adapun beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan PDRB Subsektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim adalah sebagai berikut : (a) mengidentifikasi 38 komoditas unggulan berbasis agro maritim (pertanian dan kelautan) untuk diolah di dalam daerah, guna melepaskan diri dari ketergantungan ekspor bahan mentah, (b) menyusun Roadmap Industri Agromaritim 2025–2029 sebagai pedoman strategis untuk mengintegrasikan potensi hulu hingga hilir, yang diharapkan mendorong industrialisasi yang berdaya saing global, (c) mengembangkan kawasan industri dan sentra pengolahan di berbagai kabupaten, untuk lebih mensinergikan program agromaritim. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan

ekonomi non-tambang, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui hilirisasi komoditas unggulan

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim sebesar Rp4.615.986.671,00. Realisasi anggaran sebesar Rp4.347.202.952,00. Efisiensi anggaran sebesar 49,07%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Seluruh program dan kegiatan efektif dalam menunjang pencapaian target. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (realisasi anggaran 94,64%) dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
   b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (realisasi anggaran 88,04%) dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.
   c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (realisasi anggaran 90,64%) dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 3.161
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKD

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x 100)
Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	4.615.968.671,00	4.347.202.952,00	5,3	9,8	443.592.137,96	870.937.485,09	0,51	0,49	49,07

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

c. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.162
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4,232,888,671.00	4,005,899,332.00	94.64
Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4,232,888,671.00	4,005,899,332.00	94.64
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	227,820,000.00	200,580,320.00	88.04
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	227,820,000.00	200,580,320.00	88.04

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	155,260,000.00	140,723,300.00	90.64
Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	155,260,000.00	140723300.00	90.64

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.12 Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) diukur dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Adapun capaian sasaran strategis kinerja Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.163
Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim
(Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,54	3,2	5,03	4,99	-	326,62	157,19	100,80	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

a. Analisis Capaian Kinerja:

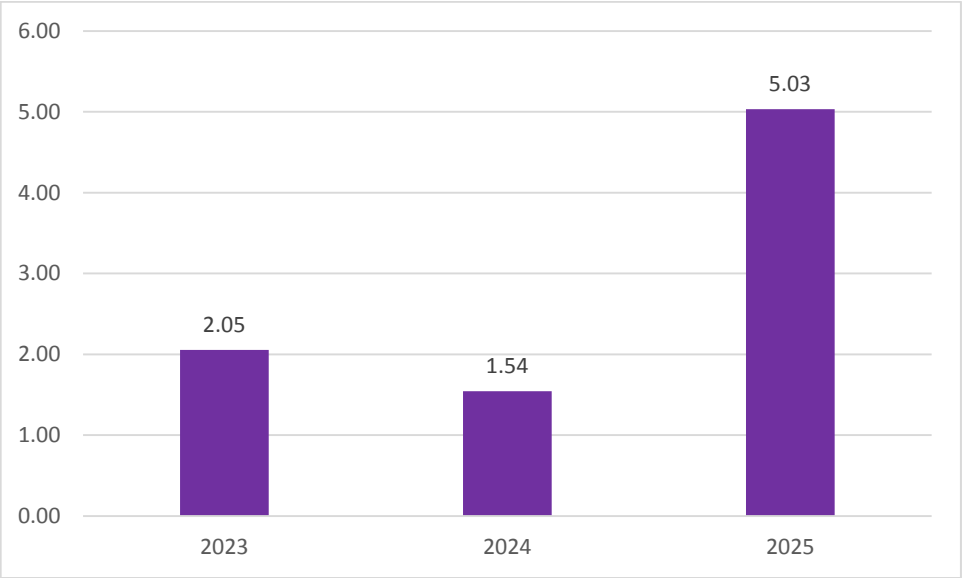
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diukur dengan mengurangi nilai PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun ini dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun sebelumnya dikali 100%. Realisasi indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 5,03%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 3,2%. Berdasarkan Rilis BPS Provinsi NTB nilai PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) sebesar Rp 24.150,00 M. Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/3/UzFSTVVXUlliME5XYzBZNUwwNVFRa3h6Y1d3M1p6MDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-di-provinsi-nusa-tenggara-barat--2015.html

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 5,03%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1,54%. Adapun nilai PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 nilai PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) sebesar Rp 22.642,74 M, meningkat di tahun 2024 menjadi Rp 22.992,49 M dan Kembali menglami peningkatan di tahun 2025 menjadi Rp 24.150,00 M. oleh karenanya capaian indikator ini sebesar 326,62% dari realisasi tahun 2024. Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 diolah

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029**

   Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 4,99% dan capaian tahun 2025 ini sebesar 100,80% dari target tersebut.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional**

   Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,2% dan sektor pertanian diharapkan tumbuh positif dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional, didorong oleh modernisasi dan hilirisasi Tidak ada target spesifik secara nasional untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Provinsi NTB tidak dapat dibandingkan dengan nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Peningkatan pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi NTB tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti : (a) Lonjakan Produksi Padi dan Luas Panen: Produksi padi di NTB pada 2025 meningkat signifikan, dengan proyeksi produksi mencapai 1,6 juta ton. Luas panen padi tercatat meningkat 14,62% (sekitar 41,18 ribu hektar) dibandingkan tahun 2024, (b) Pendekatan Agromaritim (Integrasi Pertanian-Kelautan): Pemerintah daerah memperkuat pendekatan agromaritim yang mengintegrasikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, didukung oleh penguatan sektor non-tambang, (c) Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP): NTP di NTB pada Desember 2025 naik 4,50%, yang menunjukkan peningkatan daya beli dan pendapatan petani, (d) Peningkatan Investasi dan Bantuan Pemerintah: Investasi di sektor pertanian dan perikanan menjadi

penopang utama ekonomi. Pemerintah juga memaksimalkan musim tanam awal tahun 2025 dengan bantuan teknis dan sarana produksi, (e) Optimalisasi Sektor Perikanan: Penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk perikanan tangkap, berkontribusi dalam memperkuat struktur ekonomi non-tambang, (f) Optimalisasi Lahan Pertanian: Perluasan dan optimalisasi lahan pertanian serta teknologi pertanian yang lebih baik

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp 123.381.011.989,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 71.714.330.317,00. Efisiensi anggaran sebesar 63,02%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (realisasi anggaran 82,08%) dengan kegiatan :
    1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
    2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
    3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
    4. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
    5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
    6. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
    7. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
b. Program Penyuluhan Pertanian (realisasi anggaran 91,68%) dengan kegiatan :
    1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
    2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
    3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (realisasi anggaran 96,55%) dengan kegiatan :
    1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
    3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

d. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (realisasi anggaran 99,59) dengan kegiatan :
    1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
    2. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
    3. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (realisasi anggaran 98,38%) dengan kegiatan :
    1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
    3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (realisasi anggaran 100%) dengan kegiatan :
    1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
    2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
    3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
g. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 94,43%) dengan kegiatan :
    1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
    2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
    3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
    4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
    5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
    6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
h. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (realisasi anggaran 97,01%) dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program dan kegiatan yang kurang efektif dalam pencapaian target adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (realisasi anggaran 39,94%) dengan kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.

Tabel 3.164
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggarab	Target	Realisasi	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	123.381.011.989,00	71.714.330.317,00	3,20	5,03	14.257.322.130,62	38.556.566.246,56	0,3698	0,6302	63,02

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.165
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	27,236,030,090.00	22,354,018,265.00	82.08
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	15,503,965,950.00	13,244,969,087.00	85.43
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	1,862,051,080.00	1,478,125,937.00	79.38
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	130,400,000.00	123,693,850.00	94.86
Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	408,754,950.00	378,156,000.00	92.51
Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi	1,116,071,154.00	1053996205.00	94.44

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor	35,622,356.00	31542750.00	88.55
Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	8,179,164,600.00	6,043,534,436.00	73.89
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	76,683,854,400.00	30,630,613,932.00	39.94
Penataan Prasarana Pertanian	76,683,854,400.00	30,630,613,932.00	39.94
Program Penyuluhan Pertanian	1,702,072,800.00	1,560,515,184.00	91.68
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	119,700,000.00	95,000,000.00	79.37
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1,426,217,500.00	1,331,003,004.00	93.32
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	156,155,300.00	134,512,180.00	86.14
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,850,536,200.00	2,752,318,249.00	96.55
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	610,324,500.00	571,999,311.00	93.72
Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	48,108,000.00	42,115,953.00	87.54
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan	2,135,818,700.00	2,083,161,904.00	97.53
Kesejahteraan Hewan	56,285,000.00	55,041,081.00	97.79
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4,205,135,600.00	4,187,731,211.00	99.59
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 mil	2,578,568,800.00	2,568,021,100.00	99.59
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1,624,988,000.00	1,618,132,111.00	99.58

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,578,800.00	1,578,000.00	99.95
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,540,342,980.00	2,465,973,547.00	97.07
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,110,000.00	1,092,000.00	98.38
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	275,787,000.00	206,289,162.00	74.80
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	2,263,445,980.00	2,258,592,385.00	99.79
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,503,174,645.00	1,439,453,028.00	95.76
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar	1,498,835,645.00	1,435,114,028.00	95.75
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2,939,000.00	2,939,000.00	100.00
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	5016494607.00	94.43
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	95,851,100.00	95.85
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	1,483,276,164.00	89.30
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	50,686,600.00	96.83
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	1,309,911,329.00	99.14
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	1,979,288,129.00	95.26

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	97,481,285.00	97.48
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1,347,568,000.00	1,307,212,294.00	97.01
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1,347,568,000.00	1,307,212,294.00	97.01

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.13 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur dengan indikator kinerja : (a) Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara, (b) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (c) Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif. Adapun capaian sasaran kinerja Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.166

Realisasi Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349.447	382.813	474.838	600.000	14.500.000	135.88	124.04	79.14	3.27
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,75	2,03	1,81	2,59	-	103,43	89,16	69,88	-
Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3,72	3,76	4,33	3,95	7,92	116,40	115,16	109,62	54,67

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Sasaran Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Wisatawan mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun. Indikator jumlah tamu wisatawan mancanegara ini dihitung dengan menjumlahkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi NTB melalui jalur darat, laut maupun udara.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

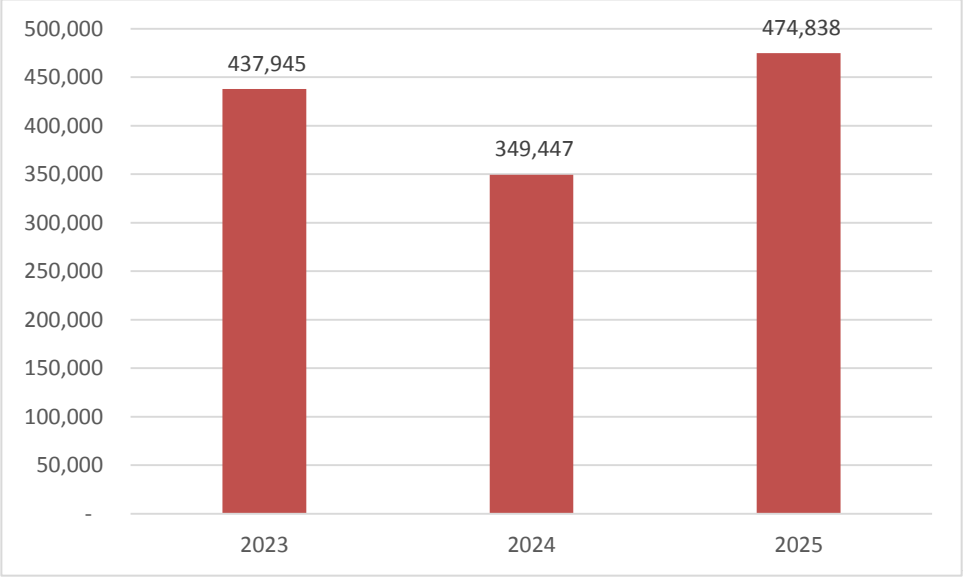
Jumlah tamu wisatawan mancanegara tahun 2025 mencapai 474.838 orang. Jumlah ini melampaui dari target yang ditetapkan sebanyak 382.813 orang atau capaiannya sebesar 124,04%. Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/01/1059/perkembangan-pariwisata-nusa-tenggara-barat-mei-2025.html

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi jumlah tamu wisatawan mancanegara tahun 2025 sebanyak 474.838 orang, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 125.391 orang dibandingkan tahun 2024 (349.447 orang). Capaian realisasi indikator ini sebesar 135,88% bila dibandingkan dengan tahun 2024. Realisasi kinerja indikator jumlah tamu wisatawan mancanegara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.30

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2023-2025



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB 2025, diolah

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**

   Jumlah tamu wisatawan mancanegara pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebanyak 600.000 orang dan realisasi tahun 2025 sebesar 79,14% dari target tersebut.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Pada tahun 2025, pemerintah pusat menargetkan 14.500.000 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan jumlah tamu kunjungan sebanyak 474.838 orang berarti Provinsi NTB telah berkontribusi sebesar 3,27% terhadap indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

5. **Analisis Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke NTB pada 2025 didorong oleh penguatan konektivitas penerbangan internasional/domestik seperti pembukaan rute penerbangan baru (rencana rute ke Perth dan Darwin) serta pengoperasian kapal cepat (*fast boat*) dari Bali ke Mandalika/Senggigi yang mempermudah aksesibilitas. Selain itu, penyelenggaraan event internasional di Sirkuit Mandalika menjadi magnet utama didukung berbagai event pariwisata yang terintegrasi dari tingkat desa hingga provinsi, serta upaya pemerintah Provinsi NTB untuk menjadikan NTB sebagai lokasi pariwisata yang ramah lingkungan dan budaya, serta menarik wisatawan mancanegara dengan lama menginap lebih tinggi. Promosi intensif di luar Mandalika, seperti Senggigi, Tiga Gili, Pulau Moyo, dan Gunung Rinjani terus dilakukan hingga Desember 2025, jumlah tamu wisatawan mancanegara ke NTB mencapai 474.838 orang. Hal ini, menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang kuat di sektor pariwisata daerah.

   Adapun hambatan yang dialami dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi NTB adalah : (1) Masih terbatasnya infrastruktur yang menunjang, terutama untuk akses ke destinasi wisata bahari dan daerah terpencil, sehingga menghambat mobilitas wisatawan mancanegara,(2) urangnya penerbangan langsung internasional ke Bandara Internasional Lombok (BIL) membuat wisatawan harus melalui Bali atau Jakarta, menambah biaya dan waktu tempuh.,(3) Promosi yang kurang gencar dan belum sepenuhnya berbasis digital membuat jangkauan pemasaran ke pasar luar negeri kurang optimal, (4) Tantangan dalam menjaga kebersihan dan ekosistem, terutama di kawasan pantai dan gili, dapat menurunkan daya tarik bagi wisatawan yang peduli lingkungan, (5) Kualitas SDM pariwisata yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan berstandar internasional dan kemampuan bahasa asing, serta (6) otensi penurunan daya beli wisatawan mancanegara akibat risiko ekonomi global juga menjadi faktor eksternal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah : (1) Digitalisasi pariwisata (Smart Tourism) dengan menggunakan TIK seperti aplikasi E-Rinjani, situs web, dan media sosial

(Instagram, TikTok) untuk promosi, serta mengadopsi AI untuk rekomendasi perjalanan dan chatbot multibahasa,(2) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan memperluas akses dan memperkuat konektivitas antar destinasi (terutama Bali-NTB-NTT) untuk memudahkan pergerakan wisatawan mancanegara, (3) optimalisasi pemasaran dan event dengan menggunakan kalender *event* tahunan untuk mempromosikan destinasi unggulan seperti Mandalika, Gili, dan Gunung Rinjani secara lebih masif, (4) Peningkatan kualitas SDM dan layanan dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pelaku pariwisata untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan layanan pelanggan berstandar internasional,(5) Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan engatasi masalah sampah dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan untuk menciptakan destinasi yang aman dan nyaman, sejalan dengan prinsip pro-lingkungan dan budaya,(6) Diversifikasi pasar wisman dengan mengoptimalkan target wisatawan dari negara yang tidak terdampak konflik global, serta menyasar segmen pasar yang lebih luas.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara, sebesar Rp 2.871.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.799.931.874,00,00. Efisiensi anggaran sebesar 21,38%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah Program Pemasaran Pariwisata (realisasi anggaran 97,52%), dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.167
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemasaran Pariwisata	2,871,000,000.00	2799931874.00	97.52
Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2,871,000,000.00	2799931874.00	97.52

Sumber: BKAD NTB 2025

Tabel 3.168
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	2.871.000.000,00	2.799.931.874,00	382.813	474.838	5.896,60	7.499,75	0,79	0,21	21,38

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

B. Indikator Sasaran Strategis Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

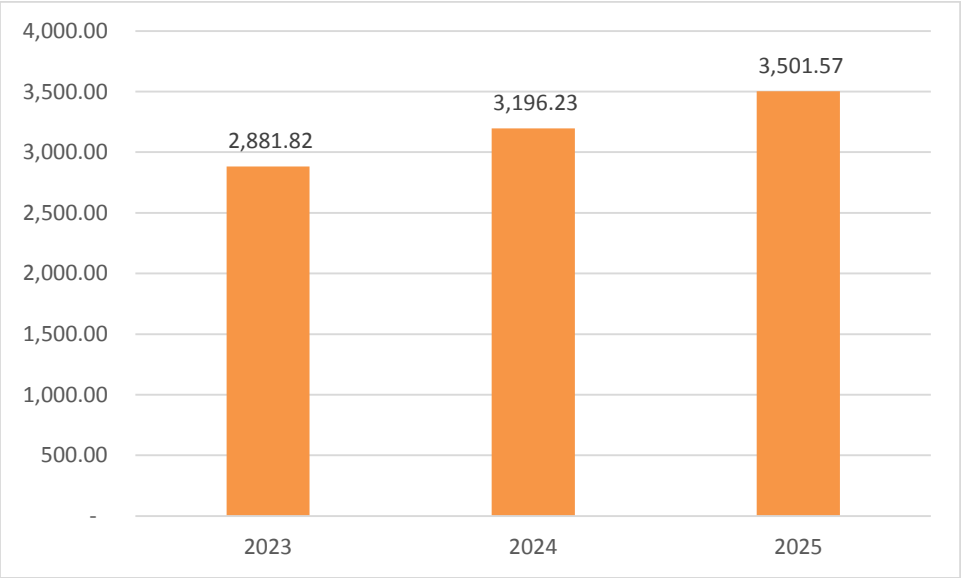
Realisasi indikator rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tahun 2025 sebesar 1,81%, realisasi ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 2,03%. Berdasarkan Rilis BPS Provinsi NTB nilai PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB) sebesar Rp 3.501,57 M sementara PDRB Provinsi NTB sebesar Rp 192.951,54 M.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2025 sebesar Rp 3.501,57 M, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak Rp 305,34 M atau 9,55% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 3.196,23. Capaian realisasi indikator ini sebesar 103,43% bila dibandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024.

Realisasi kinerja indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.31
Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2023-2025



Sumber : BPS NTB 2026, diolah

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029**

   Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 2,59% dan capaian tahun 2025 ini sebesar 69,88% dari target tersebut.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% pada tahun 2025. Sektor akomodasi dan makan minum diharapkan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional, didukung oleh peningkatan wisatawan mancanegara dan pengeluaran domestik. Namun tidak ada target spesifik secara nasional untuk sektor akomodasi dan makan minum, sehingga indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum untuk Provinsi NTB tidak dapat dibandingkan dengan nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Peningkatan PDRB pada sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi NTB pada tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor yaitu : (1) Peningkatan signifikan kunjungan tamu hotel. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh searah dengan kenaikan tamu hotel, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan (hingga 30,94% pada periode tertentu), (2) Aktivitas pariwisata internasional. Penyelenggaraan event-event internasional sepanjang tahun 2025 seperti di kawasan Mandalika berhasil mendatangkan ribuan wisatawan, yang berdampak langsung pada okupansi hotel dan restoran, (3) Peningkatan penumpang udara. Pertumbuhan jumlah penumpang udara yang mencapai sekitar 10,69% juga mendorong permintaan layanan pariwisata, (4) Penguatan sektor ekonomi pariwisata. NTB semakin fokus pada kombinasi *mass tourism* dan *quality tourism*

yang meningkatkan nilai tambah di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (5) Peralihan fokus ekonomi ke pariwisata. Adanya dorongan investasi ke sektor pariwisata sebagai bentuk diversifikasi ekonomi, mengingat fluktuasi di sektor pertambangan

Adapun hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan PDRB Akomodasi Makan dan Minuman adalah : (1) Efisiensi anggaran (Inpres I Tahun 2025). Kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi APBD dan APBN, berdampak pada pengurangan kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) atau rapat-rapat dinas yang biasa diselenggarakan di hotel, yang selama ini menjadi kontributor besar pendapatan sektor akomodasi,(2) Ketimpangan lama tinggal dan belanja wisatawan. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan ditargetkan mencapai 2,5 juta pada 2025, tantangan utamanya adalah meningkatkan rata-rata lama tinggal (*length of stay*) dan belanja (*spending*) wisatawan. Tantangan ini sering berkaitan dengan variasi produk wisata dan konektivitas,(3) Keterbatasan kualitas SDM pariwisata. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata menyebabkan standar layanan akomodasi dan kuliner belum merata, yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dan kunjungan ulang, (4) Infrastruktur dan konektivitas. Masalah infrastruktur pendukung yang belum merata, termasuk aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan, membatasi sebaran tamu hotel dan restoran di luar area utama (seperti Lombok Barat atau Mandalika), (5) Dampak lingkungan dan keberlanjutan. Meningkatnya jumlah wisatawan membawa tantangan berupa beban lingkungan (polusi, sampah), yang jika tidak dikelola dengan baik akan merusak daya tarik wisata dan keberlanjutan sektor akomodasi dalam jangka Panjang, (6) Sensitivitas terhadap ekonomi global. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, yang mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara, serta persaingan dengan destinasi terdekat lainnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas adalah sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan kunjungan dan okupansi (akomodasi)
   - Optimalisasi event pariwisata & MICE: Memaksimalkan penyelenggaraan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan event olahraga (seperti MotoGP di Mandalika) untuk menjaga tingkat hunian hotel, khususnya saat musim sepi (*low season*).
   - Diversifikasi produk wisata: Mengembangkan destinasi alternatif selain Gili Trawangan dan Mandalika, termasuk mengembangkan desa wisata dan ekowisata, untuk meningkatkan rata-rata lama menginap (*length of stay*).
   - Pemasaran strategis: Fokus pada promosi digital dan target wisatawan nusantara maupun mancanegara, menargetkan 2,55 juta kunjungan pada 2025.

2. Penguatan sektor kuliner dan UMKM (Makan Minum)

- Indonesia Gastrodiplomacy Series 2025: Mempromosikan kuliner daerah ke tingkat global untuk meningkatkan daya tarik NTB, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal.
- Digitalisasi UMKM Kuliner: Meningkatkan literasi digital pelaku usaha makan minum lokal, mengingat baru sebagian kecil UMKM pariwisata yang terdigitalisasi.
- Sertifikasi halal & standarisasi: Mendorong sertifikasi halal dan standar keamanan pangan (*higiene*) pada rumah makan dan restoran untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan.

3. Peningkatan kualitas SDM dan konektivitas

- Pelatihan SDM sesuai standar global: Mengingat tingginya standar internasional, pelatihan perlu difokuskan pada pelayanan, kemampuan bahasa, dan manajemen akomodasi.
- Peningkatan konektivitas: Memperbaiki akses transportasi udara dan laut menuju destinasi wisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk mempermudah pergerakan wisatawan.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah (2025)

- Penyusunan RPD/RKPD 2025: Pemerintah NTB memfokuskan penguatan industrialisasi dan transformasi ekonomi, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama.
- Penguatan Sinergi: Memadukan program penanggulangan bencana dengan pengembangan infrastruktur pariwisata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum sebesar Rp2.454.787.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.425.378.580,00. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena target tidak tercapai sedangkan anggaran yang terserap cukup besar.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang dijalankan belum efektif dalam pencapaian target, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (realisasi anggaran 98,80%), dengan kegiatan

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.169

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,454,787,100.00	2,425,378,580.00	98.80
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	83,200,000.00	80,817,900.00	97.14
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2,311,287,100.00	2,286,000,680.00	98.91
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	52,800,000.00	51,060,000.00	96.70

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Sasaran Strategis Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif tahun 2025 sebesar 4,33%, realisasi ini lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 3,76%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 115,16%. Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1089/perekonomian-nusa-tenggara-barat-berdasarkan-besaran-produk-domestik-regional-bruto--pdrb--atas-dasar-harga-berlaku-triwulan-iii-2025-mencapai-rp-49-49-triliun-dan-atas-dasar-harga-konstan-2010-mencapai-rp-28-92-triliun-.html

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif tahun 2025 sebesar 4,33%, mengalami peningkatan sebesar 0,57% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3,76%. Capaian realisasi indikator ini sebesar 116,40% bila dibandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif pada akhir periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ditargetkan sebesar 3,95% dan capaian tahun 2025 ini sebesar 109,62% dari target tersebut.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Pemerintah menargetkan Rasio PDB Ekonomi Kreatif sebesar 7,92% dalam RPJMN Tahun2025-2029. Provinsi NTB dengan Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif sebesar 4,33% di tahun 2025, sehingga capaiannya sebesar 54,67% dibandingkan target nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif adalah : (1) Efisiensi anggaran (Inpres I Tahun 2025). Kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi APBD dan APBN, berdampak pada pengurangan kegiatan (2) Ketimpangan lama tinggal dan belanja wisatawan. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan ditargetkan mencapai 2,5 juta pada 2025, tantangan utamanya adalah meningkatkan rata-rata lama tinggal (*length of stay*) dan belanja (*spending*) wisatawan. Tantangan ini sering berkaitan dengan variasi produk wisata dan konektivitas,(3) Keterbatasan kualitas SDM pariwisata. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata khususnya ekonomi kreatif (4) Ekonomi kreatif belum sepenuhnya dipahami dengan baik pada tataran masyarakat awam.
   Peningkatan Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB tidak terlepas dari upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti (1) Penyelenggaraan Karya Kreatif NTB (KK-NTB) 2025: menjadi panggung utama untuk mempertemukan lebih dari 100 UMKM unggulan, mulai dari sektor wastra, fesyen, kriya, home decor, hingga kuliner, untuk meningkatkan jangkauan pasar, (2) Optimalisasi Pembiayaan Syariah: Komitmen memperkuat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembiayaan Syariah, (c) Program Digitalisasi dan UMKM Naik Kelas: Dinas Perindustrian NTB gencar mengadakan pelatihan digital marketing untuk membantu pelaku kreatif menembus pasar nasional dan internasional, (d) Kolaborasi dengan Event Besar (Bazaar Mandalika): Dinas Perindustrian NTB berkolaborasi dengan ITDC dan backstagers untuk mempromosikan produk kreatif lokal di kawasan wisata Mandalika, (e) Pengembangan Sektor Kreatif Berbasis Potensi Lokal: Fokus pada pengembangan kuliner, kriya, fesyen, dan seni yang berbasis pada keunikan budaya NTB, (f) Peluncuran Program Kreatif oleh GEKRAFS: DPW GEKRAFS NTB meluncurkan Ekraf Night 2025 dan program unggulan lainnya untuk mendukung ekosistem kreatif agar lebih berdaya saing, (g) Optimalisasi Sektor Kreatif di Desa: Mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan industri kreatif di tingkat desa

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**
   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif, sebesar Rp1.120.974.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp

1.094.096.536,00. Efisiensi anggaran sebesar 15,25. Rincian efisiensi anggaran pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan**

   Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah:

   a. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (realisasi 99,47%) dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
   b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (realisasi anggaran 95,23%) dengan kegiatan:
      1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
      2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.170
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator
Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	627,000,000.00	623,702,260.00	99.47
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif	627,000,000.00	623,702,260.00	99.47
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	493,974,500.00	470,394,276.00	95.23
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	281,774,500.00	265,216,389.00	94.12
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	212,200,000.00	205,177,887.00	96.69

Sumber: BKAD NTB 2025

Tabel 3.171

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	1.120.974.500,00	1.094.096.536,00	3,76	4,33	252.678.183,83	298.131.515,96	0,85	0,15	15,25

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

3.1.2.14 Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya

Sasaran Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya diukur dengan indikator Indeks Budaya Literasi, Indeks Ekspresi Budaya, Indeks Warisan Budaya, dan Indeks Ekonomi Budaya. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.172

Realisasi Kinerja Meningkatnya Budaya Literasi, Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Ekonomi Budaya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Indeks Budaya Literasi	Indeks	(2023) 61,20	64,42	NA	72,47	-	-	-	-	-
Indeks Ekspresi Budaya	Indeks	39,74 (2023)	44,48	NA	56,63	-	-	-	-	-
Indeks Warisan budaya	Indeks	48,37 (2023)	50,17	NA	54,67	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
Indeks Ekonomi Budaya	Indeks	41,92 (2023)	44,26	NA	50,11	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

Keterangan : NA = Not Available atau data tidak dirilis lagi oleh Kementerian terkait

A. Indikator Sasaran Indeks Literasi Budaya

Indeks literasi budaya adalah kemampuan memahami, mengapresiasi, dan bersikap terhadap keberagaman budaya Indonesia, yang krusial untuk memperkuat identitas bangsa di tengah globalisasi. Ini mencakup pengetahuan adat istiadat, bahasa, dan nilai sosial, serta keterlibatan aktif dalam melestarikan warisan budaya seperti gotong royong dan kesenian lokal. Di era modern, literasi budaya juga berfungsi untuk membentengi generasi penerus dari pengaruh negatif budaya asing dengan tetap adaptif terhadap perubahan Indeks Literasi Budaya (sering dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat/IPLM) adalah indikator ukur tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas literasi, serta usaha pemerintah daerah/pusat dalam membina perpustakaan dan budaya baca. Ini mencakup kemampuan memahami identitas kebudayaan dan penggunaan informasi. Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi indeks literasi budaya tahun 2025 belum ada. Angka indeks ini diperoleh dari rilis Kementerian Kebudayaan yang dapat diakses pada website.

B. Indeks ekspresi budaya

Indeks Ekspresi Budaya adalah salah satu dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang mengukur tingkat partisipasi, keragaman, dan kebebasan masyarakat dalam aktivitas seni dan budaya. Dimensi ini menilai seberapa aktif masyarakat terlibat dalam memproduksi, mengekspresikan, dan menikmati berbagai bentuk karya seni serta budaya tradisional maupun modern. Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi indeks literasi budaya tahun 2025 belum ada. Angka indeks ini diperoleh dari rilis Kementerian Kebudayaan yang dapat diakses pada website.**Indeks Warisan Budaya**

Indeks Warisan Budaya adalah salah satu dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang mengukur upaya pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, baik benda maupun takbenda. Indikator ini mencerminkan pencatatan, penetapan, dan konservasi warisan budaya sebagai bagian dari jati diri dan ketahanan budaya masyarakat. Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi indeks literasi budaya tahun 2025 belum ada. Angka indeks ini diperoleh dari rilis Kementerian Kebudayaan yang dapat diakses pada website.

C. Indeks Ekonomi Budaya

Indeks Ekonomi Budaya adalah salah satu dari tujuh dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja, kontribusi PDB dari industri kreatif/budaya, dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi berbasis budaya. Indikator ini bertujuan menilai sejauh mana budaya memberikan nilai tambah ekonomis.

Walaupun semua angka rilis belum ada, perkembangan kebudayaan di Provinsi NTB dapat dilakukan dengan mengukur upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam pelestarian budaya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah:

1. Launching Kotaku Museumku Kampungku Museumku
   Upaya ini dilakukan dalam rangka memajukan dan melestarikan budaya lokal, Langkah ini untuk mendorong setiap desa dan kota memiliki museum sebagai destinasi yang dapat menjadi basis keunjungan wisata berbasis budaya.
   https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/menteri-kebudayaan-launching-kotaku-museumku-kampungku-museumku
2. Edukasi Masyarakat Dalam Perawatan Artefak
   Artefak ini merupakan peninggalan kerajaan yang hilang akibat letusan Gunung Tambora.
   https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/museum-negeri-ntb-ajari-warga-merawat-artefak-letusan-gunung-tambora
3. Digitalisasi Koleksi Artefak
   Digitalisasi dilakukan terhadap 7.721 kkoleksi artefak sebagai bentuk pelestarian budaya dan peningkatan akses public melalui platform daring serta pameran virtual guna memperluas jangkauan informasi hingga tingkat internasional.

https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/perluas-jangkauan-museum-ntb-digitalisasi-ribuan-koleksi-artefak

4. Pengenalan Budaya dalam Gearan Rinjani Color Run 2025
   Benda yang dipamerkan adalah arca simawadewa, dan kain tenun dan babad atau sastra klasik yang menceritakan Gunung Samalas.
   https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/museum-ntb-suguhkan-aktivitas-edukatif-semarakkan-rinjani-color-run-3-2025
5. Mendapatkan Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual atas Karya Seni
   HAKI yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTB ini atas dua karya seni berupa motif kain batik sekardiu dan desain gambar kaos baju sekardiu.
   https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/museum-ntb-raih-sertifikat-hak-kekayaan-intelektual-atas-karya-seni
6. Lokakarya Perawatan Keris
   Lokakarya ini merupakan kerjasama antara Museum Negeri NTB dengan Museum and Art Gallery of Northern Territory, Art Gallery South Australia dan Australian Museum.
   https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/museum-ntb-gelar-lokakarya-merawat-keris-bersama-tiga-museum-australia
7. Workshop bersama Tiga Museum di Australia
   Agenda workshop terkait dengan perawatan keris. Workshop ini merupakan kerjasama antara Museum Negeri NTB dengan Museum and Art Gallery of Northern Territory, Art Gallery South Australia dan Australian Museum dengan menghadirkan narasumber Kurator Pewarangan Paguyuban Anjani.
   https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/museum-ntb-gelar-workshop-bersama-tiga-museum-di-australia
8. Kajian Budaya Gula Gending Khas Lombok
   Gulag ending mendapatkan pengakkuan status warsan budaya tak benda nasional dan menjadi identitas bagi masyarakat yang mendiami Pulau Lombok.
   https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/pemaparan-hasil-kajian-budaya-gula-gending-khas-lombok-di-museum-ntb
9. Pameran Tempores “Kain dan Diplomasi Budaya”
   Pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara Museum NTB dengan Museum Daerah Sumbawa serta museum-museum desa dan SLBN 1 Lombok Barat.
   (https://museumnegeri.ntbprov.go.id/berita/museum-ntb-gelar-pameran-temporer-kain-dan-diplomasi-budaya-hadirkan-narasi-wastra-sebagai-jembatan-)
10. Penyusunan Buku Wastra Lombok

Program/kegiatan dan anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.173
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Sasaran Meningkatnya Budaya Literasi, Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Ekonomi Budaya

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Kebudayaan	5,083,896,400.00	4,771,255,965.00	93.85
Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2,777,804,400.00	2,612,733,995.00	94.06
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	1,530,092,000.00	1,518,999,730.00	99.28
Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	776,000,000.00	639,522,240.00	82.41
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	120,000,000.00	119,961,300.00	99.97
Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000.00	119,961,300.00	99.97
Program Pembinaan Sejarah	224,727,450.00	167,037,452.00	74.33
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	224,727,450.00	167,037,452.00	74.33
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	126,500,000.00	122,697,619.00	96.99
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	126,500,000.00	122,697,619.00	96.99

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Permuseuman	1,486,885,000.00	1,468,679,058.00	98.78
Pengelolaan Museum Provinsi	1,486,885,000.00	1,468,679,058.00	98.78
Program Pembinaan Perpustakaan	1,966,284,700.00	1,947,282,690.00	99.03
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1,734,819,700.00	1,716,744,230.00	98.96
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	231,465,000.00	230,538,460.00	99.60
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	32,030,100.00	31,622,600.00	98.73
Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah Di Daerah Provinsi	7,955,500.00	7,802,500.00	98.08
Penerbitan Katalog Induk Daerah Dan Bibliografi Daerah	10,813,000.00	10,558,500.00	97.65
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	13,261,600.00	13,261,600.00	100.00

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.15 Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga

Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga, diukur dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional, Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan/atau beasiswa, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.174
Realisasi Kinerja Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69,68	70,18	69,97	72,68	91	100,41	99,70	96,276	76,89
Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	7,00 (43 medali)	9,3 (47 medali)	23,40 (58 medali)	52,33 (82 medali)	-	134,88	123,40	70,73	-

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100	100	100	-	100	100	100	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda adalah persentase jumlah penduduk usia muda (biasanya rentang usia 15-24 atau 15-29 tahun) yang aktif secara ekonomi—baik bekerja maupun mencari pekerjaan dibandingkan total penduduk usia muda tersebut. Indikator ini mengukur seberapa besar pemuda terlibat dalam pasar tenaga kerja.

- TPAK pemuda mencakup mereka yang bekerja (paruh waktu/penuh) dan mereka yang menganggur namun aktif mencari kerja (penganggur terbuka).
- Berbeda dengan TPAK umum (15+ tahun), TPAK pemuda difokuskan pada transisi dari pendidikan ke dunia kerja, yang seringkali dipengaruhi oleh lamanya pendidikan.
- TPAK pemuda yang tinggi menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam perekonomian, namun juga bisa mengindikasikan tingginya kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka bekerja dini, alih-alih melanjutkan sekolah.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Indikator TPAK Pemuda Tahun 2025 sebesar 69,97%. Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 70,18% atau dengan capaian 99,70%, namun sudah *on the track*.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 69,68%, maka Capaian TPAK Pemuda Provinsi NTB Tahun 2025 terdapat deviasi +0,29 poin. Capaiannya sebesar 100,41%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2030 (72,68), maka terdapat deviasi -2,71 poin atau capaian sebesar 96,276%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target nasional

Jika dibandingkan dengan target nasional (91) maka terdapat deviasi -21,03 poin atau dengan capaian 76,89%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Permasalahan TPAK Pemuda di Provinsi NTB merupakan tantangan struktural yang kompleks, di mana meskipun angka angkatan kerja secara umum meningkat, partisipasi kelompok muda (usia 15-24 tahun) seringkali terhambat. Data 2025 menunjukkan angkatan kerja NTB mencapai 3,19 juta orang, namun tantangan dalam penyerapan tenaga kerja muda tetap tinggi.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama TPAK Pemuda di Provinsi NTB:

1. Ketidaksesuaian Keterampilan (Skill Mismatch)

- Lulusan pendidikan menengah dan tinggi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, menyebabkan rendahnya partisipasi mereka karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
- Pemuda cenderung berpendidikan tinggi tetapi kurang memiliki keterampilan teknis (vokasi) yang dibutuhkan industri.

8. Tingginya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Muda

- TPT sering kali didominasi oleh kaum muda, tercatat sekitar 87 ribu hingga 102 ribu orang masih menganggur, dengan porsi besar merupakan angkatan kerja baru atau muda.
- Kurangnya pengalaman kerja menjadi kendala utama bagi lulusan baru (fresh graduate).

9. **Tren Pendidikan Lebih Lanjut (Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah)**
   Menurunnya TPAK pada kelompok umur 15-19 tahun disebabkan oleh meningkatnya partisipasi sekolah dan program wajib belajar 9-12 tahun. Meskipun positif untuk kualitas SDM, hal ini secara langsung menurunkan TPAK pada usia muda karena mereka memilih menunda masuk pasar kerja.
10. **Keterbatasan Lapangan Kerja Formal** Ekonomi NTB
    - Masih didominasi sektor informal dan pertanian. Keterbatasan sektor formal yang mampu menyerap tenaga kerja muda terdidik menyebabkan banyak pemuda enggan berpartisipasi atau beralih menjadi pengangguran terselubung.
    - Minimnya peluang kerja formal memaksa pemuda masuk ke sektor informal yang tidak stabil.
11. **Faktor Pendidikan dan Sosial**
    Tingkat pendidikan masih berpengaruh pada TPAK; daerah dengan akses pendidikan rendah cenderung memiliki TPAK rendah. Selain itu, ada kecenderungan pemuda keluar dari pasar kerja karena alasan pernikahan dini, terutama pada perempuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Penyelesaian permasalahan rendahnya TPAK Pemuda memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, yaitu:
   - Peningkatan kualitas SDM, pelatihan vokasi, dan pengembangan sektor pariwisata serta industri pengolahan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
   - Revitalisasi Pendidikan Vokasi (SMK/Politeknik) melalui penyesuaian kurikulum SMK dan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri lokal maupun luar negeri, khususnya di sektor pariwisata, agribisnis, dan pertambangan.
   - Sertifikasi Kompetensi dengan memperbanyak program sertifikasi bagi pemuda untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.
   - Pelatihan Keterampilan Digital dengan mengembangkan skill di bidang teknologi dan digital untuk membuka peluang kerja remote atau wirausaha digital.
2. Sinergi Ketenagakerjaan dan Perluasan Lapangan Kerja melalui:
   - **Program Magang dan Pemagangan dengan** mengintensifkan kerjasama antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) untuk mempermudah transisi dari pendidikan ke dunia kerja.
   - **Investasi Padat Karya dengan** mendorong investasi di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
   - **Optimalisasi BLK dengan m**engoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih keterampilan khusus yang dibutuhkan pasar kerja, termasuk untuk pemuda putus sekolah.
3. Pemberdayaan Wirausaha Muda melalui:
   - **Dukungan UMKM & Start-up dengan** Memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan, dan akses permodalan bagi pemuda

agar menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha) daripada mencari kerja.

- **Pemanfaatan Potensi Lokal dengan m**endorong pemuda untuk mengelola potensi daerah seperti pariwisata desa dan industri kreatif.
- **Penguatan Informasi Pasar Kerja dengan m**empermudah akses informasi lowongan kerja melalui aplikasi atau *job fair* yang menyasar kelompok pemuda.
- **Perluasan Akses Pelatihan bagi Perempuan dengan m**endorong peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda perempuan agar partisipasi kerja meningkat.
- **Fokus Pemberdayaan Berbasis Desa denga** mendorong kaderisasi pemuda melalui program-program di tingkat desa, mengingat potensi terbesar seringkali berada di wilayah pedesaan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator TPAK Pemuda pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.461.963.050,00dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.297.080.512,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 6,42%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.175
Penghitungan Efisien Anggaran TPAK Pemuda

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	(Pagu Anggaran/Target Outcome)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	2.461.963.050,00	2.297.080.512,00	70,18	69,97	32.829.505,67	35.080.693,22	0,94	0,06	6,42

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan yang belum cukup efektif dalam keberhasilan pencapaian target. Hanya ada 1 (satu) program yang mendukung pencapaian target ini, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (realisasi anggaran 93,30%) dengan kegiatan:

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.176
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator TPAK Pemuda

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,461,963,050.00	2,297,080,512.00	93.30
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1,711,963,050.00	1,547,080,512.00	90.37
Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional

Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional adalah indikator statistik yang mengukur selisih jumlah total medali (emas, perak, perunggu) yang diraih atlet dalam sebuah kejuaraan resmi, dibandingkan dengan jumlah perolehan medali pada periode atau ajang sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembinaan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional (seperti PON) maupun internasional (seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade).

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Indikator Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2025 sebesar 23,40% (58 medali). Realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 9,3% (47 medali) atau dengan capaian 123,40%. Link bukti dukung https://drive.google.com/drive/folders/16CtEDAOOYLdgesrk-575dXHcmgb6hE2_

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Jika dibandingkan dengan tahun 2024 (7%, 43 medali), maka capaian Tahun 2025 melampaui tahun 2024 atau capaian sebesar 134,88%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD Tahun 2030**
   Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2030 (52,33%, 82 medali), maka terdapat deviasi -24 medali atau dengan capaian 70,73%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target nasional**
   Jika dibandingkan dengan target nasional maka capaian tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja dengan indikator nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Bila melihat perbandingan dengan tahun 2024 dan target 2025, maka capaian sudah malampaui kondisi tahun lalu dan target 2025 yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya kompetisi olahraga yang dapat diikuti oleh atlet provinsi NTB dan mulai adanya penerapan *sport science*. Kegiatan yang mendukung indikator capaian indikator ini yaitu keikutsertaan pada POPNAS, POMNAS, Kejuaraan Nasional Antar SPOBNAS dan Kejuaraan Nasional lainnya.. Pencapaian pemuda berprestasi ini merupakan gabungan dari pemuda yang menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor tingkat nasional, Pertukaran Pemuda Antar Negara, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Pekan Kreativesia Pemuda Indonesia Tingkat Nasional, The Changemakers pada Muda 30 Award, dan kegiatan Good Game oleh KEMENPORA RI.

   Namun, Pemerintah Provinsi NTB diprediksi akan menghadapi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

   1. Belum terstandarnya sarana prasarana olahraga dan pemuda dalam rangka peningkatan daya saing atlet dan pemuda di tingkat nasional dan internasional.
   2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kepeloporan pemuda dalam bentuk pembinaan dan pendampingan dari provinsi-kabupaten-kota, serta adanya keterlambatan jadwal kegiatan dari pusat, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan.
   3. Masih lemahnya database kepemudaan, di antaranya data pemuda berprestasi, data pemuda yang berwirausaha, data organisasi kepemudaan dan data pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudan.

4. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) NTB masih di bawah Nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa kompoen domain yang belum optimal, yaitu:
   - Domain kesehatan dan kesejahteraan indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil;
   - Domain lapangan dan kesempatan kerja indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih dan indikator tingkat pengangguran terbuka;
   - Domain gender dan diskriminasi indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

   Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kinerja di antaranya :

   a. Meningkatkan jumlah kompetisi dan *tallent scooting* untuk menjaga kontinyuitas jumlah atlet muda dan pelatih berprestasi
   b. Melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan
   c. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan kemajuan bidang kepemudaan dan keolahragaan
   d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar Rp74.219.522.731,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp73.144.237.300,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 20,14%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah ini.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Terdapat 1 program dan 3 kegiatan yang efektif dalam keberhasilan pencapaian target, yaitu Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (realisasi anggaran 98,85%) dengan kegiatan:

   a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
   b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
   c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
   d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Tabel 3.177

Penghitungan Efisien Anggaran Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	(Pagu Anggaran/Target Outcome)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	74.219.522.731,00	73.144.237.300,00	47	58	1.261.107.539,66	1.579.138.781,51	0,80	0,20	20,14

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.178

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	74,219,522,731.00	73,144,237,300.00	98.55
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	9,313,223,925.00	8,904,994,549.00	95.62
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1,998,839,800.00	1843821409.00	92.24
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	32,657,459,006.00	32445604900.00	99.35
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	30,250,000,000.00	29,949,816,442.00	99.01

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Sasaran Persentase Pemuda dan Atlet Berprestasi yang Mendapat Insentif dan/atau Beasiswa

Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa adalah **indikator** yang mengukur rasio atau proporsi jumlah individu (pemuda/atlet) yang berhasil mendapatkan apresiasi berupa bantuan uang tunai (insentif/bonus) atau bantuan pendidikan (beasiswa) dari pemerintah atau lembaga terkait, dibandingkan dengan total jumlah pemuda/atlet berprestasi yang memenuhi kriteria dalam kurun waktu tertentu

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Indikator Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa Tahun 2025 mencapai 100%. Realisasi ini telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% atau dengan capaian 100%.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Jika dibandingkan dengan tahun 2024 (100%), realisasi tahun 2025 juga tidak lebih rendah atau dengan capaian 100%.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD Tahun 2030**
   Target tahun 2030 sebesar 100%, maka realisasi tahun 2025 sudah mencapai target akhir RPJMD atau dengan capaian sebesar 100%.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target nasional**
   Target nasional tidak ada karena berbeda indikator, sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Indikator Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa pada prinsipnya sudah mencapai target. Namun tentunya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target itu terdapat permasalahan-permasalahan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung yang ke depannya harus dapat diantisipasi, sebagai berikut:
   a. **Terbentur Aturan ASN dan Kejelasan Nasib Atlet**
      Belasan atlet berprestasi di NTB sempat mengalami kendala terkait status kepegawaian (PHK) yang menghambat pemberian insentif berkelanjutan, dengan status yang menggantung pada awal tahun 2026.
   b. **Minimnya Anggaran Daerah**
      Kesiapan ajang seperti Porprov NTB 2026 tersendat karena minimnya anggaran, yang berdampak langsung pada dukungan finansial bagi atlet.
   c. **Belum Meratanya Akses Beasiswa**
      Meskipun terdapat program beasiswa, cakupan kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelajar/atlet berprestasi perlu ditingkatkan agar lebih inklusif.
   d. **Proses Birokrasi dan Administratif**
      Beberapa beasiswa menuntut pengajuan proposal, yang seringkali menjadi hambatan administratif bagi pemuda atau atlet di tingkat daerah.
   e. **Kebutuhan Integrasi Data**
      Diperlukan optimalisasi data atlet berprestasi agar penyaluran insentif dan beasiswa tepat sasaran.

   Upaya mengatasi permasalahan persentase pemuda dan atlet berprestasi yang mendapatkan insentif serta beasiswa di Provinsi NTB berfokus pada peningkatan kepastian anggaran, perbaikan regulasi, dan keberlanjutan dukungan karier. Berikut upaya-upaya yang dilakukan:
   a. Kepastian Anggaran Bonus dan Insentif Atlet (PON/Porprov)
      Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen dalam pencairan bonus yang terjadwal

b. Bonus Tambahan dan Insentif
   Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memberikan bonus tambahan dan apresiasi kepada atlet berprestasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi.
c. Penganggaran APBD Perubahan
   Insentif/beasiswa atlet yang meraih medali di ajang seperti Porprov NTB akan dianggarkan melalui APBD Perubahan, yang menunjukkan adanya upaya alokasi anggaran secara berkala.
d. Pemberian Beasiswa dan Pendidikan Lanjutan
   - Beasiswa Luar Negeri: Gubernur NTB menaruh perhatian khusus pada atlet muda berprestasi dengan menyiapkan program beasiswa ke luar negeri.
   - Beasiswa Keolahragaan LPDK/Kemenpora: Mendorong atlet untuk menggunakan jalur beasiswa khusus peningkatan prestasi olahraga (LPDP) yang membutuhkan rekomendasi dari SITENOR (Sistem Tenaga dan Olahraga) Kemenpora.
   - Fasilitas Pendidikan Tinggi: Akses pendidikan tinggi bagi atlet sebagai bagian dari peningkatan kapasitas SDM di bidang olahraga.
e. Solusi Karier dan Pemberdayaan Pasca-Prestasi
   - Penyelesaian Masalah PHK Atlet: Mencari solusi atas 18 atlet peraih medali PON yang sempat terbentur aturan ASN dan terdampak PHK, dengan fokus memberikan pekerjaan atau jaminan karier.
   - Jaminan Masa Depan: Gubernur menekankan pentingnya berinvestasi pada atlet, tidak hanya sekadar bonus uang tunai, tetapi juga keberlanjutan karier.

f. Penguatan Tata Kelola dan Regulas
   - Dasar hukum: Peraturan Gubernur NTB Nomor 5 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pemberian penghargaan dan insentif.
   - Penyederhanaan Birokrasi: Mengatasi kendala birokrasi yang sering menghambat penyaluran *reward*/bonus kepada atlet.

7. Fokus pada Regenerasi Atlet
   - Investasi Pembinaan: Fokus Pemerintah NTB saat ini adalah menjadikan bonus sebagai bagian dari investasi jangka panjang, menciptakan juara baru, dan tidak hanya fokus pada atlet senior saja.
   - Sosialisasi Beasiswa: Meningkatkan sosialisasi program Beasiswa NTB agar lebih banyak atlet muda yang mengaksesnya.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar Rp74.219.522.731,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp73.144.237.300,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 20,14%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.179

Penghitungan Efisien Anggaran Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang Mendapat insentif dan/atau Beasiswa

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	(Pagu Anggaran/Target Outcome)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	74.219.522.731,00	73.144.237.300,00	47	58	1.261.107.539,66	1.579.138.781,51	0,80	0,20	20,14

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

Terdapat 1 program dan 3 kegiatan yang efektif dalam keberhasilan pencapaian target, yaitu Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (realisasi anggaran 98,85%) dengan kegiatan:

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.180
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Pemuda dan Atlet Berprestasi yang Mendapat Insentif dan/atau Beasiswa

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	74,219,522,731.00	73,144,237,300.00	98.55
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	9,313,223,925.00	8,904,994,549.00	95.62
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1,998,839,800.00	1843821409.00	92.24
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	32,657,459,006.00	32445604900.00	99.35
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	30,250,000,000.00	29,949,816,442.00	99.01

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.16 Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.181
Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
IKD	Indeks	0,56	0,59	0,55	0,69	NA	98,21	93,22	79,71	NA

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dinilai dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan nilai maksimal 1. IKD dihitung secara nasional dan terkoneksi ke aplikasi InaRisk berdasarkan 7 Prioritas :

1) Perkuatan Kebijakan dan kelembagaan
2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7) Pengembangan sistem pemulihan bencana

Prioritas tersebut terdiri dari 71 Indikator dan 284 Pertanyaan untuk menilai ketahanan daerah Kabupaten/Kota. IKD Provinsi diperoleh dari menghitung rata-rata IKD Kabupaten/Kota yang dirilis oleh BNPB.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025**
   Indikator Kinerja IKD dalam rangka mewujudkan ketangguhan daerah untuk mengurangi resiko bencana. Pada tahun 2025 IKD Provinsi NTB sebesar 0,55 atau mencapai 93,22% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,59 atau kurang 0,04 poin (tidak memenuhi target).
2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**
   Capaian nilai IKD tahun 2025 sebesar 0,55 atau lebihrendah dari tahun 2024 (deviasi -0,01 poin). Hal ini terjadi karena data dukung dalam pemenuhan variabel penilaian risiko bencana yang kurang memadai. Capaian tahun 2025 ini menjadi sinyal bahwa diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan peran masing-masing serta seluruh komponen masyarakat dalam upaya pengurangan risiko untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran serta penyelamatan.
3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**
   Realisasi IKD pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,55, atau telah mencapai 79,71% dari target pada tahun 2030 atau terdapat deviasi -0,14 poin. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja IKD tersebut hingga tahun 2030.
4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**
   Tidak ada target nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   Target IKD tahun 2025 sebesar 0,59 sementara realisasinya sebesar 0,55. Nilai realisasi IKD 2025 bila dibandingkan dengan realisasi IKD tahun 2024 tampak mengalami penurunan, karena Kota Mataram tidak melakukan perhitungan sehingga nilai IKD Kota bernilai 0 (nol), namun tetap menjadi pembagi dalam perhitungan nilai rata-rata IKD. Hal ini akhirnya berdampak pada nilai IKD Provinsi yang menjadi rendah. Sebab lain adalah karena lebih ketatnya evaluasi dari BNPB terkait data dukung dalam penilaian IKD.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan capaian IKD, yaitu:

1) melakukan Koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kota Mataram untuk mengidentifikasi penyebab masalah IKD Kota Mataram belum terinput (sebab karena kesalahan teknis, keterlambatan pengiriman data, atau kurangnya dokumen pendukung)

2) Koordinasi: Mengadakan rapat koordinasi antara BPBD Kota Mataram, BPBD Provinsi NTB, untuk menyelaraskan data yang dibutuhkan oleh BNPB.
3) Melakukan penguatan data dan informasi dengan mengembangkan sistem data terpadu bencana, melakukan survei lapangan secara rutin untuk memperbarui data resiko bencana, dan meningkatkan penggunaan teknologi seperti drone, satelit dan GIS untuk menghasilkan peta risiko yang lebih akurat.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp2.565.640.549,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.388.031.100,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 0,15%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melaui BPBD dalam pencapaian indikator Sebagai upaya menunjang tercapainya indikator kinerja IKD NTB, BPBD NTB melaksanakan 2 (dua) program utama prioritas yaitu:

a. Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggaran 92,49%) yang terdiri dari 4 Kegiatan meliputi :
    1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
    2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    4. Penataan Sistem Dasar Penanggulanagn bencana
b. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Pnyelamatan Non Kebakaran (realisasi anggaran 99,68%) yang terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

Seluruh program belum efektif menunjang keberhasilan pencapaian target.

Tabel 3.182
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKD

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
IKD	2.565.640.549,00	2.388.031.100,00	0,59	0,55	4.341.874.727,27	4.348.543.303,39	1,00	0,00	0,15

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

c. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.183
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKD

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penanggulangan Bencana	2,354,640,549.00	2,177,710,900.00	92.49
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	830,956,549.00	810,293,139.00	97.51
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,343,034,000.00	1,196,777,086.00	89.11
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	180,650,000.00	170,640,675.00	94.46
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	211,000,000.00	210,320,200.00	99.68
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	211,000,000.00	210,320,200.00	99.68

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.17 Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.184
Realisasi Kinerja Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
IKLH	Indeks	75,78	76,19	77,40	77,24	NA	102,14	101,59	100,21	NA

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025**
   Indikator Kinerja IKLH dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Pada tahun 2025 IKLH NTB sebesar 77,40 atau mencapai 101,59% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76,19 atau lebih 1,21 poin (melampaui target). Link bukti dukung https://docs.google.com/document/d/1_N8vDyF7pD7tDHTgvkN97fTocZoAacR-/edit
2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**
   Capaian nilai IKLH tahun 2025 sebesar 77,40 atau lebih besar dari realisasi 75,78 tahun 2024 (lebih 1,62 poin) atau sebesar 102,14%. Dengan capaian pada tahun 2025 ini, masih terus diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan peran masing-masing serta seluruh komponen masyarakat dalam upaya pengurangan risiko untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran serta penyelamatan.

3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD**
   Realisasi IKLH tahun 2025 sebesar 77,40 atau telah mencapai 100,21% dari target tahun 2030 (77,24) atau terdapat deviasi +0,16 poin. Hal ini menunjukkan kinerja sudah *on the track*.
4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**
   Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**
   IKLH Provinsi NTB adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi NTB. IKLH berfokus pada penilaian kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan.
   a) Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sarana mengukur kualitas badan air melalui beberapa parameter pengukuran antara lain DO, pH, BOD, TSS, CO, Ntrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Kondisinya di Provinsi NTB dalam 5 tahun terakhir masih berada pada kategori buruk (nilai indeks 25-50). Hal ini disebabkan oleh sebagian besar sampel memiliki nilai DO yang tidak memenuhi nilai baku mutu dan nilai fecal coliform yang tinggi;
   b) Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, IKU Provinsi NTB berada pada kategori sangat baik karena kedua parameter yang diukur di seluruh titik sampel yaitu SO2 dan NO2 berada di bawah baku mutu;
   c) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), yaitu suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas air laut dalam 5 tahun terakhir dilakukan pada 23 titik lokasi yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi NTB, dan hasilnya berada dalam kategori sedang (nilai 50-70) dan meningkat di tahun 2021 hingga 2024 ke kategori baik (nilai 70-90).
   d) Indeks Kualitas Lahan (IKL), indeks ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain data tutupan hutan, data tutupan lahan, data ruang terbuka hijau, dan data rehabilitasi hutan dan lahan. Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 490.115 Ha atau sekitar 41,29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud, yaitu lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Faktor penyebab lahan kritis adalah perambatan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

   Selain keempat faktor di atas, kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui penanganan sampah dan pengurangan

sampah. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan sampah, antara lain pada terbatasnya lahan TPA, kurangnya sarana dan prasarana untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) serta kelembagaan yang tidak berjalan sehingga banyak infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak berfungsi.

Permasalahan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran strategis yaitu:

a. Belum optimalnya skema pengurangan dan penanganan sampah dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah
b. Belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan
c. Belum ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk pengendalian kualitas air

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya antara lain :

a. Mendorong tumbuhnya inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan mengintensifkan pendampingan terhadap kegiatan pengolahan sampah yang sudah ada seperti bank sampah.
b. Mendorong upaya rehabilitasi hutan dan lahan, serta meningkatkan upaya perlindungan hutan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan tutupan lahan
c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengendalian kualitas air antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, terutama pada titik-titik sampling sungai yang tercemar ringan hingga sedang.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 adalah sebesar Rp21.476.098.725,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.373.271.603,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 24,95%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.185
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator IKLH

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
IKLH	21.476.098.725,00	16.373.271.603,00	76,19	77,4	211.540.976,78	281.875.557,49	0,75	0,25	24,95

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pencapaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup (realisasi anggaran 97,05%) dengan kegiatan berupa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (realisasi anggaran 98,65%) dengan kegiatan berupa Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (realisasi anggaran 99,99%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) (realisasi anggaran 98,75%) dengan kegiatan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
5) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (realisasi anggaran 99,79%) dengan kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

6) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara (realisasi anggaran 91,30%) dengan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Program dan kegiatan yang kurang efektif dalam pencapaian target sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (realisasi anggaran 18,56%) dengan kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (realisasi anggaran 84,21%) dengan kegiatan berupa Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, dan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (realisasi anggaran 85,24%) dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
4) Program Pengelolaan Persampahan (realilsasi anggaran 67,77%) dengan kegiatan berupa Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.186
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKLH

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	47,200,000.00	45,806,000.00	97.05
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	47,200,000.00	45,806,000.00	97.05
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4,983,796,615.00	4,916,435,472.00	98.65
Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkugan Hidup	4,983,796,615.00	4,916,435,472.00	98.65
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	57,482,000.00	57,476,000.00	99.99
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	57,482,000.00	57476000.00	99.99
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	27,813,200.00	27466100.00	98.75
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	27,813,200.00	27,466,100.00	98.75
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	79,687,000.00	67,105,000.00	84.21

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	79,687,000.00	67,105,000.00	84.21
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30,000,000.00	25,570,827.00	85.24
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	30,000,000.00	25,570,827.00	85.24
Program Pengelolaan Persampahan	15,159,795,300.00	10,273,210,604.00	67.77
Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional	15,159,795,300.00	10,273,210,604.00	67.77
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	110,168,110.00	109,938,000.00	99.79
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	25,671,160.00	25,608,500.00	99.76
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	84,496,950.00	84,329,500.00	99.80
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	918,764,200.00	838,871,300.00	91.30
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	145,801,125.00	140,329,939.00	96.25
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah	653,302,525.00	584,413,201.00	89.46

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pertambangan Rakyat			
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	119,660,550.00	114,128,160.00	95.38
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	61,392,300.00	11,392,300.00	18.56
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	61,392,300.00	11,392,300.00	18.56

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.18 Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan Persentase, serta Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.187

Realisasi Kinerja Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,327	0,331	0,327*	0,344	-	100	98,79	95,06	-
Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0,05	0,1	0,1	0,35	-	200,00	100,00	28,57	-

Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2024-2025, diolah

*Keterangan: * Data tahun 2024 karena data tahun 2025 belum rilis. Rilis dari Kementerian Kehutanan*

A. Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK) disusun sebagai alat ukur aksi dan kinerja dari setiap upaya pengelolaan yang dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap kehilangan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan. upaya pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia meliputi:

a. Pengurangan ancaman, yaitu upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetic
b. Pemanfaatan berkelanjutan, yaitu upaya pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal dan berkelanjutan yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat dan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Indeks ini memiliki rentang nilai nol sampai satu (0-1), yang menunjukkan tingkat capaian kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati. Pengukuran nilai IPK dilaksanakan setiap tahun secara berkala di tingkat nasional dan daerah. Nilai IPK menunjukkan intervensi yang dikerahkan untuk mengelola keanekaragaman hayati, sehingga melalui pengelolaan yang baik dapat mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati yang baik pula. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati telah menjadi salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025- 2029, serta diselaraskan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Pada saat ini, pengukuran IPK masih dilakukan pada upaya pengelolaan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, IPK akan terus dikembangkan, sehingga dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh para pihak non-pemerintah.

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah terdiri dari dua komponen yaitu untuk mengurangi ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah terdiri dari 3 (tiga) sektor/pilar yaitu:

a. Sektor Kehutanan dan Lahan
b. Sektor Pertanian dan Perkebunan
c. Sektor Perairan

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Data realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan Triwulan III Tahun 2025 tidak ada.Sehingga data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data tahun 2024 yang sebesar 0,327. Bila dibandingkan dengan target maka terdapat deviasi .-0,004 poin atau capaian sebesar 98,79%.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Data realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan Triwulan III Tahun 2025 tidak ada.Sehingga data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data tahun 2024 yang sebesar 0,327. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 maka capaiannya sebesar 100%.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**
   Data realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan Triwulan III Tahun 2025 tidak ada.Sehingga data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data tahun 2024 yang sebesar 0,327. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 (0,344) maka terdapat deviasi -0,017 poin atau capaian sebesar 95,06%.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
   a. Deforestasi dan degradasi hutan
      Estimasi kerusakan akibat defrestasi dan degradasi hutan di NTB sebesar 150-200 hektar yang disebabkan oleh aktivitas legal maupun illegal. Kerusakan ini menurunkan populasi spesies flora dan fauna
   b. Peningkatan alih fungsi lahan
      Alih fungsi lahan yang marak terjadi adalah lahan hutan yang digunakan sebagai lahan jagung. Hal ini terkait erat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Keinginan untuk mendapat penghasilan yang mudah dan relatif memicu masyarakat melakukan alih fungsi lahan ini.
   c. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
      Pada beberapa wilayah, masih dijumpai tindakan kebakaran untuk pembukaan lahan. Hal ini berddampak pada menurunnya fungsi ekosistem dan munculnya emisi karbon tinggi
   d. Lemahnya Penegakan Hukum
      Hal ini terjadi karena pemerintah daerah belum memiliki solusi yang baik dalam kesejahteraan masyarakat sehingga cenderung ada pembiran atas aktivitas pemanfaatan ekonomi walaupun pada lahan yang tidak sesuai. Selain itu karena kapasitas polisi hutan juga terbatas dalam melakukan tindakan penertiban.
   e. Perubahan Iklim
      Perubahan iklim berdampak pada keberalngsungan spesies yang ada di hutan.

   Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:
   a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat lingkar hutan

b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) bagi KPH yang telah habis masa berlaku dokumennya dan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek)
c. Koordinasi pencegahan dan pengamanan hutan
d. Patroli dan sosialisasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan
e. Penegakan hukum atas pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan
f. Pendataan terhadap pelaku/penjual satwa tidak dilindungi mulai dari perijinan, jenis satwa, dan sumber asal – usul satwa yang dijual tersebut, dan memberikan sosialisasi agar tidak mengambil/berburu di dalam kawasan hutan
g. Monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berushaan Pemanfataan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu
h. Inventarisasi potensi kawasan hutan
i. Inventarisasi kawasan mangrove dalam rangka pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi
j. Melakukan alih mata pencaharian masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas *illegal* atau akitivitas yang merusak lingkungan
k. Melakukan kegiatan penanaman pohon dengan melibatkan mitra-mitra pembangunan
l. Melakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai
m. Membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolaan hutan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan tahun 2025 adalah sebesar Rp5.901.437.574,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.543.275.934,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 4,92%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target adalah:

a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 94,43%) dengan Kegiatan
   1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
   2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (realisasi anggaran 99,31%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
   2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
   3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (realisasi anggaran 99,99%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (realisasi anggaran 90,21%) dengan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 3.188
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	5.901.437.574,00	5.543.275.934,00	0,331	0,327	16.951.914.171,25	17.829.116.537,76	0,95	0,05	4,92

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.189
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	100,000,000.00	90,209,017.00	90.21
Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,000,000.00	90,209,017.00	90.21
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	370,266,000.00	367,704,010.00	99.31
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi	310,500,000.00	309,900,010.00	99.81
Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) Cites (Convension On	24,766,000.00	22,804,000.00	92.08

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
International Trade In Endangered Species) Untuk Kewenangan Daerah Provinsi			
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	35,000,000.00	35000000.00	100.00
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	5016494607.00	94.43
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	95,851,100.00	95.85
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	1,483,276,164.00	89.30
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	50,686,600.00	96.83
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	1,309,911,329.00	99.14
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	1,979,288,129.00	95.26
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	97,481,285.00	97.48
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	61,392,300.00	11,392,300.00	18.56
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	61,392,300.00	11,392,300.00	18.56
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	57,482,000.00	57,476,000.00	99.99
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	57,482,000.00	57476000.00	99.99

Sumber: BKAD NTB 2025

8. Indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 0,1% atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,1% (mencapai target).

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Realisasi tahun 2025 sebesar 0,1% atau lebih besar dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 0,05% (lebih 0,05 poin) atau capaian sebesar 200% (memenuhi target).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 0,1% atau mencapai 28,57% persen dari target tahun 2030 (0,35%) atau terdapat deviasi -0,25 poin. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tersebut di tahun 2030.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi

Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK) sektor Kehutanan dan Lahan, akan tetapi indikator kinerja rehabilitasi ekosistem di Provinsi NTB berfokus pada pemulihan lahan kritis dan ekosistem mangrove. Berdasarkan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2021, indeks ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain data tutupan hutan, data tutupan lahan, data ruang terbuka hijau, dan data rehabilitasi hutan dan lahan. Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 490.115 Ha atau sekitar 41,29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Faktor penyebab lahan kritis adalah perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan. Dalam rangka mempertahankan tutupan hutan dan lahan, Dinas LHK NTB berupaya melakukan tata kelola hutan melalui beberapa kegiatan antara lain:

a. Penataan batas blok
b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) bagi KPH yang telah habis masa berlaku dokumennya dan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek)
c. Koordinasi pencegahan dan pengamanan hutan

d. Patroli dan sosialisasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan
e. Penegakan hukum atas pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan
f. Pendataan terhadap pelaku/penjual satwa tidak dilindungi mulai dari perijinan, jenis satwa, dan sumber asal – usul satwa yang dijual tersebut, dan memberikan sosialisasi agar tidak mengambil/berburu di dalam kawasan hutan
g. Monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berushaan Pemanfataan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu
h. Inventarisasi potensi kawasan hutan
i. Inventarisasi kawasan mangrove dalam rangka pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik tahun 2025 adalah sebesar Rp.9.569.104.274,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.257.270.926,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 3,26%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh rogram dan kegiatan efektif dalam pencapaian target, sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi anggaran 94,43%), dengan kegiatan:

   Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi

   1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan
   2. Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk)
   3. Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
   4. Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
   5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
   6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun

b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (realisasi anggaran 99,64%) dengan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut

Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (realisasi anggaran 99,38%) dengan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

Tabel 3.190

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	9.569.104.274,00	9.257.270.926,00	0,1	0,1	92.572.709.260,00	95.691.042.740,00	0,97	0,033	3,26

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.191
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Hutan	5,312,297,274.00	5,016,494,607.00	94.43
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	95,851,100.00	95.85
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1,660,914,175.00	1,483,276,164.00	89.30
Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	52,345,400.00	50,686,600.00	96.83
Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	1,321,254,000.00	1,309,911,329.00	99.14
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	2,077,783,699.00	1,979,288,129.00	95.26
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100,000,000.00	97,481,285.00	97.48
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	3,938,767,000.00	3,924,718,000.00	99.64
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	1,111,910,000.00	1,108,658,900.00	99.71
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2,826,857,000.00	2,816,059,100.00	99.62
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	318,040,000.00	316,058,319.00	99.38
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	318,040,000.00	316,058,319.00	99.38

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.19 Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan diukur melalui indikator kinerja Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.192
Realisasi Kinerja Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan Konsumsi Listrik yang Merata serta Berkelanjutan

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192,23	123,53	153,88	NA	NA	155,61	124,57	NA
Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709	751,00	769,88	876,00	NA	108,59	102,51	87,89	NA

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Kinerja Intensitas Energi Primer

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merupakan indikator negatif. Realisasi tahun 2025 sebesar 123,53 SBM/Rp. Milyar. Jika dibandingkan dengan target sebesar 192,23 SBM/Rp. Milyar, maka capaian sebesar 155,61%.

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi tahun 2025 sebesar 123,53 SBM/Rp. Milyar. Sedangkan realisasi tahun 2024 tidak tersedia, sehingga capaiannya tidak bisa diukur.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPJMD**

   Realisasi tahun 2025 sebesar 123,53 SBM/Rp. Milyar. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 153,88 SBM/Rp. Milyar, maka capaian sebesar 124,57%.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Realisasi tahun 2025 sebesar 123,53 SBM/Rp. Milyar. Sedangkan target nasional tidak tersedia, sehingga capaiannya tidak bisa diukur..

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Intensitas energi primer adalah rasio yang mengukur seberapa banyak energi primer (seperti batubara, minyak, gas, atau terbarukan) yang digunakan untuk menghasilkan satu unit Produk Domestik Bruto (PDB). Ini merupakan indikator efisiensi ekonomi, di mana angka yang lebih rendah menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien. Sumber energi, meliputi bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, gas alam) dan sumber energi terbarukan (panas bumi, air, matahari, angin).

   Indikator kinerja Intensitas energi primer didukung oleh Program Energi Baru Terbarukan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM Provinsi NTB yaitu dengan peningkatan sarana dan prasana pemanfaatan energi baru terbarukan dalam wilayah provinsi yang diharapkan mampu meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi primer. Pelaksanaan Program Energi Baru Terbarukan dilakukan secara konsisten melalui peningkatan sarana dan prasarana pemanfaatan EBT, termasuk dukungan fasilitasi pembangunan dan optimalisasi infrastruktur energi terbarukan di wilayah provinsi termasuk di dalamnya dukungan pihak swasta. Selain itu, kegiatan yang mendukung peningkatan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer, salah satunya melalui pembangunan instalasi biogas. Sepanjang tahun 2025 telah terbangun 18 (delapan belas) instalasi biogas yang pembangunannya bersumber dari dana APBD Provinsi NTB. Selain faktor internal, keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.

   Selanjutnya, pemanfaatan pelet biomassa yang bersumber dari sampah organik dan limbah pertanian untuk *co-firing* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) turut memberikan kontribusi dalam peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer. *Co-firing* adalah proses pencampuran bahan bakar biomassa dengan batubara di dalam boiler PLTU sehingga sebagian energi berasal dari sumber terbarukan tanpa perlu membangun pembangkit baru. Jenis biomassa yang digunakan antara lain sekam padi, serbuk gergaji kayu, tempurung kelapa, dan limbah pertanian lainnya yang diolah menjadi pelet padat untuk

dicampur dengan batubara. Implementasi *co-firing* memungkinkan substitusi sebagian batubara secara efisien, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memanfaatkan sampah dan limbah pertanian secara produktif sebagai sumber energi alternatif. Sinergi antara pemerintah daerah, pengelola PLTU, dan penyedia biomassa menjadi faktor kunci untuk memastikan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan, sehingga *co-firing* dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target bauran energi primer.

Iklim investasi yang relatif stabil serta meningkatnya minat sektor swasta dalam pengembangan pembangkit energi terbarukan turut mempercepat penambahan kapasitas EBT di daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pelaku usaha/sektor swasta menjadi katalis penting dalam mendorong pertumbuhan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Intensitas energi primer tahun 2025 adalah sebesar Rp854.994.985,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp838.046.592,00. Efisiensi anggaran sebesar 52,35%. Perhitungan efisiensi anggaran sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.192a

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Intensitas Energi Primer

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (P3-1)	Efisiensi (P4x100)
Intensitas energi primer	855.994.985	838.046.592	192,23	123,53	6.784.154,39	4.452.972,92	1,52	0,52	52,35

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB dalam rangka pencapaian indikator kinerja adalah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (realisasi anggaran 98,02%) dengan kegiatan:

a. Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi
b. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.193
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Intensitas Energi Primer

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	854,994,985.00	838,046,592.00	98.02
Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	329,099,265.00	318,887,625.00	96.90
Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	492,873,195.00	486,288,362.00	98.66
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	33,022,525.00	32,870,605.00	99.54

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Kinerja Konsumsi Listrik per Kapita

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja Konsumsi Listrik per kapita dalam rangka mewujudkan Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan. Pada tahun 2025 realisasi kinerja indikator tersebut sebesar 769,88 kWh atau capaian realisasi sebesar 102,51% dari target yang telah ditetapkan (751,00 kWh).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian nilai Konsumsi Listrik per kapita di NTB tahun 2025 yaitu sebesar 769,88 kWh atau capaian sebesar 102,51% lebih tinggi dari tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2025-2029

Realisasi indikator kinerja Konsumsi Listrik per kapita pada tahun 2025 sebesar 876 kWh apabila dibandingkan dengan target indikator kinerja tersebut di tahun 2030 (876,00), terpaut 106,12 poin. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pencapaian target di tahun 2030.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Target nasional tidak ada sehingga capaian kinerja tidak bisa dibandingkan.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Konsumsi listrik per kapita adalah total penjualan tenaga listrik (kWh) dibagi jumlah penduduk, yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan dan kemajuan pembangunan energi suatu daerah. Konsumsi Listrik per kapita ini bisa menunjukkan adanya Pertumbuhan yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

   Untuk mendukung peningkatan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik atau Konsumsi Listrik, Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

   Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin kegiatan yang dilakukan yaitu melalui pemasangan listrik murah dan hemat dengan 195 RTS pada tahun 2024. Untuk tahun 2025 program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin masih tetap dilaksanakan dengan jumlah penerima manfaat sebesar 338 RTS. Peningkatan cakupan layanan listrik bagi masyarakat tidak mampu diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus meingkatkan Rasio Elektrifikasi daerah.

   Indikator kinerja Konsumsi listrik per kapita tahun 2025 melampaui target. Nammun untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja selanjutnya, diperlukan peningkatan infrastruktur listrik di beberapa wilayah terpencil pemerataan kapasitas jaringan transmisi dan distribusi peningkatan kepemilikan rumah tangga atas sambungan listrik, subsidi/insentif biaya pemasangan listrik awal. Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM melaksanakan intervensi melalui kegiatan bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Sasaran penerima program adalah rumah tangga yang terdata sebagai masyarakat tidak mampu yang berhak mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah. Untuk tahun 2025, pemerintah provinsi telah memberikan bantuan kepada 338 Rumah Tangga Sasaran. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan beban pengeluaran masyarakat untuk pasang baru layanan listrik PLN dapat berkurang. Selain itu masyarakat tidak mampu dapat menikmati layanan listrik PLN secara aman, andal dan ramah lingkungan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Konsumsi listrik per kapita tahun 2025 adalah sebesar Rp725.985.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp723.149.146,00. Efisiensi anggaran sebesar 2,83%. Perhitungan efisiensi anggaran sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.193a

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Konsumsi Listrik per Kapita

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Konsumsi Listrik per Kapita	725.985.000	723.149.146	751	769,88	939.301,12	966.691,08	0,97	0,03	2,83

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Program dan Kegiatan Pendukung

Program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB adalah Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (realisasi anggaran 99,61%) dengan kegiatan antara lain Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi, Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.194

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Konsumsi Listrik per Kapita

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	725,985,000.00	723,149,146.00	99.61
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	51,322,000.00	51162750.00	99.69
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	9,617,000.00	9537000.00	99.17
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	665,046,000.00	662,449,396.00	99.61

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.20 Meningkatnya Realisasi Investasi

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi diukur dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi. Adapun capaian sasaran strategis kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.195
Realisasi Kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi Provinsi NTB Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54.55	61.09	61.10	107.81	61,09	112.01	100.02	56.67	100,02

Sumber : Bappeda NTB, 2025 diolah

a. Analisis Capaian Kinerja

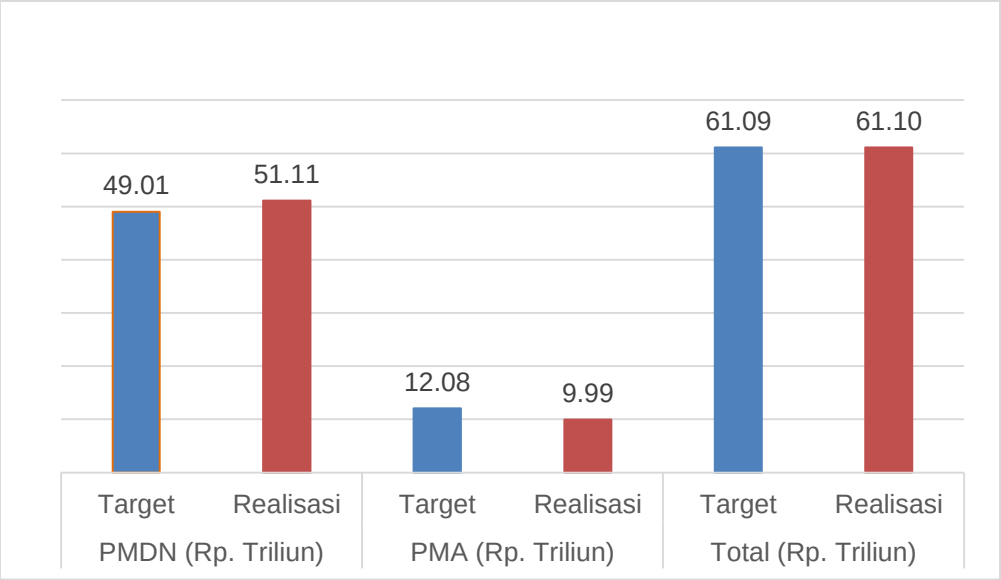
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Nilai realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai Rp 61,10 Triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 51,11 Triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 9,99 Triliun. Nilai realisasi investasi tahun 2025 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 61,09 Triliun atau tercapai 100,02%. Realisasi PMDN untuk tahun 2025 melampuai dari target yang ditetapkan sebesar Rp 49,01 Triliun atau capaiannya 104,28% , sementara realisasi PMA belum mencapai target sebesar 12,08 Triliun atau capaiannya 82,73%. Link bukti dukung https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2025/10/28/realisasi-investasi-sampai-dengan-triwulan-iii-tahun-2025-di-ntb-capai-8018-persen-dari-target-nasional/

Perbandingan antara target dan nilai realisasi investasi di tahun 2025, termasuk PMDN dan PMA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.32

Perbandingan Target dan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025



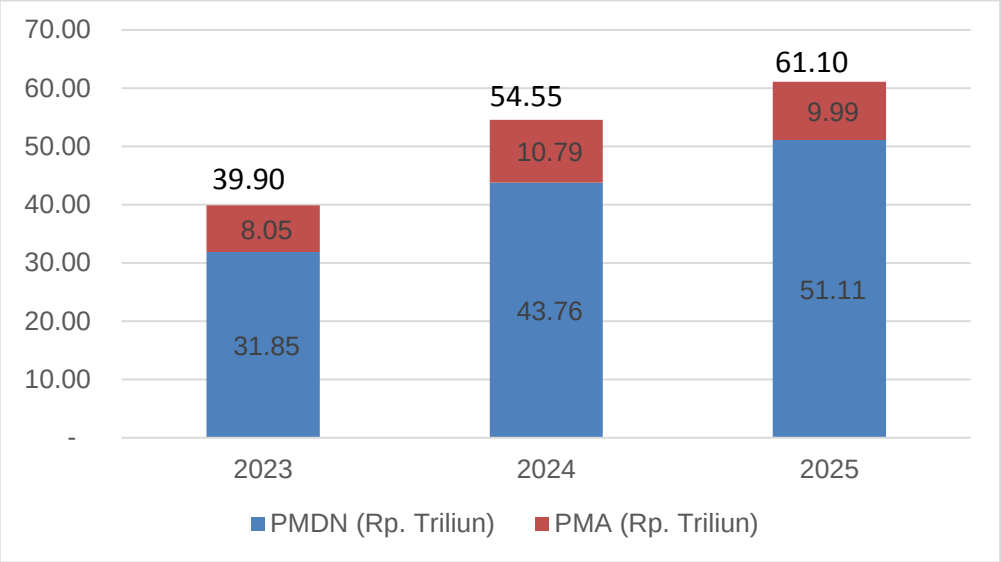
Sumber : DPMPTSP NTB 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja indikator nilai realisasi investasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.33

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023-2025



Sumber: DPMPTSP NTB 2025

Realisasi kinerja indikator nilai realisasi investasi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, yaitu Rp 61,10 Triliun di tahun 2025 dan Rp 54,55 Triliun di tahun 2024 atau capaiannya sebesar 112,01%. Nilai realisasi investasi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 realisasi

investasi mencapai Rp 39,90 Trilin yang terdiri dari PMDN sebesar Rp 31,85 Triliun dan PMA sebesar Rp 8,05 Triliun, tahun 2024 realisasi investasi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 54,55 Triliun yang terdiri dari PMDN sebesar Rp 43,76 Triliun dan PMA sebesar Rp 10,79 Triliun. Pada tahun 2025, realisasi investasi meningkat menjadi Rp 61,10 Triliun yang terdiri dari PMDN sebesar Rp 51,11 Triliun dan PMA sebesar Rp 9,99 Triliun.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029**

   Nilai realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp 61,10 Triliun atau 56,67% dari target akhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebesar Rp 107,81 Triliun.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Nilai realisasi investasi di Provinsi NTB tahun 2025 sebesar Rp 61,10 Triliun atau 100,02% dari target nasional yaitu Rp 61,09Triliun. Total target realisasi investasi secara nasional tahun 2025 sebesar Rp 1.905,86 Triliun, dan Provinsi NTB ditargetkan sebesar Rp 61,09 Triliun atau 3,21% dari target nasional.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Terlampauinya target nilai realisasi investasi di Provinsi NTB tidak terlepas dari kontribusi masing-masing kabupaten/kota. Realisasi PMDN dan PMA menurut kabupaten/kota se-Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

Tabel 3.196

Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi PMDN dan PMA		
		PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kota Mataram	1.109.069.731.952	827.239.266.471	1.936.308.998.423
2	Lombok Barat	1.043.172.960.386	316.009.617.752	1.359.182.578.138
3	Lombok Tengah	5.106.994.580.103	2.336.943.353.147	7.443.937.933.250
4	Lombok Timur	374.969.888.772	120.050.175.642	495.020.064.414
5	Lombok Utara	661.888.045.979	905.979.209.270	1.567.867.255.249
6	Sumbawa Barat	41.686.652.248.490	4.134.495.616.401	45.821.147.864.891
7	Sumbawa	762.839.190.822	247.047.925.448	1.009.887.116.270
8	Dompu	49.868.952.027	1.092.696.998.024	1.142.565.950.051
9	Bima	182.276.589.334	13.305.289.840	195.581.879.174
10	Kota Bima	131.007.445.982	4.268.500	131.011.714.482
Total		51.108.739.633.847	9.993.771.720.495	61.102.511.354.342

Sumber : DPMPTSP Provinsi NTB, 2025

Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar bagi penanaman modal di provinsi NTB adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan realisasi penanaman modal sebesar Rp 45.821.147.864.891 (74,99%) dengan rincian PMDN sebesar Rp41.686.652.248.490 (81,56% dari total PMDN) dan PMA sebesar Rp4.134.495.616.401 (41,37% dari total PMA). Kontribusi ini sebagian besar

bersumber dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang mengelola pertambangan tembaga dan emas serta industri turunannya. Keberadaan PT. AMNT ini memberikan dampak bagi sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian/perkebunan, pariwisata dan peternakan, dan lain sebagainya.

Adapun kontribusi kabupaten/kota lainnya berturut-turut adalah Kabupaten Lombok Tengah (12,18%), Kota Mataram (3,17%), Kabupaten Lombok Utara (2,57%), Kabupaten Lombok Barat (2,22%), Kabupaten Dompu (1,87%), Kabupaten Sumbawa (1,65%), Kabupaten Lombok Timur (0,81%), Kabupaten Bima (0,32%) dan Kota Bima (0,21%). Peningkatan realisasi investasi mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Provinsi NTB. Kondisi ini merupakan hasil dari perbaikan tata kelola perizinan, kepastian layanan melalui sistem perizinan berbasis risiko, serta dukungan kebijakan daerah yang relatif adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Capaian nilai realisasi investasi yang juga berada di atas target nasional menunjukkan bahwa Provinsi NTB mampu bersaing dalam menarik investasi di tengah dinamika ekonomi nasional.

Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar bagi realisasi penanaman modal di NTB yang mencapai Rp 44.096.574.020.729, yang kemudian diikuti oleh sektor perindustrian sebesar Rp 5.799.903.073.911 dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp 5.330.030.819.737. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sektor pertambangan, perindustrian dan pariwisata menjadi sektor yang menjadi potensi dan unggulan di Provinsi NTB. Berdasarkan sektornya, realisasi investasi terbagi menjadi 15 sektor, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.197

Rekapitulasi Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2025

No.	Sektor	Realisasi PMDN dan PMA 2025		
		PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ESDM	39.348.735.082.818	4.747.838.937.911	44.096.574.020.729
2	Perindustrian	4.952.027.638.297	847.875.435.614	5.799.903.073.911
3	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.860.654.691.637	2.469.376.128.100	5.330.030.819.737
4	Perdagangan	1.909.480.859.014	306.583.561.173	2.216.064.420.187
5	Telekomunikasi	13.012.205.619	773.283.310.870	786.295.516.489
6	UMK	652.419.063.500	-	652.419.063.500
7	Transportasi	433.242.011.229	135.532.865.613	568.774.876.842
8	Kelautan dan Perikanan	312.451.314.122	162.469.636.021	474.920.950.143
9	Peternakan, Pertanian, Perkebunan	19.169.065.520	415.864.685.198	435.033.750.718
10	PUPR	184.327.026.693	94.880.790.223	279.207.816.916
11	Ketenagakerjaan	206.207.161.144	14.456.035.478	220.663.196.622

No.	Sektor	Realisasi PMDN dan PMA 2025		
		PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah (Rp)
12	Kesehatan	215.019.060.844	3.758.624.804	218.777.685.648
13	Keuangan	3.679.541.958	13.841.508.101	17.521.050.059
14	Pendidikan	20.000.000	3.918.162.924	3.938.162.924
15	Koperasi	2.386.949.917	-	2.386.949.917
J u m l a h		51.112.831.672.312	9.989.679.682.030	61.102.511.354.342

Sumber : DPMPTSP Provinsi NTB. 2025

Peningkatan nilai realisasi investasi tidak terlepas dari komitmen pemerintah Provinsi NTB untuk terus menjadikan NTB sebagai daerah Ramah Investasi. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif dan berbagai kemudahan penanaman modal dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Pada tahun 2024 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengaturan Penanaman Modal yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Perijinan dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2025. Selain itu dilakukan perjanjian kerjasama antara Provinsi jawa Timur dan Provinsi NTB dalam pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, promosi penanaman modal serta optimalisasi penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu. Untuk meningkatkan realisasi investasi juga dibentuk Tim Satgas Percepatan Investasi yang antara lain bertugas mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan di lapangan serta memastikan kemudahan berusaha, memfasilitasi kerjasama investor dengan UMKM serta mengkaji pemanfaatan lahan.

Stabilitas politik dan keamanan daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan realisasi investasi. Kondisi sosial politik Provinsi NTB yang relatif kondusif dan aman memberikan kepastian dan rasa nyaman bagi investor, terutama untuk investasi yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Stabilitas ini menjadi modal non-fisik yang strategis dalam menjaga iklim investasi daerah tetap kompetitif di tengah dinamika nasional dan global.

Untuk menjaga keberlanjutan realisasi investasi khususnya di luar sektor pertambangan, Provinsi NTB berusaha untuk terus mendorong dan mengembangkan sektor-sektor potensial yang dapat menarik investor, seperti pariwisata, perindustrian dan agromaritim. Pariwisata, perindustrian dan agromaritim kedepannya diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi NTB di luar sektor pertambangan, terutama dengan adanya dukungan pemerintah pusat yang menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai Destinasi Super Prioritas serta Destinasi Pariwisata Internasional dan Alur Laut Kepulaian Indonesia II yang satu jalur dengan Ibu Kota Negara (IKN).

Pemerintah Provinsi NTB melalui DPMPTSP telah memberikan layanan perizinan menggunakan sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan berbasis digital sejak tahun 2017. Implementasi OSS-RBA telah memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam proses perizinan berusaha, sehingga mampu mempercepat waktu layanan dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Digitalisasi layanan perizinan ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat serta mendorong realisasi investasi. Jumlah penerbitan perizinan (izin dan non izin) pada tahun 2025 sebanyak 4.048, terdiri dari 4.024 izin dan 24 non izin. Jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS sebanyak 1.864 izin, sementara yang diterbitkan manual sebanyak 2.159.

Peningkatan nilai realisasi investasi di Provinsi NTB juga dipengaruhi adanya Mall Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota. Mall Pelayanan Publik (MPP merupakan sebuah tempat terpadu yang menyediakan berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat. Salah satu gerai yang ada di Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi.

Adapun permasalahan dan kendala dalam pencapaian indikator kinerja nilai realisasi investasi disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.198

Permasalahan dan Upaya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja

Nilai Realisasi Investasi

Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1. Keterbatasan infrastruktur pendukung pada sektor-sektor potensial non-ESDM menjadi hambatan utama dalam mendorong diversifikasi investasi	1. Penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam penyiapan kawasan dan lokasi potensial investasi, khususnya pada sektor prioritas. 2. Menyusun dan memperbarui peta potensi investasi daerah sebagai dasar promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis sektor unggulan. Penyusunan peta potensi ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik sektor-sektor non-ESDM dan mendorong diversifikasi investasi yang lebih merata antarwilayah dan antarsektor 3. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah yang pro-investasi, baik dalam bentuk kebijakan perizinan, fasilitasi investasi, maupun pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat iklim investasi daerah
2. Gangguan pada sistem OSS serta kendala teknis dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berpotensi menyebabkan data realisasi investasi tidak tercatat secara maksimal dan akurat. Ketidakakuratan data ini tidak hanya memengaruhi capaian indikator kinerja, tetapi juga dapat menghambat proses analisis dan pengambilan keputusan yang tepat waktu, baik oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha.	1. Pembaruan (updating) aplikasi OSS-RBA secara berkelanjutan yang disertai dengan pendampingan intensif kepada pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan, sekaligus memastikan data realisasi investasi tercatat secara lebih akurat dan tepat waktu. 2. Pengembangan beberapa aplikasi dan platform digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan

Sumber: DPMPST NTB 2025

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Nilai Realisasi Investasi sebesar Rp 1.206.004.212,00. Realisasi anggaran sebesar Rp791.540.050,00. Efisiensi anggaran sebesar 34,38%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target adalah:

a. Program Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal (realisasi anggaran 99,94%), dengan kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (realisasi anggaran 99,48%) dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (realisasi anggaran 96,35%) dengan kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Sedangkan program dan kegiatan yang belum efektif dalam pencapaian target adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (realisasi anggaran 50,16%) dengan kegiatan:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.199
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Realisasi Investasi

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	824,394,012.00	413,520,000.00	50.16
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	323,597,900.00	313,127,400.00	96.76
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	500,796,112.00	100,392,600.00	20.05
Program Pelayanan Penanaman Modal	38,813,000.00	38,788,000.00	99.94
Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	38,813,000.00	38,788,000.00	99.94
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	285,646,000.00	284168050.00	99.48
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	285,646,000.00	284168050.00	99.48
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	57,151,200.00	55,064,000.00	96.35
Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	57,151,200.00	55,064,000.00	96.35

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.21 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, dan Rasio Konektivitas. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.200
Realisasi Kinerja Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%))			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75,83	76,21	70,12	78,13	NA	92,47	92,01	89,75	NA
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67,74	71,68-71,7	71,49	73,35-73,58	68,4	105,54	99,73	97,46	104,52
Rasio Konektivitas	Rasio	0,82	0,83	0,831	0,88	NA	101,34	100,12	94,43	NA

Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2024-2025, diolah

A. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan. Pada tahun 2025 IKLI NTB sebesar 70,12 atau mencapai 92,01% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76,21 sehingga kurang dari 6,09 poin (tidak mencapai target). Apabila dicermati bahwa capaian indikator kinerja IKLI NTB ini semakin menurun realisasinya.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Realisasi nilai IKLI NTB tahun 2025 sebesar 70,12 atau lebih kecil dari realisasi 75,83 tahun 2024 (kurang 5,71 poin) atau sebesar 92,47%. Dengan capaian pada tahun 2025 ini, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur NTB semakin menurun realisasinya (tidak memenuhi target).

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD

Realisasi IKLI pada tahun 2025 tercatat sebesar 70,12, atau belum mencapai 89,75% dari target yang ditetapkan sebesar 78,13 pada tahun 2030 terdapat deviasi -8,01 poin. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja IKLI tersebut di tahun 2030.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Target/standar nasional tidak ada, sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Analisis terhadap IKLI merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan dan harapan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Provinsi NTB. Penilaian dilakukan terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikembangkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing infrastruktur dimana SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Data pengukuran pendapat masyarakat tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.201

Capaian kinerja indeks kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) per sektor

Infrastruktur	Indeks Kinerja		Kategori		Indeks Harapan		Kategori		Tingkat Kesesuaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Irigasi	78,65	69,49	Baik	Kurang Baik	96,38	82,83	Sangat Penting	Penting	82	84
Jalan dan Jembatan	81,35	75,66	Baik	Kurang Baik	96,78	83,85	Sangat Penting	Penting	84	90
Air Minum (SPAM)	73,4	71,26	Kurang Baik	Kurang Baik	97,09	82,55	Sangat Penting	Penting	76	86
Persampahan	75,04	65,72	Kurang Baik	Kurang Baik	98,74	82,72	Sangat Penting	Penting	76	79
Drainase	73,77	69,95	Kurang Baik	Kurang Baik	95,86	81,46	Sangat Penting	Penting	77	86
Permukiman Kumuh	64,27	68,64	Tidak Baik	Kurang Baik	96,94	82,72	Sangat Penting	Penting	66	83
Terminal	77,45		Baik		94,21		Sangat Penting		82	
Pelabuhan	82,74		Baik		93,74		Sangat Penting		88	
IKLI	**75,83**	**70,12**	**Kurang Baik**	**Kurang Baik**	**96,22**	**82,62**	**Sangat Penting**	**Penting**	**79**	**85**

Sumber: Bappeda NTB 2026

Berdasarkan tabel di atas bahwa tahun 2025 capaian kinerja untuk IKLI menunjukkan hasil yang kurang baik. Penjelasan masing-masing sektor infrastruktur yang dinilai mencakup berbagai aspek yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti:

1) **Irigasi**, yang mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Tantangan utama di hampir semua wilayah adalah peningkatan kualitas fisik dan kontribusi terhadap hasil pertanian. Infrastruktur yang sudah tersedia perlu dioptimalkan agar memberikan dampak yang lebih besar pada keberhasilan pertanian di wilayah ini. Selanjutnya untuk mengevaluasi berbagai unsur layanan infrastruktur irgasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja irigasi maka yang perlu dilakukan adalah dengan mempertahankan irigasi yang sudah bagus dengan pemeliharaan agar tetap optimal, dan untuk irigasi yang kualitasnya tidak bagus agar bisa di prioritaskan untuk ditingkatkan sehingga dapat berfungsi secara optimal untuk penunjang pertanian.
2) **Jalan dan Jembatan**, yang mendukung mobilitas orang dan barang antar wilayah. Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan merujuk pada berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan pembangunan, pemeliharaan, serta peningkatan jalan dan jembatan agar dapat mendukung mobilitas masyarakat, transportasi barang, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, terdapat disparitas kinerja infrastruktur jalan dan jembatan antar wilayah. Beberapa kota dan kabupaten telah menunjukkan performa yang baik hingga sangat baik, sementara wilayah lainnya masih membutuhkan peningkatan signifikan, terutama dalam hal kualitas fisik dan pemanfaatan infrastruktur. Perbaikan dan pemerataan pengelolaan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan layanan di seluruh wilayah.
3) **Air minum (SPAM)**, yang memastikan akses masyarakat terhadap air bersih. Penilaian unsur-unsur kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur

air minum (SPAM) ini meliputi ketersediaan fisik jaringan air minum, kualitas fisik jaringan air minum, kualitas air minum, tingkat pemanfaatan jaringan air minum dan kontribusinya terhadap kesehatan masyarakat. Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Infrastruktur Air Minum (SPAM) terdapat di 6 (enam) Kabupaten yang memiliki nilai indeks Layanan Infrastruktur SPAM antara lain:

a. **Kabupaten Lombok Utara** dengan kategori mutu C, Ketersediaan fisik jaringan dinilai kurang tersedia, dan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masih tergolong rendah.
b. **Kabupaten Lombok Barat**: Nilai indeks kepuasan layanan di Kabupaten Lombok Barat adalah **73** (kategori mutu C), dengan sebagian besar parameter seperti ketersediaan fisik, kualitas jaringan, dan kualitas air masuk dalam kategori kurang baik.
c. **Kabupaten Lombok Tengah**: Sama seperti Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki indeks kepuasan layanan sebesar **73** (kategori mutu C). Hal ini menunjukkan infrastruktur air minum yang kurang optimal, terutama pada pemanfaatan infrastruktur.
d. **Kabupaten Lombok Timur**: Dengan nilai indeks kepuasan layanan sebesar **77** (kategori mutu B), Kabupaten Lombok Timur menonjol dengan kinerja infrastruktur yang baik. Kontribusi terhadap peningkatan kesehatan dinilai cukup memadai.
e. **Kabupaten Sumbawa**: memiliki indeks kepuasan layanan sebesar **76** (kategori mutu C), dengan ketersediaan fisik jaringan dan kualitas air dinilai kurang memadai. Namun, kontribusi terhadap kesehatan menunjukkan hasil yang lebih baik.
f. **Kabupaten Dompu**: mencatat indeks kepuasan layanan yang rendah sebesar **67** (kategori mutu C). Pemanfaatan infrastruktur dan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan berada dalam kategori tidak baik.

Sebagian besar layanan infrastruktur air minum di Provinsi ntb menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan mutu layanan kategori C. Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa memiliki kinerja relatif lebih baik, sedangkan Kabupaten Dompu mencatat indeks terendah. Masalah utama meliputi ketersediaan, kualitas jaringan, dan pemanfaatan infrastruktur, sementara beberapa wilayah tidak memiliki data untuk dievaluasi. Peningkatan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut sangat diperlukan.

4) **Persampahan**, yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Infrastruktur persampahan adalah sistem atau fasilitas yang dirancang untuk mengelola limbah padat, mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Meskipun sarana dan prasarana persampahan sudah ada, akan tetapi kunatitas dan

kualitas serta operasional penanganan atau pengurangan sampah yang perlu untuk dioptimalkan di seluruh wilayah.

5) **Drainase**, yang mencegah banjir dan kerusakan lingkungan. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan airdari suatu kawasan ke badan air penerima. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur drainase meliputi unsur-unsur ketersediaan fisik, kualitas fisik, kontribusi dalam mengurangi genangan, tingkat pemanfaatan dan kontribusi dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Meskipun ketersediaan fisik sudah memadai, pemanfaatan infrastruktur sudah baik, tetapi kontribusi terhadap penciptaan lingkungan bersih dan sehat masih tergolong rendah.

   Oleh karena itu, perlu optimalisasi drainase dengan melakukan perbaikan drainase yang kurang memadai.

6) **Kawasan Permukiman Kumuh**, yang membutuhkan perhatian untuk meningkatkan kualitas hidup. Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu dibawah 10 ha, antara 10-15 ha dan di atas 15 ha. Luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan tanggung jawab Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan tanggung jawab Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas 10-15 Ha. Ketersediaan fisik jaringan di dalam Kawasan permukiman ada yang sudah memadai akan tetapi masih banyak juga yang belum memadai bahkan tidak tersedia. Contohnya akses terhadap air bersih, air minum, ketersediaan jalan lingkungan yang baik dan lain-lain.

   Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan identifikasi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai penunjang fungsi permukiman di dalam kawasan kumuh kewenangan provinsi

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IKLI tahun 2025 adalah sebesar Rp582.950.785.390,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp567.459.246.844,00. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena kinerja tidak tercapai namun anggaran yang terserap sebesar 97,34%.

Tabel 3.202

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
IKLI	582.950.785.390,00	567.459.246.844,00	76,21	70,12	8.092.687.490,64	7.649.268.933,08	1,06	-0,06	-5,80

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perhubungan dalam pencapaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan. Seluruh program dan kegiatan dapat dikatakan belum efektif mencapai target indikator. Kinerja yang tidak tercapai namun anggaran yang terserap 97,34%.

Program dan kegiatan yang tersebut antara lain:

a. Dinas PUPR melalui beberapa program/kegiatan prioritas yaitu:
    1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (realisasi anggaran 99,83%) dengan kegiatan antara lain: Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.
    2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (realisasi anggaran 56,57%) dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
    3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (realisasi anggaran 94,79%) dengan kegiatan antara lain: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional berupa Optimalisasi TPA/TPST/SPA.
    4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (realisasi anggaran 93,47%) dengan kegiatan antara lain: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi berupa Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
    5. Program Pengembangan Permukiman (realisasi anggaran 96,05%) dengan kegiatan antara lain: Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi berupa Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
    6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (realisasi anggaran 99,68%) dengan kegiatan antara lain: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas berupa Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.
    7. Program Penyelenggaraan Jalan (realisasi anggaran 91,33%) dengan kegiatan antara lain: Penyelenggaraan Jalan Provinsi berupa Rekonstruksi Jalan, Penggantian Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,
b. Dinas Perumahan dan Permukiman melalui beberapa program/kegiatan prioritas yaitu:
    1. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 76,25%) dengan kegiatan antara lain: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi

Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi

2. Program Kawasan Permukiman (realisasi anggaran 95,88%) dengan kegiatan antara lain: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha, Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (realisasi anggaran 99,74%) dengan kegiatan antara lain: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman berupa penyediaan Jalan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c. Dinas Perhubungan melalui beberapa program/kegiatan prioritas yaitu:
   1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (realisasi anggaran 95,68%) dengan kegiatan antara lain: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi.
   2. Program Pengelolaan Pelayaran (realisasi anggaran 95,85%) dengan kegiatan antara lain: Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional, Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas, Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional, Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.203
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IKLI

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	141,535,781,040.00	141,289,341,428.00	99.83
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	79,462,004,360.00	79,318,023,408.00	99.82
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	62,073,776,680.00	61,971,318,020.00	99.83
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100,000,000.00	56,566,028.00	56.57
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	100,000,000.00	56,566,028.00	56.57
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	4,542,000,000.00	4,305,513,200.00	94.79
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4,542,000,000.00	4,305,513,200.00	94.79
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	20,769,131,450.00	19,412,376,650.00	93.47

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	20,769,131,450.00	19,412,376,650.00	93.47
Program Pengembangan Permukiman	11,974,950,000.00	11,501,967,500.00	96.05
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	11,974,950,000.00	11,501,967,500.00	96.05
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2,265,396,400.00	2,258,131,400.00	99.68
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,265,396,400.00	2,258,131,400.00	99.68
Program Penyelenggaraan Jalan	126,126,287,400.00	115,189,239,132.00	91.33
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	126,126,287,400.00	115,189,239,132.00	91.33
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	1,736,847,764.00	76.25
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	1,736,847,764.00	91.15
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	-	0.00
Program Kawasan Permukiman	7,304,804,900.00	7,003,677,944.00	95.88

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200,000,000.00	194,754,736.00	97.38
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7,104,804,900.00	6,808,923,208.00	95.84
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	249,072,431,000.00	248,412,392,745.00	99.74
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	249,072,431,000.00	248,412,392,745.00	99.74
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19,429,740,600.00	18,591,271,280.00	95.68
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18,811,850,000.00	17,984,283,257.00	95.60
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	169,500,000.00	168,921,500.00	99.66
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	173,852,600.00	164,916,100.00	94.86
Program Pengelolaan Pelayaran	2,094,285,150.00	2,007,434,973.00	95.85
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan	24,806,700.00	23,556,700.00	94.96

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelabuhan Internasional			
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45,547,200.00	45,023,800.00	98.85
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25,409,650.00	24,399,650.00	96.03
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1,400,000,000.00	1,323,852,600.00	94.56
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	598,521,600.00	590,602,223.00	98.68

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Sasaran Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan. Pada tahun 2025 realisasi kinerja indikator sebesar 71.49% atau mencapai 99,73% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,68-71,7% sehingga kurang dari 0,19 poin (tidak mencapai target).

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian nilai Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan NTB tahun 2025 sebesar 71,49% atau lebih besar dari target 67,74% tahun 2024 (lebih 3,75 poin) atau sebesar 105,54 persen. Dengan capaian pada tahun 2025 ini, Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan NTB meningkat realisasinya melampui realisasi tahun 2024. Tabel berikut ini menunjukkan capaian Rumah Layak Huni di Provinsi NTB.

Tabel 3.204
Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan NTB Tahun 2022-2025

KABUPATEN/ KOTA	RUMAH LAYAK HUNI			
	2022	2023	2024	2025
Lombok Barat	54,01	59,31	58,88	56,39
Lombok Tengah	55,66	59,21	60,30	65,84
Lombok Timur	63,00	68,02	69,12	71,72
Sumbawa	62,63	69,19	69,81	75,83
Dompu	62,59	65,30	68,28	72,44
Bima	72,50	73,43	76,72	80,31
Sumbawa Barat	74,89	77,45	77,97	84,83
Lombok Utara	51,72	60,22	60,93	75,55
Kota Mataram	73,09	75,19	76,77	82,84
Kota Bima	78,21	80,87	83,56	81,63
Nusa Tenggara Barat	62,30	66,31	67,74	71,49

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022-2025

Tabel 3.205
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021-2025

No.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN PER UNIT					TOTAL	Based on DPA DPUPR PKP TA. 2026
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Lombok Barat	2	6	0	8	16	32	0
2	Lombok Tengah	18	3	30	10	17	78	29
3	Lombok Utara	30	80	26	14	9	159	3
4	Lombok Timur	76	20	42	30	16	184	0
5	Sumbawa Barat	6	4	5	23	21	59	0
6	Sumbawa	50	1	18	25	26	120	2
7	Dompu	9	0	6	14	22	51	0
8	Bima	5	10	14	20	29	78	2
9	Kota Mataram	1	6	4	15	16	42	9
10	Kota Bima	2	2	4	16	0	24	0
	Nusa Tenggara Barat	199	132	149	175	172	827	45

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022-2025

Tabel 3.206
Capaian Program Nasional Tiga Juta Rumah di Provinsi NTB

PROGRAM		PESISIR								PERKOTAAN	
		Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Utara	Lombok Timur	Sumbawa Barat	Sumbawa	Dompu	Bima	Kota Mataram	Kota Bima
INTERNAL	Pembangunan Rumah Susun										
	Pembangunan Rumah Khusus										
	BSPS	153	339	20	463	20	20	80	250	115	150
	Penanganan Kumuh										
EKSTERNAL	APBD Kab/Kota-PB	12	1	250	8					16	
	APBD Kab/Kota-PK	11	331		26			12		77	
	APBD Provinsi-PB										
	APBD Provinsi-PK	16	17	9	16	21	26	22	29	16	
	APBDes										
	DAK Tematik PB							86			
	DAK Tematik PK							1			
	RTLH Kemensos										
	Rumah Sederhana Non FLPP										
	Menengah Mewah	74									
	Swadaya Masyarakat Non PBG (PB)										
	Swadaya Masyarakat Non PBG (PK)										
	CSR (PB)									20	25
	CSR (PK)			2				46	37	15	
TOTAL		266	688	281	513	41	46	247	316	259	175
NTB TOTAL											2.832

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman 2026

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD

Realisasi indikator kinerja Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,49%, atau mencapai 97,46 persen dari target tahun 2030 (73,35-73,58%) atau terdapat deviasi -1,86 poin. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan tersebut di tahun 2030.

4. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

   Tidak terdapat target atau standar nasional yang harus dicapai oleh setiap Provinsi. Namun demikian, capaian Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2025 Nasional sebesar 68,40%, bila dibandingkan dengan capaian Provinsi NTB yaitu 71,49%. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*), 2) memiliki akses terhadap air minum layak, 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak, 4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.

   Rumah yang layak huni menurut penjelasan pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Dalam definsi lain, Sebuah rumah dikatakan layak huni jika kualitas atap, dinding dan lantainya baik, alat penerangan yang bersumber dari listrik serta memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik.

   Permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

   1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni belum bersifat masif karena salah satu dari empat indikator Rumah Layak Huni (ketahanan bangunan, kecukupan luas min 7,2 m2/kapita, akses sanitasi layak dan akses air minum layak) tidak terpenuhi maka rumah tersebut dinyatakan tidak layak huni.
   2. Kurangnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap (*non bankable*) menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh anggaran untuk membangun dan memperbaiki rumah.
   3. Kolaborasi dalam penganan RTLH belum optimal melibatkan lintas sektor seperti CSR, Baznas, dan Mitra pembangunan lainnya.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan tahun 2025 adalah sebesar 258.655.213.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp257.152.918.453,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 0,32%. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan**

   Seluruh program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan belum cukup efektif. Hal ini karena target tercapai sebesar 99,73% (target tidak tercapai). Program dan kegiatan tersebut antara lain:

   a. Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggaran 76,25%) dengan kegiatan antara lain: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi;
   b. Program Kawasan Permukiman (realisasi anggaran 95,88%) dengan kegiatan antara lain: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
   c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (realisasi anggaran 99,74%) dengan kegiatan antara lain: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman berupa penyediaan Jalan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3.207
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/ Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	258.655.213.350,00	257.152.918.453,00	71,69	71,49	3.597.047.397,58	3.608.471.168,39	1,00	0,00	0,32

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.208

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengembangan Perumahan	2,277,977,450.00	1,736,847,764.00	76.25
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1,905,477,450.00	1,736,847,764.00	91.15
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	372,500,000.00	0	0.00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7,304,804,900.00	7,003,677,944.00	95.88
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200,000,000.00	194,754,736.00	97.38
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7,104,804,900.00	6,808,923,208.00	95.84
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	249,072,431,000.00	248,412,392,745.00	99.74
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	249,072,431,000.00	248,412,392,745.00	99.74

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Sasaran Rasio Konektivitas

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja Rasio Konektivitas dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan. Pada tahun 2025 Rasio Konektivitas NTB sebesar 0,831 atau mencapai 100,12% dari target yang telah ditetapkan (0,83), sehingga lebih 0,01 poin (melampaui target). Link bukti dukung https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/06/02/1054/perkembangan-transportasi-nusa-tenggara-barat-april-2025.html

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian nilai Rasio Konektivitas NTB tahun 2025 sebesar 0,831 atau lebih besar dari realisasi 0,82 tahun 2024 (lebih 0,011 poin) atau sebesar 101,34% (melampaui target)

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD

Realisasi indikator kinerja Rasio Konektivitas pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,831, atau baru mencapai 94,43% dari target yang ditetapkan sebesar 0,88 pada tahun 2030 terdapat deviasi -0,049 poin. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Rasio Konektivitas tersebut di tahun 2030.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target Rasio Konektivitas, antara lain:

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang mencakup kegiatan penyusunan database perlengkapan jalan dan pemasangan PJU diruas jalan provinsi yang terdiri dari 300 unit PJU solar cell di pulau Lombok dan 147 unit PJU solar cell di pulau Sumbawa dengan rincian sebagai berikut:
   1) Ruas Jalan Kuta – Keruak sebanyak 100 Unit;
   2) Ruas Jalan Rembiga - Pemenang sebanyak 24 Unit;
   3) Ruas Jalan Kediri - Praya sebanyak 48 Unit;
   4) Ruas Jalan Praya (Wakul Ketejer) sebanyak 23 Unit;
   5) Ruas Jalan Praya – Keruak sebanyak 39 Unit;
   6) Ruas Jalan Kuta – MT.Ajan (Selong Belanak) sebanyak 17 Unit;
   7) Ruas Jalan Tanjung Gres – Pohgading sebanyak 49 Unit;
   8) Ruas Jalan Sila – Bajo (Kec.Bolo) sebanyak 20 Unit;
   9) Ruas Jalan Talabiu – Simpasai (kec.Woha) sebanyak 30 Unit;
   10) Ruas Jalan Karumbu - Sape (Kec.Lambu) sebanyak 20 Unit;
   11) Ruas Jalan Tawali – Sape (kec. Sape) sebanyak 37 Unit;

12) Ruas Jalan Imam Bonjol (Kab.Dompu) sebanyak 20 Unit;
13) Ruas Jalan Sultan Kaharudin (Sumbawa) sebanyak 20 Unit;

b. Pembangunan 1 (satu) unit terminal Tipe B bangsal yaitu pembangunan musholla dan toilet yang merupakan fasilitas pendukung Kabupaten Lombok utara. Berdasarkan realisasi ini, Persentase Infrastruktur Terminal dalam kondisi baik menjadi 33,53 % dari kondisi awal 32,25 % hanya naik 1,28 %. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 42,5 %, maka realisasinya tidak tercapai. Untuk mencapai target tesebut perlu dilakukan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal yang meliputi pembangunan, rehabilitasi maupun pengaturan oprasional terminal terhadap aspek keselamatan, keamanan, kehandalan/ ketaraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan, Kesetaraan;
c. Pengaturan jadwal operasional kapal, pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan kapal melalui Uji SPM kapal, koordinasi dengan pemangku kepentingan (Pelabuhan Kayangan – Pototano).
d. Penyusunan Master Plan/FS (Pelabuhan Senggigi dan Pelabuhan Mandalika) dan Penyusunan Dokumen Kajian Pengambangan Potensi dan kelayakan pengawasan terhadap pelabuhan regional yang berada di wilayah NTB.
e. Pengoperasian pelabuhan pengumpan, pemeliharaan infrastruktur pelabuhan, Pengelolaan Sumber Daya Keuangan (PAD) dan koordinasi dengan pihak terkait (Pelabuhan Bangsal), dll.

Agar kondisi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan maka selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan, peningkatan kualitas personil/operator, perbaikan tata kelola/manajemen, serta tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan para mitra pembangunan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah sebesar Rp21.524.025.750,00. Realisasi anggaran sebesar Rp20.598.706.253,00. Efisiensi anggaran sebesar 4,41%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3.209
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Konektivitas

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/ Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Rasio konektivitas	21.524.025.750,00	20.598.706.253,00	0,83	0,831	24.787.853.493,38	25.932.561.144,58	0,96	0,04	4,41

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Rasio Konektivitas antara lain:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (realisasi anggaran 95,68%) dengan kegiatan antara lain: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
b. Program Pengelolaan Pelayaran (realisasi anggaran 95,85%) dengan kegiatan antara lain: Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional, Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas, Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

b. Realiasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.210

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Konektivitas

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19,429,740,600.00	18,591,271,280.00	95.68
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18,811,850,000.00	17,984,283,257.00	95.60
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	169,500,000.00	168921500.00	99.66
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	173,852,600.00	164,916,100.00	94.86
Program Pengelolaan Pelayaran	2,094,285,150.00	2,007,434,973.00	95.85
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	24,806,700.00	23,556,700.00	94.96
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang	45,547,200.00	45,023,800.00	98.85

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25,409,650.00	24,399,650.00	96.03
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1,400,000,000.00	1,323,852,600.00	94.56
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	598,521,600.00	590,602,223.00	98.68

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.22 Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan diukur melalui indikator kinerja Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.211

Realisasi Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	83,13	83,38	83,13	84,64	NA	100,00	99,70	98,22	NA

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Pada tahun 2025 realisasi kinerja indikator sebesar 83,13% atau mencapai 99,70% dari target yang telah ditetapkan (83,38%). Terdapat deviasi -0,25 poin (tidak mencapai target).

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Capaian nilai Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang NTB tahun 2025 sebesar 83,13% atau sama dengan realisasi tahun 2024 (capaian 100%)

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD 2025-2029**

   Realisasi indikator kinerja persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2025 tercatat sebesar 83,13 persen, atau belum mencapai 98,22 persen dari target yang ditetapkan sebesar 84,64 persen pada tahun 2030 terdapat deviasi -1,51 poin. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tersebut di tahun 2030.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Target nasional tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Beberapa penyebab capaian kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal adalah:

   a. Keterbatasan jumlah PPNS sehingga kegiatan pengawasan tidak optimal
   b. Minimnya sanksi bagi pelanggar tata ruang karena samai dengan saat ini masih banyak bangunan liar yang belum ditertibakan, misannya pada bantara kali
   c. Maraknya alif fungsi lahan yang tidak terkeb=ndali akibat dari longgarnya perizinan
   d. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan daya tamping

   Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang antara lain: Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota, Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang, Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK.

   Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KPR) adalah kondisi ketika pemanfaatan ruang oleh pemerintah, masyarakat, atau pelaku usaha telah sesuai dengan peruntukan ruang, fungsi kawasan, dan ketentuan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang. Total skor aspek kesesuaian pemanfaatan ruang (SN) merupakan Jumlah nilai hasil penilaian setiap indikator kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam instrumen evaluasi dalam satu periode penilaian tertentu.

   Dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang, Kinerja Aspek Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan (TURBINLAKWAS) dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang harus di optimalkan melalui 5 (lima) aspek antara lain:

   1) Pengaturan Penataan Ruang (PPR1): Kegiatan penetapan regulasi dan pedoman teknis yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

2) PembinaanPenataan Ruang (PPR2): Kegiatan bimbingan, pendampingan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan penataan ruang sesuai rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan;
3) Perencanaan Tata Ruang (PTR): Kegiatan penyusunan, pembahasan, dan penetapan rencana tata ruang wilayah yang meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Pemanfaatan Ruang (PR): Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha yang menggunakan ruang berdasarkan rencana tata ruang, ketentuan zonasi, serta peraturan perundang-undangan
5) Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PPR3): Kegiatan pengawasan, penertiban, dan pemberian sanksi serta penerapan insentif dan disinsentif terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan zonasi yang berlaku.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2025 adalah sebesar Rp196.936.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp190.093.974,00. Sehingga, efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebesar 3,47 persen. Rincian efisiensi tersebut, tersaji pada tabel di bawah.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

Terdapat 1 (satu) program yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (realisasi anggaran 96,53%) dengan kegiatan:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi

Tabel 3.212

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	196.936.000,00	190.093.974,00	83,38	83,13	2.286.707,25	2.361.909,33	0,97	0,03	3,18

Sumber: BKAD NTB 2025

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.213

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	196,936,000.00	190,093,974.00	96.53
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	38,106,000.00	37,346,000.00	98.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	35,469,000.00	34,901,500.00	98.40
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	123,361,000.00	117,846,474.00	95.53

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.23 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu nilai Reformasi Birokrasi (RB) General, Nilai RB Tematik, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.214
Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
RB General	Skor	68,8	69,49	70,50	73,03	NA	102,47	101,45	96,54	NA
RB Tematik	Skor	9,19	9,28	6,96	9,76	NA	75,73	75,00	71,31	NA
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,241	1,100	0,598	1,449	NA	48,187	54,36	41,27	NA
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91,47	91,50	87,20	92,75	NA	95,33	95,30	94,02	NA

Sumber: KemenPANRB 2024 dan 2025

A. Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General adalah langkah strategis untuk membangun aparatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan fokus penyelesaian isu hulu. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu komponen dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi.sebesar 77,46, dengan besaran Nilai Reformasi Birokrasi General adalah 70,50.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bila dibandingkan antara realisasi nilai RB General dan target 2025, terdapat deviasi +1,01. Capaian realisasi sebesar 101,45% (melampaui target). Link bukti dukung https://drive.google.com/file/d/1m-4tyna6B6X2kRvmXS9SZpGVxkMgVSpn/view?usp=sharing

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, Nilai RB General tahun 2025 naik 1,7 poin. Capaian realisasi sebesar 102,47% (melampaui target). Komponen RB General memiliki bobot ideal 100 dengan 25 indikator. Berdasarkan data tahun 2024 dan 2025 yang diolah dari hasil rilis Kementerian PANRB, terdapat 10 indikator (40%) yang capaiannya naik, 9 indikator (36%) capaiannya turun, dan 6 indikator (24%) capaiannya tetap. Rincian nilai sub komponen RB General sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.215
Rincian Nilai Sub Komponen RB General
Provinsi NTB Tahun 2024 dan 2025

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Tahun 2024		Bobot	Tahun 2025	
				Skor	Skor Index		Skor	Skor Index
1	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,21	2,21	3	2,05	2,05
2	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	91	4,69	7	100	4,78
3	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	2	1,2	3	2	1,2
4	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,12	2,49	3	2,67	2,14
5	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0,75	0,64	3	0,75	0,64
6	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai SAKIP	4	72,88	2,92	4	70,92	2,84
7	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	91,47	2,29	2,5	87,39	2,18
8	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	74,6	1,86	2,5	78,25	1,96

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Tahun 2024		Bobot	Tahun 2025	
				Skor	Skor Index		Skor	Skor Index
9	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	2	1	2,5	5	2,5
10	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2	0	0	2	45,79	0,92
11	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2	77,74	1,55	2	96,54	1,93
12	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,77	1,11	2	2,77	1,11
13	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	82,36	2,06	2,5	86,06	2,15
14	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	284,5	2,78	4	284,5	2,78
15	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	2	4,42	1,77	2	4,41	1,76
16	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	85,03	1,7	2	85,03	1,7
17	Capaian Sasaran Strategis RB	Indeks SPBE	9	3,56	6,41	9	4,2	7,55
18	Capaian Sasaran Strategis RB	Capaian IKU Makro	4	82,4	3,3	4	79,39	3,18
19	Capaian Sasaran Strategis RB	Capaian IKU Non Makro	6	86,49	3,79	6	68,75	2,93
20	Capaian Sasaran	Opini BPK	5	3	5	5	3	5

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Tahun 2024		Bobot	Tahun 2025	
				Skor	Skor Index		Skor	Skor Index
	Strategis RB							
21	Capaian Sasaran Strategis RB	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	77,93	3,12	4	83,08	3,32
22	Capaian Sasaran Strategis RB	Indeks BerAkhlak	4	57,29	2,29	4	57,29	2,29
23	Capaian Sasaran Strategis RB	Survei Penilaian Integritas	10	65,74	6,57	10	64,93	6,49
24	Capaian Sasaran Strategis RB	Survei Kepuasan Masyarakat	8	85,62	6,85	8	88,81	7,10
25	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,2	2	3	0

Sumber: KemenPANRB 2024 dan 2025

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**

   Bila dibandingkan dengan target akhir nilai RB General dalam RPJMD 2025-2029, terdapat deviasi - 2,53 poin. Capaian realisasi sebesar 96,54% (belum mencapai target).

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (jika ada)**

   Standar Nilai RB General secara nasional sampai untuk triwulan IV tidak ada.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Realisasi Reformasi General 2025 terhadap target 2025 maupun realisasi 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu target terlampaui (di atas 100%). Capaian yang meningkat ini disebabkan oleh meningkatnya koordinasi dan kolaborasi di antara para pengampu, yaitu Biro Organisasi, Inspektorat, dan perangkat daerah yang mengimplementasikan rencana anksi RB General. Selain itu juga, adanya kegiatan Praktik Baik Implementasi RB General dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berpengaruh pada peningkatan motivasi kerja pada PIC Perangkat Daerah yang berdampak pada peningkatan pengawalan rencana aksi. Selain motivasi kerja, Pemerintah Provinsi NTB juga mendapat gambaran penggunaan aplikasi Surabi yang merupakan aplikasi penilaian mandiri IRB di Provinsi Jawa Barat. Adanya aplikasi ini menjadi pembelajaran bai Diskominfotik Provinsi NTB untuk dapat membuat hal serupa, agar implementasi RB dapat lebih efektif dan efisien.

Namun demikian, bila dilihat per sub komponen, terdapat 9 indikator (36%) capaiannya turun. Beberapa penyebab indikator pada sub komponen belum mencapai target tertuang dalam catatan dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB, sebagai berikut:

Tabel 3.216

Catatan dan Rekomendasi LHE RB Komponen RB General Tahun 2025

Catatan	Rekomendasi
3. Rencana Aksi Pembangunan RB General	
a. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024). b. Rencana Aksi yang disusun belum berorientasi pada prioritas permasalahan utama c. Indikator Output atas Rencana Aksi sudah relevan, namun belum cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan. d. Penetapan target atas Output Rencana Aksi belum sepenuhnya didasarkan pada kondisi capaian tahun tahun sebelumnya e. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai	a. Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024. b. Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama. c. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran. d. Memastikan target Output atas Rencana Aksi mempertimbangkan baseline tahun sebelumnya. e. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi
4. Tingkat Maturitas SPIP	
a. Terdapat sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak berorientasi hasil; b. Terdapat indikator kinerja sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak berorientasi hasil dan juga tidak relevan mengukur capaian sasaran strategis pemerintah daerah; c. Terdapat sasaran strategis perangkat daerah yang tidak menggambarkan dan/ atau berkorelasi langsung dengan sasaran strategis pemerintah daerah; d. Terdapat sasaran strategis perangkat daerah yang overlapping atau tumpang tindih dengan sasaran program/kegiatan di bawahnya; e. Terdapat indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang overlapping atau	Kami menyarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat agar menginstruksikan kepada: 1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar memperbaiki proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan: a. Menambah jumlah asesor minimal 4 (empat) orang sesuai ketentuan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 untuk setiap perangkat daerah dengan melibatkan bidang teknis agar dapat membantu subbag program menyediakan kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan dalam penilaian mandiri SPIP; b. Melaksanakan pemaparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 disertai dokumentasi dan

Catatan	Rekomendasi
tumpang tindih dengan indikator kinerja sasaran program di bawahnya; f. Terdapat target indikator sasaran strategis perangkat daerah yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan/atau tidak dilakukan penyesuaian kembali pada dokumen perubahan perencanaan tahun berjalan. g. Terdapat sasaran program dan kegiatan perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan/ atau overlapping atau tumpang tindih dengan sasaran strategis perangkat daerah/program/ kegiatan/subkegiatan; h. Terdapat indikator kinerja sasaran program tidak cukup menggambarkan sebagai tolak ukur sasaran program dan/ atau overlapping atau tumpang tindih dengan indikator program lainnya; dan i. Terdapat target program dan kegiatan yang tidak SMART dan/atau tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya. j. Penerapan Manajemen Risiko belum ditetapkan sebagai indikator kinerja dan masih terbatas penggunaannya sebagai dasar pengambilan keputusan; k. Kebijakan Manajemen Risiko belum memuat substansi terkait strategi anti-fraud, dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko; l. Peningkatan pembinaan manajemen risiko masih fokus pada SDM Inspektorat dan Subbag Program masing-masing perangkat daerah, belum menjangkau pada seluruh SDM teknis, serta masih minimnya SDM yang bersertifikasi manajemen risiko; m. Identifikasi risiko kemitraan masih terbatas pada kemitraan dengan penyedia/rekanan dalam pengadaan barang/jasa.	notulen yang memadai; c. Rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 agar diarahkan untuk perbaikan peningkatan satu level di atasnya; d. Melengkapi kebijakan terkait pedoman pengelolaan manajemen risiko dengan menambahkan substansi terkait strategi anti-fraud dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko; dan e. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. 2. Seluruh kepala perangkat daerah agar: a. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperbaiki perencanaan daerah dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, spesifik dan relevan, memenuhi kriteria SMART, serta didukung penetapan target yang tepat; b. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan tahun 2025; c. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko dengan: 1) Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal pada seluruh proses bisnis; 2) Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko fraud pada seluruh proses bisnis di setiap perangkat daerah; 3) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko; 4) Meningkatkan anggaran pembinaan SDM dan intervensi pengendalian kecurangan atau fraud; 5) Melakukan monitoring pelaksanaan

Catatan	Rekomendasi
Atas kerja sama melalui suatu perikatan seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau melalui koordinasi juga belum sepenuhnya diidentifikasi risikonya. n. Struktur Manajemen Risiko belum berjalan optimal dan masih bergantung pada peran Inspektorat; o. Proses Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara utuh yaitu belum dilekatkan pada proses bisnis dan penyusunan risk register dan RTP juga belum disusun bersamaan atau segera setelah dokumen perencanaan ditetapkan; p. Terdapat ketidakseragaman format risk register pada beberapa perangkat daerah serta sebagian besar perangkat daerah belum menyusun risk register secara lengkap mulai dari form 1 sampai dengan form 12 sesuai lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 01.A Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; q. Baru sebagian perangkat daerah yang telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko kecurangan atau fraud; r. Atas RTP yang telah disusun, belum seluruh RTP dapat dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah. Efektivitas atas pelaksanaan RTP juga belum pernah diukur oleh masing-masing perangkat daerah; s. Atas implementasi perbup dan struktur keanggotaan Majelis Kode Etik dan UPG tersebut belum dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas	RTP dan efektivitasnya pada masingmasing Unit Pemilik Risiko (UPR) atau di masing-masing tingkat eselon; 6) Menerapkan manajemen risiko secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan; 7) Meningkatkan pembelajaran antikorupsi melalui kampanye, penyuluhan, dan sosialisasi dengan memperhatikan permasalahan yang sering menjadi temuan auditor eksternal maupun internal; 8) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan meningkatkan sosialisasi, memastikan perlindungan terhadap pelapor, dan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima; dan 9) Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang. 3. Seluruh kepala perangkat daerah terkait Sektor Pengentasan Kemiskinan a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak agar: i. Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian bantuan pangan, sandang, kompor, dan alat bantu mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan verifikasi, penyerahan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; ii. Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemuktahiran DTKS mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan mulai dari tingkat desa sampai nasional, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; dan iii. Melakukan pendataan terhadap PSM dan TKSK yang telah/belum tersertifikasi serta pelatihan apa saja yang telah diikuti sebagai dasar pertimbangan pengembangan kompetensi selanjutnya. b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan agar: 1) Mengalokasikan anggaran untuk

Catatan	Rekomendasi
pelaksanaan perbup tersebut; t. Anggaran pembinaan SDM dan intervensi pengendalian kecurangan masih berfokus untuk Inspektorat sedangkan untuk perangkat daerah lain masih terbatas; u. Pembelajaran antikorupsi melalui kampanye, penyuluhan, dan sosialisasi belum sepenuhnya diarahkan pada permasalahan yang sering menjadi temuan auditor eksternal maupun internal sehingga temuan berulang masih sering terjadi setiap tahunnya; v. Bukti pelaksanaan RTP atas risiko fraud juga belum sepenuhnya didokumentasikan dengan baik; w. Pemanfaatan saluran pengaduan seperti melalui layanan Pengaduan Masyarakat, Whistleblowing System (WBS), dan Pelaporan Gratifikasi belum dapat diyakini pemanfaatannya karena minimnya laporan yang masuk Selain itu, belum terdapat evaluasi atas efektivitas pemanfaatan saluran pengaduan tersebut untuk menemukan kendala yang dihadapi dan pemecahan masalah atas kendala tersebut; x. Atas kasus dugaan kecurangan yang terjadi, rekomendasi yang diberikan dalam laporan hasil investigasi masih sebatas penyelesaian administrasi dan keuangan, belum diarahkan untuk perbaikan pengendalian agar kejadian serupa tidak terulang. y. Masih terdapat capaian kinerja yang kurang dapat diyakini daya ungkitnya terhadap capaian ultimate outcome karena penetapan sasaran, indikator kinerja, dan/ atau target yang masih kurang tepat; z. Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan	pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2025 sedemikian hingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkala dan pada momen-momen tertentu agar memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap pengendalian inflasi harga pangan; 2) Menyusun laporan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan GPM untuk melihat kaitan pelaksanaan GPM dengan stabilitas harga pangan dan pendapatan petani pasca pelaksanaan GPM sebagai bahan masukan perbaikan di masa mendatang; 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan GPM mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, pelaksanaan, koordinasi dengan pihak terkait, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 4) Menyusun dokumen berita acara serah terima penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; 5) Mengajukan usulan rancangan peraturan Gubernur yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; 6) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan penyaluran CPPD untuk tahapan perhitungan dan penetapan, pemeliharaan, penyaluran, pelepasan, pengawasan, serta peran serta masyarakat atau kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan CPPD; 7) Menyusun SOP terkait pemberian subsidi bunga pinjaman agar terdapat standar layanan baku yang

Catatan	Rekomendasi
Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir, seperti pengelolaan dana BOS yang belum dilakukan secara memadai, belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah yang belum memadai; aa. Masih terdapat catatan terkait aset dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir, seperti pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai dan pemanfaatan aset daerah belum didukung dengan regulasi yang memadai sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah; dan bb. Terdapat jumlah temuan terkait ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih berada di atas 5 (lima) temuan pada tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022	digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pemberian subsidi bunga pinjaman; 8) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas program pemberian subsidi bunga pinjaman mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pembayaran, rekonsiliasi data dengan bank dan perangkat daerah terkait, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 9) Menyusun rancangan regulasi daerah yang menjabarkan persyaratan spesifik penerima hibah atau bantuan barang, misalnya lama usia kelompok tani didirikan, syarat minimal jumlah anggota kelompok tani yang tergolong miskin, status keaktifan kelompok tani, atau kriteria lain sesuai kebutuhan dalam bentuk keputusan Gubernur, keputusan kepala dinas, atau SOP agar verifikasi penerima hibah dapat dilakukan secara selektif dan betul betul diarahkan untuk menunjang capaian kinerja pemerintah daerah yang salah satunya mengentaskan kemiskinan di daerah; 10) Melakukan kajian dan menuangkan hasilnya dalam bentuk kajian/ telaahan staf atau laporan efektivitas dampak pemberian bantuan terhadap baik pendapatan kelompok tani maupun capaian kinerja pemda; dan 11) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian hibah/bantuan barang mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan verifikasi, penyerahan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar: 1) Menyusun SOP terkait penyaluran bantuan air bersih dan/atau tandon; 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas penyaluran bantuan air bersih dan/atau tandon mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi kekeringan,

Catatan	Rekomendasi
	pelaksanaan penyaluran, kerja sama penyediaan air bersih dengan pihak lain, hingga pelaporan distribusi bersih; 3) Menyusun kajian dan/atau rencana aksi strategis yang melibatkan lintas perangkat daerah terkait efektivitas distribusi air bersih dalam menyelesaikan masalah kekeringan yang ada di lokasi kekeringan atau rawan kekeringan karena tidak memungkinkan untuk menyalurkan air bersih setiap hari sehingga memerlukan rencana aksi yang saling terkoordinasi dan terintegrasi dengan kegiatan perangkat daerah lainnya untuk menyelesaikan masalah kekeringan. d. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan agar: 1) Memperbaiki SOP Pasar Murah dengan menambahkan mekanisme yang diperlukan terkait: 1. Apakah penetapan jumlah kupon Pasar Murah menyesuaikan jumlah masyarakat miskin yang ada atau membagi rata jumlah paket sembako di masing-masing kecamatan/desa; 2. Apakah distribusi kupon Pasar Murah dilakukan oleh dinas atau diserahkan kepada kecamatan/desa dengan mengacu pada data masyarakat miskin yang telah diverifikasi; 3. Apakah pembeli yang memiliki kupon telah dicocokkan dengan data kemiskinan yang ada dan telah didukung dengan dokumentasi tanda terima secara memadai antara panitia kegiatan dan pembeli; dan 4. Perlakuan apabila terdapat sisa paket sembako yang belum terjual atau apabila terdapat masyarakat miskin yang belum memperoleh kupon. 2) Menambahkan informasi dalam laporan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah terkait: (a) Jumlah paket sembako yang disiapkan per desa; (b) Jumlah paket sembako yang terjual per desa;

Catatan	Rekomendasi
	(c) Jumlah paket sembako yang tersisa per desa; dan (d) By Name By Address (BNBA) pembeli dan bukti tanda terima yang disesuaikan dengan data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi per desa. 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan Pasar Murah mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi. pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. e. Kepala Dinas Perhubungan agar: 1) Menyusun SOP terkait pemberian bantuan helm dan jaket kepada ojek pangkalan; dan 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian helm dan jaket mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, rekonsiliasi data polres, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. f. Kepala Dinas Kesehatan agar: 1) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 2) Menyusun SOP terkait program jaminan kesehatan masyarakat secara memadai; 3) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diperlukan atas risiko terkait Universal Health Coverage (UHC) yang teridentifikasi; dan 4) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas program jaminan kesehatan masyarakat mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pembayaran, rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan dan perangkat daerah terkait, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. g. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan

Catatan	Rekomendasi
	Tenaga Kerja agar: 1) Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan job fair secara memadai; 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan job fair paling sedikit memuat: (a) Latar belakang kegiatan; (b) Tujuan kegiatan; (c) Lokasi dan sumber pembiayaan; (d) Kondisi existing tenaga kerja dan pengangguran; (e) Hasil kegiatan yang di dalamnya memuat antara lain jumlah perusahaan dan lowongan pekerjaan yang ditawarkan, jumlah pencari kerja yang berpartisipasi, dan jumlah pencari kerja yang terserap dan penempatan; (f) Kendala pelaksanaan kegiatan; dan (g) Saran dan rencana tindak lanjut perbaikan. 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas penyelenggaraan job fair mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perusahaan, pelaksanaan job fair, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman agar: 1) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas pemberian bantuan tangki septik individual mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, pelaksanaan pekerjaan oleh KSM, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan SPAM mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; dan 3) Melakukan identifikasi dan analisis

Catatan	Rekomendasi
	risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan RTLH mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar: 1) Memperbaiki SK Tim Layanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa, dan Lanjut Usia (APDOL) dengan menambahkan peran dan pembagian tugas masing-masing anggota tim serta melakukan evaluasi atas efektivitas pembentukan tim terhadap capaian kinerja perangkat daerah; 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan APDOL dengan menambahkan poin hambatan dalam pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang diperlukan; dan 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas layanan APDOL mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban j. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga agar: 1) Menyusun berita acara serah terima pemberian beasiswa yang di dalamnya juga memuat kewajiban penerima beasiswa untuk menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa tersebut sesuai peruntukkan; 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian beasiswa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, verifikasi oleh pihak sekolah dan dinas, pelaksanaan penyaluran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 3) Menyusun format rekonsiliasi manual terkait kondisi sarpras pendidikan minimal untuk ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan sebagai back up data pendukung;

Catatan	Rekomendasi
	4) Mewajibkan seluruh operator Dapodik satuan pendidikan untuk melakukan pemuktahiran dokumentasi fisik secara berkala dengan bukti foto visual atas sarpras pendidikan khususnya ruang kelas dan melakukan identifikasi status ruang kelas tersebut apakah bangunan semi permanen/bangunan darurat, ruangan lain yang difungsikan sebagai ruang kelas, atau bangunan ruang kelas riil ke dalam format rekonsiliasi yang disusun oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi bahan pemuktahiran data sarpras di aplikasi Dapodik dan Verval SP serta disampaikan kepada admin Dapodik di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga untuk proses verifikasi dan validasi agar data sarpras di Dapodik dapat diyakini kevalidannya, didukung dengan dokumentasi foto yang memadai, serta dapat dicocokkan dengan data sarpras di aplikasi Verval SP. 5) Memfasilitasi guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui pemberian beasiswa pendidikan atau penyediaan biaya hidup selama menempuh pendidikan sesuai kemampuan fiskal daerah; 6) Memberikan bimbingan teknis persiapan mengikuti sertifikasi profesi guru dalam rangka membantu guru agar dapat meningkatkan peluang kelulusan ujian sertifikasi guru; 7) Menyusun road map atau strategi peningkatan kompetensi guru agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana pelatihan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan; 8) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas peningkatan kompetensi dan pengadaan guru mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengusulan kebutuhan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban;

Catatan	Rekomendasi
	9) Menyusun edaran pemanfaatan hasil rapor pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi perbaikan capaian rapor pendidikan bagi masing-masing satuan pendidikan, termasuk strategi peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik; 10) Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dan/atau UPTD Pendidikan untuk melakukan monitoring dan/ atau pembinaan kepada masing masing satuan pendidikan terkait implementasi strategi perbaikan capaian rapor pendidikan; dan 11) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi dengan pihak sekolah/pengawas sekolah, hingga pelaporan. k. Inspektur bersama-sama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar: 1) Melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan identifikasi dan analisis risiko untuk: (a) Risiko Strategis OPD; (b) Risiko Operasional OPD; (c) Risiko Kemitraan; dan (d) Risiko Fraud, serta menyusun risk register mulai form 1 sampai dengan form 12 sesuai lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 01.A Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Menyusun surat edaran kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan evaluasi efektivitas implementasi manajamen risiko secara mandiri, termasuk evaluasi atas keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian atau RTP yang telah

Catatan	Rekomendasi
	disusun; 3) Dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan tidak hanya memberikan rekomendasi yang bersifat penyelesaian administrasi dan keuangan, tetapi juga mengarahkan pada perbaikan pengendalian agar tidak terjadi berulang-ulang; 4) Melakukan evaluasi atas desain dan implementasi risiko perangkat daerah; dan 5) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.
5. Nilai SAKIP	
a. Perencanaan Kinerja	
1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2025, akan tetapi belum seluruhnya kinerja baik tujuan strategis maupun sasaran strategis telah berorientasi pada hasil serta belum seluruhnya juga indikator kinerja yang digunakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2025, akan tetapi belum seluruhnya kinerja baik tujuan strategis maupun sasaran strategis telah berorientasi pada hasil serta belum seluruhnya juga indikator kinerja yang digunakan telah relevan dengan	1. Menyusun draft perbaikan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 dengan memastikan seluruh kinerja telah berorientasi pada hasil untuk level Gubernur begitu juga dengan indikator kinerja yang digunakan telah relevan menggambarkan kinerja tujuan/sasaran strategis. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada RPJMD 2025-2029 pada periode yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Melakukan perbaikan target kinerja pada dokumen perjanjian kinerja Gubernur setiap tahunnya dengan menggunakan angka absolut, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan kinerja Provinsi NTB serta melakukan penyesuaian target kinerja yang mengacu pada target RPJMN 2025-2029 3. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan Critical Success Factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang. Setelah itu, melakukan

Catatan	Rekomendasi
kinerja yang ingin dicapai 2. Target pada dokumen RPJMD Provinsi NTB belum sepenuhnya menggunakan angka absolut dan masih berupa range, begitu juga dengan penentuan target yang masih belum sepenuhnya memperhatikan target yang sudah ditetapkan pada RPJMN 2025-2029 3. Pohon kinerja yang disusun baik pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum memperlihatkan hubungan kausalitas, misalnya masih terdapat kondisi yang sama pada level yang berbeda. Selain itu belum terdapat adanya identifikasi crosscutting kinerja baik yang berasal dari internal Pemerintah Provinsi NTB maupun yang berasal dari eksternal 4. Rencana aksi tahun 2025 belum seluruhnya selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada level perangkat daerah, misalnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Provinsi NTB	identifikasi adanya crosscutting kinerja baik yang berasal dari internal maupun eksternal lingkup Provinsi NTB 4. Melakukan perbaikan pada dokumen rencana aksi pada level perangkat daerah dengan memastikan keselarasan dengan sasaran strategis yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga dapat diketahui program/kegiatan yang relevan untuk mencapai kinerja sasaran strategis
b. Pengukuran Kinerja	
1. Pemerintah Provinsi NTB belum memiliki pedoman teknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dapat dijadikan oleh seluruh Perangkat	1. Mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menyusun pedoman teknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar dapat dijadikan dasar seluruh perangkat daerah dalam menyusun SOP dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk didalamnya kebijakan

Catatan	Rekomendasi
Daerah dalam melakukan manajemen kinerja sehingga data yang disajikan dalam laporan kinerja dapat valid dan andal 2. Pada aplikasi e-sakip Provinsi NTB belum terdapat dashboard yang menyajikan capaian kinerja Gubernur secara berkala yang dikaitkan dengan hasil pelaksanaan rencana aksi seluruh Perangkat Daerah 3. Belum seluruhnya perangkat daerah telah taat dalam memanfaatkan aplikasi e-sakip Provinsi NTB baik dalam melaporkan capaian realisasi anggaran maupun capaian atas kinerja secara berkala 4. Indikator Kinerja Utama pada level Perangkat Daerah belum seluruhnya dilengkapi dengan Definisi Operasional pada setiap indikator kinerja, misalnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	mengenai pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB 2. Melakukan pengembangan terhadap e-sakip Provinsi NTB sehingga dapat menyajikan capaian kinerja Gubernur secara berkala yang didapatkan dari pelaksanaan rencana aksi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Perjanjian Kinerja Gubernur 3. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja secara berkala, dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki 4. Melakukan penyempurnaan pada dokumen IKU seluruh perangkat daerah dengan menambahkan penjelasan mengenai definisi operasional pada setiap indikator kinerja agar dapat diketahui pengertian atau makna dari indicator tersebut
c. Pelaporan Kinerja	
1. Laporan kinerja pada level Perangkat belum menyajikan strategi/alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangkat mempertahankan atau meningkatkan kinerja	1. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menyajikan strategi atau alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, sehingga laporan kinerja bukan hanya dijadikan sebagai output akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan tahun berikutnya 2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah dengan

Catatan	Rekomendasi
2. Belum seluruh laporan kinerja perangkat daerah telah menyajikan keterkaitan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja	melengkapi informasi mengenai keterkaitan antara anggaran yang sudah digunakan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sehingga pimpinan dapat segera dapat melakukan tindaklanjut atas informasi tersebut
d. Evaluasi Kinerja	
1. Inspektorat Provinsi NTB telah menyelesaikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025, akan tetapi belum seluruhnya perangkat daerah telah mengupload LHE AKIP internal tahun 2025 pada esr.menpan.go.id 2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, akan tetapi belum terlihat proses pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah	1. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk dapat mengupload dokumen LHE AKIP Internal yang terbaru pada esr.menpan.go.id, agar dapat dapat dipastikan seluruh perangkat daerah telah mendapatkan LHE AKIP internal dari Inspektorat Provinsi NTB dan akan ditindaklanjuti 2. Mendorong Inspektorat Provinsi NTB untuk dapat mengembangkan aplikasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menambahkan menu dalam pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan serta memberikan akses kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan dialog pada aplikasi tersebut
3. Indeks Perencanaan Pembangunan	
	a. Perencanaan: Diharapkan adanya penguatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dan pusat. b. Terkait evaluasi sudah disampaikan dengan baik hasilnya, namun agar lebih runut, sebaiknya permasalahan dibahas dulu, kemudian disampaikan isu strategisnya (saat ini penulisannya masalah-isu strategis-masalah). c. Capaian SDGs sebaiknya dimasukkan dalam subbab hasil evaluasi. d. Prioritas Pembangunan Daerah perlu ditambahkan sasaran atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Prioritas Pembangunan sebaiknya didetailkan dalam Program Prioritas yang dilengkapi dengan indikator dan OPD yang melaksanakan. Pada bagian

Catatan	Rekomendasi
	ini saat ini lebih banyak menjelaskan intervensi pemerintah pusat e. Perlu ditambahkan anggaran total keseluruhan Prioritas Pembangunan Program Unggulan: - Program Unggulan Provinsi NTB adalah Optimalisasi Sumber Daya Lokal untuk Kesejahteraan, merupakan inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memaksimal potensi sumber daya secara berkelanjutan. Diharapkan program direncanakan melalui pendekatan berbasis data, sehingga mampu mendorong pertumbuhan tinggi yang inklusif. - Perlu disesuaikan antara ruang lingkup dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. - Kerangka kerja logis masih belum menggambarkan keterkaitan input, proses, output, outcome sampai dampak yang menunjukkan proses menuju keberhasilan program tersebut. - Program terlalu luas, perlu dipilih salah satu atau beberapa saja yang dapat dijadikan sebagai program unggulan. - Perlu dijelaskan tahapan dan proses pelaksanaan program secara runut."
4. Indeks Pelayanan Publik	
(menunggu rilis disampaikan ke Pemda)	
5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	
Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sesuai standa	
6. Capaian IKU Makro	
7. Capaian IKU Non Makro	
Terdapat 10 indikator kinerja non makro pada LPPD/LKjIP tahun 2024 yang tidak tercapai >90%	Melakukan reviu atas rencana aksi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja dan membuat strategi atau upaya baru agar output yang dihasilkan dapat berdampak pada pencapaian target kinerja non makro
8. Survei Penilaian Integritas	
	a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu meningkatkan kejelasan informasi layanan kepada masyarakat. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah pengemasan informasi prosedur layanan secara jelas dan interaktif melalui inovasi. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan juga sangat penting untuk

Catatan	Rekomendasi
	memastikan bahwa masyarakat memahami dan merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat terwujud. Selanjutnya, dalam upaya memudahkan masyarakat memahami prosedur layanan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk terus melakukan pengemasan informasi yang jelas dan bersifat interaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi secara lebih luas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap prosedur pelaksanaan layanan melalui survei kepuasan juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan memahami layanan yang tersedia. b. Dalam konteks penghindaran praktik korupsi, penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap menyuap. Sosialisasi ini harus diikuti dengan mekanisme ujian untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan pegawai. Penegakan aturan yang tegas dan tanpa pandang bulu, serta penerapan sistem manajemen kepatuhan seperti ISO-37301, akan memperkuat integritas dan komitmen dalam penegakan aturan di lingkungan pemerintahan. c. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga perlu mengkomunikasikan dengan baik kepada pihak eksternal mengenai aturan terkait gratifikasi dan cara melapor melalui Whistleblowing System (WBS). Mengkaji penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi dan melakukan survei untuk memahami pemahaman masyarakat tentang hal ini sangat penting. Pemimpin harus menjadi role model dalam penegakan pengelolaan gratifikasi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. d. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. Pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP baru dan standar harga juga harus dilakukan untuk

Catatan	Rekomendasi
	memastikan keseragaman dalam implementasi. Selain itu, pencarian vendor yang berkualitas dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang berkorelasi dengan kualitas produk sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan. e. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan edukasi dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. f. Melakukan due diligence terhadap vendor dan memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam adalah langkah yang perlu diambil. g. Selain itu, membuka ruang pengadaan yang lebih luas dan melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka memastikan bahwa pemenang tender tidak terlibat dalam praktik korupsi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pelaporan gratifikasi secara internal. Hal ini penting untuk menciptakan budaya integritas di lingkungan pemerintahan. h. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan juga harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk mewajibkan survei kebutuhan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengembangan sistem aplikasi e-catalog atau e procurement akan memfasilitasi input data kebutuhan dari setiap direktorat atau divisi. i. Selain itu, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi pengadaan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap vendor yang bermasalah sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengadaan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam menghadapi pengaruh pihak lain terhadap keputusan pengadaan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menegakkan sanksi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Pembuatan kebijakan larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan harus disertai dengan contoh dari pimpinan. Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi

Catatan	Rekomendasi
	intervensi dan benturan kepentingan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. j. Terakhir, dalam hal pengenaan sanksi atau denda kepada pengguna layanan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai standar prosedur operasional. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan sanksi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.

Sumber: KemenPANRB, 2025

Berdasarkan analisis ketidaktercapaian target di atas, berikut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB:

Tabel 3.217
Rencana Aksi Tindak Lanjut atas
Rekomendasi LHE RB Komponen RB General Tahun 2025

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
Rekomendasi	
1. Rencana Aksi Pembangunan RB General	
a. Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmen PANRB Nomor 182 Tahun 2024). b. Memastikan rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama. c. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran. d. Memastikan target Output atas Rencana Aksi mempertimbangkan baseline tahun sebelumnya. e. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi	Rencana aksi untuk angka 1 huruf a – d, yaitu dengan melakukan reviu atas Rencana Aksi dan target yang sudah disusun melalui koordinasi dengan Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi dan OPD Pengampu.
2. Tingkat Maturitas SPIP	
Kami menyarankan kepada Gubernur	Terkait dengan hasil penilaian Tingkat

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
Nusa Tenggara Barat agar menginstruksikan kepada: 1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar memperbaiki proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan: a. Menambah jumlah asesor minimal 4 (empat) orang sesuai ketentuan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 untuk setiap perangkat daerah dengan melibatkan bidang teknis agar dapat membantu subbag program menyediakan kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan dalam penilaian mandiri SPIP; b. Melaksanakan pemaparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 disertai dokumentasi dan notulen yang memadai; c. Rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 agar diarahkan untuk perbaikan peningkatan satu level di atasnya; d. Melengkapi kebijakan terkait pedoman pengelolaan manajemen risiko dengan menambahkan substansi terkait strategi anti-fraud dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko; dan e. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. 2. Seluruh kepala perangkat daerah agar: a. Berkoordinasi dengan Kepala	Maturitas SPIP, Pemerintah Provinsi sudah melakukan sanggah (link: https://s.id/yF9EB).

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperbaiki perencanaan daerah dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, spesifik dan relevan, memenuhi kriteria SMART, serta didukung penetapan target yang tepat; b. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan tahun 2025; c. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko dengan: 1) Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal pada seluruh proses bisnis; 2) Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko fraud pada seluruh proses bisnis di setiap perangkat daerah; 3) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko; 4) Meningkatkan anggaran pembinaan SDM dan intervensi pengendalian kecurangan atau fraud; 5) Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masingmasing Unit Pemilik Risiko (UPR) atau di masing-masing tingkat eselon; 6) Menerapkan manajemen risiko secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan; 7) Meningkatkan pembelajaran antikorupsi melalui kampanye, penyuluhan, dan sosialisasi dengan memperhatikan permasalahan yang sering menjadi temuan auditor eksternal maupun internal; 8) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan meningkatkan sosialisasi, memastikan perlindungan terhadap pelapor, dan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima; dan 9) Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang. 3. Seluruh kepala perangkat daerah terkait Sektor Pengentasan Kemiskinan a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak agar: i. Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian bantuan pangan, sandang, kompor, dan alat bantu mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan verifikasi, penyerahan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; ii. Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemuktahiran DTKS mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan mulai dari tingkat desa sampai nasional, hingga pelaporan	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
dan pertanggungjawaban; dan iii. Melakukan pendataan terhadap PSM dan TKSK yang telah/belum tersertifikasi serta pelatihan apa saja yang telah diikuti sebagai dasar pertimbangan pengembangan kompetensi selanjutnya. b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan agar: 1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2025 sedemikian hingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkala dan pada momen-momen tertentu agar memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap pengendalian inflasi harga pangan; 2) Menyusun laporan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan GPM untuk melihat kaitan pelaksanaan GPM dengan stabilitas harga pangan dan pendapatan petani pasca pelaksanaan GPM sebagai bahan masukan perbaikan di masa mendatang; 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan GPM mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, pelaksanaan, koordinasi dengan pihak terkait, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 4) Menyusun dokumen berita acara serah terima penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diketahui oleh camat dan kepala desa	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
setempat sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; 5) Mengajukan usulan rancangan peraturan Gubernur yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; 6) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan penyaluran CPPD untuk tahapan perhitungan dan penetapan, pemeliharaan, penyaluran, pelepasan, pengawasan, serta peran serta masyarakat atau kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan CPPD; 7) Menyusun SOP terkait pemberian subsidi bunga pinjaman agar terdapat standar layanan baku yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pemberian subsidi bunga pinjaman; 8) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas program pemberian subsidi bunga pinjaman mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pembayaran, rekonsiliasi data dengan	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
bank dan perangkat daerah terkait, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 9) Menyusun rancangan regulasi daerah yang menjabarkan persyaratan spesifik penerima hibah atau bantuan barang, misalnya lama usia kelompok tani didirikan, syarat minimal jumlah anggota kelompok tani yang tergolong miskin, status keaktifan kelompok tani, atau kriteria lain sesuai kebutuhan dalam bentuk keputusan Gubernur, keputusan kepala dinas, atau SOP agar verifikasi penerima hibah dapat dilakukan secara selektif dan betul betul diarahkan untuk menunjang capaian kinerja pemerintah daerah yang salah satunya mengentaskan kemiskinan di daerah; 10) Melakukan kajian dan menuangkan hasilnya dalam bentuk kajian/ telaahan staf atau laporan efektivitas dampak pemberian bantuan terhadap baik pendapatan kelompok tani maupun capaian kinerja pemda; dan 11) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian hibah/bantuan barang mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan verifikasi, penyerahan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar:	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1) Menyusun SOP terkait penyaluran bantuan air bersih dan/atau tandon; 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas penyaluran bantuan air bersih dan/atau tandon mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi kekeringan, pelaksanaan penyaluran, kerja sama penyediaan air bersih dengan pihak lain, hingga pelaporan distribusi bersih; 3) Menyusun kajian dan/atau rencana aksi strategis yang melibatkan lintas perangkat daerah terkait efektivitas distribusi air bersih dalam menyelesaikan masalah kekeringan yang ada di lokasi kekeringan atau rawan kekeringan karena tidak memungkinkan untuk menyalurkan air bersih setiap hari sehingga memerlukan rencana aksi yang saling terkoordinasi dan terintegrasi dengan kegiatan perangkat daerah lainnya untuk menyelesaikan masalah kekeringan. d. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan agar: 1) Memperbaiki SOP Pasar Murah dengan menambahkan mekanisme yang diperlukan terkait: 1. Apakah penetapan jumlah kupon Pasar Murah menyesuaikan jumlah masyarakat miskin yang ada atau	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
membagi rata jumlah paket sembako di masing-masing kecamatan/desa; 2. Apakah distribusi kupon Pasar Murah dilakukan oleh dinas atau diserahkan kepada kecamatan/desa dengan mengacu pada data masyarakat miskin yang telah diverifikasi; 3. Apakah pembeli yang memiliki kupon telah dicocokkan dengan data kemiskinan yang ada dan telah didukung dengan dokumentasi tanda terima secara memadai antara panitia kegiatan dan pembeli; dan 4. Perlakuan apabila terdapat sisa paket sembako yang belum terjual atau apabila terdapat masyarakat miskin yang belum memperoleh kupon. 2) Menambahkan informasi dalam laporan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah terkait: (a) Jumlah paket sembako yang disiapkan per desa; (b) Jumlah paket sembako yang terjual per desa; (c) Jumlah paket sembako yang tersisa per desa; dan (d) By Name By Address (BNBA) pembeli dan bukti tanda terima yang disesuaikan dengan data kemiskinan yang telah diverifikasi dan	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
divalidasi per desa. 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan Pasar Murah mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi. pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. e. Kepala Dinas Perhubungan agar: 1) Menyusun SOP terkait pemberian bantuan helm dan jaket kepada ojek pangkalan; dan 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian helm dan jaket mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, rekonsiliasi data polres, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. f. Kepala Dinas Kesehatan agar: 1) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 2) Menyusun SOP terkait program jaminan kesehatan masyarakat secara memadai; 3) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diperlukan atas risiko terkait Universal Health Coverage	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
(UHC) yang teridentifikasi; dan 4) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas program jaminan kesehatan masyarakat mulai tahap perencanaan, penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pembayaran, rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan dan perangkat daerah terkait, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. g. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja agar: 1) Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan job fair secara memadai; 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan job fair paling sedikit memuat: (a) Latar belakang kegiatan; (b) Tujuan kegiatan; (c) Lokasi dan sumber pembiayaan; (d) Kondisi existing tenaga kerja dan pengangguran; (e) Hasil kegiatan yang di dalamnya memuat antara lain jumlah perusahaan dan lowongan pekerjaan yang ditawarkan, jumlah pencari kerja yang berpartisipasi, dan jumlah pencari kerja yang terserap dan penempatan; (f) Kendala pelaksanaan kegiatan; dan (g) Saran dan rencana tindak lanjut perbaikan. 3) Melakukan identifikasi dan	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas penyelenggaraan job fair mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perusahaan, pelaksanaan job fair, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman agar: 1) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas pemberian bantuan tangki septik individual mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, pelaksanaan pekerjaan oleh KSM, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan SPAM mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; dan 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan RTLH mulai dari tahap perencanaan,	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
penganggaran, penetapan lokasi, koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar: 1) Memperbaiki SK Tim Layanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa, dan Lanjut Usia (APDOL) dengan menambahkan peran dan pembagian tugas masingmasing anggota tim serta melakukan evaluasi atas efektivitas pembentukan tim terhadap capaian kinerja perangkat daerah; 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan APDOL dengan menambahkan poin hambatan dalam pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang diperlukan; dan 3) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas layanan APDOL mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban j. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga agar: 1) Menyusun berita acara serah terima pemberian beasiswa yang di dalamnya	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
juga memuat kewajiban penerima beasiswa untuk menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa tersebut sesuai peruntukkan; 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan pemberian beasiswa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, verifikasi oleh pihak sekolah dan dinas, pelaksanaan penyaluran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 3) Menyusun format rekonsiliasi manual terkait kondisi sarpras pendidikan minimal untuk ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan sebagai back up data pendukung; 4) Mewajibkan seluruh operator Dapodik satuan pendidikan untuk melakukan pemuktahiran dokumentasi fisik secara berkala dengan bukti foto visual atas sarpras pendidikan khususnya ruang kelas dan melakukan identifikasi status ruang kelas tersebut apakah bangunan semi permanen/bangunan darurat, ruangan lain yang difungsikan sebagai ruang kelas, atau bangunan ruang kelas riil ke dalam format rekonsiliasi yang disusun oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
bahan pemuktahiran data sarpras di aplikasi Dapodik dan Verval SP serta disampaikan kepada admin Dapodik di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga untuk proses verifikasi dan validasi agar data sarpras di Dapodik dapat diyakini kevalidannya, didukung dengan dokumentasi foto yang memadai, serta dapat dicocokkan dengan data sarpras di aplikasi Verval SP. 5) Memfasilitasi guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui pemberian beasiswa pendidikan atau penyediaan biaya hidup selama menempuh pendidikan sesuai kemampuan fiskal daerah; 6) Memberikan bimbingan teknis persiapan mengikuti sertifikasi profesi guru dalam rangka membantu guru agar dapat meningkatkan peluang kelulusan ujian sertifikasi guru; 7) Menyusun road map atau strategi peningkatan kompetensi guru agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana pelatihan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan; 8) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas peningkatan kompetensi dan pengadaan guru mulai dari tahap	

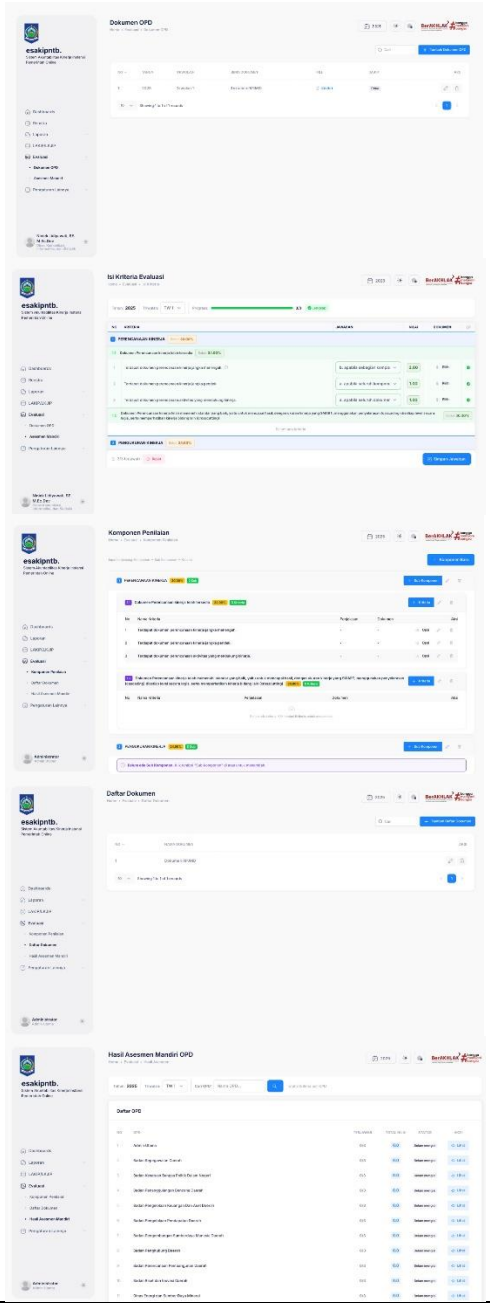
Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
perencanaan, penganggaran, pengusulan kebutuhan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban; 9) Menyusun edaran pemanfaatan hasil rapor pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi perbaikan capaian rapor pendidikan bagi masing-masing satuan pendidikan, termasuk strategi peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik; 10) Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dan/atau UPTD Pendidikan untuk melakukan monitoring dan/ atau pembinaan kepada masing masing satuan pendidikan terkait implementasi strategi perbaikan capaian rapor pendidikan; dan 11) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menyusun RTP yang diperlukan atas kegiatan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi dengan pihak sekolah/pengawas sekolah, hingga pelaporan. k. Inspektur bersama-sama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar: 1) Melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh perangkat daerah	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
agar melakukan identifikasi dan analisis risiko untuk: (a) Risiko Strategis OPD; (b) Risiko Operasional OPD; (c) Risiko Kemitraan; dan (d) Risiko Fraud, serta menyusun risk register mulai form 1 sampai dengan form 12 sesuai lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 01.A Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Menyusun surat edaran kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan evaluasi efektivitas implementasi manajamen risiko secara mandiri, termasuk evaluasi atas keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian atau RTP yang telah disusun; 3) Dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan tidak hanya memberikan rekomendasi yang bersifat penyelesaian administrasi dan keuangan, tetapi juga mengarahkan pada perbaikan pengendalian agar tidak terjadi berulang-ulang; 4) Melakukan evaluasi atas desain dan implementasi risiko perangkat daerah; dan	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
5) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.	
3. Nilai SAKIP	
a. Perencanaan Kinerja	
1. Menyusun draft perbaikan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 dengan memastikan seluruh kinerja telah berorientasi pada hasil untuk level Gubernur begitu juga dengan indikator kinerja yang digunakan telah relevan menggambarkan kinerja tujuan/sasaran strategis. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada RPJMD 2025-2029 pada periode yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Melakukan perbaikan target kinerja pada dokumen perjanjian kinerja Gubernur setiap tahunnya dengan menggunakan angka absolut, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan kinerja Provinsi NTB serta melakukan penyesuaian target kinerja yang mengacu pada target RPJMN 2025-2029 3. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan Critical Success Factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian	Pemerintah Provinsi melalui Bappeda sebagai langkah awal atas rekomendasi ini adalah dengan melakukan rapat koordinasi bersama dengan seluruh perangkat daerah (link: https://www.instagram.com/p/DVIc4-wkTjs/?igsh=MXd3Z2NoYzd6bXV1Yg==). Untuk selanjutnya akan dilakukan desk asistensi untuk perbaikan dokumen RPJMD 2025-2029 dan Renstra 2025-2029, khususnya yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran.

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang. Setelah itu, melakukan identifikasi adanya crosscutting kinerja baik yang berasal dari internal maupun eksternal lingkup Provinsi NTB 4. Melakukan perbaikan pada dokumen rencana aksi pada level perangkat daerah dengan memastikan keselarasan dengan sasaran strategis yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga dapat diketahui program/kegiatan yang relevan untuk mencapai kinerja sasaran strategis	
b. Pengukuran Kinerja	
1. Mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menyusun pedoman teknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar dapat dijadikan dasar seluruh perangkat daerah dalam menyusun SOP dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk didalamnya kebijakan mengenai pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB 2. Melakukan pengembangan terhadap e-sakip Provinsi NTB sehingga dapat menyajikan capaian kinerja Gubernur secara berkala yang didapatkan dari pelaksanaan rencana aksi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Perjanjian Kinerja Gubernur 3. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan aplikasi e-SAKIP Provinsi NTB sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan	1. Tim Implementasi SAKIP 2026 mengalami penyempurnaan dalam komposisi dan keanggotaannnya. Saat ini sedang dilakukan proses finalisasi SK di Biro Hukum (link: https://s.id/edHEw). Selain itu juga sedang dilakuan finalisasi Rapergub Implementasi SAKIP yang di dalamnya memuat pengaturan tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja (link: https://s.id/P3CsI). 2. Aplikasi e-SAKIP sudah dilakukan pengembangan, dapat diakses pada: https://esakip.ntbprov.go.id. 3. Bappeda sudah menerbitkan surat nomor: 000.7/259/Bappeda/2026 tanggal 27 Februari 2026, hal: Penginputan Data Capaian Kinerja Tahun 2025 (link: https://s.id/H4Gd9

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
pengukuran capaian kinerja secara berkala, dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki 4. Melakukan penyempurnaan pada dokumen IKU seluruh perangkat daerah dengan menambahkan penjelasan mengenai definisi operasional pada setiap indikator kinerja agar dapat diketahui pengertian atau makna dari indicator tersebut	
c. Pelaporan Kinerja	
1. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menyajikan strategi atau alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, sehingga laporan kinerja bukan hanya dijadikan sebagai output akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan tahun berikutnya 2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah dengan melengkapi informasi mengenai keterkaitan antara anggaran yang sudah digunakan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sehingga pimpinan dapat segera dapat melakukan tindaklanjut atas informasi tersebut	1. Sudah dilakukan desk asistensi LAKIP/LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk perbaikan/penyempurnaan laporan (link Berita Acara Desk: https://s.id/3LV2T). 2. Sudah dilakukan desk asistensi LAKIP/LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk perbaikan/penyempurnaan laporan (link Berita Acara Desk: https://s.id/3LV2T) Saat laporan ini disusun, LAKIP/LKjIP Perangkat Daerah dalam proses reviu Inspektorat.
d. Evaluasi Kinerja	
1. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk dapat mengupload dokumen LHE AKIP Internal yang terbaru pada esr.menpan.go.id, agar dapat dapat dipastikan seluruh perangkat daerah telah mendapatkan LHE AKIP internal dari Inspektorat Provinsi NTB	1. Inspektorat sudah menerbitkan surat Inspektur Nomor: 700/352-III/SP-II/XI/2026 tanggal 2 Maret 2026, hal:Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Menpan RB Tahun 2025 (link: https://s.id/cLIOU) 2. Aplikasi evaluasi kinerja internal e-SIAP, mulai tahun 2026 diintegrasikan dengan e-SAKIP (link :

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
dan akan ditindaklanjuti 2. Mendorong Inspektorat Provinsi NTB untuk dapat mengembangkan aplikasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menambahkan menu dalam pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan serta memberikan akses kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan dialog pada aplikasi tersebut	https://esakip.ntbprov.go.id) 
5. Indeks Perencanaan Pembangunan	
a. Perencanaan: Diharapkan adanya penguatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dan pusat. b. Terkait evaluasi sudah disampaikan dengan baik hasilnya, namun agar lebih runut, sebaiknya permasalahan dibahas dulu, kemudian disampaikan isu strategisnya (saat ini penulisannya masalah-isu strategis-masalah). c. Capaian SDGs sebaiknya dimasukkan dalam subbab hasil evaluasi.	Rencana Aksi Tindak Lanjut sama dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Hasil LHE Nilai SAKIP.

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
d. Prioritas Pembangunan Daerah perlu ditambahkan sasaran atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Prioritas Pembangunan sebaiknya didetailkan dalam Program Prioritas yang dilengkapi dengan indikator dan OPD yang melaksanakan. Pada bagian ini saat ini lebih banyak menjelaskan intervensi pemerintah pusat e. Perlu ditambahkan anggaran total keseluruhan Prioritas Pembangunan Program Unggulan: 1. Program Unggulan Provinsi NTB adalah Optimalisasi Sumber Daya Lokal untuk Kesejahteraan, merupakan inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memaksimal potensi sumber daya secara berkelanjutan. Diharapkan program direncanakan melalui pendekatan berbasis data, sehingga mampu mendorong pertumbuhan tinggi yang inklusif. 2. Perlu disesuaikan antara ruang lingkup dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. 3. Kerangka kerja logis masih belum menggambarkan keterkaitan input, proses, output, outcome sampai dampak yang menunjukkan proses menuju keberhasilan program tersebut. 4. Program terlalu luas, perlu dipilih salah satu atau beberapa saja yang dapat dijadikan sebagai program unggulan. 5. Perlu dijelaskan tahapan dan proses pelaksanaan program secara runut.	
6. Indeks Pelayanan Publik	
(belum ada rekomendasi)	(menunggu rilis disampaikan ke Pemda)
7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	
Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sesuai standar	Sudah ada Peraturan Gubernur NTB Nomor 047-519 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov NTB Tahun 2024-2026 (link: https://s.id/NoS5m)
8. Capaian IKU Makro	Sebagai langkah awal dilakukan: - rapat konsolidasi dengan seluruh Kepala Bappeda se-Provinsi NTB (link:

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	https://www.instagram.com/p/DSq4vWrEVwE/?igsh=dGo4ODYxM3BqeHFx) - rapat-rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak: https://www.instagram.com/p/DVNmBVSkRxf/?igsh=MWZmNHc2MmllOG9rYg== https://www.instagram.com/p/DVIQAdgkRm5/?igsh=MWZhc281NjZicnFibA== https://www.instagram.com/p/DQT1I-DkQiQ/?igsh=MXF4NGF5MW5neDY4Nw== https://www.instagram.com/p/DOvT7A4EcRg/?igsh=MTRlN3JqN2t3MDVuNw== https://www.instagram.com/reel/DO710YREWal/?igsh=bDlkOGo4cmVsaHhn https://www.instagram.com/reel/DO710YREWal/?igsh=bDlkOGo4cmVsaHhn
9. Capaian IKU Non Makro	
Melakukan reviu atas rencana aksi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja dan membuat strategi atau upaya baru agar output yang dihasilkan dapat berdampak pada pencapaian target kinerja non makro	Sebagai langkah awal dilakukan: - rapat konsolidasi dengan seluruh Kepala Bappeda se-Provinsi NTB (link: https://www.instagram.com/p/DSq4vWrEVwE/?igsh=dGo4ODYxM3BqeHFx) - rapat-rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak: https://www.instagram.com/p/DVNmBVSkRxf/?igsh=MWZmNHc2MmllOG9rYg== https://www.instagram.com/p/DVIQAdgkRm5/?igsh=MWZhc281NjZicnFibA== https://www.instagram.com/p/DQT1I-DkQiQ/?igsh=MXF4NGF5MW5neDY4Nw== https://www.instagram.com/p/DOvT7A4EcRg/?igsh=MTRlN3JqN2t3MDVuNw== https://www.instagram.com/reel/DO710YREWal/?igsh=bDlkOGo4cmVsaHhn https://www.instagram.com/reel/DO710YREWal/?igsh=bDlkOGo4cmVsaHhn
10. Survei Penilaian Integritas	
a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu meningkatkan kejelasan informasi layanan kepada masyarakat. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah pengemasan informasi prosedur layanan secara jelas dan interaktif melalui inovasi. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dan	Sebagai langkah awal, sudah dilakukan konsolidasi internal di Inspektorat.

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat terwujud. Selanjutnya, dalam upaya memudahkan masyarakat memahami prosedur layanan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk terus melakukan pengemasan informasi yang jelas dan bersifat interaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi secara lebih luas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap prosedur pelaksanaan layanan melalui survei kepuasan juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan memahami layanan yang tersedia. b. Dalam konteks penghindaran praktik korupsi, penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap menyuap. Sosialisasi ini harus diikuti dengan mekanisme ujian untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan pegawai. Penegakan aturan yang tegas dan tanpa pandang bulu, serta penerapan sistem manajemen kepatuhan seperti ISO-37301, akan memperkuat integritas dan komitmen dalam penegakan aturan di lingkungan pemerintahan. c. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga perlu mengkomunikasikan dengan baik kepada pihak eksternal mengenai aturan terkait gratifikasi dan cara melapor melalui Whistleblowing System (WBS). Mengkaji penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi dan melakukan survei untuk memahami pemahaman masyarakat tentang hal ini sangat penting. Pemimpin harus menjadi role model dalam penegakan pengelolaan gratifikasi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
d. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. Pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP baru dan standar harga juga harus dilakukan untuk memastikan keseragaman dalam implementasi. Selain itu, pencarian vendor yang berkualitas dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang berkorelasi dengan kualitas produk sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan. e. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan edukasi dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. f. Melakukan due diligence terhadap vendor dan memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam adalah langkah yang perlu diambil. g. Selain itu, membuka ruang pengadaan yang lebih luas dan melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka memastikan bahwa pemenang tender tidak terlibat dalam praktik korupsi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pelaporan gratifikasi secara internal. Hal ini penting untuk menciptakan budaya integritas di lingkungan pemerintahan. h. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan juga harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk mewajibkan survei kebutuhan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengembangan sistem aplikasi e-	

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
catalog atau e procurement akan memfasilitasi input data kebutuhan dari setiap direktorat atau divisi. i. Selain itu, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi pengadaan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap vendor yang bermasalah sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengadaan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam menghadapi pengaruh pihak lain terhadap keputusan pengadaan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menegakkan sanksi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Pembuatan kebijakan larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan harus disertai dengan contoh dari pimpinan. Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. j. Terakhir, dalam hal pengenaan sanksi atau denda kepada pengguna layanan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai standar prosedur operasional. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan sanksi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.	

Sumber: Biro Organisasi, 2025

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Nilai RB General sebesar Rp160.285.504.397,00. Realisasi anggaran sebesar Rp147.999.483.979,00. Efisiensi anggaran sebesar 15,54%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.218
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja RB General

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
RB General	160.285.504.397,00	147.999.483.979,00	64,49	70,5	2.099.283.460,70	2.485.431.918,08	0,84	0,16	15,54

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan:

a. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Target adalah Program Penataan Organisasi (realisasi anggaran 93,97%) dengan kegiatan:
   1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (realisasi anggaran 98,32%) dengan kegiatan:
   1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
   2. Pelaksanaan Otonomi Daerah
   3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah

c. Program Kesejahteraan Rakyat (realisasi anggaran 96,83%) dengan kegiatan:
   1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
   2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
   3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

d. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum (realisasi anggaran 94,80%) dengan kegiatan:
   1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
   2. Fasilitasi Bantuan Hukum

e. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (realisasi anggaran 88,93%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

f. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (realisasi anggaran 99,85%) dengan kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
g. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 95,34%) dengan kegiatan:
    1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
h. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (realisasi anggaran 96,86%) dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
i. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (realisasi anggaran 98,99%) dengan kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
j. Program Penyelenggaraan Peersandian untuk Pengamanan Informasi (realisasi anggaran 89,81%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
k. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (realisasi anggaran 99,34%) dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
l. Program Penyelenggaraan Pengawasan (realisasi anggaran 97,60%) dengan kegiatan:
    1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
m. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (realisasi anggaran 97,75%) dengan kegiatan:
    1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    2. Pendampingan dan Asistensi
n. Program Kepegawaian Daerah (realisasi anggaran 99,91%) dengan kegiatan:
    1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    2. Mutasi dan Promosi ASN
    3. Pengembangan Kompetensi ASN
    4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

o. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (realisasi anggaran 91,05%) dengan kegiatan:
    1. Pengembangan Kompetensi Teknis
    2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
p. Program Pelayanan Penghubungn (realisasi anggaran 92,46%) dengan kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.
q. Program Pendaftaran Penduduk (realisasi anggaran 83,82%) dengan kegiatan
    1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
    2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
    3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
r. Program Pencatatan Sipil (realisasi anggaran 83,83%)
    1. Pelayanan Pencatatan Sipil
    2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
s. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (realisasi anggaran 99,92%) dengan kegiatan:
    1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
    2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
t. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (realisasi anggaran 99,95%) dengan kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan
u. Program Pengelolaan Arsip (realisasi anggaran 99,42%) dengan kegiatan
    1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
    2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
    3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

8. Inovasi

Belum ada inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai RB General. Strategi peningkatan capaian masih terbatas pada pendampingan kepada PIC Perangkat Daerah, penguatan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang menjadi pengampu, dan melaksanakan FGD Praktik Baik Implementasi Reformasi Birokrasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.219
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Reformasi Birokrasi General

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penataan Organisasi	1,656,196,700.00	1,556,351,513.00	93.97
Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	590,170,600.00	580,284,518.00	98.32
Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	1,066,026,100.00	976,066,995.00	91.56
Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1,290,872,600.00	1,259,452,223.00	97.57
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	341,794,600.00	329,372,407.00	96.37
Pelaksanaan Otonomi Daerah	546,563,000.00	528754835.00	96.74
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	402,515,000.00	401324981.00	99.70
Program Kesejahteraan Rakyat	35,179,785,155.00	34,063,179,987.00	96.83
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18,214,848,295.00	17,577,558,737.00	96.50
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16,787,387,410.00	16,357,532,800.00	97.44
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	177,549,450.00	128,088,450.00	72.14
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	5,615,282,500.00	5,323,522,571.00	94.80
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2,948,763,300.00	2,761,758,610.00	93.66
Fasilitasi Bantuan Hukum	2,666,519,200.00	2,561,763,961.00	96.07

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1,019,097,100.00	906,235,385.00	88.93
Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	191,460,700.00	187,528,596.00	97.95
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	95,000,000.00	93,788,034.00	98.72
Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	732,636,400.00	624,918,755.00	85.30
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	393,017,500.00	392,423,280.00	99.85
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	393,017,500.00	392,423,280.00	99.85
Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,659,679,300.00	2,535,644,066.00	95.34
Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	2,093,498,700.00	2,042,619,157.00	97.57
Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65,012,700.00	58,858,613.00	90.53
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	339,720,600.00	310,305,615.00	91.34
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	161,447,300.00	123,860,681.00	76.72

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	7,376,637,800.00	7,144,937,928.00	96.86
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7,376,637,800.00	7,144,937,928.00	96.86
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,674,294,316.00	1,657,355,373.00	98.99
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1,674,294,316.00	1,657,355,373.00	98.99
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	195,005,000.00	175,129,294.00	89.81
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	195,005,000.00	175,129,294.00	89.81
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	135,344,600.00	134,456,566.00	99.34
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi	135,344,600.00	134,456,566.00	99.34
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,805,365,500.00	2,738,028,295.00	97.60
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,149,209,500.00	2,083,708,502.00	96.95
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	656,156,000.00	654,319,793.00	99.72
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2,046,759,000.00	2,000,779,352.00	97.75

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	96,640,000.00	86,382,700.00	89.39
Pendampingan Dan Asistensi	1,950,119,000.00	1,914,396,652.00	98.17
Program Kepegawaian Daerah	3,663,092,900.00	3,659,699,027.00	99.91
Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	768,622,700.00	766,988,077.00	99.79
Mutasi Dan Promosi Asn	1,480,990,000.00	1,479,827,277.00	99.92
Pengembangan Kompetensi Asn	589,125,400.00	588,620,305.00	99.91
Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	824,354,800.00	824,263,368.00	99.99
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,334,791,726.00	10,320,228,190.00	91.05
Pengembangan Kompetensi Teknis	2,218,320,890.00	2,090,057,750.00	94.22
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	9,116,470,836.00	8,230,170,440.00	90.28
Program Pelayanan Penghubung	1,403,821,000.00	1,297,975,003.00	92.46
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1,403,821,000.00	1,297,975,003.00	92.46
Program Pendaftaran Penduduk	163,958,000.00	137,434,800.00	83.82
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	12,500,000.00	11,990,000.00	95.92
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	29,527,000.00	29,237,000.00	99.02

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	121,931,000.00	96,207,800.00	78.90
Program Pencatatan Sipil	148,517,000.00	124,508,400.00	83.83
Pelayanan Pencatatan Sipil	1,912,000.00	1,837,000.00	96.08
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	146,605,000.00	122,671,400.00	83.67
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	138,663,000.00	138,558,300.00	99.92
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	25,724,000.00	25716500.00	99.97
Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	112,939,000.00	112841800.00	99.91
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25,283,750.00	25,271,250.00	99.95
Penyediaan Profil Kependudukan	25,283,750.00	25,271,250.00	99.95
Program Pengelolaan Arsip	177,620,400.00	176,585,699.00	99.42
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	68,758,700.00	68,706,700.00	99.92
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	80,986,700.00	80,270,700.00	99.12
Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	27,875,000.00	27,608,299.00	99.04

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	81,182,419,550.00	72,231,727,477.00	88.97
Pembentukan Perda Dan Peraturan Dprd	20,137,614,500.00	19,490,645,337.00	96.79
Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,004,832,500.00	441,970,260.00	43.98
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	522,214,210.00	325,364,410.00	62.30
Peningkatan Kapasitas Dprd	6,649,019,500.00	5,287,490,673.00	79.52
Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	38,499,137,650.00	36,718,598,900.00	95.38
Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik Dprd	66,882,890.00	12,433,740.00	18.59
Fasilitasi Tugas Dprd	14,302,718,300.00	9,955,224,157.00	69.60

Sumber: BKAD NTB 2025

B. Indikator Sasaran RB Tematik

RB Tematik adalah langkah strategis untuk membangun aparatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan fokus penyelesaian isu hilir. RB Tematik merupakan salah satu komponen dalam Indeks RB. Pada tahun 2025 Indeks RB sebesar 77,46, dengan besaran Nilai RB Tematik 6,96.

a. **Analisis Capaian Kinerja:**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Realisasi kinerja RB Tematik tahun 2025 (6,96) bila dibandingkan dengan target 2025 (9,28), maka terdapat deviasi -2,32. Capaian realisasi sebesar 75,00% (tidak mencapai target).

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja tahun 2025 (6,96), bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (6,24), Nilai RB Tematik naik 0,72 poin atau capaian 111,54%. Realisasi kinerja tahun 2025 (6,96), bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (9,19), Nilai RB Tematik turun 2,23 poin. Capaian realisasi sebesar 75,73% (tidak mencapai target). Komponen RB Tematik memiliki bobot Ideal 20 (dua puluh) dengan 10 (sepuluh) indikator. Berdasarkan

data tahun 2024 dan 2025 yang diolah dari hasil rilis Kementerian PANRB, terdapat 2 (dua) indikator (20%) yang capaiannya naik, 1 indikator (10%) capaiannya turun, dan 7 (tujuh) indikator (70%) capaiannya tetap. Rincian nilai Sub Komponen RB Tematik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.220

Rincian Nilai Sub Komponen RB Tematik Provinsi NTB Tahun 2024 dan 2025

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Tahun 2024		Bobot	Tahun 2025	
					Skor	Skor Index		Skor	Skor Index
1	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,41	0,41	1	0,58	0,58
2	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,24	0,24	1	0,54	0,54
3	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,42	0,42	1	0,42	0,42
4	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0,4	0,4	1	0,4	0,4
5	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0,39	0,39	1	0,39	0,39
6	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,33	1,33	1	1,33	1,33
7	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,06	1,06	3	0,81	0,81
8	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan	3	1,8	1,8	3	1,8	1,8

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Tahun 2024		Bobot	Tahun 2025	
					Skor	Skor Index		Skor	Skor Index
			Stunting (Capaian Dampak)						
9	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,9	2,9	3	2,9	2,9
10	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0,24	0,24	3	0,24	0,24

Sumber: KemenPANRB 2024 dan 2025

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**
   Realisasi kinerja RB Tematik tahun 2025 (6,96), bila dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD 2025-2029 (9,76), terdapat deviasi -2,8 poin. Capaian realisasi sebesar 96,54% (belum mencapai target).
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (jika ada)**
   Target Nilai RB Tematik secara nasional tidak ada, sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Realisasi nilai RB Tematik tahun 2025 terhadap target 2025 dan realisasi 2024 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena belum mencapai target. Bila dilihat per sub komponen, terdapat 1 indikator (10%) yang capaiannya turun, yaitu Realisasi Investasi (Capaian Dampak), ini artinya bahwa realisasi investasi belum memberikan dampak yang optimal sekurang-kurangnya terhadap pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan tingkat kemiskinan. Permasalahan utama dalam pencapaian target ini adalah belum optimalnya pemerataan dan diversifikasi investasi antar sektor dan wilayah. Meskipun secara agregat realisasi investasi menunjukkan capaian yang relatif baik, investasi masih cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu, khususnya sektor ESDM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi investasi pada sektor unggulan lainnya, seperti kelautan dan perikanan, pertanian modern, perindustrian serta pariwisata skala besar, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan keterbatasan infrastruktur dasar di lokasi-lokasi potensial investasi, antara lain akses jalan, ketersediaan listrik, dan air baku. Ketidaksiapan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap kelayakan

usaha dan menurunkan minat investor, terutama investor jangka menengah dan panjang yang membutuhkan kepastian dukungan infrastruktur sejak tahap awal investasi. Selain itu, permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kendala teknis dan administratif dalam sistem perizinan dan pelaporan penanaman modal, khususnya pada pemanfaatan sistem OSS-RBA dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Gangguan sistem dan rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha dalam penyampaian laporan berpotensi menyebabkan data realisasi investasi tidak tercatat secara optimal, sehingga mempengaruhi akurasi pengukuran kinerja dan ketepatan pengambilan kebijakan.

Dari sisi kebijakan, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi regulasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan fasilitasi investasi. Kondisi ini dapat memperlambat proses penyiapan kawasan dan proyek investasi yang membutuhkan dukungan lintas sektor, sehingga berdampak pada kecepatan realisasi investasi di daerah.

Berdasarkan analisis ketidaktercapaian target di atas, berikut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai berikut:

a. Melakukan penguatan strategi fasilitasi dan promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis sektor unggulan daerah. Penyusunan dan pemutakhiran peta potensi investasi menjadi instrumen penting dalam mengarahkan investor pada sektor-sektor non-ESDM yang memiliki nilai tambah tinggi dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pemerataan investasi antarwilayah.
b. Optimalisasi peran DPMPTSP sebagai *focal point* koordinasi untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan kawasan investasi. Dalam rangka menjawab keterbatasan infrastruktur pendukung, diperlukan penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam penyiapan kawasan dan lokasi potensial investasi, khususnya pada sektor prioritas.
c. Untuk mengatasi kendala teknis sistem perizinan dan pelaporan, DPMPTSP Provinsi NTB terus melakukan pembaruan sistem OSS-RBA serta pendampingan intensif kepada pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan, tetapi juga untuk memastikan tersedianya data investasi yang akurat, valid, dan dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja.
d. DPMPTSP Provinsi NTB mendorong penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah yang pro-investasi, termasuk kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Penyederhanaan prosedur, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan koordinasi lintas sektor

diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi dan meningkatkan daya saing daerah.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Nilai RB Tematik sebesar Rp384.481.804.940,00. Realisasi anggaran sebesar Rp351.850.516.737,00. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan hasil yang kurang optimal, yaitu -22,02%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.221
Penghitungan Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja RB Tematik

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	(Pagu Anggaran/ Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
RB Tematik	384.088.787.440,00	351.458.093.457,00	9,28	6,96	50.496.852.508,19	41.388.877.956 ,90	1,22	-0,22	-22,02

Sumber: Biro Organisasi, 2025

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan cukup berhasil dalam mendukung pencapaian target karena terbukti efektif dengan anggaran yang ada adalah sebagai berikut:

a. Program Kesejahteraan Rakyat (realisasi anggaran 96,83%) dengan kegiatan:
   1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
   2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
   3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

b. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (realisasi anggaran 88,93%) dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 90,64%) dengan kegiatan:
   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggaran 91,04%) dengan kegiatan:
   1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
   2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi,
   3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
e. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (realisasi anggaran 72,85%) dengan kegiatan:
   1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
   2. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
f. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (realisasi anggaran 85,41%) dengan kegiatan:
   1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
   2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
   3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
g. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (realisasi anggaran 94,33%) dengan kegiatan:
   1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
   2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
h. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (realisasi anggaran 99,50%) dengan kegiatan:
   1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
   2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (realisasi anggaran 70,08%) dengan kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sedangkan Program dan Kegiatan belum efektif dalam mendukung pencapaian target karena tidak sebanding antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (realisasi anggaran 50,16%) dengan kegiatan:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

b. Program Pelayanan Penanaman Modal (realisasi anggaran 99,94%) dengan kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (realisasi anggaran 99,48%) dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (realiasi anggaran 96,35%) dengan kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

8. Inovasi

Belum ada inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai RB Tematik. Strategi peningkatan capaian masih terbatas pada pendampingan kepada PIC Perangkat Daerah, penguatan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang menjadi pengampu, dan melaksanakan FGD Praktik Baik Implementasi Reformasi Birokrasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b. Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.222
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Reformasi Birokrasi Tematik

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Kesejahteraan Rakyat	35,179,785,155.00	34,063,179,987.00	96.83
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18,214,848,295.00	17,577,558,737.00	96.50
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16,787,387,410.00	16,357,532,800.00	97.44
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	177,549,450.00	128,088,450.00	72.14
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1,019,097,100.00	906,235,385.00	88.93
Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	191,460,700.00	187,528,596.00	97.95
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	95,000,000.00	93,788,034.00	98.72
Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	732,636,400.00	624,918,755.00	85.30

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	393,017,500.00	392,423,280.00	99.85
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	393,017,500.00	392,423,280.00	99.85
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	6,230,585,089.00	90.64
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	1,067,318,011.00	86.45
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	4,416,198,154.00	91.11
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	747,068,924.00	94.26
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	824,394,012.00	413,520,000.00	50.16
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	323,597,900.00	313,127,400.00	96.76
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	500,796,112.00	100,392,600.00	20.05
Program Pelayanan Penanaman Modal	38,813,000.00	38,788,000.00	99.94
Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	38,813,000.00	38,788,000.00	99.94
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	285,646,000.00	284168050.00	99.48
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	285,646,000.00	284168050.00	99.48
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	57,151,200.00	55,064,000.00	96.35
Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	57,151,200.00	55,064,000.00	96.35

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330,607,624,773.00	300,999,368,874.00	91.04
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	218,337,115,578.00	199,881,328,236.00	91.55
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	111,311,482,435.00	100,212,898,778.00	90.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	232,306,760.00	221,667,100.00	95.42
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	726,720,000.00	683,474,760.00	94.05
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	88,780,000.00	64674000.00	72.85
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (Pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Pak)	61,740,000.00	55854000.00	90.47
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Ukot)	27,040,000.00	8,820,000.00	32.62
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811,529,900.00	693,122,366.00	85.41
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	638,479,900.00	595,332,366.00	93.24
Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (Kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	148,550,000.00	73,670,000.00	49.59
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbm) Tingkat Daerah Provinsi	24,500,000.00	24,120,000.00	98.45
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7,030,536,800.00	6,631,821,874.00	94.33

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	6,189,500.00	195,000.00	3.15
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	7,024,347,300.00	6,631,626,874.00	94.41
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	634,997,000.00	631,796,784.00	99.50
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	485,497,000.00	485,315,500.00	99.96
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	23,500,000.00	20,621,284.00	87.75
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	636,066,000.00	445,769,048.00	70.08
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	636,066,000.00	445,769,048.00	70.08

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Sasaran Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dijelaskan bahwa Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik sesuai kewenangannya. Komponen yang diperhitungkan dalam penentuan besaran kapasitas fiskal daerah adalah pendapatan asli daerah, transfer ke daerah, pendapatan transfer antar daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja bunga, dan pembiayaan utang daerah.

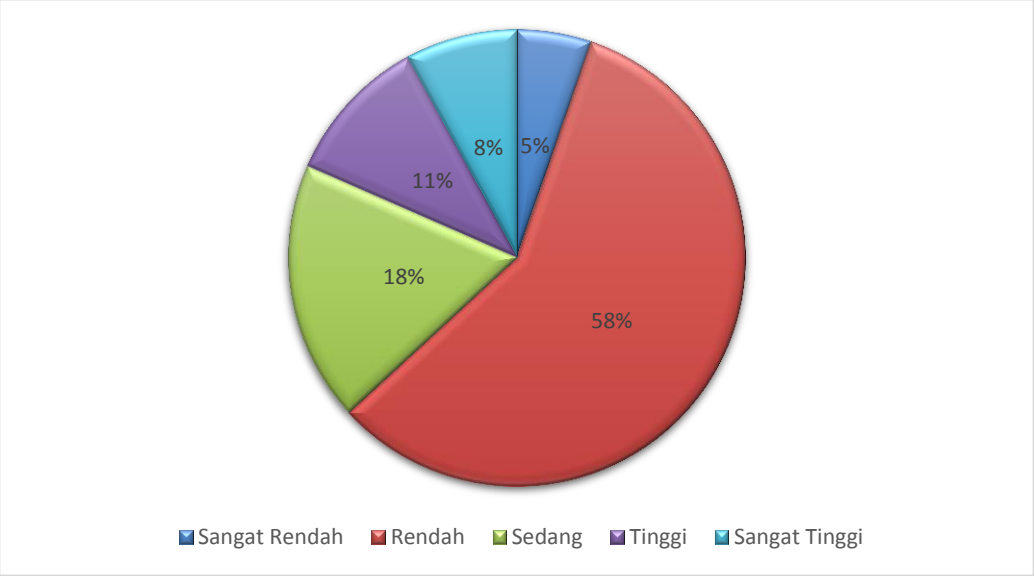
Sesuai PMK dimaksud, terdapat 5 (lima) kategori kapasitas fiskal daerah, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Provinsi NTB dengan rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 0,598 menjadi 1 (satu) dari 22 (dua puluh dua) Provinsi yang masuk dalam kategori rendah (57,89%) , selebihnya masuk kategori sangat rendah (5,26%), sedang (18,42%), tinggi (10,53%), sangat tinggi (7,89%). Bila dilihat berdasarkan wilayah, kategori rendah paling banyak di Sumatera (6 dari 10 Provinsi) dan Sulawesi (5 dari 6

Provinsi), kategori sangat rendah dan sangat tinggi ada di wilayah Maluku-Papua. Kategori Provinsi NTB di tahun 2025 sama dengan kategori tahun 2024 namun besaran rasio kapasitas fiskal daerah 1,241.

Kategori kapasitas fiskal daerah antara tahun 2024 dengan 2025 mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama pada 2 (dua) kategori , yaitu rendah dan sedang. Jika pada tahun 2024 kategori rendah sebanyak 42,11%, maka di tahun 2025 menjadi 57,89%, dan kategori sedang sebanyak 31,58% di tahun 2024 menjadi 18,42% di tahun 2025. Ini terjadi karena adanya kebijakan efisiensi oleh Pemerintah Pusat melalui pemotongan dana transfer ke daerah. Proporsi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025 Menurut Kategori, dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025 Menurut Wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.34

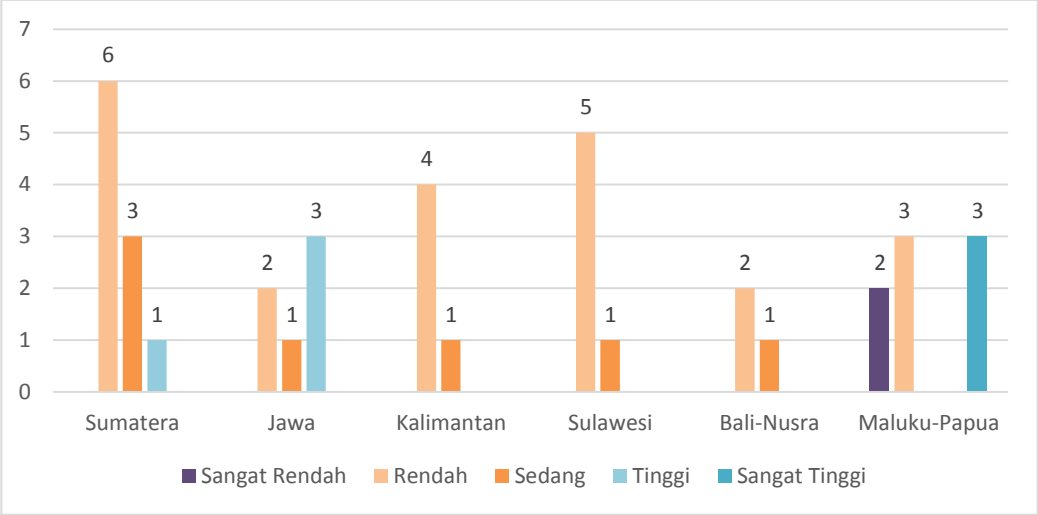
Proporsi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025 Menurut Kategori



Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

Grafik 3.35

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025 Menurut Wilayah



Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

   Realisasi kinerja Rasio Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2025 (0,598) bila dibandingkan dengan target 2025 (1,100), maka terdapat deviasi -0,502. Capaian realisasi sebesar 54,36% (tidak mencapai target).

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Realisasi kinerja tahun 2025 (0,598), bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (1,241, kategori rendah), Rasio Kapasitas Fiskal Daerah turun 0,643 poin. Capaian realisasi sebesar 48,19% (tidak mencapai target).

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**

   Realisasi kinerja Rasio Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2025 (0,598), bila dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD 2025-2029 (1,449), terdapat deviasi -0,851 poin. Capaian realisasi sebesar 41,27% (belum mencapai target).

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (jika ada)**

   Target Rasio Kapasitas Fiskal Daerah secara nasional tidak ada, sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. **Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Realisasi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2025 terhadap target 2025, realisasi 2024, dan target akhir RPJMD 2025-2029 menunjukkan hasil yang tidak memuaskan karena belum mencapai target. Beberapa penyebab utama ketidaktercapaian adalah karena:

   a. Penurunan besaran transfer ke daerah, dimana pada tahun 2024 sebesar Rp3.075.449.431.340,00 menjadi Rp2.481.714.874.957 di tahun 2025 atau berkurang Rp593.734.556.383,00.

b. Penurunan belanja bagi hasil, dimana pada tahun 2024 sebesar Rp996.971.719.600,00 menjadi Rp803.311.897.839,00 di tahun 2025 atau berkurang Rp193.659.821.761,00.
c. Penurunan belanja bunga, dimana pada tahun 2024 sebesar Rp 42.226.714.128,00 menjadi Rp25.993.780.957,00 di tahun 2025 atau berkurang Rp 16.232.933.171,00
d. Peningkatan belanja pegawai, dimana pada tahun 2024 sebesar Rp2.257.683.969.195,00 menjadi Rp2.333.054.476.025,00 di tahun 2025 atau bertambah Rp75.370.506.830,00.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sebesar Rp912.176.128.962,00. Realisasi anggaran sebesar Rp901.489.544.823,00. Tidak terjadi efisiensi anggaran karena antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan hasil yang tidak optimal, yaitu -81,79%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.223

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	912.176.128.962,00	901.489.544.823,00	1,1	0,598	1.507.600.038,46	829.251.026.329,09	1,82	-0,82	-81,79

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Seluruh Program dan Kegiatan belum efektif menunjang keberhasilan pencapaian target, sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (realisasi anggaran 88,83%) dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (realisasi anggaran 99,06%) dengan kegiatan:
    1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
    3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
    5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (realisasi anggaran 79,41%) dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b.Realisasi Anggaran:

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.224

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11,580,854,700.00	10,287,535,340.00	88.83
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11,580,854,700.00	10,287,535,340.00	88.83
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	896,019,370,793.00	887568224530.00	99.06
Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4,015,227,250.00	3,549,190,511.00	88.39
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	983,025,500.00	977,193,898.00	99.41
Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	720,721,800.00	708,074,619.00	98.25
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	811,470,680.00	678,009,415.00	83.55
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	888,818,302,563.00	881,035,443,058.00	99.12
Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	670,623,000.00	620,313,029.00	92.50
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,575,903,469.00	3,633,784,953.00	79.41
Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,575,903,469.00	3,633,784,953.00	79.41

Sumber: BKAD NTB 2025

D. Indikator Sasaran Indeks Perencanan Pembangunan Nasional Provinsi

Penilaian didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu kinerja pencapaian, perencanaan pembangunan, dan program unggulan.

1) Aspek kinerja pencapaian terdiri dari kriteria kinerja pembangunan dan kriteria tata kelola, penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dokumen daerah maupun dokumen pusat. Penilaian dilakukan berdasarkan pada kinerja pencapaian makro pembangunan, kinerja prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, serta melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Penilaian juga dibantu bahan pendukung kuesioner informasi pembangunan daerah yang diisi oleh daerah.
2) Aspek perencanaan pembangunan diukur melalui kriteria sinergi dan keterkaitan, dan kriteria konsistensi.
   a. Sinergi dan keterkaitan untuk melihat pemetaan dan keselarasan pusat-daerah yaitu antara kebijakan/program/kegiatan yang terdapat dalam RPJMD/RPD dan RKPD dengan yang tercantum dalam dokumen RPJMN,RKP dan dokumen perencanaan strategis lainnya. Penilaian ditekankan pada indikator sasaran dan prioritas pembangunan.
   b. Konsistensi untuk melihat hubungan antar bab dalam dokumen RPJMD/RPD maupun RKPD, yaitu hasil evaluasi yang melihat konsistensi antara permasalahan dan isu strategis, prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, program pembangunan dengan kegiatan prioritas, serta prioritas pembangunan dengan pagu anggaran yang tersedia.
   c. Kelengkapan dan kedalaman dimaksudkan bahwa dokumen RPJMD/RPD maupun RKPD memuat informasi terkait dengan kerangka ekonomi makro, kerangka pendanaan, sasaran dan indikator, dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan prioritas nasional serta penjelasan mengenai konsep dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Aspek Program Unggulan

   Program Unggulan merupakan program unggulan yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dengan mendayagunakan potensi daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penilaian program unggulan dilakukan berdasarkan ide dan kreativitas dari seluruh pemangku kepentingan di daerah dan bukan merupakan inisiasi dari lembaga donor maupun pemerintah pusat. Penilaian program unggulan ditekankan pada masalah yang akan diselesaikan dengan melihat ketersediaan dan efektifitas input yang digunakan, perencanaan program unggulan, proses pelaksanaannya, output dan dampak dari pelaksanaan program unggulan. Dokumen yang diajukan sebagai program unggulan daerah adalah program unggulan yang dilakukan dalam kurun waktu

2023 s.d 2025 serta memiliki keterkaitan dalam mendukung salah satu sasaran trisula pembangunan yaitu “Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan”.

Kriteria dan indikator penilaian IPPN Provinsi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.225

Kriteria dan Indikator Penilaian IPPN Provinsi Tahun 2025

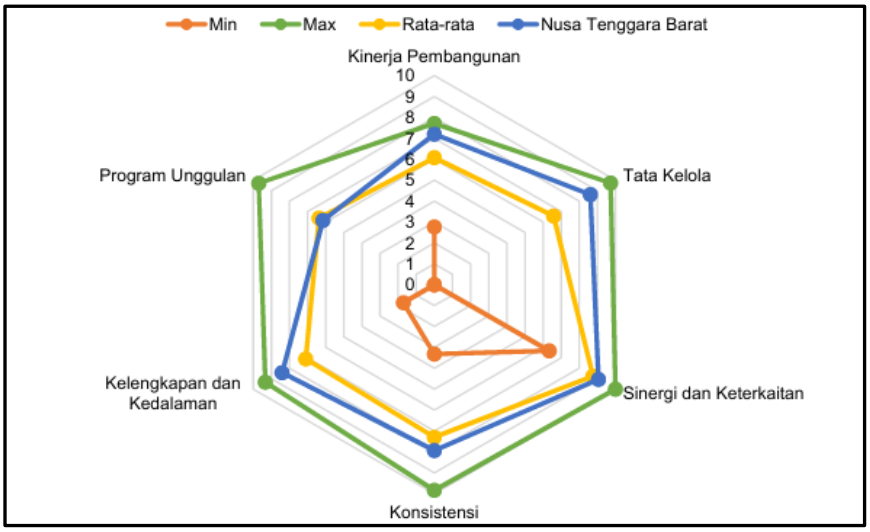
Kriteria	Indikator		Bobot
Aspek Kinerja Pencapaian (40%)			
Kinerja pembangunan (31,75%)	1	Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas Pembangunan	6,5%
	2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5%
	3	Kemiskinan	4,5%
	4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5%
	5	Ketimpangan	4%
	6	Kinerja terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 di daerah	3,25%
	7	Intervensi Daerah Mendukung Trisula Pembangunan 2024	4%
Tata Kelola (8,25%)	8	Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, dan Transparansi	3%
	9	Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1%
	10	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	2%
	11	Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemerintah Daerah	2,25%
Aspek Perencanaan Pembangunan (40%)			
Sinergi dan Keterkaitan (7%)	12	Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2025 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD	3%
	13	Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2025	4%
Konsistensi (16%)	14	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025	4%
	15	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025	4%
	16	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan program prioritas daerah	4%
	17	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2025 dengan pagu anggaran	4%
Kelengkapan dan Kedalaman (17%)	18	Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan	4%

Kriteria	Indikator		Bobot
		arah kebijakan	
	19	Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2025 terhadap program prioritas pada PN RKP 2025	5%
	20	Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2025 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	4%
	21	Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah	4%
Aspek Program Unggulan (20%)			
Program Unggulan (20%)	22	Kelengkapan dokumen program unggulan daerah	6%
	23	Kedalaman program unggulan daerah	14%

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Hasil penilaian dokumen perencanaan Provinsi NTB Tahun 2025 berdasarkan kriteria bahwa terdapat kriteria yang di bawah rata-rata penilaian, yaitu kriteria program unggulan. Sedangkan kriteria yang di atas rata-rata penilaian adalah kriteria kinerja pembangunan, tata kelola, sinergi dan keterkaitan, konsistensi, serta kelengkapan dan kedalaman. Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD Provinsi NTB 2025 Berdasarkan Kriteria dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.36
Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD
Provinsi NTB 2025 Berdasarkan Kriteria



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Sedangkan hasil penilaian dokumen perencanaan Provinsi NTB Tahun 2025 berdasarkan indikator bahwa terdapat indikator yang di bawah rata-rata penilaian, yaitu:

a. Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2025 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPDkriteria sinergi dan keterkaitan.

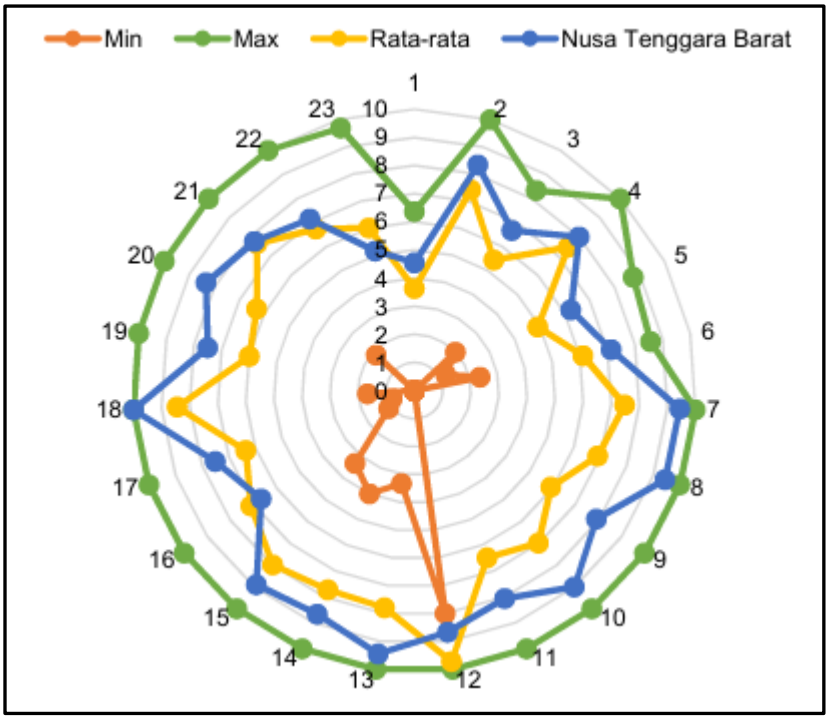
b. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan program prioritas daerah.
c. Kedalaman program unggulan daerah

Sedangkan indikator yang di atas rata-rata penilaian adalah indikator:
a. Pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas pembangunan
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
c. Kemiskinan
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
e. Ketimpangan
f. Kinerja terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP 2025 di daerah
g. Intervensi mendukung trisula pembangunan 2025
h. Pelayanan publik, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan transparansi
i. Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK)
j. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
k. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemerintah Daerah
l. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2025
m. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025
n. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025
o. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2025 dengan pagu anggaran
p. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan
q. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2025 terhadap program prioritas pada PN RKP 2025
r. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2025 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)
s. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah
t. Kelengkapan dokumen program unggulan daerah

Indikator yang sama dengan nilai maksimum, yaitu Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan.

Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD Provinsi NTB 2025 Berdasarkan Indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.37
Diagram Hasil Penilaian Dokumen PPD
Provinsi NTB 2025 Berdasarkan Indikator



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**
   Realisasi kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi tahun 2025 (87,20) bila dibandingkan dengan target 2025 (91,50), maka terdapat deviasi -4,3 poin. Capaian realisasi sebesar 95,30% (tidak mencapai target).
2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Realisasi kinerja tahun 2025 (87,20), bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (91,47), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi turun 4,27 poin. Capaian realisasi sebesar 95,33% (tidak mencapai target).
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**
   Realisasi kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi tahun 2025 (87,20), bila dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD 2025-2029 (94,02), terdapat deviasi -6,82 poin. Capaian realisasi sebesar 94,02% (belum mencapai target). Bila dibandingkan dengan tahun 2023 (87,83), terdapat deviasi -0,63 poin atau capaian realisasi sebesar 99,28%.
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (jika ada)**
   Target Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional secara nasional tidak ada, sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi tahun 2025 terhadap target 2025, realisasi 2024, dan target akhir RPJMD 2025-2029

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena belum mencapai target. Beberapa penyebab utama ketidaktercapaian adalah karena:

a. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah/unit kerja pengampu perencanaan pembangunan daerah;
b. Belum meratanya kualitas SDM yang kompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang tersebar di seluruh perangkat daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan mitra-mitra pembangunan dalam pencapaian target-target pembangunan daerah;
d. Belum terwujudnya komitmen bersama dalam mewujudkan keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah;

Strategi peningkatan capaian adalah dengan:

a. Menyusun rencana kerja yang lebih komprehensif (calendar of event) link bukti dukung: https://s.id/LwFNw.
b. Meningkatkan kapasitas SDM perencana
c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala selama periode pelaksanaan melalui rapat-rapat koordinasi (link bukti dukung: https://www.instagram.com/p/DVNmBVSkRxf/?igsh=MWZmNHc2MmllOG9rYg== https://www.instagram.com/p/DVIQAdgkRm5/?igsh=MWZhc281NjZicnFibA==

   https://www.instagram.com/p/DQT1I-DkQiQ/?igsh=MXF4NGF5MW5neDY4Nw==

   https://www.instagram.com/p/DOvT7A4EcRg/?igsh=MTRlN3JqN2t3MDVuNw==

   https://www.instagram.com/reel/DO710YREWal/?igsh=bDlkOGo4cmVsaHhn

   https://www.instagram.com/reel/DO710YREWal/?igsh=bDlkOGo4cmVsaHhn

   https://www.instagram.com/p/DVNmBVSkRxf/?igsh=MWZmNHc2MmllOG9rYg==

d. Menyesuaikan target indikator melalui perjanjian kinerja perubahan (tahap konsolidasi dengan seluruh perangkat daerah)
e. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan mitra-mitra pembangunan (link: https://www.instagram.com/p/DSq4vWrEVwE/?igsh=dGo4ODYxM3BqeHFx)
f. Menerapkan manajemen risiko dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan (proses konsolidasi dengan Inspektorat).

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi sebesar Rp9.534.045.900,00. Realisasi anggaran sebesar Rp8.766.229.155,00. Efisiensi anggaran sebesar 3,52%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.226

Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi	P1	P2	P3	P4	Efisiensi
					(Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	(Pagu Anggaran/Target)	(P1/P2)	(1-P3)	(P4x100)
IPPN	9.534.045.800,00	8.766.229.155,00	91,5	87,20	100.530.150,86	104.197.221,86	0,96	0,04	3,52

Sumber: Biro Organisasi 2025, diolah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan Kegiatan yang cukup berhasil namun perlu perbaikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (realisasi anggaran 95,34%) dengan kegiatan:
   1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi angagran 90,64%) dengan kegiatan:
   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.227
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPPN

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,659,679,300.00	2,535,644,066.00	95.34
Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	2,093,498,700.00	2,042,619,157.00	97.57
Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65,012,700.00	58,858,613.00	90.53
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	339,720,600.00	310,305,615.00	91.34
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	161,447,300.00	123,860,681.00	76.72
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,874,366,500.00	6,230,585,089.00	90.64
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1,234,644,000.00	1,067,318,011.00	86.45
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)	4,847,142,500.00	4,416,198,154.00	91.11
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	792,580,000.00	747,068,924.00	94.26

Sumber: BKAD NTB, 2025

3.1.2.24 Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas

Sasaran strategis *Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas* diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebagai gambaran kualitas pelaksanaan demokrasi, persentase capaian pelaksanaan aksi HAM daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) yang mencerminkan kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui pencapaian indikator-indikator tersebut diharapkan tercipta kehidupan demokrasi yang sehat, aman, dan berkeadilan di Provinsi NTB. Realisasi kinerja sasaran strategis di atas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.228
Realisasi Kinerja Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76,37	75,37-78,63	76,37*	78,81-82,06	-	100	101,33	96,90	-
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65	59	83,75	-	NA	90,77	70,45	
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	49,76	75	49,76*	78,83	-	100	66,35	63,12	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

*Keterangan: * Data tahun 2024 karena data tahun 2025 belum ada. Rilis dari Kemendagri.*

A. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

IDI merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) di bidang politik yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kualitas demokrasi yang menggambarkan dinamika kehidupan politik di tingkat daerah, nasional, maupun global, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat. Penyusunan IDI merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Kelompok Kerja IDI Pusat, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik, bersama dengan pemerintah daerah. IDI pertama kali diinisiasi oleh Bappenas pada tahun 2009 dan mulai diukur bersama BPS dengan menghasilkan data awal pada tahun 2010, kemudian mengalami penyempurnaan dimensi dan metode pengukuran pada tahun 2021.
Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama yang dijabarkan ke dalam 22 indikator yang merepresentasikan penguatan nilai-nilai demokrasi di tingkat pusat maupun daerah. Dalam implementasinya, IDI juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi kepala daerah, termasuk Gubernur, sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan politik yang demokratis. Pelaksanaan dan koordinasi pengukuran IDI di tingkat daerah dilakukan melalui pembentukan Tim Kelompok Kerja IDI Tingkat Provinsi.
IDI terdiri dari 3 aspek dengan 22 indikator, ketiga aspek tersebut adalah aspek kebebasan terdiri dari 7 indikator, aspek kesetaraan terdiri dari 7 indikator dan aspek kapasitas lembaga demokrasi terdiri dari 8 indikator.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**
   Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi NTB pada tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh BPS. Sehingga capaian yang digunakan dalam perhitungan kinerja adalah capaian tahun 2024, yaitu sebesar 76,37. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka capaian ini berada di range target yang telah ditetapkan. Link bukti dukung https://ntbprov.go.id/post/indeks-demokrasi-indonesia-ntb-tahun-2024-naik-7637-ntb-makin-ramah-demokrasi
2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**
   Capaian IDI sementara ini sama dengan tahun lalu, jadi tingkat capaiannya 100%.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**
   Realisasi IDI tahun 2024 sebesar 76,37 mencapai 96,90% terhadap target akhir RPJMD (78,81).
4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**
   Tidak ada standar nasional untuk capaian IDI yang harus dicapai setiap provinsi, namun jika membandingkan capaian IDI Provinsi NTB dengan Provinsi NTT dan Bali, capaian Provinsi NTB pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi NTT dan Bali, yaitu sebesar 79,47 dan 88,34.
5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**
   Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Bakesbangpoldagri sebagai koordinator dalam pencapaian indikator IDI di daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain, pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan, pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya poltik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah, dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah.
   Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah Pembentukan Satgas Desa Bersinar, dan pembentukan Bale Mediasi. Hal penting lainnya dalam pencapaian IDI di daerah adalah koordinasi lintas sektor, karena indikator

pada ketiga aspek tersebut merupakan capaian urusan lain di luar urusan kesatuan bangsa dan politik.

Deskripsi/Tahun		2022	2023	2024
		Capaian	Capaian	Capaian
IDI Komposit		**73,38**	**70,03**	**76,37**
Aspek 1	**Kebebasan**	**76,75**	**64,49**	**73,19**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	89,48	89,67	89,85
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	60,54	9,60	74,63
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	91,23	65,56	74,63
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	72,73	72,73	72,73
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	78,27	78,27	67,18
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	54,78	50,67	58,70
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	79,62	72,89	68,83
Aspek 2	**Kesetaraan**	**77,24**	**79,26**	**80,55**
8	Kesetaraan Gender	70,51	70,26	84,98
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	67,69	76,92	70,77
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	64,00	68,33	66,67
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	81,29	80,15	80,94
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	97,11	97,20	97,27
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	83,72	85,86	89,60
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	76,85	77,34	77,77
Aspek 3	**Kapasitas Lembaga Demokrasi**	**65,44**	**64,46**	**74,50**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	28,57	15,38	47,37
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,06	82,48	85,50
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	54,55	54,55	68,18
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	18,18	59,09	81,82
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	70,56	71,92	73,18
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	100,00	100.00
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	74,20	79,40	88,40
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	66,67	28,33	35,00

Pada tahun 2024, indikator yang capaiannya lemah adalah pada indikator 9. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, indikator 21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dan indikator 22. Pendidikan politik pada kader partai politik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan melalui pembinaan generasi muda dalam politik, meningkatkan produk hokum yang merupakan inisiasi dari lembaga legislatif, peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta meminimalisir demo anarkis. Alternatif solusi yang dilakukan ke depan adalah:

1. Pembinaan politik kepada generasi muda;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas produk hukum daerah melalui inisiatif DPRD;
3. Advokasi untuk menambah jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi lintas sector untuk meminimalisir demo anarkis.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**
   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IDI pada tahun 2025 adalah sebesar Rp36,432,283,167 dengan realisasi anggaran sebesar Rp33,878,508,872. Efisien anggaran sebesar 8,23%. Rincian perhitungan efisiensi anggaran pada tabel di bawah.
7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**
   Program dan kegiatan yang efektif dalam pencapaian target indikator, sebagai berikut:
   a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (realisasi anggaran 93,64%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (realisasi anggaran 92,68%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (realisasi anggan 92,91%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (realisasi anggaran 98,48%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (realisasi anggaran 100%) dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

Program dan kegiatan yang kurang efektif dalam pencapaian target indicator adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (realisasi anggaran 88,81%) dengan kegiatan:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.229
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IDI

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	801,384,091.00	93.64
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	855,858,300.00	801,384,091.00	93.64
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika	23,800,228,167.00	22,057,906,533.00	92.68

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Serta Budaya Politik			
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	23,800,228,167.00	22,057,906,533.00	92.68
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,516,292,000.00	1,408,772,540.00	92.91
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,516,292,000.00	1408772540.00	92.91
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	618,603,600.00	609215160.00	98.48
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	618,603,600.00	609,215,160.00	98.48

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,924,520,000.00	3,924,396,388.00	100.00
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	3,924,520,000.00	3,924,396,388.00	100.00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5,716,781,100.00	5,076,834,160.00	88.81
Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3,344,595,800.00	3,282,365,997.00	98.14
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	2,340,185,300.00	1,763,269,984.00	75.35
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	32,000,000.00	31,198,179.00	97.49

Sumber: BKAD NTB 2025

Tabel 3.230
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
IDI	36,432,283,167	33,878,508,872	75.37	76,37	483,379,105.31	483.379.105,31	0,918	0,082	8,23

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025, diolah

B. Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian persentase capaian aksi HAM Daerah di Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebesar 59% dari target 65%, sehingga target tahun 2025 ini belum tercapai atau capaian nya hanya sekitar 90,77 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian indikator ini tidak memiliki basis data di tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2025-2029

Capaian persentase capaian aksi HAM Daerah di Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebesar 59%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 83,75%, maka capaiannya sebesar 70,45%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tidak ada standar nasional untuk capaian persentase capaian IDI yang harus dicapai setiap provinsi, selain itu juga tidak dapat membandingkan dengan Provinsi lain, karena keterbatasan sumber data.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Meningkatnya Aksi HAM di daerah melalui pemenuhan data dukung adalah upaya percepatan dan perwujudan kewajiban negara (Pemerintah Daerah) dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), terutama terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat) yang didokumentasikan secara akuntabel, sistematis, dan terukur sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Secara persentase, capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan sekitar 90,7 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Meskipun belum mencapai target, capaian 59% menunjukkan komitmen yang cukup baik dari Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan perapian, perencanaan, dan pelaporan aksi HAM di daerah. Capaian ini juga mencerminkan peningkatan konsistensi dalam pengumpulan data dukung dibanding tahun- tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat kesenjangan substantif yang perlu diperbaiki.

Dalam upaya memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di tingkat daerah, Pemerintah Daerah mencatatkan lompatan signifikan pada tahun 2025. Setelah capaian pada tahun 2024 berada pada status NA (belum terlaporkan secara optimal), komitmen pemerintah daerah meningkat pesat dengan berhasil memenuhi 59 data dukung aksi HAM pada tahun 2025. Peningkatan ini merupakan hasil dari perbaikan tata kelola data dan intensifikasi kolaborasi antar-perangkat daerah. Pemenuhan 59 data dukung tersebut mencakup pemetaan, laporan, dan evaluasi aksi HAM yang fokus pada kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas. Langkah ini sejalan dengan pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) tahun 2021-2025.

Meskipun capaian persentase pelaksanaan aksi HAM Daerah tahun 2025 belum mencapai target, namun capaian tersebut menunjukkan komitmen yang kuat. Dengan memperbaiki manajemen data, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan pemahaman substantif, target di tahun berikutnya sangat potensial untuk melampaui angka 65. Pada tahun 2025, kesenjangan antara target dan realisasi dipicu oleh beberapa kendala utama, seperti kualitas data dukung, koordinasi antar perangkat daerah yang masih lemah, keterbatasan pemahaman, dan prosedur yang birokratis.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator persentase pelaksanaan aksi HAM Daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5,615,282,500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5,323,522,571. Tidak ada efisiensi anggaran karena target tidak tercapai namuan anggaran terserap sangat besar.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan dalam pencapaian target adalah program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (realisasi anggaran 94,80%) dengan kegiatan :

a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
b. Fasilitasi Bantuan Hukum

Program ini dinilai belum efektif dalam pencapaian target, sehingga diperlukan perbaikan berupa penguatan kelompok kerja daerah, digitalisasi pelaporan, fokus pada substansi HAM dan evaluasi tengah tahun.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.231
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	5,615,282,500.00	5,323,522,571.00	94.80
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2,948,763,300.00	2,761,758,610.00	93.66
Fasilitasi Bantuan Hukum	2,666,519,200.00	2,561,763,961.00	96.07

Sumber: BKAD NTB 2025

C. Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

IPKKU merupakan alat ukur capaian penyelenggaraan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar. IPKKU merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum, Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran.

a. Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian IPKKU Provinsi NTB pada tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga realisasi yang digunakan adalah

realisasi tahun 2024. Jika dibandingkan antara target dengan realisasi, capaian kinerja sebesar 66,35%

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

   Capaian IPKKU tahun 2025 belum rilis, sehingga menggunakan realisasi tahun 2024. Bisa dibandingkan maka capaiannya sebesar 100%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD**

   Realisasi IPPKU tahun 2025 belum di rilis, namun jika membandingkan persentase capaian tahun 2024 dengan target akhir RPJMD (76,37), maka capaianya 96,90 %.

4. **Perbandingan Realisasi Knerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

   Tidak ada standar nasional untuk capaian persentase capaian IPKKU yang harus dicapai setiap provinsi, selain itu juga tidak dapat membandingkan dengan Provinsi lain, karena keterbatasan sumber data.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi**

   Faktor-faktor yang belum optimal dalam pencapaian kinerja adalah:

   a. Tingkat pelanggaran cukup tinggi misalnya pelanggan dalam penataan Pedagang Kaki Lima, bangunan tanpa izin
   b. Monitoring dan evaluasi yang belum berjalan secara berkala
   c. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait
   d. Keterbaasan sumber daya manusia
   e. Sarana dan prasarana yang terbatas

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada indikator IPKKU pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5,716,781,100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5,076,834,160. Tidak ada efisiensi anggaran karena anggaran terserap cukup besar namun belum ada kepastian pencapaian indikator.

7. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan**

   Program dan kegiatan pada Bakesbangpol yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IPKKU Provinsi NTB meliputi Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (realisasi anggaran 88,81%) dengan kegiatan

   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas
   b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
   c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

   Program ini kurang efektif dalam pencapaian target.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.232

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator IPKKU

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5,716,781,100.00	5,076,834,160.00	88.81
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3,344,595,800.00	3,282,365,997.00	98.14
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2,340,185,300.00	1,763,269,984.00	75.35
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	32,000,000.00	31,198,179.00	97.49

Sumber: BKAD NTB 2025

3.1.2.25 Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dan Persentase Inovasi yang Diterapkan dalam Pembangunan Daerah. Adapun capaian sasaran kinerja Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.233

Realisasi Kinerja Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025		Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)	Capaian Triwulan IV Tahun 2025 terhadap 3, 4, 6, 7 (%)			
			Target	Realisasi TW IV			Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Akhir Jangka Menengah (Tahun 2030)	Target Nasional (jika ada)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8=5/3*100)	9 (9=5/4*100)	10 (10=5/6*100)	11 (11=5/7*100)
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	NA	50	60	100	-	-	120	60	-
Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	94,63	95,58	100	100	-	105,67	104,62	100	-

Sumber: Bappeda NTB 2025, diolah

A. Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator persentase kebijakan berbasis bukti diperoleh dari perbandingan jumlah program unggulan Provinsi NTB yang didukung kajian atau inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah dibagi dengan 10 program unggulan Provinsi NTB dikali 100%. Realisasi persentase kebijakan berbasis bukti tahun 2025 sebesar 60% dari target 50% atau capaiannya sebesar 120% dari target. Link bukti dukung https://drive.google.com/drive/folders/1ATR3mREn3-WBw25_vtolr6VnJ4sm92tc. Adapun dukungan kajian atau inovasi untuk program unggulan di Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

Tabel 3.234
Kajian/Inovasi Dalam Mendukung Program Unggulan
Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Program Unggulan	Jumlah Kajian/ Inovasi	Judul Riset/ Inovasi
1	NTB Sehat dan Cerdas	3 Judul	Studi Pengembangan SDM Menuju NTB Emas 2024
			Optimalisasi Pemanfaatan Produk Olahan Berbasis Kelor dan Rumput Laut Untuk Mencegah Stunting dan Mendukung Program MBG
			Hilirisasi Kelor dan Rumput Laut untuk Mencegah Stunting dan Mendukung Program Makan Gizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB
2	Desa Berdaya	1 Judul	Intervensi Sosial Berbasis Komunitas dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural dan Meningkatkan Status Sosial di Kawasan Perdesaan di NTB
3	NTB Inklusif		
4	NTB Agromaritim	3 Judul	Penelitian Hilirisasi Nira Aren Menjadi Nira Segar dan Sirup Aren Terkemas
			Implementasi Produk Turunan Nira Aren Untuk Mendukung Produk Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu NTB
			Riset Kultur Jaringan Kurma
5	NTB Pariwisata Berkualitas	4 Judul	Riset Joki CIlik di Provinsi NTB
			Tradisi Merarik Suku Sasak Sebagai

No.	Program Unggulan	Jumlah Kajian/ Inovasi	Judul Riset/ Inovasi
			Penyangga Pariwisata NTB
			Ulama Lombok,Genealogi Keilmuan & Tariqah : Menuju Pariwisata Mendunia
			Riset Standarisasi Peresean di NTB
6	E-Mania (Ekraf Mendunia)		
7	NTB Terampil dan Tangkas		
8	NTB Lestari Berkelanjutan	2 Prototype	Penelitian dan Pengembangan Bricket Biomassa
			Pengembangan Pyrolisis Portabel
9	NTB Good and Smart Governance	3 judul	Penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek (RIPJ-PIP) Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029
			Penyusunan Review AMDAL
			Integritas Birokrasi dan Resiko Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Unggulan di Provinsi NTB
10	NTB Connected		

Sumber : BRIDA Provinsi NTB 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator persentase kebijakan berbasis bukti merupakan indikator baru dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Pada tahun 2024 realisasi indikator ini tidak ada, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Realisasi persentase kebijakan berbasis bukti tahun 2025 sebesar 60% atau 60% dari target akhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Di tahun 2030 diharapkan ada dukungan dalam bentuk kajian atau inovasi dalam mendukung seluruh program unggulan yang ada di Provinsi NTB.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Kebijakan berbasis bukti merupakan bentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong transformasi dan menunjang berbagai kegiatan manusia melalui perumusan kebijakan yang tepat. Kebijakan berbasis bukti sudah dan sedang terus diterapkan di Indonesia, meskipun tingkat keberhasilannya bervariasi di berbagai sektor. Pemerintah saat ini

menjadikannya sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan kualitas tata kelola publik menuju visi Indonesia Emas 2045. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi motor utama dalam menyediakan evidensi ilmiah bagi kementerian dan Lembaga, sementara di daerah ini mejadi tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Namun kebijakan berbasis bukti bukan menjadi indikator kinerja dari BRIN, sehingga indikator persentase kebijakan berbasis bukti untuk Provinsi NTB tidak bisa dibandingkan secara nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Pencapaian indikator kinerja kebijakan berbasis bukti didorong adanya sinergi antara *stakeholder* dalam pengembangan dan pemanfaatan riset dan inovasi di Provinsi NTB, terutama kolaborasi pentahelix pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, media dan masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan Provinsi NTB menerima Apresiasi BRIDA Optimal Tahun 2025 di Jakarta oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja persentase kebijakan berbasis bukti adalah sebagai berikut.

Tabel 3.235
Permasalahan dan Upaya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3. Anggaran riset atau inovasi ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2025 yang menyebabkan tidak cukupnya waktu pelaksanaan penelitian karena pelaksanaan riset umumnya membutuhkan waktu 90 hari,	4. Optimalisasi waktu yang tersedia untuk melaksanakan riset. 5. Menyusun rencana penelitian dalam setahun kedepan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan sehingga anggaran riset dan inovasi dialokasikan pada APBD murni tahun berikutnya.
4. Terbatasnya sumber daya manusia untuk jabatan fungsional peneliti, fungsional perekayasa, fungsional litkayasa, fungsional analis data ilmiah serta fungsional analis pemanfaatan teknologi	6. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia untuk jabatan fungsional tertentu dalam mendukung riset dan inovasi di daerah serta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut.
5. Ekosistem penelitian dan inovasi belum terintegrasi	7. Mendorong kolobarasi pentahelix pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, media dan masyarakat
6. Hasil riset dan inovasi belum	8. Melaksanakan forum diseminasi

maksimal dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	hasil riset dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi daerah melalui perumusan kebijakan yang tepat.

Sumber : BRIDA Provinsi NTB 2025

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti sebesar Rp 3.081.793.430,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.829.631.568,00. Efisiensi anggaran sebesar 23,49%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (realisasi anggaran 91,82%) dengan kegiatan:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.236
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,081,793,430.00	2,829,631,568.00	91.82
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	240,925,000.00	240,553,962.00	99.85
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1,609,284,640.00	1,391,771,506.00	86.48
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	637,130,290.00	619,934,980.00	97.30
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	594,453,500.00	577,371,120.00	97.13

Sumber: BKAD NTB 2025

Tabel 3.237
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/ Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	3.081.793.430,00	2.829.631.568,00	50	60	47.160.526,13	61.635.868,60	0,77	0,23	23,49

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

B. Indikator Persentase Inovasi yang Diterapkan dalam Pembangunan Daerah

a. Analisis Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan daerah diperoleh dari perbandingan jumlah inovasi daerah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dalam *Innovative Government Award* (IGA) dibagi jumlah inovasi daerah yang memenuhi kriteria kematangan atau sudah terimplementasi dikali 100%. Jumlah inovasi yang diajukan ke *Innovative Government Award* tahun 2025 sebanyak 139 inovasi, sehingga realisasi persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan daerah sebesar 100% dari target 95,58% atau capaiannya sebesar 104,62% dari target. Link bukti dukung https://ntbprov.go.id/post/ntb-masuk-kategori-provinsi-sangat-inovatif-di-iga-2025#:~:text=Provinsi%20NTB%20%7C%20NTB%20Masuk%20Kategori%20Provinsi%20Sangat%20Inovatif%20di%20IGA%202025. Dari 139 inovasi yang diajukan tersebut sebanyak 83 inovasi berbentuk non digital, 3 berbentuk teknologi, dan 53 berbentuk.digital (tabel di bawah)

Tabel 3.238

Data Inovasi Daerah Provinsi NTB IGA Tahun 2025

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
1	Upaya Penyelamatan Plasma Nutfah Lokal Daerah Nusa Tenggara Barat Melalui Kegiatan Observasi dan Pendaftaran Varietas Lokal	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=0DEzn3-3Ww0
2	Mengolah Limbah menjadi berkah : "Dari Batang Tembakau Virginia Menjadi Briket Arang & Pestisida Organik yang bernilai Ekonomi"	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://res5.tuxedovation.com/99a59ebca0d7bdd8f9e47aca796a3662b458b1ea.mp4
3	Eduwisata Keilmuan dan Teknologi Membangun Generasi Adaptif dan Inovatif NTB	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=M2mfBtxKuW g
4	Batik Inklusi Karya Anak Istimewa SLB SE-NTB	Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=eJyZrTizr18
5	Pelestarian Budaya Wastra Berbasis Kearifan Lokal Mulai Dari Budidaya Kapas, Pewarna Alami Hingga Beragam Motif Tenun "Andi & Dina "	Andi dan Dina Foundation	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=KYlCgnlk7B4
6	Berkat Program Inkubasi Bisnis BRIDA NTB, UMKM MANHA 99 Berhasil Naik Kelas, "Dari mengolah pisang dan limbah ke Pasar Wisata Nasional"	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=tobdy2SffUc
7	Manis Tanpa Gula, Subur Tanpa Limbah : Budidaya Stevia dan Daur Ulang Limbah Hidroponik	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://youtu.be/NxKrQ5IjI9Q?si=2m0vUQZKXR2kkC4L
8	Dari Teaching Factory Menuju Konversi Kendaraan Listrik untuk Mendukung UMKM Mandiri dan Pariwisata Kelas Dunia	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=y1Ntvd_KXRw
9	RUM Innovation: Dari Training Center Ke Sekolah Industri Pertambangan Untuk Masa Depan SDM NTB Yang Unggul	Yutphi Iriandi, ST	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=JsYELIrfvtQ&t=65s
10	Teh Buah Pala "Ye Ga Tea" Lombok Tengah. Dari Yang Dibuang Menghasilkan Uang	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=CASHDRxuVHg
11	Menyulap Lahan Kering Menjadi Pusat Kurma dan Kacang Sacha Inchi Menuju NTB Makmur Mendunia	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=l4KICz8gqLA& t=21s
12	Dari Kotoran Ternak Lahirlah Pupuk Istimewa, Kampung Anggur Hingga Racikan Wine Lombok Untuk Mendukung Destinasi Super Prioritas Nasional	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=ichXYh5gsJE& t=18s

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
13	SIGITA TABUH (SISTEM DIGITALISASI DATA TAMBAT LABUH) DIPELABUHAN PERIKANAN LABUHAN LOMBOK	Dinas Perikanan dan Kelautan NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=F3Umnkq0Nq w
14	Penerapan Teknologi Inovasi Hidroponik untuk Mendukung Wisata Halal dan Parawisata Berkelas dunia	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=FepRjHYvqwg
15	Kosmetik Alami Iwani: Mendukung NTB Hijau Dan Wisata Bahari Berkelas Dunia	Iwin Insani	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=vMTt3bTydx4
16	Inovasi Pembuatan Busana Kerja Muslim dengan Teknik Kombinasi Tenun Khas Sasak (Lombok NTB) SMKN 7 Mataram	SMKN 7 Mataram	Non Digital	https://res5.tuxedovation.com/75cffd39132f0242b9ff02c4a64766f9b9710376.mp4
17	Batik Sasambo SMKN 5 Mataram	SMKN 5 Mataram	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=DdEZzdxnq2I, https://www.youtube.com/watch?v=XQfKOj05PW8
18	Pusat Rekreasi Masyarakat (PUREKMAS)	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=jrx6xuBnmNY
19	Alat Penetasan Telur Unggas tenaga Surya SMK 1 Kuripan	SMK 1 Kuripan	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=P0tScugHbdg&t=380s, https://www.youtube.com/watch?v=XwvNYlX7oE4 &t=96s
20	Agribisnis Melon Golden (SMK 1 Kuripan)	SMK 1 Kuripan	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=TzTVjUdNx2w
21	Aplikasi Portal Oleh-Oleh Khas Sumbawa	Universitas Teknologi Sumbawa	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=V3MtWaux4M 4
22	NTBelib Digital Library	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB	Teknologi	https://www.youtube.com/watch?v=dXMgKEMqT9 g
23	APLIKASI ENSIKLOPEDIA KEBUDAYAAN SUMBAWA	Universitas Teknologi Sumbawa	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=Df8DQtQfhhE &t=1s
24	Genset Silent	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB	Non Digital	https://res5.tuxedovation.com/55ac0a1cde84d8f65fe99c5b38e2904275526f91.mp4
25	Battery Charger Semkasa Bolo	SMKN 1 BOLO	Non Digital	https://res5.tuxedovation.com/bae192956f2ea3fd8aeb3a60c7d0b1213a0dd1b2.mp4
26	Sistem kartu terintegrasi berbasis RFID menggunakan ESP8266 (FASE 1)	SMK NEGERI 2 DOMPU	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=VG1P940yYX M, https://www.youtube.com/shorts/B7xObDsJfHs
27	PePADu Plus (Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus)	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=2WnY8g67kZU&t=25s

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
28	ECOGREEN RESTAURANT (Desa Wisata Bonjeruk Berbasis Wisata Alam dan Budaya)	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=4s34VchPw-c&t=239s
29	Kopi Jago SMKN 1 SIKUR	SMKN 1 SIKUR	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=PP3eZBzLb1Y&t=205s
30	Aesthetic Product EcoPrint	SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_7xDt3yQ5I
31	99 Desa Wisata	Dinas Pariwisata NTB	Teknologi	https://www.youtube.com/watch?v=51KZNo_CIbA
32	Aneka Motif Batik Pujasera SMKN 1 Sikur	SMKN 1 SIKUR	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=T2Rm_yeDPLg
33	Mobil Edukasi Bencana	Dinas Sosial NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=pMJP9d5IAL4
34	Pemanfaatan Limbah Batok Kelapa menjadi Tempat minum (TEKO) SMKN 1 Sikur	SMKN 1 Sikur	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=gCHaS4LtOgY
35	PINALO (Peluang Usaha Serat Nanas Sebagai Bahan Baku Tekstil)	Aisyah Odist	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=VnIk_KB779w
36	SIRUKOGALAR PLUS	RSJ Mutiara Sukma NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=OaxqY4aCdVY
37	Membuat minuman N.A Drink (Nata Aloevera) SMKN 1 SIKUR	SMKN 1 SIKUR	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=PP3eZBzLb1Y&t=206s
38	psikolog goes to school	RSJ. Mutiara Sukma Prov. NTB	Non Digital	https://res5.tuxedovation.com/fabd5be47207c07714c7c7d0cf41cb3f58aa5c99.mp4
39	POJOK HEALING	RSJ. Mutiara Sukma Prov. NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=HC_bNWGU9gg&t=32s
40	Minuman Nata de Coco (SMKN 1 Kuripan)	SMKN 1 Kuripan	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=XwvNYlX7oE4&t=96s
41	Inovasi System Irigasi Tetes Tenaga Surya di SMKN 1 KURIPAN	SMKN 1 Kuripan	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=hEJrRT5atto
42	Electric Bike (EBIKE) Eduwisata Teknologi	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=HPIxCFF1r0I
43	SISTEM INFORMASI REHAB REKON (SIRKON)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=QdCbmQJwg3 k&t=10s
44	Sistem TPP ASN Provinsi NTB	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=5FuBIh6iGgM
45	Sistem Informasi Pembangunan (SipBang2)	Ahmad Riadi	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=gYsRAgkjpUc

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
46	SAMBIKA KRIM	SMK NEGERI 1 GERUNG LOMBOK BARAT	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=fYDTCe-D-fI
47	BAHAN PENGENDALI OPT RAMAH LINGKUNGAN SPESIFIK LOKASI	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP) Prov. NTB	Non Digital	https://youtu.be/VQtImJYZa2A?si=bTjXk8eTX2jIY0Y1
48	Anjungan Pendaftaran Mandiri V2.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=785Yl0jW0v8
49	E-PIDALIT (Elektronik Pengurusan Ijin Data dan Penelitian) di RSUD Provinsi NTB	RSUD Provinsi NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=K-TDRfKz-H0&t=32s
50	PCC (Province Command Center) 119 NTB	RSUD Provinsi NTB	Teknologi	https://www.youtube.com/watch?v=93oJO6FDdYQ&t=1s
51	Desa Wisata Bahari Tolouwi	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=GSj0gLvGvkg
52	Lestari NTB	Dinas LHK NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=r1FkP4ObZ7c, https://www.youtube.com/watch?v=IBSiKeUrSWU
53	PT. Berkahi Gumiku Lestari - Maggot UGOTIN (Pakan Ternak Premium)	Windu Fajar Arum	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=G-i8FetBWgw
54	Media Center Dinas Sosial Prov. NTB	Dinas Sosial NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=p5ngErAiNWo &t=2s
55	Kafe Literasi Keliling (FEELING)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=Ip_pI5KOVuc
56	SIMADU (Sistem Manajemen ASN Terpadu)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=g5S9RFXSVX8&t=48s
57	DESA WISATA MALAJU	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=FMYJr-pTTJY
58	LMS E-learning BPSDMD Provinsi NTB	BPSDM Provinsi NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=ValOsLa9LI0& t=68s, https://www.youtube.com/watch?v=8BU- pCY7Y_Y
59	Desa Wisata Kampung Adat Suku Sasak Sade	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=TZZEgNFOVEc
60	DESA WISATA KEMBANG KUNING	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=N4fDL6lqiKc, https://www.youtube.com/watch?v=lmgKYVlaRHo
61	Screening On Cataract (Serioc)	RS. Mata Nusa Tenggara Barat	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=dZKtV9LsPDs&t=1s
62	Petinang Pintar (Petinang late)	SMK 2 Sumbawa Besar	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=3eIR_dnjmOU &t=391s

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
63	QRIS (Samsat Delivery)	BAPPENDA NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=gOiiX_82KFs, https://www.youtube.com/watch?v=onuss8Er4VQ
64	TENPURUNG (TEKNOLOGI PENGUSIR BURUNG)	SMKN 1 JONGGAT	Non Digital	https://drive.google.com/file/d/1meoh0- WCqajDtie_0e-QRFaXIDqRw-0I/view?usp=sharing
65	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP)	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Non Digital	https://res5.tuxedovation.com/0d35c3e6301e340792ac52e6dba7bee4fd81d8b2.mp4
66	Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	DPMPD Dukcapil NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=nfAn352CFoY
67	SPAB – NTB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	DIKBUD NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=4ppqgp4erOc, https://www.youtube.com/watch?v=THweT6t0EyI&t=31s
68	Aplikasi Aksi Cepat / Codeblue RSUD Provinsi NTB	RSUD Provinsi NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=jrDo65bLz8w
69	Percepatan 5 Pilar STBM	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=2HcIFd7rNig
70	SIMADU BERDANSA	RS MANDALIKA	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=Huko7YAlpvE
71	BETRIK SMKN 1 JONGGAT	SMKN 1 JONGGAT	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=fr2sLGjP40k
72	Panel Control Kincir Tambak Udang Automatis SMKN 1 Gangga	TITL M. Takdir Akbari Putra, ST SMKN 1 Gangga	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=tjVGXv9TuLM
73	LAPOR RSUD Provinsi NTB	RSUD Provinsi NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=SdN2k9xlC7k, https://www.youtube.com/watch?v=R0nEtH6PdOA
74	PLTS PELADANG HUTAN (SMKN 1 LINGSAR)	SMKN 1 LINGSAR	Non Digital	https://drive.google.com/file/d/1atT9RawsHpoag7UDl2paUH-HkGpZYFRr/view?usp=drive_link, https://www.youtube.com/watch?v=ouscKzog3nk
75	SEKOLAH MANDIRI ENERGI SMKN 1 LINGSAR	SMKN 1 LINGSAR	Non Digital	https://drive.google.com/file/d/1-LZaTIVg46FEPAln67zjFG45BqgEG3qV/view?usp=drive_link, https://www.youtube.com/watch?v=f6iMGH6k7jA
76	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAGA NTB	BPBD Provinsi NTB	Digital	https://youtu.be/YAI8zLYK8Kk?si=Fzn5IS9C_g-B9fiM
77	Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Perangkat Daerah (SIAP)	Inspektorat Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=7NezQSyMhO k

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
78	Konversi Motor Listrik Bertenaga baterai	Hadi Kurniawan, S.T	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=E_dE3cge7uU
79	SEPEDA LISTRIK DIKBUD NTB (SMKN 1 LINGSAR)	SMKN 1 LINGSAR	Non Digital	https://static2024.tuxedovation.com/d547b98cc96d70838d7ff0df54396c99eb834f3e.mp4, https://www.youtube.com/watch?v=j3fmkfrZm7A
80	Pembelajaran Budidaya Melon Hidroponik Sistem Sirkulasi DFT (Deep Flow Technique) di SMKN Pringgasela	Gita Salami, SP. SMKN 1 Pringgasela	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=u0NiFv9yr_A, https://www.youtube.com/watch?v=AOAfa3cDkm 8
81	Ontel Jurusan Otomotif Kren (OJOK) SMKN 3 Selong	SMK Negeri 3 Selong	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=dUXYa0Z9tNw
82	Pengering kakao SMKN 1 GANGGA	SMK Negeri 1 Gangga	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=cRrDfMAqVW M
83	Smart Shelf (Rak Pintar)	SMKN 1 PRAYA TENGAH	Digital	https://static2024.tuxedovation.com/7fd0cc228768a4c8278cdd051effdd64d2920693.mp4, https://www.youtube.com/watch?v=YcjRK0DTiRU, https://www.youtube.com/watch?v=F4_wa3YnFVc
84	Desain Busana Motif Ampenan - SMK Negeri 1 Mataram	SMKN 1 MATARAM	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=RhLR1oZbrgw
85	JIBAS AKADEMIK SMKN 1 JEROWARU	Kepala SMKN 1 Jerowaru beserta Team	Digital	https://res5.tuxedovation.com/b762ec42c28ad9c49aeccb331035ce4128cdae23.mp4
86	APLIKASI DASHBOARD TERINTEGRASI (Command Center)	Diskominfotik NTB	Digital	https://drive.google.com/drive/folders/1kRo1nL1ZpXvjeI5PL8KgqoJRvRsfv93H, https://www.youtube.com/watch?v=o06qehrKN2Q
87	SQUADRONES.AI	Ashary Gartanto	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=xJa0BNbfifY&t=23s
88	SIKMASKOT (Survei Kepuasan Masyarakat Online Teritegrasi)	Abdul Aziz Rifaldi, S.STP	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=MoN3Hru6DbQ, https://www.youtube.com/watch?v=AylOMyZJWqo
89	Aplikasi ROSI MANDALIKA	Apt. MS Firmansyah, S.Farm	Digital	https://drive.google.com/file/d/1Ut9f7n_awzDRSgfCu9FSvJREGGD9ljck/view?usp=sharing
90	Kawasan Bebas Riba	Diskop UKM NTB	Digital	https://youtu.be/x6Qu8VuNxJU?si=6bGSerzbgFpe 9R0N
91	GERAI SMK (Marketplace)	SMKN 2 Mataram	Digital	https://youtu.be/DrDYuCRCY2o?si=k1SAO_3OKV8 2wXfl

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
92	Spot Olahraga Desa Wisata Mantar	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://youtu.be/9ZdU2gG4J9s?si=PIqTuh2wzW6A_ktq
93	Aplikasi Nikahyuk-Vendor Marketplace dan Organizer (Tenant Inkubasi BRIDA)	Wahyu Hidayat, S.STP, MAP	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=ybNjGwibnM4, https://www.youtube.com/watch?v=wq5w2kmyJSs
94	NTB Satu Data	Diskominfotik NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=Kl3JZcuTu0Y&t=2s
95	NTB MALL	Dinas Perdagangan NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=D4tCzauRvYg
96	Cidomo Listrik (Dolis)	SMKN 3 Mataram	Non Digital	https://youtu.be/YNkTR9DqNJY?si=wFbhGbODeYmwFMKL
97	Mobil Listrik Wisata	SMKN 1 Lingsar	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=6WBAecaoVb Y, https://www.youtube.com/watch?v=dF4kw- Jf6bM
98	Sistem Informasi Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi (SILAMO)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=7Cdir7BU8RI
99	R-One Smekti (Rinjani Sopok - SMK 3 MATARAM Konversi Mobil Konvensional ke Mobil Listrik)	SMKN 3 Mataram	Non Digital	https://youtu.be/puoMxjeQXdQ?si=NhQ9I9DbSYA DVb5P
100	e-Wisma NTB	DINAS PENGHUBUNG NTB	Digital	https://youtu.be/8oQ9iGQe0y0?si=tsFbqUGK1NXe 7HM2
101	NTB MED'X (NTB Medical Expert)	RSUD Provinsi NTB	Non Digital	https://static2024.tuxedovation.com/355903ef08d0c2bae12dbd466b4dd09c1f639c11.mp4
102	NTB Care	Diskominfotik NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=-PZhZXIR0ik
103	BATIK SASAMPAT (INOVASI SEKOLAH LUAR BIASA/SLB) 1 KOTA MATARAM	SLB 1 Kota Mataram	Non Digital	https://youtu.be/BBX8KAYg1ho
104	Sistem Informasi Pengendalian Pengawasan (SIMDALWAS)	Inspektorat NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=waehc1FdvJQ &ab_channel=NuansaGISKonsultan
105	Rumah Bahasa	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://youtu.be/lnnItfqsmoI?si=eNqvaAkM85ZNv bXQ
106	Life Jacket dari Limbah Botol Plastik	SMKN 1 TARANO	Non Digital	https://youtu.be/gcEb8SLmMZE?si=If- vqIHGumrp9FiS
107	SHARECATION Apps	ALMANIK BALINGGA, S,Kom	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=eiKfeaOHxNw &ab_channel=BRIDANusaTenggaraBarat

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
108	BALE Apps	INDRA AGUS SAPUTRA, A.Md	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=eiKfeaOHxNw&ab_channel=BRIDANusaTenggaraBarat, https://www.youtube.com/watch?v=0HaQAHWLSJ w
109	Posyandu Keluarga	Dinas Kesehatan NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=rLWV4ciZyIU&t=1s
110	Pengembangan Kendaraan Listrik (PENGENDALI)	Dinas Perindustrian NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=bUjS8EP0FUU &ab_channel=DINASPERINDUSTRIANPROVINSINTB
111	1000 Cendekia	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=7hawDJ2jBPU
112	SMaRT KPH (Sistem Manajemen Informasi Terpadu Kesatuan Pengelolaan Hutan) Rinjani Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB	Digital	https://kmisfip2.menlhk.go.id/image/video/9ad6156f13d7f3097c47eab7b381a504_file.mp4, https://www.youtube.com/watch?v=CQqvnmohOZ M
113	SIMANIS (Sistem Informasi Manajemen Industri)	Dinas Perindustrian NTB	Digital	https://res3.tuxedovation.com/c86ccf7114400bd52df3abaf3439c6528e813091.mp4
114	RSMA (HOME CARE)	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=hb_T0iGkSwk&ab_channel=NICKNAME
115	Rumah Perlindungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB	DP3AP2KB NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=wRE-i9FjON0
116	e-SAKIP Pemerintah Provinsi NTB	Biro Organisasi Setda NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=oVlyf2RUIM0
117	Aplikasi Klinomics UMKM	Universitas Teknologi Sumbawa	Digital	https://res3.tuxedovation.com/1d2b34c2cc410ebbd5a3ad52f3c6564a37642129.mp4, https://www.youtube.com/watch?v=wyItEXAxCkc &ab_channel=NICKNAME
118	Mesin Pemipil Jagung Tornado tanpa kupas 2000 Rpm (PIJAT KUPAS 2000 Rpm SMKN 1 SAKRA)	SMKN 1 Sakra	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=u434zMT4Z_0 &t=40s&ab_channel=NICKNAME
119	Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah NTB	BRIDA Provinsi NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=FmXE0gH8SnQ&ab_channel=NICKNAME
120	Aplikasi Ruang Temu	Universitas Teknologi Sumbawa	Digital	https://res3.tuxedovation.com/47f82dd1c9b95df2

No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
				62b142e11d796806f3816332.mp4
121	Dashboard Pendidikan Inklusif NTB	DIKBUD NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=ELt-fw9VdoA
122	PAMOBVIT (Pengembangan Kapasitas dalam Pengamanan Obyek Vital Daerah)	POLPP NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=yMF_gXW7D3E&ab_channel=NICKNAME
123	Mahadesa	NGO	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=Rei1Heiyfag&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=8sh3QW_DA1 M&feature=youtu.be
124	Lapak pengaduan SatpolPP Prov. NTB	POLPP NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=53xt1cJ2YzA&ab_channel=PolppProvinsiNTB
125	KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) BERBASIS KOMODITAS CABE TERINTEGRASI UNGGAS (TanCabGas)	Dinas Ketahanan Pangan NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=ANR02xckTTs&t=5s&ab_channel=DinasKetahananPanganNTB
126	SMK Mandiri Energi Terbarukan	SMKN 1 Lingsar	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=f6iMGH6k7jA&ab_channel=SMKN1Lingsar
127	Samsat Autodebet ASN	BAPPENDA PROV. NTB	Digital	https://res3.tuxedovation.com/e789cc8b5004d37b201e9ee803ede4a35f0a767f.txt
128	NTB Belajar Dari Rumah	DIKBUD NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=hV_S-CDVyuI
129	PIROLISIS (MESIN PENGOLAH SAMPAH PLASTIK MENJADI BBM)	Andrew Sinclair	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=uS9ycest0nw&t=2s&ab_channel=GeoTrashManagement
130	Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Beasiswa (SIMILEA)	Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=-LkQ7DHbWLs&ab_channel=NICKNAME
131	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (SIMPEL PBJ)	Biro PBJ	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=Xr3kA-iYUqw&ab_channel=BiroPengadaanBarangdanJasaNTB
132	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Ramah Lingkungan	Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB	Non Digital	https://res3.tuxedovation.com/7b289b06b6001165ec043caa5a7df589a6ee3365.mp4

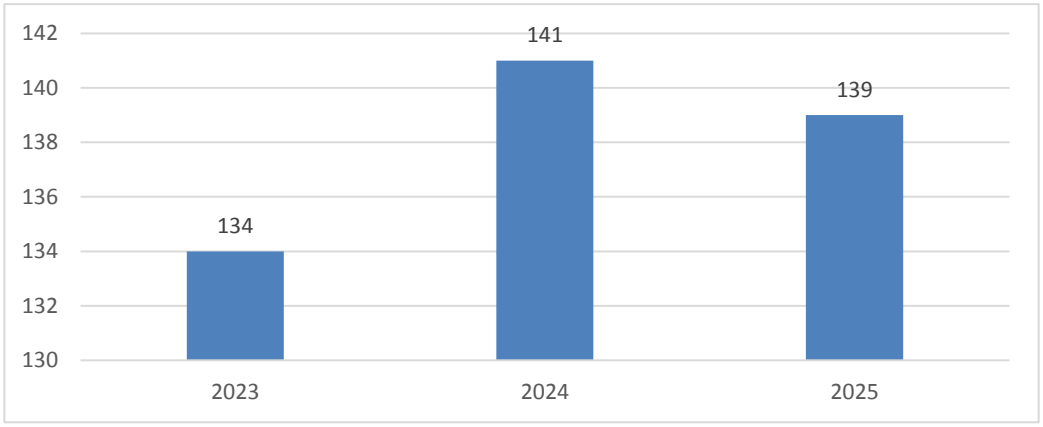
No.	Nama Inovasi	Nama Inisiator	Jenis	Link Video
133	Pengembangan Produk Olahan Serbat Instan SMK 1 Kuripan	SMK 1 Kuripan	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=mDwNdttqKro&t=80s&ab_channel=SMKN1KURIPANMEDIA
134	SISTEM LAYANAN BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN (SISLABLING) BERBASIS WEB	UPT Laboratorium Lingkungan	Non Digital	https://res3.tuxedovation.com/8992e65ef924fc0ba4bb02a8be71aa4c5f982fd5.mp4, https://www.youtube.com/watch?v=6YDeeUPHRm 4
135	Desa Wisata Kampung Anggur	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=Xk8ZXoifbUE&ab_channel=TANJUNGTV
136	Desa Wisata Hijau Bilebante	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=FWxCPFYQj1E&ab_channel=CNNIndonesia
137	Kuliner, Bahari berbasis Budaya Pulau Bungin	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/watch?v=M_JKhKXI5jA
138	DESA WISATA KAMPUNG BAWANG BIMA	Dinas Pariwisata NTB	Non Digital	https://www.youtube.com/channel/UCG_XTEXj_sU KGShDMUlVU3g
139	E-Journal Bestari BPSDMD Provinsi NTB	BPSDMD Provinsi NTB	Digital	https://www.youtube.com/watch?v=F3iRQzwtmvo

Sumber: BRIDA NTB 2025

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan daerah tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.38
Jumlah Inovasi Provinsi NTB Tahun 2023-2025



Sumber : BRIDA Provinsi NTB, 2025

Pada tahun 2024 persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan daerah sebesar 94,63% dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 100%. Artinya ada peningkatan realisasi tahun 2025 terhadap realisasi 2024 sebesar 105,67%. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh jumlah dan target inovasi yang diajukan dalam *Innovative Government Award* (IGA). Tahun 2024 jumlah inovasi yang diajukan sebanyak 141 inovasi dari target 149 inovasi, sementara di tahun 2025 ada penurunan target disebabkan penyesuaian terhadap capaian tahun sebelumnya dan ketersediaan anggaran.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029**

Realisasi persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan tahun 2025 sebesar 100% atau sama dengan target akhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Realisasi untuk indikator ini tidak bersifat kumulatif, sehingga walaupun capaiannya 100%, namun ada perbedaan jumlah untuk inovasi yang akan diajukan di tahun 2030 dalam *Innovative Government Award* (IGA). Jumlah inovasi ini tentunya akan terus meningkat setiap tahunnya.

4. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan bahwa Prioritas Nasional 4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesektaraan gender serta Penguatan peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas dengan salah satu sasarannya adalah Memperkuat Iptek, Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diukur dari : (a) Peringkat Indeks Inovasi Global, (b) Tingkat Pengangguran Terbuka(%),(c) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%PDB) dan (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%PDB). Indeks Inovasi Global adalah proyek yang terus berkembang yang

dibangun berdasarkan edisi-edisi sebelumnya sambil menggabungkan data baru yang tersedia yang terinspirasi oleh penelitian terbaru tentang pengukuran inovasi. Salah satu sumber inovasi untuk Indeks Inovasi Global ini bisa berasal dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tahun 2025 Indonesia menempati urutan ke-55 untuk Indeks Inovasi Global, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang menempati urutanke-54.

Adapun inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian Indeks Inovasi Global. Oleh karenanya realisasi persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan di Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 100% tidak dapat dibandingkan secara nasional karena perbedaan indikator dan ukurannya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan daerah mencapai target yang ditetapkan karena adanya sejumlah inovasi dan diterapkan dalam skala industri dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang dapat meningkatkan inovasi dan daya saing industri lokal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah daerah, akademisi/perguruan tinggi, pebisnis/UMKM, komunitas, dan media mendorong akselerasi adopsi inovasi dan teknologi dalam pertumbuhan industri lokal. Selain itu dilakukan kurasi terhadap inovasi-inovasi yang akan diajukan oleh daerah dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan dampak ekonomi nyata, khususnya dalam sektor UMKM, teknologi digital, dan pelayanan publik.

Provinsi NTB berhasil meraih predikat sebagai Provinsi Sangat Inovatif dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diberikan pada 10 Desember 2025 sebagai apresiasi atas konsistensi NTB dalam menciptakan berbagai inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Capaian ini diperoleh melalui dua inovasi unggulan Provinsi NTB, yaitu ROSSI Mandalikaa atau sistem farmasi terpusat dari RS Mandalika dan Tumpangsari Kurma dengan Kacang Sacha Inchi.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap anggaran. Pagu anggaran untuk mencapai target indikator Persentase Inovasi yang di Terapkan Dalam Pembangunan Daerah sebesar Rp 3.081.793.430,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.829.631.568,00. Efisiensi anggaran sebesar 12,24%. Rincian penghitungan efisiensi anggaran terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3.239
Penghitungan Efisien Anggaran Indikator Kinerja Persentase Inovasi yang di Terapkan Dalam Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outccome)	P2 (Pagu Anggaran/ Target)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4x100)
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	3.081.793.430,00	2.829.631.568,00	95,58	100	28.296.315,68	32.243.078,36	0,88	0,12	12,24

Sumber: Biro Organisasi NTB 2025

7. Analisis Program/Kegiatan yang Efektif Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (realisasi anggaran 91,82%) dengan kegiatan:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.240
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Indikator Persentase Inovasi yang di Terapkan Dalam Pembangunan Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,081,793,430.00	2,829,631,568.00	91.82
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	240,925,000.00	240,553,962.00	99.85
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1,609,284,640.00	1,391,771,506.00	86.48
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	637,130,290.00	619,934,980.00	97.30
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	594,453,500.00	577,371,120.00	97.13

Sumber: BKAD NTB 2025

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2024-2026 yang melampaui target tahun 2025:
   1. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (capaian 119,09%)
   2. Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Risiko Bencana dengan indikator kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (capaian 105,84%) dan Bauran EBT (capaian 100,28%)
   3. Meningkatnya Perlindungan Sosial, Pengembangan Mata Pencaharian, Pemberdayaan Sosial dan Inklusi Keuangan Provinsi dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi (capaian 124,75%), Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (capaian 117,65%), dan Tingkat Literasi Keuangan (capaian 101,54%)
   4. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik) dengan Indeks Demokrasi (capaian 102,79%)
   5. Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (capaian 124,17%).
   6. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (121,67%)

b. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2024-2026 yang mencapai target tahun 2025:
   1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan indikator kinerja Persentase penanganan konflik SARA (capaian 100%)
   2. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik) dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial (capaian 100%)

c. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2024-2026 yang tidak mencapai target tahun 2025:
   1. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang (capaian 3,67%) dan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (capaian 90,32%)
   2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Serta Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (capaian 90,98%), Harapan Lama Sekolah (capaian 98,17%), dan Usia Harapan Hidup (capaian 99,08%).

3. Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Risiko Bencana dengan indikator kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) (capaian 69,8%)
4. Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (capaian 99,24%) dan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (capaian 97,92%).
5. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik) dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (96,54%), dan Indeks Ketahanan Pangan (98,73%)
6. Meningkatnya Perlindungan Sosial, Pengembangan Mata Pencaharian, Pemberdayaan Sosial dan Inklusi Keuangan dengan indikator kinerja: Persentase Universal Health Coverage (UHC) (capaian 96,94%)
7. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Nilai SAKIP (capaian 99,53%)
8. Meningkatnya Integrasi Program Pembangunan Daerah dan Peran Pemerintah Provinsi NTB dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan indikator Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial (98,57%), Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi (96,92%), Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan (98,55%), dan Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (95,38%)
9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Transmigrasi dan Perdesaan, Mendorong Investasi dan Percepatan Industrialisasi dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (capaian 94,79%)
10. Meningkatnya Konektivitas yang dapat Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Regional dengan indiator kinerja Rasio Konektivitas (capaian 87,47%)
11. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi Mendukung Peningkatan Kinerja Industri dan Pengembangan Ekspor dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah (capaian 90,57%)

d. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2025-2029 yang melampaui target tahun 2025:
    1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB dengan indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (capaian 103,14%), Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (capaian 115,67%)
    2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Usia Harapan Hidup (capaian 101,4%)

3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga serta Kesetaraan Gender dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (capaian 103%)
4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan dengan indikator kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah (capaian 423,21%) dan indikator kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (capaian 101,82%)
5. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran dengan indikator kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (capaian 101,70%)
6. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial (capaian 106,97%)
7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Pedesaan dengan indikator kinerja Indeks Desa (capaian 100,89%)
8. Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim (capaian 184,91%)
9. Meningkatnya Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (capaian 157,19%)
10. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (capaian 124,04%) Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif (capaian 115,16%)
11. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional (capaian 123,40%)
12. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (capaian 101,59%)
13. Meningkatnya Realisasi Investasi Provinsi NTB dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi (capaian 100,02%)
14. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan Konsumsi Listrik yang Merat serta Berkelanjutan dengan indikator kinerja Intensitas Energi Primer (capaian 135,78%) dan indikator kinerja Konsumsi Listrik per Kapita (capaian 102,51%)
15. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas (capaian 100,12%)
16. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Reformasi Birokrasi General (capaian 101,45%)
17. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (capaian 101,33%)

18. Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (capaian 120%) dan Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah (capaian 104,62%)

e. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2025-2029 yang mencapai target tahun 2025:
    1. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan indikator kinerja Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa (capaian 100%)
    2. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan indikator kinerja Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik (capaian 100%)
f. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2025-2029 yang tidak mencapai target tahun 2025:
    1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (capaian 99%)
    2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (capaian 62,67%)
    3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga serta Kesetaraan Gender dengan indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender (capaian 97,49%)
    4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan dengan indikator kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (capaian 95,88%)
    5. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (capaian 90,68%)
    6. Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (capaian 94,96%)
    7. Menurunnya Disparitas Harga Antar Wilayah Dalam Provinsi dengan indikator kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi (capaian -22,05%)
    8. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (capaian 89,16%)
    9. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda (capaian 99,70%)
    10. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (capaian 93,22%)

11. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan (capaian 98,79%)
12. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (capaian 92,01%) dan indikator kinerja Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (99,73%)
13. Meningkatnya Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (capaian 98,22%)
14. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Reformasi Birokrasi Tematik (75,00%), indikator kinerja Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (capaian 54,36%), dan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi (capaian 95,30%)
15. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah (capaian 90,77%) dan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (capaian 66,35%)

g. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2024-2026 yang tidak bisa diukur:
    1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Kematian Ibu dan indikator Angka Kematian Bayi (tidak ada data, sensus 10 tahun sekali)
    2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Persentase Kota Kreatif, Indeks Pembangunan Kebudayaan (tidak ada data)
    3. Perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan dengan indikator kinerja Peningkatan Pendapatan per kapita (perubahan satuan indikator kinerja dari % menjadi juta rupiah)
h. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja atas dokumen perencanaan 2025-2029 yang tidak bisa diukur:
    1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi(indikator imperatif, tidak ada data yang rilis dari pusat), dan indikator kinerja Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

untuk Literasi Membaca dan Numerasi (indikator imperatif, tidak ada data yang rilis dari pusat)

2. Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Inklusi Keuangan (tidak ada data)
3. Meningkatnya Budaya Literasi, Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Ekonomi Budaya dengan indikator Indeks Budaya Literasi, Indeks Ekspresi Budaya, Indeks Warisan budaya, Indeks Ekonomi Budaya (tidak ada data karena tidak ada rilis lagi dari Kementerian Kebudayaan)

4.2. Langkah-Langkah Meningkatkan Kinerja untuk Mencapai Target Sasaran Strategis:

1. Melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 :

a. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau melalui:
   1. Pemerataan akses pendidikan di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat
   2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
   3. Pengembangan sistem pendidikan inklusif dan responsif gender
   4. Pemenuhan dan perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan kuantitas, kualitas dan distribusi yang optimal serta pemberian bantuan/insentif dan afirmasi tenaga pendidik
   5. Peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan daerah
   6. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran
   7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi

   Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
   a. Program Pengelolaan Pendidikan (pagu anggaran Rp412.702.130.000,00)
   b. Program Pengembangan Kurikulum (pagu anggaran Rp250000.000,00)
   c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (pagu anggaran Rp54.912.810.000,00)
   d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (pagu anggaran Rp 352.500.000,00)
   e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra (pagu anggaran Rp250.000.000,00)

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui:
   a. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

b. Penguatan Kapasitas Ketahanan kesehatan
c. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Berbasis Masyarakat
d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
e. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
f. Penguatan Layanan Keluarga Berencana

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (pagu anggaran Rp271.391.865.171,00)
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (pagu anggaran Rp1.976.930.800,00)
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (pagu anggaran Rp178.749.500,00)
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (pagu anggarang Rp1.243.100.000,00)

3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender dengan Pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, dan pembangunan berwawasan kependudukan melalui:
   a. Penguatan dan pengelolaan system informasi gender dan anak, serta pengembangan data terpilah untuk perencanaan pembangunan
   b. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pengelola berbasis masyarakat untuk kesetaraan gender, perlindungan anak dan ketahanan keluarga
   c. Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum terutama bagi kelompok rentan
   d. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
   e. Penguatan regulasi, kepastian hukum dan mekanisme pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
   f. Pengendalian penduduk (kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan pengelolaan database kependudukan)
   g. Penguatan perencanaan dan pengendalian jumlah serta persebaran penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah

   Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

   1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (pagu anggaran Rp776.890.500,00)
   2. Program Perlindungan Perempuan (pagu anggaran Rp266.031.000,00)
   3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (pagu anggaran Rp46.160.000,00)
   4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (pagu anggaran R713.770.200,00)
   5. Program Pemenuhan Hak Anak (pagu anggaran Rp1.338.549.700,00)
   6. Program Perlindungan Khusus Anak (pagu anggaran Rp 587.660.300,00)

7. Program Pengendalian Penduduk (Rp157.108.300,00)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (pagu anggaran Rp666.234.500,00)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (pagu anggaran Rp588.880.000,00)

4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan dengan:
   a. Menguatkan UMKM dan Kewirausahaan Berbasis Inovasi dan Digitalisasi melalui:
      1. Pengembangan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah melalui akses pembiayaan salah satunya melalui subsidi bunga, pelatihan manajemen, dan perluasan pasar, serta mendukung inovasi produk untuk meningkatkan daya saing
      2. Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM dan Wirausaha Baru
      3. Penguatan Kemitraan antara UMKM dan Pelaku Usaha Besar/Swasta
      4. Pengembangan koperasi yang dikelola secara profesional untuk kemandirian ekonomi
   b. Meningkatkan Produktivitas sektor Tambang melalui:
      1. Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi Usaha Tambang Rakyat
      2. Digitalisasi dan Inovasi Pemantapan Hilirisasi Produk Tambang dalam Kawasan Industri
      3. Pengawasan dan pengendalian pertambangan
   c. Perluasan Akses Pasar dan Penguatan Sistem Perdagangan Daerah melalui:
      1. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan yang Terintegrasi
      2. Pengembangan Jejaring Distribusi dan Rantai Pasok Regional-Nasional
      3. Peningkatan Promosi dan Branding Produk Unggulan Daerah
      4. Penguatan Sistem Informasi dan Data Perdagangan Daerah

   Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
   1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (pagu anggaran Rp 300.000.000,00)
   2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (pagu anggaran Rp 624.450.000,00)
   3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (pagu anggaran Rp 500.000.000,00)
   4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (pagu anggaran Rp949.020.000,00)

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (pagu anggaran Rp1.904.116.500,00)
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (pagu anggaran Rp605.133.500,00)
7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (pagu anggaran Rp 75.000.000,00)
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (pagu anggaran 700.000.000,00)
9. Program Pengembangan Ekspor (pagu anggaran Rp730.000.000,00)
10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (pagu anggaran Rp 1.725.000.000,00)
11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (pagu anggaran Rp630.000.000,00)

5. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan:
   a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi pelatihan vokasi yang bersifat inklusif
   b. Memperluas kesempatan kerja terutama lapangan kerja formal bagi seluruh pencari kerja termasuk penyandang disabilitas
   c. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri
   d. Menguatkan dan mengembangkan sistem informasi pasar kerja untuk perencanaan tenaga kerja lebih inklusif
   e. Melakukan revitaliasi BLK melalui rebranding lembaga pelatihan; reformasi lembaga pelatihan; redesain program pelatihan; revitalisasi fasilitas, sarana, prasarana; reorientasi sumberdaya manusia (instruktur, mentor, asesor) dan peningkatan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders lain untuk memperkuat kinerja lembaga pelatihan
   f. Penguatan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV)

   Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
   1. Program Perencanaan Tenaga Kerja (pagu anggaran Rp 250.000.000,00)
   2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (pagu anggaran Rp 1.534.708.100,00)
   3. Program Penempatan Tenaga Kerja (pagu anggaran Rp 669.630.000,00)
   4. Program Hubungan Industrial (pagu anggaran Rp 3.155.970.500,00)
   5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (pagu anggaran Rp 964.500.185,00)
6. Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan dengan:

a. Memberdayakan UMKM, Koperasi, BUMD dalam Akses Pembiayaan Produktif melalui:
b. Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan lembaga keuangan formal (bank, BPR, fintech, koperasi simpan pinjam) di seluruh wilayah
c. Memfasilitasi pengembangan sistem layanan keuangan digital dan agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)
d. Meningkatkan efektivitas program Kredit/Pembiayaan Ultra Mikro, KUR, dan pembiayaan syariah berbasis kelompok, salah satunya melalui subsidi bunga
e. Mendorong pembentukan BUMD NTB Capital
f. Melakukan kolaborasi lintas sektor untuk inovasi pembiayaan daerah melalui:
g. Meningkatkan kolaborasi antara pemda, OJK, BI, perbankan, dan fintech untuk memperluas akses pembiayaan
h. Mendorong integrasi data dan layanan akses keuangan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah
i. Menyediakan edukasi dan pelatihan keuangan dasar bagi masyarakat, pelaku UMKM, dan pelajar
j. Menyusun regulasi atau insentif daerah untuk lembaga keuangan yang berperan aktif dalam pembiayaan inklusif

Program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah Program Perekonomian dan Pembangunan (pagu anggaran Rp 1.756.108.600,00)

7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat dengan mengembangkan Porgram Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran dan Responsif melalui:
   a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
   b. Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi social
   c. Penguatan koordinasi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penanggulangan kemiskinan
   d. Penanggulangan Kemiskinan melalui pendekatan graduasi dan penguatan pendampingan
   e. Penguatan Program Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Tidak Mampu
   f. Pengembangan program Perlindungan Sosial Responsif terhadap Krisis dan Bencana

   Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
   1. Program Pemberdayaan Sosial (pagu anggaran Rp 12.391.805.000,00)
   2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (pagu anggaran Rp110.500.000,00)
   3. Program Rehabilitasi Sosial (pagu anggaran Rp18.353.779.330,00)

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (pagu anggaran Rp7.945.170.000,00)
5. Program Penanganan Bencana (pagu anggaran Rp3.770.370.000,00)
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (pagu anggaran Rp442.500.000,00)

8. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan dengan penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah melalui:
   a. Mendorong diversifikasi pangan lokal yang berbasis pada tanaman asli NTB yang memiliki nilai gizi tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim
   b. Mengembangkan pasar dan promosi untuk produk pangan lokal agar lebih dikenal dan diminati, baik di dalam maupun luar daerah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perekonomian local
   c. Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung kearifan lokal dan ekologi dalam ketahanan pangan
   d. Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan

   Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
   1. Program Pengelolaaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (pagu anggaran Rp 600.000.000,00)
   2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketaanan Pangan Masyarakat (pagu anggaran Rp 1.206.492.500,00)
   3. Program Penanganan Kerawanan Pangan (pagu anggaran Rp 1.126.250.000,00)
   4. Program Pengawasan Keamanan Pangan (pagu anggaran Rp 342.700.000,00)
9. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan dengan:
   a. Peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa melalui:
      1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa
      2. Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik
      3. Penguatan perekonomian desa melalui pengembangan BUMDesa sebagai katalisator pengembangan ekonomi produktif dan pemanfaatan potensi desa
      4. Mengembangkan Daerah Kawasan Transmigran
   b. Pengembangan Potensi Unggulan Wilayah Secara Spasial melalui:
      1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal di luar pusat kota
      2. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi) di wilayah dengan akses terbatas
      3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan afirmatif bagi wilayah perdesaan, pesisir, lingkar kawasan hutan, lingkar TPAR dan atau daerah afirmasi 3T

4. Mendorong sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kawasan strategis daerah
5. Mengintegrasikan pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan (one data–one map)

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

1. Program Pentaaan Desa (pagu anggaran Rp 230.700.000,00)
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa (pagu anggaran Rp 231.215.500,00)
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa (pagu anggaran 1.355.959.500,00)
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Rp8.896.290.300,00)

10. Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi dengan Stabilisasi Harga dan Pasokan Komoditas Strategis melalui:
    a. Mendorong pembentukan dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan dan Barang Pokok (BUMDes, Koperasi, Distributor Mitra)
    b. Mengembangkan dan memperluas jaringan logistik lokal serta fasilitas penyimpanan (gudang, cold storage) di wilayah sentra dan konsumen
    c. Melaksanakan operasi pasar di wilayah dengan gejolak harga tinggi secara berkala
    d. Mendorong penguatan kerja sama antardaerah/kawasan dalam stabilisasi harga dan distribusi komoditas
    e. Mengembangkan pasar rakyat digital dan sistem informasi harga terpadu antar wilayah

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

    1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (pagu anggaran Rp 225.000.000,00)
    2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (pagu anggaran Rp 40.000.000,00)
    3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (pagu anggara Rp 250.000.000,00)
    4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (pagu anggaran Rp360.000.000,00)

11. Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim dengan mengembangkan Hilirisasi Komoditas Unggulan Agromaritim melalui:
    a. Penguatan Rantai Nilai dan Industri Pengolahan Komoditas Unggulan
    b. Peningkatan Akses Teknologi Produksi dan Inovasi Produk Olahan
    c. Fasilitasi Sertifikasi Mutu dan Standar Produk Olahan
    d. Penguatan Promosi dan Akses Pasar Produk Olahan Agromaritim
    e. Perbaikan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (pagu anggaran Rp 3.102.640.000,00)
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (pagu anggaran Rp262.940.000,00)
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (pagu anggaran Rp640.390.000,00)

12. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi Komoditas Unggulan melalui:
    a. Pengembangan Kawasan Sentra (roadmap) Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Wilayah dan potensi lahan kering
    b. Peningkatan Kualitas Produk dan Sertifikasi Standar Komoditas Unggulan
    c. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi dan Distribusi Komoditas serta Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Budidaya dan Produksi
    d. Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Penguatan Sistem Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan Teknis
    e. Meningkatkan kapasitas petani lokal melalui pelatihan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

    1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (pagu anggaran Rp 17.079.288.950,00)
    2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (pagu anggaran Rp15.906.282.878,00)
    3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (pagu anggaran Rp35.954.880.810,00)
    4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (pagu anggaran Rp1.686.633.900,00)
    5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (pagu anggaran Rp2.900.120.340,00)
    6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (pagu anggaran Rp100.000.000,00)
    7. Program Penyuluhan Pertanian (pagu anggaran Rp2.290.000.000,00)
    8. Program Penyuluhan Pertanian (pagu anggaran Rp861.000.000,00)
    9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (pagu anggaran Rp4.784.237.305,00)
    10. Program Perizinan Usaha Pertanian (pagu anggaran Rp150.000.000,00)

11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (pagu anggaran Rp2.498.910.000,00)
12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (pagu anggaran Rp1.740.140.630,00)
13. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (pagu anggaran Rp276.232.100,00)
14. Program Pengelolaan Hutan (pagu anggaran Rp303.000.000,00)
15. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (pagu anggaran Rp2.320.098.000,00)

13. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan:
    a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan melalui:
        1. Penataan dan Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan serta Penguatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Prioritas
        2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata serta Peningkatan Konektivitas Antar Destinasi Wisata
        3. Pengembangan Quality Tourism dengan Penguatan Kelembagaan Pariwisata Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal/SDM Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi
        4. Pengembangan Event dan Aktivitas Wisata Unggulan Daerah
        5. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Pariwisata
        6. Promosi dan Branding (halal tourism, Lombok-Sumbawa Infinity Experience) menuju Pariwisata NTB Mendunia
    b. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi melalui:
        1. Pengembangan Sentra Ekonomi Kreatif Daerah Berbasis Budaya dan Komoditas Lokal
        2. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Kreatif
        3. Promosi dan Branding Produk Ekraf NTB di Pasar Nasional dan Internasional
        4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Produksi dan Pemasaran Produk Kreatif

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
    1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (pagu anggaran Rp 2.198.313.555,00)
    2. Pemasaran Pariwisata (pagu anggaran Rp2.484.865.700,00)
    3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (pagu anggaran Rp297.388.500,00)
    4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (pagu anggaran Rp1.221.557.000,00)

14. Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya dengan:
    a. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui:
        1. Perlindungan Warisan Budaya melalui Pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
        2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Adat dan Komunitas Budaya
        3. Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Sistem Pendidikan dan Kehidupan Sosial
        4. Penyelenggaraan Festival Budaya dan Kegiatan Seni Secara Berkala dan Terencana
        5. Mengembangkan pemanfaatan budaya lokal dalam ekonomi kreatif
        6. Menyediakan pelatihan kewirausahaan budaya untuk pelaku seni, komunitas, dan UMKM berbasis budaya local
    b. Peningkatan budaya literasi dan Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara melalui:
        1. Pembinaan dan peningkatan serta pengembangan kepada semua jenis perpustakaan
        2. Gerakan sosial literasi dan promosi perpustakaan

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
    1. Pengembangan Kebudayaan (pagu anggaran Rp4.916.871.000,00)
    2. Pengembangan Kesenian Tradisional (pagu anggaran Rp231.000.000,00)
    3. Pembinaan Sejarah (pagu anggaran Rp370.000.000,00)
    4. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (pagu anggaran Rp318.000.000,00)
    5. Pengelolaan Permuseuman (pagu anggaran Rp2.181.490.000,00)
    6. Pembinaan Perpustakaan (pagu anggaran Rp2.025.609.700,00)
    7. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (pagu anggaran Rp360.000.000,00)
15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga melalui:
    a. Meningkatkan kompetensi dan kewirausahaan pemuda
    b. Penguatan dan pengelolaan database kepemudaan dan olahraga
    c. Menyelenggarakan program kepemudaan berbasis komunitas dan potensi wilayah
    d. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
    e. Mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan dalam program inovatif
    f. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

g. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional
h. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi
i. Merevitalisasi dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
j. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provisi
k. Memberikan penghargaan, insentif, dan beasiswa bagi pemuda dan atlet berprestasi berprestasi

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (pagu anggaran Rp4.773.864.964,00)
2. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (pagu anggaran Rp57.467.795.385,00)
3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (pagu anggaran Rp150.000.000,00)

16. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan:
    a. Meningkatkan Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca bencana melalui:
        1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana
        2. Meningkatkan sistem peringatan dini (early warning system) dan peningkatan kesiapsiagaan serta respon tanggap darurat bencana
        3. Pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan masyarakat mengahadapi bencana.
        4. Pengelolaan data dan sitem informasi dalam penanggulangan bencana
        5. Pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana
        6. Perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif dalm penanggulangan bencana
        7. Penguatan pembangunan berbasis pengurangan resiko bencana baik mitigasi struktural maupun non structural
    b. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Kebakaran dan non kebakaran melalui:
        1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi layanan penanganan kebakaran dan non kebakaran
        2. Pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran
        3. Perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran

    Program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah Program Penanggulangan Bencana (pagu anggaran Rp3.839.296.095,00)

17. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui:
    a. Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar udara, air, dan tanah
    b. Meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah (TPA, TPS3R, Bank Sampah)
    c. Mendorong prinsip ekonomi sirkular dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
    d. Peningkatan kualitas pemantauan dan informasi lingkungan hidup
    e. Mendorong gerakan lingkungan berbasis komunitas seperti kampung hijau, sekolah adiwiyata, dan desa lestari
    f. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
    1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (pagu anggaran 851.403.500,00)
    2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (pagu anggaran Rp100.000.000,00)
    3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (pagu anggaran Rp1.957.385.000,00)
    4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
       Hidup Untuk Masyarakat (pagu anggaran Rp200,000,000.00)
    5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (pagu anggaran Rp 257.528.000,00)
18. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan Penguatan Tata Kelola Konservasi dan Perlindungan Kawasan Ekosistem Strategis melalui:
    a. Memperluas dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut berbasis zonasi dan rencana pengelolaan
    b. Melaksanakan pengelolaan DAS melalui rehabilitasi kawasan kritis, mangrove, dan habitat satwa terancam punah
    c. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan perburuan illegal
    d. Mengembangkan program konservasi berbasis masyarakat, seperti hutan desa, ekowisata, dan kelompok pengawas lingkungan
    e. Melestarikan plasma nutfah lokal dan spesies endemik melalui kebun raya, taman keanekaragaman hayati, atau pusat konservasi
    f. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga internasional dalam konservasi
    g. Meningkatkan edukasi lingkungan dan kampanye pelestarian sumber daya alam bagi pelajar dan masyarakat umum

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup (pagu anggaran Rp100.000.000,00)
2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (pagu anggaran Rp1.957.385.000,00)

19. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan dengan meningkatkan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di berbagai wilayah melalui:
    a. Menyusun dan memperkuat kebijakan energi daerah yang mendorong bauran energi terbarukan
    b. Mendorong investasi swasta dan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek energi terbarukan
    c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal (matahari, angin, biomassa, air, panas bumi) untuk pembangkit energy
    d. Mendorong konversi penggunaan energi fosil ke energi bersih, khususnya di sektor transportasi dan industry
    e. Memperluas penyediaan energi listrik untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN (off-grid solutions)
    f. Mengembangkan pusat-pusat inovasi energi dan pendidikan energi terbarukan di daerah
    g. Meningkatkan kampanye kesadaran publik terhadap konservasi energi dan transisi energi hijau

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

    1. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (pagu anggaran Rp200.000.000,00)
    2. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (pagu anggaran Rp257.528.000,00)

20. Sasaran Strategi Meningkatnya Realisasi Investasi dengan:
    a. Penguatan regulasi dan tata kelola investasi yang ramah lingkungan dan sosial melalui:
        1. Menyusun dokumen perencanaan terintegrasi untuk masing-masing KSP (masterplan, RDTR, business plan)
        2. Menyediakan insentif fiskal dan non fiskal bagi investor yang berinvestasi di sektor prioritas KSP
    b. Pengembangan kawasan investasi strategis yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan melalui:
        1. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri hijau, dan kawasan potensial investasi berbasis tata ruang
        2. Menjalin kemitraan antara BUMD, BUMDes, UMKM, dan investor besar agar manfaat KSP merata

3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas ekonomi
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi dampak investasi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dn Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (pagu anggaran Rp324.000.000,00)
2. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (pagu anggaran Rp50.000.000,00)
3. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (pagu anggaran Rp150.000.000,00)
4. Pengelolaan Persampahan (pagu anggaran Rp9.948.483.000,00)
5. Pengelolaan Aspek Kegeologian (pagu anggaran Rp146.957.645,00)
6. Pengelolaan Mineral dan Batubara (pagu anggaran Rp499.496.950,00)
7. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) (pagu anggaran Rp400.000.000,00)
8. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (pagu anggaran Rp876.500.000,00)
9. Pengelolaan Hutan (pagu anggaran Rp11.940.224.800,00)
10. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (pagu anggaran Rp200.000.000,00)
11. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (pagu anggaran Rp608.912.600,00)
12. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (pagu anggaran RP1,622,700,000.00)
13. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (pagu anggaran Rp772.651.850,00)
14. Pengelolaan Ketenagalistrikan (pagu anggaran Rp530.654.350,00)
15. Pengembangan Iklim Penanaman Modal (pagu anggaran Rp1.273.504.650,00)
16. Promosi Penanaman Modal (pagu anggaran Rp779.239.850,00)
17. Pelayanan Penanaman Modal (pagu anggaran Rp491.227.700,00)
18. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (pagu anggaran Rp1.006.765.500,00)
19. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (pagu anggaran Rp93.902.500,00)

21. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi dengan:
    a. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Perpipaan untuk Meningkatkan Akses Air Bersih melalui:
        1. Peningkatan kapasitas dan jangkauan sistem perpipaan air bersih

2. Rehabilitasi dan modernisasi jaringan perpipaan eksisting
3. Mendorong kerjasama antar daerah dan dengan badan usaha/swasta untuk pendanaan dan penyelenggaraan SPAM
4. Pemanfaatan teknologi dan sistem digitalisasi dalam pengelolaan air bersih
5. Peningkatan kapasitas dan tata kelola BUMD air minum
6. Integrasi pengelolaan air bersih dengan konservasi sumber air

b. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Konektivitas melalui:
   1. Peningkatan kemantapan jalan
   2. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung kawasan prioritas kewenangan Proviinsi, salah satunya melalui Port to Port
   3. Penguatan kolaborasi pendanaan dan partisipasi pihak non pemerintah
   4. Integrasi pembangunan jalan dengan pengembangan wilayah dan tata ruang
c. Pemantapan Sistem Jaringan dan Saluran Irigasi melalui:
   1. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal
   2. Penguatan kelembagaan dan peran Petugas Pengelola Irigasi serta P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
   3. Integrasi pengelolaan irigasi dengan konservasi dan perlindungan sumber air
   4. Sinkronisasi rencana irigasi dengan program ketahanan pangan dan tata ruang wilayah
   5. Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi jaringan irigasi secara digital
d. Peningkatan ketersediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui:
   1. Fasilitasi pembangunan rumah layak dan terjangkau bagi MBR dan kelompok rentan
   2. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
   3. Revitalisasi dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan
   4. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman untuk mencegah kekumuhan
   5. Integrasi penyediaan hunian dengan pengembangan wilayah dan layanan dasar
   6. Penguatan kebijakan insentif dan kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN
e. Pengembangan sistem transportasi publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan melalui:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan strategis antar kabupaten/kota
2. Peningkatan interkonektivitas sistem transportasi darat-laut-udara secara terpadu
3. Pengembangan sistem logistik daerah yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa
4. Integrasi konektivitas dengan sistem perencanaan tata ruang dan kawasan
5. Pemanfaatan teknologi transportasi dan pengelolaan infrastruktur berbasis data

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) (agu anggaran Rp138.332.858.114,00)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (pagu anggaran Rp2.000.000.000,00)
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (pagu anggaran Rp4.742.000.000,00)

22. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang dengan meningkatkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui:
    a. Peningkatan kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai dengan perizinan dan zonasi
    b. Pengembangan sistem informasi geospasial daerah dan pemetaan tematik
    c. Pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang
    d. Peningkatan kolaborasi antar sektor dan wilayah dalam perencanaan ruang
    e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan tata ruang

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:

    1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (pagu anggaran Rp1.000.000.000,00)
    2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (pagu anggaran Rp 7.981.755.000,00)
    3. Pengembangan Permukiman (pagu anggaran Rp 22.861.006.000,00)
    4. Penataan Bangunan Gedung (pagu anggaran Rp 22.569.157.000,00)
    5. Penataan Bangunan dan Lingkungannya (pagu anggaran Rp 2.832.161.000,00)
    6. Penyelenggaraan Jalan (pagu anggaran Rp 119.232.593.800,00

7. Pengembangan Jasa Konstruksi (pagu anggaran Rp 781.250.000,00
8. Program Pengembangan Perumahan (pagu anggaran Rp 2.877.976.400,00
9. Program Kawasan Permukiman (pagu anggaran Rp23.225.165.814,00)
10. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (pagu anggaran Rp228.850.241.000,00
11. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (pagu anggaran Rp 150.000.000,00)
12. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (pagu anggaran Rp9.119.610.000,00)
13. Pengelolaan Pelayaran (pagu anggaran Rp 2.662.570.000,00)
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang (pagu anggaran Rp 1.723.000.000,00
15. Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (pagu anggaran Rp150.000.000,00)

23. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan:
    a. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah yang Adaptif dan Berbasis Kinerja melalui:
        1. Penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan tantangan pembangunan
        2. Peningkatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah
        3. Penguatan manajemen kinerja perangkat daerah berbasis hasil (result-based management)
        4. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan yang sistematis dan digital
        5. Optimalisasi fungsi Sekretariat Daerah sebagai penggerak koordinasi lintas sector
        6. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam semua lini kelembagaan
    b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional dan Berintegritas melalui:
        1. Penguatan sistem merit dalam pengelolaan ASN
        2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
        3. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural ASN
        4. Penguatan budaya kerja profesional, adaptif, dan inovatif
        5. Penguatan sistem evaluasi dan penilaian kinerja ASN

6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SDM aparatur
7. Peningkatan motivasi dan kesejahteraan ASN

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Tata Kelola Pemerintahan (e Government) melalui:
1. Penguatan kebijakan dan regulasi e Government yang terpadu dan adaptif
2. Pengembangan dan integrasi layanan digital pemerintahan
3. Peningkatan kapasitas infrastruktur dan keamanan sistem informasi
4. Pemanfaatan big data dan sistem analitik dalam pengambilan keputusan
5. Peningkatan literasi digital dan kapasitas SDM aparatur
6. Penguatan partisipasi publik melalui kanal digital
7. Evaluasi dan penyempurnaan sistem e-Government secara berkelanjutan

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
1. Program Penataan Organisasi (pagu anggaran Rp1.365.147.800,00)
2. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (pagu anggaran Rp957.750.000,00)
3. Program Kesejahteraan Rakyat (pagu anggaran Rp19.517.429.371,00)
4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (pagu anggaran Rp5.717.265.045,00)

24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas dengan:

a. Penguatan tata kelola pemerintahan umum yang stabil, inklusif, dan berketahanan melalui:
1. Menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban umum
2. Penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat
3. Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila
4. Pencegahan dan Penanganan potensi konflik social
5. Penguatan sinergi pusat-daerah dan antarwilayah

b. Memperkuat Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pencegahan, Penegakan, dan Partisipasi Publik secara Terpadu melalui:
1. Penguatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Penguatan penegakan Peraturan Daerah
3. Penguatan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (pagu anggaran Rp 1.392.490.000,00)
2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (pagu anggaran Rp787.206.000,00)

3. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (pagu anggaran Rp.3.328.707.300,00)

25. Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah dengan Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang kolaboratif, aplikatif, dan berkelanjutan untuk mendorong produktivitas dan daya saing pembangunan melalui:
    a. Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, dan masyarakat (quadruple helix)
    b. Penguatan peran riset dan inovasi untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah
    c. Peningkatan kapasitas dan literasi inovasi di kalangan ASN, pelajar, dan masyarakat
    d. Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi daerah

    Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis dimaksud adalah:
    1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (pagu anggaran Rp7.150.880.360,00)
    2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (pagu anggaran Rp 14.970.403.200,00)
    3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (pagu anggaran Rp 244.090.000,00)
    4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (pagu anggaran Rp 1.083.665.079.535,00)
    5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (pagu anggaran Rp 3.127.619.265,00)
    6. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik (pagu anggaran Rp7.414.600.000,00)
    7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (pagu anggaran Rp 792.200.400,00)
    8. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (pagu anggaran Rp500.000.000,00)
    9. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (pagu anggaran Rp 500.000.000,00)
    10. Program Penyelenggaraan Pengawasan (pagu anggaran Rp 5.783.000.000,00)
    11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi(pagu anggaran Rp1.313.200.000.00)
    12. Program Kepegawaian Daerah (pagu anggaran Rp 3.415.148.500,00)
    13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (pagu anggaran Rp 12.924.590.000,00)
    14. Program Pelayanan Penghubung (pagu anggaran Rp 2.144.563.100,00)

15. Program Pendaftaran Penduduk (pagu anggaran Rp 408.971.300,00)
16. Program Pencatatan Sipil (pagu anggaran Rp 228.099.000,00)
17. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (pagu anggaran Rp416.818.000,00)
18. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (pagu anggaran Rp 141.882.000,00)
19. Program Pengelolaan Arsip (pagu anggaran Rp 666.446.165,00)
20. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (pagu anggaran Rp 138.548.310,00
21. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (pagu anggaran Rp67.273.519.510,00
22. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (pagu anggaran Rp1.360.679.800,00
23. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (pagu anggaran Rp17.449.610.350,00)
24. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (pagu anggaran Rp2.871.705.500,00)
25. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (pagu anggaran Rp964.968.400,00)
26. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (pagu anggaran Rp 4.493.110.000.00
27. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (pagu anggaran Rp5.188.520.000,00)
28. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (pagu anggaran Rp 4.150.000.000,00)
29. Program Riset dan Inovasi Daerah (pagu anggaran Rp 1.649.999.900,00

2. **Menyusun perbaikan atas penjenjangan kinerja bagian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pedoman dalam PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021**
3. **Merumuskan program dan kegiatan tahun 2027 (Ranwal RKPD) yang mendukung capaian sasaran strategis atas evaluasi kinerja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam laporan ini.**

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Muhamad Iqbal
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 21 Februari 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	6,00 – 6,50	%
		Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	5.5-6.9	%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,19 - 2,79	%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,65-8,66	tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,24 - 14,25	tahun
		Umur Harapan Hidup (UHH)	72,92	tahun
		Angka Kematian Ibu (AKI)	169	per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	24.64-16.85	per 1000 KH
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69-70	point
		Persentase kota kreatif	40	%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,05 - 57,1	point
		Persentase penanganan konflik SARA	100	%
4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	25,99	%
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	119,83	point
		Bauran energi baru terbarukan	25	%
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67	point
		Indeks Kualitas Air	48	point
		Indeks Kualitas Udara	50-75	point
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,19	point
		Indeks Ketahanan Pangan	78,67	point
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Baik	kategori
		Indeks Demokrasi	Sedang (75,37 - 78,63)	point
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	2 - 4	%
		Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	98	%
		Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27,2	%
		Peningkatan Pendapatan per kapita	34,48-34,57 (juta rupiah)	%
		Tingkat Literasi Keuangan	65-67	%

Dipindai dengan CamScanner

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB kategori
9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,504-1,838 point
10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	70 %
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	65 %
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	69 %
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	65 %
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80 point
12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	95 %
13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan	Indeks Inovasi Daerah	70 point

Dipindai dengan CamScanner

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengembangan ekspor		

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.384.373.185.751
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.227.599.051.893
3	Program Pengelolaan Pendidikan	389.131.371.650
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	246.669.306.070
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	215.140.241.000
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	108.810.643.540
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	64.766.749.700
8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	64.487.329.060
9	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	62.203.539.331
10	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	54.245.000.000
11	Program Pengelolaan Pelayaran	39.835.398.550
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	31.277.661.289
13	Program Penyelenggaraan Jalan	28.752.264.600
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	26.638.474.600
15	Program Kesejahteraan Rakyat	21.472.414.420
16	Program Penataan Bangunan Gedung	18.400.000.000
17	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14.918.902.000
18	Program Rehabilitasi Sosial	14.791.125.252
19	Program Pemberdayaan Sosial	13.924.697.780
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.891.073.000
21	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.015.279.200
22	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.730.787.500
23	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.138.347.980
24	Program Pengelolaan Persampahan	8.174.572.300
25	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.876.611.966
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.034.703.300
27	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.753.446.600
28	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.010.000.000
29	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5.466.042.800
30	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.414.668.000
31	Program Kawasan Permukiman	5.115.000.000
32	Program Pengembangan Perumahan	5.000.000.000
33	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4.575.335.000
34	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.077.345.500
35	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.000.000.000

Dipindai dengan CamScanner

	PROGRAM	ANGGARAN
36	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.949.996.830
37	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	3.795.976.343
38	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.761.985.520
39	Program Penyuluhan Pertanian	3.572.500.000
40	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.565.062.950
41	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.483.668.800
42	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.066.293.425
43	Program Pengelolaan Hutan	2.968.910.000
44	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.720.000.000
45	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.580.856.900
46	Program Perlindungan Perempuan	2.566.930.600
47	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.499.612.000
48	Program Hubungan Industrial	2.452.399.764
49	Program Pemasaran Pariwisata	2.350.000.000
50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.303.759.000
51	Program Penanggulangan Bencana	2.291.714.999
52	Program Pengembangan Kebudayaan	2.280.000.000
53	Program Kepegawaian Daerah	2.144.552.700
54	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.120.778.415
55	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.885.692.300
56	Program Pengembangan Permukiman	1.850.000.000
57	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.766.896.600
58	Program Pelayanan Penghubung	1.736.264.600
59	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.553.143.500
60	Program Pembinaan Perpustakaan	1.530.573.000
61	Program Penanganan Bencana	1.521.825.000
62	Program Pengelolaan Permuseuman	1.486.885.000
63	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.451.331.850
64	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.351.936.400
65	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.175.474.900
66	Program Penataan Organisasi	1.171.742.900
67	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.161.308.600
68	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.135.950.000
69	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	988.328.000
70	Program Administrasi Pemerintahan Desa	982.711.400
71	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	954.867.816
72	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	876.893.700
73	Program Perlindungan Khusus Anak	873.490.900
74	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	854.869.200
75	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	770.976.000

Dipindai dengan CamScanner

	PROGRAM	ANGGARAN
76	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	755.000.000
77	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	748.874.950
78	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	747.858.300
79	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	694.999.996
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	657.100.712
81	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	621.527.678
82	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	600.000.000
83	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	591.246.640
84	Program Perizinan Usaha Pertanian	575.000.000
85	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	535.000.000
86	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	500.000.000
87	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	496.900.000
88	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	491.731.025
89	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	482.597.000
90	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	470.543.000
91	Program Pengembangan Ekspor	466.980.000
92	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	429.820.700
93	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	426.500.000
94	Program Penanganan Kerawanan Pangan	407.500.000
95	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	338.760.000
96	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	328.000.000
97	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	305.384.930
98	Program Pengelolaan Arsip	300.000.000
99	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	298.904.000
100	Program Penempatan Tenaga Kerja	295.700.000
101	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	284.720.000
102	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	282.460.300
103	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	275.000.000
104	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	275.000.000
105	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	265.855.765
106	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	250.000.000
107	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	250.000.000
108	Program Pengendalian Penduduk	232.558.950
109	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	223.487.200
110	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	220.130.150
111	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	214.999.400
112	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	200.000.000
113	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	200.000.000
114	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.000.000
115	Program Pengawasan Keamanan Pangan	190.000.000

Dipindai dengan CamScanner

	PROGRAM	ANGGARAN
116	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	190.000.000
117	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	181.470.000
118	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	180.250.000
119	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	175.000.000
120	Program Pembinaan Sejarah	175.000.000
121	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	168.019.450
122	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	156.462.000
123	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	130.522.000
124	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	120.000.000
125	Program Pendaftaran Penduduk	105.000.000
126	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	100.000.000
127	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100.000.000
128	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	96.500.000
129	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	89.427.000
130	Program Pelayanan Penanaman Modal	76.813.000
131	Program Pencatatan Sipil	75.000.000
132	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000
133	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	75.000.000
134	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	57.000.000
135	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	53.500.000
136	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.298.835
137	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.000.000
138	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000
139	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000
140	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	50.000.000
141	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.001.000
142	Program Pengelolaan Sistem data Gender Dan Anak	25.000.000
143	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	24.666.000
144	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	23.923.000
145	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	19.750.000

Mataram, 21 Februari 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Muhamad Iqbal
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 31 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	8,6-8,63	Tahun
		2 Harapan Lama Sekolah	14,1-14,13	Tahun
		3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	10,02	%
		4 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		
		untuk:		
		a) Literasi Membaca	10	%
		b) Numerasi	0-10	%
		5 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:		
		a) Literasi Membaca	26,24-28,74	%
		b) Numerasi	22,68-25,18	%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	72,95	Tahun
		2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	21,7	%
3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,517	Indeks
		2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,70	Indeks
4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1 Rasio kewirausahaan Daerah	2,37	%
		2 Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,97	%
		3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,27	%
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	35.408,24	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,19 - 2,79	%

Dipindai dengan CamScanner

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	Inklusi Keuangan	88,70 %
7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	46,00 Indeks
8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	78,83 Indeks
9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa	77.88 (%)
10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7,30 Koefisien
11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	5,3-6,4 %
12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,2 %
13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	382.813 Orang
		2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,03 %
		3 Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	3,76 %
14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1 Indeks budaya literasi	64,42 Indeks
		2 Indeks ekspresi budaya	44,48 Indeks
		3 Indeks warisan budaya	50,17 Indeks
		4 Indeks ekonomi budaya	44,26 Indeks
15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	70,18 %
		2 Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	9,3 (47 medali) % (medali)
		3 Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	100 %
16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,59 Indeks
17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,19 Indeks
18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	0,331 Indeks

Dipindai dengan CamScanner

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		2 Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	0,10 %
19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1 Intensitas energi primer	192,23 SBM/Rp milyar
		2 Konsumsi Listrik per kapita	751,00 kWh
20	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	61,09 Rp Triliun
21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,21 Indeks
		2 Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	71,68-71,7 %
		3 Rasio Konektivitas	0,83 Rasio
22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	83,38 %
23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a Reformasi Birokrasi General	69,49 Skor
		1b Reformasi Birokrasi Tematik	9,28 Skor
		2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,100 Poin
		3 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	91,50 Indeks
24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1 Indeks Demokrasi Indonesia	75,37-78,63 Indeks
		2 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	65,00 %
		3 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	75,00 Indeks
25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	50 %
		2 Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	95,58 %

Dipindai dengan CamScanner

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.638.393.717.059
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	896.082.380.225
3	Program Pengelolaan Pendidikan	418.480.681.118
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330.607.624.773
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	249.072.431.000
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	141.535.781.040
7	Program Penyelenggaraan Jalan	126.126.287.400
8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	81.182.419.550
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	76.683.854.400
10	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	74.219.522.731
11	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.503.960.000
12	Program Kesejahteraan Rakyat	35.179.785.155
13	Program Penataan Bangunan Gedung	35.109.346.140
14	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	27.236.030.090
15	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	23.800.228.167
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	20.769.131.450
17	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.429.740.600
18	Program Pengelolaan Persampahan	15.159.795.300
19	Program Rehabilitasi Sosial	13.306.771.039
20	Program Pengembangan Permukiman	11.974.950.000
21	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.580.854.700
22	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.334.791.726
23	Program Pemberdayaan Sosial	10.644.264.200
24	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.376.637.800
25	Program Kawasan Permukiman	7.304.804.900
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.030.536.800
27	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.874.366.500
28	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.716.781.100
29	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5.615.282.500
30	Program Pengelolaan Hutan	5.312.297.274
31	Program Pengembangan Kebudayaan	5.083.896.400
32	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.983.796.615
33	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.575.903.469
34	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.542.000.000
35	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.232.888.671
36	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.205.135.600
37	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.938.767.000
38	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	3.924.520.000

Dipindai dengan CamScanner

	PROGRAM	ANGGARAN
	Sosial	
39	Program Kepegawaian daerah	3.663.092.900
40	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.604.949.300
41	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.227.204.600
42	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.081.793.430
43	Program Pemasaran Pariwisata	2.871.000.000
44	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.850.536.200
45	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.805.365.500
46	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.659.679.300
47	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.540.342.980
48	Program Hubungan Industrial	2.539.899.764
49	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.488.612.000
50	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.461.963.050
51	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.454.787.100
52	Program Penanggulangan Bencana	2.354.640.549
53	Program Pengembangan Perumahan	2.277.977.450
54	Program Perlindungan Perempuan	2.274.052.600
55	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.265.396.400
56	Program Pengelolaan Pelayaran	2.094.285.150
57	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.046.759.000
58	Program Pembinaan Perpustakaan	1.966.284.700
59	Program Penyuluhan Pertanian	1.702.072.800
60	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.682.713.200
61	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.682.332.300
62	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.674.294.316
63	Program Penataan Organisasi	1.656.196.700
64	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.613.381.850
65	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.516.292.000
66	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.503.174.645
67	Program Pengelolaan Permuseuman	1.486.885.000
68	Program Penanganan Bencana	1.458.866.700
69	Program Pelayanan Penghubung	1.403.821.000
70	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.385.672.450
71	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.347.568.000
72	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.290.872.600
73	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.100.376.000
74	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.019.097.100
75	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	918.764.200
76	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	855.858.300
77	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	854.994.985
78	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	824.394.012
79	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	811.529.900
80	Program Perlindungan Khusus Anak	775.110.300

Dipindai dengan CamScanner

	PROGRAM	ANGGARAN
81	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	725.985.000
82	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	671.968.696
83	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	666.290.000
84	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	636.066.000
85	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	634.997.000
86	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	627.000.000
87	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	618.603.600
88	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	522.435.240
89	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	493.974.500
90	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	482.098.100
91	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	450.000.000
92	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	436.302.500
93	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	393.017.500
94	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	373.530.430
95	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	370.266.000
96	Program Penanganan Kerawanan Pangan	351.200.000
97	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	318.040.000
98	Program Penempatan Tenaga Kerja	305.571.200
99	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	285.646.000
100	Program Pengembangan Ekspor	257.630.000
101	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	253.680.000
102	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	243.060.000
103	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	227.820.000
104	Program Pembinaan Sejarah	224.727.450
105	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	211.000.000
106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	196.936.000
107	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	195.005.000
108	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	188.923.100
109	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	184.617.350
110	Program Pengelolaan Arsip	177.620.400
111	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	169.000.000
112	Program Pendaftaran Penduduk	163.958.000
113	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	155.260.000
114	Program Pencatatan Sipil	148.517.000
115	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	138.663.000
116	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	135.344.600
117	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	126.500.000
118	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	125.708.000
119	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	120.281.500

Dipindai dengan CamScanner

	PROGRAM	ANGGARAN
120	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	120.000.000
121	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	110.168.110
122	Program Pengawasan Keamanan Pangan	104.400.000
123	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	100.000.000
124	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100.000.000
125	Program Perencanaan Tenaga Kerja	92.499.980
126	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	88.780.000
127	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	79.687.000
128	Program Pengendalian Penduduk	77.357.450
129	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	61.392.300
130	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	57.482.000
131	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	57.151.200
132	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	47.200.000
133	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	42.500.000
134	Program Pelayanan Penanaman Modal	38.813.000
135	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	33.845.000
136	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	32.030.100
137	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.000.000
138	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	29.999.990
139	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	27.813.200
140	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	25.500.000
141	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25.283.750
142	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	16.298.835
143	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14.666.000
144	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	11.690.000
145	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.164.000

Mataram, 31 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

INSPEKTORAT

Jalan Langko Nomor 27 Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125,
Telepon. (0370) 621360/634835, Faksimile (0370) 621937
Laman inspektorat.ntbprov.go.id, Pos-el inspektorat@ntbprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKjIP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah :

Nama	: Budi Herman, S.H., MH
NIP	: 19710731 199603 1 001
Pangkat/ Gol Ruang	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Unit Kerja	: Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tim Reviu Inspektorat Provinsi NTB telah mereviu atas Format, Mekanisme Penyusunan dan Substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi NTB Tahun 2025.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keandalan data informasi yang disajikan di dalam LKjIP 2025.

INSPEKTUR PROVINSI NTB,

BUDI HERMAN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19710731 199603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
INSPEKTORAT
Jln. Langko No. 27 Mataram, Telp. 621360, 634835. Fax.
(0370) 621937. Kodepos: 83125 E-Mail:
inspektorat@ntbprov.go.id Website: inspektorat.ntbprov.go.id

LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/ 267 – IV / LHR.Itp II – INSP/2026

TANGGAL : 01 APRIL 2026

I. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi NTB Nomor: SPT/800.1.11.1/121./INSP.NTB/2026, tanggal 10 Maret 2026

II. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi NTB untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 31 Maret 2026.

III. Tujuan Reviu

1. Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi NTB tahun 2025.

V. Hasil Reviu

Reviu atas LKjIP Provinsi NTB tahun 2025 dilaksanakan sesuai:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/AA.05/2026, tanggal 13 Maret 2026 tentang Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan hasil reviu LKjIP Provinsi NTB terhadap masalah-masalah material atas format, mekanisme penyusunan dan substansi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Reviu atas Format Laporan Kinerja telah menyajikan:

a. Bab I Pendahuluan terdiri dari sub bab:
   1) Latar Belakang menyajikan informasi mengenai Perjanjian Kinerja Gubernur NTB Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada RPD 2024–2026, yang berkesinambungan dengan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang didukung oleh alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.
   2) Maksud dan Tujuan;
   3) Dasar Hukum Penyusunan LAKIP/LKjIP Provinsi NTB 2025;
   4) Gambaran Umum menyajikan Posisi dan Peran Strategis Daerah;
   5) Permasalahan Umum dan Isu Strategis;
   6) Cascading Kinerja sesuai RPD 2024-2026, dan Cascading Kinerja sesuai RPJMD 2025-2029;
   7) Proses Bisnis Provinsi NTB; dan
   8) Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025;

b. Bab II Perencanaan Kinerja terdiri dari sub bab:
   1) Perencanaan Kinerja dalam LKjIP Tahun 2025 disusun dengan menyelaraskan dua dokumen strategis utama. RPD Provinsi NTB

2024–2026 menetapkan 7 (tujuh) tujuan strategis sebagai landasan masa transisi. RPJMD Provinsi NTB 2025–2029 memuat 14 (empat belas) rumusan tujuan untuk mewujudkan visi 'NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia'. Sinergi kedua dokumen ini memastikan kesinambungan target kinerja tahunan dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Selain rumusan tujuan, juga diuraikan sasaran stategis secara tahunan selama periode RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 dengan Indikator kinerjanya.

2) Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 sesuai RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029, telah memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target dan satuan.
3) Bab III Akuntabilitas Kinerja mengurai sub bab capaian Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan RPD 2024-2026, dan RPJMD 2025-2029 Provinsi NTB.
4) Bab IV Penutup menyajikan kesimpulan, dan langkah-langkah meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis.

2. Hasil Reviu atas Mekanisme Penyusunan

a. Laporan Kinerja disusun oleh Tim Penyusun LKjIP 2025 Provinsi NTB di bawah koordinasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dalam penyusunan laporan kinerja tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tupoksi Perangkat Daerah;
b. Telah tersedia mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja kepada unit penyusun Laporan Kinerja. Hal ini didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyampaian data dan informasi untuk penyusunan LKjIP 2025 Provinsi NTB; dan
c. Penanggungjawab pengumpulan data dan informasi di setiap unit kerja tersebut belum seluruhnya diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah.

3. Hasil Reviu atas Substansi Laporan Kinerja

Tim LKjIP 2025 Provinsi NTB telah menyusun Bab I, dan telah menyajikan:

a. Rekapitulasi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024–2026. Namun, analisis yang disajikan belum komprehensif, khususnya dalam memberikan justifikasi atas indikator yang tidak mencapai target,

melampaui target, maupun yang berstatus NA (*Not Available*). Selain itu, terdapat ketidakcermatan dalam pendefinisian indikator kinerja (positif/negatif) serta standarisasi satuan indikator sebagaimana tercantum pada tabel ikhtisar eksekutif.

b. Cascading RPD 2024–2026 berdasarkan tujuan pada Gambar 1.3 sampai dengan Gambar 1.9. Selain itu Cascading RPJMD 2025-2029 Provinsi NTB sesuai misi pada Gambar1.10 sampai dengan gambar 1.16. Namun belum mencantumkan target kinerja tahunan pada setiap indikator untuk sepanjang periode RPD 2024–2026, sehingga kesinambungan pencapaian target antar-level belum terlihat jelas.

c. Telah dilakukan penyelarasan antara tujuan dan sasaran yang tertuang dalam LKjIP dengan PK Gubernur Provinsi NTB Tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan ketidaksesuaian (gap) pada penetapan target kinerja di kedua dokumen (LKjIP dengan PK) tersebut. Secara lebih rinci sesuai tabel berikut:

No	SASARAN						Keterangan
	LKjIP 2025				PK		
	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target	Satuan	
1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	6,00 – 6,50	%	6 - 7,5	%	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,19 - 2,79	%	2,70	%	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,65 - 8,66	Tahun	7,9	Tahun	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,24 - 14,25	Tahun	13,99	Tahun	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
		Umur Harapan Hidup (UHH)	72,92	Tahun	72,68 - 73,01	Tahun	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
		Angka Kematian Ibu (AKI)	169	Per 100.000 KH	257 - 189	Per 100.000 KH	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif,	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69 - 70	Point	62	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK

	Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,05 - 57,1	Point	57 - 60	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	25,99	%	19,76	%	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	119,83	Point	110,08	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 8 belum sesuai dengan dokumen PK
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,53	Point	67	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK
		Indeks Kualitas Air	46,8	Point	47,5	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK
		Indeks Kualitas Udara	50 - 75	Point	93,5	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK
		Indeks Demokrasi	Sedang (75,37 - 78,63)	Point	78,11	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	2,8 - 3,5	%	2 - 4	%	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK
		Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/Universal Health Coverage (UHC)	98	%	100	%	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK
		Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27,2	%	54	%	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK
		Peningkatan Pendapatan per kapita	34,48 - 34,57 (Juta Rupiah)	%	5	%	1. Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 9 belum sesuai dengan dokumen PK 2. Terget kinerja dan satuan tidak relevan
8	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	76,5	Point	79	Point	Nilai target pada Bab II tabel 2.3 halaman 10 belum sesuai dengan dokumen PK

d. Berdasarkan hasil analisis terhadap sasaran pada LKjIP dan RPD 2024 - 2026, ditemukan ketidakselarasan penetapan target kinerja di antara kedua dokumen tersebut. Detail ketidakselarasan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Pada LKjIP						Keterangan
	LKjIP				RPD		
	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Target	Satuan	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,65 - 8,66	Tahun	9,55	Tahun	Nilai target pada Bab III tabel 3.14 halaman 47 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,24 - 14,25	Tahun	17	Tahun	Nilai target pada Bab III tabel 3.14 halaman 47 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Umur Harapan Hidup (UHH)	72,92	Tahun	67,98	Tahun	Nilai target pada Bab III tabel 3.14 halaman 47 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Angka Kematian Ibu (AKI)	169	Per 100.000 KH	257 - 189	Per 100.000 KH	Nilai target pada Bab III tabel 3.14 halaman 47 belum sesuai dengan dokumen RPD
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,05 - 57,1	Point	54 - 60	Point	Nilai target pada Bab III tabel 3.26 halaman 78 belum sesuai dengan dokumen RPD
3	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	25,99	%	19,76	%	Nilai target pada Bab III tabel 3.33 halaman 95 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	119,83	Point	110,08	Point	Nilai target pada Bab III tabel 3.33 halaman 95 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Bauran energi baru terbarukan	25	%	23	%	Nilai target pada Bab III tabel 3.33 halaman 95 belum sesuai dengan dokumen RPD
4	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67	Point	65,53	Point	Nilai target pada Bab III tabel 3.40 halaman 110 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Indeks Kualitas Air	48	Point	46,8	Point	Nilai target pada Bab III tabel 3.40 halaman 110 belum sesuai dengan dokumen RPD
5	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Demokrasi	75,37 - 78,63	Point	78,11	Point	Nilai target pada Bab III tabel 3.47 halaman 121 belum sesuai dengan dokumen RPD

6	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/Universal Health Coverage (UHC)	98	%	97	%	Nilai target pada Bab III tabel 3.57 halaman 152 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27,2	%	54	%	Nilai target pada Bab III tabel 3.57 halaman 152 belum sesuai dengan dokumen RPD
		Peningkatan Pendapatan per kapita	34,48 - 34,57 (Juta Rupiah)	%	9	%	1. Nilai target pada Bab III tabel 3.57 halaman 152 belum sesuai dengan dokumen RPD 2. Terget kinerja dan satuan tidak relevan
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB	Kategori	A	Kategori	Nilai target pada Bab III tabel 3.68 halaman 181 belum sesuai dengan dokumen RPD
8	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,504 - 1,838	Point	Sedang	Point	Nilai target pada Bab III tabel 3.74 halaman 192 belum sesuai dengan dokumen RPD
9	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	70	Point	79	Point	Nilai target pada Bab III tabel 3.106 halaman 320 belum sesuai dengan dokumen RPD

e. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025, khususnya pada aspek kriteria SMART dan cukup, ditemukan sejumlah sasaran dan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

No	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025		Hasil		Keterangan
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kriteria SMART	Kriteria CUKUP	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Belum SMART		Indikator tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan sasaran, dimana sasaran terlalu luas sehingga indikator kinerja belum menggambarkan seluruh kondisi yang ingin dicapai hanya menggambarkan atas akuntabilitas
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Belum SMART		Indikator kinerja tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan sasaran, dimana indikator kinerja belum menggambarkan seluruh kondisi yang ingin dicapai yaitu atas investasi dan percepatan industrialisasi
3	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	Belum SMART		Indikator tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan sasaran, dimana indikator kinerja belum menggambarkan seluruh kondisi yang ingin dicapai yaitu atas pengembangan ekspor

f. Capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator fokus tahun 2025 telah disusun sesuai RPD 2024-2026 hingga Triwulan III. Namun, hasil sinkronisasi menunjukkan adanya inkonsistensi data antara realisasi pada LKjIP dengan realisasi internal Perangkat Daerah, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Laporan Kinerja Pemda		Hasil Konfirmasi OPD		Keterangan
				Target	Realisasi sampai triwulan III	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang	%	6 – 7,5	0,22	6 – 7,5	3,22	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang	%	5,5-6,9	6,55	5,5-6,9	8,33	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2, 85	3,06	2, 85	3,05	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta Derajat Kesejahteraan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,65 – 8,66	7,87	8,65 – 8,66	8,21	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,24 - 14,25	13,98	14,24 - 14,25	13,99	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,92	72,25	72,92	72,60	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	169	NA	169	NA	Masih menunggu rilis dari BPS
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	24,64-16,85	NA	24,64-16,85	NA	Masih menunggu rilis dari BPS
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	69-70	NA	69-70	31,77	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Persentase kota kreatif	%	40	NA	40	40	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	57,05 - 57,1	NA	57,05 - 57,1	NA	Belum rilis dari Kemendikbud ristek
		Persentase Penanganan Konflik SARA	%	100	100	100	100	Sesuai

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Laporan Kinerja Pemda		Hasil Konfirmasi OPD		Keterangan
				Target	Realisasi sampai triwulan III	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Ketahanan Iklim dan Ketangguhan menghadapi Resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	25,99	24,47	25,99	12,37	
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	119,83	156,02	119,83	156,02	Sesuai
		Bauran Energi Baru Terbarukan	%	25	25,07	25	25,07	Sesuai
	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	67	66,49	67	77,36	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Indeks Kualitas Air	Poin	48	47	48	71,24	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Indeks Kualitas Udara	Poin	50-75	93,13	50-75	81,44	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
	Menngkatnya Pemerataan Pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Poin	71,19	68,73	71,19	61,90	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Indeks Ketahanan Pangan	**Poin**	78,67	77,67	78,67	74,70	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sesuai
		Indeks Demokrasi	Poin	(75,37 - 78,63)	77,47	(75,37 - 78,63)	NA	Masih menunggu rilis dari BPS
	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan (sdh	Tingkat Inflasi	%	2 - 4	3.01	2 - 4	3,01	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	98	95	98	98,35	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Laporan Kinerja Pemda		Hasil Konfirmasi OPD		Keterangan
				Target	Realisasi sampai triwulan III	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sesuai RPD), tapi target 2025 : 2-4	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosialu Ketenagakerjaan	%	27,2	32	27,2	38,81	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
		Peningkatan Pendapatan Per Kapita	%	34,48 – 34,57 (Juta rupiah)	8	34,48 – 34,57	4,3	
		Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	66	65-67	80,51	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan pulik	Nilai SAKIP	Kategori	BB	B	A	BB	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
	Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,504 – 1,838	NA	Sedang	0,598	
	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	70	69*	70	NA	
		Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	65	63*	65	NA	
		Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	69	68*	69	NA	
		Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	65	62*	65	NA	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Transmigrasi dan Perdesaan,	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	80	75,83	80	75,67	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Laporan Kinerja Pemda		Hasil Konfirmasi OPD		Keterangan
				Target	Realisasi sampai triwulan III	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mendorong Investasi dan Percepatan Industrialisasi							
	Meningkatna Konektivitas yang Dapat Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Regional	Rasio Konektivitas	%	95	83,1	95	96,05	Terdapat perbedaan atas realisasi yang disajikan pada LKjIP dengan hasil konfirmasi perangkat daerah
	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi Mendukung Peningkatan Kinerja Industri dan Pengembangan Ekspor	Indeks Inovasi Daerah	Poin	70	63,40	79	73,25	

Begitu juga terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator fokus tahun 2025 sesuai RPJMD 2025-2029 hingga Triwulan IV. Hasil sinkronisasi menunjukkan adanya kontradiksi data antara realisasi pada LKjIP dengan realisasi internal Perangkat Daerah, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Laporan Kinerja Pemda		Hasil Konfirmasi OPD		Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk						
		a) Literasi Membaca	%	10	NA	10	NA	Data Belum Disajikan
		b) Numerasi	%	0,00- 10,00	NA	0,00- 10,00	NA	Data Belum Disajikan
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:						
		a) Literasi Membaca	%	26,24-28,74	NA	26,24-28,74	NA	Data Belum Disajikan
		b) Numerasi	%	22,68-25,18	NA	22,68-25,18	NA	Data Belum Disajikan
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,92	73,97	72,92	72,60	Terdapat perbedaan realisasi berdasarkan hasil konfirmasi Perangkat Daerah dan Rilis BPS yaitu 72,60
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,7	29,8*	21,7	NA	-Realisasi pada LKjIP Pemda menggunakan data tahun 2024 karena data tahun 2025 belum ada

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Laporan Kinerja Pemda		Hasil Konfirmasi OPD		Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
								-Konfirmasi Dinas Kesehatan masih menunggu rilis SKI
3.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19-2,79	3,05	2,19-2,79	3,06	Terdapat perbedaan realisasi, berdasarkan data BPS dan konfirmasi Disnakertrans adalah 3,06
4.	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	Inklusi Keuangan	%	88,70	NA	88,70	NA	Data Belum Disajikan
5.	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	382.813	474.838	382.813	509.171	Terdapat perbedaan realisasi dengan hasil konfirmasi Perangkat Daerah
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,03	1,81	2,03	1,83	Terdapat perbedaan realisasi dengan hasil konfirmasi Perangkat Daerah
		Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3,76	4,33	3,76	4,52	Terdapat perbedaan realisasi dengan hasil konfirmasi Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	Indeks budaya literasi	Indeks	64,42	NA	64,42	NA	Data Belum Disajikan
		Indeks ekspresi budaya	Indeks	44,48	NA	44,48	NA	Data Belum Disajikan
		Indeks warisan budaya	Indeks	50,17	NA	50,17	NA	Data Belum Disajikan
		Indeks ekonomi budaya	Indeks	44,26	NA	44,26	NA	Data Belum Disajikan
7.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	70,18	69,97	70,18	NA	Hasil konfirmasi perangkat daerah, realisasi 2025 belum rilis Kemenpora
		Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	9,3 (47 medali)	23,40 (58 medali)	9,3 (47 medali)	95,34 (84 medali)	- Terdapat perbedaan realisasi dengan hasil konfirmasi Perangkat Daerah - Terdapat kesalahan perhitungan persentase pada LKjIP yang membandingkan selisih perolehan medali dengan target sedangkan penjelasan atas Indikator ini adalah mengukur selisih jumlah total medali yang diraih atlet dalam sebuah kejuaraan resmi, dibandingkan dengan jumlah perolehan medali pada periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
8.	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,331	0,327*	0,331	0,331	Terdapat perbedaan realisasi dengan hasil konfirmasi Perangkat Daerah Pada LkjIP masih menggunakan data sementara sedangkan hasil konfirmasi data tahun 2025 telah tersedia (perhitungan mandiri).
9.	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	192,23	NA	192,23	123,53	Data realisasi pada LkjIP belum disajikan
		Konsumsi Listrik per	kWh	751,00	747,74	751,00	769,88	Terdapat perbedaan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Laporan Kinerja Pemda		Hasil Konfirmasi OPD		Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	yang merata serta berkelanjutan	kapita						realisasi dengan hasil konfirmasi Perangkat Daerah
10.	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	75,37-78,63	76,37*	75,37-78,63	76,37	Sesuai (Menggunakan realisasi tahun 2024 karena rilis BPS tahun 2025 belum tersedia)
		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	75,00	49,76*	75,00	83,08	Tidak sesuai (terdapat perbedaan realisasi dengan hasil konfiirmasi perangkat daerah) Pada LkjIP masih menggunakan data sementara sedangkan hasil konfirmasi data tahun 2025 telah tersedia.

g. Berdasarkan hasil reviu atas keselarasan target kinerja pada LKjIP terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029, ditemukan ketidakkonsistenan data pada indikator "Usia Harapan Hidup (UHH)" dan "Reformasi Birokrasi General". Terdapat perbedaan angka target antara Bab III dengan Bab II dan Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana rincian pada tabel berikut:"

NO	Sasaran Pada LKjIP				Sasaran Pada Dokumen PK Sesuai RPJMD				Keterangan
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Satuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Satuan	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,92 / 72,95	Tahun	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,92	Tahun	LKjIP Tabel 3.120 = 72,95
2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi General	69,49/ 64,49	Skor	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi General	69,49	Skor	LKjIP Tabel 3.216 = 64,49

h. Hasil reviu terhadap dokumen PK, ditemukan beberapa ketidaksesuaian pada penulisan sasaran strategis dan indikator sebagai berikut:

1) Penulisan urutan indikator tidak selaras dengan narasi sasaran strategis;
2) Ditemukan indikator yang belum memenuhi kriteria SMART serta indikator yang belum berorientasi pada hasil.
3) Terdapat indikator yang tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan sasaran strategis;
4) Terdapat indikator yang tidak selaras dengan satuannya;
5) Terdapat indikator yang belum berorientasi hasil (masih bersifat output);

6) Terdapat indikator kinerja yang merupakan pembentuk indikator kinerja yang lain (*overlapping*); dan
7) Terdapat narasi sasaran strategis yang sama dengan narasi indikatornya.

Rincian temuan poin (1) sampai dengan (7) tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

No	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025				Hasil		Keterangan
	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Kriteria SMART	Kriteria Cukup	
1	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks			Urutan indikatornya harus selaras dengan sasaran : - Ketahanan keluarga - Kesetaraan gender
		2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks			
2	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1	Rasio kewirausahaan Daerah	%	Tidak		Indikator tidak relevan dengan sasaran, UMKM dan kewirausahaan tidak sama walaupun berkaitan erat (opsi PDRD sektor UMKM)
		2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%			
		3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%			
3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks		Tidak	Indikator tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan sasaran (opsi meningkatnya kesejahteraan tarap hidup masyarakat secara menyeluruh)
4	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan		Indeks Desa	(%)			Indikator tidak selaras dengan satuan (seharusnya indeks)
5	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien			Indikator tidak selaras dengan satuan (seharusnya %)
6	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1	Indeks budaya literasi	Indeks	Tidak		Narasi sasaran sama dengan indikator (opsi Meningkatnya pembangunan kebudayaan dalam arti luas)
		2	Indeks ekspresi budaya	Indeks			
		3	Indeks warisan budaya	Indeks			
		4	Indeks ekonomi budaya	Indeks			
7	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%			
		2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)			

No	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025				Hasil		Keterangan
	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Kriteria SMART	Kriteria Cukup	
		3	Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	Tidak		- Indikator kurang relevan dengan sasaran - Indikator masih bersifat output
8	Meningkatnya Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	Tidak		Narasi sasaran sama dengan indikator (opsi Meningkatnya kinerja penanaman modal daerah)
9	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Tidak		- Sasaran bersifat output, pembangunan -> kualitas - Indikator IKLI tidak sepenuhnya relevan dengan sasaran (opsi meningkatnya kualitas infrastruktur..)
		2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%			
		3	Rasio Konektivitas	Rasio			
10	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	Tidak		IPPN merupakan pembentuk IRB (Indek Reformasi Birokrasi)
11	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks			Urutan indikatornya harus selaras dengan sasaran : - Penegakan hukum - stabilitas keamanan - Demokrasi berkualitas
		2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	Tidak		- Indikator kurang relevan dengan sasaran - Indikator masih bersifat output
		3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks			
12	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti111	%	Tidak		Indikator kurang relevan dengan sasaran (terkait riset)
		2	Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%			

i. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sesuai RPD 2024-2026.

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 sampai triwulan III, namun terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja "Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tambang".

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2025
			Target	Realisasi Tw III	Capaian
Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang	%	6-7,5	0,22	3,67%

a) Telah dilakukan perbandingan antara target dan realisasi, namun belum terdapat penjelasan mengenai indikator pembentuk realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang. Hingga Triwulan III 2025, realisasi tercatat 0,22% atau mencapai 3,67% dari target yang ditetapkan 6,0–7,5%.

b) Telah disajikan permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 LKjIP 2025 halaman III-4. Namun, uraian mengenai langkah strategis dan solusi alternatif yang lebih komprehensif masih perlu diperdalam guna memastikan target kinerja pada akhir periode dokumen perencanaan dapat tercapai.

c) Penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LKjIP telah didasarkan pada PK 2025. Namun, ditemukan ketidaktepatan narasi di mana analisis yang disajikan seharusnya ditujukan untuk capaian indikator "Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang 2025", bukan "IPLM".

Selain itu, analisis efisiensi masih terbatas pada perbandingan Pagu terhadap Realisasi Anggaran. Analisis tersebut belum mengukur efisiensi output/outcome terhadap penggunaan anggaran dengan menggunakan formulasi: 1 – [(Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)] x 100%.

d) Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator 'Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang' telah disajikan pada Tabel 3.3 halaman III.6. Namun, laporan tersebut belum memuat penjelasan mendalam mengenai analisis penyebab rendahnya persentase realisasi tersebut.

2. **Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang**

a) Telah dilakukan analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap tahun 2024 dan 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan hingga Triwulan III-2025 tumbuh positif sebesar 6,55% (c-to-c), yang

didorong oleh performa seluruh lapangan usaha, terutama sektor Industri Pengolahan.

Di sisi lain, terdapat satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian. Namun, analisis tersebut belum membedah akar penyebab terjadinya penurunan tersebut serta belum merumuskan upaya dan langkah strategis untuk memitigasi risiko kontraksi di masa mendatang

b) Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan. Capaian pertumbuhan ekonomi non-tambang sangat dipengaruhi oleh performa 16 lapangan usaha dalam PDRB. Berdasarkan data pada Tabel 3.4 (LkjIP halaman III.8), tercatat delapan lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara tujuh lapangan usaha lainnya menunjukkan tren penurunan dan satu lapangan usaha menunjukkan stagnan. Berikut adalah rincian sektor-sektor tersebut:

Lapangan Usaha	2024	s.d Triwulan III 2025	Keterangan
Pertanian,kehutanan dan perikanan	21,45	22,92	Meningkat
Industri Pengolahan	3,87	7,66	Meningkat
Pengadaan Listrik dan Gas	0	0,09	Meningkat
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,07	0,07	Stagnan
Konstruksi	9,11	9,13	Meningkat
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor	14,2	14,27	Meningkat
Transportasi dan pergudangan	5,83	5,85	Meningkat
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,75	1,88	Meningkat
Informasi dan komunikasi	2,00	1,91	Menurun
Jasa keuangan dan asuransi	3,83	3,95	Meningkat
Real estate	2,89	2,82	Menurun
Jasa Perusahaan	0,18	0,17	Menurun
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	5,82	5,43	Menurun
Jasa pendidikan	4,77	4,59	Menurun
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,93	1,83	Menurun
Jasa lainnya	2,10	2,06	Menurun

Analisis telah dilakukan terhadap 8 (delapan) lapangan usaha yang menunjukkan tren peningkatan, khususnya mengenai upaya-upaya

strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi non-tambang. Namun, evaluasi tujuh lapangan usaha yang mengalami penurunan masih belum memadai, karena tidak disertai dengan identifikasi akar penyebab maupun rumusan langkah nyata/rencana aksi strategis untuk memitigasi penurunan dan memulihkan performa sektor tersebut di masa depan.

c) Realisasi anggaran telah disajikan pada Tabel 3.6 (LkjIP halaman III.18). Namun demikian, penyajian data tersebut belum disertai dengan analisis mendalam mengenai capaian realisasi, termasuk penjelasan atas faktor penyebab tingginya penyerapan atau kendala yang menghambat jika realisasi masih rendah

3. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a) Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja telah disajikan pada Tabel 3.12 (Halaman III.44, LKjIP 2025). Namun demikian, data tersebut belum disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab terjadinya penyerapan anggaran yang tinggi maupun yang masih rendah.

4. Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	2025	
			Target (Pemutakhiran Target)	Realisasi TW III
1	2	3	4	5
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,87	8,65-8,66	7,87*

a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 telah dilakukan. Namun, capaian kinerja menggunakan data tahun 2024 dengan alasan belum dapat diukur pada triwulan III dan menunggu rilis BPS.

b) RLS secara resmi hanya dirilis secara tahunan oleh BPS. Namun, untuk kebutuhan pelaporan triwulanan, RLS tetap bisa dihitung secara mandiri menggunakan metode estimasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan perhitungan mandiri untuk mendapatkan angka proyeksi/estimasi Triwulan III dengan menggunakan data profil penduduk dalam sistem informasi pendidikan (Dapodik) dengan menghitung jumlahkan total tahun sekolah dari seluruh individu dalam sampel/database, kemudian bagi dengan jumlah total penduduk dalam kelompok usia tersebut.

c) Tim LKjIP telah menyajikan analisis penyebab keberhasilan kenaikan RLS yang meningkat setiap tahun. Namun, penjelasan tersebut kontradiktif dengan uraian realisasi Triwulan III Tahun 2025 yang justru menggunakan data tahun 2024 dengan alasan data terbaru belum tersedia. Seharusnya, analisis menyajikan estimasi capaian hingga Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini penting agar analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan menjadi lebih akurat, serta memudahkan penyajian alternatif solusi yang relevan.

d) Realisasi anggaran telah dijabarkan sesuai dengan Tabel 3.17 pada dokumen LKjIP halaman III.35. Namun, tabel tersebut belum dilengkapi dengan penjelasan komprehensif yang menjelaskan faktor-faktor penyebab capaian realisasi yang masih belum optimal.

5. Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS).

a) Perbandingan antara target dan realisasi HLS tahun 2025 telah dilakukan. Namun, capaian kinerja Triwulan III belum dapat diukur secara akurat karena keterbatasan rilis data tahunan dari BPS, sehingga analisis saat ini masih didasarkan pada data tahun 2024 sebesar 13,98 tahun. Meskipun HLS merupakan indikator makro tahunan, capaian Triwulan III sebenarnya tetap dapat diproyeksikan melalui estimasi internal menggunakan data sektoral (Dapodik) untuk memberikan gambaran progres kinerja yang lebih mutakhir.

b) Telah menyajikan analisis penyebab keberhasilan kenaikan HLS yang meningkat setiap tahun. Namun, penjelasan tersebut kontradiktif dengan uraian realisasi Triwulan III Tahun 2025 yang justru menggunakan data tahun 2024 dengan alasan data terbaru belum tersedia. Seharusnya, analisis menyajikan estimasi capaian hingga Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini penting agar analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan menjadi lebih akurat, serta memudahkan penyajian alternatif solusi yang relevan.

c) Realisasi anggaran telah dijabarkan pada Tabel 3.20 dokumen LKjIP halaman III.60. Namun, tabel tersebut belum disertai penjelasan

mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian realisasi, baik yang bersifat optimal maupun yang masih rendah.

6. Indikator Kinerja Umur Harapan Hidup (UHH),
   a) Telah diuraikan data UHH pada tahun 2025 dengan menggunakan capaian tahun 2024, yaitu sebesar 72,25 tahun atau mencapai 99,08% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,92 tahun tahun 2025. Capaian ini digunakan karena sampai dengan TW III tidak ada data.

      Secara resmi, indikator UHH dirilis secara tahunan oleh BPS dan tidak tersedia dalam rilis triwulanan. Namun, untuk kepentingan laporan internal (seperti LKjIP), seharusnya bisa menyajikannya pada Triwulan III menggunakan metode estimasi/proyeksi internal.
   b) Perbandingan realisasi kinerja UHH tahun 2025 telah disandingkan dengan rata-rata nasional tahun 2024 sebesar 72,25 tahun. Seharusnya dijelaskan standar nasional untuk UHH tahun 2025 di rilis bulan berapa dan lembaga atau instansi yang merilis sehingga informasi yang disajikan dalam LKjIP lebih informatif.
   c) Laporan telah menyajikan analisis penyebab kenaikan UHH yang menunjukkan tren positif setiap tahun. Namun, analisis tersebut kurang relevan dengan uraian realisasi Triwulan III Tahun 2025 yang masih menggunakan data tahun 2024. Seharusnya, tim penyusun menyajikan estimasi capaian hingga Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan hasil perhitungan internal Dinas Kesehatan. Hal ini penting agar evaluasi faktor keberhasilan atau kegagalan menjadi lebih akurat, sekaligus memudahkan perumusan alternatif solusi yang lebih tepat sasaran.
   d) Realisasi anggaran telah dijabarkan pada Tabel 3.23 dokumen LKjIP halaman III.65. Namun, tabel tersebut belum disertai penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian realisasi sebagaimana sajian data sesuai tabel tersebut.
7. Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI);
   a) Berdasarkan uraian pada LKjIP terhadap AKI, belum dilakukan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Lebih detail mengurai distribusi Jumlah dan Rasio Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2024 (grafik 3.11) dibandingkan dengan menyajikan capaian indikator AKI tahun 2025 walaupun sampai triwulan III.

      Dinas Kesehatan memiliki kapasitas untuk menyajikan realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) secara periodik, mulai dari Triwulan I

hingga Triwulan III. Hal ini dimungkinkan karena instansi memiliki sistem registrasi rutin dan surveilans kematian ibu yang bersifat *real-time*, dengan data yang dihimpun langsung dari Puskesmas, Rumah Sakit, serta laporan bidan desa. Dengan demikian, analisis capaian tidak perlu bergantung pada rilis tahunan BPS, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih aktual dan tepat waktu.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta perumusan alternatif solusi terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) dinilai kurang relevan dengan sajian data pada LKjIP. Hal ini dikarenakan data yang dicantumkan masih merujuk pada tahun 2024 dan periode sebelumnya, bukan kondisi tahun berjalan. Seharusnya, uraian didasarkan pada hasil perhitungan hingga Triwulan III Tahun 2025, sehingga analisis faktor penyebab, upaya strategis, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

c) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja telah diuraikan dalam bentuk tabel 3.24 LKjIP halaman III-71. Namun, tabel tersebut belum disertai penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian realisasi sebagaimana sajian data sesuai tabel tersebut.

8. Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB).

a) Perbandingan target Realisasi/capaian indikator AKB tahun 2025 disajikan capaian AKB Provinsi NTB berdasarkan Long Form SP2020 sebesar 24,64 per 1.000 kelahiran hidup. Seharusnya bisa menyuguhkan data capaian AKB sampai triwulan III 2025 karena instansi pemerintah/Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan sering melakukan penghitungan dalam laporan kinerja bulanan/triwulanan sebagai bentuk pemantauan rutin dan evaluasi berkala. Penghitungan setiap tiga bulan dilakukan untuk mengetahui tren kematian bayi secara rutin sebagai dasar pengambilan keputusan dan intervensi cepat tanpa harus menunggu akhir tahun, dengan formulasi: AKB= Jumlah Kematian Bayi (0-11 bulan) pada periode triwulan III dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode triwulan III dikali 100.

b) Analisis penyebab keberhasilan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagaimana diuraikan pada halaman III.73 LKjIP 2025 dinilai belum memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini disebabkan narasi keberhasilan tersebut masih sepenuhnya bersandar pada data proyeksi *Long Form* SP2020 (sebesar 24,64 per 1.000 kelahiran hidup) yang bersifat makro dan statis. Meskipun data SP2020 merupakan acuan resmi (baseline), Dinas Kesehatan seharusnya menyajikan data capaian *real-time* atau data operasional hasil penghitungan internal hingga Triwulan III Tahun 2025. Penyajian data sektoral yang berbasis laporan fasilitas kesehatan (*facility-based data*) ini sangat diperlukan untuk memvalidasi apakah intervensi yang dilakukan selama tahun berjalan benar-benar berkontribusi terhadap tren penurunan AKB secara faktual di lapangan

c) Telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PK 2025. Namun, analisis tersebut baru sebatas membandingkan pagu anggaran dengan realisasi anggaran (saat ini hanya melihat selisih anggaran, bukan efisiensi kinerja).

Evaluasi tersebut belum mengukur tingkat efisiensi yang komprehensif karena belum mengintegrasikan capaian output/outcome terhadap anggaran yang digunakan. Idealnya, penghitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan rasio biaya per unit target terhadap rasio biaya per unit realisasi, menggunakan formulasi: 1 – ((Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)) x 100%.

d) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja telah diuraikan dalam bentuk tabel 3.25 LKjIP halaman III-76. Namun, tabel tersebut belum disertai penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian realisasi sebagaimana sajian data sesuai tabel tersebut.

9. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Point	69-70	NA

a) Hingga triwulan III, data realisasi IPLM Provinsi NTB tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target, dikarenakan data resmi belum diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seharusnya dijelaskan waktu rilis dan oleh lembaga/instansi yang merilis sehingga informasi yang

disampaikan di LKjIP 2025 terupdate. Selain itu tidak diuraikan komponen pembentuk IPLM;

b) Telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PK 2025. Namun, analisis tersebut baru sebatas membandingkan pagu anggaran dengan realisasi anggaran (saat ini hanya melihat selisih anggaran, bukan efisiensi kinerja).
Evaluasi tersebut belum mengukur tingkat efisiensi yang komprehensif karena belum mengintegrasikan capaian output/outcome terhadap anggaran yang digunakan. Idealnya, penghitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan rasio biaya per unit target terhadap rasio biaya per unit realisasi, menggunakan formulasi: 1 – ((Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)) x 100%.

c) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja telah diuraikan dalam bentuk tabel 3.27 LKjIP halaman III-76. Namun, tabel tersebut belum disertai penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian realisasi sebagaimana sajian data sesuai tabel tersebut.

10. Indikator Kinerja Presentase Kota Kreatif.

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
1	2	3	4
Persentase Kota Kreatif	%	40	NA

a) Target capaian indikator "Persentase Kota Kreatif Tahun 2025" ditetapkan sebesar 40%, mengalami peningkatan sebesar **10%** dibandingkan realisasi tahun 2024. Namun, hingga pelaporan Triwulan III (TW III) Tahun 2025, status realisasi masih tercatat *Not Available* (N/A) sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2025. Seharusnya disajikan estimasi rilis oleh lembaga yang berwenang dan waktunya. Informasi ini diperlukan sebagai dasar verifikasi capaian akhir tahun.

b) Analisis penyebab kegagalan (NA) dan alternatif solusi yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja pada Indikator Persentase Kota Kreatif belum disajikan dalam rangka meningkatkan kinerja.

c) Telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PK 2025. Namun, analisis tersebut baru sebatas membandingkan pagu anggaran dengan realisasi anggaran (saat

ini hanya melihat selisih anggaran, bukan efisiensi kinerja).

Belum mengukur tingkat efisiensi yang komprehensif karena tidak mengintegrasikan capaian output/outcome terhadap anggaran yang digunakan. Formulasi: 1 – ((Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)) x 100%.

d) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja telah diuraikan dalam bentuk tabel 3.28 LKjIP halaman III-85. Namun, belum disertai penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian realisasi.

11. Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
1	2	4	5
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Point	57.05-57.1	NA

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan capaian triwulan III karena belum bisa dihitung atau NA.

b) Target tahun 2025 lebih yaitu 57,05-57,1 lebih rendah dari capaian tahun 2024;

c) Tidak disajikan secara rinci komponen pembentuk "Indeks Pembangunan Kebudayaan". Hanya di tampilkan dalam bentuk tabel 3.29.

d) Laporan ini belum menyajikan analisis mendalam penyebab kegagalan atau belum tersedianya data (NA), dan alternatif solusi staregis yang diperlukan untuk memastikan target kinerja tercapai tepat waktu.

e) Telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PK 2025. Namun, analisis tersebut baru sebatas membandingkan pagu anggaran dengan realisasi anggaran (saat ini hanya melihat selisih anggaran, bukan efisiensi kinerja). Belum mengukur tingkat efisiensi yang komprehensif karena tidak mengintegrasikan capaian output/outcome terhadap anggaran yang digunakan. Formulasi: 1 – ((Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)) x 100%.

f) Penyajian realisasi anggaran pada Tabel 3.30 halaman III-89 perlu

dilengkapi dengan analisis kausalitas (sebab-akibat) untuk menjelaskan mengapa target keuangan tercapai atau tidak tercapai dalam periode pelaporan.

12. Persentase penanganan konflik SARA

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
Persentase penanganan konflik SARA	%	100	100

a) Realisasi Kinerja indikator "Persentase penanganan konflik SARA" sampai triwulan III tahun 2025 telah 100%. Analisis penyebab keberhasilan telah diuraikan dengan melibatkan FKUB, Forkompimda, FPK dan Bale Mediasi. Namun belum diuraikan secara mendalam faktor manajemen dan operasional secara sistematis seperti ketepatan regulasi dan SOP, efektivitas koordinasi antara lembaga atau sinergitas, partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya manusia.

b) Penyajian realisasi anggaran pada Tabel 3.32 halaman III-94 perlu dilengkapi dengan analisis kausalitas (sebab-akibat) untuk menjelaskan mengapa target keuangan tercapai atau tidak tercapai dalam periode pelaporan.

13. Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	25,99	24,47

a. Analisis capaian indikator Penurunan Emisi GRK disajikan dengan membandingkan target tahun 2025 sebesar 25,99% terhadap realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 24,47%. Namun, narasi tersebut belum menguraikan rincian komponen sektor pembentuknya seperti sektor energi, transportasi, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah yang berkontribusi secara signifikan terhadap angka capaian tersebut. Selain itu, laporan belum menyertakan analisis mitigasi risiko serta alternatif solusi untuk mengantisipasi potensi tidak tercapainya target pada akhir tahun berjalan.

b. Penyajian realisasi anggaran pada Tabel 3.35 (halaman III-100) perlu diperkuat dengan analisis kausalitas yang menjelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja fisik. Analisis ini harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tercapai maupun tidak tercapai, guna memberikan gambaran efektivitas penggunaan anggaran dalam periode pelaporan.

14. Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	119,83	156,02

a) IRB tidak dijabarkan berdasarkan interaksi antara tiga komponen utama IRB yaitu Bahaya (*Hazard*), Kerentanan (*Vulnerability*), dan Kapasitas (*Capacity*).
b) Realisasi IRB Provinsi NTB tahun 2025 tercatat sebesar 156,02 poin, yang berarti belum mencapai target ditetapkan sebesar 119,83 poin (capaian kinerja 69,80%). Meskipun upaya strategis telah dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa analisis dan langkah-langkah penanganan yang diambil belum terfokus secara spesifik pada interaksi tiga komponen utama, yaitu: bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Selain itu, belum terjabarkan rencana mitigasi yang konkret dan terukur untuk mengantisipasi risiko ketidaktercapaian target IRB di masa mendatang.
c) Penyajian realisasi anggaran pada Tabel 3.37 (halaman III-105) perlu diperkuat dengan analisis kausalitas yang menjelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja fisik. Analisis ini harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tercapai maupun tidak tercapai, guna memberikan gambaran efektivitas penggunaan anggaran dalam periode pelaporan.

15. Indikator Bauran energi baru terbarukan

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Bauran energi baru terbarukan	%	25	25,07

menyebabkan target keuangan tercapai maupun tidak tercapai, guna memberikan gambaran efektivitas penggunaan anggaran dalam periode pelaporan.

18. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Kualitas Udara	Point	50-75	93,13*

a) IKU dihitung berdasarkan konsentrasi polutan udara seperti: Partikulat (PM10), Ozon (O3), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2).
b) Realisasi IKU Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 93,13, di atas target yang ditetapkan sebesar 50-75, sehingga capaiannya 124,17%.
c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi. Terdapat ketidakselarasan antara data capaian dengan narasi analisis penyebab keberhasilan. Pada target dan realisasi IKU 2025 melampaui target (mencapai 124,17%). Namun pada analisis keberhasilan menggunakan basis data tahun 2024. Selain itu, analisis yang disajikan masih bersifat umum dan cenderung berfokus pada hambatan. Narasi perlu dilengkapi dengan uraian konkret mengenai faktor kunci keberhasilan, langkah-langkah strategis yang telah ditempuh, serta rencana mitigasi untuk mempertahankan performa agar tidak terjadi penurunan target di periode mendatang.
d) Realisasi anggaran pada Tabel 3.46 (halaman III-120) perlu dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Analisis harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tingkat capaiannya masih rendah.

19. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Point	71,19	68,73*

a) Realisasi indikator Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 tercapai sebesar 25,07%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 25%, dengan tingkat efektivitas kinerja mencapai 100,28%.
b) Untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja tersebut belum terlihat terobosan dan inovasi yang akan dilakukan kedepan sehingga capaian kinerja EBT bisa lebih optimal ke depan.
c) Penyajian realisasi anggaran pada Tabel 3.38 (halaman III-107) perlu diperkuat dengan analisis kausalitas yang menjelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja fisik. Analisis ini harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tercapai maupun tidak tercapai, guna memberikan gambaran efektivitas penggunaan anggaran dalam periode pelaporan.

16. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	67	66,49*

a) Analisis capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) hingga Triwulan III Tahun 2025 realisasi sebesar 66,49 poin atau mencapai 99,24% dari target yang ditetapkan (67 poin). Namun demikian evaluasi kinerja ini belum menyertakan perbandingan tren dengan capaian tahun 2024. Hal ini penting dibandingkan untuk mengidentifikasi apakah terjadi penurunan atau peningkatan kualitas tutupan lahan secara tahunan (*year-on-year*).
b) Laporan kinerja ini belum menyajikan analisis komparatif antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional. Guna meningkatkan validitas data, perlu dicantumkan informasi mengenai instansi atau lembaga berwenang yang merilis standar tersebut beserta waktu publikasinya.

c) Penyajian realisasi anggaran pada Tabel 3.42 (halaman III-113) perlu diperkuat dengan analisis kausalitas yang menjelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja fisik. Analisis ini harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tercapai maupun tidak tercapai, guna memberikan gambaran efektivitas penggunaan anggaran dalam periode pelaporan.

17. Indeks Kualitas Air

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Kualitas Air	Point	48	47*

a) IKA dihitung berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi air, seperti : pH, suhu, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologis (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), bakteri E-coli.

b) Realisasi IKA di Provinsi NTB sampai Triwulan III Tahun 2025 sebesar 45, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 46,8 sehingga capaiannya 96,15%.

c) Laporan kinerja ini belum menyajikan analisis komparatif antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional. Guna meningkatkan validitas data, perlu dicantumkan informasi mengenai instansi atau lembaga berwenang yang merilis standar tersebut beserta waktu publikasinya.

d) Analisis capaian kinerja saat ini masih bersifat deskriptif dengan hanya mengurai faktor penyebab penurunan IKA. Belum menganalisis penuruanan IKA berdasarkan parameternya. Kedepannya, analisis perlu diperdalam dengan menyertakan langkah strategis yang konkret, serta rencana mitigasi yang terukur guna memastikan efektivitas pencapaian dan peningkatan target kinerja di periode mendatang.

e) Penyajian realisasi anggaran pada Tabel 3.44 (halaman III-117) perlu diperkuat dengan analisis kausalitas yang menjelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Analisis ini harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang

a) Telah disajikan realisasi kinerja tahun 2025 yang menggunakan capaian tahun 2024. Analisis akuntabilitas kinerja yang disajikan masih terbatas pada identifikasi permasalahan dan solusi teknis semata. Narasi tersebut perlu disempurnakan dengan menguraikan upaya nyata dan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh untuk mencapai target, serta strategi peningkatan kinerja yang berkelanjutan guna memastikan target tetap tercapai secara optimal dimasa depan.

b) Realisasi anggaran pada Tabel 3.49 (halaman III-127) perlu dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Analisis harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tingkat capaiannya masih rendah.

20. Indeks Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Ketahanan Pangan	Point	78,67	77,67*

a) Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak ada, sehingga data yang digunakan adalah realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 77,67. Namun pada analisis penyebab keberhasilan dinarasikan yaitu kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tidak sepenuhnya dapat diukur. Hal ini kontradiktif.

b) Meskipun upaya peningkatan ketahanan pangan telah diuraikan, narasi tersebut belum menyentuh tiga pilar utama yang mencakup 9 indikator spesifik (Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan). Selain itu, laporan ini belum menyajikan strategi mitigasi yang konkret untuk mengantisipasi potensi penurunan ketahanan pangan di wilayah NTB.

c) Realisasi anggaran pada Tabel 3.51 (halaman III-135) perlu dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Analisis harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tingkat capaiannya masih rendah.

21. Indeks Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Kesejahteraan Sosial	Kategori	Baik	Baik*

a) Analisis kebehasilan Indeks Kesejahteraan Sosial kurang komprehensif dan mendalam hanya dijelaskan secara umum. Kurang menguraikan komponen pembentuk indeks kesejahteraan sosial seperti Dimensi Kebutuhan Dasar, Dimensi Peranan Sosial, dan Dimensi Keberdayaan Ekonomi.

b) Realisasi anggaran pada Tabel 3.53 (halaman III-142) perlu dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Analisis harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tingkat capaiannya masih rendah.

22. Indeks Demokrasi

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Indeks Demokrasi	Point	(75.37 - 78.63)	77,47*

a) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja dinilai kurang mendalam karena belum membedah tiga aspek utama, yaitu Kebebasan Sipil (*civil liberty*), Hak-hak Politik (*political rights*), dan Lembaga Demokrasi (*institution of democracy*) yang terinci dalam 30 variabel/elemen. Selain itu, langkah-langkah peningkatan capaian yang diusulkan masih bersifat umum dan belum relevan dengan pendalaman ketiga aspek tersebut.

23. Tingkat inflasi

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Tingkat inflasi	%	2-4	3.01

a) Telah dijelaskan Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sebesar 3,01% (inflasi masih terkendali). Namun

dalam analisis penyebab keberhasilan belum mengurai tiga komponen utama pemicu inflasi seperti Inflasi inti, Inflasi Harga Bergejolak, dan Inflas Harga diatur Pemerintah.

b) Realisasi anggaran pada Tabel 3.59 (halaman III-158) perlu dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Analisis harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tingkat capaiannya masih rendah.

24. Persentase Universal Health Coverage (UHC)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Persentase Universal Health Coverage (UHC)	%	98	95*

a) Capaian kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 98%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional. Belum disebutkan Lembaga resmi yang merilis dan waktunya.

b) Analisis penyebab belum tercapainya target kinerja UHC belum disajikan secara komprehensif, khususnya pada aspek Komponen Kepesertaan dan Cakupan Layanan. Diperlukan pendalaman lebih lanjut mengenai hambatan yang ada guna merumuskan strategi dan alternatif solusi yang efektif untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang.

c) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.59 (halaman III-161) penting dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Analisis harus menguraikan faktor pendorong atau penghambat yang menyebabkan target keuangan tingkat capaiannya. masih rendah.

25. Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	27,2	32

a) Realisasi kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 32%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 27,2% (capaian 117,65%). Meskipun secara kuantitatif target telah terlampaui, analisis faktor penyebab pencapaian tersebut masih bersifat umum dan belum dibahas secara mendalam. Selain itu, laporan ini belum merumuskan strategi atau solusi alternatif untuk tahun mendatang guna mempertahankan serta meningkatkan tren kinerja yang positif.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.63 (halaman III-164) penting dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

26. Peningkatan Pendapatan per Kapita

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Peningkatan Pendapatan per kapita	%	34.48 - 34.57 (Juta rupiah)	8*

a) Dijelaskan Realisasi kinerja tahun 2025 sampai Triwulan III sebesar 8% (menggunakan realisasi tahun 2024). Disatu sisi target dan realisasi kinerja sampai dengan triwulan III 2025 tidak bisa dibandingkan. Selain itu, dalam sajian dijelaskan tahun 2025 dilakukan perubahan indikator dan satuannya, semula "persentase peningkatan pendapatan per kapita (%)" menjadi "besaran peningkatan pendapatan per kapita (juta rupiah)". Namun dalam tabel di atas masih menggunakan indikator Peningkatan Pendapatan per kapita.

b) Analisis capaian kinerja kurang mendalam, hanya menyajikan penyebab belum optimalnya pencapaian pendapatan, dan upaya yang sudah dilakukan. Belum menyajikan strategi/alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja.

c) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.65 (halaman III-171) penting dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

27. Tingkat Literasi Keuangan

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	66

a) Realisasi kinerja tahun 2025 sampai Triwulan III sebesar 66% dari 65% (capaian 101,54%). Belum menyajikan strategi/alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangkat mempertahankan atau meningkatkan kinerja.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.67 (halaman III-180) penting dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

28. Indikator Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
Nilai SAKIP	kategori	BB	B (69,68)

a) Indikator Nilai SAKIP dinilai belum cukup untuk merepresentasikan pencapaian sasaran strategis "meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,

akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik", yang memerlukan indikator tambahan yang lebih spesifik, relevan dan cukup.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.73 (halaman III-190) penting dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

29. Indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
1	2	4	5
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,504-1,838	NA

a) Realisasi indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah hingga Triwulan III 2025 belum dapat dihitung (N/A), sehingga angka capaian menggunakan data tahun 2024 sebesar 1,241 poin (82,51%). Namun, terdapat ketidaksinkronan data pada penjelasan perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025, dimana tertulis realisasi 1,241 poin atau mencapai 100%. Diperlukan keselarasn penyajian data agar angka capaian yang disajikan konsisten.

b) Analisis terhadap capaian indikator 'Indeks Kapasitas Fiskal Daerah' dinilai masih bersifat makro dan umum. Narasi yang disajikan belum memuat analisis mendalam upaya strategis yang akan dilakukan. Begitu juga mengenai kendala dan rumusan strategi atau alternatif solusi konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang.

c) Telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PK 2025. Namun, analisis tersebut baru sebatas membandingkan pagu anggaran dengan realisasi anggaran. Belum mengukur tingkat efisiensi yang mengintegrasikan capaian output/outcome terhadap anggaran yang digunakan. Formulasi: 1 – ((Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)) x 100%.

d) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.75 (halaman III-197) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

30. Persentase capaian pilar pembangunan sosial

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	70	69*

a) Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial tahun 2025 sebesar 69% lebih rendah dari target 70,00% atau mencapai 98,57%. Indikator ini adalah indikator SDGs dengan 17 tujuan. Dari 17 tujuan tersebut 7 tujuan masuk dalam pilar pembangunan sosial.

Tim LKjIP Provinsi NTB telah melakukan analisis terhadap 7 tujuan pembentuk indikator "Presentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial". Namun dari 7 tujuan tersebut Tim LKjIP baru melakukan analisis mendalam terhadap 4 tujuan (Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender). Sementara itu, analisis untuk tujuan 'Kehidupan Sehat dan Sejahtera' belum diuraikan secara komprehensif, dan 2 tujuan lainnya belum disajikan dalam laporan. Diperlukan kelengkapan analisis terhadap seluruh tujuan pembentuk pilar untuk memberikan gambaran kinerja yang utuh.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.78 (halaman III-215) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

31. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	65	63*

a) Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi Tahun 2025 sebesar 63% lebih rendah dari target 65% atau mencapai 96,92%.
Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terdapat 5 tujuan yang termasuk dalam Pilar Pembangunan Ekonomi, yaitu: Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Mengingat peran strategisnya dalam pencapaian indikator kinerja, diperlukan penajaman analisis terhadap kelima tujuan pembentuk indikator tersebut guna memastikan pencapaian kinerja yang lebih optimal.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.80 (halaman III-232) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

32. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	69	68*

a) Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan sebesar 68 % dari target 69% atau capaiannya 98,55%.
Dari 17 Tujuan SDGs, terdapat 6 tujuan yang dikelompokkan kedalam Pilar Pembangunan Lingkungan yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak; Kota dan Permukiman Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; Penanganan Perubahan Iklim; Ekosistem Lautan; dan Ekosistem Daratan.
Dari 6 tujuan pembentuk indikator kinerja 'Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan', sebanyak 4 tujuan telah dianalisis secara mendalam (Kota dan Permukiman Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Ekosistem Lautan; serta Ekosistem

Daratan). Terdapat 2 tujuan lainnya, yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak serta Penanganan Perubahan Iklim, yang belum diuraikan analisisnya secara lebih mendalam.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.81 (halaman III-250) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

33. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW III
Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	65	62*

a) Realisasi Presentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola tahun 2025 sebesar 62% dari target 65,00% atau mencapai 95,38%.

Dari 17 Tujuan SDGs, terdapat 1 tujuan yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Adapun capaian persentase Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Setelah dilakukan pendalaman terhadap analisis yang disajikan, belum disajikn alternatif solusi yang akan dilakukan pada untuk penguatan mencapai target.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.83 (halaman III-256) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

34. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi sampai dengan TW III
IKLI	Point	80	75,83*

a) Realisasi kinerja IKLI Provinsi tahun 2025 sampai dengan Triwulan III (75,83) mengalami deviasi -4,17 atau capaian sebesar 94,79%.

Analisis terhadap capaian indikator kinerja IKLI (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) saat ini baru sebatas menyajikan upaya yang telah dilaksanakan. Narasi tersebut belum mendalami akar permasalahan atau penyebab belum tercapainya target, serta belum merumuskan strategi mitigasi maupun solusi alternatif yang konkret untuk meningkatkan kinerja pada masing-masing sektor pendukung.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.100 (halaman III-307) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

35. Indikator Rasio Konektivitas

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
Rasio konektivitas	%	95	83,1

a) Realisasi Rasio Konektivitas sebesar 83,1 dari target 95% atau capaian 87,47%.

Telah dilakukan analisis terhadap realisasi dan capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas berupa sajian permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio konektivitas. Namun belum merumuskan strategi solusi alternatif yang konkret untuk meningkatkan kinerja.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.105 (halaman III-320) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

36. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Pemutakhiran Target	Realisasi sampai dengan TW III
IID	point	70	63,40*

a) Realisasi indeks inovasi daerah 2025 sebesar 63,40 point (menggunakan capaian 2024) atau Capaian 90,57%.

Analisis realisasi capaian kinerja masih bersifat umum

dan belum dilakukan secara mendalam. Selain itu, langkah-langkah yang telah diambil memerlukan penajaman lebih lanjut, serta perlu menyajikan upaya strategi dan solusi alternatif yang konkret guna memastikan pencapaian target dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

b) Realisasi anggaran sesuai tabel 3.108 (halaman III-327) belum dijelaskan korelasi antara penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator RPJMD 2025-2029 Provinsi NTB

1. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,6-8,63	8,87

a) Realisasi RLS penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi NTB mencapai 8,87 tahun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan (8,6–8,63 tahun) dengan tingkat capaian sebesar 103,14%. Meskipun target telah tercapai, analisis kinerja yang dilakukan masih kurang mendalam. Selain itu, laporan belum menyajikan strategi alternatif atau solusi konkret untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut di tahun mendatang.

b) Analisis realisasi anggaran dengan capaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.111 belum diuraikan secara mendalam. Perlu dilengkapi penjelasan penyebab terjadinya capaian yang melampaui target (tinggi) maupun realisasi yang masih di bawah target (rendah).

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Harapan Lama Sekolah	tahun	14,1-14,13	13,99

a) Realisasi HLS NTB Tahun 2025 sebesar 13,99 tahun (99,22%) masih berada sedikit di bawah target minimal 14,1 tahun. Evaluasi kinerja saat ini belum menyajikan analisis hambatan yang menghalangi pencapaian target penuh.

Laporan juga perlu dilengkapi dengan formulasi strategi baru dan solusi konkret sebagai upaya akselerasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga keberlanjutan kinerja HLS di masa depan.

b) Belum diuraikan penjelasan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.111. Penjelasan ini penting untuk mengidentifikasi faktor penyebab capaian yang melampaui target maupun hambatan yang menyebabkan realisasi kinerja masih rendah.

3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
1	2	4	5
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,02	11,59

a) Realisasi penduduk berpendidikan tinggi (usia 15 tahun ke atas) di NTB tahun 2025 mencapai 11,59%, secara signifikan melampaui target 10,02% dengan capaian 115,67%. Belum dijelaskan upaya yang komprehensif dan strategi nyata dalam mencapai target (misalnya melalui perluasan akses dan keterjangkauan, skema pembiayaan inovatif, peningkatan mutu dll). Selain itu belum disajikan alternatif solusi untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja.

b) Belum menyajikan keterkaitan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sesuai tabel 3.117. Selain itu belum disajikan alasan realisasi anggaran masih rendah dan tinggi.

4. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:			
a. Literasi Membaca	%	10	NA
b. Numerasi	%	0-10	NA

a) Realisasi Literasi Membaca NA dari target 10%. Begitu juga indikator Numerasi NA dari target 0-10%. Namun, analisis perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja tahun 2025 tersebut belum dilengkapi dengan informasi mengenai lembaga penanggung jawab serta waktu perilisan data capaian
b) Belum terdapat analisis mendalam mengenai penyebab capaian kinerja berstatus NA (*Not Available*). Selain itu, narasi juga belum menyertakan alternatif solusi sebagai langkah tindak lanjut.
c) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja pada Tabel 3.118 belum disertai dengan analisis mendalam, baik untuk realisasi yang mencapai target tinggi maupun yang realisasinya masih rendah.

5. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:			
a. Literasi Membaca	%	26,24-28,74	NA
b. Numerasi	%	22,68-25,18	NA

a) Realisasi Literasi Membaca NA dari target 26,24-28,74%. Begitu juga indikator Numerasi NA dari target 22,68-25,18%. Namun, analisis perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja tahun 2025 tersebut belum dilengkapi dengan informasi mengenai lembaga penanggung jawab serta waktu perilisan data capaian
b) Belum terdapat analisis mendalam mengenai penyebab capaian kinerja berstatus NA (Not Available). Selain itu, narasi juga belum menyertakan alternatif solusi sebagai langkah tindak lanjut.
c) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja pada Tabel 3.119 belum disertai dengan analisis mendalam, baik untuk realisasi yang mencapai target tinggi maupun yang realisasinya masih rendah.

6. Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,95	73,97

a) Terdapat perbedaan sajian target untuk indikator UHH pada tabel 3.120 terurai 72,95 sedangkan pada analisis perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 tercantum 72,92 tahun.

b) Realisasi UHH NTB 73,97 tahun atau mencapai 101,4 persen dari target 72,92 tahun.

c) Analisis penyebab keberhasilan belum didukung dengan data capaian yang mendalam. Sebagai contoh, upaya penurunan angka kematian bayi melalui peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan durasi pemberian ASI eksklusif hanya disampaikan secara naratif tanpa menyertakan data dukung yang valid. Penyajian data statistik sangat diperlukan untuk menjaga keselarasan antara faktor pembentuk dengan capaian kinerja yang dilaporkan.

d) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja pada Tabel 3.123 belum disertai dengan analisis mendalam, baik untuk realisasi yang mencapai target tinggi maupun yang realisasinya masih rendah

7. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,7	29,8*

a) Belum mencantumkan lembaga penanggung jawab serta estimasi waktu perilisan data atas realisasi kinerja, sehingga informasi yang disampaikan belum dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

b) Belum menguraikan bentuk intervensi kolaboratif maupun sinergi lintas sektor dengan mitra terkait, seperti Tim Penggerak PKK, DP3AP2KB, DPMPD, dan Dinas Dukcapil. Padahal, rincian kontribusi setiap instansi

sangat diperlukan untuk memetakan efektivitas kerja sama dalam pencapaian target kinerja.

c) Belum menyajikan strategi/alternatif solusi yang akan dilakukan meningkatkan kinerja kedepan.

d) Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LKjIP telah didasarkan pada PK 2025 dengan memakai realisasi sementara (2024) menggunakan formulasi : 1 – [(Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)] x 100%.

e) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja pada Tabel 3.125 belum disertai dengan analisis mendalam, baik untuk realisasi yang mencapai target tinggi maupun yang realisasinya masih rendah.

8. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	382.813	474.838

a) Sudah dilakukan analisis terhadap pencapaian peningkatan kinerja "Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara". Namun belum menyajikan strategi/alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangkat mempertahankan atau meningkatkan kinerja.

b) Realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja pada Tabel 3.165 belum disertai dengan analisis mendalam, baik untuk realisasi yang mencapai target tinggi maupun yang realisasinya masih rendah.

9. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,03	1,81

a) Pada analisis dijelaskan bahwa terjadi peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Provinsi NTB tahun 2025 yang didorong oleh faktor sebagaimana dijelaskan pada halaman III-463. Penjelasan ini kontradiksi dengan realisasi 1,81 dari target 2,03 (tidak mencapai target).

b) Belum menyajikan strategi/alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

c) Analisis efisiensi anggaran tetap harus dilakukan menggunakan formulasi 1 – [(Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)] x 100%, meskipun target *outcome* tidak tercapai. Analisis ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana ketidaktercapaian target memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.

d) Analisis program dan kegiatan pada halaman III-465 telah disajikan penjelasan bahwa pelaksanaan program belum efektif dalam mencapai target. Namun, uraian tersebut belum disertai dengan analisis mendalam mengenai akar penyebab ketidakefektifan dalam mendukung pencapaian target.

e) Belum dijelaskan korelasi realisasi anggaran dengan realisasi kinerja/-pencapaian target. Hal ini penting untuk mengetahui sampai sejauhmana anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian target.

10. Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif.

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif.	%	3,76	4,33

a) Dalam analisis faktor keberhasilan kinerja yang telah melampaui target, penguraian permasalahan dirasa kurang relevan. Fokus narasi sebaiknya diarahkan pada identifikasi strategi kunci atau faktor pendukung yang memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tersebut.

b) Uraian realisasi anggaran pada Tabel 3.168 perlu dilengkapi dengan analisis korelasi antara penyerapan anggaran dan realisasi kinerja. Hal ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi anggaran berkontribusi secara nyata dan optimal terhadap pencapaian target program/kegiatan.

11. Indikator Kinerja "Indeks Budaya Literasi"; " Indeks Ekspresi Budaya"; " Indeks Warisan budaya"; dan " Indeks Ekonomi Budaya".

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Indeks Budaya Literasi	Indeks	64,42	NA
Indeks Ekspresi Budaya	Indeks	44,48	NA
Indeks Warisan budaya	Indeks	50,17	NA
Indeks Ekonomi Budaya	Indeks	44,26	NA

mendatang guna memastikan peningkatan kinerja dan pemenuhan target yang ditetapkan.

b) Penyajian data pada Tabel 3.174 perlu diperkuat dengan analisis korelasi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja, untuk menilai kualitas belanja dan mengukur kontribusi nyata alokasi anggaran terhadap efektivitas pencapaian target program/kegiatan

13. Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	9,3 (47 medali)	23,40 (58 medali)

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2025 tercapai sebesar 23,40% (58 medali). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 9,3% (47 medali) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 123,40%. Meskipun mencatatkan hasil positif, analisis laporan tersebut perlu dilengkapi dengan:

a. Formulasi strategi alternatif atau solusi inovatif untuk tahun mendatang guna mempertahankan serta meningkatkan tren performa tersebut;
b. Analisis korelasi antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja pada level program dan kegiatan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya.

14. Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Persentase pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100

a) Analisis capaian kinerja yang telah mencapai target 100% masih menguraikan permasalahan baik langsung maupun tidak langsung. Tidak dijelaskan secara spesifik bentuk permalahan langsung dan tidak langsung.

a) Realisasi ke 4 (empat) indikator di atas masih berstatus N/A (Not Available). Laporan belum menguraikan lembaga sumber data serta waktu rilis resmi dari masing-masing indikator. Informasi ini sangat krusial untuk memberikan kepastian dan akurasi dalam pengukuran capaian kinerja.
b) Terdapat inkonsistensi penulisan indikator antara data tabel dengan uraian penjelasan. Pada Tabel 3.170 tertulis 'Indeks Budaya Literasi', sedangkan dalam narasi penjelasan dituliskan 'Indeks Literasi Budaya'. Diperlukan standardisasi penulisan agar informasi yang disajikan seragam dan akurat.
c) Penjelasan terhadap ke 4 (empat) indikator tersebut masih bersifat umum dan belum menyertakan analisis capaian kinerja pada setiap pernyataan sasaran strategis. Sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, analisis seharusnya dilakukan secara mendalam, mencakup:
    1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
    2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
    3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
    4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; dan
    5) Dll.
d) Penghitungan efisiensi anggaran belum disajikan dengan menggunakan 1 – [(Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) / (Pagu Anggaran / Target Outcome)] x 100%.

12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	70,18	69,97

a) Realisasi indikator TPAK Pemuda Tahun 2025 sebesar 69,97% dari target 70,18%, atau capaian 99,70%. Meskipun analisis permasalahan dan upaya penanganan telah disajikan, namun belum menguraikan strategi alternatif atau solusi inovatif yang akan diimplementasikan pada tahun

b) Laporan belum dilengkapi strategi alternatif atau solusi inovatif untuk periode mendatang. Hal ini strategis sebagai langkah mitigasi dan upaya mempertahankan, serta meningkatkan tren performa kinerja secara berkelanjutan.

15. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
IKD	Indeks	0,59	0,55

a) Realisasi IKD tercatat sebesar **0,55** dari target **0,50** (capaian **93,22%**). Meskipun secara angka menunjukkan performa yang cukup baik, analisis capaian tersebut belum mendalam karena belum menguraikan:
   1) Korelasi dan kontribusi tujuh prioritas (sebagaimana tercantum pada halaman III-492) dalam mendukung capaian kinerja IKD secara nyata;
   2) Penjelasan mengenai kendala perhitungan IKD di Kota Mataram yang berdampak langsung pada akumulasi nilai IKD Provinsi NTB; serta
   3) Perumusan strategi alternatif atau solusi inovatif untuk periode mendatang guna memitigasi kendala data dan meningkatkan progres capaian."

b) Analisis korelasi antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja pada level program dan kegiatan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya.

16. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
IKLH	Indeks	76,19	77,40

Terdapat kesalahan penulisan pada poin perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya. Dimana dinyatakan Capaian nilai IKLH tahun 2025 sebesar 77,40 atau lebih besar dari **target** 75,78 tahun 2024 (lebih 1,62 poin) atau sebesar 102,14%. Dimana nilai 75,78 adalah realisasi tahun 2024 bukan target tahun 2025 (tabel 3.182)

17. Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,331	0,327*

Terdapat ketidaksesuaian narasi analisis dengan tabel capaian atas indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan yaitu sebagai berikut: Berdasarkan tabel yang disajikan, data realisasi merupakan data atas nilai realisasi pada Triwulan IV, sementara pada seluruh poin analisis capaian menyatakan Data realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan Triwulan III Tahun 2025 tidak ada, sehingga data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data tahun 2024 yang sebesar 0,327.

18. Indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0,1	0,1

a) Untuk indikator Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik dengan target sebesar 0,1 dan realisasi sebesar 0,1 (tingkat capaian 100%), pada poin Analisis penyebab keberhasilan diketahui bahwa uraian analisis yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang jelas antara pencapaian kinerja dengan faktor penyebab keberhasilan.
b) Analisis yang disusun masih bersifat deskriptif umum, dengan memuat kondisi luas lahan kritis, faktor penyebab kerusakan hutan, serta daftar kegiatan yang dilaksanakan, namun belum secara spesifik menjelaskan kontribusi langsung kegiatan tersebut terhadap pencapaian indikator kinerja yang dimaksud.
c) Selain itu, uraian belum menegaskan faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan capaian kinerja sebesar 100%, seharusnya analisis difokuskan

pada identifikasi faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya target, bukan pada pemaparan umum kondisi permasalahan sektor kehutanan.

19. Indikator Intensitas Energi Primer

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	192,23	NA

a) Atas indikator Intensitas Energi Primer, ketidaktersediaan data menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap target tahunan, tren data kinerja, maupun target jangka menengah, sehingga indikator ini belum dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja. Meski demikian, uraian mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, seperti pengembangan energi baru terbarukan, pembangunan instalasi biogas, serta penerapan *co-firing biomassa* pada pembangkit listrik, telah memberikan gambaran yang mendukung serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target bauran energi primer.
b) Namun, berdasarkan hasil konfirmasi dengan perangkat daerah pengampu, untuk indikator intensitas energi primer, telah tersedia data realisasi untuk tahun 2025, maka pada penyajian laporan kinerja perlu disesuaikan kembali data realisasinya sehingga dapat memberikan keterkaitan antara keseluruhan analisis capaian dengan hasil realisasi yang diperoleh.

20. **Indikator Konsumsi Listrik per kapita**

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Konsumsi Listrik per kapita	kWh	751,00	747,74

Untuk indikator Konsumsi Listrik per kapita terdapat perbedaan hasil realisasi antara yang tersaji pada laporan kinerja dan sumber data konfirmasi dengan perangkat daerah Dinas ESDM Provinsi NTB. Hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan analisis yang disajikan seperti analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan, karena berdasarkan konfirmasi perangkat daerah realisasi atas indikator ini telah tercapai, sementara berdasarkan realisasi yang disajikan pada laporan kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

21. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Untuk indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), terdapat kesalahan penulisan pada perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, dimana disajikan sebagai berikut *"Realisasi nilai IKLI NTB tahun 2025 sebesar 70,12 atau lebih kecil dari target 75,83 tahun 2024 (kurang 5,71 poin) atau sebesar 92,47%. Dengan capaian pada tahun 2025 ini, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur NTB semakin menurun realisasinya (tidak memenuhi target)"*, dimana nilai 75,83 adalah realisasi tahun 2024 bukan target tahun 2024. Penggunaan narasi "lebih kecil dari target tahun sebelumnya" kurang tepat karena yang dibandingkan seharusnya realisasi vs realisasi, bukan vs target tahun lalu. Seharusnya narasinya "lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 75,83".

22. Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.

Atas Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, terdapat inkonsistensi pengggunaan narasi realisasi dan capaian seperti pada poin perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 menyatakan pada tahun 2025 **realisasi kinerja indikator sebesar 71,49%** atau mencapai 99,73% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,68-71,7% sehingga kurang dari 0,19 poin (tidak mencapai target). Sedangkan pada poin perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya menyatakan **capaian** nilai persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan NTB tahun 2025 **sebesar 71,49%** atau lebih besar dari target 67,74% tahun 2024 (lebih 3,75 poin) atau sebesar 105,54 persen. Seharusnya realisasi adalah nilai hasil kegiatan. Sedangkan capaian adalah tingkat keberhasilan dari suatu target kegiatan

23. Indikator Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

a) Atas sasaran ini dengan indikator Persentase Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, terdapat inkonsistensi dalam penyajian perbandingan kinerja serta kesalahan penyajian narasi realisasi menjadi capaian.
b) Pada bagian perbandingan target dan realisasi tahun 2025 telah disajikan realisasi kinerja indikator sebesar 83,13% atau mencapai 99,70% dari target yang telah ditetapkan (83,38%) dan terdapat deviasi -0,25 poin (tidak mencapai

target), namun pada bagian perbandingan dengan tahun sebelumnya dinyatakan **capaian** nilai persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2025 sebesar 83,13% atau sama dengan realisasi tahun 2024 (capaian 100%). Sementara, angka 83,13 merupakan realisasi tahun 2025 bukan tingkat capaian tahun 2025. Dengan demikian, narasi belum memberikan penjelasan yang utuh dan konsisten.

c) Selain itu, atas alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja belum disajikan secara spesifik. Meskipun telah diuraikan beberapa permasalahan, namun belum terdapat rumusan alternatif solusi yang konkret untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi.

24. Indikator Reformasi Birokrasi General

a) Atas indikator Reformasi Birokrasi General pada poin Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Alternatif Solusi belum menyajikan faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, dimana telah dinyatakan bahwa realisasi 2025 terhadap target 2025 telah menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu target terlampaui (di atas 100%), namun selanjutnya yang disajikan malah lebih berfokus pada sub komponen yang indikatornya menurun serta penyebab indikator yang belum mencapai target sebagaimana tertuang dalam catatan dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB. Sehingga terdapat kontradiksi, dimana realisasi telah mencapai target namun analisis tidak berfokus kepada penyebab keberhasilan tetapi lebih kepada masalah dan penyebab turunnya nilai pada indikator sub komponen.

25. Indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Untuk indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, pada poin Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD terdapat penyajian yang kurang sesuai, dimana telah terdapat pernyataan, "Jika dibandingkan antara tahun 2025 dengan 2023 (1,375, kategori rendah), maka terdapat deviasi -0,777. Capaian realisasi sebesar 43,49%." Pada poin ini cukup membandingkan realisasi dan capaian tahun 2025 dengan target akhir RPJMD, tidak perlu membandingkan dengan data tahun 2023.

26. Indikator persentase pelaksanaan aksi HAM Daerah

Atas indikator persentase pelaksanaan aksi HAM Daerah, pada poin analisis

penyebab kegagalan atau keberhasilan, uraian yang disajikan belum proporsional dengan capaian kinerja. Meskipun capaian belum mencapai target, terdapat penekanan yang cukup besar pada narasi keberhasilan (komitmen, lompatan signifikan), tanpa diimbangi dengan analisis kritis terhadap kekurangan. Dalam konteks realisasi atas target tidak tercapai, seharusnya lebih fokus pada penyajian faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja.

27. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).
    a) Untuk dua indikator (IDI dan IPKKU) masih menggunakan data tahun 2024, sehingga menunjukkan kelemahan dalam pengukuran kinerja yang belum mutakhir. Selain itu, uraian pada bagian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan masih bersifat deskriptif berupa daftar kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, tanpa menjelaskan kontribusi langsung kegiatan tersebut terhadap peningkatan nilai IDI, dimana sebelumnya dijelaskan IDI terdiri dari 3 aspek dengan 22 indikator, ketiga aspek tersebut adalah aspek kebebasan terdiri dari 7 indikator, aspek kesetaraan terdiri dari 7 indikator dan aspek kapasitas lembaga demokrasi terdiri dari 8 indikator.
    b) Sementara hasil konfirmasi pada perangkat daerah pengampu, untuk indikator IPKKU telah memiliki realisasi tahun 2025, sehingga diperlukan penyesuaian penyajian analisis berdasarkan dengan data yang terbaru. Pada uraian faktor penyebab belum optimalnya capaian kinerja masih bersifat umum, seperti tingginya pelanggaran, keterbatasan SDM, dan sarana prasarana, namun belum menunjukkan keterkaitan langsung dengan nilai capaian IPKKU. Dengan demikian, analisis belum mampu menjelaskan secara spesifik faktor dominan yang mempengaruhi kinerja.
    c) Selain itu, meskipun telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, namun tidak disertai dengan rumusan alternatif solusi atau langkah konkret yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan maupun pencapaian indikator kinerja.

28. **Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti**

    Atas indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, pada poin Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi telah menyebutkan faktor pendukung keberhasilan, namun penyajiannya lebih fokus pada permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut, dimana kondisi realisasi telah

mencapai target yang ditetapkan, sementara tidak dijabarkan lebih mendetail dan mendalam atas faktor-faktor yang menjadi penyebab dan kontribusi dalam pencapaian target kinerja.

29. Indeks Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,83	74,70

a) Atas sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan Yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) secara umum telah memenuhi struktur dasar pedoman penyusunan LKjIP, karena telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi, tren antar tahun, capaian terhadap target jangka menengah, analisis penyebab, serta informasi efisiensi anggaran dan program pendukung.

b) Selain itu, pada analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya disebutkan bahwa "Pada tahun 2023, IKP sebesar 76,51 dan mengalami kenaikan 1,93 poin menjadi 78,44. Pada tahun 2025, IKP mengalami penurunan menjadi 74,70, sehingga capaiannya sebesar 95,23% dibandingkan realisasi tahun 2024." Jika maksud narasi adalah untuk menjelaskan capaian dan realisasi tahun 2024, maka narasi dapat lebih disederhanakan agar tidak menimbulkan kerancuan. Narasi yang tepat untuk analysis ini adalah perbandingan antara capaian 2024 dengan capaian 2025 atau antara realisasi 2024 dengan realisasi 2025.

c) Pada analisis sumber daya, nomor tabel penghitugan anggaran belum dituliskan dan masih berupa titik yang haris dilengkapi. Selain itu, IKP tahun 2025 yang capaiannya dibawah target, tidak dapat dikatakan telah terjadi efisiensi anggaran 2,74%. Penggunaan tabel penghitungan efisiensi anggaran adalah untuk memperlihatkan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, untuk kemudian dilakukan analisis.

30. **Indikator Indeks Desa**

Indikator	Satuan	2025	
		Target	Realisasi TW IV
Indeks Desa	%	77.88	78.81

Atas sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Pedesaan dengan Indikator Indeks Desa, secara umum telah memenuhi struktur dasar pedoman penyusunan LKjIP. Telah disajikan perbandingan antara target dan realisasi, tren antar tahun, capaian terhadap target jangka menengah, analisis penyebab, serta informasi efisiensi anggaran dan program pendukung.

31. Indikator Indikator Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi.
    a) Atas sasaran strategis Menurunnya Disparitas Harga Antar Wilayah Dalam Provinsi dengan Indikator Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi, secara umum telah memenuhi struktur dasar pedoman penyusunan LkjIP. Telah disajikan perbandingan antara target dan realisasi, tren antar tahun, capaian terhadap target jangka menengah, analisis penyebab, serta informasi efisiensi anggaran dan program pendukung. Capaian indikator kinerja ini sebesar 7.30 jauh dibawah target yang ditetapkan, yang sebesar 16.21. Masalah keterbatasan data tahun untuk capaian tahun 2024 menyebabkan capaian tahun 2025 tidak bisa dibandingkan. Demiian pula dengan tidak adanya standar nasional untuk membandingkan capaian indikator.
    b) Analisis penyebab kegagalan sudah disajikan dengan memberikan alternatif solusi yang dilakukan.
    c) Analisis efisiensi anggaran tidak menyajikan penghitungan efisiensi anggaran menggunakan tabel efisiensi karena realisasi anggaran jauh dibawah target yang ditetapkan.

32. Indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim
    a) Atas sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim dengan Indikator Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim, secara umum telah memenuhi struktur dasar pedoman

penyusunan LkjIP. Telah disajikan perbandingan antara target dan realisasi, tren antar tahun, capaian terhadap target jangka menengah, analisis penyebab, serta informasi efisiensi anggaran dan program pendukung.

b) Untuk analisis efisiensi anggaran, meskipun telah menyajikan tabel penghitungan efisiensi anggaran, namun narasi analisis substansinya adalah analisis efisiensi terhadap pagu anggaran (persentase sisa anggaran), sehingga belum dapat mencerminkan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja.

33. Indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

a) Atas sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) dengan Indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, secara umum telah memenuhi struktur dasar pedoman penyusunan LkjIP. Telah disajikan perbandingan antara target dan realisasi, tren antar tahun, capaian terhadap target jangka menengah, analisis penyebab, serta informasi efisiensi anggaran dan program pendukung.

b) Analisis efisiensi anggaran telah menyajikan tabel perhitungan efisiensi anggaran, namun substansi narasi analisis adalah efisiensi penggunaan anggaran terhadap pagu anggaran.

c) Narasi ini tentunya belum dapat menjelaskan secara penuh nilai efisiensi anggaran terhadap kinerja, karena hanya merujuk pada sisa pagu anggaran.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil reviu terhadap LKjIP 2025 Pemerintah Provinsi NTB, direkomendasikan kepada Tim Penyusun LKjIP untuk segera :

1. Memastikan seluruh salinan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 telah ditandatangani oleh Gubernur NTB sebagai basis legalitas utama penyusunan LKjIP 2025.
2. Melakukan harmonisasi target kinerja secara vertikal dan horizontal antara LKjIP 2025, PK 2025, RPD 2024-2026, dan RPJMD 2025-2029 untuk menjaga konsistensi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi/capaian kinerja.
3. Mencantumkan target tahunan secara eksplisit pada pohon kinerja (*cascading*) RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 guna memastikan hubungan kausalias/hubungan sebab akibat pencapaian kinerja organisasi supaya terlihat jelas.
4. Melakukan sinkronisasi data target antara LKjIP 2025 dengan target internal Perangkat Daerah, agar selaras dengan mandat RPD 2024-2026, dan RPJMD 2025-2029 Povinsi NTB.
5. Memperbaiki Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja agar memenuhi kriteria **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) serta memenuhi prinsip kecukupan (*adequate*) dalam menggambarkan keberhasilan organisasi.
6. Memastikan penyajian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis mencerminkan hasil pengukuran riil di lapangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan.
7. Menyajikan informasi yang informatif mengenai sumber data (lembaga penyedia) dan estimasi waktu rilis bagi indikator yang masih berstatus *Not Available* (NA), guna memberikan kepastian jadwal pelaporan capaian kinerja.
8. Melakukan perbaikan analisis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 terutama pada Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, kendala yang dihadapi serta alternative solusi yang telah dilakukan;
9. Mengintegrasikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap capaian *outcome*, dengan menggunakan formulasi:

1 – ((Realisasi Anggaran / Realisasi Outcome) /
(Pagu Anggaran / Target Outcome)) x 100%.

Demikian Laporan hasil reviu ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Budi Herman, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 197107311996031001